



RKPD

**RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
TAHUN 2026**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Laporan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2026 ini dapat disusun, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk Jangka 1 Tahun.

Laporan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah.

Disadari sepenuhnya bahwa dalam pelaksanaan pembangunan dalam Tahun Anggaran 2024 belum dapat memenuhi harapan semua pihak. Hasil kerja yang dicapai adalah prestasi kita bersama, yang wajib disyukuri sebagai anugerah yang diberikan Allah SWT. Semua kendala dan tantangan yang dihadapi merupakan tanggung jawab kita semua untuk menyelesaikannya.

Mengakhiri kata pengantar ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur dan semua pihak yang telah membantu penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026 ini. Semoga dapat bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Halmahera Timur di masa yang akan datang dan dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Halmahera Timur. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merahmati dan meridhoi kita semua.

Kota Maba, 2025
BUPATI HALMAHERA TIMUR

DRS. H. UBAID YAKUB., MPA



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3 Hubungan antar Dokumen	I-6
1.4 Maksud dan Tujuan	I-6
1.5 Sistematika Penulisan	I-7
BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-46
2.3 Aspek Pelayanan Umum	II-70
2.4 Aspek Daya Saing	II-109
2.5 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Sampai Tahun 2024.....	II-117
2.6 Permasalahan Pembangunan Daerah	II-246
BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-22
BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024.....	IV-10
BAB 5 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
BAB 6 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	VI-1
6.1 Indikator Kinerja	VI-1
6.2 Penetapan Indikator Kinerja.....	VI-2
BAB 7 PENUTUP.....	VII-1



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Alur Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	I-6
Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Halmahera Timur.....	II-4
Gambar 2.2. Posisi Geostrategis Kabupaten Halmahera Timur.....	II-5
Gambar 2.3. Peta Topografi Kabupaten Halmahera Timur.....	II-8
Gambar 2.4. Peta Kelerengan Kabupaten Halmahera Timur.....	II-9
Gambar 2.5. Peta Geologi Kabupaten Halmahera Timur.....	II-12
Gambar 2.6. Peta Jenis Tanah Kabupaten Halmahera Timur.....	II-14
Gambar 2.7. Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Halmahera Timur.....	II-16
Gambar 2.8. Peta Penutupan Lahan Kabupaten Halmahera Timur.....	II-21
Gambar 2.9. Peta Kawasan Strategis Kabupaten Halmahera Timur.....	II-23
Gambar 2.10. Piramida Penduduk Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024.....	II-45
Gambar 2.11. Tren Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024.....	II-49
Gambar 2.12. Indeks Rasio Gini Kabupaten Halmahera Timur dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	II-53
Gambar 2.13 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024.....	II-55
Gambar 2.14 Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024.....	II-55
Gambar 2.15 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Halmahera Timur dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	II-56
Gambar 2.16 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Halmahera Timur dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	II-57
Gambar 2.17 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Halmahera Timur dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	II-58
Gambar 2.18 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Halmahera Timur dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024	II-60
Gambar 2.19 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Halmahera Timur dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	II-60
Gambar 2.20 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Halmahera Timur dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	II-64
Gambar 2.21 Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Halmahera Timur dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	II-65
Gambar 2.22 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Halmahera Timur dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	II-66



Gambar 2.23 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Halmahera Timur dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	II-67
Gambar 2.24 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan Kabupaten Halmahera Timur dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	II-67
Gambar 2.25 Indeks Pembangunan & Pemberdayaan Gender Kabupaten Halmahera Timur & Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	II-69
Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Global Tahun 2024.....	III-2
Gambar 3.2 PMI Manufaktur Negara Utama dan Negara Asia Februari 2023-2025	III-3
Gambar 3.3 Perkembangan Harga Minyak Mentah dan Gas Alam/Batubara 2025.....	III-4
Gambar 3.4 Inflasi Negara Utama Tahun 2020-2025.....	III-5
Gambar 3.5 Suku Bunga Negara Utama Tahun 2022-2025	III-6
Gambar 3.6 Pertumbuhan Ekonomi Negara Asean 2022-2024.....	III-7
Gambar 3.7 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2021-2024.....	III-8
Gambar 3.8 Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran Tahun 2021-2024	III-9
Gambar 3.9 Tingkat Inflasi Indonesia Tahun 2023-2025	III-12
Gambar 3.9 Peta Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2025 ..	III-13
Gambar 4.1 Visi Misi RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2025-2029.....	IV-3
Gambar 4.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2025-20292	IV-8
Gambar 4.3 Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2025-2029 Dengan RPJMN 2025-20292 dan RPMD Provinsi Maluku Utara 2025-2029	IV-3
Gambar 4.4 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026.....	IV-3



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur.....	II-3
Tabel 2.2. Jumlah Desa Menurut Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur	II-3
Tabel 2.3. Desa Pesisir dan Bukan Pesisir Menurut Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur.....	II-5
Tabel 2.4. Pulau-Pulau Kecil Menurut Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur....	II-6
Tabel 2.5. Luas Wilayah Berdasarkan Kelas Ketinggian Menurut Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur.....	II-7
Tabel 2.6. Luas Wilayah Berdasarkan Kelas Kemiringan Lahan Menurut Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur.....	II-9
Tabel 2.7. Luas Wilayah Berdasarkan Jenis Batuan Kabupaten Halmahera Timur	II-11
Tabel 2.8. Luas Wilayah Berdasarkan Jenis Tanah Kabupaten Halmahera Timur	II-13
Tabel 2.9. Daerah Aliran Sungai Di Kabupaten Halmahera Timur.....	II-15
Tabel 2.10. Daerah Aliran Sungai Prioritas Di Kabupaten Halmahera Timur.....	II-15
Tabel 2.11. Mata Air Potensial Di Kabupaten Halmahera Timur.....	II-17
Tabel 2.12. Nama-nama Sungai Di Kabupaten Halmahera Timur	II-17
Tabel 2.13. Suhu dan Kelembaban Udara Kabupaten Di Halmahera Timur Tahun 2024	II-19
Tabel 2.14. Tekanan Udara, Kecepatan Angin, Penyinaran Matahari, Curah Hujan dan Hari Hujan Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024.....	II-19
Tabel 2.15. Penutupan Lahan Di Kabupaten Halmahera Timur.....	II-20
Tabel 2.16. Potensi Bahaya Bencana Di Kabupaten Halmahera Timur	II-29
Tabel 2.17. Luas Wilayah Bahaya Banjir dan Potensi Penduduk Terpapar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur	II-30
Tabel 2.18. Luas Wilayah Bahaya Banjir Bandang dan Potensi Penduduk Terpapar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur.....	II-32
Tabel 2.19. Luas Wilayah Bahaya Cuaca Ekstrem dan Potensi Penduduk Terpapar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur.....	II-32
Tabel 2.20. Luas Wilayah Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi dan Potensi Penduduk Terpapar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur	II-33
Tabel 2.21. Luas Wilayah Bahaya Gempa Bumi dan Potensi Penduduk Terpapar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur.....	II-34
Tabel 2.22. Luas Wilayah Bahaya Kekeringan dan Potensi Penduduk Terpapar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur	II-35
Tabel 2.23. Luas Wilayah Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan dan Potensi Penduduk Terpapar Menurut Kecamatan	



Di Kabupaten Halmahera Timur	II-35
Tabel 2.24. Luas Wilayah Bahaya Tanah Longsor dan Potensi Penduduk Terpapar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur.....	II-36
Tabel 2.25. Luas Wilayah Bahaya Tsunami dan Potensi Penduduk Terpapar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur	II-38
Tabel 2.26. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024	II-38
Tabel 2.27. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024	II-40
Tabel 2.28. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024.....	II-42
Tabel 2.29. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Berdasarkan Registrasi Kependudukan Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024	II-43
Tabel 2.30. Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024	II-45
Tabel 2.31. Proporsi Penduduk Usia >15 Tahun Menurut Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024	II-47
Tabel 2.32. PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024.....	II-48
Tabel 2.33. PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024	II-48
Tabel 2.34. Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024.....	II-48
Tabel 2.35. Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024	II-50
Tabel 2.36. PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024.....	II-51
Tabel 2.37. PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024.....	II-51
Tabel 2.38. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024	II-51
Tabel 2.39. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024	II-52
Tabel 2.40. Pendapatan per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	II-52
Tabel 2.41. Perkembangan Angkatan Kerja Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024.....	II-59
Tabel 2.42. Perkembangan Indeks Desa Membangun Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2023-2024.....	II-62



Tabel 2.43. Indeks Desa Membangun Berdasarkan Dimensi Menurut Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2023	II-63
Tabel 2.44. Jumlah SD/ sederajat dan SMP/ sederajat Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024	II-71
Tabel 2.45. Sebaran SD/ sederajat dan SMP/ sederajat Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024	II-71
Tabel 2.46. Perkembangan APS, APK dan APM Pendidikan Dasar Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024	II-73
Tabel 2.47. Angka Putus Sekolah dan Angka Kelulusan Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024.....	II-73
Tabel 2.48. Kondisi Ruang Kelas SD dan SMP Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024.....	II-74
Tabel 2.49. Persentase Guru SD dan SMP Berkualifikasi Pendidikan D4/S1 dan Bersertifikasi Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2024....	II-75
Tabel 2.50. Perkembangan Akreditasi Sekolah SD dan SMP Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2024.....	II-76
Tabel 2.51. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024	II-76
Tabel 2.52. Jumlah PAUD dan RA Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024.....	II-77
Tabel 2.53. Sebaran PKBM Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2023-2024.....	II-78
Tabel 2.54. Kinerja Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024.....	II-81
Tabel 2.55. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024.....	II-82
Tabel 2.56. Ketersediaan Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024.....	II-83
Tabel 2.57. Kasus Penyakit Menular dan Tidak Menular Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2025	II-84
Tabel 2.58. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024.....	II-86
Tabel 2.59. Kinerja Penyelenggaraan Perumahan Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024.....	II-87
Tabel 2.60. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024-2024.....	II-88
Tabel 2.61. Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024.....	II-89
Tabel 2.62. Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024.....	II-90



Tabel 2.63. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024	II-91
Tabel 2.64. Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024	II-92
Tabel 2.65. Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024	II-92
Tabel 2.66. Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024	II-93
Tabel 2.67. Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024	II-94
Tabel 2.68. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024	II-95
Tabel 2.69. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024	II-96
Tabel 2.70. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024	II-96
Tabel 2.71. Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024	II-97
Tabel 2.72. Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024	II-98
Tabel 2.73. Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024	II-98
Tabel 2.74. Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024	II-99
Tabel 2.75. Kinerja Urusan Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024	II-101
Tabel 2.76. Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024	II-102
Tabel 2.77. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024	II-103
Tabel 2.78. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024	II-103
Tabel 2.79. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kehutanan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024	II-104
Tabel 2.80. Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024	II-104
Tabel 2.81. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024	II-105
Tabel 2.82. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Timur	II-105
Tabel 2.83. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pendukung Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024	II-106
Tabel 2.84. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pendukung Sekretariat DPRD	



Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024	II-106
Tabel 2.85. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pendukung Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024	II-106
Tabel 2.86. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Penunjang Keuangan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024	II-106
Tabel 2.87. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024	II-107
Tabel 2.88. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pengawasan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024	II-107
Tabel 2.89. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Kewilayahan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024.....	II-108
Tabel 2.90. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan Umum Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024.....	II-108
Tabel 2.91. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024	II-109
Tabel 2.92. Nilai Tukar Petani Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	II-111
Tabel 2.93. Fasilitas Akomodasi Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2024	II-111
Tabel 2.94. Layanan SPAM Perkotaan, SPAM IKK dan SPAM Pedesaan Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024	II-113
Tabel 2.95. Penduduk Menggunakan Telepon Seluler dan Mengakses Internet Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024	II-114
Tabel 2.96. Angka Kriminalitas Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024.....	II-115
Tabel 2.97. Jumlah Aksi Unjuk Rasa Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024.....	II-116
Tabel 2.98. Rasio Lulusan S1/S2/S3 Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024.....	II-116
Tabel 2.99. Rasio Ketergantungan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024.....	II-117
Tabel 2.100. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan Tahun 2024.....	II-118
Tabel 3.1. Pertumbuhan dan Andil PDRB sisi Pengeluaran Tahun 2024	III-16
Tabel 3.2. Pertumbuhan dan Andil PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023-2024.....	III-17
Tabel 3.3. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Menurut Jenis Pendapatan Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2024.....	III-25
Tabel 3.4. Realisasi Pendapatan Daerah Menurut Jenis Pendapatan Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2022 dan 2023.....	III-26
Tabel 3.5. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2026	III-28



Tabel 3.6. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2026	III-33
Tabel 3.7. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2026	III-35
Tabel 4.1. Sasaran Pembangunan Nasional 2026	III-20
Tabel 5.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah yang Disertai Kebutuhan Pendanaan RKPD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2026	V-3
Tabel 6.1. Indikator Kinerja Makro RKPD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2026	VI-2
Tabel 6.2. Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan RKPD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025.....	VI-2

BAB 1

PENDAHULUAN

2026

RKPD

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan, RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. RKPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) serta sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan ketentuan pasal 263 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan, yang disusun dengan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026, serta berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP)/program strategis nasional dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kabupaten/Kota.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2026 merupakan Perencanaan lima tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Halmahera Timur tahun 2025-2045 dan merupakan

perencanaan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Timur tahun 2025-2029.

RKPD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2026 disusun dengan tahapan persiapan, penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD dengan menggunakan pendekatan teknokratik, politis, partisipatif, bottom-up dan top-down. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dankerangka berfikir ilmiah dalam menelaah permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah, perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan daerah. Pendekatan politis dilaksanakan dengan memperhatikan pokok pokok pikiran yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Timur. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan antara lain melalui mekanisme Musrenbang. Proses *bottom-up* dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, provinsi dan Nasional. Sedangkan pendekatan top down menekankan bahwa tema, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah mengacu pada tema, arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Maluku Utara.

Substansi penyusunan RKPD Kabupaten Halmahera Timur tahun 2026 menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

RKPD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKPD Provinsi Maluku Utara ditetapkan. Selanjutnya dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2026. RKPD yang telah ditetapkan tersebut digunakan juga sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur tentang APBD Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2026 telah disusun berlandaskan pada RKPD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2026. Berdasarkan hal tersebut, maka rencana kerja dan pendanaan yang akan

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur serta berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif, diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten, dalam mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Halmahera Timur tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1264);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);



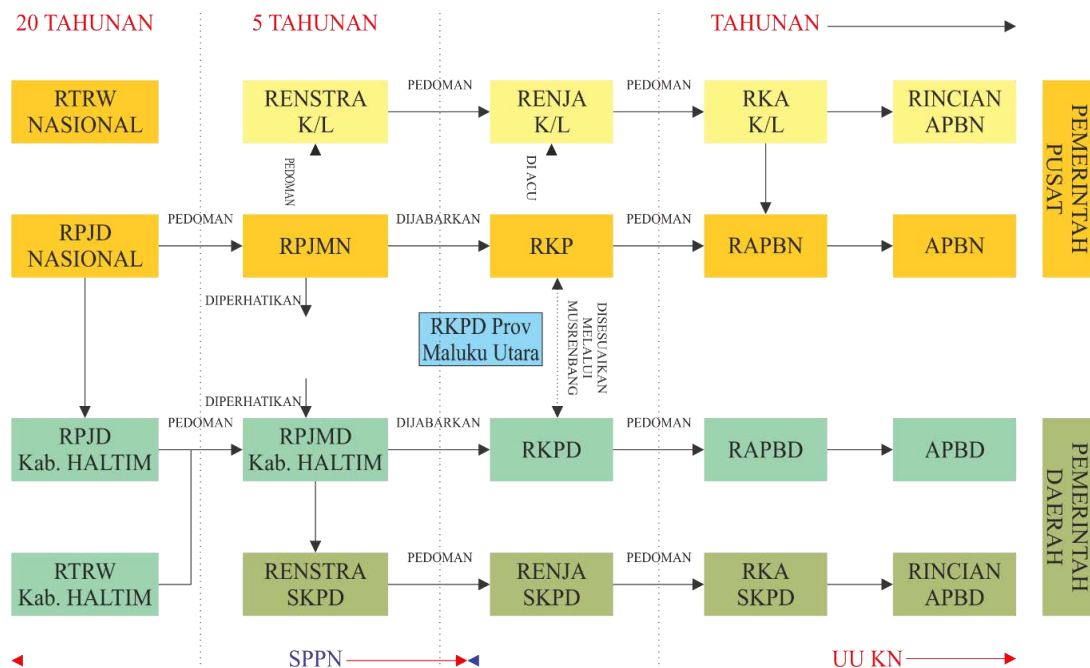
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312, 2017);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1114, 2019);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1477, 2019);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 288, 2020);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia



- Nomor 1781, 2020);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1419, 2021);
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013–2033 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Nomor 2);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 Nomor 1);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010-2029;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016- 2021;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025-2045;
 27. Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025-2029
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

1.1. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dokumen RKPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2026 memiliki keterkaitan vertikal dan horizontal dengan dokumen perencanaan lainnya. Dalam konteks ini RKPD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2026 merupakan landasan yang digunakan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2026, sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat daerah, serta untuk menjalankan agenda pembangunan tahunan dan dalam rangka mencapai sasaran-sasaran dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten Halmahera Timur, dengan memperhatikan arah kebijakan kewilayahan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Timur. RKPD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RKP dan RKPD Provinsi Maluku Utara. Mengingat adanya keselarasan sistem perencanaan dan sistem penganggaran, maka RKPD harus dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Gambaran atau ilustrasi hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada bagan di halaman berikut.



Gambar 1.1. Bagan Alur Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan RKPD Kabupaten Halmahera Timur tahun 2026 dimaksudkan untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten Halmahera Timur tahun 2025-2029 yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun untuk pelaksanaan tahun 2026, yang diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Prioritas Nasional tahun 2026 serta RKPD Provinsi Maluku Utara dan Prioritas Daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Halmahera Timur tahun 2026, yaitu:

- 1) Menyediakan pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
- 2) Menyediakan pedoman penyalarsan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi dengan Kabupaten Halmahera Timur;
- 3) Menyediakan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum (KUA) APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Halmahera Timur;
- 4) Menyediakan landasan evaluasi untuk menetapkan program dan kegiatan daerah serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya.

1.3. SISTIMATIKA PENULISAN

RKPD Kabupaten Halmahera Timur tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika dokumen.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing; Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu yang menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu dengan memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan; serta gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Halmahera Timur, yang berkaitan dengan prioritas daerah serta penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatandaerah, belanja daerah dan

pembiayaan daerah.

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional.

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini menyajikan penetapan indikator kinerja untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bab VII Penutup

Bab ini menguraikan tentang pedoman umum pelaksanaan RKPD.

BAB 2

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2026

RKPD

BAB 2

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Halmahera Timur terletak di bagian Timur wilayah Provinsi Maluku Utara dengan letak geografis antara $0^{\circ}40'-1^{\circ}4'$ LU (Lintang Utara) dan $126^{\circ}45'-129^{\circ}30'$ BT (Bujur Timur).

Kabupaten Halmahera Timur dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan. Sebagaimana pertimbangan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003, pembentukan Kabupaten Halmahera Timur dimaksudkan untuk memacu kemajuan Provinsi Maluku Utara pada umumnya, dan Kabupaten Halmahera Tengah pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan memperhatikan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya.

Pembentukan Kabupaten Halmahera Timur secara umum dimaksudkan untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Halmahera Tengah yang mempunyai luas wilayah $\pm 36.446,36$ km², sehingga dipandang perlu untuk membentuk Kabupaten Halmahera Timur yang terdiri atas 4 (empat) Kecamatan, yaitu Kecamatan Wasile, Kecamatan Maba, Kecamatan Maba Selatan, dan Kecamatan Wasile Selatan dengan luas wilayah keseluruhan $\pm 14.202,02$ km²; dan Kota Tidore Kepulauan yang terdiri atas 5 (lima) Kecamatan, yaitu Kecamatan Tidore, Kecamatan Oba Utara, Kecamatan Oba, Kecamatan Tidore Selatan, dan Kecamatan Tidore Utara dengan luas wilayah keseluruhan $\pm 13.862,86$ km². Dengan luas wilayah seperti tersebut di atas dan kurang berimbang laju pertumbuhan dan persebaran penduduk di berbagai kecamatan, menyebabkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan

memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan nasional dalam rangka percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia, dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Aspirasi masyarakat dimaksud tertuang dalam: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 188.4/04/ DPRD/HT/2001 tanggal 19 Maret 2001 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah, dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 167.02/21/DPRD/MU/2002 tanggal 21 Mei 2002 tentang Persetujuan Pemekaran Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah. Seiring dengan kebutuhan percepatan pengembangan wilayah, Kabupaten Halmahera Timur yang beribukota di Maba sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003, pada saat ini secara administratif telah berkembang dan terdiri dari 10 kecamatan, yaitu Kota Maba, Maba, Maba Selatan, Maba Tengah, Maba Utara, Wasile, Wasile Selatan, Wasile Timur, Wasile Tengah, Wasile Utara.

Luas wilayah Kabupaten Halmahera Timur secara keseluruhan adalah 14.202,02 km², dengan luas lautan mencapai 7.695,82 Km² (54,15%) dan daratan seluas 6.506,19 km². (45,85%). Kabupaten Halmahera Timur tercatat sebagai kabupaten dengan luas daratan terluas kedua di Provinsi Maluku Utara, atau 20,53% dari total luas daratan Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024-2043, terdapat perubahan luas wilayah darat dari penetapan sebelumnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2018 tentang Penetapan Batas Daerah Antara Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 103 tentang Penetapan Batas Daerah Antara Kabupaten Halmahera Timur dengan Kota Tidore Kepulauan. Selain kedua Permendagri di atas, perubahan luas wilayah darat terjadi sesuai dengan hasil Tim Tapal Batas Daerah Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2018.

Kabupaten Halmahera Timur secara administratif memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara :Teluk Kao

Sebelah Timur:Laut Halmahera dan Samudera Pasifik

Sebelah Selatan :Kabupaten Halmahera Tengah

Sebelah Barat :Kabupaten Halmahera Barat dan Kota Tidore Kepulauan. Kabupaten Halmahera Timur beribukota di Maba. Secara administratif Kabupaten Halmahera Timur saat terdiri dari 10 Kecamatan dan 102 desa. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Maba Utara, Wasile Selatan, dan Kota Maba, sedangkan kecamatan dengan luasan wilayah terkecil adalah Wasile. Luas wilayah Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan Kecamatan sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.1, serta Jumlah desa dan nama desa menurut Kecamatan sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.2.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Proporsi (%)
1	Kota Maba	952,91	14,62
2	Maba	434,89	6,67
3	Maba Selatan	503,77	7,73
4	Maba Tengah	651,92	10,01
5	Maba Utara	1.118,73	17,17
6	Wasile	253,39	3,89
7	Wasile Selatan	1.078,41	16,55
8	Wasile Timur	431,05	6,62
9	Wasile Tengah	490,16	7,52
10	Wasile Utara	600,51	9,22
Luas Wilayah Darat		6.506,19	45,85
Luas Wilayah Laut		7.695,82	54,15
Total		14.202,02	100,0

Sumber: BP4D Kab. Halmahera Timur 2025

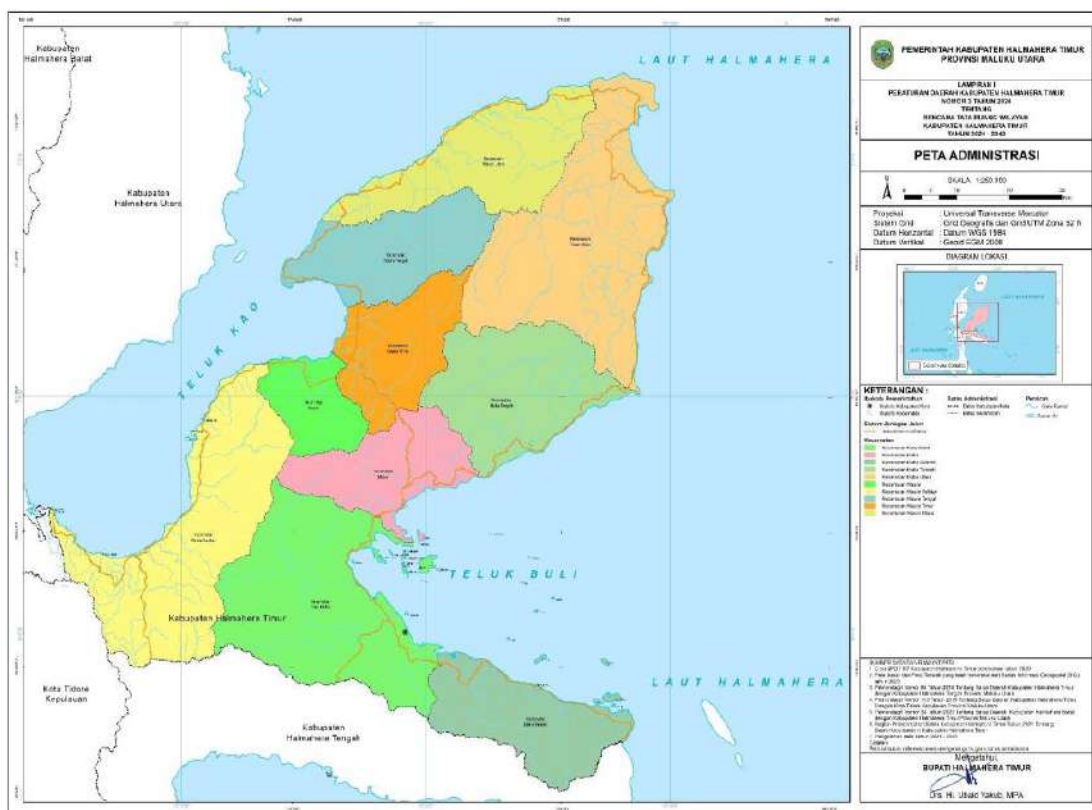
Tabel 2. 2 Jumlah Desa Menurut Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Nama Desa
1	Kota Maba	6	Maba Sangaji (ibu kota kecamatan), Soa Gimalaha, Wailukum, Soa Sangaji, SoaLaipoh, Tewil
2	Maba	10	Buli (ibu kota kecamatan), Buli Asal, Buli Karya, Wayafly, Sailal, Geltoli, Pekaulang, Teluk Buli
3	Maba Selatan	9	Bicoli (ibu kota kecamatan), Waci, Peteley, Lolelamo, Gotowasi, Kasuba, Momole, Sil, Sowoli
4	Maba Tengah	12	Wayamli (ibu kota kecamatan), Beringin Lamo, Miaf, Bangul, Marasipno, Dorolamo, Maratana, Bebsili, Yawanli, Gaifoli, Babasaram
5	Maba Utara	10	Dorosagu (ibu kota kecamatan), Sosolat, Patlean, Lolasita, Wasileo, Pumlanga, Jara-jara, Doromoi, Lili
6	Wasile	7	Subaim (ibu kota kecamatan), Cemara Jaya, Bumi Restu, Batu Raja, Makar Sari, Gulapapo, Waisuba,
7	Wasile Selatan	24	Nusa Jaya (ibu kota kecamatan), Nanas, Bukutio, Fayaul, Wasile, Saramaake, Tanure, Loleba, Yawal, Saolat, Jiko Moi, Waijoi, Minamin, Ekor, Ekorino, Ino Jaya, Binagara, Ake Jawi, Tabanalou, Tomares, Pintatu, Talaga Jaya, Sondo-Sondo, Nusa Ambu
8	Wasile Timur	8	Dodaga (ibu kota kecamatan), Dakaino, Ake Daga, Toboino, Tutuling Jaya, Woka Jaya, Rawamangun, Sidomulyo
9	Wasile tengah	8	Lolobata (ibukota kecamatan), Hate Tabako, Puao, Foly, Nyaolako, Bokimaake, Silalayang, kakaraino

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Nama Desa
10	Wasile Utara	8	Labi-Labi (ibu kota kecamatan) Iga, Tatam, Majiko Tongone, Marimoi, Bololo, Helitator, Dowongi Jaya
Total		102	

Sumber: BP4D Kab. Halmahera Timur 2025

Adapun peta administrasi Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana tersajidalam gambar berikut.

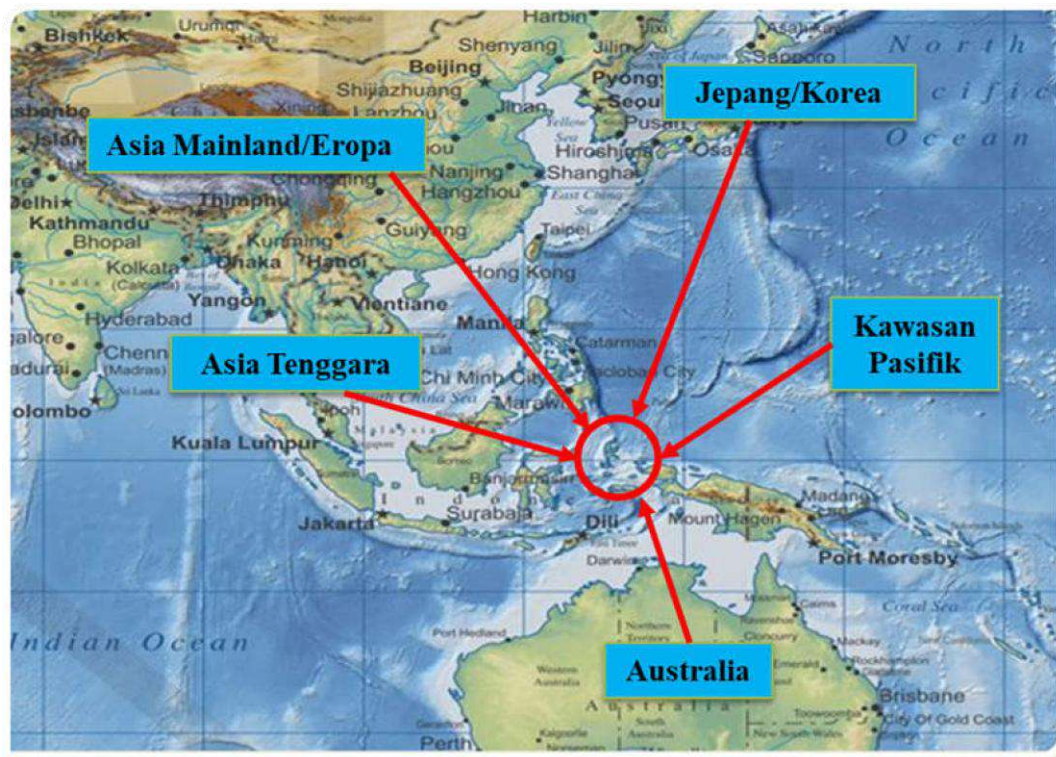


Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Halmahera Timur
(Sumber: BP4D Kab. Halmahera Timur 2025)

2.1.2. Posisi Geostrategis dan Kondisi Kawasan

Kabupaten Halmahera Timur terletak pada posisi perbatasan negara Indonesiadengan perairan internasional, yakni terhadap Laut Pasifik (Negara Palau) dan padaperairan yang relatif tidak jauh dengan perairan negara Filipina. Pada posisi demikian yang merupakan perbatasan laut dengan Negara lain maka sistem pertahanan dan keamanan di wilayah Kabupaten Halmahera Timur harus mendapat perhatian tersendiri karena menjadi gerbang perbatasan internasional. Dalam konteks ini berbagai risiko penyusupan atau infiltrasi, aktifitas *illegal fishing*, bajak laut dan sebagainya merupakan ancamany yang nyata bagi wilayah KabupatenHalmahera Timur, mengingat posisinya yang berhadapan langsung dengan laut bebas Internasional.

Adapun di bagian sisi Timur wilayah Kabupaten Halmahera Timur, dilalui ALKI III (Alur Laut Kepulauan Indonesia III), yang merupakan jalur lintasan utama pelayaran Internasional dari Pasifik melewati Indonesia. Sebagaimana ilustrasi pada gambar di halaman berikut, berada pada ALKI III, maka wilayah Halmahera Timur khususnya di kawasan perairannya menjadi suatu kawasan lintasan Internasional yang memerlukan perhatian ditinjau dari segi pertahanan dan keamanan nasional.



Gambar 2. 2 Posisi Geostrategis Kabupaten Halmahera Timur

(Sumber: BP4D Kab. Halmahera Timur, 2025)

Dari total desa sebanyak 102, sebanyak 78 desa atau 76,5 persen diantaranya desa merupakan desa pesisir, dan 23,5 persen sisanya merupakan desa-desa yang terletak di daerah pedalaman/pegunungan/ terpencil yang tersebar di hampir semua Kecamatan. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 3 Desa Pesisir dan Bukan Pesisir Menurut Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur

No	Kecamatan	Pesisir			Bukan Pesisir	
1	Kota Maba	6	6	100	-	-
2	Maba	10	9	90,0	1	10,0
3	Maba Selatan	9	9	100	-	-
4	Maba Tengah	12	7	58,3	5	41,7
5	Maba Utara	10	10	100	-	-
6	Wasile	7	2	28,6	5	71,4
7	Wasile Selatan	24	15	62,5	9	37,5
8	Wasile Timur	8	6	75,0	2	25,0

No	Kecamatan	Pesisir			Bukan Pesisir	
9	Wasile Tengah	8	6	75,0	2	25,0
10	Wasile Utara	8	8	100	-	-
Jumlah		102	78	76,5	24	23,5

Sumber: RPJMD Kab. Halmahera Timur 2021-2025

Sebagian besar wilayah Kabupaten Halmahera Timur menempati salah satu bagian dari pulau terbesar di Maluku Utara yaitu Pulau Halmahera. Kabupaten Halmahera Timur berkarakter kepulauan dengan garis pantai sepanjang 499,46 Km, juga memiliki 41 pulau besar dan kecil. Tabel berikut menyajikan jumlah pulau, nama pulau dan luas pulau menurut kecamatan.

**Tabel 2. 4 Pulau-Pulau Kecil Menurut Kecamatan
Kabupaten Halmahera Timur**

No	Kecamatan	Nama Pulau	Titik Koordinat
1	Kota Maba	Pulau Baiboko	00°46'52.38" U 128°20'58.8
		Pulau Bangul Besar	00°47'31.43" U 128°17'37.3
		Pulau Bangul Kecil	00°47'30.63" U 128°17'38.0
		Pulau Belingsili Besar	00°47'58.99" U 128°17'44.0
		Pulau Belingsili Kecil	00°48'39.24" U 128°17'47.7
		Pulau Gifow	00°47'20.86" U 128°19'11.5
		Pulau Mabuli	00°48'04.00" U 128°15'04.0
		Pulau Misluwi Besar	00°48'20.00" U 128°16'28.9
		Pulau Misluwi Kecil	00°48'37.00" U 128°16'17.0
		Pulau Mlowos	00°46'40.00" U 128°17'53.9
		Pulau Mobon	00°42'23.00" U 128°18'06.9
		Pulau Mow	00°47'33.00" U 128°12'34.9
		Pulau Pakal	00°47'15.00" U 128°20'08.9
		Pulau Parapara	00°50'18.72" U 128°26'31.2
		Pulau Sloton	00°47'58.60" U 128°30'34.9
		Pulau To	00°45'41.00" U 128°19'39.0
2	Wasile Selatan	Pulau Akasalaka	01°01'30.00" U 127°57'07.9
		Pulau Bokinibob	00°48'21.26" U 127°46'50.7
		Pulau Burung	01°00'26.22" U 127°56'06.0
		Pulau Kuso	00°52'29.30" U 127°42'02.3
		Pulau Lambie	00°52'49.00" U 127°41'43.0
		Pulau Lambu	00°52'46.38" U 127°41'40.3
		Pulau Roni	00°59'33.00" U 127°55'45.0
		Pulau Tamotamo	00°52'52.01" U 127°41'27.3
		Pulau Tanjopende	00°52'28.99" U 127°42'09.0
		Pulau Timlonga	01°00'19.15" U 127°55'54.7
3	Maba Selatan	Pulau Bonnyos	00°35'30.99" U 128°31'22.0
		Pulau Cef	00°33'49.00" U 128°37'32.0
		Pulau England	00°34'07.00" U 128°39'11.0
		Pulau Lewi	00°43'54.99" U 128°33'02.9
		Pulau Mia	00°39'56.99" U 128°28'30.0
		Pulau Oto	00°37'41.99" U 128°38'25.0
		Pulau Plum	00°42'38.99" U 128°31'18.0
		Pulau Sai	00°45'28.34" U 128°29'48.0
		Pulau Seal	00°33'23.00" U 128°39'15.0
		Pulau Wor	00°37'59.00" U 128°31'50.0
4	Maba	Pulau Batuso	00°49'20.39" U 128°19'10.7

No	Kecamatan	Nama Pulau	Titik Koordinat
		Pulau Gee	00°49'59.00" U 128°19'32.0
		Pulau So	00°49'22.18" U 128°19'11.0

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian Dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Dan Pulau.

2.1.3. Topografi Wilayah

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Halmahera Timur cukup beragam, mulai wilayah yang relatif datar, landai, bergelombang, curam hingga sangat curam dalam rentang ketinggian antara 0 s/d >1.000 meter di atas permukaan air laut (dpl). Dari total luas wilayah Kabupaten Halmahera Timur, lebih dari 75 persen berada di wilayah yang relatif datar pada ketinggian antara 0 s/d 100 meter dpl, dan hanya 0,6 persen yang berada di ketinggian >1.000 meter dpl.

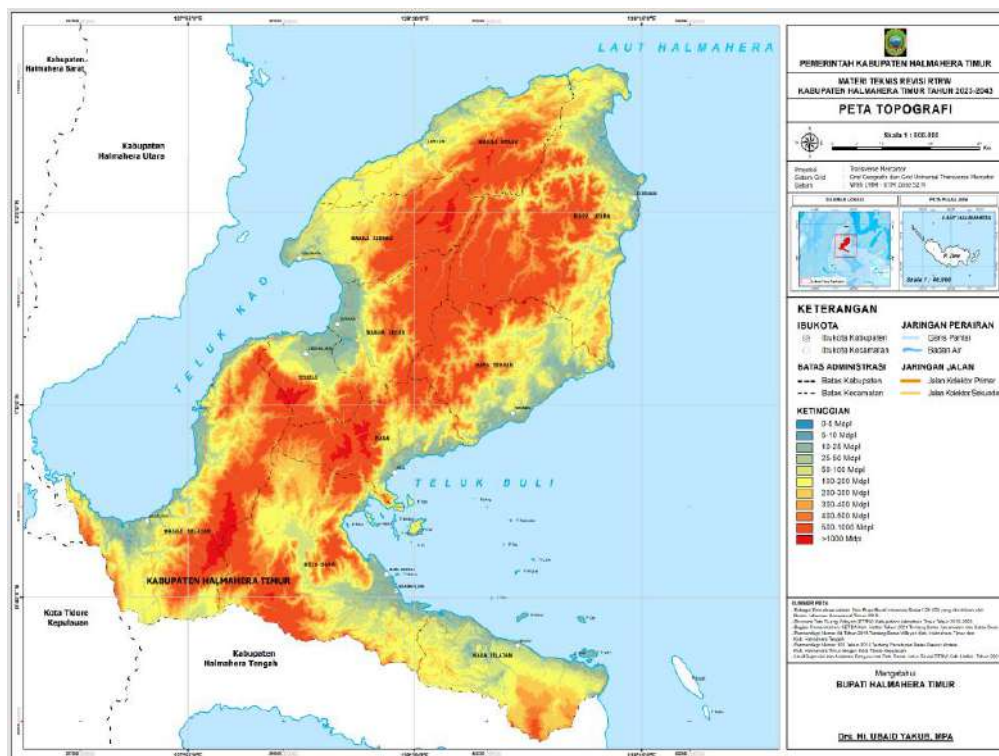
Secara rinci, untuk rentang ketinggian antara 0-300 meter dpl tersebar di seluruh kecamatan; untuk rentang ketinggian antara 0-1.000 meter dpl berada pada sembilan Kecamatan, dimana Kecamatan Maba Selatan wilayahnya hanya berada pada ketinggian 0-300 meter dpl. Dibandingkan terhadap total wilayah masing-masing kecamatan, Maba Selatan merupakan kecamatan wilayah dengan proporsi luasan wilayah terbesar pada ketinggian 0-100 meter dpl, yaitu 99,11 persen. Sedangkan jika dibandingkan terhadap total luas wilayah Kabupaten Halmahera Timur, Wasile Selatan adalah kecamatan dengan proporsi luasan wilayah terbesar pada ketinggian 0-100 meter dpl, yaitu 16,55 persen dari 75,46 persen wilayah Kabupaten Halmahera Timur yang terletak pada kelas ketinggian 0-100 meter dpl. Tabel berikut menyajikan luas wilayah berdasarkan kelas ketinggian menurut kecamatan.

Tabel 2. 5 Luas Wilayah Berdasarkan Kelas Ketinggian Menurut Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha) Menurut Kelas Ketinggian (mdpl)						
		0-100	100-200	200-300	300-400	400-500	500 -1.000	> 1.000
1	Kota Maba	78,986.9	5,943.7	4,354.9	2,952.5	1,555.2	334.2	-
2	Maba	26,387.1	4,307.0	3,802.7	3,116.7	2,735.7	2,022.6	937.5
3	Maba Selatan	48,988.3	392.5	46.3	-	-	-	-
4	Maba Tengah	51,701.2	5,864.0	43,336.3	1,983.7	969.1	327.9	0.7
5	Maba Utara	77,365.4	13,381.5	10,882.1	6,442.0	3,279.7	499.9	0.2
6	Wasile	17,290.2	2,277.6	2,298.3	1,448.0	952.9	575.7	490.0
7	Wasile Selatan	81,083.9	7,955.2	5,431.1	4,180.5	3,159.2	3,560.3	2,358.7
8	Wasile Timur	28,566.3	4,922.6	5,133.0	3,400.2	919.9	159.6	-
9	Wasile Tengah	31,175.1	4,865.5	4,901.8	3,505.1	2,544.5	1,910.6	107.4
10	Wasile Utara	48,290.0	3,767.9	3,343.8	2,500.5	1,612.1	518.6	-
Total		414,459.0	53,677.5	83,530.3	29,529.2	17,728.3	9,909.4	3,894.5
Persentase								

Sumber: BP4D Kab. Halmahera Timur 2025

Peta topografi wilayah Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.



Gambar 2. 3 Peta Topografi Kabupaten Halmahera Timur

(Sumber: BP4D Kab. Halmahera Timur 2025)

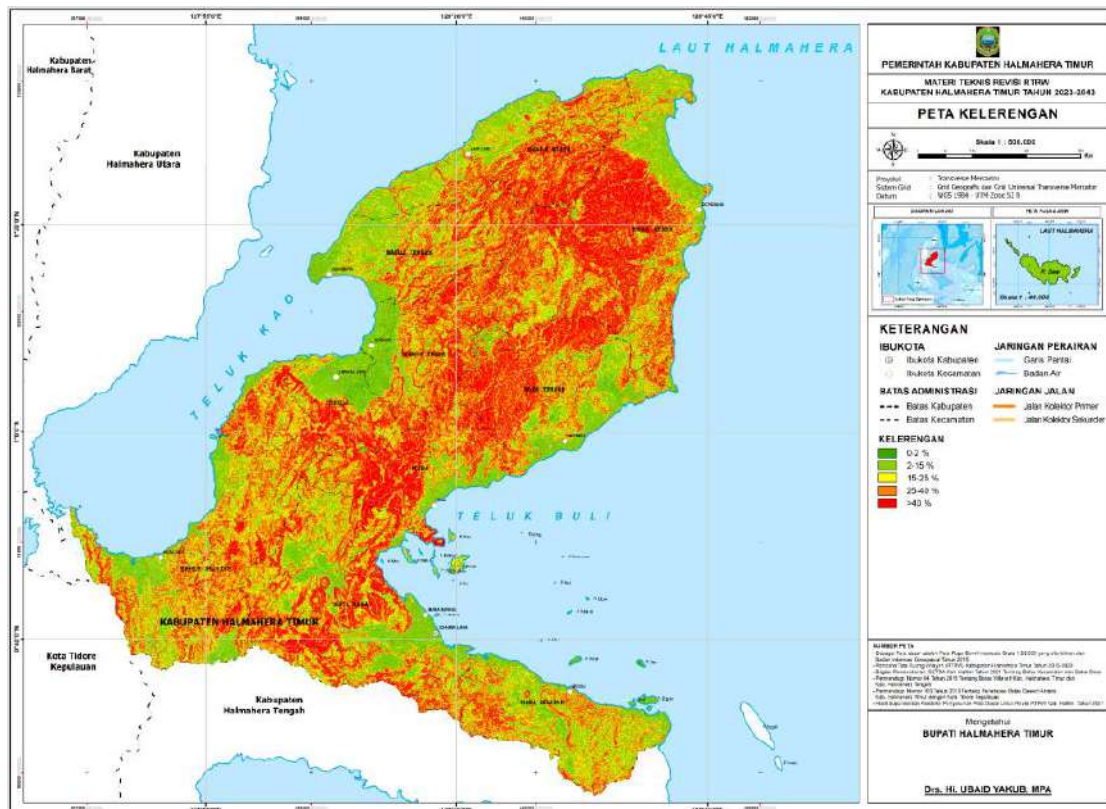
Ditinjau dari kemiringan lerengnya, wilayah Kabupaten Halmahera Timur didominasi oleh kemiringan curam dan sangat curam yakni 25-40% dengan luasan mencapai 159.059,95 Hektar (24,57%) dan > 40% seluas 154.025,51 Hektar (23,79%) yang cenderung lebih cocok diperuntukkan sebagai kawasan lindung seperti hutan. Selanjutnya untuk kemiringan bergelombang yakni 15-25% dengan luasan mencapai 130.159,54 Hektar (20,11%) yang kecenderungannya cocok untuk peruntukan perkebunan, permukiman terbatas, dan kawasan hutan produksi. Sementara sisanya merupakan wilayah dengan kelerengn dibawah 15% yang lebih cocok untuk pengembangan area terbangun, seperti permukiman, budidaya persawahan atau perkebunan. Tingginya persentase luas tanah yang termasuk dalam klasifikasi curam di Kabupaten Halmahera Timur menyebabkan persentase wilayah yang dapat digunakan sebagai lahan produktif terutama untuk pertanian menjadi relatif sedikit dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Halmahera Timur itu sendiri. Wilayah kecamatan dengan kondisi kemiringan datar dan landai yaitu antara 0-15% terluas terdapat pada Kecamatan Wasile Selatan dengan luasan mencapai 32.316,70 Hektar (15,83%), Kemudian Kecamatan Kota Maba dengan luasan mencapai 30.159,45 Hektar (14,78%). Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel di halaman berikut.

Tabel 2. 6 Luas Wilayah Berdasarkan Kelas Kemiringan Lahan Menurut Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha) Menurut Kelas Kemiringan Lahan				
		0-8%	8-15%	15-25%	25-40%	>40%
1	Kota Maba	17.351,09	12.808,36	19.192,40	22.761,63	21.744,10
2	Maba	5.222,76	4.305,05	6.966,46	11.216,56	15.521,56
3	Maba Selatan	10.527,21	10.740,46	12.715,46	10.664,31	4.489,25
4	Maba Tengah	12.091,97	7.919,21	11.053,81	15.994,96	18.024,61
5	Maba Utara	13.547,71	13.947,48	19.545,27	26.885,23	37.682,53
6	Wasile	8.103,07	2.771,17	3.685,96	4.933,53	5.792,26
7	Wasile Selatan	15.389,41	16.927,29	26.982,21	30.417,60	17.573,65
8	Wasile Timur	9.129,75	4.255,27	7.328,29	11.182,48	11.179,18
9	Wasile Tengah	9.863,47	8.659,09	10.385,64	11.217,23	8.801,10
10	Wasile Utara	9.456,93	11.097,30	12.304,04	13.786,41	13.217,26
	Total	110.683,37	93.430,69	130.159,54	159.059,95	154.025,51
	Persentase	17,10	14,43	20,11	24,57	23,79

Sumber: BP4D Kab. Halmahera Timur 2025

Peta kelerengan lahan Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.



Gambar 2. 4 Peta Kelerengan Kabupaten Halmahera Timur
(Sumber: BP4D Kab. Halmahera Timur 2025)

2.1.4. Kondisi Geologi dan Jenis Tanah

Wilayah Kabupaten Halmahera Timur berada pada Mendala Fisiografi Halmahera Timur, yang bagian terbesarnya berupa pegunungan berlereng curam dengan torehan sungai yang dalam dan sebagian bermorfologi karst. Morfologi pegunungan berlereng curam cerminan batuan ultra basa, batuan sedimen dan batuan gunung api Oligo-Miosen dan yang lebih tua. Morfologi karst terdapat pada daerah batuan gamping, baik yang berumur Paleosen-Eosen, Oligo-Miosen maupun Miosen-Paleosen. Batuan sedimen Miosen-Pliosen membentuk morfologi dengan perbukitan yang relatif lebih rendah dan lerengnya lebih landai daripada batuan yang lebih tua. Mendala Halmahera Timur berupa jalur tektonik yang kuat, berbatuan sedimen Neogen, perlipatan kuat dan persesaran terdapat pada jalur ini. Mendala geologi Halmahera Timur terutama dibentuk oleh satuan batuan ultra basa yang sebarannya cukup luas dan batuan sedimen berumur Kapur (Kd) serta berumur Paleosen-Eosen (Tped, Tpec, dan Tpel) diendapkan tak selaras di atas batuan ultra basa. Secara rinci, geologi wilayah Kabupaten Halmahera Timur tersusu oleh batuan sebagai berikut:

1) Batuan Sedimen

- Formasi Dodaga (Kd): perselingan batu lanau serpih, batupasir, napal dan batugamping.
- Formasi Dorosagu (Tped): perselingan antara batupasir, batu lanau, batulempung, serpih, konglomerat, dan batugamping, sangat kompak, berlapisan sangat baik.
- Formasi Tutuli (Tomt): batugamping, bersisipan napal dan batupasir.
- Formasi Weda (Tmpw): batupasir berselingan dengan batulempung, batu lanau, napal, batugamping dan konglomerat.
- Formasi Tingteng (Tmpt): batugamping dengan sisipan batupasir gampingan dan napal.
- Batugamping Terumbu (QI): batugamping terumbu berwarna putih keabuan, setempat mengandung cangkang moluska, sisipan napal dan batugamping pasiran, terbentuk di lingkungan neritik dan litoral.
- Satuan Konglomerat (Tpec); tersusun oleh batuan Konglomerat sisipan batupasir, Batulempung dan batubara. Konglomerat (Tmpc): berkomponen batuan Ultrabasa, Basal, Rijang, Diorit dan Batu Sabak.

2) Endapan Permukaan

- Aluvium (Qa/t): kerikil, pasir, lumpur dan bongkah andesit dan basal, yang di lengan timur laut mengandung komponen batuan ultrabasa, diendapkan dalam lingkungan sungai, delta dan rawa; yang di sebelah selatan Tanjung Gurua terdapat endapan undak yang diduga dari kipas aluvium.

3) Batuan Gunung api

- Formasi Bacan (Tomb): breksi dan lava. Breksi berkomponen andesit dan basal, setempat juga batugamping.
- Formasi Kayasa (Qpk): batuan gunungapi terdiri dari lava dan breksi.

4) Batuan Beku

- Komplek Batuan Ultrabasa (Ub): batuan ultrabasa, gabro, basal dan diabas.
- Gabro (Gb): kelabu muda, berkristal kasar, pejal sebagian terbreksikan.
- Diorit (Di): diorit putih keabuan, porfiritik, fenokris amfibol terletak di dalam masa dasar mikrolit plagioklas. Mikrodiort kelabu muda mengandung sedikit mineral amfibol.

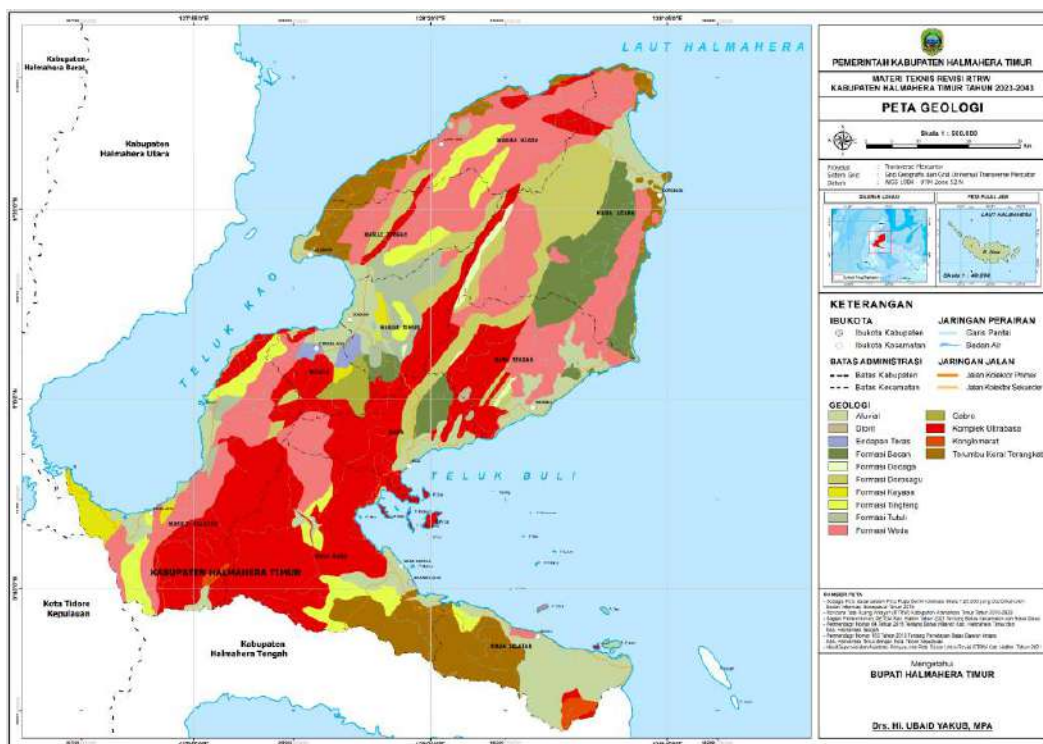
Gambaran selengkapnya mengenai jenis batuan serta proporsi luasan sebarannya terhadap total luas wilayah Kabupaten Halmahera Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 7 Luas Wilayah Berdasarkan Jenis Batuan Kabupaten Halmahera Timur

No	Kecamatan	Simbol, Luas dan Proporsi Luasan		
		Simbol	Luas (Ha)	Proporsi (%)
1	Dodaga Formation	Kd	3.455,10	0,53
2	Dorosagu Formation	Tped	56.399,90	8,68
3	Tingteng Formation	Tmpt	34.902,38	5,37
4	Tutuli Formation	Tomt	17.963,65	2,76
5	Weda Formation	Tmpw	158.704,32	24,42
6	Raised Coral Reef	Ql1	56.146,56	8,64
7	Conglomerate	Tpec	2.655,46	0,41
8	Conglomerate	Tmpc	830,45	0,13
9	Terrace Deposits	Qt	3544,48	0,55
10	Alluvium	Qa	81.322,42	12,51
11	Bacan Formation	Tomb	40.698,52	6,26
12	Kayasa Formation	Qpk	11.036,88	1,70
13	Ultrabasic Complex	Ub	176.673,09	27,18
14	Gabbro	Gb	5.610,99	0,86
15	Diorite	Di	1.556,61	0,24
Jumlah			649.944,20	100,0

Sumber: BP4D Kab. Halmahera Timur 2025

Peta geologi wilayah Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana tersaji dalam gambar di halaman berikut.



Gambar 2. 5 Peta Geologi Kabupaten Halmahera Timur

(Sumber: BP4D Kab. Halmahera Timur 2025)

Berdasarkan Peta Tanah Tinjau Pulau Halmahera berskala 1:250.000 dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan, Kementerian Pertanian, tahun 2016, terdapat 9 (sembilan) jenis tanah di Kabupaten Halmahera Timur dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Aluvial merupakan jenis tanah yang terjadi karena endapan lumpur yang biasanya terbawa aliran sungai. Biasanya tanah ini ditemukan dibagianhilir atau daerah rendah, untuk warna tanah ini coklat hingga kelabu. Untuk jenis tanah ini hanya terdapat di wilayah Kecamatan Wasile Selatan.
- 2) Gleisol Tanah mempunyai ciri hidromorfik sampai kedalaman 50 cm dari permukaan; mempunyai horison A okrik, umbrik, histik dan B kambik, sulfurik, kalsik atau gipsik. Jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Kota Maba, Maba Selatan, Maba Tengah Maba Utara, Wasile, Wasile Selatan, Wasile Timur dan Kecamatan Wasile Tengah.
- 3) Kambisol merupakan tanah yang mempunyai horison B kambik dan horison A umbrik atau molik, tidak terdapat gejala hidromorfik. Untuk jenis tanah ini terdapat di seluruh Kecamatan.
- 4) Mediteran merupakan tanah yang mempunyai horison argilik dengan kejenuhan basa > 50% dan tidak mempunyai horison albik. Jenis tanah ini terdapat di seluruh

Kecamatan.

- 5) Molisol merupakan tanah memiliki horison penciri A molik, B kambik dan KB > 50% di seluruh penampang. Jenis tanah ini terdapat di seluruh Kecamatan.
- 6) Oksisol merupakan tanah mempunyai horison B oksik, atau kandik (KTK liat <16 cmol(+)/kg). Jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Kota Maba, Maba, Maba Tengah, Wasile, Wasile Selatan, Wasile Timur dan Wasile Tengah.
- 7) Podsolik merupakan tanah mempunyai horison B argilik, atau kandik, KB < 50% pada beberapa bagian horison B di dalam kedalaman 125 cm dari permukaan dan tidak mempunyai horison albik yang berbatasan langsung dengan horison argilik atau fragipan. Jenis tanah ini hanya terdapat di Kecamatan Wasile Selatan.
- 8) Regosol merupakan tanah bertekstur kasar (pasir, pasir berlempung), mempunyai horison A okrik, umbrik atau histik, ketebalan > 25 cm. Jenis tanah ini terdapat di seluruh Kecamatan.
- 9) Renzina merupakan tanah dangkal mempunyai A molik, ketebalan 18-25 cm dan di bawahnya langsung batu kapur. Jenis tanah ini hanya terdapat di Kecamatan Maba Selatan dan Kecamatan Wasile Timur.

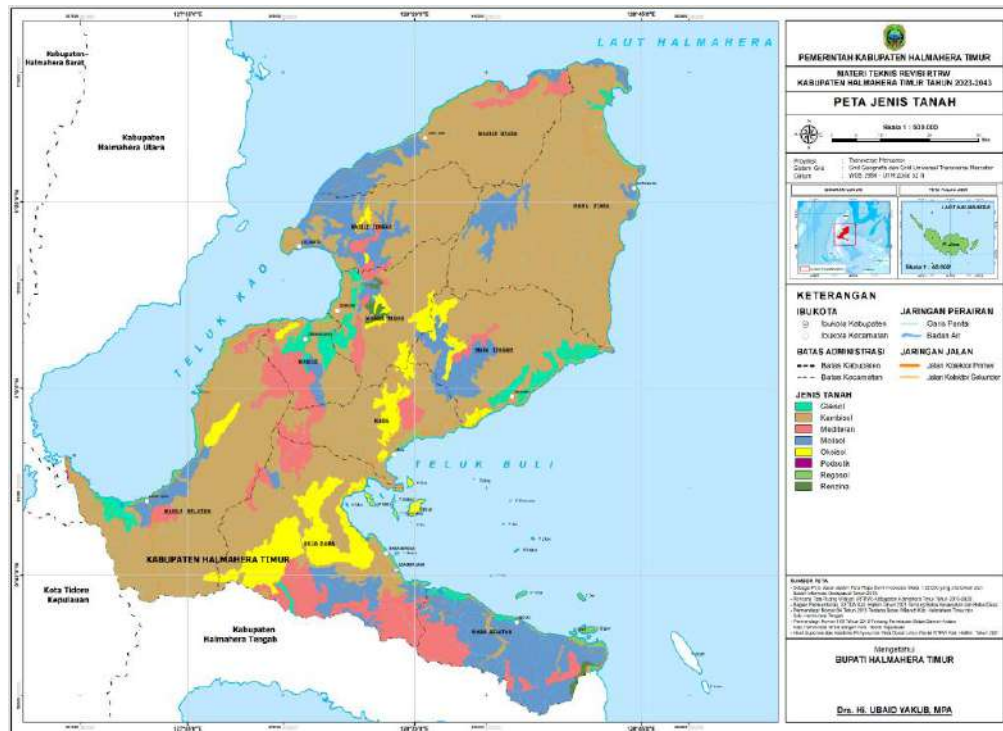
Untuk lebih jelasnya mengenai jenis tanah di Kabupaten Halmahera Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 8 Luas Wilayah Berdasarkan Jenis Tanah Kabupaten Halmahera Timur

No	Luas dan Proporsi Luasan		
	Kecamatan	Luas (Ha)	Proporsi (%)
1	Aluvial	183,11	0,03
2	Gleisol	18.025,96	2,78
3	Kambisol	412.880,89	63,67
4	Mediterranean	62.343,58	9,61
5	Molisol	95.377,92	14,71
6	Oksisol	42.893,20	6,61
7	Podsolik	708,93	0,11
8	Regosol	13.785,31	2,13
9	Renzina	2.243,24	0,35
Jumlah		648.442,14	100,0

Sumber: BP4D Kab. Halmahera Timur 2025

Peta jenis tanah Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana tersaji dalam gambar di halaman berikut.



Gambar 2. 6 Jenis Tanah Kabupaten Halmahera Timur

(Sumber: BP4D Kab. Halmahera Timur 2025)

2.1.5. Kondisi Hidrologi

Sumber air di Kabupaten Halmahera Timur berupa air permukaan (sungai) yang tersebar pada hampir seluruh bagian wilayahnya, embung dan air tanah (mata air). Sungai di Halmahera Timur sejauh ini sebagian besar pemanfaatannya untuk kebutuhan pengairan pada lahan pertanian, karena telah di bangun beberapa bendungan, sedangkan mata air sebagai sumber air bersih untuk kehidupan sehari-hari masyarakat. Kondisi hidrologi di Kabupaten Halmahera Timur dapat diuraikan sebagai berikut.

Daerah Aliran Sungai, Sungai-sungai yang terdapat di wilayah Kabupaten Halmahera Timur masuk dalam Wilayah Sungai (WS) Halmahera Selatan dengan wilayah administrasi yang berada dalam WS Halmahera Selatan meliputi 3 (tiga) kabupaten dan 2 (dua) kota yaitu: (1) Kabupaten Halmahera Selatan, (2) Kabupaten Halmahera Timur, (3) Kabupaten Halmahera Tengah, (4) Kota Tidore Kepulauan, (5) Kota Ternate (Pulau Moti). Kabupaten Halmahera Timur merupakan wilayah di Provinsi Maluku Utara yang mendominasi WS Halmahera Selatan dengan persentase sebesar (41,88%) dari total luas wilayah sungai. Jumlah DAS yang melintasi wilayah Kabupaten Halmahera Timur terdiri dari 50 DAS, dengan luasan sebesar 651.500,83 Hektar. DAS Kabupaten Halmahera Timur merupakan DAS terluas dari 5



kabupaten/kota pada Wilayah Sungai (WS) Halmahera Selatan sebesar 40,81% dari total keseluruhan luas DAS. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di halaman berikut.

Tabel 2. 9 Daerah Aliran Sungai Di Kabupaten Halmahera Timur

No	Nama DAS	Luas (Ha)	Persentase	No	Nama DAS	Luas (Ha)	Persentase
1	DAS Air Gelagela	33.613,72	5,16%	26	DAS Pekaulang	8.001,16	1,23%
2	DAS Air Tutuli	39.526,61	6,07%	27	DAS Paruama	18.329,94	2,81%
3	DAS Bukumatiti	3.264,08	0,50%	28	DAS Pintatu	3.385,80	0,52%
4	DAS Buli Sarani	3.755,69	0,58%	29	DAS Sadea	1.339,71	0,21%
5	DAS Bicoli	8.658,43	1,33%	30	DAS Sangaji	87.588,89	13,44%
6	DAS Bobaneigo	2.841,38	0,44%	31	DAS Saolat	8.919,15	1,37%
7	DAS Dole	0,07	0,00%	32	DAS Selaka	9.506,90	1,46%
8	DAS Ekor	4.248,35	0,65%	33	DAS Sool	8.660,77	1,33%
9	DAS Gagaeli	20.409,50	3,13%	34	DAS Sil	10.757,88	1,65%
10	DAS Gau	7.828,29	1,20%	35	DAS Soalaipoh	4.821,15	0,74%
11	DAS Gotowasi	5.168,68	0,79%	36	DAS Tatam	7.834,29	1,20%
12	DAS Gowonli	1.068,13	0,16%	37	DAS Teue	19,00	1,29%
13	DAS Ifis	14.135,43	2,17%	38	DAS Titilegan	8.421,18	1,29%
14	DAS Iga	4.254,72	0,65%	39	DAS Tolawi	19.253,22	2,96%
15	DAS Inggelang	521,21	0,08%	40	DAS Waleh	309,02	0,05%
16	DAS Keloggiso	13.315,83	2,04%	41	DAS Waisango	8.727,99	1,34%
17	DAS Kobe	26.381,35	4,05%	42	DAS Waci	24.881,99	3,82%
18	DAS Kolamo	880,79	0,14%	43	DAS Woya	7.896,45	1,21%
19	DAS Labi-Labi	6.021,07	0,92%	44	DAS Walal	15.003,64	2,30%
20	DAS Akelamo Haltim	86.715,84	13,31%	45	DAS Watan	2.834,57	0,44%
21	DAS Lili	14.125,40	2,17%	46	DAS Wayamli	4.497,89	0,69%
22	DAS Lolobata	9.794,20	1,50%	47	DAS Watmetaos	1.288,40	0,20%
23	DAS Mabulan	13.356,17	2,05%	48	DAS Wor	208,09	0,03%
24	DAS Niniwi	9.885,04	1,52%	49	DAS Wotu	119,39	0,02%
25	DAS Onat	55.348,48	8,50%	50	DAS Yawanli	3.775,90	0,58%
Total						651.500,83	100,0%

Sumber: BP4D Kab. Halmahera Timur 2025

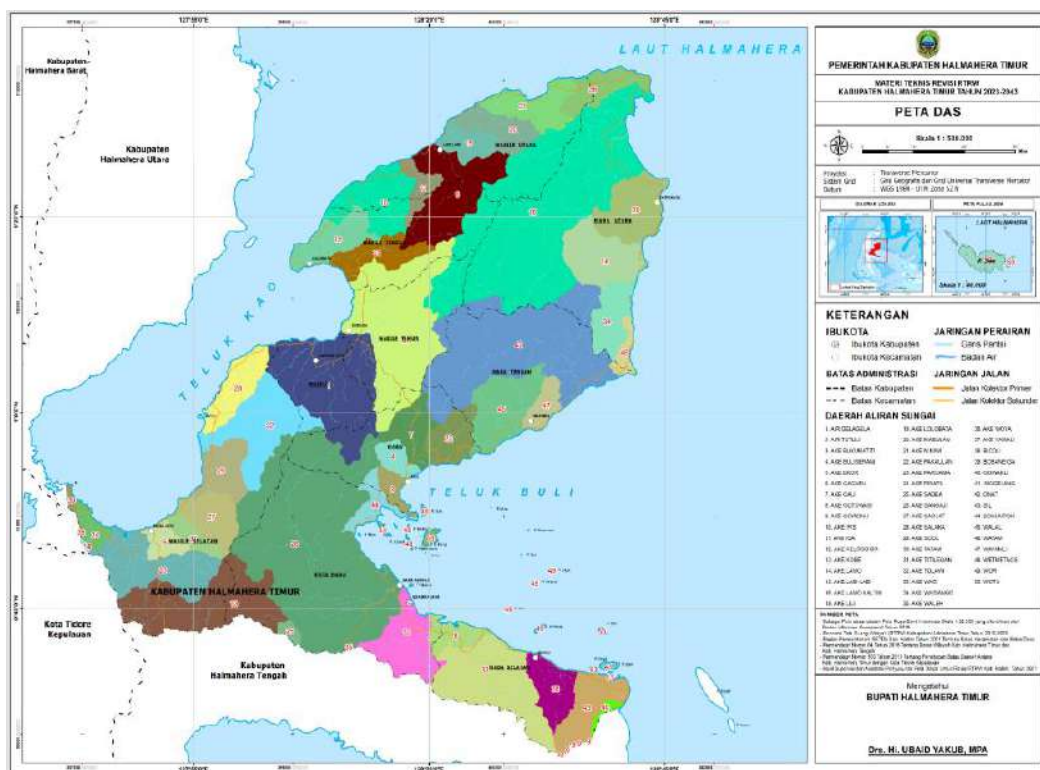
Di Kabupaten Halmahera Timur juga terdapat 5 (lima) DAS prioritas, yaitu Kompleks DAS Subaim sampai DAS Tutuling, DAS Onat, DAS Ake Sangaji, DAS Waci dan DAS Akelamo yang mencakup areal seluas 314.915,37 Ha. Gambaran luasan dan proporsi luasan dari masing-masing DAS selengkapnya dapat dilihat pada tabel di halaman berikut.

Tabel 2. 10 Daerah Aliran Sungai Prioritas Di Kabupaten Halmahera Timur

No	Kecamatan	Luas dan Proporsi Luasan	
		Luas (Ha)	Proporsi (%)
1	Kompleks DAS Subaim sampai DAS Tutuli	60.380,17	19,17
2	DAS Ake Onat	55.348,48	17,58
3	DAS Ake Sangaji	87.588,89	27,81
4	DAS Ake Waci	24.881,99	7,9
5	DAS Ake Lamo Haltim	86.715,84	27,54
Jumlah		314.915,37	100,0

Sumber: BP4D Kab. Halmahera Timur 2025

Sungai-sungai berikut cabang-cabang dan anak-anak cabangnya memiliki tingkat kerapatan yang tinggi dan secara merata melingkupi seluruh wilayah. Potensi aliran air yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan manfaat, tetapi kondisi topografi dengan kemiringan permukaan lahan yang terjal dan kerusakan lingkungan membuat air hujan tidak bertahan, menimbulkan fluktuasi debit aliran yang tidak menguntungkan. Pada musim penghujan aliran air berlimpah namun hanya berlangsung dalam waktu relatif pendek sehingga daya gunanya kecil, di sisi lain dapat menimbulkan bahaya banjir terutama di daerah-daerah hilir. Pada musim kemarau aliran sangat kecil, bahkan kering. Secara lengkap, peta DAS Kabupaten Halmahera Timur tersaji pada gambar berikut.



Gambar 2. 7 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Halmahera Timur
(Sumber: BP4D Kab. Halmahera Timur 2025)

Sungai, Mata Air, Embung, Potensi sumber daya air di Halmahera Timur juga tersedia berupa Mata Air, Sungai, Embung. Berdasarkan data Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan, Kementerian ESDM, 2018, dijelaskan bahwa air tanah di Kabupaten Halmahera Timur memiliki produktivitas dari kecil sampai tinggi dengan keterusan rendah sampai tinggi. Dengan kapasitas sejumlah potensi sumber air tanah dengan akuifer berskala kecil sampai tinggi. Selain itu juga terdapat berbagai mata air dengan debit yang bervariasi antara 0,1 sampai dengan 500 liter per detik. Selain empat mata air utama diatas, terdapat pula 21 mata air yang

dijadikan sumber air minum yang telah dibangun sistem jaringan perpipaan berupa SPAM IKK dan SPAM Pedesaan. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 11 Mata Air Potensial Di Kabupaten Halmahera Timur

No	Mata Air	Debit (Liter/Detik)	Elevasi (mdpl)		Lokasi (Kecamatan)
A	Mata Air Potensial Utama				
1	Ake Sangkole	20	-		Wasile
2	Air Lelewi	0,1	-		Wasile
3	Lolobata	100	-		Wasile Tengah
4	Lolosmani	200	-		Kota Maba
B	Mata Air Potensial				
1	Sil	40		95	Maba Selatan
2	Bicoli	10		27	Maba Selatan
3	Labi-Labi	10		15	Wasile Utara
4	Silapoh	< 0,5		25	Kota Maba
5	Silapoh II	5		52	Kota Maba
6	Bukutio	2		86	Wasile Selatan
7	Fayaul	3		206	Wasile Selatan
8	Tanure Loleba	2		29	Wasile Selatan
9	Babasaram	1		32	Maba Tengah
10	Jara jara	< 1		47	Maba Utara
11	Lili	1		36	Maba Utara
12	Gaifoli Marasipno	5		22	Maba Tengah
13	Miaf	1,5		31	Maba Tengah
14	Maratana Jaya	0,5		40	Maba Tengah
15	Telaga Jaya	2		161	Wasile Selatan
16	Pintatu	5		209	Waile Selatan
17	Tomares	2		450	Waile Selatan
18	Tabanalou	300		75	Waile Selatan
19	Ake Jawi	10		60	Waile Selatan
20	Waijoi	40		769	Waile Selatan
21	Yawal	10		35	Waile Selatan

Sumber: BP4D Kab. Halmahera Timur 2025

Selain mata air, sumber air lainnya adalah sungai yang tersebar di wilayah Halmahera Timur, yaitu sebanyak 15 sungai yang sebagian besar bermata air di daerah pegunungan, sedangkan lainnya dari mata air di lereng-lereng yang letaknya lebih rendah. Selain air hujan, sungai tersebut juga menampung aliran air dari telaga/embung/sumber-sumber yang banyak terdapat di daerah hulunya. Sungai Ake Sangi merupakan sungai terpanjang yaitu, 60 km yang merupakan aliran sungai Laiwui. Tabel berikut menyajikan nama-nama sungai di Kabupaten Halmahera Timur.

Tabel 2. 12 Nama-nama Sungai Di Kabupaten Halmahera Timur

No	Nama Mata Air	Panjang (Km)	Aliran Sungai
1	Ake Pariama	17	Wasile
2	Ake Soalat	15	Wasile
3	Ake Subaim	12	Wasile

No	Nama Mata Air	Panjang (Km)	Aliran Sungai
4	Ake Mancalele	8	Wasile
5	Ake Opyang	22	Wasile
6	Ake Tulling	22	Wasile
7	Ake Lolobata	12	Wasile
8	Ake Gagaeli	18	Wasile
9	Ake Pamalanga	42	Maba
10	Ake Onat	45	Maba
11	Ake Gau	10	Maba
12	Ake Sangaji	60	Maba
13	Ake Terwele	23	Maba
14	Ake Waci	28	Maba
15	Ake annas	25	Maba

Sumber: BP4D Kab. Halmahera Timur 2025

Sumber air lain yang tersedia adalah keberadaan sejumlah embung. Embung-embung tersebut terletak di lima sungai besar, yang masing-masing berada pada wilayah Kecamatan Maba, Maba Tengah, Kota Maba, dan Wasile Tengah. Selain berfungsi untuk menampung air dan mencegah banjir, embung-embung ini juga dapat difungsikan sebagai sumber air alternatif untuk irigasi pertanian. Embung-embung yang ada diperkirakan mampu menampung air hingga total mencapai 360.00 m³ dengan rincian sebagai berikut:

- Embung dari sungai Ake Akelamo (volume ± 100.000 m³).
- Embung dari sungai Ake Noe (volume ± 30.000 m³).
- Embung dari sungai Air Onat (volume ± 80.000 m³).
- Embung dari sungai Air Sangaji (volume ± 100.000 m³).
- Embung dari sungai Ake Waci (volume ± 60.000 m³).
- Embung dari sungai Air Dodaga (volume ± 50.000 m³).

2.1.6. Klimatologi

Kondisi geografis Kabupaten Halmahera Timur dapat dikategorikan beriklim tropis dan kondisi alam Kabupaten Halmahera Timur dipengaruhi oleh 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Gambaran iklim Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana tersaji dalam tabel-tabel berikut.

**Tabel 2. 13 Suhu dan Kelembaban Udara
Kabupaten Di Halmahera Timur Tahun 2024**

No	Bulan	Suhu Udara (°C)			Kelmbaban Udara (%)		
		Max	Min	Rerata	Max	Min	Rerata
1	Januari	31	25	27	94	72	85
2	Februari	31	25	27	92	74	84
3	Maret	31	25	27	94	70	86
4	April	31	25	27	94	69	85
5	Mei	31	25	27	95	73	86
6	Juni	31	24	27	95	73	86
7	Juli	31	25	27	94	71	85
8	Agustus	31	25	27	94	69	84
9	September	30	24	27	94	73	86
10	Oktober	31	25	27	92	69	83
11	November	31	25	27	95	76	87
12	Desember	31	25	27	102	73	90
Rerata		31	25	27	95	72	86

Sumber: Halmahera Timur dalam Angka 2025, BPS

**Tabel 2. 14 Tekanan Udara, Kecepatan Angin, Penyinaran Matahari,
Curah Hujan dan Hari Hujan Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024**

No	Bulan	Tekanan Udara (mb)	Kecapatan Angin (Knot)	Penyinaran Matahari (%)	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan
1	Januari	1.011,00	4	45	367	26
2	Februari	1.011,90	6	53	149	18
3	Maret	1.012,10	4	57	255	25
4	April	1.012,40	4	55	275	20
5	Mei	1.011,80	3	50	354	23
6	Juni	1.012,40	3	55	327	25
7	Juli	1.012,40	3	52	238	23
8	Agustus	1.012,00	3	46	140	22
9	September	1.012,60	3	46	142	20
10	Oktober	1.011,20	3	66	121	14
11	November	1.009,90	3	59	161	24
12	Desember	1.010,60	4	51	202	24
Jumlah					2.731	264
Rerata		1.011,70	4	53	228	22

Sumber: Halmahera Timur dalam Angka 2025, BPS

2.1.7. Penutupan Lahan

Penutupan lahan (*land cover*) adalah tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati dan merupakan hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada areal tersebut. Wilayah Kabupaten Halmahera didominasi oleh penutupan lahan hutan yang terdiri dari hutan primer seluas 252.344,61 Hektar dan hutan sekunder seluas 309.341,32 Hektar atau 47,64% dari total luas wilayah kabupaten. Kemudian peruntukan yang luasnya dibawah >10% dari total luas wilayah yakni perkebunan seluas 36.113,15 Hektar atau 5,56%

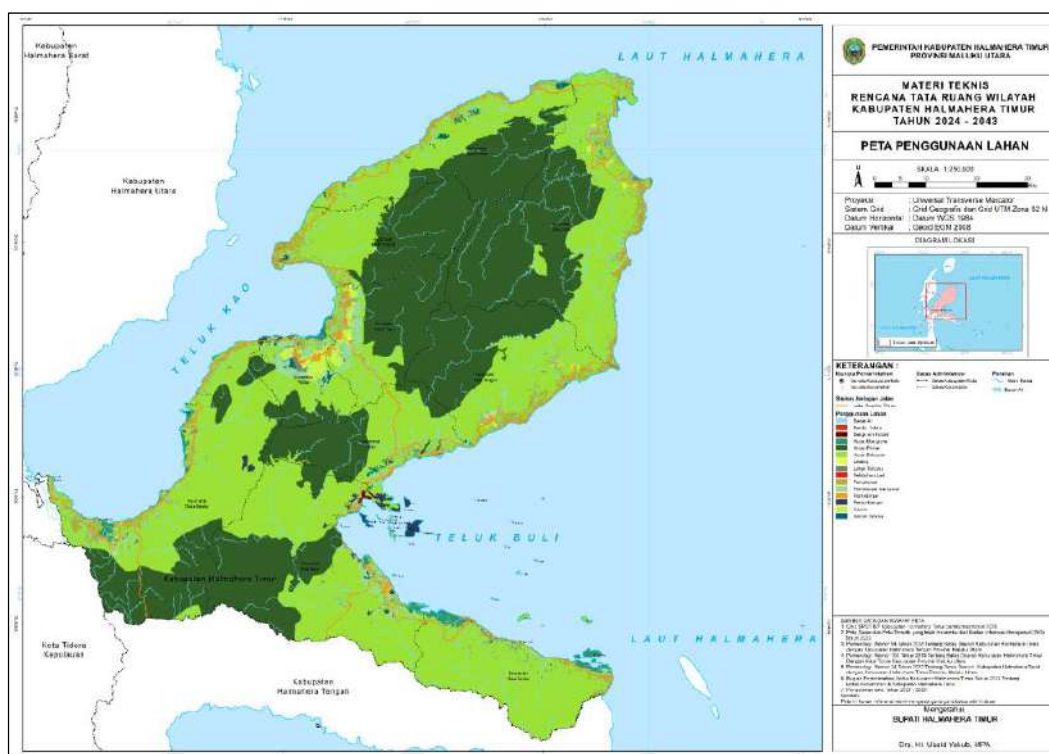
dan semak belukar seluas 18.187,58 hektar. Sementara sisanya merupakan peruntukan yang luasnya >1% dari luas wilayah kabupaten. Selanjutnya untuk lahan pertanian di Kabupaten Halmahera Timur hingga tahun 2025 yang terdiri dari sawah seluas 18.187,58 Hektar atau 0,72%, ladang dan tegalan seluas 4.578,94 hektar atau 0,71%. Gambaran penggunaan lahan selengkapnya dapat dilihat pada tabel di berikut.

Tabel 2. 15 Penutupan Lahan Di Kabupaten Halmahera Timur

No	Jenis Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Hutan Primer	252.344,61	38,86
2	Hutan Sekunder	309.341,32	47,64
3	Hutan Mangrove Primer	2.594,46	0,40
4	Hutan Mangrove Sekunder	2.374,07	0,37
5	Hutan Rawa Gambut	109,89	0,02
6	Kebun Campuran	6.326,96	0,97
7	Perkebunan	36.113,15	5,56
8	Ladang dan Tegalan	4.578,94	0,71
9	Lahan Terbuka	4.967,48	0,76
10	Padang Rumput	1.031,12	0,16
11	Permukiman	2.557,72	0,39
12	Pertambangan	1.786,87	0,28
13	Rawa	871,09	0,13
14	Sawah	4.652,05	0,72
15	Semak belukar	18.187,58	2,80
16	Tambak	11,25	0,002
17	Tubuh Air	3.652,03	0,56
Total		649.353,31	100,33

Sumber: BPS Kab. Halmahera Timur 2025

Peta penutupan lahan Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana tersaji dalam gambar di halaman berikut.



Gambar 2. 8 Peta Penutupan Lahan Kabupaten Halmahera Timur
(Sumber: BP4D Kab. Halmahera Timur 2025)

2.1.8. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Halmahera Timur dapat dijelaskan dari sejumlah perspektif sebagai berikut.

Kawasan Strategis Kabupaten, meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis Kabupaten Halmahera Timur dalam mewujudkan pola ruang terdiri atas:

- 1) kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas:
 - a) Rencana Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Desa WailukumKec. Kota Maba;
 - b) Kawasan Simpul Ekonomi Kabupaten yang terdapat di Kota Maba Kecamatan Kota Maba, Buli Kecamatan Maba, Subaim Kecamatan Wasile, dan Nusa Jaya Kecamatan Wasile selatan;
 - c) Kawasan Pengembangan Tanaman Pangan dan Perkebunan terdiri atas:
 - Kawasan tanaman pangan terdapat di Kawasan transmigrasiPatlean Kecamatan
 - Kawasan tanaman hortikultura dan kelapa sawit terdapat diKecamatan

Maba Selatan;

- Kawasan sawah tadah hujan terdapat di Kawasan transmigrasi Maba kecamatan Kota Maba.

d) Kawasan Pengembangan Perikanan, terdiri atas:

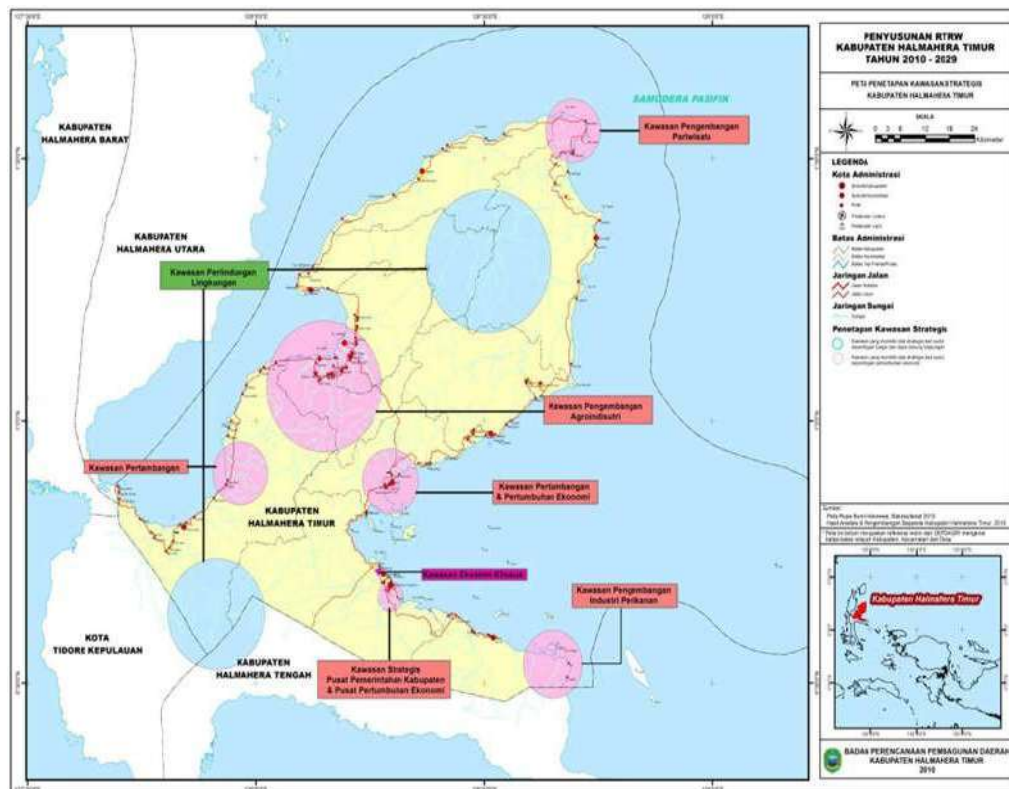
- Kawasan Perikanan tangkap dan budidaya laut terdapat di Kecamatan Maba Selatan
- Kawasan perikanan tangkap dan sumberdaya kelautan dengan komoditas seperti cumi dan ubur-ubur yang terdapat di Nusa Jaya Kecamatan Wasile Selatan

e) Kawasan pembangunan industri nikel yang terdapat di Kecamatan Kota Maba, Maba dan Wasile Selatan

f) Kawasan Pengembangan Pariwisata terdiri atas:

- Kawasan wisata bahari, terdapat di Jara-jara
- Kawasan wisata bahari dan konservasi laut terdapat di Teluk Buli
- Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya yaitu Kawasan seni dan suku asli Halmahera Timur
- Kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdapat di Taman Nasional Lolobata dan Aketajawe.

Peta kawasan-kawasan strategis di Kabupaten Halmahera Timur sebagaimanatersaji pada gambar berikut.



Gambar 2. 9 Peta Kawasan Strategis Kabupaten Halmahera Timur

(Sumber: BP4D Kab. Halmahera Timur 2025)

Kawasan Strategis Provinsi, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. Provinsi Maluku Utara yang merupakan provinsi kepulauan juga dibagi atas beberapa kawasan pengembangan sebagai kawasan strategis. Kabupaten Halmahera Timur dalam Kawasan strategis Provinsi Maluku Utara sebagaimana dalam RTRW Provinsi Maluku Utara 2013 – 2033, Terdiri dari:

- 1) Kawasan Perbatasan dan Pulau Kecil yaitu Halmahera Timur, Halmahera Tengah dan Pulau Jiuw diarahkan pada pengembangan Pariwisata dan Hankam;
- 2) Kawasan Strategis Halmahera Utara, Halmahera Barat dan Halmahera Timur diarahkan pengembangannya pada sektor pertanian tanaman pangan guna mendukung ketahanan pangan nasional dan provinsi.

Kawasan Strategis Nasional, merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Nasional terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. Kabupaten Halmahera Timur dalam lingkup Kawasan Strategis Nasional termasuk dalam Kawasan Strategis Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Papua Barat. Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disebut

dengan Kawasan Perbatasan Negara adalah Kawasan Strategis Nasional yang berada di bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat dengan Negara Palau, dalam hal batas Wilayah Negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. Cakupan wilayah di Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara meliputi; 6 (enam) kecamatan yang meliputi Kecamatan Wasile Utara, Kecamatan Maba Utara, Kecamatan Maba Tengah, Kecamatan Maba, Kecamatan Maba Kota dan Kecamatan Maba Selatan. Nilai Strategis Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat antara lain:

- 1) Posisi strategis perbatasan Negara Maluku-Papua Barat dengan Republik Palau yang merupakan destinasi internasional wisata bahari;
- 2) Belum adanya pusat pelayanan kawasan perbatasan negara di Maluku Utara-Papua Barat; a) Dekat dengan Filipina yang merupakan Pusat perikanan; b) Terletak di bibir Pasifik (Ekonomi Dunia masa depan)
- 3) Belum dilakukan perundingan tentang garis batas laut, ZEE, Landas Kontinen, dan Zona tambahan dengan Republik Palau;
- 4) Maraknya illegal fishing karena kurangnya fasilitas pertahanan dan keamanan;
- 5) Potensi perikanan tangkap yang besar, namun baru dimanfaatkan 20% saja;

Selain nilai strategis, terdapat tantangan dalam perbatasan antar Provinsi Maluku Utara dan Papua Barat yaitu Potensi Konflik Kepemilikan Pulau Sain(Pulau Sayang). Kawasan Strategis Nasional Perbatasan Negara di Maluku Utara – Papua Barat dan Perbatasan Laut yang berbatasan dengan Negara Republik Palau, 4(empat) pulau kecil terluar:

- 1) Pulau Jiew (Maluku Utara)
- 2) Pulau Budd
- 3) Pulau Fani
- 4) Pulau Miossu

Konektivitas Penyeberangan Antar Pulau pada perbatasan antar Provinsi Maluku Utara dan Papua Barat terdiri dari:

- 1) Sabuk Utara Penyeberangan Indonesia pada jalur Daruba – Biak;
- 2) Sabuk Tengah Penyeberangan Indonesia pada jalur Halmahera Timur - Patani – P. Gebe – Raja Ampat – Sorong

- 3) Potensi Jalur Baru penyeberangan (ferry) antar provinsi;
- 4) Kepulauan Widi – Raja Ampat;
- 5) Sum (Obi Timur) – Raja Ampat

Sedangkan tujuan Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara RI – Palau meliputi:

- 1) Kawasan fungsi pertahanan & keamanan wilayah laut yang efektif untuk menjamin keutuhan kedaulatan & ketertiban wilayah Negara;
- 2) Kawasan budidaya berbasis perikanan, pertambangan dan pariwisata untuk kemandirian pangan, ekonomi antar wilayah, dan perdagangan antar negara, yang berkelanjutan;
- 3) Kawasan lindung perairan dengan fungsi perlindungan keanekaragaman hayati dan sempadan pantai pulau-pulau kecil terluar;
- 4) Sistem pusat pelayanan kawasan perbatasan negara yang efektif sebagai pusat ekonomi; pintu gerbang negara; dan pusat pertahanan dan keamanan;
- 5) Akses prasarana antar pusat pelayanan dan pulau-pulau kecil terluar, ketersediaan sarana dasar yang memadai, serta keterkaitan selektif dengan eksternal;
- 6) Kerjasama perlindungan dan pengembangan wilayah dengan Negara Palau dan Filipina.

Kawasan Terpadu, yaitu kawasan pengembangan yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur, yang meliputi 11 (sebelas) Kawasan Terpadu Baru untuk mendukung kegiatan pengembangan di Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kawasan Perkotaan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang lebih bernilai tambah dan berdaya saing. Kawasan-kawasan terpadu baru tersebut, yaitu:

- 1) Kawasan Transmigrasi Kota Maba

Kabupaten Halmahera Timur merupakan wilayah di Provinsi Maluku Utara dengan luasan lahan pertanian tanaman pangan terluas. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB setiap tahun mengalami peningkatan. Atas dasar itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur selalu berupaya untuk meningkatkan lahan produktif untuk peningkatan jumlah produksi pertanian. Salah satu upaya yang diambil oleh pemerintah daerah yaitu adanya rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi Baru di Wilayah Kecamatan Kota Maba.

- 2) Kawasan Perdesaan Sondo-Sondo Sebagai Kawasan Perkebunan Terpadu
Pengembangkan beberapa Kawasan Terpadu Baru untuk mendukung kegiatan Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kawasan Perkotaan, salah satunya melalui Pengembangan Kawasan Perdesaan Sondo-Sondo sebagai Kawasan Perkebunan Terpadu sebagai upaya pengembangan sektor pertanian sub sektor perkebunan dengan komoditi cengkeh, pala dan kakao.
- 3) Kawasan Perikanan Terpadu Tanjung Roni dan Saramaake di Kecamatan Wasile Selatan Rencana Pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu Tanjung Roni dan Saramaake di Kecamatan Wasile Selatan dengan luasan 2.436,60 Hektar. Kawasan tersebut hingga saat ini merupakan Kawasan perikanan tangkap yang sudah berkembang dan memberikan kontribusi cukup besar terhadap PAD Kabupaten Halmahera Timur. Produksi perikanan yang unggul pada Kawasan ini yaitu ikan pelagis kecil, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur berupaya untuk mengembangkan Kawasan Perikanan Terpadu Tanjung Roni dan Saramaake di Kecamatan Wasile Selatan yang kedepannya berkembang sesuai potensi yang dimiliki.
- 4) Kawasan Perikanan Terpadu Sill di Kecamatan Maba Selatan
Rencana Pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu Sill di Kecamatan Maba Selatan. Potensi perikanan tangkap pada Kawasan ini antara lain jenis ikan demersal sehingga fokus pengembangan diarahkan pada potensi yang dimiliki. Jumlah produksi perikanan tangkap pada kawasan ini setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup pesat dan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Halmahera Timur. Selain kondisi tersebut, kawasan ini memiliki nilai strategis yang tinggi karena kawasan ini berada pada Wilayah Perbatasan Kabupaten (Perbatasan antara Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah). Dengan adanya pengembangan kawasan ini, diharapkan memberikan dampak ekonomi yang besar bagi Kabupaten Halmahera Timur, karena berpotensi memperluas areal pemasaran produksi perikanan sampai ke Kabupaten Halmahera Tengah.
- 5) Kawasan Perikanan Terpadu Dabo dan Kawasan Pariwisata Jara-Jara Rencana Pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu Dabo yang dipadukan dengan Pengembangan Kawasan Pariwisata Jara-Jara. Keterpaduan dengan Kawasan pariwisata Jara-jara yang diarahkan dengan konsep pengembangan wisata bahari sebagai komplementer dari Kawasan perikanan terpadu. Konsep pengembangan Kawasan yang memadukan dua sektor unggulan di Kabupaten Halmahera Timur

dinilai memiliki nilai strategis yang tinggi, karena memiliki keterpaduan fungsi yang dapat menunjang satu sama lain. Nilai strategis lainnya yaitu pengembangan Kawasan Perikanan terpadu Dabo dan Kawasan Pariwisata Jara-Jara ini dapat dipadukan dengan pengembangan sektor perikanan yang ada di Kabupaten Halmahera Utara dan Pengembangan Sektor Perikanan dan sektor pariwisata Kabupaten Halmahera Timur (Segitiga Emas di Provinsi Maluku Utara).

6) Kawasan Fayaul-Bukutio Sebagai Kawasan Perkotaan Baru

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur terkait pengembangan wilayah berbasis Kawasan untuk pengembangan kawasan perkotaan salah satunya yaitu Rencana Pengembangan Kawasan Fayaul- Bukutio sebagai kawasan perkotaan baru. Rencana pengembangan Kawasan ini untuk mendukung adanya rencana pembentukan kecamatan baru di Kecamatan Wasile Selatan yaitu Kecamatan Wasile Barat Daya dengan rencana Ibukota di Kawasan Fayaul – Bukutio.

7) Kawasan Sekitar Bandara Buli Sebagai Kawasan Perkotaan Baru

Kawasan sekitar Bandara Buli memiliki sisi strategis karena disamping lokasi yang berada di sekitar bandara, kawasan ini juga dilalui oleh jaringan kolektor yang menghubungkan antara Kawasan Perkotaan Buli- Lapter dan Kawasan Perkotaan Wayamli. Selain itu, kawasan ini merupakan kawasan cepat tumbuh yang ditandai dengan mulai bermunculannya kawasan permukiman baru dan kegiatan ekonomi mikro yang tidak terencana dan tidak tertata. Terhadap kondisi tersebut, bila fenomena ini tidak direspon maka dalam beberapa tahun kedepan akan menjadi kawasan yang berpotensi kumuh. Kondisi tersebut merupakan fenomena *Urban Sprawl* (perambatan linier) yang tidak bisa ditekan perkembangannya, sehingga dibutuhkan strategi untuk mengontrol perembetan tersebut. Saat ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur mulai merespon fenomena tersebut dengan strategi penanganan berupa Rencana Pengembangan Kawasan Sekitar Bandara Buli sebagai Kawasan Perkotaan Baru.

8) Kawasan Perkotaan Maba

Perluasan ibukota Kabupaten Halmahera Timur ini bertujuan untuk penambahan aktivitas perkotaan dalam menunjang fungsi utama Kawasan Perkotaan Maba yaitu sebagai Pusat Pemerintahan Kabupaten, Pusat Permukiman, Pusat Perdagangan dan Jasa dan Pusat Pendidikan, termasuk Kawasan Pendidikan tinggi. Selain itu, tujuan utama perluasan areal Kawasan Perkotaan ini yaitu sebagai upaya antisipatif untuk mengontrol laju pembangunan dengan

membentuk struktur jaringan jalan utama sebagai pondasi awal. Sehingga perkembangan kota kedepannya dapat dikendalikan sejak dini dan tidak terjadi *Urban Sprawl*.

9) Kawasan Perkotaan Wayamli

Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan Wayamli dengan tujuan perluasan dan penataan Kota. Kawasan Perkotaan Wayamli pada saat penyusunan RTRW Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010-2029 hanya ditetapkan di Desa Wayamli dan Desa Yawanli. Sedangkan Rencana pengembangan Perkotaan Wayamli kedepannya direncanakan dari Desa Wayamli, Desa Yawali, Desa Bebsili, Desa Beringin Lamo, Desa Babasaram dan Desa Bangul dengan fungsi utama yang akan difokuskan selain fungsi yang telah ada, direncanakan sebagai Sentra Produksi Pertanian dan Perkebunan, dengan tujuan untuk mendukung Program Nasional (Program Pembangunan Kawasan Pengembangan Pedesaan Mandiri).

10) Kawasan Perkotaan Lolobata

Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan Lolobata yaitu perluasan dan penataan kota serta pengembangan sentra produksi dan sentra pemasaran hasil perkebunan. Selain fungsi yang telah diembani, Kawasan Perkotaan Lolobata kedepannya diarahkan sebagai kawasan pendukung dengan fungsi memperpendek layanan perdagangan dan jasa untuk wilayah Kecamatan Wasile Utara. Mengingat kondisi saat ini, pusat pelayanan dari Kecamatan Wasile, Wasile Timur, Wasile Tengah dan Wasile Utara masih terpusat di Kawasan Perkotaan Cemara Jaya.

11) Kawasan Smelter di Buli

Dengan adanya Penetapan Kawasan Smelter Buli yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk mendukung program tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur perlu melakukan pengembangan perkotaan buli dengan meningkatkan fungsi pelayanan kawasan. Fungsi pelayanan yang ditingkatkan antara lain sebagai Kawasan Industri, Pusat Perdagangan dan Jasa, Pusat Permukiman, Pusat Pendidikan dan Kawasan Perkantoran. Selain itu, Pemerintah Daerah terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur pendukung untuk menunjang segala kebutuhan operasional Kawasan Smelter Buli nantinya.

2.1.9. Wilayah Rawan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Potensi bencana Kabupaten Halmahera Timur diketahui berdasarkan sejarah kejadian bencana yang menurut pencatatan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dan Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Timur. Dari pencatatan tersebut, bencana berpotensi terjadi di Kabupaten Halmahera Timur adalah banjir, banjir bandang, longsor, gelombang ekstrim dan abrasi dan cuaca ekstrim. Namun, tidak menutup kemungkinan bencana lain dapat terjadi mengingat faktor-faktor kondisi daerah yang berkaitan dengan bencana yang diketahui berdasarkan pengkajian risiko bencana.

Secara keseluruhan, identifikasi potensi bencana tersebut diperoleh dari pengkajian risiko bencana dan kesepakatan di daerah. Bencana yang berpotensi di Kabupaten Halmahera Timur dari hasil kajian risiko bencana dan kesepakatan daerah didapat 9 bencana yaitu: banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor dan tsunami. Bencana-bencana tersebut dikategorikan berpotensi disebabkan kondisi daerah dan faktor penyebab bencana (faktor alam, non alam, maupun ulah manusia). Penetapan potensi bencana tersebut berdasarkan metodologi pengkajian dan kesepakatan daerah Kabupaten Halmahera Timur. Sembilan potensi bencana di Kabupaten Halmahera Timur tersebut dilaksanakan dalam pengkajian risiko bencana Kabupaten Halmahera Timur untuk tahun 2022 sampai tahun 2024. Gambaran potensi bahaya bencana di Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2. 16 Potensi Bahaya Bencana Di Kabupaten Halmahera Timur

No	Jenis Bencana	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Banjir	78.62	Tinggi
2	Banjir Bandang	20.484	Tinggi
3	Cuaca Ekstrim	159.687	Tinggi
4	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	8.864	Tinggi
5	Gempa Bumi	645.801	Tinggi
6	Kekeringan	645.801	Tinggi
7	Kebakaran Hutan dan Lahan	542.007	Tinggi

No	Jenis Bencana	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
8	Tanah Longsor	456.113	Tinggi
9	Tsunami	1.974	Tinggi

Sumber: BPBD Kab. Halmahera Timur 2025

Secara rinci, wilayah rawan bencana menurut jenis bencana di Kabupaten Halmahera Timur diuraikan sebagai berikut.

A. Banjir

Banjir didefinisikan sebagai peristiwa terjadinya genangan pada suatu daerah yang biasanya kering (bukan daerah rawa) atau meluapnya limpasan air permukaan (*runoff*) yang volumenya melebihi kapasitas pengaliran sistem drainase atau sungainya. Secara keseluruhan bencana banjir memiliki potensi luas bahaya di Kabupaten Halmahera Timur dengan total luas bahaya 41.992 Ha yang berada pada kelas tinggi. Kelas bahaya tinggi pada Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan pada kelas bahaya maksimal dari setiap kecamatan terdampak bencana. Berdasarkan Hasil Kajian Risiko Bencana BPBD Kabupaten Halmahera Timur, Potensi penduduk terpapar bencana banjir per kecamatan di Kabupaten Halmahera berada pada kelas tinggi. Potensi penduduk terpapar berbeda-beda untuk setiap Kecamatan Terdampak, Hal tersebut dilihat berdasarkan potensi banyaknya jumlah penduduk terpapar di kecamatan tersebut. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar bencana banjir per kecamatan menghasilkan potensi penduduk terpapar di Kabupaten Halmahera Timur, yaitu 65.489 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 17 Luas Wilayah Bahaya Banjir dan Potensi Penduduk Terpapar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur

No	Kecamatan	Bahaya		Potensi Penduduk Terpapar	
		Luas (ha)	Kelas	Jiwa	Kelas
1	Kota Maba	12.505	Tinggi	10.066	Tinggi
2	Maba	4.102	Tinggi	8.519	Tinggi
3	Maba Selatan	7.446	Tinggi	5.596	Tinggi
4	Maba Tengah	9.792	Tinggi	5.499	Tinggi
5	Maba Utara	9.787	Tinggi	6.641	Tinggi
6	Wasile	9.542	Tinggi	7.583	sedang
7	Wasile Selatan	11.889	Tinggi	8.424	Tinggi
8	Wasile Tengah	3.147	Tinggi	3.058	Tinggi
9	Wasile Timur	7.373	Tinggi	9.812	Sedang
10	Wasile Utara	3.037	Tinggi	291	Tinggi
Halmahera Timur		41.992	Tinggi	65.489	Tinggi

Sumber: BP4BD Kab. Halmahera Timur -2025

B. Banjir Bandang

Banjir Bandang adalah banjir besar yang datang secara tiba-tiba dengan meluap, menggenangi, dan mengalir deras menghanyutkan benda-benda besar (seperti kayu dan sebagainya).

Banjir bandang terjadi secara tiba-tiba di daerah permukaan rendah akibat hujan yang turun terus-menerus. Banjir bandang terjadi saat penjenjuran air terhadap tanah di wilayah tersebut berlangsung dengan sangat cepat hingga tidak dapat diserap lagi. Air yang tergenang lalu berkumpul di daerah-daerah dengan permukaan rendah dan mengalir dengan cepat ke daerah yang lebih rendah. Akibatnya, segala macam benda yang dilewatinya dikelilingi air dengan tiba-tiba. Banjir bandang dapat mengakibatkan kerugian yang besar.

Berdasarkan Hasil Kajian Risiko Bencana BPBD Kabupaten Halmahera Timur, Potensi penduduk terpapar bencana Banjir Bandang per kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur dari 10 (sepuluh) kecamatan, 8 (delapan) kecamatan yang berpotensi, 3 (tiga) berada pada kelas sedang yaitu Kec. Maba tengah, Kec. Wasile dan Kec. Wasile Timur dan 5 (lima) kecamatan berada pada kelas tinggi yaitu Kec. Kota Maba, Kec. Maba, Kec. Maba Utara, Kec. Wasile Selatan dan Kec. Wasile Utara. Sedangkan untuk potensi penduduk terpapar bencana banjir bandang pada Kabupaten Halmahera Timur memiliki kelas tinggi, yang diperoleh dari kelas maksimal per kecamatan. Potensi penduduk terpapar berbeda-beda untuk setiap kecamatan terdampak, hal tersebut dilihat berdasarkan banyaknya jumlah penduduk yang beraktivitas di kecamatan tersebut. Secara keseluruhan, potensi penduduk terpapar bencana Banjir Bandang per kecamatan menghasilkan potensi penduduk terpapar di Kabupaten Halmahera Timur, yaitu 5.359 jiwa.

Gambaran Luas Wilayah Bahaya Banjir Bandang dan Potensi Penduduk Terpapar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 18 Luas Wilayah Bahaya Banjir Bandang dan Potensi Penduduk Terpapar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur

No	Kecamatan	Bahaya		Potensi Penduduk Terpapar	
		Luas (ha)	Kelas	Jiwa	Kelas
1	Kota Maba	3.05	Tinggi	636	Tinggi
2	Maba	1.606	Tinggi	732	Tinggi
3	Maba Selatan	50	Tinggi	-	-
4	Maba Tengah	1.802	Tinggi	110	Sedang
5	Maba Utara	3.738	Tinggi	441	Tinggi
6	Wasile	2.915	Tinggi	1.865	Sedang
7	Wasile Selatan	3.872	Tinggi	747	Tinggi
8	Wasile Tengah	569	Tinggi	-	-
9	Wasile Timur	1.031	Tinggi	424	Sedang
10	Wasile Utara	1.85	Tinggi	404	Tinggi
Halmahera Timur		13.611	Tinggi	5.359	Tinggi

Sumber: BPBD Kab. Halmahera Timur 2025

C. Cuaca Ekstrim

Cuaca ekstrim adalah suatu kondisi di mana salah satu atau beberapa indikator cuaca mengalami perubahan ekstrem. Misalnya perubahan ekstrem suhu udara atau perubahan ekstrim curah hujan. Secara keseluruhan bencana cuaca ekstrim memiliki potensi luas bahaya di Kabupaten Halmahera Timur dengan total 159.686 Ha yang berada pada kelas tinggi. Penentuan kelas bahaya tingkat Kabupaten diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kecamatan. Berdasarkan Hasil Kajian Resiko Bencana BPBD Kabupaten Halmahera Timur, Potensi penduduk terpapar bencana cuaca ekstrim per kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur berada pada kelas tinggi. Potensi penduduk terpapar berbeda-beda untuk setiap kecamatan terdampak, hal tersebut dilihat berdasarkan banyaknya jumlah penduduk yang beraktivitas di kecamatan tersebut. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar bencana cuaca ekstrim per kecamatan menghasilkan potensi penduduk terpapar di Kabupaten Halmahera Timur, yaitu 78.026 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 19 Luas Wilayah Bahaya Cuaca Ekstrim dan Potensi Penduduk Terpapar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur.

No	Kecamatan	Bahaya		Potensi Penduduk Terpapar	
		Luas (Ha)	Kelas	Jiwa	Kelas
1	Kota Maba	21.909	Sedang	11.098	Sedang
2	Maba	6.62	Tinggi	8.964	Tinggi
3	Maba Selatan	21.923	Tinggi	6.803	Tinggi
4	Maba Tengah	14.427	Tinggi	6.377	Tinggi
5	Maba Utara	19.324	Tinggi	7.52	Tinggi
6	Wasile	10.743	Tinggi	7.791	Tinggi
7	Wasile Selatan	22.812	Tinggi	11.288	Tinggi
8	Wasile Tengah	13.354	Tinggi	5.658	Tinggi

9	Wasile Timur	10.528	Tinggi	9.974	Tinggi
10	Wasile Utara	18.041	Tinggi	2.551	Tinggi
Halmahera Timur		159.686	Tinggi	78.024	Tinggi

Sumber: BPBD Kab. Halmahera Timur 2025

D. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Gelombang ekstrim adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Sementara itu, abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut.

Secara keseluruhan bencana gelombang ekstrim dan abrasi memiliki potensi luas bahaya di Kabupaten Halmahera Timur dengan total 8.864 Ha yang berada pada kelas tinggi. Penentuan kelas bahaya tingkat Kabupaten diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kecamatan. Berdasarkan Hasil Kajian Resiko Bencana BPBD Kabupaten Halmahera Timur, Potensi penduduk terpapar bencana gelombang ekstrim dan abrasi per kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur berada pada kelas tinggi. Potensi penduduk terpapar terdampak 9 (sembilan) kecamatan, hanya 1 (satu) kecamatan yang tidak terdampak potensi penduduk terpapar yaitu Kecamatan Wasile Timur hal tersebut dilihat berdasarkan banyaknya jumlah penduduk yang beraktivitas di kecamatan tersebut. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar bencana cuaca ekstrim per kecamatan menghasilkan potensi penduduk terpapar di Kabupaten Halmahera Timur, yaitu 19.431 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 20 Luas Wilayah Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi dan Potensi Penduduk Terpapar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur

No	Kecamatan	Bahaya		Potensi Penduduk Terpapar	
		Luas (ha)	Kelas	Jiwa	Kelas
2	Maba	861	Tinggi	1.614	Tinggi
3	Maba Selatan	599	Tinggi	-	-
4	Maba Tengah	590	Tinggi	1.735	Tinggi
5	Maba Utara	1.58	Tinggi	1.794	Tinggi
6	Wasile	284	Tinggi	2.728	Sedang
7	Wasile Selatan	1.707	Tinggi	227	Tinggi
8	Wasile Tengah	610	Tinggi	4.263	Tinggi
9	Wasile Timur	306	Sedang	2.472	Tinggi
Halmahera Timur		8.864	Tinggi	19.432	Tinggi

Sumber: BPBD Kab. Halmahera Timur 2025

E. Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuhnya batuan. Secara keseluruhan bencana gempabumi memiliki potensi luas bahaya di Kabupaten Halmahera Timur adalah 645.801 Ha yang berada pada kelas tinggi. Penentuan kelas bahaya tingkat Kabupaten diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kecamatan. Berdasarkan Hasil Kajian Resiko Bencana BPBD Kabupaten Halmahera Timur, Potensi penduduk terpapar bencana gempabumi per kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur berada pada kelas tinggi.

Potensi penduduk terpapar berbeda-beda untuk setiap kecamatan terdampak, hal tersebut dilihat berdasarkan jumlah penduduk beraktivitas di kecamatan tersebut. Secara keseluruhan, perhitungan potensi penduduk terpapar bencana gempabumi per kecamatan menghasilkan potensi penduduk terpapar di Kabupaten Halmahera Timur, yaitu 86.260 jiwa. Gambaran selengkapnya sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2. 21 Luas Wilayah Bahaya Gempa Bumi dan Potensi Penduduk Terpapar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur

No	Kecamatan	Bahaya		Potensi Penduduk Terpapar	
		Luas (ha)	Kelas	Jiwa	Kelas
1	Kota Maba	82.455	Tinggi	11.863	Tinggi
2	Maba	40.631	Tinggi	10.131	Tinggi
3	Maba Selatan	47.626	Tinggi	7.444	Tinggi
4	Maba Tengah	52.724	Tinggi	6.498	Tinggi
5	Maba Utara	89.915	Tinggi	8.174	Tinggi
6	Wasile	48.124	Tinggi	7.864	Sedang
7	Wasile Selatan	134.393	Tinggi	12.827	Tinggi
8	Wasile Tengah	47.63	Tinggi	6.087	Tinggi
9	Wasile Timur	32.328	Tinggi	9.977	Sedang
10	Wasile Utara	69.975	Tinggi	5.395	Tinggi
Halmahera Timur		645.801	Tinggi	86.26	Tinggi

Sumber: BPBD Kab. Halmahera Timur 2025

F. Kekeringan

Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Adapun yang dimaksud kekeringan di bidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di lahan pertanian yang ada tanaman (padi, jagung, kedelai dan lain-lain) yang sedang dibudidayakan. Secara keseluruhan bencana kekeringan memiliki potensi luas bahaya di Kabupaten Halmahera Timur dengan total 645.801 Ha yang beradapada kelas tinggi. Penentuan kelas bahaya tingkat Kabupaten diperoleh berdasarkan kelas

bahaya maksimal per kecamatan. Berdasarkan Hasil Kajian Risiko Bencana BPBD Kabupaten Halmahera Timur, Potensi penduduk terpapar bencana kekeringan per kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur berada pada kelas tinggi. Potensi penduduk terpapar berbeda-beda untuk setiap kecamatan terdampak, hal tersebut dilihat berdasarkan banyaknya jumlah penduduk yang beraktivitas di kecamatan tersebut. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar bencana kekeringan per kecamatan menghasilkan potensi penduduk terpapar di Kabupaten Halmahera Timur, yaitu 86.260 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di halaman berikut.

Tabel 2. 22 Luas Wilayah Bahaya Kekeringan dan Potensi Penduduk Terpapar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur

No	Kecamatan	Bahaya		Potensi Penduduk Terpapar	
		Luas (ha)	Kelas	Jiwa	Kelas
1	Kota Maba	82.455	Tinggi	11.863	Tinggi
2	Maba	40.631	Tinggi	10.131	Tinggi
3	Maba Selatan	47.626	Tinggi	7.444	Tinggi
4	Maba Tengah	52.724	Tinggi	6.498	Tinggi
5	Maba Utara	89.914	Tinggi	8.174	Tinggi
6	Wasile	48.124	Tinggi	7.864	Sedang
7	Wasile Selatan	134.393	Tinggi	12.827	Tinggi
8	Wasile Tengah	47.629	Tinggi	6.087	Tinggi
9	Wasile Timur	32.327	Tinggi	9.977	Sedang
10	Wasile Utara	69.974	Tinggi	5.395	Tinggi
Halmahera Timur		645.801	Tinggi	86.26	Tinggi

Sumber: BPBD Kab. Halmahera Timur 2025

G. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar. Secara keseluruhan bencana kebakaran hutan dan lahan memiliki potensi luas bahaya di Kabupaten Halmahera Timur dengan total 542.006 Ha yang berada pada kelas tinggi. Pada bahaya Kebakaran hutan dan lahan tidak terdapat potensi penduduk terpapar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 23 Luas Wilayah Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan dan Potensi Penduduk Terpapar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur

No	Kecamatan	Bahaya		Potensi Penduduk Terpapar	
		Luas (Ha)	Kelas	Jiwa	Kelas
1	Kota Maba	73.711	Sedang	-	-
2	Maba	32.52	Sedang	-	-

3	Maba Selatan	42.069	Sedang	-	-
4	Maba Tengah	46.543	Tinggi	-	-
5	Maba Utara	75.646	Sedang	-	-
6	Wasile	37.696	Tinggi	-	-
7	Wasile Selatan	112.507	Tinggi	-	-
8	Wasile Tengah	39.273	Tinggi	-	-
9	Wasile Timur	23.128	Tinggi	-	-
10	Wasile Utara	58.913	Tinggi	-	-
Halmahera Timur		542.006	Tinggi	-	-

Sumber: BPBD Kab. Halmahera Timur 2025

H. Tanah Longsor

Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Secara keseluruhan bencana tanah longsor memiliki potensi luas bahaya di Kabupaten Halmahera Timur dengan total 456.113 Ha yang berada pada kelas tinggi. Penentuan kelas bahaya tingkat Kabupaten diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kecamatan. Berdasarkan Hasil Kajian Resiko Bencana BPBD Kabupaten Halmahera Timur, Potensi penduduk terpapar bencana tanah longsor per kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur berada pada kelas tinggi. Potensi penduduk terpapar berbeda untuk setiap kecamatan terdampak, hal tersebut dilihat berdasarkan banyaknya jumlah penduduk beraktivitas di kecamatan tersebut. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar bencana tanah longsor per kecamatan menghasilkan potensi penduduk terpapar di Kabupaten Halmahera Timur, yaitu 6.182 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 24 Luas Wilayah Bahaya Tanah Longsor dan Potensi Penduduk Terpapar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur

No	Kecamatan	Bahaya		Potensi Penduduk Terpapar	
		Luas (ha)	Kelas	Jiwa	Kelas
1	Kota Maba	56.04	Sedang	528	Tinggi
2	Maba	32.892	Tinggi	1.054	Sedang
3	Maba Selatan	25.682	Sedang	1.022	Tinggi
4	Maba Tengah	38.53	Sedang	233	Tinggi
5	Maba Utara	68.885	Tinggi	668	Sedang
6	Wasile	34.12	Sedang	18	Sedang
7	Wasile Selatan	99.645	Sedang	970	Tinggi
8	Wasile Tengah	31.82	Sedang	93	Tinggi
9	Wasile Timur	18.877	Sedang	3	Sedang
10	Wasile Utara	49.622	Sedang	1.593	Tinggi
Halmahera Timur		456.113	Tinggi	6.182	Tinggi

Sumber: BPBD Kab. Halmahera Timur 2025

I. Tsunami

Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan ("tsu" berarti lautan, "nami" berarti gelombang ombak). Tsunami dikenal sebagai gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut, seperti gempa bumi. Gangguan ini membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan gelombang mencapai 600–900 km/jam.

Penyebab terjadinya tsunami yang paling umum adalah gempa bumi bawah laut, terutama yang terjadi di zona penunjaman dengan kekuatan 7,0 skala magnitudo momen atau lebih. Penyebab lain tsunami adalah terjadinya longsor, letusan gunung, dan jatuhnya benda besar seperti meteor ke dalam air. Secara geografis, hampir seluruh tsunami terjadi di kawasan Lingkaran Api Pasifik dan kawasan Palung Sumatera di Samudra Hindia. Risiko tsunami dapat dideteksi dengan sistem peringatan dini tsunami yang mengamati gempa-gempa berkekuatan besar dan melakukan analisis data perubahan air laut yang terjadi setelahnya. Wilayah Provinsi Maluku Utara secara umum termasuk kawasan yang rentan terhadap ancaman tsunami.

Secara keseluruhan bencana Tsunami memiliki potensi luas bahaya di Kabupaten Halmahera Timur dengan total 1.974 Ha yang berada pada kelas tinggi. Berdasarkan Hasil Kajian Risiko Bencana BPBD Kabupaten Halmahera Timur, Potensi penduduk terpapar bencana tsunami per kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur berada pada kelas tinggi. Potensi penduduk terpapar berbeda untuk setiap kecamatan terdampak, hal tersebut dilihat berdasarkan banyaknya jumlah penduduk beraktivitas di kecamatan tersebut. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar bencana tsunami per kecamatan menghasilkan potensi penduduk terpapar di Kabupaten Halmahera Timur, yaitu 7.297 jiwa.

Gambaran Luas Wilayah Bahaya Tsunami dan Potensi Penduduk Terpapar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 25 Luas Wilayah Bahaya Tsunami dan Potensi Penduduk Terpapar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur

No	Kecamatan	Bahaya		Potensi Penduduk Terpapar	
		Luas (ha)	Kelas	Jiwa	Kelas
1	Kota Maba	233	Tinggi	988	Tinggi
2	Maba	163	Tinggi	420	Tinggi
3	Maba Selatan	216	Tinggi	893	Tinggi
4	Maba Tengah	103	Tinggi	443	Tinggi
5	Maba Utara	559	Tinggi	2.311	Tinggi
6	Wasile	35	Tinggi	38	Sedang
7	Wasile Selatan	320	Tinggi	1.435	Tinggi
8	Wasile Tengah	78	Tinggi	295	Tinggi
9	Wasile Timur	42	Tinggi	-	-
10	Wasile Utara	226	Tinggi	472	Tinggi
Halmahera Timur		1.974	Tinggi	7.295	Tinggi

Sumber: BPBD Kab. Halmahera Timur 2025

2.1.10. Kondisi Demografi

Berdasarkan registrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Timur menunjukkan tren peningkatan yang cukup stabil. Total penduduk meningkat dari 91.625 jiwa pada tahun 2020 menjadi 100.473 jiwa pada tahun 2024, dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 2,31% per tahun. Pertumbuhan ini sedikit meningkat pada periode 2023–2024 menjadi 2,63%, menandakan adanya akselerasi demografis di beberapa wilayah. Perubahan dinamika ini memiliki implikasi strategis terhadap kebutuhan pelayanan dasar, pengelolaan ruang, serta daya dukung sumber daya .

Tabel berikut menyajikan perkembangan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Halmahera Timur menurut kecamatan berdasarkan registrasi kependudukan tahun 2020-2024

Tabel 2. 26 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)			Laju Pertumbuhan (%)	
		2020	2023	2024	2020-2024	2023-2024
1	Kota Maba	9.232	10.461	10.946	4,35	4,64
2	Maba	12.544	13.194	13.486	1,79	2,21
3	Maba Selatan	8.215	8.523	8.471	0,77	(0,61)
4	Maba Tengah	6.676	6.796	6.853	0,67	0,84
5	Maba Utara	8.509	9.202	9.663	2,99	5,01
6	Wasile	10.582	11.311	11.585	2,29	2,42
7	Wasile Selatan	13.27	14.514	15.145	3,36	4,35
8	Wasile Timur	11.431	11.979	12.085	1,40	0,88
9	Wasile Tengah	5.968	6.327	6.564	2,45	3,75
10	Wasile Utara	5.198	5.588	5.675	2,23	1,56
Halmahera Timur		91.625	97.895	100.473	2,31	2,63

Sumber : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Timur (2025), diolah

Kecamatan Kota Maba mencatat laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2023-2024 sebesar 4,64%, melanjutkan tren lima tahunan yang juga tinggi, yaitu 4,35%. Lonjakan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh peningkatan fungsi kawasan sebagai pusat administrasi dan layanan publik, serta pertumbuhan sektor jasa dan permukiman yang lebih cepat dibanding kecamatan lainnya. Kecamatan Maba Utara juga menunjukkan pertumbuhan signifikan dengan laju mencapai 5,01% pada 2023-2024, mencerminkan dinamika migrasi masuk atau perluasan kawasan permukiman dan aktivitas ekonomi yang mengundang konsentrasi penduduk baru, termasuk di kawasan eks transmigrasi.

Di sisi lain, Kecamatan Maba Selatan justru mencatat penurunan jumlah penduduk secara tahunan pada 2023-2024 dengan laju pertumbuhan minus 0,61%. Meskipun selama periode 2020-2024 masih tercatat mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,77%, angka tersebut mengindikasikan kecenderungan stagnasi atau bahkan potensi migrasi penduduk keluar wilayah. Fenomena ini memerlukan perhatian lebih lanjut, terutama terkait dengan ketersediaan layanan dasar, aksesibilitas infrastruktur, atau tekanan terhadap sumber daya lokal yang mungkin memengaruhi daya tarik kawasan.

Kecamatan-kecamatan lain seperti Wasile Selatan, Wasile Tengah, dan Kota Maba menunjukkan laju pertumbuhan tahunan di atas rata-rata kabupaten, mencerminkan adanya konsentrasi pertumbuhan di kawasan tengah dan selatan. Sementara itu, wilayah seperti Kecamatan Wasile Timur dan Wasile Utara menunjukkan laju pertumbuhan yang lebih moderat, meskipun tetap positif. Komposisi dan pola ini mencerminkan adanya diferensiasi spasial dalam dinamika pertumbuhan penduduk.

Komposisi sebaran penduduk Kabupaten Halmahera Timur dalam lima tahun terakhir masih menunjukkan kecenderungan yang relatif seimbang dibandingkan tahun 2020, dengan dominasi tetap berada pada beberapa kecamatan utama. Kecamatan Wasile Selatan menempati proporsi tertinggi dengan kontribusi 15,07% terhadap total populasi kabupaten, diikuti oleh Kecamatan Maba sebesar 13,42%, dan Wasile Timur sebesar 12,03%. Ketiga kecamatan ini secara kolektif menampung lebih dari 40% populasi Halmahera Timur, mencerminkan posisi strategis ketiganya dalam struktur spasial dan pelayanan dasar wilayah. Posisi ini juga menegaskan bahwa pusat-pusat populasi terkonsentrasi di wilayah dengan aksesibilitas relatif lebih baik, kedekatan terhadap jalur logistik, serta basis ekonomi yang lebih kuat, khususnya dalam bidang pertanian, perdagangan lokal, dan jasa.

Sementara itu, kecamatan-kecamatan seperti Wasile Utara, Wasile Tengah, dan Maba Tengah tetap berada pada posisi terbawah dari sisi distribusi penduduk, masing-masing hanya menyumbang sekitar 5,65%, 6,53%, dan 6,82% dari total penduduk kabupaten pada tahun 2024. Hal ini tidak hanya mencerminkan keterbatasan akses dan belum meratanya infrastruktur dasar di wilayah-wilayah tersebut, tetapi juga menggambarkan tantangan demografis yang bersifat struktural-yakni tingkat ketertarikan pemukiman yang rendah, ketersediaan lahan dengan risiko bencana atau degradasi lingkungan, serta peluang ekonomi lokal yang belum berkembang optimal. Meskipun terdapat peningkatan penduduk secara absolut di hampir seluruh kecamatan, namun proporsi terhadap total penduduk kabupaten tetap stagnan atau menurun pada beberapa wilayah.

Dari perspektif kepadatan penduduk, terjadi peningkatan rerata dari 14,12 jiwa/km² pada tahun 2020 menjadi 15,48 jiwa/km² pada tahun 2024. Kecamatan Wasile menempati posisi tertinggi dengan kepadatan mencapai 45,66 jiwa/km², yang mengindikasikan semakin intensifnya pemanfaatan ruang di wilayah tersebut. Kepadatan yang tinggi ini berimplikasi pada perlunya penguatan tata kelola ruang, pengendalian laju konversi lahan, dan penyediaan layanan publik yang lebih terfokus.

Sementara itu, Kecamatan Maba dan Wasile Timur juga mencatatkan kenaikan kepadatan yang cukup signifikan, masing-masing dari 29,04 ke 31,22 dan dari 26,51 ke 28,03 jiwa/km², mencerminkan potensi pertumbuhan urban kecil di luar Kota Maba. Kota Maba sendiri mengalami peningkatan kepadatan dari 9,20 menjadi 10,91 jiwa/km², mencerminkan tren urbanisasi yang meskipun belum masif, tetapi terus menguat seiring dengan konsolidasi peran sebagai pusat administratif, pemerintahan, dan pelayanan dasar tingkat kabupaten. Sebaliknya, kepadatan penduduk di kecamatan-kecamatan seperti Maba Utara, Wasile Utara, dan Maba Tengah masih berada di bawah 10 jiwa/km², menandakan dominasi karakteristik rural yang kuat di wilayah tersebut

**Tabel 2. 27 Distribusi dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024**

No	Kecamatan	Distribusi (persen)			Kepadatan (jiwa/Km ²)		
		2020	2023	2024	2020	2023	2024
1	Kota Maba	10,08	10,69	10,89	9,20	10,98	10,91
2	Maba	13,69	13,48	13,42	29,04	30,34	31,22
3	Maba Selatan	8,97	8,71	8,43	16,30	16,92	16,80
4	Maba Tengah	7,29	6,94	6,82	10,25	10,42	10,52
5	Maba Utara	9,29	9,4	9,62	7,61	8,23	8,64
6	Wasile	11,55	11,55	11,53	41,71	44,64	45,66
7	Wasile Selatan	14,48	14,83	15,07	13,22	13,46	15,08
8	Wasile Timur	12,48	12,24	12,03	26,51	27,79	28,03

No	Kecamatan	Distribusi (persen)			Kepadatan (jiwa/Km ²)		
		2020	2023	2024	2020	2023	2024
9	Wasile Tengah	6,51	6,46	6,53	12,15	12,91	13,36
10	Wasile Utara	5,67	5,71	5,65	8,66	9,31	9,45
Halmahera Timur		100,0	100,0	100,0	14,12	15,02	15,48

Sumber : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Timur (2025), diolah

Ketimpangan kepadatan ini menciptakan tantangan perencanaan kewilayahan yang kompleks. Di satu sisi terdapat wilayah-wilayah yang mengalami tekanan spasial dan memerlukan pengendalian pembangunan fisik, di sisi lain terdapat wilayah dengan pemanfaatan ruang yang sangat rendah namun membutuhkan intensifikasi pelayanan dan pengembangan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, wilayah-wilayah berpenduduk jarang seharusnya tidak hanya diposisikan sebagai beban pelayanan, melainkan sebagai potensi strategis untuk pengembangan fungsi-fungsi ekologis, ketahanan pangan, dan cadangan ruang hidup masa depan. Dinamika distribusi dan kepadatan penduduk ini harus menjadi pijakan penting dalam perumusan strategi pembangunan wilayah Kabupaten Halmahera Timur ke depan.

Berdasarkan jenis kelamin, komposisi penduduk Kabupaten Halmahera Timur tahun 2024 menunjukkan dominasi penduduk laki-laki yang cukup konsisten di seluruh kecamatan. Dengan jumlah penduduk total mencapai 100.473 jiwa, rasio jenis kelamin secara keseluruhan tercatat sebesar 107,08, yang berarti terdapat sekitar 107 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Kecenderungan ini mengindikasikan bahwa struktur penduduk daerah ini masih dipengaruhi oleh mobilitas penduduk laki-laki, terutama di wilayah dengan aktivitas pertambangan, pertanian, dan perkebunan yang lebih tinggi.

Kecamatan Wasile Selatan memiliki jumlah penduduk terbesar (15.145 jiwa) sekaligus mencatat rasio jenis kelamin yang relatif tinggi sebesar 109,68, mencerminkan tingginya konsentrasi tenaga kerja laki-laki. Rasio tertinggi tercatat di Kecamatan Maba Utara (111,77), menunjukkan kemungkinan dominasi tenaga kerja laki-laki di sektor tertentu. Sementara itu, rasio terendah ditemukan di Kecamatan Wasile Tengah (102,59), meskipun masih menunjukkan dominasi laki-laki. Kota Maba sebagai pusat administrasi mencatat jumlah penduduk 10.946 jiwa dengan rasio 104,87, yang relatif seimbang jika dibandingkan dengan kecamatan lain.

Tabel 2. 28 Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah (jiwa)	Jenis Kelamin (jiwa)		Rasio L/P
			Laki-laki	Perempuan	
1	Kota Maba	10.946	5.603	5.343	104,87
2	Maba	13.486	7.051	6.435	109,57
3	Maba Selatan	8.471	4.431	4.040	109,68
4	Maba Tengah	6.853	3.520	3.333	105,61
5	Maba Utara	9.663	5.100	4.563	111,77
6	Wasile	11.585	5.984	5.601	106,84
7	Wasile Selatan	15.145	7.922	7.223	109,68
8	Wasile Timur	12.085	6.180	5.905	104,66
9	Wasile Tengah	6.564	3.324	3.240	102,59
10	Wasile Utara	5.675	2.946	2.729	107,95
Halmahera Timur		100.473	51.954	48.519	107,08

Sumber : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Timur (2025), diolah

Kesenjangan komposisi gender dalam struktur jumlah penduduk ini penting untuk diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, khususnya dalam penyediaan layanan dasar yang responsif gender seperti pendidikan, kesehatan reproduksi, dan pemberdayaan ekonomi. Di sisi lain, ketimpangan ini juga bisa menjadi cerminan tidak langsung dari preferensi lapangan kerja atau karakteristik migrasi yang didorong oleh sektor-sektor ekonomi tertentu. Oleh karena itu, perspektif distribusi umur akan sangat bermanfaat dalam menilai ketahanan demografi daerah secara lebih menyeluruh.

Struktur umur penduduk Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2024 menggambarkan kondisi demografis yang masih relatif muda namun mulai menunjukkan tanda-tanda transisi menuju struktur yang lebih seimbang. Penduduk usia 0–14 tahun mencapai sekitar 25,14% dari total populasi, yang didominasi oleh kelompok usia 5–9 tahun (9,47%) dan 10–14 tahun (9,93%). Komposisi ini menandakan bahwa tingkat ketergantungan anak masih cukup tinggi, sehingga kebijakan pembangunan daerah perlu tetap memberikan perhatian besar terhadap pemenuhan kebutuhan dasar anak, khususnya akses pendidikan, kesehatan ibu dan anak, serta pemenuhan gizi dan perlindungan sosial bagi keluarga dengan anak-anak usia dini. Angka ini juga mengindikasikan tingginya kebutuhan akan kapasitas lembaga pendidikan dasar dan layanan kesehatan primer di tahun-tahun mendatang.

Sementara itu, penduduk usia produktif (15–64 tahun) mencapai sekitar 68,94% dari total penduduk, mencerminkan peluang besar bagi pemanfaatan bonus demografi. Kelompok usia remaja dan dewasa muda (15–24 tahun) sendiri mencakup hampir 20% populasi, yang menunjukkan potensi tenaga kerja baru yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi lokal jika ditopang oleh sistem pendidikan menengah dan tinggi yang adaptif serta pasar kerja yang inklusif. Kelompok usia kerja aktif lainnya, seperti usia 25–29 tahun (9,17%) dan 30–34 tahun (8,33%), juga menunjukkan proporsi signifikan, yang dapat menjadi motor pembangunan daerah apabila ditopang oleh investasi pada pelatihan vokasi, program kewirausahaan, serta pengembangan ekonomi lokal yang mampu menyerap angkatan kerja usia muda.

Di sisi lain, penduduk usia 65 tahun ke atas mencapai sekitar 4,35%, yang masih tergolong rendah namun penting untuk dicermati seiring bertambahnya usia harapan hidup dan peningkatan akses layanan kesehatan. Komposisi usia lanjut ini terdiri dari kelompok 65–69 tahun (2,02%), 70–74 tahun (1,05%), dan 75 tahun ke atas (1,28%). Keberadaan kelompok usia lanjut yang mulai menanjak menuntut kesiapan sistem sosial dan layanan publik dalam menghadapi tantangan penuaan penduduk di masa mendatang. Gambar berikut menyajikan piramida penduduk Kabupaten Halmahera Timur tahun 2024.

Tabel 2. 29 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Berdasarkan Registrasi Kependudukan
Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024

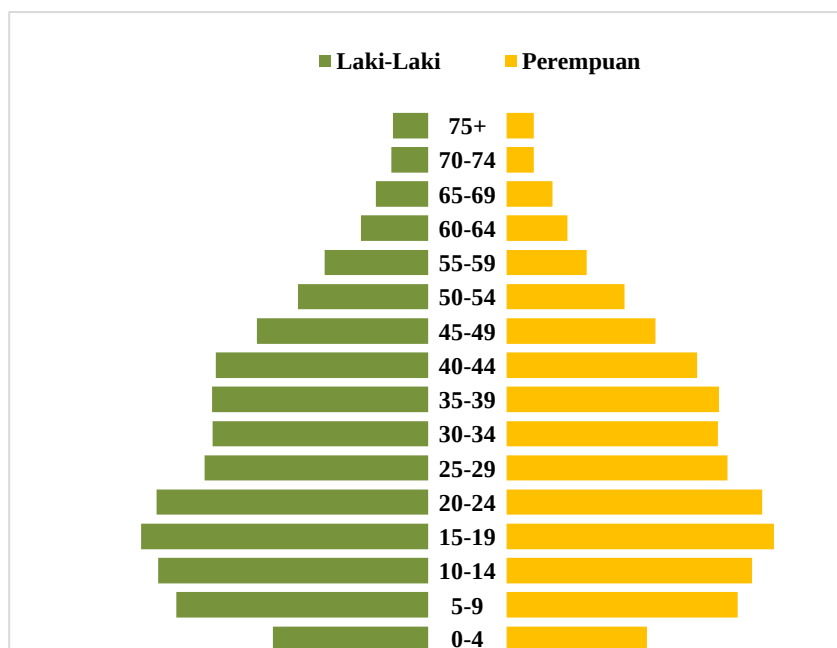
Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
0-4	2,972	2,697	5,669	91%
5-9	4,816	4,541	9,357	94%
10-14	5,153	4,654	9,807	90%
15-19	5,481	5,006	10,487	91%
20-24	5,191	4,938	10,129	95%
25-29	4,269	4,422	8,691	104%
30-34	4,119	4,109	8,228	100%
35-39	4,127	3,991	8,118	97%
40-44	4,058	3,805	7,863	94%
45-49	3,270	3,058	6,328	94%
50-54	2,491	2,312	4,803	93%
55-59	1,979	1,680	3,659	85%
60-64	1,290	1,213	2,503	94%
65-69	999	937	1,936	94%
70-74	705	566	1,271	80%
75+	673	591	1,264	88%
Jumlah	51,593	48,520	100,113	94%

Sumber : BPS Kab. Halmahera Timur (2025), diolah

Dengan komposisi penduduk sebagaimana tersaji, maka rasio ketergantungan di Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2024 sebesar 94%. Berdasarkan definisinya, rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 75 tahun ke atas (keduanya disebut dengan usia non produktif) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-75 tahun (usia produktif, yang dinyatakan dalam persen). Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Dalam konteks ini, semakin tinggi *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Di samping itu, melalui rasio ketergantungan juga dapat diketahui berapa persen penduduk yang berpotensi sebagai modal dalam pembangunan yaitu penduduk usia produktif atau yang berusia 15-75 tahun.

Berdasarkan rasio ketergantungan 94% artinya bahwa pada tahun 2024 untuk setiap 100 orang di Kabupaten Halmahera Timur yang berusia kerja (dianggap produktif) masih mempunyai tanggungan sebanyak 38-39 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Secara umum besaran rasio ketergantungan dapat menunjukkan beban ekonomi bagi penduduk umur produktif (usia kerja) di Kabupaten Halmahera Timur yang menanggung penduduk pada umur belum produktif dan tidak produktif.

Gambaran lengkap piramida penduduk Kabupaten Halmahera Timur tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 2. 10 Piramida Penduduk
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024**

(Sumber: Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Timur, 2025, diolah)

Sebagian besar penduduk Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2024 tercatat berdasarkan registrasi kependudukan, beragama Islam yaitu dengan proporsi 65,16 persen, kemudian Kristen Protestan sebesar 34,03 persen, serta Kristen Katolik sebesar 0,78 persen. Tercatat setengah dari jumlah Kecamatan memiliki proporsi penduduk yang lebih dari setengahnya beragama Islam, yaitu Kecamatan Kota Maba, Kecamatan Maba Selatan, Kecamatan Maba Tengah, Kecamatan Wasile, dan Kecamatan Wasile Timur.

Tabel berikut menyajikan komposisi penduduk berdasarkan agama yang dianut menurut kecamatan pada tahun 2024.

**Tabel 2. 30 Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama Menurut
Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024**

No	Kecamatan	Proporsi (persen)				
		Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
1	Kota Maba	90,15	9,27	0,50	-	0,08
2	Maba	49,43	50,51	0,06	-	-
3	Maba Selatan	99,68	0,14	0,18	-	-
4	Maba Tengah	70,06	28,52	1,42	-	-
5	Maba Utara	49,26	46,52	4,08	0,05	0,09
6	Wasile	91,92	7,82	0,26	-	-
7	Wasile Selatan	43,81	56,15	0,01	-	0,03
8	Wasile Timur	85,64	14,21	0,11	0,02	0,02
9	Wasile Tengah	36,57	63,42	0,02	-	-
10	Wasile Utara	15,61	81,53	2,86	-	-
Halmahera Timur		65,16	34,03	0,78	0,01	0,02

Sumber : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Timur (2025), diolah

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan struktur dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Timur dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu. PDRB merupakan nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. PDRB maupun agregat turunannya disajikan dalam dua versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu.

Nilai PDRB Kabupaten Halmahera Timur atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2024 mencapai 5,40 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 0,15 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2023. Kenaikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya nilai produksi pada beberapa lapangan usaha dan karena adanya faktor inflasi. Sedangkan nilai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, nilai PDRB pada tahun 2024 sebesar 3,32 triliun rupiah, atau secara riil mengalami peningkatan sebesar 0,12 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2023 atau mengalami pertumbuhan sebesar 3,64 persen pada tahun 2024. Hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan pada beberapa sektor/ lapangan usaha, seperti pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta pada Administrasi Pemerintahan.

Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2024 dihasilkan oleh sektor/ lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian, yaitu sebesar 42,40 persen (menurun dari nilai kontribusi sebesar 45,53 persen pada tahun 2023), selanjutnya adalah pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sebesar 17,14 persen (meningkat dari nilai kontribusi sebesar 16,19 persen pada tahun 2023), disusul oleh sektor/ lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,20 persen (meningkat dari nilai kontribusi sebesar 10,60 persen pada tahun 2023). Berikutnya adalah sektor/ lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan

dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 10,84 persen (meningkat dari nilai kontribusi sebesar 9,78 persen pada tahun 2023) dan sektor/ lapangan usaha Konstruksi sebesar 8,07 persen (menurun dari nilai kontribusi sebesar 8,21 persen pada tahun 2023).

Tabel-tabel di halaman berikut menyajikan perkembangan nilai PDRB ADHB Kabupaten Halmahera Timur serta kontribusi masing-masing lapangan usaha dan komponen pengeluaran dalam kurun tahun 2020-2024.

**Tabel 2. 31 PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024**

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHB (Milyar Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	729,76	760,33	792,78	849,43	924,59
2	Pertambangan dan Penggalian	1.113,13	1.419,40	1.515,34	2.388,29	2.287,98
3	Industri Pengolahan	129,02	111,03	116,78	126,33	135,67
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,42	1,51	1,79	5,58	5,98
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,14	0,14	0,16	0,16	0,19
6	Konstruksi	319,86	357,13	385,84	430,75	435,66
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	458,82	480,93	535,07	555,93	604,39
8	Transportasi dan Pergudangan	58,97	61,05	73,11	82,49	91,82
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	6,63	6,83	7,21	7,43	7,82
10	Informasi dan Komunikasi	74,22	78,37	80,85	83,56	86,54
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	43,92	49,12	53,60	55,85	65,09
12	Real Estate	2,29	2,34	2,40	2,47	2,37
13	Jasa Perusahaan	10,46	10,65	11,24	11,66	13,00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	479,42	472,87	493,64	512,87	584,75
15	Jasa Pendidikan	69,07	71,03	73,84	80,18	92,03
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	34,04	37,04	38,19	41,33	45,35
17	Jasa lainnya	10,11	10,54	11,02	11,47	12,65
PDRB		3.541,28	3.930,32	4.192,86	5.245,78	5.395,88

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Timur, 2025, diolah



**Tabel 2. 32 PDRB ADHB Menurut Pengeluaran
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024**

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHB (Milyar Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Konsumsi Rumah Tangga	1.562,16	1.622,40	1.734,85	1.865,50	1.997,74
2	Konsumsi LNPRT	87,27	89,39	96,67	113,04	129,85
3	Konsumsi Pemerintah	890,34	905,32	1.030,34	1.262,76	1.711,37
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.179,66	1.472,07	1.461,46	2.230,53	2.262,55
5	Perubahan Inventori	3,14	7,13	14,06	16,45	74,52
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	175,02	165,99	116,4	209,71	780,15
PDRB		3.348,59	3.541,28	3.930,32	4.192,86	5.245,78

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Timur, 2025, diolah

**Tabel 2. 33 Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024**

No	Lapangan Usaha	Distribusi PDRB ADHB (persen)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20,61	19,35	18,91	16,19	17,14
2	Pertambangan dan Penggalan	31,43	36,11	36,14	45,53	42,4
3	Industri Pengolahan	3,64	2,82	2,76	2,41	2,51
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,11	0,11
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Limbah dan Daur Ulang	0	0	0	0	0
6	Konstruksi	9,03	9,09	9,2	8,21	8,07
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,96	12,24	12,76	10,6	11,20
8	Transportasi dan Pergudangan	1,67	1,55	1,74	1,57	1,70
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	0,19	0,17	0,17	0,14	0,15
10	Informasi dan Komunikasi	2,1	1,99	1,93	1,59	1,60
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,24	1,25	1,28	1,06	1,21
12	Real Estate	0,06	0,06	0,06	0,05	0,04
13	Jasa Perusahaan	0,30	0,27	0,27	0,22	0,24
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	13,54	12,03	11,77	9,78	10,84
15	Jasa Pendidikan	1,95	1,81	1,76	1,53	1,71
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,96	0,94	0,91	0,79	0,84
17	Jasa lainnya	0,29	0,27	0,26	0,22	0,23
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

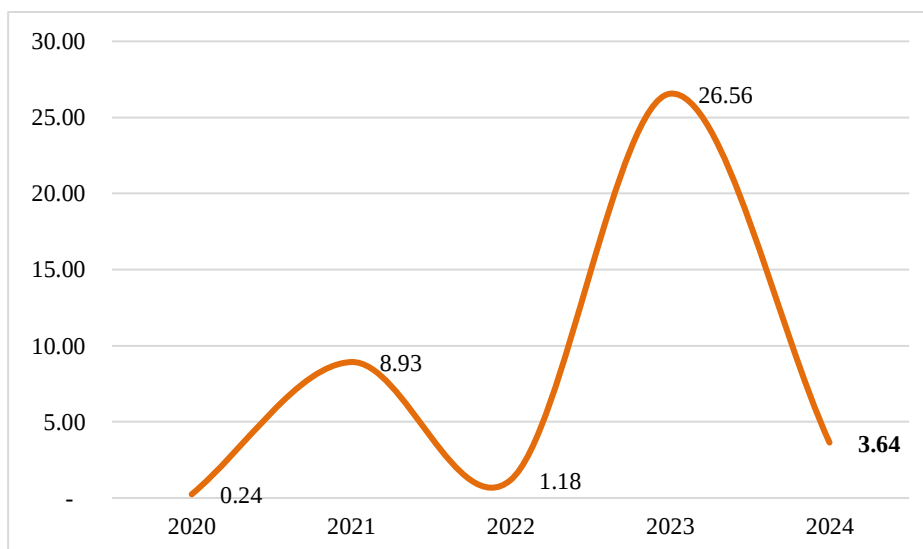
Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Timur, 2025, diolah

**Tabel 2. 34 Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024**

No	Lapangan Usaha	distribusi PDRB ADHB (persen)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Konsumsi Rumah Tangga	44,11	41,28	41,38	35,56	37,02
2	Konsumsi LNPRT	2,46	2,27	2,31	2,15	2,41
3	Konsumsi Pemerintah	25,14	23,03	24,57	24,07	31,72
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	33,31	37,45	34,86	42,52	41,93
5	Perubahan Inventori	0,09	0,18	0,34	0,31	1,38
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	4,94	4,22	2,78	4,00	14,46
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Timur, 2025, diolah

PDRD ADHK Berdasarkan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, nilai PDRB Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2024 mengalami peningkatan. Ini dipengaruhi oleh meningkatnya nilai produksi pada beberapa sektor/ lapangan usaha yang sudah tidak terpengaruh oleh faktor kenaikan harga/ inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Halmahera Timur atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, pada tahun 2024 adalah sebesar 3,32 triliun rupiah. Secara riil, angka ini meningkat sebesar 116,53 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2024 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,64 persen, melambat secara signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 yang sebesar 26,56 persen. Dalam kurun lima tahun terakhir, perekonomian Kabupaten Halmahera Timur mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam lima tahun terakhir atau bahkan dalam sepuluh tahun terakhir terjadi di tahun 2023, dengan laju sebesar 26,56 persen, disebabkan oleh pertumbuhan yang sangat tinggi pada sektor/ lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian. Akan tetapi, di tahun 2024 pertumbuhan kembali melambat menjadi 3,64 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi paling rendah terjadi pada tahun 2020, yaitu hanya sebesar 0,24 persen yang disebabkan oleh dampak pandemi covid-19.



Gambar 2. 11 Tren Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024

(Sumber: BPS Kab. Halmahera Timur, 2025, diolah)

Salah satu yang mendorong meningkat-pesatnya sektor/ lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian adalah meningkatnya aktivitas produksi tambang ore nikel yang dilakukan oleh beberapa perusahaan tambang nikel di Kabupaten Halmahera Timur. Penambahan perusaha-perusahaan tambang nikel baru yang

beroperasi dan mendapatkan izin penambangan selama tahun 2023, seperti PT. Indobumi Nikel di Desa Dakaino, Kec. Wasile Timur, PT. Alngit Raya di Desa Wailukum, Kec. Kota Maba dan lain sebagainya. Selain itu juga, adanya penambahan/ pembukaan akses pelabuhan/jetty baru selama tahun 2023 menjadi fenomena bahwa produksi ore nikel selama tahun 2023 yang diekspor ke luar daerah meningkat pesat dibandingkan tahun sebelumnya dan mengakibatkan di tahun 2024 produksi di sektor pertambangan nilainya tetap besar walaupun lajunya melambat. Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 ini disebabkan oleh dampak pandemi covid-19, yang memberikan dampak terhadap menurunnya aktivitas produksi pada beberapa sektor/ lapangan usaha. Seperti pada sektor/ lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta pada Jasa Perusahaan yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif selama tahun 2020. Kebijakan pembatasan aktivitas perekonomian ke luar daerah menjadi alasan utama melambatnya perekonomian pada tahun 2020 ini, karena hasil produksi dari beberapa sektor/ lapangan usaha tidak dapat diperdagangkan atau dihasilkan.

**Tabel 2. 35 PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024**

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHK (milyar)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	455,84	468,48	475,76	490,86	510,97
2	Pertambangan dan Penggalian	679,45	856,47	842,94	1.469,47	1.494,04
3	Industri Pengolahan	96,15	82,00	82,29	83,86	87,01
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,05	1,12	1,27	3,94	4,15
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13
6	Konstruksi	209,19	224,14	229,68	244,15	243,20
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	323,66	334,98	355,67	358,88	386,85
8	Transportasi dan Pergudangan	38,23	38,26	41,79	43,82	46,8
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	4,84	4,95	5,12	5,18	5,20
10	Informasi dan Komunikasi	61,8	65,06	66,55	66,64	67,38
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	29,50	31,22	31,55	32,31	37,76
12	Real Estate	1,67	1,70	1,71	1,73	1,62
13	Jasa Perusahaan	7,14	7,14	7,39	7,45	7,89
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	311,36	306,93	308,53	312,08	337,71
15	Jasa Pendidikan	47,40	47,930	48,88	50,29	55,24
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	22,59	24,4	24,92	25,79	27,13
17	Jasa lainnya	7,22	7,47	7,75	7,85	8,34
PDRB		2.297,20	2.502,40	2.532,00	3.204,40	3.320,94

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Timur, 2025, diolah



**Tabel 2. 36 PDRB ADHK Menurut Pengeluaran
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024**

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHK (milyar)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Konsumsi Rumah Tangga	1.026,47	1.031,67	1.077,40	1.109,75	1.165,36
2	Konsumsi LNPRT	54,39	54,86	57,10	61,87	67,92
3	Konsumsi Pemerintah	455,46	452,42	497,73	588,37	792,81
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	770,55	961,13	917,67	1.355,79	1.359,96
5	Perubahan Inventori	-2,3	5,19	-4,04	-4,13	35,67
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-7,34	-2,91	-13,94	92,75	-100,78
PDRB		2.297,20	2.502,36	2.531,92	3.204,40	3.320,94

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Timur, 2025, diolah

**Tabel 2. 37 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024**

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (persen)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,63	2,77	1,55	3,17	4,1
2	Pertambangan dan Penggalian	-1,77	26,05	-1,58	74,33	1,67
3	Industri Pengolahan	-12,13	-14,72	0,35	1,90	3,77
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,44	6,80	13,27	210,73	5,51
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Limbah dan Daur Ulang	1,02	4,90	7,23	3,76	6,92
6	Konstruksi	-6,06	7,15	2,47	6,30	-0,39
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,01	3,50	6,18	0,90	7,79
8	Transportasi dan Pergudangan	-10,42	0,07	9,23	4,86	6,81
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	-5,93	2,31	3,48	1,11	0,38
10	Informasi dan Komunikasi	4,32	5,28	2,29	0,14	1,1
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,45	5,82	1,08	2,38	15,33
12	Real Estate	2,49	1,74	0,59	0,93	-5,98
13	Jasa Perusahaan	-0,82	-0,03	3,5	0,86	5,86
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	7,78	-1,42	0,52	1,15	8,21
15	Jasa Pendidikan	0,88	1,12	1,98	2,88	9,85
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,08	7,98	2,13	3,52	5,19
17	Jasa lainnya	2,00	3,44	3,75	1,26	6,28
PDRB		0,24	8,93	1,18	26,56	3,64

Sumber : BPS BPS Kabupaten Halmahera Timur, 2025, diolah

**Tabel 2. 38 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024**

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (persen)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Konsumsi Rumah Tangga	1,33	0,51	4,43	3	5,01
2	Konsumsi LNPRT	-3,51	0,86	4,08	8,36	9,78
3	Konsumsi Pemerintah	-6,92	-0,67	10,01	18,21	34,75
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	-37,48	24,73	-4,52	47,74	0,31
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (persen)				
		2020	2021	2022	2023	2024
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
	PDRB	0,24	8,93	1,18	26,56	3,64

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Timur, 2025, diolah

2.2.2. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan (PDRB ADHK) per kapita Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp. 33.810 atau mengalami kenaikan sebesar 1,88 persen dibandingkan tahun 2023. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya PDRB ADHK per Kapita Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2022 hingga 2024 sudah berada di bawah rata-rata provinsi dikarenakan akselerasi dari kab/kota yang lain meski tren di Kabupaten Halmahera Timur juga menunjukkan kenaikan. Perkembangan dan laju pertumbuhan Pendapatan per Kapita Kabupaten Halmahera Timur yang dibandingkan dengan kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 serta rata-rata pada tingkatan provinsi tersaji dalam tabel-tabel berikut.

**Tabel 2. 39 Pendapatan per Kapita
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024**

No	Kabupaten/Kota	PDRB ADHK per Kapita (Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Halmahera Barat	11.613	11.581	11.823	11.966	12.545
2	Halmahera Tengah	35.445	90.599	179.374	250.036	289.772
3	Kepulauan Sula	15.811	15.791	16.150	16.375	17.255
4	Halmahera Selatan	23.118	25.923	30.937	38.902	47.461
5	Halmahera Utara	18.966	19.275	19.740	19.671	19.788
6	Halmahera Timur	25.133	26.860	26.686	33.187	33.810
7	Pulau Morotai	14.229	14.204	14.384	14.488	15.000
8	Pulau Taliabu	17.211	19.104	19.483	19.705	20.301
9	Ternate	34.922	35.441	36.888	38.288	41.205
10	Tidore Kepulauan	17.831	17.763	18.084	18.294	19.219
	Maluku Utara	21.915,0	25.191,0	30.526,5	36.267,3	40.684,2

Sumber : BPS; BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2025, diolah

**Tabel 2. 40 Laju Pertumbuhan Pendapatan per Kapita
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024**

No	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK per Kapita (persen)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Halmahera Barat	11.613	11.581	11.823	11.966	12.545
2	Halmahera Tengah	35.445	90.599	179.374	250.036	289.772
3	Kepulauan Sula	15.811	15.791	16.150	16.375	17.255
4	Halmahera Selatan	23.118	25.923	30.937	38.902	47.461
5	Halmahera Utara	18.966	19.275	19.740	19.671	19.788
6	Halmahera Timur	25.133	26.860	26.686	33.187	33.810
7	Pulau Morotai	14.229	14.204	14.384	14.488	15.000

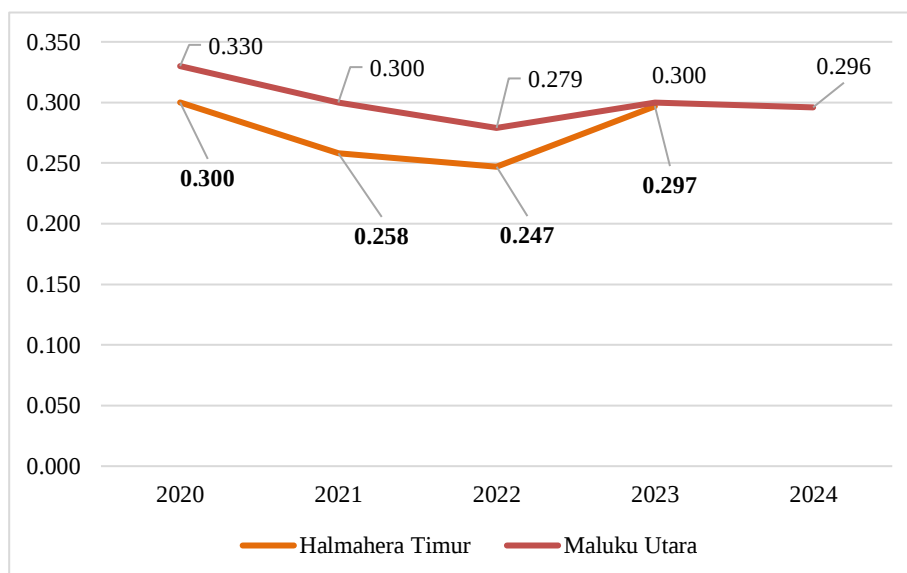
8	Pulau Taliabu	17.211	19.104	19.483	19.705	20.301
9	Ternate	34.922	35.441	36.888	38.288	41.205
10	Tidore Kepulauan	17.831	17.763	18.084	18.294	19.219
Maluku Utara		21.915,0	25.191,0	30.526,5	36.267,3	40.684,2

Sumber : BPS; BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2025, diolah

2.2.3. Kesenjangan Pendapatan (Indeks Rasio Gini)

Indeks Gini merupakan salah satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan atau pengeluaran antar masyarakat. Angka ini dapat digunakan untuk memperkuat fenomena yang telah diuraikan sebelumnya terkait pendapatan per kapita berdasarkan PDRB. Pada prinsipnya jika sebuah garis pemerataan membentuk garis lurus maka bernilai “0” atau disebut pemerataan sempurna, yang dapat menggambarkan pemerataan pendapatan masyarakat. Namun jika membentuk garis tidak lurus maka dianggap sebagai ketimpangan pemerataan, dengan nilai “1” sebagai ketimpangan sempurna. Jika angka koefisien mendekati “0” berarti tingkat pemerataan semakin baik, dan sebaliknya jika mendekati angka “1” maka menunjukkan ketimpangan pemerataan masyarakat.

Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Halmahera Timur dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara selama kurun waktu 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam Gambar berikut.



Gambar 2. 12 Rasio Gini
Kabupaten Halmahera Timur dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024
 (Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2025, diolah)

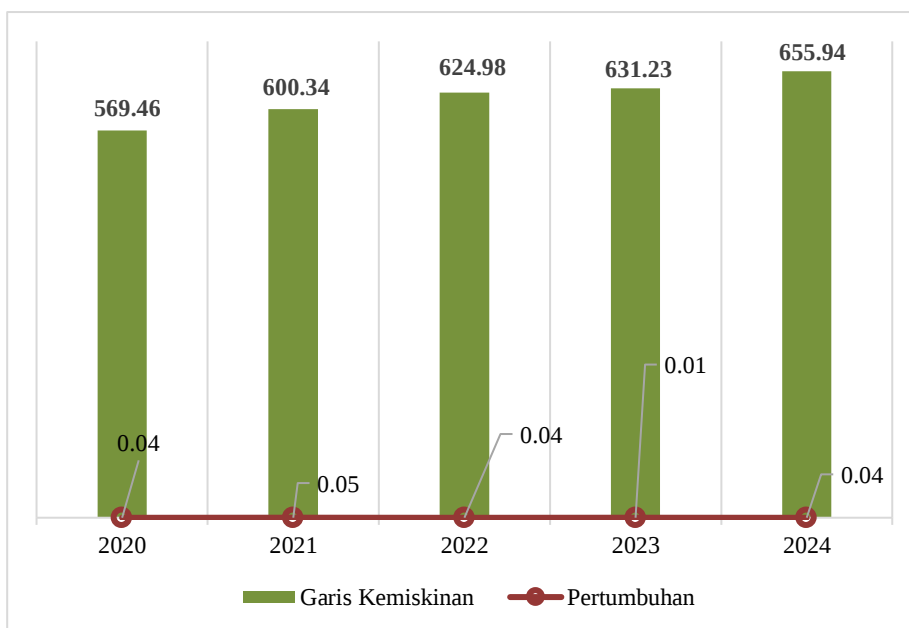
Dari Gambar, Indeks Gini Provinsi Maluku Utara cenderung berfluktuasi selama kurun tahun 2020-2024 sebesar 0,330 di tahun 2020, lalu menurun menjadi

0,300 pada tahun 2021 dan turun kembali diangka 0,279 pada tahun 2022 lalu kemudian berfluktuasi kembali menjadi 0,300 dan 0,296 pada tahun 2023 dan 2024. Sementara indeks rasio gini Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2024 belum didapatkan data pasti namun tercatat sebesar 0,297 pada tahun 2023. Secara keseluruhan, baik Indeks Rasio Gini Provinsi Maluku Utara maupun Kabupaten Halmahera Timur masih berada pada rentang kategori ketimpangan rendah ($<0,4$).

2.2.4. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dari pendekatan ini maka indikator kemiskinan mencakup: **Pertama**, *Head Count Index* (HCI = P0), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK); **Kedua**, Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* = P1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan; **Ketiga**, Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index* = P2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Garis Kemiskinan Kabupaten Halmahera Timur terus mengalami kenaikan. Hal ini salah satunya disebabkan oleh inflasi yang menyebabkan kenaikan harga komoditi pembentuk garis kemiskinan yang meliputi komoditi makanan dan komoditi non makanan. Pada tahun 2024, garis kemiskinan (GK) Kabupaten Halmahera Timur sebesar Rp. 655,94 ribu perkapita/bulan atau hanya tumbuh sebesar 1,00 persen dari tahun 2023 yang sebesar Rp. 631,23 ribu perkapita/bulan. Garis kemiskinan Kabupaten Halmahera Timur merupakan yang tertinggi kedua di Provinsi Maluku Utara setelah Kota Ternate. Kondisi dalam lima tahun terakhir ini belum mengalami perubahan dimana Garis Kemiskinan Kabupaten Halmahera Timur merupakan yang tertinggi kedua di Provinsi Maluku Utara. Tren garis kemiskinan Kabupaten Halmahera Timur selama lima tahun terakhir sebagaimana tersaji dalam Gambar berikut.

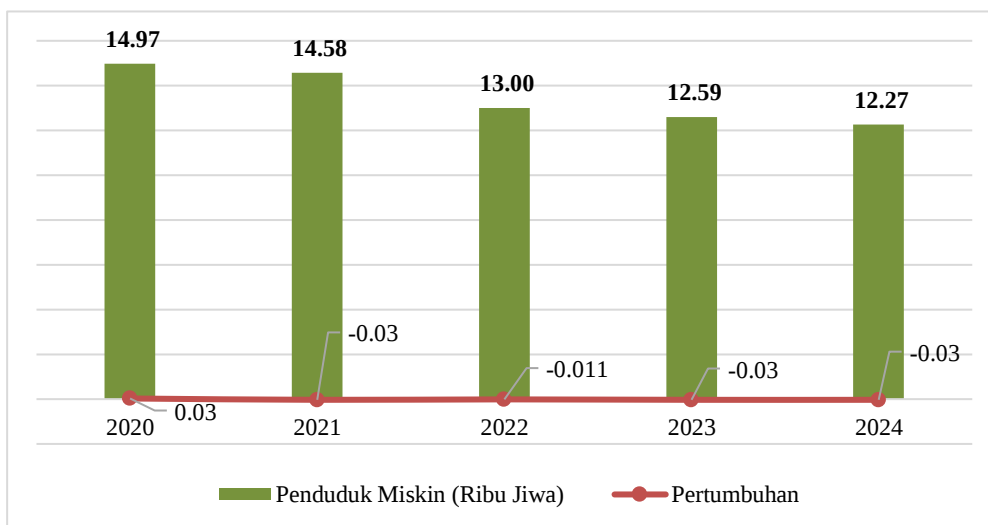


Gambar 2. 13 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024

(Sumber : BPS Halmahera Timur Tahun 2025, diolah)

Persentase Penduduk Miskin (P0) sangat ditentukan oleh seberapa banyak penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Timur sebanyak 12,27 ribu jiwa lebih pada tahun 2024, mengalami penurunan sebesar 0,03 persen dari tahun sebelumnya, dan merupakan titik yang terendah dalam lima tahun terakhir. Tren penurunan yang konsisten dalam periode 2020-2024 ini merupakan indikasi yang baik akan upaya-upaya penurunan kemiskinan di Kabupaten Halmahera Timur.

Tren perkembangan jumlah penduduk miskin dan persentase peningkatannya di Kabupaten Halmahera Timur dalam kurun tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji pada Gambar di halaman berikut.

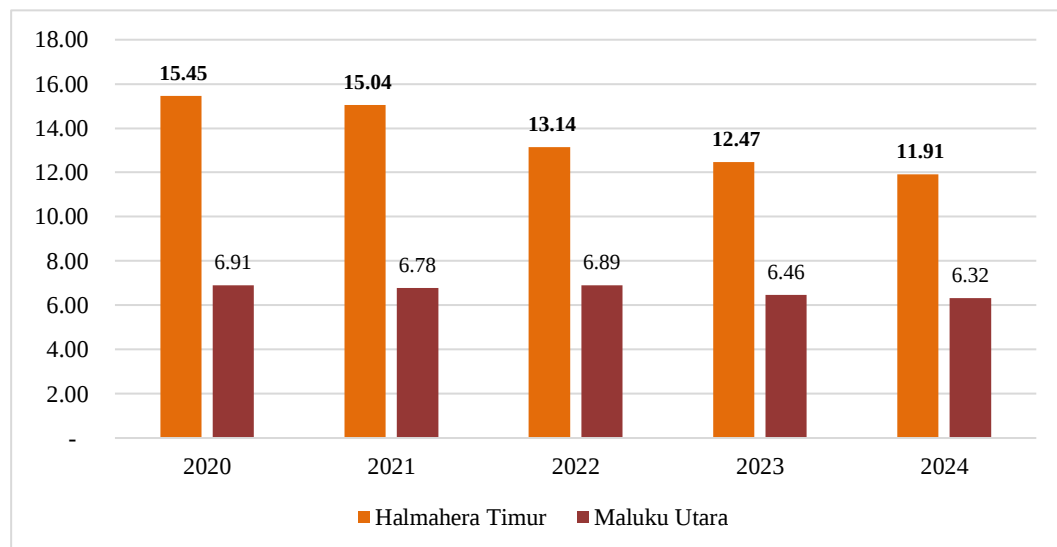


Gambar 2. 14 Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024

(Sumber : BPS Halmahera Timur Tahun 2025, diolah)

Jumlah penduduk miskin sebagaimana tersaji pada Gambar tentunya sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan. Dalam hal ini penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan didefinisikan sebagai nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar asupan kalori sebesar 2.100 kkal/hari per kapita (Garis Kemiskinan Makanan – GKM) ditambah kebutuhan minimum non makanan (Garis Kemiskinan Non Makanan – GKNM). Dalam hal Garis Kemiskinan Makanan (GKM), paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 36 jenis komoditi (perumahan, listrik, minyak tanah, dll)

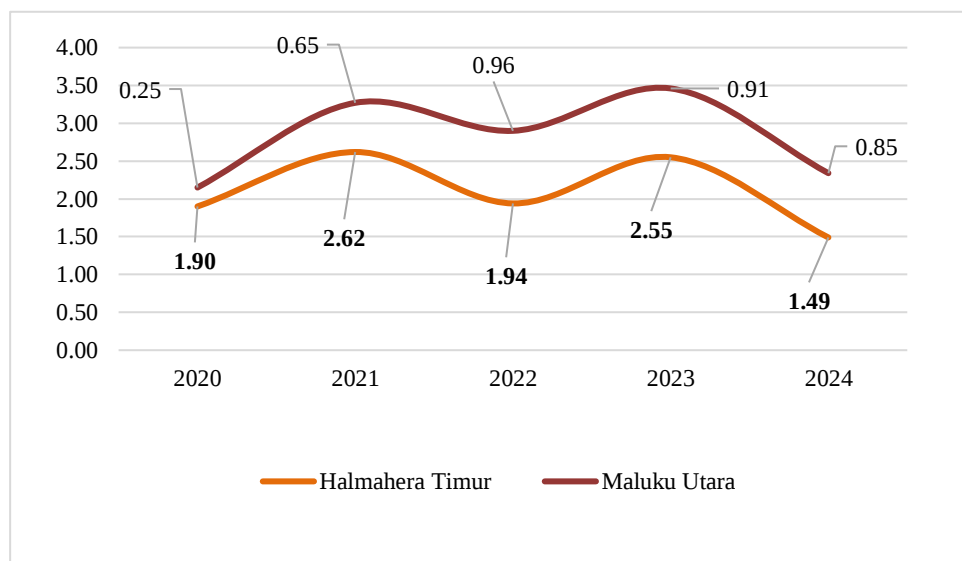
Bagaimanapun, jumlah penduduk miskin tentunya juga berkaitan dengan pertambahan jumlah penduduk di suatu wilayah. Oleh karena itu profil lengkap kemiskinan suatu wilayah dapat dijelaskan melalui angka persentase penduduk miskin. Dalam konteks ini, persentase penduduk miskin merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan jumlah penduduk yang ada pada suatu wilayah. Dari definisi tersebut maka persentase penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Timur dibandingkan dengan rata-rata pada tingkatan Provinsi Maluku Utara pada kurun tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam Gambar berikut.



**Gambar 2. 15 Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Halmahera Timur dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024**
(Sumber : BPS Halmahera Timur & BPS Provinsi Maluku Utara 2025, diolah)

Dari Gambar, persentase penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2024 sebesar 11,91 persen atau berkurang dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih konsisten pada kisaran dua digit dan masih terpaut jauh di atas rata-rata Provinsi Maluku Utara. Hal ini tentunya mengindikasikan bahwa upaya-upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur bersama masyarakat masih perlu dioptimalkan. Adapun terkait dengan kesenjangan antar penduduk miskin diuraikan sebagai berikut.

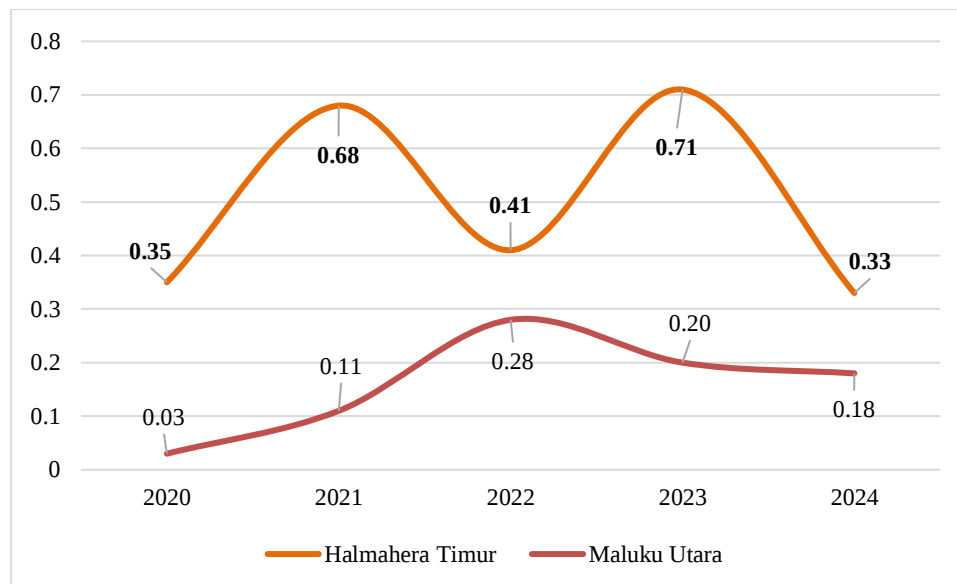
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2024 sebesar 1,49 atau mengalami kenaikan sebesar 0,61 poin dari tahun sebelumnya. Angka indeks kedalaman kemiskinan di tahun 2024 ini menjadi paling rendah pada periode 2020-2024. Indeks Kedalaman kemiskinan mengindikasikan kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di Kabupaten Halmahera Timur yang masih berpotensi semakin melebar. Disayangkan Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Halmahera Timur dalam lima tahun terakhir masih berada di atas rata-rata Provinsi Maluku Utara. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 2. 16 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Halmahera Timur dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

(Sumber : BPS, BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2025, diolah)

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Halmahera Timur tahun 2024 sebesar 0,33 atau berkurang 0,15 poin dari tahun 2023, dan dalam lima tahun terakhir juga masih berada di atas rata-rata Provinsi Maluku Utara. Ini mengindikasikan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Timur masih berpotensi semakin tinggi. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 2. 17 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Halmahera Timur dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024
(Sumber : BPS, BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2025, diolah)

2.2.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Pengangguran merupakan kondisi dimana seseorang tidak mempunyai pekerjaan atau tidak mempunyai usaha dan sedang berusaha mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Secara ekonomi, pengangguran merupakan efek dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Adanya sejumlah pengangguran pada dasarnya menggambarkan kondisi kelebihan penawaran tenaga kerja (excess supply) pada pasar kerja dibandingkan lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran dalam konteks ini merupakan keadaan dari seseorang yang mengalami hambatan di dalam usahanya untuk memperoleh pekerjaan. Secara singkat, Tingkat Pengangguran Terbuka menggambarkan proporsi penduduk angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan yang secara aktif mencari kerja/mempersiapkan usaha.

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan penduduk yang bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Berdasarkan publikasi BPS Halmahera Timur, jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2024 diperkirakan sebanyak 70.867 orang, bertambah sebanyak 874 orang dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 69.993 orang atau

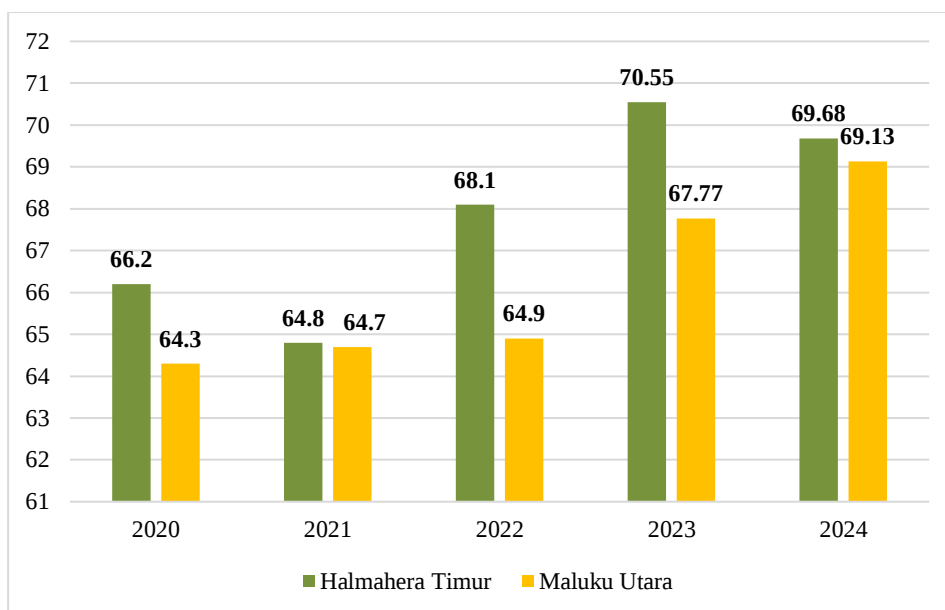
1,23%. Adapun jumlah penduduk angkatan kerja pada tahun 2024 sebanyak 49.382 orang. Perkembangan jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, dan bukan angkatan kerja di Kabupaten Halmahera Timur pada periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 41 Perkembangan Angkatan Kerja
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024**

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Penduduk Usia Kerja (15+)	69,122	70,827	72,515	69,993	70.867
Angkatan Kerja	45,747	45,894	49,365	49,381	49.382
- Bekerja	43,365	42,783	46,797	47,079	47.251
- Pengangguran	2,382	3,111	2,568	2,302	2.131
Bukan Angkatan Kerja	23,375	24,933	23,150	20,612	21.485
- Sekolah	5,1	4,398	5,812	5,452	5.407
- Mengurus Rumah Tangga	16,294	18,31	16,028	12,541	13.497
- Lainnya	1,981	2,225	1,310	2,619	2.581

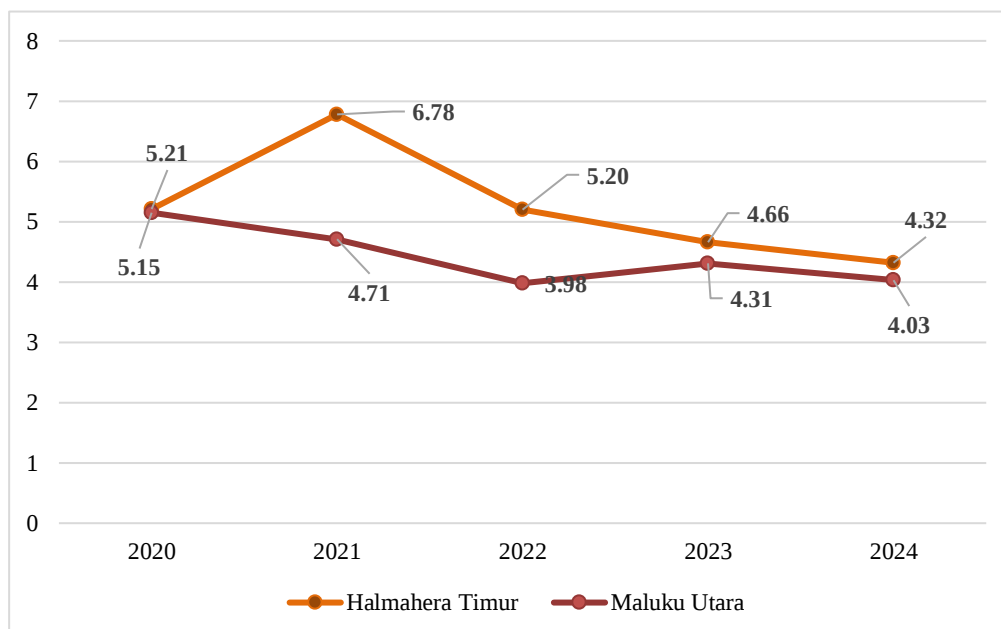
Sumber: BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang tinggi adalah sangat baik untuk pembangunan suatu negara atau wilayah. Semakin tinggi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena semakin banyak pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang akan memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Secara singkat, TPAK adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja secara keseluruhan. Berdasarkan Tabel 2.18 dapat diketahui TPAK Kabupaten Halmahera Timur. TPAK Kabupaten Halmahera Timur pada 2024 tercatat sebesar 69,68 persen, turun 0,87 poin dibanding tahun 2023 yang sebesar 70,55 persen. Meskipun penduduk 15+ Usia Kerja cenderung fluktuasi namun Angkatan Kerja dalam periode 2020-2024 terus menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan TPAK mengindikasikan peningkatan potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja. TPAK Kabupaten Halmahera Timur juga masih tetap berada di atas rata-rata Provinsi Maluku Utara dalam lima tahun terakhir. Gambaran Perkembangan TPAK Kabupaten Halmahera Timur dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Maluku Utara sepanjang periode tahun 2020-2024 tersaji dalam Gambar berikut.



Gambar 2. 18 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Halmahera Timur dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, 2025)

Pada akhirnya, dampak dari berbagai kebijakan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesempatan kerja akan berhulu kepada upaya untuk mengurangi jumlah penduduk yang menganggur. Gambar di halaman berikut menyajikan kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Halmahera Timur yang dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2020-2024.



Gambar 2. 19 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Halmahera Timur dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, 2025)

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2024 tercatat sebesar 4,32 persen atau mengalami penurunan 0,34 poin dari tahun sebelumnya 2023 sebesar 4,66. Secara umum, angkatan kerja yang menganggur dapat mencakup mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; atau yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Positifnya penurunan TPT mengindikasikan mulai terserapnya pencari kerja oleh Sektor Pertambangan & Penggalian yang mulai beroperasi di Halmahera Timur pada Tahun 2024. Pada akhirnya, dampak dari berbagai kebijakan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesempatan kerja akan berhulu kepada upaya untuk mengurangi jumlah penduduk yang menganggur.

2.2.6. Indeks Desa Membangun

Perkembangan global yang dimanifestasikan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) mendorong pemerintah Indonesia untuk mengubah strategi pembangunannya, antara lain dengan arah kebijakan untuk membangun dari pinggiran, yakni memperkuat daerah dan desa. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengusung paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional, yang tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. Meningkatnya perhatian pemerintah pada pembangunan desa memunculkan berbagai upaya untuk membangun desa melalui pengembangan berbagai model, salah satunya melalui konsep Desa Membangun.

Konsep Desa Membangun menempatkan desa sebagai subjek pembangunan, dimana Desa dapat merencanakan sendiri, melaksanakan sendiri, dan memberdayakan sendiri masyarakatnya. Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah mengembangkan Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun (IDM) didedikasikan untuk memperkuat pencapaian sasaran pembangunan prioritas sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang menargetkan sebanyak 10.559 Desa Mandiri pada tahun 2024. Target pemerintah untuk meningkatkan jumlah desa berstatus Desa Mandiri tentunya perlu mendapat dukungan pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur. Secara keseluruhan, meskipun skor IDM dan peringkat IDM

secara nasional Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2024 mengalami perbaikan atau peningkatan dari kondisi di tahun 2023, namun masih berada dalam kategori daerah Berkembang. Perbandingan IDM kabupaten/kota di Maluku Utara sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 42 Perkembangan Indeks Desa Membangun Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2023-2024

No	Rank*	Kabupaten/ Kota	Tahun	Status	IDM	Perubahan (%)
1	279	Pulau Morotai	2024	Berkembang	0,7021	0,45
	244		2023	Berkembang	0,6976	
2	329	Tidore Kepulauan	2024	Berkembang	0,6699	0,79
	321		2023	Berkembang	0,662	
3	365	Halmahera Tengah	2024	Berkembang	0,6338	1,43
	367		2023	Berkembang	0,6195	
4	360	Halmahera Utara	2024	Berkembang	0,6403	1,69
	365		2023	Berkembang	0,6234	
5	371	Halmahera Timur	2024	Berkembang	0,6255	1,35
	373		2023	Berkembang	0,612	
6	387	Kepulauan Sula	2024	Tertinggal	0,5911	0,11
	384		2023	Tertinggal	0,5900	
7	391	Halmahera Selatan	2024	Tertinggal	0,5865	0,90
	388		2023	Tertinggal	0,5775	
8	395	Pulau Taliabu	2024	Tertinggal	0,5765	0,83
	382		2023	Tertinggal	0,5682	
9	390	Halmahera Barat	2024	Tertinggal	0,5867	1,10
	389		2023	Tertinggal	0,5757	
10	31	Maluku Utara	2024	Berkembang	0,6159	1,06
	31		2023	Berkembang	0,6053	

Sumber: KemenDesPDTrans, 2025 / *) Peringkat secara Nasional

IDM disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pembangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Paradigma pembangunan yang mengedepankan pembangunan manusia didasarkan pada ruang dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi (lingkungan).

Aspek sosial (Indeks Ketahanan Sosial, IKS) memiliki dimensi yang luas, sehingga diperlukan pengelompokan yang mencakup sub-dimensi pendidikan, kesehatan, modal sosial dan permukiman. Dimensi ekonomi (Indeks Ketahanan Ekonomi, IKE) dibentuk dari keragaman ekonomi produksi masyarakat, ketersediaan dan akses terhadap kredit dan perbankan, transportasi (prasarana dan

moda transportasi), akses terhadap pusat perdagangan (pasar) dan jasa jasa. Sedangkan dimensi ekologi (Indeks Ketahanan Lingkungan, IKL) terkait dengan kualitas lingkungan dengan komponen kualitas air, tanah dan udara. Kualitas lingkungan juga mencakup risiko-risiko yang muncul dari tindakan dan atau mengabaikan faktor faktor yang menyebabkan banjir, longsor dan kebakaran hutan, kewaspadaan terhadap risiko bencana.

Dari 10 kecamatan, tercatat 8 (delapan) kecamatan dalam kategori Berkembang, sementara dua lainnya masih dalam kategori tertinggal. Tabel berikut menyajikan status IDM Kabupaten Halmahera Timur tahun 2024 berdasarkan kecamatan.

Tabel 2. 43 Indeks Desa Membangun Berdasarkan Dimensi Menurut Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024

No	Rank	Kecamatan	IDM	Kategori
1	4.166	Kota Maba	0,6910	Berkembang
2	4.802	Wasile	0,6445	Berkembang
3	4.915	Maba Selatan	0,6563	Berkembang
4	5.014	Wasile Timur	0,6309	Berkembang
5	5.088	Maba	0,6462	Berkembang
6	5.219	Maba Tengah	0,6228	Berkembang
7	5.309	Wasile Selatan	0,5932	Berkembang
8	5.567	Wasile Tengah	0,5964	Berkembang
9	5.753	Maba Utara	0,5623	Tertinggal
10	5.967	Wasile Utara	0,5294	Tertinggal

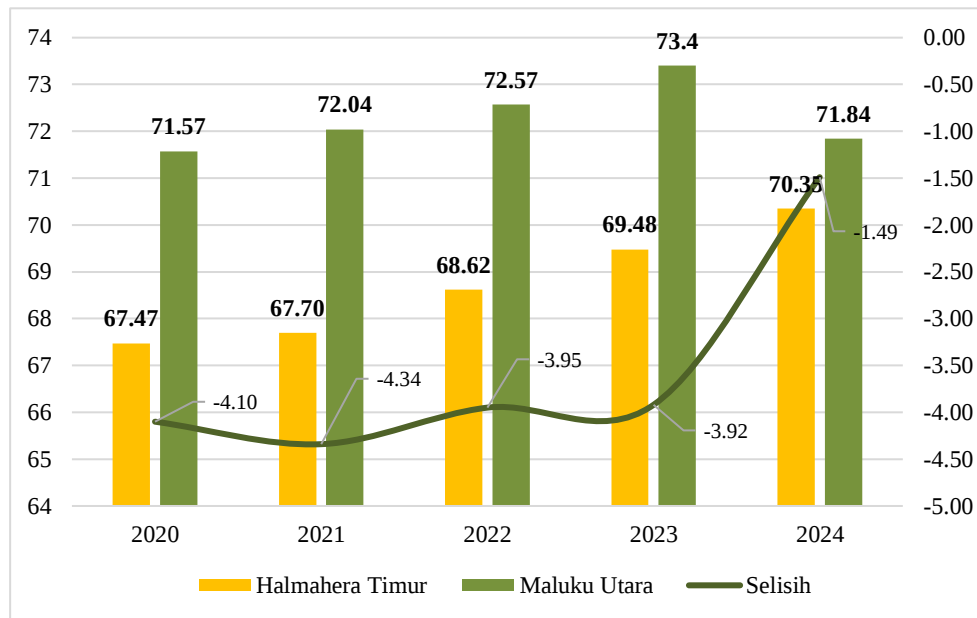
Sumber: KemenDesPDTTrans, 2025

2.2.7. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yang meliputi dimensi umur panjang dan hidup sehat (usia harapan hidup), pengetahuan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta standar hidup layak (pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan). IPM Kabupaten Halmahera Timur dari tahun ke tahun konsisten mengalami peningkatan.

IPM Kabupaten Halmahera Timur dari tahun ke tahun konsisten mengalami peningkatan. IPM Kabupaten Halmahera Timur meningkat dari 67,47 pada tahun 2020 menjadi 70,35 pada tahun 2024. Pada tahun 2024 IPM Halmahera Timur memasuki babak baru dimana IPM Halmahera Timur berada pada kategori Tinggi (>70<80). IPM Kabupaten Halmahera Timur sejauh ini juga masih konsisten berada dibawah rata-rata IPM provinsi Maluku Utara, namun dengan dengan jarak atau

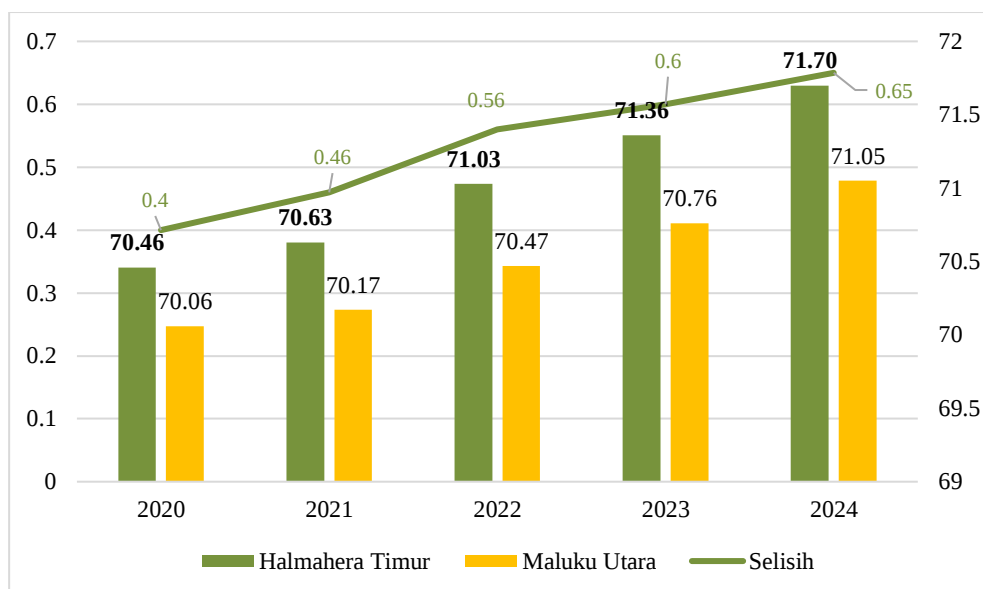
selisih yang semakin mengecil dari tahun ke tahun. Selisih atau jarak tersebut dapat menjadi ukuran seberapa percepatan peningkatan IPM Kabupaten Halmahera Timur dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Maluku Utara. Gambaran perkembangan IPM Kabupaten Halmahera Timur dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2020-2024 selengkapnya dapat dilihat dalam Gambar berikut.



Gambar 2. 20 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Halmahera Timur dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024
(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2025, diolah.)

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), didefinisikan sebagai rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Capaian UHH Kabupaten Halmahera Timur terus meningkat dari tahun ke tahun.

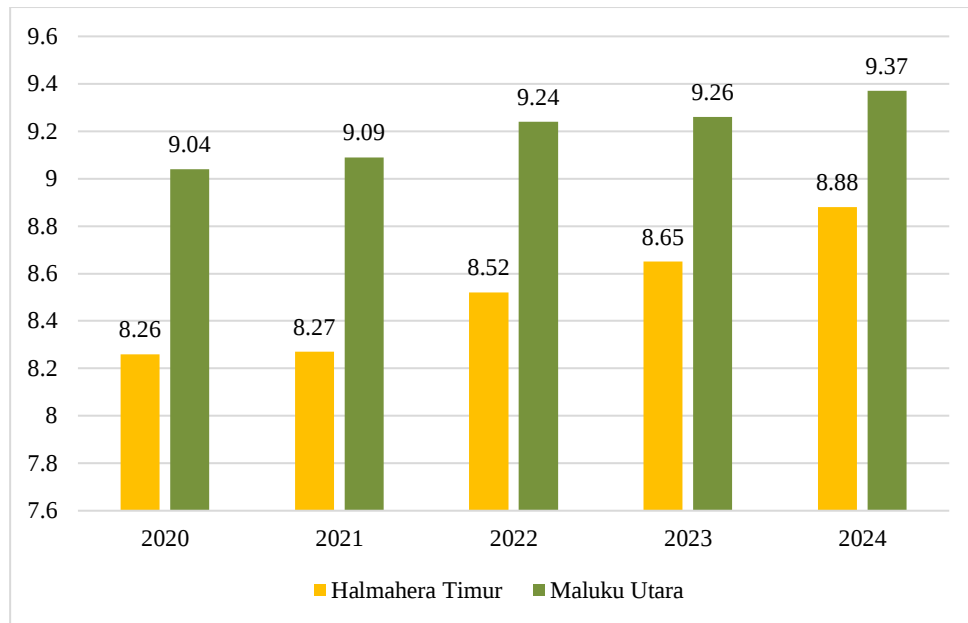
Angka UHH Kabupaten Halmahera Timur naik dari 70,46 pada tahun 2020 menjadi 71,70 tahun pada tahun 2024. Sebagaimana tersaji pada Gambar berikut, UHH Kabupaten Halmahera Timur masih konsisten berada di atas rata-rata provinsi Maluku Utara, dengan selisih yang semakin membesar dari tahun ke tahun. Kondisi ini mengindikasikan pencapaian UHH Kabupaten Halmahera Timur lebih berakselerasi dibanding rata-rata provinsi.



**Gambar 2. 21 Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup
Kabupaten Halmahera Timur dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024**
(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2025, diolah)

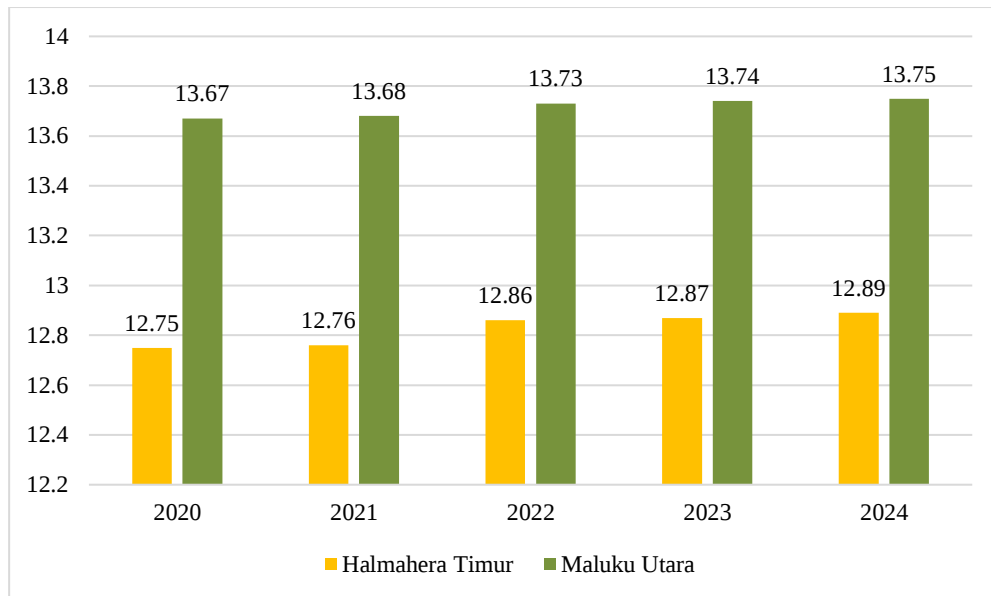
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan salah satu komponen dalam dimensi pengetahuan yang membentuk IPM, yang didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Dalam perhitungannya, lama sekolah selama 6 untuk penduduk yang tamat SD, 9 tahun untuk tamat SMP dan 12 tahun untuk tamat SMA, tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Seiring dengan program wajib belajar 12 tahun sejak tahun 2015 maka idealnya RLS minimal adalah 12 tahun. Angka RLS Kabupaten Halmahera Timur mengalami kenaikan setiap tahunnya sejak 2020 sehingga mencapai angka tertingginya, yaitu 8,88 persen di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk usia > 25 tahun di Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2024 telah menempuh pendidikan hingga kelas IX (SMP kelas III). Tren kenaikan setiap tahun ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Halmahera Timur yang lebih baik. Namun demikian capaian RLS Kabupaten Halmahera Timur masih tetap berada di bawah rata-rata RLS provinsi Maluku Utara.

Selisih atau jarak RLS Kabupaten Halmahera Timur terhadap rata-rata provinsi Maluku Utara pada tahun 2024 mulai mengecil dibandingkan dengan kondisi di tahun sebelumnya. Gambaran perbandingan RLS Halmahera Timur dan rata-rata provinsi Maluku Utara selengkapnya dalam kurun tahun 2020-2024 disajikan dalam Gambar berikut.



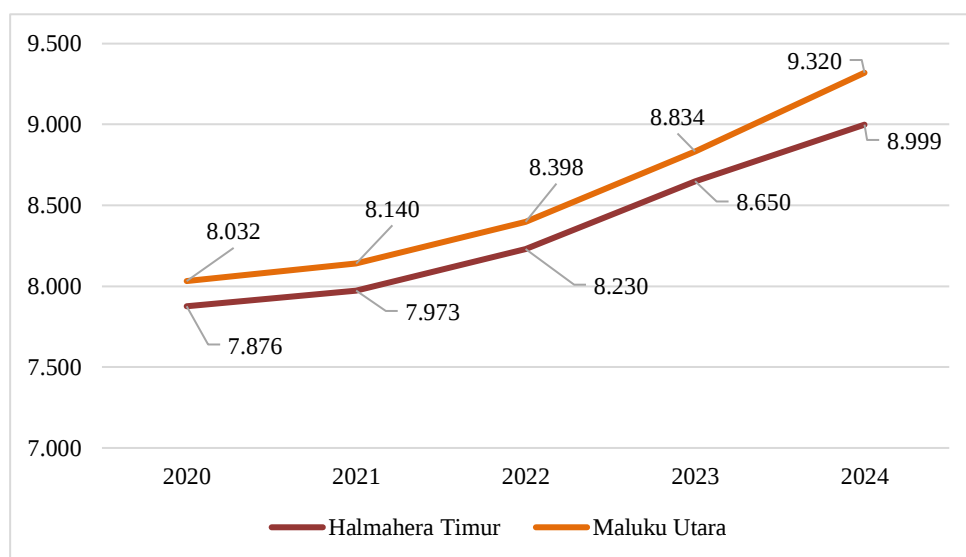
**Gambar 2. 22 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten Halmahera Timur dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024**
(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2025, diolah)

Harapan Lama Sekolah (HLS), merupakan komponen kedua dalam dimensi pengetahuan yang membentuk IPM. HLS mengukur kesempatan pendidikan seorang penduduk dimulai pada usia tujuh tahun. Secara sederhana, HLS dapat didefinisikan sebagai angka partisipasi sekolah menurut umur tunggal, yang menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Dalam konteks ini, pada tahun 2024 penduduk Halmahera Timur usia tertentu (>7 tahun) berpotensi menempuh pendidikan hingga lulus SMA/ sederajat dan melanjutkan pendidikan ke tingkat setara Diploma I. Ini dapat dilihat dari angka HLS yang mencapai 12,89 tahun $\approx$ 13 tahun. Sebagaimana tersaji dalam Gambar 2.23 di halaman berikut, angka HLS Kabupaten Halmahera Timur masih konsisten berada di bawah rata-rata provinsi Maluku Utara dalam lima tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa harapan lama sekolah seorang anak usia tujuh tahun di tingkatan provinsi lebih tinggi dibandingkan di Kabupaten Halmahera Timur. Namun demikian, jika pada tahun 2020 jarak atau selisih HLS Kabupaten Halmahera Timur dengan rata-rata Provinsi Maluku Utara sebesar 0,89 tahun, pada tahun 2024 sedikit membaik dengan selisih angka 0,86 tahun. Ini mengindikasikan peningkatan HLS Kabupaten Halmahera Timur mulai lebih berakselerasi dalam lima tahun terakhir.



Gambar 2. 23 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Halmahera Timur dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024
(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2025, diolah)

Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan, adalah representasi dari dimensi hidup layak, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*). Keseimbangan kemampuan berbelanja atau paritas daya beli adalah sebuah metode yang digunakan untuk menghitung sebuah alternatif nilai tukar antar mata uang dari dua negara. Gambar berikut menyajikan perkembangan Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan (PPK) Kabupaten Halmahera Timur dan rata-rata provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2020-2024.



Gambar 2. 24 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan Kabupaten Halmahera Timur dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024
(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2024, diolah)

2.2.8. Indeks Pembangunan Gender

Secara umum istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

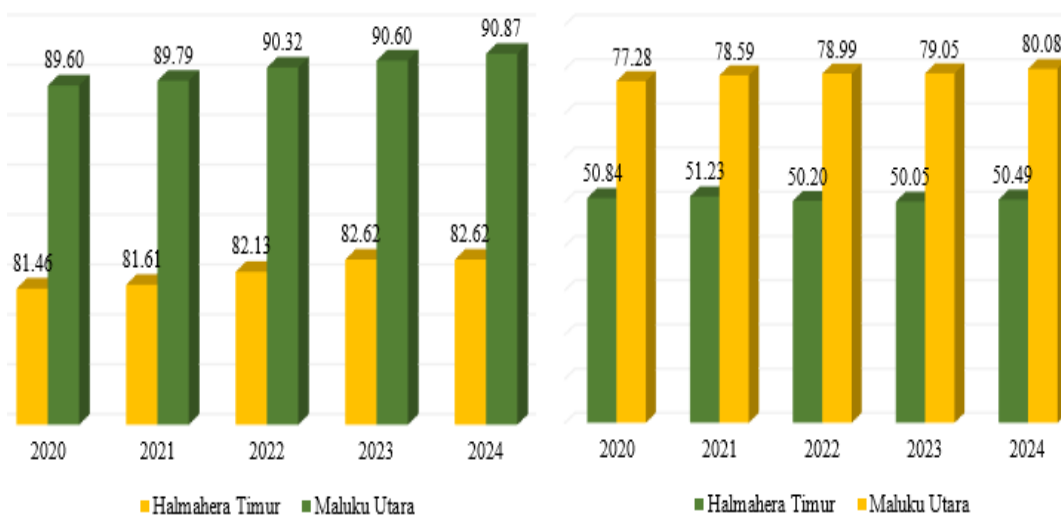
Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Dalam konteks ini, Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian IPM laki-laki dan perempuan.

IPG Halmahera Timur menunjukkan tren positif selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, nilai IPG tercatat sebesar 81,46 dan meningkat secara konsisten hingga mencapai 82,73 pada tahun 2024. Peningkatan ini menandakan bahwa kesenjangan pencapaian antara laki-laki dan perempuan dalam hal indikator dasar pembangunan seperti harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan cenderung menurun. Meski demikian, nilai tersebut masih relatif tertinggal dibandingkan dengan rerata Provinsi Maluku Utara yang telah mencapai 90,87 pada tahun 2024. Artinya, perempuan di Halmahera Timur masih mengalami keterbatasan dalam memperoleh hasil pembangunan yang setara dengan laki-laki, terutama dalam aspek ekonomi dan pendidikan tinggi.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang mengukur keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, akses terhadap sumber daya ekonomi, dan keterwakilan di tingkat legislatif menunjukkan dinamika yang lebih kompleks. Pada tahun 2020, IDG Halmahera Timur berada di angka 50,84 dan mengalami sedikit peningkatan menjadi 51,23 pada 2021. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing ke angka 50,20 dan 50,05, sebelum naik kembali menjadi 50,49 pada 2024. Nilai IDG ini memperlihatkan bahwa pemberdayaan perempuan masih mengalami stagnasi dan bahkan sempat mengalami regresi. Jika dibandingkan

dengan rerata provinsi yang mencapai 80,08 pada tahun 2024, ketimpangan yang signifikan masih menjadi tantangan serius yang harus diatasi dengan kebijakan afirmatif dan struktural yang lebih kuat.

Rendahnya IDG di Halmahera Timur dapat disebabkan oleh beberapa faktor mendasar. Pertama, representasi perempuan dalam jabatan strategis, baik di pemerintahan maupun legislatif, masih terbatas. Kedua, akses perempuan terhadap pekerjaan yang layak dan posisi manajerial juga masih rendah, yang mencerminkan ketimpangan dalam penguasaan sumber daya ekonomi. Ketiga, masih terdapat hambatan budaya dan norma sosial yang menghambat partisipasi perempuan secara aktif dalam ruang publik dan proses pengambilan keputusan. Sementara itu, tren IPG yang meningkat tetapi IDG yang stagnan menunjukkan adanya paradoks: meskipun akses terhadap pendidikan dan kesehatan bagi perempuan telah membaik, hal tersebut belum secara langsung mendorong peningkatan kekuatan dan posisi perempuan dalam struktur sosial dan ekonomi lokal. Hal ini memperkuat argumen bahwa pencapaian pembangunan gender tidak cukup hanya dengan memperbaiki akses layanan dasar, tetapi juga harus menyasar transformasi kelembagaan dan norma sosial yang diskriminatif. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 2.25 Indeks Pembangunan & Pemberdayaan Gender Kabupaten Halmahera Timur & Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

(Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2025, diolah)

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan wajib pelayanan dasar terdiri dari Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketenteraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, serta Sosial. Gambaran capaian kinerja pada urusan wajib pelayanan dasar di Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan tahun 2024 diuraikan sebagai berikut.

A) Pendidikan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan pendidikan adalah: (1) Pengelolaan pendidikan dasar; (2) Pengelolaan pendidikan anak usia dini; (3) Pengelolaan pendidikan nonformal; (4) Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal; (5) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota; (6) Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. (7) Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat dan (8) Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota.

Gambaran pencapaian kinerja pembangunan pada urusan pelayanan dasar pendidikan Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan, menumbuhkan sikap dasar yang diperlukan dalam masyarakat, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan dasar. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTS) atau bentuk lain yang sederajat.

Hingga tahun 2024, jumlah satuan pendidikan dasar pada jenjang SD/sederajat di Kabupaten Halmahera Timur sebanyak 108 sekolah, yang terdiri dari 101 SD di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta 7 MI yang beradadi bawah naungan Kementerian Agama. Pada jenjang SMP/sederajat sebanyak 55 sekolah, yang terdiri dari 45 SMP di bawah naungan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan serta 10 MTs yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Perkembangan jumlah satuan pendidikan dasar di Kabupaten Halmahera Timur dalam periode tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.44, sementara sebaran sekolah menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.45.

Tabel 2.44. Jumlah SD/ sederajat dan SMP/ sederajat Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah				
	2020	2021	2022	2023	2024
SD/ sederajat					
SD		100	101	101	
MI		7	7	7	
Jumlah		107	108	108	
SMP/ sederajat					
SMP		43	45	45	
MTs		10	10	10	
Jumlah		53	55	55	

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Timur, 2025

Tabel 2.45. Sebaran SD/ sederajat dan SMP/ sederajat Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024

No	Kecamatan	SD/ sederajat						SMP/ sederajat					
		SD			MI			SMP			MTs		
		N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml
1	Maba Selatan	10	-	10	-	1	1	4	-	4	1	1	2
2	Kota Maba	6	1	7	-	2	2	3	2	5	-	1	1
3	Wasile Selatan	20	-	20	-	-	-	10	-	10	-	1	1
4	Wasile	7	-	7	-	2	2	2	-	2	1	-	1
5	Wasile Timur	11	-	11	-	1	1	3	1	4	-	2	2
6	Wasile Tengah	8	-	8	-	-	-	3	-	3	-	-	-
7	Wasile Utara	7	-	7	-	-	-	3	-	3	-	-	-
8	Maba	6	1	7	-	1	1	3	1	4	-	1	1
9	Maba Tengah	11	-	11	-	-	-	3	-	3	-	1	1
10	Maba Utara	13	-	13	-	-	-	7	-	7	-	1	1
Total		99	2	101	-	7	7	41	4	45	2	8	10

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Timur, 2024/ N (Negeri); S (Swasta); Jml (Jumlah)

Angka Partisipasi

Dengan semakin banyaknya sekolah yang tersedia pada jenjang pendidikan dasar, tentunya diharapkan dapat meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat. Terkait akses pelayanan pendidikan dasar, dapat dijelaskan melalui sejumlah indikator, antara lain Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM).

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan, khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah maka semakin

besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan pada suatu wilayah. APS didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan. Nilai ideal APS adalah 100 persen dan tidak akan terjadi lebih besar dari 100 persen, karena murid usia sekolah dihitung dari murid yang ada di semua jenjang pendidikan pada suatu daerah.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu, dinyatakan dalam persen. APK merupakan indikator paling sederhana yang dapat digunakan untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK sering digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK juga dapat memberikan gambaran mengenai partisipasi sekolah penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhatikan umur. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK menunjukkan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

Adapun Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Nilai APM berkisar antara 0-100. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK, dikarenakan APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Gambaran perkembangan APS, APK dan APM pendidikan dasar

di Kabupaten Halmahera Timur dalam kurun tahun 2020-2024 tersaji dalam Tabel di halaman berikut.

Tabel 2.46. Perkembangan APS, APK dan APM Pendidikan Dasar Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024

Uraian	Persentase				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Partisipasi Sekolah (APS)*					
7-12 Tahun			99,15	98,78	99,92
13-15 Tahun			96,21	96,25	99,92
Angka Partisipasi Kasar (APK)**					
SD	109,2	107,81	100,50	98,55	96,29
SMP	105,19	102,13	105,55	104,24	104,98
Angka Partisipasi Murni (APM)**					
SD	93,44	90,69	88,30	87,45	85,96
SMP	74,74	65,34	74,34	75,35	76,35

Sumber: *) BPS Provinsi Maluku Utara, 2025

**) Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Timur, 2025 (Gabungan Data Kemendikbud dan Kemenag)

Angka Putus Sekolah dan Kelulusan Siswa

Disamping menjamin ketersediaan sekolah yang mencukupi kebutuhan masyarakat, pelayanan pendidikan dasar di Kabupaten Halmahera Timur masih dihadapkan dengan jaminan keberlanjutan pendidikan dari para peserta didik. Dalam konteks ini masih ada anak didik yang mengalami putus sekolah. Adapun Angka kelulusan adalah jumlah siswa yang lulus dan dibuktikan dengan surat tandatamat belajar/ijazah. Angka ini menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan.

Tabel berikut menyajikan Angka putus sekolah dan Angka kelulusan ujian siswa pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Halmahera Timur sepanjang periode tahun 2020-2024.

Tabel 2.47. Angka Putus Sekolah dan Angka Kelulusan Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Putus Sekolah (persen)					
SD	2,22	2,01	2,01	1,85	1,32
SMP	3,78	3,70	3,17	2,68	2,53
Angka Kelulusan (persen)					
SD	100	100	100	100	100
SMP	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Timur, 2025

Kondisi Ruang Kelas

Kelas adalah ruang tempat belajar di sekolah, serta merupakan taman belajar bagi siswa dan menjadi tempat mereka bertumbuh dan berkembang, baik secara fisik, intelektual maupun emosional. Dalam konteks ini kondisi ruang kelas merupakan segala sesuatu memudahkan anak didik. Segala sesuatu yang diperlukandalam proses belajar mengajar yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan berjalan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Lingkungan belajar yang tidak menyenangkan, suasana ruang kelas yang pengap, meja dan kursi yang berantakan, menyebabkan siswa kurang semangat dalam belajar. Oleh karena itu, kondisi ruang kelas yang baik akan mendukung proses pembelajaran yang efektif dan kondusif bagi para peserta didik. Sebagaimana tersaji pada Tabel berikut, masih terdapat ruang kelas dalam kondisi rusak berat maupun rusak sedang di Kabupaten Halmahera Timur.

Tabel 2.48. Kondisi Ruangan Kelas SD dan SMP Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD					
	Baik/Rusak Ringan (%)	65,21	80,73	75.33	66.10	66.10
	Rusak Sedang (%)	17.55	16.61	20,35	24.55	24.55
	Rusak Berat/Rusak Total (%)	17.22	2.64	4.30	0.44	0.44
2	SMP					
	Baik/Rusak Ringan (%)	70.00	75.42	77.51	68.99	68.99
	Rusak Sedang (%)	16.00	23.75	14.06	25.97	25.97
	Rusak Berat/Rusak Total (%)	14.00	0.43	8.43	5.04	5.04

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Timur, 2025

Kualifikasi dan Sertifikasi Guru

Peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya dengan meningkatkan sarana prasarannya, melainkan juga dengan menetapkan kualifikasi guru sebagai tenaga pengajar. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik dimaksud dapat dilihat melalui tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan. Dalam hal ini Guru pada jenjang pendidikan dasar harus memiliki kualifikasi akademik minimum Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) sebagaimana tertuang dalam Permendiknas RI No. 16 Tahun 2007.

Perkembangan guru SD dan SMP berkualifikasi pendidikan minimal D4/S1 dan bersertifikasi di Kabupaten Halmahera Timur sepanjang periode tahun 2021-2024 dapat dilihat pada Tabel di halaman berikut.

Tabel 2.49. Persentase Guru SD dan SMP Berkualifikasi Pendidikan D4/S1 dan Bersertifikasi Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2024

Jenjang Pendidikan	2021	2022	2023	2024
SD				
Total Jumlah Guru	633	668	728	771
Jumlah Guru yang Berkualifikasi Pendidikan > D4/S1	513	544	593	629
Persentase Guru SD yang Berkualifikasi Pendidikan > D4/S1	13.33	11.39	14.71	13,16
Jumlah Guru yang Bersertifikat Pendidik	99	102	109	112
Persentase Guru SD yang Bersertifikat	15.63	15.26	14.97	14,50
SMP				
Total Jumlah Guru	312	343	438	463
Jumlah Guru yang Berkualifikasi Pendidikan > D4/S1	278	311	404	433
Persentase Guru SMP yang Berkualifikasi Pendidikan > D4/S1	89.10	90.67	92.23	93,50
Jumlah Guru yang Bersertifikat Pendidik	51	56	72	76
Persentase Guru SMP yang Bersertifikat Pendidik	20,44	32.63	24.94	28,89

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Timur, 2025

Akreditasi Sekolah

Dalam rangka memastikan pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri, maka layanan pendidikan yang diberikan harus sesuai dengan standar mutu. Penjaminan mutu pendidikan mengacu pada standar sesuai peraturan yang berlaku, dalam hal ini Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan. Standar dimaksud meliputi: kompetensi lulusan; isi, proses, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan. Akreditasi sekolah dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukankelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Tabel berikut menyajikan Perkembangan Akreditasi Sekolah pada jenjang pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Halmahera Timur sepanjang periode tahun 2021-2024.

**Tabel 2.50. Perkembangan Akreditasi Sekolah SD dan SMPDi
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2024**

No	Pendidikan	Persentase			
		2021	2022	2023	2024
1	PAUD				
	Akreditasi A				
	Akreditasi B	8,33	57,29	63,04	54,56
1	SD				
	Akreditasi A				
	Akreditasi B	50,50	51,49	54,46	54,46
1	SMP				
	Akreditasi A				
	Akreditasi B	31,11	55,56	57,78	56,52
	Satuan PKBM Terakreditasi	80,0	100,0	100,0	71,43

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Timur, 2025

Sebagaimana tersaji, hingga tahun 2024, lebih dari 50 persen sekolah baik pada jenjang PAUD, SD, SMP maupun Satuan PKBM telah terakreditasi minimal B. Namun demikian, masih terdapat sekolah yang belum terakreditasi.

2) Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Sampai dengan tahun 2024, Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Kabupaten Halmahera Timur telah mencapai 47,21 persen jika hanya memperhitungkan jumlah siswa PAUD yang berada dibawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau 49,43 persen jika memperhitungkan juga RA (Raudatul Athfal) yang berada dibawah pembinaan Kementerian Agama.

Tabel di halaman berikut menyajikan perkembangan APK PAUD di Kabupaten Halmahera Timur tahun 2022-2024 yang dilengkapi data jumlah peserta didik PAUD berdasarkan jenis PAUD.

**Tabel 2.51. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini
Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024**

Uraian		2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Usia 4-6 Tahun		7.302	7.322	6.276
Siswa PAUD	TK/TKLB	2.68	2.36	2.332
Formal	RA	263	147	139
Siswa PAUD Non	KB	515	576	631
Formal	SPS	-	-	-
Jumlah Siswa	Kemendikbud	3.195	2.936	2.963
PAUD	Kemendikbud + Kemenag	3.458	3.083	3.102

Uraian	2022	2023	2024
APK PAUD	Kemendikbud 43,76%	40,10%	47,21%
	Kemendikbud + Kemenag 47,36%	42,11%	49,43%

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Timur, 2024

Program PAUD merupakan salah satu program prioritas nasional, mengingat sebagian besar masyarakat, terutama di perdesaan masih menganggap bahwa pendidikan usia dini kurang begitu penting dibanding masuk sekolah dasar. Sampai dengan tahun 2024, telah tersedia 72 satuan pendidikan anak usia dini dalam bentuk layanan, antara lain: Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS), serta Raudatul Athfal (RA) yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Dari jumlah tersebut, 27,5 persen PAUD (tidak termasuk RA) sudah terakreditasi. Tabel berikut menyajikan jumlah sebaran PAUD termasuk RA menurut kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2024.

Tabel 2.52. Jumlah PAUD dan RA Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024

No	Kecamatan	PAUD (TK)	RA*	Total
1	Maba Selatan	8	-	8
2	Kota Maba	5	-	5
3	Wasile Selatan	14	1	15
4	Wasile	5	1	6
5	Wasile Timur	8	1	9
6	Wasile Tengah	8	-	8
7	Wasile Utara	6	-	6
8	Maba	4	-	4
9	Maba Tengah	5	-	5
10	Maba Utara	6	-	6
Halmahera Timur		69	3	72

TK=Taman Kanak-kanak; KB=Kelompok Bermain; SPS=Satuan PAUD Sejenis; RA (Kemenag) Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Timur, 2024

3) Pendidikan Non Formal

Pendidikan kesetaraan merupakan layanan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal yang memberikan kesempatan atau akses bagi warga masyarakat khususnya para pemuda yang putus sekolah dan putus lanjut di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Pendidikan kesetaraan ini dapat berbentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), yaitu sebuah lembaga pendidikan yang dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat serta diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal dengan tujuan untuk memberikan kesempatan belajar kepada seluruh lapisan masyarakat agar mampu membangun dirinya secara mandiri sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

PKBM sebagai sumber informasi berisi berbagai jenis program pembelajaran yang berguna terutama dalam peningkatan kemampuan dalam bidang keterampilan fungsional yang berorientasi pada pemberdayaan potensi masyarakat setempat melalui pendekatan pendidikan berbasis masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Kehadiran PKBM dapat sangat membantu meningkatkan angka rata-rata lama sekolah, karena memfasilitasi peningkatan kualifikasi pendidikan penduduk usia >21 tahun yang memiliki tingkat pendidikan di bawah SMP/ sederajat, namun sudah tidak bisa melanjutkan pendidikan pada satuan-satuan pendidikan formal. Sampai dengan tahun 2024 baru terdapat 5 (lima) layanan PKBM di Kabupaten Halmahera Timur, atau berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaran PKBM dan jumlah siswanya menurut kecamatan pada tahun 2023-2024, sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel 2.53. Sebaran PKBM Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2023-2024

No	Kecamatan	2023		2024	
		Jml PKBM	Jml Siswa	Jml PKBM	Jml Siswa
1	Maba Selatan	1	-	1	120
2	Kota Maba	2	189	1	237
3	Wasile Selatan	2	189	2	365
4	Wasile	-	-	-	-
5	Wasile Timur	-	-	-	-
6	Wasile Tengah	-	-	-	-
7	Wasile Utara	-	-	-	-
8	Maba	1	79	1	96
9	Maba Tengah	-	-	-	-
10	Maba Utara	1	-	-	-
Halmahera Timur		7	457	5	818

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Timur, 2024

B) Kesehatan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah kabupaten dalam urusan kesehatan meliputi sub urusan: 1) Upaya kesehatan (Pengelolaan UKP Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota; Pengelolaan UKM Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota; serta Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah kabupaten/kota; 2) Sumber Daya Manusia Kesehatan (Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan; Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah kabupaten/kota); 3) Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman (Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal; Penerbitan izin usaha mikro obat

tradisional (UMOT); Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga; Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga; Pengawasan post-market produk makanan minuman industri rumah tangga); dan 4) Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten/kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten/kota.

Capaian kinerja pembangunan bidang kesehatan Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan tahun 2024 diuraikan sebagai berikut.

1) **Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi**

Ibu yang sehat, cerdas dan kreatif serta memiliki pengetahuan tentang gizi akan mencetak anak yang sehat secara jasmani maupun rohani, sehingga dapat membentuk generasi-generasi bangsa yang sehat dan berjiwa kuat. Oleh karena itu, peran ibu sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Kesehatan Ibu dan Anak merupakan upaya di bidang kesehatan yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu menyusui, bayi dan anak balita serta anak prasekolah. Terdapat beberapa indikator penting dalam upaya kesehatan ibu, anak dan gizi.

Angka Kematian Ibu (AKI) atau *maternal mortality ratio* didefinisikan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) sebagai angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (KH). Angka Kematian Neonatal (*Neonatal Mortality Rate*) adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari, per 1000 kelahiran hidup (KH) pada satu tahun tertentu. Angka kematian bayi endogen atau kematian neonatal ini menggambarkan banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.

Angka kematian bayi (*Infant Mortality Rate*) merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat. Angka Kematian Bayi sangat sensitif terhadap perubahan tingkat kesehatan dan kesejahteraan. Angka kematian bayi dapat didefinisikan sebagai kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup (KH) pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi

meninggal sebelum mencapai usia satu tahun.

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi Kematian Ibu, Kematian Neonatal dan Kematian Bayi, diantaranya status kesehatan ibu, status reproduksi, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan perilaku penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan. Sejumlah indikator yang dapat menjelaskan kondisi tersebut antara lain: Cakupan pelayanan ibu hamil yang diwujudkan melalui Kunjungan Antenatal yang dianjurkan, yaitu 4 kali kunjungan yaitu K1 pada usia (16 minggu), K2 dilakukan pada (24-28 minggu), K3 (32 minggu), K4 (36 minggu sampai lahir); Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan; Cakupan persalinan yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan; Cakupan neonatus mendapatkan pelayanan sesuai standar paling sedikit 3 kali dengan distribusi waktu: 1 x pd usia 6-48 jam, 1x pada usia 3 - 7 hari, dan 1 x pada usia 8 - 28 hari setelah lahir; Cakupan pemberian air susu ibu, segera setelah persalinan sampai bayi berusia 6 bulan tanpa tambahan makanan lain, termasuk air putih; serta Cakupan imunisasi atau penyuntikkan vaksin tertentu yang diberikan kepada bayi sesuai dengan usianya.

Adapun merujuk pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995//2010, pengertian Gizi Kurang dan Gizi Buruk adalah status gizi yang didasarkan pada Indeks berat Badan menurut Umum (BB/U) yang merupakan padanan istilah *underweight* (gizi kurang) dan *severely underweight* (gizi buruk). Pendek dan sangat pendek adalah status gizi yang didasarkan pada indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) yang merupakan padanan istilah *stunted* (pendek) dan sangat pendek (*severely stunted*). Selain *underweight* dan *stunting*, *wasting* adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan permasalahan gizi anak, ketika bobot tubuhnya jauh di bawah normal. Wasting menandakan bahwa nutrisi anak tidak terpenuhi dengan cukup. Wasting merupakan gabungan dari istilah kurus (*wasted*) dan sangat kurus (*severe wasted*) yang didasarkan pada indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB). WHO selaku badan kesehatan dunia, menyatakan bahwa *wasting* adalah salah satu masalah kesehatan utama. Sebab kondisi ini berhubungan langsung dengan angka kejadian suatu penyakit (*morbidity*). Secara umum suatu wilayah dikatakan mengalami masalah gizi akut bila prevalensi balita kurus sebesar 5% atau lebih.

**Tabel 2.54. Kinerja Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi
Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	458	342	335	327	130
2	Angka Kematian Neonatal (per 100.000 KH)	21	13	14	9	9
3	Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)	6	5	6	8	7
4	Angka Kematian Balita (per 1000 KH)				1	1
5	1000 KH)Cakupan Persalinan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (persen)				77,0	77,3
6	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil Antenatal K1-K4 (persen)				73,3	74,2
7	Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) Lengkap (persen)				65,0	63,8
8	Cakupan Bayi 0-6 Bln Mendapat Mendapat ASI Eksklusif (persen)				83,4	74,0
9	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Anak Usia 12-23 Bulan (persen)	69,6	73,5	78,5	n/a	n/a
10	Prevalensi stunting pada balita (persen)	23,50	24,30	16,57	16,09	11,34
11	Prevelensi Kusta (per 10.000 Penduduk)	34	25	31	27	31

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Timur, 2024

Sebagaimana tersaji, AKI pada tahun 2024 mencapai 302 per 100.000 kelahiran hidup, atau masih jauh di atas target Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030, yaitu menurunkan AKI sehingga sebesar 70 per 100.000 KH. Demikian pada AKB yang masih berada di atas 12 yang merupakan target Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030. Dari status gizi anak, dapat dilihat bahwa prevalensi stunting pada balita di Kabupaten Halmahera Timur hingga tahun 2024 masih diangka 16,5 persen atau termasuk kategori tinggi dibandingkan rata-rata provinsi Maluku Utara, yang sebesar 10,2 persen.

2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Fasilitas pelayanan kesehatan merujuk kepada sarana atau prasarana atau perlengkapan yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan yang disenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta bagi masyarakat dengan tujuan untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan melalui tindakan preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Kondisi fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Halmahera Timur dapat digambarkan melalui keberadaan fasilitas Rumah Sakit dan Puskesmas yang tersebar di 10 kecamatan. Rumah Sakit didefinisikan sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Adapun Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya

kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Pada kondisi tertentu dan bila memungkinkan, Puskesmas dapat memberikan pelayanan rawat inap sebagai rujukan antara sebelum dirujuk ke rumah Sakit. Perkembangan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Halmahera Timur dalam lima tahun terakhir sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Fasilitas pelayanan kesehatan merujuk kepada sarana atau prasarana atau perlengkapan yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta bagi masyarakat dengan tujuan untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan melalui tindakan preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Kondisi fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Halmahera Timur dapat digambarkan melalui keberadaan fasilitas Rumah Sakit dan Puskesmas yang tersebar di 10 kecamatan. Rumah Sakit didefinisikan sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Adapun Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Pada kondisi tertentu dan bila memungkinkan, Puskesmas dapat memberikan pelayanan rawat inap sebagai rujukan antara sebelum dirujuk ke rumah Sakit. Perkembangan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Halmahera Timur dalam lima tahun terakhir sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

**Tabel 2.55. Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024**

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Rumah Sakit	1	1	1	1	2
Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit	50	50	50	50	50
Rasio daya tampung RS (per 1000 penduduk)	95	95	96	96	97
Akreditasi RSUD	Dasar	Dasar	Dasar	Utama	Utama
Jumlah Puskesmas	16	16	16	16	16
PKM Terakreditasi	100	100	100	100	100
PKM Tersedia Dokter					93,8
PKM Tersedia Nakes sesuai Standar	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
PKM menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi	35,6	37,5	40	41,6	43,8

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PKM menyelenggarakan Kesjaor					6,3
PKM menyelenggarakan pelayanan Kesehatan Lansia					-
PKM menyelenggarakan pelayanan Kesehatan Tradisional	35,67	37,55	39,95	41,61	43,8
PKM mampu PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar)					-

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Timur, 2025

4) Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sumber daya manusia kesehatan (SDMK) adalah tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis) dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan. Peran tenaga kesehatan menjadi sangat penting dalam implementasi sistem kesehatan. Di sisi lain tantangan seperti rendahnya kompetensi menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan sistem kesehatan. SDMK adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan selain dilaksanakan oleh dokter, juga dibantu oleh tenaga kesehatan lainnya seperti Perawat, Bidan, Farmasi, Kesehatan Masyarakat, Tenaga Gizi, Teknisi Medis, dan Tenaga Terapis. Peranan tenaga-tenaga kesehatan tersebut sangat penting dalam mendukung pelayanan kesehatan agar semakin optimal. Keadaan tenaga kesehatan di Kabupaten Halmahera Timur hingga tahun 2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 2.56. Ketersediaan Tenaga Kesehatan
Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024**

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk (jiwa)					
Dokter					
Dokter Umum					29
Dokter Spesialis					2
Dokter Gigi					7
Jumlah Dokter					37
<i>Rasio Dokter (per 2500 penduduk)</i>					<i>1 : 2.512</i>
<i>Rasio Dokter Spesialis (per 2500 penduduk)</i>					<i>1 : 92.954</i>
Bukan Dokter					
Perawat					293
Bidan					285
Tenaga Farmasi					45
Tenaga Kesmas					131
Tenaga Gizi					53
Tenaga Teknisi Medis					7
Tenaga Terapis					4
Jumlah					818

1) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat adalah angka kesakitan dan kematian akibat penyakit, baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Untuk itu penting dilakukan upaya pengendalian penyakit melalui upaya menurunkan insiden, prevalensi, morbiditas atau mortalitas dari suatu penyakit hingga level yang dapat diterima secara lokal.

Gambaran kejadian kasus atau insidensi penyakit menular maupun tidak menular di Kabupaten Halmahera Timur dalam kurun tahun 2021-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 2.57. Kasus Penyakit Menular dan Tidak Menular
Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2024**

No	Uraian	2021	2022	2023	2024
1	Tuberculosis (TB)				
	Banyaknya kasus penderita TBC 61	125	93	39	
	Cakupan Penemuan dan penanganan penderita TBC BTA 34,659 (+)	71	52,84	22,159	
	Prevalensi TBC (per 100.000 65	132	97	41	
	Jumlah pasien TB yang 5	6	8	3	
	Tingkat Kematian TBC (per 5	6	8	3	
	Proporsi jumlah kasus TB yang 100	100	100	100	
	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam 19,67 program DOTS	17,6	6,45	38,46	
2	Demam Berdarah Dengue (DBD)				
	Cakupan penemuan dan 100	100	100	100	
3	Diare				
	Penderita diare yang ditangani -	11	8	11	
4	Malaria				
	Angka kejadian Malaria (per 519	203	174	29	
	Tingkat kematian Akibat Malaria -	-	-	-	
5	HIV/AIDS				
	Prevalensi HIV/AIDS (persen) 0,04	0,05	0,07	0,03	

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Timur, 2025

C) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pekerjaan umum merujuk pada berbagai macam proyek infrastruktur yang didanai dan dibangun oleh pemerintah, untuk meningkatkan ekonomi, kesehatan, maupun keamanan masyarakat. Pekerjaan umum dapat meliputi pembangunan fasilitas umum (kantor pemerintah daerah, sekolah, rumah sakit), infrastruktur

transportasi (jalan, rel, jembatan, jalur pipa, terusan, pelabuhan, bandara), ruang publik (alun-alun, taman, pantai), layanan umum (penyediaan dan pengolahan air, pengolahan limbah, bendungan), dan lain-lain, yang biasanya berupa aset dan bangunan fisik yang dapat digunakan dalam jangka panjang. Infrastruktur pekerjaan umum tidak selalu membawa dampak ekonomi langsung bagi pemerintah, namun membawa dampak ekonomi tidak langsung dalam jangka panjang. Adapun Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) adalah: (1) Sumber Daya Air (SDA) (Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota; Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota; 2) Air Minum (Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/kota); 3) Persampahan (Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah kabupaten/kota); 4) Air Limbah (Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten/kota); 5) Drainase (Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah kabupaten/kota); 6) Permukiman (Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah kabupaten/kota); 7) Bangunan Gedung (Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten/kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung); 8) Penataan Bangunan dan Lingkungannya (Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah kabupaten/kota); 9) Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota; 10) Jasa Konstruksi (Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi; Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten/kota; Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil); Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi); dan 11) Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten/kota. Capaian kinerja pembangunan dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tersaji dalam tabel di halaman berikut.

Tabel 2.58. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024

No	Uraian	Capaian Kinerja		
		2022	2023	2024
1	Sumber Daya Air			
a	Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten (Ha)	815,0	815,0	
b	Panjang Jaringan Irigasi kewenangan Kabupaten yang terbangun (km, kumulatif)	1,26	1,26	1,26
2	Air Minum dan Air Limbah			
	Proporsi rumah tangga memiliki akses pada layanan air minum layak (persen)	65,99	66,47	71,17
	Proporsi rumah tangga memiliki akses pada sanitasi layak (persen)		70,10	79,79
3	Drainase			
	Panjang saluran Drainase yang terbangun (km, kumulatif)			
	Proporsi panjang saluran Drainase yang terbangun dalam kondisi baik (persen)	n/a	n/a	n/a
4	Penyelenggaraan Jalan	54,79		
a	Kondisi Jalan Kabupaten			
	Baik (Km)			
	Sedang (Km)			
	Rusak Ringan (Km)			
	Rusak Berat (Km)			
	Total (Km)			
b	Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap/baik dan sedang (persen)	65,13	66,64	59,29
c	Proporsi desa yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	59,0		
d	Proporsi panjang jalan kabupaten yang memiliki trotoar dan drainase (minimal 1,5 m)	12,28		
5	Jasa Konstruksi	0,54		
	Rasio proyek konstruksi kewenangan kabupaten tanpa kecelakaan konstruksi (persen)			
6	Penatan Ruang			
	Rasio penyelesaian materi teknis RTRW dan RRTR sampai dengan persetujuan substansi dan legalisasi (persen)	100,0	100,0	

Sumber: Dinas PUPR Kab. Halmahera Timur, 2024

D) Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah: 1) Perumahan (Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota; Fasilitas penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota; Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan; Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung); 2) Kawasan

Permukiman (Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman; Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha); 3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh (Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota); 4) Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan; dan 5) Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

Rumah (papan) merupakan kebutuhan primer manusia. Jaminan kesejahteraan bagi setiap warga terhadap kebutuhan dasar merupakan tanggung jawab pemerintah yang wajib dipenuhi. Regulasi tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menekankan kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayahnya. Tabel berikut menyajikan kinerja penyelenggaraan perumahan di Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan tahun 2024.

Tabel 2.59. Kinerja Penyelenggaraan Perumahan Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024

No	Uraian	2022	2023	2024
1a	Jumlah rumah korban bencana kabupaten yang harus ditangani	n/a	n/a	n/a
1b	Jumlah rumah korban bencana kabupaten yang sudah ditangani	n/a	n/a	n/a
2a	Jumlah rumah korban relokasi kabupaten yang harus ditangani	n/a	n/a	n/a
2b	Jumlah rumah korban relokasi kabupaten yang sudah ditangani	n/a	n/a	n/a
3	Jumlah Rumah (unit)	n/a	n/a	n/a
4	Jumlah Rumah Layak Huni (unit)	84,85	84,89	84,79
4a	Rasio Rumah Layak Huni (persen)	87,72	84,18	
5a	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (unit)	n/a	n/a	n/a
5b	Rasio Rumah Tidak Layak Huni (persen)	n/a	n/a	n/a
5c	Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (Ha)	6,37	7,81	8,18

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Halmahera Timur, 2023

E) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat adalah: 1) Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum; Penegakan Perda Kabupaten dan peraturan bupati; dan Pembinaan PPNS kabupaten); 2) Penanggulangan bencana kabupaten;

dan 3) Kebakaran (Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten).

Capaian kinerja pembangunan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan tahun 2024, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.60. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024

No	Uraian	2022	2023	2024
Trantibum				
1	Jumlah Personil Satpol PP	50	100	170
2	Jumlah PPNS	15	15	28
3	Desa yang Memiliki Satuan Linmas Aktif (%)			8,82
4	Persentase Desa yang terjangkau Patroli Satpol-PP			5,88
5	Jumlah Perda yang memuat sanksi yang Harus ditegakkan	21	21	21
6	Persentase Jumlah Perda yang memuat sanksi yang telah ditegakkan	80,0	50,0	50,0
7	Jumlah laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang diterima oleh Satpol-PP	2	3	10
8	Persentase Jumlah laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang diterima oleh Satpol-PP dan dapat ditindaklanjuti/diselesaikan	50,0	66,7	80
Kebakaran				
1	Jumlah Kejadian Kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	-	-	3
2	Persentase Jumlah Kejadian Kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) ditangani	50	-	81,8
3	Tingkat waktu tanggap (response time) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)(Menit)		15	10
Bencana				
1	Jumlah Desa telah terbentuk Relawan Tangguh Bencana			30
2	Persentase Kejadian Bencana Ditangani (direspons dengan aktivasi tanggap darurat sesuai SOP	100,0	100,0	100,0
3	Rata-rata Waktu Respon Aktivasi Tanggap Darurat (Jam)	<6	<6	<6
4a	Jumlah korban bencana kabupaten yang harus ditangani (jiwa)			
4b	Persentase jumlah korban bencana kabupaten yang mendapatkan pelayanan saat bencana sesuai standar pelayanan minimal (jiwa)			
5	Indeks Risiko Bencana Kabupaten	173,2	173,2	173,2

Sumber: Dinas Satpol PP Kab. Halmahera Timur, 2023; BPBD Kab. Halmahera Timur, 2023

F) Sosial

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam urusan Sosial adalah: 1) Pemberdayaan Sosial; 2) Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan; 3) Rehabilitasi Sosial; 3) Perlindungan dan Jaminan Sosial; 4) Penanganan Bencana; dan 5) Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota. Capaian kinerja pembangunan bidang Sosial di Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan tahun 2023 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.61. Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pemberdayaan Sosial						
1	Jumlah jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) tingkat kabupaten yang telah dikembangkan atau diberdayakan (jenis, kumulatif)	-	-	5	5	5
2	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) tingkat kabupaten yang telah dikembangkan atau diberdayakan (orang, kumulatif)	-	-	50	50	50
Rehabilitasi Sosial						
1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang sudah ditangani atau dipenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	-	-	-	-	996
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang sudah ditangani atau dipenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	-	-	-	-	69,70
Penanganan Bencana						
1	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang harus dipenuhi kebutuhan	-	-	-	-	284
2	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang harus dipenuhi kebutuhan Persentase korban bencana alam dan sosial yang sudah ditangani/terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	-	-	-	-	100
Perlindungan dan Jaminan Sosial				8.612	11.047	11.047
1	Cakupan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Pangan (persen)	100,47	93,87	95,99	96,67	98,19

Sumber: Dinas Sosial Kab. Halmahera Timur, 2024

2.3.2. Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan wajib non pelayanan dasar terdiri dari 18 urusan, yaitu Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olah Raga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan.

A) Tenaga Kerja

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam urusan Tenaga Kerja meliputi sub urusan: 1) Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi; Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta; Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja; Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil; dan Pengukuran produktivitas tingkat Daerah kabupaten/kota); 2) Penempatan tenaga kerja (Pelayanan antar kerja; Penerbitan izin LPTKS; Pengelolaan informasi pasar kerja; Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan); Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota; dan 3) Hubungan industrial (Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota; Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah kabupaten/kota. Capaian kinerja bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 2.62. Kinerja Urusan Tenaga Kerja
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Produktifitas per tenaga kerja daerah (Rp. Juta)	81,66	91,87	89,41	111,32	114,20
2	Tingkat kesempatan (persen)					
3	Persentase pekerja sektor formal (persen)					
4	Angka sengketa Pengusaha-Pekerja (per 1000 perusahaan)			31,96		
5	Persentase perusahaan yang menerapkan K3			5,33		
6	Persentase pekerja/buruh yang terlindungi dalam program Jamsostek			-	45,87	38,84

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Timur, 2024

B) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kesetaraan gender merupakan hak pada semestinya didapatkan oleh semua pihak, baik laki-laki dan perempuan agar memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam bidang kehidupan. Perbedaan gender pun terlihat dari kecenderungan peran masing-masing, yaitu berperan dalam publik atau domestik. Peran publik diartikan dengan aktivitas yang dilakukan di luar rumah dan bertujuan mendapatkan penghasilan.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi sub urusan: 1) Kualitas Hidup Perempuan (Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah; Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan; Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan); 2) Perlindungan Perempuan (Pencegahan kekerasan terhadap perempuan; Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan; Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan); 3) Kualitas Keluarga (Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak; Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak; Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak); 4) Sistem data gender dan anak; 5) Pemenuhan Hak Anak; dan 6) Perlindungan Khusus Anak.

Capaian kinerja pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel 2.63. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024

No	Uraian	2022	2023	2024
1	Indeks Pemberdayaan Gender	50,2	50,05	50,49
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (persen)	46,81	52,98	50,93
3	Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	0,01		
4	Indeks Perlindungan Anak	-	58,81	61,11
5	Indeks Pemenuhan Hak Anak	-	53,2	55,83
6	Indeks Perlindungan Khusus Anak	-	77,94	80,41

Sumber: Dinas P2KBP3A Kab. Halmahera Timur, 2025

C) Pangan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam urusan Pangan meliputi sub urusan: 1) Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian; 2) Penyelenggaraan Ketahanan Pangan; 3) Penanganan Kerawanan Pangan; 4) Keamanan Pangan (Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar dalam kabupaten).

Gambaran pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan Pangan di Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.



**Tabel 2.64. Kinerja Urusan Pangan
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024**

No	Uraian	2022	2023	2024
1	Indeks Ketahanan Pangan	72,38	76,12	79,63
2	Jumlah desa yang masuk dalam kategori rawan pangan			98
3	Persentase Desa kategori rentan rawan pangan	51,0	4,9	20,6
4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	100,0	100,0	100,0
5	Jumlah Regulasi Ketahanan Pangan Tingkat Daerah (Perda/Perbup)*			
6	Tingkat Ketersediaan Pangan Utama (Ton)			
	a) Beras			
	b) Jagung			
	c) Ubi Kayu			
	d) Ubi Jalar			
	e) Sagu			
	f) Gandum/terigu			
7	Skor PPH Ketersediaan	72,1	68,3	79,63
8	Rata-rata Konsumsi Kalori Per Kapita (Kkal) (Susenas BPS)	1.854		
9	Rata-rata Konsumsi Protein per Kapita (Gram) (Susenas BPS)	49,8		

Sumber: Dinas Ketahanan Kab. Halmahera Timur, 2025

D) **Pertanahan**

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam urusan Pertanahan meliputi sub urusan: 1) Izin Lokasi; 2) Penyelesaian sengketa tanah garapan; 3) Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah; 4) Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee; 5) Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; 6) Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota dan Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota; 7) Penerbitan izin membuka tanah; dan 8) Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah kabupaten/kota. Capaian kinerja urusan pertanahan di Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 2.65. Kinerja Urusan Pertanahan
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat melalui Mediasi	100,0	50,0	50,0	66,7	100,0
2	Persentase luas tanah milik Pemda yang telah dimanfaatkan untuk pembangunan	100,0	100,0	100,0	100,0	99,1
3	Jumlah permohonan izin lokasi		2	2	4	
4	Jumlah izin lokasi		2	2	9	
5	Persentase penyelesaian izin lokasi		100	100	44,4	

Sumber: Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kab. Halmahera Timur, 2024

E) Lingkungan Hidup

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten dalam urusan Lingkungan Hidup meliputi sub urusan: 1) Perencanaan Lingkungan Hidup; 2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis; 3) Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 4) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati kabupaten; 5) Penyimpanan sementara limbah B3 dan Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten; 6) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten; 7) Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH; 8) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan LH untuk lembaga kemasyarakatan kabupaten; 9) Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten; 10) Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH; dan 11) Pengelolaan Persampahan.

Capaian kinerja urusan lingkungan hidup di Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 2.66. Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024**

No	Uraian	2022	2023	2024
1	Perda tentang RPPLH (Ada/Tidak)	Tidak	Tidak	Tidak
2a	Jumlah KRP Pemda yang memerlukan KLHS			
2b	Luas RTH publik yang telah terbangun (Ha, kumulatif)	46,77	46,77	46,77
Pengawasan Izin Lingkungan				
1	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang izin PPLH dan PUU LH Taat	27,71	28,92	24,10
Pencemaran Lingkungan				
1	Persentase objek pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang dilaporkan dan sudah ditangani	100,0	100,0	100,0
2	Persentase Jumlah objek pencemaran/kerusakan lingkungan hidup kewenangan kabupaten yang dilaporkan dan sudah ditangani			
Pengaduan Masyarakat				
1	Jumlah pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten, yang lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten			
2	Persentase Jumlah pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten, yang lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten yang ditangani/ditindaklanjuti			
Pengelolaan Sampah				
	Persentase volume timbulan sampah perkotaan yang sudah ditangani	73,0	72,0	70,9

No	Uraian	2022	2023	2024
1	Volume potensi timbunan sampah perkotaan (M3)			
Kualitas Lingkungan Hidup				
1	Indeks Kualitas Udara	93,57	92,97	96,31
2	Indeks Kualitas Air	62,38	64,29	62,00
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	97,50		
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	82,70	83,07	83,62

Sumber: Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kab. Halmahera Timur, 2024

F) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi sub urusan: 1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan 2) Penyusunan profil kependudukan kabupaten. Capaian kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.67. Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penduduk wajib KTP yang Sudah ber-KTP	99,9	99,9	100,0	n/a	n/a
2	Persentasi anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari memiliki KIA	4,9	4,9	5,0	n/a	n/a
3	Persentase anak usia 0-18 tahun memiliki Akta Kelahiran	14,0	14,0	68,3	n/a	n/a
4	Ketersediaan database kependudukan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas CAPIL Kab. Halmahera Timur, 2024

G) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah menempatkan desa sebagai organisasi campuran (*hybrid*) antara masyarakat berpemerintahan (*self governing community*) dengan pemerintahan lokal (*local self government*), sehingga desa berwajah ganda: pemerintahan dan masyarakat, atau berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat. Desa tidak identik dengan pemerintah desa dan kepala desa. Desa mengandung pemerintahan dan sekaligus mengandung masyarakat sehingga membentuk kesatuan (entitas) hukum. Desa merupakan organisasi pemerintahan yang paling kecil, paling bawah, paling depan dan paling dekat dengan masyarakat.

Tujuan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa adalah: 1) memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2) memberikan

kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; 3) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; 4) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; 5) membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; 6) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; 7) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; 8) memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan 9) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. UU Desa telah menempatkan desa sebagai subyek pembangunan, bukan lagi sekedar obyek pembangunan.

Adapun berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi sub urusan: 1) Penyelenggaraan penataan Desa; 2) Fasilitasi kerja sama antar Desa dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota; 3) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa; dan 4) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat. Capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan tahun 2024 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.68. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024

No	Uraian	Capaian Kinerja		
		2022	2023	2024
1	Persentase Desa Kategori IDM Mandiri	0,0	0,0	0,0
2	Persentase Desa Kategori IDM Maju	4,77	6,17	9,0
3	Persentase Desa Kategori IDM Tertinggal/Sangat Tertinggal	56,82	38,67	20,5
4	Persentase Desa memiliki BUMDES	-		
5	Jumlah BUMDES (unit)	-		
6	Persentase BUMDES Aktif	-		

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Halmahera Timur. 2025

H) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) meliputi sub urusan: 1) Pengendalian Penduduk; 2) Keluarga Berencana; dan 3) Keluarga Sejahtera. Capaian kinerja pembangunan urusan Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana di Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tersaji dalam tabel di halaman berikut.

Tabel 2.69. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024

No	Uraian	Capaian Kinerja		
		2022	2023	2024
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,67	2,43	2,31
2	Total Fertility Rate (TFR)	2,73	2,67	2,45
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga (Orang)	2,3	2,3	
4	Rasio Akseptor KB	73,1	85,5	
5	Rasio Pemakai kontrasepsi/CPR bagi perempuan Menikah Usia 15-49	65,9	67	
6	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive/mCPR)	53,7	39,0	45,3
9	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15 -19) per 1.000 perempuan usia 15-19 (ASFR 15-19)	48,7	40,7	37,3
10	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang mau ber-KB tapi tidak terlayani (<i>unmeet need</i>)	17,45	15,41	18,4
14	Cakupan remaja dalam PIKR/M	38,46	40,5	
15	Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	13,16	20,5	

Sumber: Dinas PPKBP3A Kab. Halmahera Timur, 2024

I) Perhubungan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam urusan Perhubungan meliputi sub urusan: 1) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ): Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten; Pengelolaan terminal penumpang tipe C; Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah kabupaten; 2) Pelayaran, meliputi: Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha; Angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha; Angkutan sungai dan danau; dan 3) Penerbangan, untuk jenis pelayanan Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter; dan 4) Perkeretapihan.

Gambaran pencapaian kinerja pembangunan urusan Perhubungan di Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tersaji dalam tabel di halaman berikut.

Tabel 2.70. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024

No	Uraian	Capaian Kinerja		
		2022	2023	2024
1	Rasio konektifitas kabupaten (persen)	91,2	91,2	91,2
	Rasio konektivitas darat (persen)	82,4	82,4	82,4
2	Rasio konektivitas laut (persen)	100	100	100
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus :				
3	Pelabuhan Laut	8	8	8
4	Pelabuhan Udara	1	1	1

No	Uraian	Capaian Kinerja		
		2022	2023	2024
5	Jumlah terminal bus Jumlah	9	9	13
7	Jumlah pemasangan rambu – rambu	200	200	200
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	98,18	98,18	98,18
Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum				
11	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	65.52	65.52	65.52
12	jumlah barang yang terangkut angkutan umum	655.2	655.2	655.2
13	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	729.035	729.035	729.035

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Timur. 2023

J) Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam urusan Komunikasi dan Informatika meliputi sub urusan: 1) Informasi dan Komunikasi Publik (Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota); dan 2) Aplikasi Informatika (Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Gambaran pencapaian kinerja urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 2.71. Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				1,01	1,38
2	Jumlah Perangkat Daerah yang terkoneksi di jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang disediakan secara terpadu oleh Pemda	30	35	37	38	38

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Kab. Halmahera Timur, 2025

K) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pilar perekonomian Indonesia. Kehadirannya mampu menjawab dan memberi solusi terhadap usaha pemberdayaan ekonomi rakyat, memperluas lapangan pekerjaan, hingga menurunkan kemiskinan pada suatu daerah. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam urusan Koperasi dan UKM meliputi sub urusan: 1) Izin Usaha Simpan Pinjam; 2) Pemeriksaan dan pengawasan koperasi; 3) Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi; 4) Pendidikan dan latihan perkoperasian; 5) Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi; 6) Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM); dan 7) Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadibusaha kecil. Capaian kinerja Urusan Koperasi UKM di Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan tahun

2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 2.72. Kinerja Urusan Koperasi dan UKM
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A Koperasi						
1	Jumlah Koperasi	108	109	114	114	114
2	Jumlah Anggota Koperasi (orang)					
3	Jumlah Koperasi Aktif	60	61	65	65	65
	Persentase Koperasi Aktif	58,47	59,84	60,80	62,02	62,31
B UMKM						
1	Jumlah Usaha Mikro					
2	Jumlah Usaha Kecil					
3	Jumlah Usaha Menengah					
4	Pertumbuhan UMKM	-	9,84	3,42	2,62	1,38
5	Rasio Wirausaha Mapan (persen)	1,16	6,66	2,99	4,73	2,32

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Halmahera Timur, 2024

L) Penanaman Modal

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di seluruh sektor bidang usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam urusan Penanaman Modal meliputi sub urusan: 1) Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 2) Promosi Penanaman Modal; 3) Pelayanan Penanaman Modal; 4) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan 5) Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Gambaran kinerja Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 2.73. Kinerja Urusan Penanaman Modal
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024**

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat partisipasi pemuda (usia 16-30 tahun) dalam kegiatan ekonomi (persen)		84,1	81,9	83,25	84,6

Sumber: Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab. Halmahera Timur, 2025

M) Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam urusan Kepemudaan dan Olahraga meliputi sub urusan: 1) Kepemudaan; 2) Keolahragaan; dan 3) Kepramukaan. Kinerja pembangunan urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.



**Tabel 2.74. Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024**

No	Uraian	2022	2023	2024
A	Kepemudaan			
1	Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten yang aktif (Organisasi Nasional Tingkat Cabang)	16	16	17
2	Organisasi Kepemudaan Tingkat Desa/Kecamatan yang aktif (Organisasi skala lokal Kab/kec/desa, dan terdaftar atau sepengetahuan Pemerintah Kab/Kec/Desa)	10	10	29
3	Pemuda Berprestasi Tingkat Nasional/Provinsi			
4	Tingkat partisipasi pemuda (usia 16-30 tahun) dalam kegiatan ekonomi (persen)	81,9	83,25	84,6
B	Olahraga			
1	Organisasi Olahraga Tingkat Kabupaten yang aktif (Organisasi Nasional Tingkat Cabang)	8	8	9
2	Klub Olahraga Tingkat Desa/Kecamatan yang aktif (Klub skala lokal Kab/kec/desa, dan terdaftar atau sepengetahuan Pemerintah Kab/Kec/Desa)	19	19	19
3	Atlet Berprestasi Tingkat Nasional/ Provinsi (PON/Kejurnas/Porda/ Kejurda)			
4	Atlet Pelajar Berprestasi Tingkat Nasional/Provinsi (POPNAS/POPDA/dll)	3	3	3
6	Perolehan medali pada multi event olahraga tingkat pelajar nasional/provinsi (POPNAS/POPDA/dll)	20	21	10
7	Jumlah atlet pelajar/dewasa berprestasi dalam multi/single event olahraga tingkat Provinsi/ Nasional (PON/PORDA/ POPNAS/POPDA/Kejurnas/Kejurda)	n/a	n/a	n/a
C	Pramuka			
1	Satuan Karya (SAKA) Pramuka yang telah terbentuk dan aktif di tingkat Kabupaten	3	3	3
2	Kecamatan yang memiliki Kwartir Ranting Pramuka Aktif	5	5	6
3	Sekolah Memiliki Gugus Depan Pramuka			
	a. SD/ sederajat	6	6	4
	b. SMP/ sederajat	5	4	3
	c. SMA/ sederajat	3	3	4
	d. Perguruan Tinggi			

Sumber: Dinas Pemuda & Olahraga Kab. Halmahera Timur, 2025

N) Statistik

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam kinerja urusan Statistik menjabarkan Persentase OPD telah menetapkan Focal Point Statistik Sektoral secara resmi pada tahun 2024 yaitu 12, 8.

O) **Persandian**

Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan sistem informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori dan seni dari ilmu krypto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Persandian meliputi sub urusan: Persandian untuk Pengamanan Informasi, yaitu: Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah serta Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah. Kinerja Pengelolaan urusan persandian menjabarkan persentase OPD yang telah menggunakan tanda tangan Elektronik tersertifikasi pada tahun 2024 yaitu 89,1

P) **Kebudayaan**

Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan dapat dipandang sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai super-organic. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Kebudayaan meliputi sub urusan: 1) Kebudayaan (Pengelolaan kebudayaan; Pelestarian tradisi; Pembinaan lembaga adat); 2) Kesenian Tradisional (Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota); 3) Sejarah (Pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota); 4) Cagar Budaya (Penetapan dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota; Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah); dan 5) Pengelolaan museum kabupaten/kota. Penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kabupaten Halmahera Timur dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Sampai dengan tahun 2024 dapat mempresentasikan warisan budaya tak benda terinventarisasikan yang telah diverifikasi/validasi yaitu 11,0 % dan warisan budaya tak benda terinventarisasikan yang telah ditetapkan yaitu 75,0%.

Namun demikian, terdapat sejumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang telah dilestarikan, yaitu: a) Bunker peninggalan perang dunia II; b) 2. Kuburan mata kena; c) Al-qur'an tua (kulit kayu); c) Kuburan sultan zainal abidin, dan e) Meriam peninggalan perang dunia II.

Q) Perpustakaan dan Kearsipan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam urusan Perpustakaan meliputi sub urusan: 1) Pembinaan Perpustakaan (Pengelolaan perpustakaan dan Pembudayaan gemar membaca); dan 2) Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno. Adapun kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Kearsipan meliputi sub urusan: 1) Pengelolaan Arsip; 2) Perlindungan dan Penyelamatan Arsip; dan 3) Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Halmahera Timur dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan tahun 2024 tersaji dalam Tabel berikut.

**Tabel 2.75. Kinerja Urusan Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024**

	Uraian	2022	2023	2024
A	Perpustakaan			
	Perpustakaan milik Pemerintah Daerah			
	Perpustakaan milik non Pemerintah Daerah (termasuk Perpustakaan Desa atau diselenggarakan oleh masyarakat)	3	3	3
	Angka Melek Huruf (persen)	98,45	97,97	98,67
	Tingkat Kegemaran Membaca (persen)			57,56
	Perpustakaan yang telah dikelola sesuai Standar Nasional Perpustakaan			
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat			25,24
D	Kearsipan			
	Nilai hasil pengawasan kearsipan pemerintah daerah (ANRI)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber: Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Halmahera Timur, 2025

2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Urusan Pilihan terdiri dari 8 (delapan) urusan, yaitu Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perdagangan, Perindustrian, dan Transmigrasi.

A. Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten dalam urusan Kelautan dan Perikanan meliputi sub urusan: 1) Perikanan Tangkap (Pemberdayaan nelayan kecil; Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)); dan 2) Perikanan Budidaya (Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan Pengelolaan pembudidayaan ikan). Capaian kinerja pembangunan urusan

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 2.76. Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024**

N	Uraian	2022	2023	2024
1	Total Produksi Perikanan (ton)	27,504	23.929	23.929
2	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	1029,0	1.475,7	1.475,7
3	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	n/a	n/a	n/a
4	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)	27,25	45,75	
5	Persentase Kelompok Nelayan yang mendapatkan bantuan Pemda	26,70%	-	
6	Jumlah Kelompok Nelayan	67	101	
7	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan	14	-	
8	Jumlah Kelompok Pengolah Ikan	9	-	
9	Jumlah Produksi Kontribusi dari Kelompok Nelayan	7,486.90		
10	Nilai Tukar Nelayan	0.97	1,00	
11	Kawasan Lindung Perairan	6.775,09	-	
12	Total Luas Perairan Teritorial	7.695,82	-	

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Halmahera Timur, 2025

B. Pariwisata

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten dalam urusan Pariwisata meliputi sub urusan: 1) Destinasi Pariwisata (Pengelolaan daya tarik wisata; Pengelolaan kawasan strategis pariwisata; Pengelolaan destinasi pariwisata); 2) Pemasaran pariwisata (Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata); 3) Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif; dan 4) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Gambaran capaian kinerja pembangunan urusan Pariwisata di Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan tahun 2024, tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 2.77. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024**

No	Uraian	2022	2023	2024
1	Kontribusi PDRB ADHB sektor Pariwisata (Persen)*	0,17	0,14	0,14
2	Pertumbuhan PDRB ADHK sektor Pariwisata (Persen)*	-5,93	3,83	4,78
3	Kunjungan Wisatawan Mancanegara (orang)	-	36	36
4	Kunjungan Wisatawan Nusantara (orang)	37.164	42.936	49.299

*) PDRB Lapangan usaha Penyediaan Akomodasi & Penyediaan Makan Minum Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Halmahera Timur, 2025

C. Pertanian

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam urusan Pertanian meliputi sub urusan: 1) Sarana Pertanian; 2) Pengembangan prasarana pertanian; 3) Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; 4) Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian; dan 5) Perizinan Usaha Pertanian. Capaian kinerja pembangunan urusan Pertanian di Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 2.78. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024**

No	Uraian	Capaian Kinerja		
		2022	2023	2024
1	Tanaman Pangan			
	Jumlah Produksi (Ton)	11.749,0	11.1607,5	8.868,0
	Jumlah Luas Areal (Ha)	3.914	4.12	
2	Tanaman Hortikultura			
	Jumlah Produksi (Ton)	3.591,0	2.805,0	2.456,5
	Jumlah Luas Areal (Ha)	2.402	8.928	
3	Tanaman Perkebunan			
	Jumlah Produksi (Ton)	11.375,4	11.378,4	11.377,7
	Jumlah Luas Areal (Ha)	21.417	25.168	
4	Peternakan			
	Jumlah Produksi (Ton)	209,96	182,54	159,62

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Halmahera Timur, 2025

D. Kehutanan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam urusan Kehutanan, tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 2.79. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kehutanan
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024**

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	-	97,50	97,50	97,04	97,28

Sumber: RPJMD. Halmahera Timur, 2025-2029

E. Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yaitu Sub Urusan Energi Baru Terbarukan, dalam bentuk pelayanan Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan urusan ESDM di Kabupaten Halmahera Timur dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan ESDM. Secara umum, tabel berikut menyajikan sejumlah indikator yang menggambarkan penyelenggaraan urusan ESDM di Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan tahun 2024.

**Tabel 2.80. Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024**

No	Uraian	2022	2023	2024
1	Persentase rumah tangga menggunakan listrik	97,36	99,09	100,0
2	Kapasitas Terpasang Listrik PLN (MW)			

Sumber: BPS Kab. Halmahera Timur, 2025

F. Perdagangan dan Perindustrian

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam urusan Perdagangan meliputi sub urusan: 1) Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan (pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan usaha toko swalayan); 2) Sarana Distribusi Perdagangan (Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan; Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat); 3) Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (penjaminan ketersediaan, pemantauan harga dan stok, operasi pasar); 4) Pengembangan Ekspor; dan 5) Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Adapun kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam urusan Perindustrian meliputi sub urusan: 1) Perencanaan Pembangunan Industri; 2) Perizinan (Industri kecil dan menengah); 3) Sistem Informasi Nasional (penyampaian laporan industri). Gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perdagangan dan perindustrian di Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan tahun 2024, tersaji

dalam tabel di halaman berikut.

**Tabel 2.81. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024**

No	Uraian	2022	2023	2024
PERDAGANGAN				
1	Kontribusi PDRB sektor perdagangan (persen)	12,79	10,62	11,20
2	Kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa (%PDRB)	-2,78	-4	-14,46
PERINDUSTRIAN				
1	Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan (persen)	2,76	2,38	2,51

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kab. Halmahera Timur, 2025

G. Transmigrasi

Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduknya yang ditetapkan di dalam wilayah Republik Indonesia, guna kepentingan negara dan alasan yang dipandang perlu oleh pemerintah. Transmigrasi memiliki tujuan yaitu untuk menyeimbangkan penyebaran penduduk, memperluas kesempatan kerja, mempercepat lajunya pembangunan daerah, pemerataan sumber daya alam dan sumber daya manusia serta meningkatkan taraf hidup para transmigrasi dan memperkuat ketahanan nasional. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Transmigrasi meliputi sub urusan: 1) Perencanaan kawasan transmigrasi; 2) Pembangunan kawasan transmigrasi; dan 3) Pengembangan kawasan transmigrasi. Tabel berikut menyajikan indikator yang menggambarkan capaian kinerja urusan Transmigrasi di Kabupaten Halmahera Timur tahun 2024.

**Tabel 2.82. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Transmigrasi
Kabupaten Halmahera Timur**

Uraian	2022	2023	2024	Status
Indeks perkembangan kawasan transmigrasi	n/a	n/a	n/a	berkembang

Sumber: Transmigrasi Kab. Halmahera Timur, 2025

2.3.4. Fokus Layanan Unsur Pendukung, Penunjang, Pengawasan dan Pemerintahan Umum

Unsur pendukung, penunjang dan pengawasan pemerintahan daerah serta pemerintahan umum, meliputi: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat Daerah, serta Kesatuan Bangsa dan Politik.

Gambaran capaian kinerja dalam penyelenggaraan unsur-unsur

pemerintahan daerah tersebut sebagaimana tersaji pada Tabel-tabel berikut.

Tabel 2.83. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pendukung Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024

No	Uraian	2022	2023	2024
Tata Pemerintahan				
1	Indeks Reformasi Birokrasi	C	C	C
2	Nilai/Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemda	50,6	51,44	53,57
3	Indeks Pelayanan Publik	3,29	2,12	2,29
4	Nilai EKPPD (hasil penilaian Kemdagri)			
Pengadaan Barang dan Jasa				
1	Indeks Tata Kelola Pengadaan Pemda	24,50	28,68	64,74
Kerjasama Daerah				
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,07	82,05	82,81
2	Jumlah Kerjasama daerah (berdasarkan jumlah MoU), kumulatif			
3	Proporsi kerjasama daerah yang sudah ditindaklanjuti (persen)			

Sumber: Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Timur, 2025

Tabel 2.84. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pendukung Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024

No	Uraian	2022	2023	2024
	Jumlah Ranperda dalam Prolegda	10	8	5
	Jumlah Ranperda dalam Prolegda yang disetujui menjadi Perda	7	6	3
	Persentase Ranperda dalam Prolegda yang disetujui menjadi Perda	66,00	60,00	53,00

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Halmahera Timur, 2025

Tabel 2.85. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pendukung Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024

No	Uraian	2022	2023	2024
1	Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan daerah (persen)			95,0
2	Tingkat realisasi kinerja pembangunan daerah (persen)			58,3
3	Indeks Inovasi Daerah	49,521	45,43	54,04

Sumber: BP4D Kab. Halmahera Timur, 2025

Tabel 2.86. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Penunjang Keuangan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024

No	Uraian	2022	2023	2024
Pengelolaan Keuangan				
1	Predikat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP
2	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah (persen)	5,51	3,63	3,17
Pengelolaan Pendapatan				



No	Uraian	2022	2023	2024
1	Rasio kemandirian keuangan daerah (persen)	5,83	3,78	3,31
2	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	n/a	n/a	1-27
2	Rasio efektifitas pajak dan retribusi daerah (persen)		94,72	109,5

Sumber: BPKAD Kab. Halmahera Timur, 2025

Tabel 2.87. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024

No	Uraian	2022	2023	2024
Kepegawaian				
1	Jumlah PNS (orang)		2.695	
2	Rasio pegawai PNS yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi S1/S2/S3 (persen)	57,3	59,5	59,1
3	Kedisiplinan Aparatur			
	a. Jumlah pelanggaran disiplin (kasus)			
	b. Jumlah pelanggaran disiplin (orang/PNS)			
4	Eseloneering			
	a. Jumlah jabatan eseloneering yang tersedia			
	b. Rasio jabatan eseloneering yang terisi (persen)			
5	Indeks Profesionalisme (IP) ASN Kabupaten	-	26,48	26,48
Pendidikan dan Pelatihan				
1	Indeks Kompetensi (sub IP) ASN Kabupaten	-	8,08	8,08

Sumber: BKPSDA Kab. Halmahera Timur, 2025

Tabel 2.88. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pengawasan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024

No	Uraian	2022	2023	2024
1	Jumlah Temuan Hasil Pengawasan	424	441	
2	Jumlah Temuan Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	283	290	
	Persentase Temuan Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	66,69	65,79	
3	Jumlah Pengaduan Masyarakat			
4	Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti			
5	Level Maturitas SPIP Pemda (berdasarkan hasil QA BPKP)			
6	Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (SPIP)	2	2	2
7	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2	2	2

Sumber: Inspektorat 2025



**Tabel 2.89. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Kewilayahan
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024**

No	Uraian	2022	2023	2024
1	Indeks Perkembangan Wilayah Kecamatan Kota Maba	67,17	67,17	69,10
2	Indeks Perkembangan Wilayah Kecamatan Maba	60,93	63,91	64,62
	Indeks Perkembangan Wilayah Kecamatan Maba Selatan	57,47	59,26	65,63
3	Indeks Perkembangan Wilayah Kecamatan Maba Tengah	62,28	63,64	63,55
4	Indeks Perkembangan Wilayah Kecamatan Maba Utara	56,23	56,66	57,04
5	Indeks Perkembangan Wilayah Kecamatan Wasile	64,45	65,08	66,22
6	Indeks Perkembangan Wilayah Kecamatan Wasile Selatan	59,32	60,47	62,78
7	Indeks Perkembangan Wilayah Kecamatan Wasile Tengah	59,64	59,64	60,01
	Indeks Perkembangan Wilayah Kecamatan Wasile Timur	63,09	65,68	65,06
	Indeks Perkembangan Wilayah Kecamatan Wasile Utara	52,94	53,11	53,11

Sumber: RPJMD Halmahera Timur 2025-2029

**Tabel 2.90. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan Umum
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024**

No	Uraian	2022	2023	2024
1	Jumlah partai politik dan lembaga pendidikan tingkat kabupaten yang memperoleh fasilitasi Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik			
2	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Kesbangpol			
3	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan			
	<i>Persentase organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan</i>			
4	Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu/ Pilkada			
5	Jumlah Aksi Unjuk Rasa			
6	Jumlah Aksi Unjuk Rasa yang berakhir dengan kericuhan			
	<i>Persentase Aksi Unjuk Rasa yang berakhir dengan damai</i>	100	100	100
7	Jumlah Konflik skala kabupaten pada tahun berkenaan			

8	Jumlah Konflik skala kabupaten pada tahun berkenaan yang diselesaikan			
	<i>Persentase konflik skala kabupaten pada tahun berkenaan yang diselesaikan</i>			
9	Jumlah Desa rawan konflik sosial			
	<i>Persentase Desa bebas kerawanan konflik sosial</i>	85,3	75,5	75,5

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Halmahera Timur, 2025

2.4. ASPEK DAYA SAING

Aspek daya saing daerah merepresentasikan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dan berkualitas dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional. Aspek daya saing daerah dapat mencakup antara lain: kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Gambaran kondisi aspek daya saing di Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dan nilai tukar petani.

A) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan pengeluaran rumah tangga atas barang dan jasa untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga dalam hal ini berfungsi sebagai konsumen akhir (*final demand*) dari berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia. Perkembangan pengeluaran konsumsi rumah tangga per Kapita penduduk Kabupaten Halmahera Timur dalam kurun tahun 2020-2024 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.91. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp)	885.454	923.882	987.279	1.026.990	1.091.002
Pangan (Rp)	481.952	505.183	518.703	551.846	589.317
Non Pangan (Rp)	403.502	418.699	468.576	475.144	501.686
Persentase pengeluaran konsumsi non pangan	45,57	45,32	47,46	46,27	45,98

Sumber: Provinsi Maluku Utara Dalam Angka, 2024

Dari tabel, pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita penduduk Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2024 sebesar Rp. 1,09 juta atau meningkat 6,23 persen dari tahun sebelumnya. Namun demikian, proporsi pengeluaran konsumsi per kapita non pangan pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,29 persen poin dari tahun sebelumnya.

B) Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani di suatu wilayah, karena mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk usaha maupun untuk konsumsi rumah tangga petani. Semakin tinggi NTP atau peningkatan NTP suatu periode, maka makin tinggi pula kenaikan kesejahteraan petani pada wilayah tersebut. Nilai Tukar Petani yang baik sangat penting bagi Maluku Utara karena sebagian besar masyarakat menggantungkan mata pencahariannya pada sektor ini. NTP adalah perbandingan indeks harga diterima oleh petani terhadap indeks harga yang dibayar oleh petani. Istilah-istilah yang berkaitan dengan NTP adalah sebagai berikut:

- 1) Bila NTP lebih besar dari 100, maka dapat diartikan bahwa perubahan harga yang dibayar petani secara rata-rata lebih kecil dibandingkan yang diterima petani dari usaha pertaniannya,
- 2) Bila NTP suatu periode lebih besar dibandingkan periode sebelumnya maka dapat diartikan bahwa kemampuan daya beli atau tingkat kesejahteraan petani periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya,
- 3) NTP dihitung menurut subsektor tanaman pangan, subsektor tanaman perkebunan rakyat, subsektor peternakan dan subsektor perikanan,
- 4) Bila NTP diperbandingkan antar subsektor atau antar wilayah, NTP dapat diartikan sebagai insentif untuk berusaha.

Subsektor atau wilayah dengan NTP yang lebih besar, berarti berusaha di bidang pertanian pada subsektor atau wilayah tersebut lebih menguntungkan dibandingkan pada subsektor atau wilayah lain, karena memberikan insentif yang lebih besar.

Pada tahun 2024, NTP Provinsi Maluku Utara telah berada di atas 100. Gambaran perkembangan rata-rata NTP Provinsi Maluku Utara pada kurun tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.92. Nilai Tukar Petani Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks harga yang diterima petani (It)	129,14	100,64	101,60	115,58	-
Indeks harga yang dibayar petani (Ib)	130,77	102,70	105,25	109,09	-
Nilai Tukar Petani (NTP)	98,77	97,99	96,53	105,95	106,45

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2023; *)

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah dan infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di suatu daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah dan infrastruktur, maka semakin berdaya saing wilayah tersebut.

A) Fasilitas Akomodasi

Ketersediaan fasilitas akomodasi menunjang pembangunan pariwisata daerah. Seiring dengan berkembangnya pariwisata di daerah maka permintaan akan fasilitas akomodasi yang memadai juga akan meningkat. Pada tahun 2024, jumlah fasilitas akomodasi (hotel dan penginapan) di Kabupaten Halmahera Timur tercatat sebanyak 24 buah, mengalami peningkatan dibandingkan kondisi pada tahun 2022 yang baru berjumlah 23 buah. Sebaran akomodasi menurut kecamatan tersaji dalam tabel di halaman berikut.

Tabel 2.93. Fasilitas Akomodasi Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2024

No	Kecamatan	2021	2022	2023	2024
1	Maba Selatan	-	-	-	-
2	Kota Maba	4	5	5	5
3	Wasile Selatan	1	1	2	2
4	Wasile	4	4	4	4
5	Wasile Timur	2	2	2	2
6	Wasile Tengah	-	-	-	-
7	Wasile Utara	-	-	-	-
8	Maba	11	11	11	11
9	Maba Tengah	-	-	-	-
10	Maba Utara	-	-	-	-
Halmahera Timur		22	23	24	24

Sumber: BPS Kab. Halmahera Timur, 2025

B) **Infrastruktur Transportasi**

Prasarana transportasi wilayah peran penting dalam menentukan kinerja logistik suatu wilayah. Aktivitas utama logistik yang mencakup transportasi dan pergudangan, memerlukan dukungan infrastruktur pelabuhan udara (*airport*), pelabuhan laut (*seaport*), dan jalan raya (*road*). Prasarana jalan penting untuk menghubungkan transportasi antardaerah, terutama dari desa ke kota, dari kota kabupaten ke kota provinsi. Hingga tahun 2025, total panjang jalan yang terbangun di Kabupaten Halmahera Timur sepanjang 1.113,87 Km, yang meliputi 196,87 Km Jalan Nasional (17,7 persen), dan 917 Km Jalan Kabupaten (82,3 persen). Adapun jumlah kendaraan di Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2023 berdasarkan data Polda Maluku Utara, sebanyak 8.280 unit kendaraan, yang meliputi 953 unit mobil penumpang, 13 unit Bus, 411 unit Truk, dan 6.903 unit sepeda motor. Dengan demikian maka rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2024 sebesar 0,13. Ini mengindikasikan bahwa kapasitas jalan di Kabupaten Halmahera Timur masih sangat memadai dalam memenuhi pertumbuhan jumlah kendaraan di masa depan.

C) **Pasokan Tenaga Listrik**

Tenaga listrik merupakan sumber energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia baik untuk kegiatan industri, kegiatan komersial maupun dalam kehidupan sehari-hari rumah tangga. Energi listrik dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan penerangan dan juga proses produksi yang melibatkan barang-barang elektronik dan alat-alat/mesin industri. Sistem-sistem tenaga listrik di Kabupaten Halmahera Timur saat ini sekitar 52,4 MW, dipasok oleh PLTD tersebar dan PLTS yang terhubung langsung ke sistem distribusi 20 kV.

Untuk wilayah Halmahera Timur, kebutuhan listrik melalui PLN, dengan dayaterpasang pada Desember 2024 sebesar 19.840.000 KW, produksi listrik sebanyak 24.098.334 kWh, serta jumlah pelanggan sebanyak 19.557.

D) **Pasokan Air Bersih Perpipaan**

Sistem pasokan air (*water supply*) yang aman dan terlindungi menjadi salah satu tantangan khas bagi Kabupaten Halmahera Timur. Infrastruktur air minum yang handal mencakup sebuah sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang meliputi intake air baku, storage (penampungan pra pengolahan), transmisi ke instalasi pengolahan, pengolahan air (*water treatment*), transmisi ke penampungan (*reservoir*) distribusi dan distribusi ke pelanggan. Air yang disalurkan melalui sistem adalah sumber air



yang berasal dari air yang telah melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air. Di Kabupaten Halmahera Timur sumber air ini diusahakan oleh Pemerintah Daerah melalui SPAM Perkotaan, SPAM IKK dan SPAM Pedesaan. Secara keseluruhan perkembangan infrastruktur air minum tentunya belummencakup sebagian besar permintaan, baik untuk kebutuhan sosial maupun ekonomi masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur. Tabel berikut menyajikan perkembangan Layanan SPAM Perkotaan, SPAM IKK dan SPAM Pedesaan di Kabupaten Halmahera Timur.

Tabel 2.94. Layanan SPAM Perkotaan, SPAM IKK dan SPAM Pedesaan Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis SPAM	Nama Mata Air	Debit (Liter/dtk)	Layanan SPAM	
					Desa	Rumah (Unit)
1	Kota Maba	1SPAM Perkotaan	¹ Lolosmani & Lolos Difa	300	4	3,552
		2SPAM Pedesaan	² Sailapoh I & II	5.5	2	501
2	Maba	1SPAM Perkotaan	¹ Buli	200	8	2,847
		2SPAM Pedesaan	² Pekaulang	10	1	88
			³ Baburino	10	1	97
3	Maba Selatan	1SPAM IKK	¹ Bicoli	10	3	651
		2SPAM Pedesaan	² Gotowasi	10	2	419
			³ Waci	10	2	401
			⁴ Sil	40	1	109
4	Maba Tengah	1SPAM IKK	¹ Yawanli	40	2	448
		2SPAM Pedesaan	² Babasaram	1	2	264
			³ Gaifoli	5	2	195
			Marasipno			
			⁴ Miaf	1.5	3	217
			⁵ Maratana Jaya	0.5	1	174
5	Maba Utara	1SPAM Pedesaan	¹ Sosolat	1	1	175
			² Lili	1	1	147
			³ Jara – Jara	1	1	266
6	Wasile	1SPAM Perkotaan	¹ Ake Sangkole & Lelewi	20.01	7	2,865
7	Wasile Selatan	1SPAM IKK	¹ Nusa Jaya	40	3	387
		2SPAM Pedesaan	² Bukutio	2	1	75
			³ Fayaul	3	1	119
			⁴ Tanure Loleba	2	2	230
			⁵ Telaga Jaya	2	3	351
			⁶ Pintatu	5	1	181
			⁷ Tomares	2	1	143
			⁸ Tabanalou	300	1	87
			⁹ Ake Jawi	10	3	444
			¹⁰ Waijoi	40	2	263
			¹¹ Yawal	10	1	157
			²¹ Nanas	1	1	112
			¹³ Saramaake	2	1	126
			¹⁴ Wasile	2	1	176
			¹⁵ Minamin	2	1	168
			¹⁶ Saolat	1	1	126
8	Wasile Timur	1SPAM Perkotaan	¹ Dakaino	20	1	365
		2SPAM IKK	² Dodaga	10	1	487
		3SPAM Pedesaan	³ Rawamangung	1	1	299



No	Kecamatan	Jenis SPAM	Nama Mata Air	Debit (Liter/dtk)	Layanan SPAM	
					Desa	Rumah (Unit)
9	Wasile Tengah	1SPAM IKK	⁴ Sido Mulyo	1	1	353
			⁵ Ake Daga	1	1	371
			⁶ Toboino'	1	1	251
			⁷ Tutuling Jaya	1	1	195
			⁷ Woka Jaya	1	1	357
		2SPAM Pedesaan	¹ Lolobata	10	2	399
			² Foly	1	1	209
			³ Hatetabako	2	1	165
			⁴ Silalayang	2	2	227
			⁵ Puao	1	1	173
			⁶ Kakaraino	1	1	98
10	Wasile Utara	1SPAM IKK	¹ Labi - Labi	10	2	237
			² Marimoi	1	1	89
		2SPAM Pedesaan	³ Tatam	1	1	144
			⁴ Bololo	2	1	195
			⁵ Iga	1	1	196
			⁶ Hilaitetor	2	1	113

Sumber : 1 Rispam Kabupaten Halmahera Timur Dinas Perumahan dan Kawasan Kab. Halmahera Timur 2024,
2 Data Base Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan BP4D Kabupaten Halmahera Timur 2024

E) Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Peranan dan keberadaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di segala sektor kehidupan tanpa sadar telah membawa dunia ke gerbang globalisasi tanpa batas dan tidak mengenal jarak. Dalam konteks ini siapapun dapat berkomunikasi dan mengakses segala informasi yang di butuhkan dengan cepat dan dimanapun keberadaannya. Gambaran perkembangan penetrasi layanan infrastruktur TIK di Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan tahun 2024, yang direpresentasikan melalui Persentase Penduduk Menggunakan

Telepon Seluler dan Mengakses Internet, sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel 2.95. Penduduk Menggunakan Telepon Seluler dan Mengakses Internet Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penduduk Menggunakan Telepon Seluler	63,89	62,21	73,11	71,62	81,06
Persentase Penduduk Mengakses Internet	22,57	25,64	34,45	44,47	53,26

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2025

Dari tabel, persentase penduduk yang menggunakan telepon seluler terus meningkat setiap tahunnya sehingga mencapai 81,06 persen pada tahun 2024. Dengan demikian dalam lima tahun terakhir telah bertambah sebesar 17,17 persen poin. Adapun persentase penduduk mengakses internet mengalami peningkatan sebesar 30,69 persen poin dalam lima tahun terakhir.

2.4.3. Fokus Iklim Investasi

Tinjauan atas iklim berinvestasi di Kabupaten Halmahera Utara dilakukan terhadap beberapa aspek terkait yang diuraikan sebagai berikut.

A) Angka Kriminalitas

Tindak kriminalitas akan memunculkan rasa tidak aman bagi masyarakat. Berbagai bentuk kejahatan seperti pencurian, penipuan, dan perampokan, maupun kekerasan dan kejahatan susila, masih sering terjadi. Dengan masih adanya jumlah kejahatan yang tinggi ini, keleluasaan masyarakat untuk melakukan kegiatannya masing-masing menjadi terganggu. Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya keamanan pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk aktivitas ekonomi.

Kondisi wilayah yang kondusif pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Tabel berikut menyajikan angka kriminalitas di Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun tahun 2020-2024.

Tabel 2.96. Angka Kriminalitas Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jenis Tindak Kriminal					
2	Jumlah Kasus Pembunuhan					
3	Jumlah kejahatan seksual					
4	Jumlah kasus penganiyaan					
5	Jumlah Kasus pencurian					
6	Jumlah kasus penipuan					
7	Jumlah kasus pemalsuan uang					
8	Jumlah kasus lainnya					
9	Jumlah kasus/tindak kriminal selama satu tahun					
10	Jumlah kasus/tindak kriminal yang diselesaikan (proses hukum)					

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Halmahera Timur, 2025

B) Aksi Unjuk Rasa

Aksi unjuk rasa atau demonstrasi turun ke jalan merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses demokrasi. Namun demikian aksi unjuk rasa yang seringkali berujung pada kericuhan dipandang dapat mempengaruhi iklim bisnis. Tabel berikut menyajikan jumlah aksi unjuk rasa yang terjadi di Kabupaten Halmahera Timur dalam kurun waktu tahun 2020-2024.

**Tabel 2.97. Jumlah Aksi Unjuk Rasa Di
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024**

No	Kategori Isu/Tuntutan	Jumlah Aksi Unjuk Rasa				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Bidang Politik	3	4	3	4	1
2	Bidang Sosial					5
3	Bidang Ekonomi	1	3	3	3	3
Jumlah						
Jumlah Unjuk Rasa yang Berakhir dengan Kericuhan						

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Halmahera Timur, 2025

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilihat dari dua aspek, yaitu kuantitas dankualitas. Kuantitas menyangkut seberapa banyak penduduk usia produksi di suatu wilayah. Kuantitas sumber daya manusia tanpa disertai dengan kualitas akan menjadi beban bagi pembangunan daerah. Sedangkan kualitas SDM berkenaan dengan mutu SDM yang menyangkut antara lain kemampuan, baik kemampuan fisik, maupun non fisik.

A) Rasio Lulusan S1/S2/S3

Untuk meningkatkan daya saing bagi wilayah maka kualitas pasokan tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Kualitas tenaga kerja yang tersedia pada suatu wilayah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang termasuk kedalam Angkatan Kerja yang telah menyelesaikan pendidikan setara S1, S2 dan S3. Persentase Penduduk Lulusan S1, S2 dan S3 adalah proporsi penduduk usia 15 ke atas yang tamat S1, S2 dan S3 terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas (yang termasuk kedalam kategori angkatan kerja). Tabel berikut menyajikan perkembangan rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024

**Tabel 2.98. Rasio Lulusan S1/S2/S3 Di
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024**

Uraian	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Termasuk Angkatan Kerja Pendidikan Terakhir Min S1	4.386	4.273	6.11
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Termasuk Angkatan Kerja	64.302	69.122	70.827
Rasio Lulusan S1/S2/S3 (persen)	6,82	6,18	8,63

Sumber : Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, BPS Provinsi Maluku Utara, 2025

B) Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Pengelompokan jumlah atau persentase penduduk di tiap kelompok umur, akan dapat diketahui berapa besar penduduk yang berpotensi sebagai beban yaitu penduduk yang belum produktif (usia 0-14 tahun) termasuk bayi dan anak (usia 0-4 tahun) dan penduduk yang dianggap kurang produktif (65 tahun ke atas).

Melalui rasio ketergantungan juga dapat diketahui berapa persen penduduk yang berpotensi sebagai modal dalam pembangunan yaitu penduduk usia produktif atau yang berusia 15-64 tahun. Tabel berikut menyajikan rasio ketergantungan Kabupaten Halmahera Timur tahun 2022-2024.

**Tabel 2.99. Rasio Ketergantungan
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024**

Tahun	Kelompok Umur	Jumlah (Jiwa)	Rasio Ketergantungan
2022	Non Produktif (<15 & >64 Tahun)		
	Produktif (15 - 64 Tahun)		
2023	Non Produktif (<15 & >64 Tahun)	37,52	60,05
	Produktif (15 - 64 Tahun)	62,48	
2024	Non Produktif (<15 & >64 Tahun)	37,54	60,10
	Produktif (15 - 64 Tahun)	62,46	

Sumber : BPS Kab. Halmahera Timur, 2025

Dari tabel, rasio ketergantungan Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2023 sebesar 60,05 persen, kemudian meningkat menjadi 60,10 persen pada tahun 2024. Berdasarkan rasio ketergantungan 60,10 artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) masih mempunyai tanggungan sebanyak 60 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Secara umum rasio ketergantungan dapat menunjukkan beban ekonomi bagi penduduk umur produktif (usia kerja) yang menanggung penduduk pada umur tidak produktif.

2.5. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM RKPD SAMPAI TAHUN 2024

Hasil evaluasi capaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan RKPDsmpai dengan tahun 2024, yang meliputi target kinerja dan anggaran, capaian kinerja dan realisasi anggaran, serta tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran disajikan pada tabel 2.99



Tabel 2.100. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan Tahun 2024

No	Urusan/Bidang Urusan	Progran/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		100	845,827,585,250	825,587,175,402	97.61
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		100	200,527,084,817	168,143,694,032	83.85
1	Pendidikan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	127,762,722,081	103,205,756,343	80.78
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	30,000,000		0.00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	10,000,000		0.00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100	10,000,000		0.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	10,000,000		0.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	125,319,808,714	101,050,767,670	80.63
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	124,919,808,714	100,373,774,870	80.35
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	4,000,000	676,992,800	0.59
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	20,963,480		0.00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	852,057,680	981,652,729	86.80
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100	257,973,750	241,056,729	93.44
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	573,120,450	689,616,000	83.11
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	408,856,625	364,753,675	89.21
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	17,016,300	17,014,875	99.99
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	92,259,555	92,257,600	100.00



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	20,000,000	12,681,000	63.41
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	58,041,270	206,973,000	28.04
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	221,539,500	35,827,200	16.17
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	962,500,000	234,600,000	24.37
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	962,500,000	234,600,000	24.37
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	77,242,062	424,492,269	18.20
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	100	15,141,000	15,135,000	99.96
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	15,301,062	15,300,000	99.99
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	46,800,000	394,057,269	11.88
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	112,257,000	149,490,000	75.09
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	37,257,000	110,400,000	33.75
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	75,000,000	39,090,000	52.12
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		100	72,764,362,736	64,937,937,689	89.24
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100	38,209,925,180	36,083,501,225	94.43
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	100	834,339,870	238,382,820	28.57
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	100	791,416,395	226,118,970	28.57
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	100	255,230,325	426,422,950	59.85
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	100	1,736,702,100	1,432,874,700	82.51



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	100	5,965,000,000	676,759,000	11.35
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	100	412,227,000		0.00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100	19,298,685,000		0.00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	100	463,047,000	319,433,450	68.99
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	100	322,728,000	68,344,885	21.18
		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	100	1,320,000,000	8,143,985,206	16.21
		Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah yang Tersedia	100	400,000,000	101,683,000	25.42
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	100	400,000,000		0.00
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	100	331,500,000	529,069,900	62.66
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan		100	626,183,700		0.00
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		100	449,800,000		0.00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	100	1,028,988,000		0.00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	100	1,000,000,000	1,210,763,400	82.59
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	100		17,540,048,308	0.00
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100	164,051,580	225,863,000	72.63
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	100	505,827,000	505,812,500	100.00
		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	100	1,366,753,060	1,710,881,600	79.89
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100	108,846,150		0.00
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	100	428,600,000		0.00



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase keterlaksanaan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100	25,839,283,386	22,214,915,427	85.97
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	100	515,858,122	1,092,388,035	47.22
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	100	503,196,760	137,235,480	27.27
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	100	524,300,535	142,991,055	27.27
		Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	100	1,953,468,000	1,616,728,520	82.76
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	100	1,119,945,750	1,272,797,609	87.99
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	100	540,520,312	1,102,234,375	49.04
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	100	968,184,000		0.00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	100	337,815,345	649,712,255	51.99
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	100	97,244,280	234,861,878	41.40
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100	10,233,982,500	10,609,118,900	96.46
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100	183,975,462	183,975,400	100.00
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	100	298,000,000	239,065,700	80.22
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	100	219,700,000	406,784,000	54.01
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	100	55,800,000		0.00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		100	336,021,000		0.00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	100	1,220,000,000		0.00
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	100	239,074,440	6,050,201,037	3.95



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	100	324,253,050		0.00
		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Ruang Rumah Kepala Sekolah/Guru/Penjaga sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	100	3,000,000,000	213,161,950	7.11
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	100	44,939,180		0.00
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100	108,142,650		0.00
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	100	200,000,000		0.00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	100	2,590,000,000		0.00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	100	224,862,000		0.00
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100	8,249,550,170		0.00
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	100	342,893,100	209,005,841	60.95
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	100	571,458,000	508,399,800	88.97
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100	4,871,064,000	4,136,604,196	84.92
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	100	238,253,070	238,251,400	100.00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	100	250,000,000	150,000,000	60.00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		100	264,900,000		0.00
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	100	240,200,000	240,192,200	100.00
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	100	214,000,000		0.00
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tu Baru yang Bertambah (Ruang)	100	450,182,000		0.00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	100	521,600,000	354,585,650	67.98
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	100	285,000,000		0.00



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	100	465,604,000		0.00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	100	150,000,000	589,320,000	25.45
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan		100	124,000,000		0.00
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	100	191,604,000		0.00
		URUSAN PEMERINTAHAN		100	132,699,694,358	138,999,380,504	95.47
		BIDANG KESEHATAN					
2a	Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	50,018,709,226	38,564,606,429	77.10
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	43,137,778,187	34,644,593,629	80.31
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	43,137,778,187	34,644,593,629	80.31
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	1,162,308,950	613,230,000	52.76
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100	360,000,000	313,820,000	87.17
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100		299,410,000	0.00
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	800,000,000		0.00
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	100	2,308,950		0.00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	3,202,680,083	1,511,963,388	47.21
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	75,000,000	64,155,000	85.54
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	730,000,000	370,961,200	50.82
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	120,238,020	89,844,400	74.72
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	955,192,250	315,820,000	33.06



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	333,156,063	153,837,000	46.18
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100	50,000,000	32,000,000	64.00
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100	212,257,800	278,670,000	76.17
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	366,835,950	206,675,788	56.34
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	2,110,405,006	1,794,819,412	85.05
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	70,275,240	31,160,000	44.34
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	410,129,766	55,059,412	13.42
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	280,000,000	370,100,000	75.66
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,794,819,412	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	10,000,000		0.00
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	100	150,000,000		0.00
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	100	200,000,000		0.00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	1,350,000,000	1,338,500,000	99.15
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	terfasilitasinya pengadaan barang milik daerah	100	200,000,000		0.00
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	100	100,000,000		0.00
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	100	100,000,000		0.00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	161,133,000		0.00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	161,133,000		0.00



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		100	76,233,870,492	76,233,870,492	100.00
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKPKewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100	75,586,837,457	35,203,688,645	46.57
		Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	100	5,625,000,000	14,483,860,245	38.84
		Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	100	23,600,000,000		0.00
		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	100	17,656,996,165	10,207,811,000	57.81
		Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)	100	6,560,000,000		0.00
		Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	100	12,000,000,000		0.00
		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	100	600,000,000	199,580,000	33.26
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	100		747,578,000	0.00
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	100	400,000,000	5,178,913,200	7.72
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)	100	1,200,000,000		0.00
		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center (Unit)	100	175,000,000		0.00
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	100	431,125,000	66,481,000	15.42
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				3,899,670,200	
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	100	431,125,000		0.00



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Pengadaan Bahan Habis Pakai Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pengadaan Bahan Habis Pakai Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Keseh	100	7,260,271,572		0.00
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis	100	78,444,720	419,795,000	18.69
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterlak- sanaan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	44,691,057,137	40,932,181,847	91.59
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	596,907,270	1,048,420,859	56.93
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	6,545,640	9,262,000	70.67
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	100	1,359,743,984	1,215,283,000	89.38
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	100	463,330,036	499,530,000	92.75
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	100	271,780,650	414,337,000	65.59
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	100	586,619,990	711,380,000	82.46
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	100	483,438,150	186,170,000	38.51
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	100	250,500,000	292,540,000	85.63
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	100	921,649,500		0.00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	100	325,753,000		0.00
		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	100	1,075,210,000		0.00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100	7,021,614,500	5,199,709,142	74.05
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100	1,684,932,000	91,360,000	5.42



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	100	510,913,518		0.00
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100	1,408,986,000	290,317,000	20.60
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	6,518,955,464	2,364,030,500	36.26
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100	13,952,448,432	20,303,204,703	68.72
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	100	168,975,135	170,649,000	99.02
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100	812,510,318	7,545,297,643	10.77
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100	147,000,000		0.00
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	100	4,602,743,550	360,531,000	7.83
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	100	900,000,000	230,160,000	25.57
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100	250,500,000		0.00
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	100	370,000,000		0.00
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	100	110,297,880	98,000,000	88.85
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100	110,297,880	98,000,000	88.85
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D Serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	150,000,000		0.00
		Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	100	50,000,000		0.00
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	100	100,000,000		0.00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		100	6,447,114,640	1,946,068,000	30.19



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase keterlak-sanaan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	100	5,617,069,250	306,740,000	5.46
		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	150,000,000	99,100,000	66.07
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100	3,669,973,750		0.00
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	100	1,797,095,500	207,640,000	11.55
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterlaks- naan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	830,045,390	1,639,328,000	50.63
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	830,045,390	1,639,328,000	50.63
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		100	368,330,625	540,380,000	68.16
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	100	368,330,625	540,380,000	68.16
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	100	368,330,625	540,380,000	68.16
2a	Kesehatan (Rumah Sakit)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100		7,941,257,675	0.00
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterlak- sanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	44,404,000	44,403,200	100.00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	10,000,000	9,999,900	100.00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	100	6,644,000	6,643,600	99.99



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	100	5,332,000	5,331,800	100.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	22,428,000	22,427,900	100.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat	100	43,137,778,187	5,933,925,834	13.76
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	43,137,778,187	5,933,925,834	13.76
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			244,847,100	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	100	2,308,950	2,303,100	99.75
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	800,000,000	242,544,000	30.32
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	1,162,308,950	833,994,620	71.75
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	730,000,000	206,262,580	28.26
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	955,192,250	360,381,000	37.73
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	333,156,063	62,367,200	18.72
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	10,000,000	47,520,000	21.04
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	366,835,950	157,463,840	42.92
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				249,325,000	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	100	100,000,000	99,340,000	99.34
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	100,000,000	149,985,000	66.67
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				363,281,921	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	100	70,275,240	5,600,000	7.97
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	410,129,766	357,681,921	87.21



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				271,480,000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	161,133,000	271,480,000	59.35
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				10,622,687,288	
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				4,020,415,144	
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				862,000,000	
		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center (Unit)	100	175,000,000	124,984,000	71.42
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	100	431,125,000	192,000,000	44.53
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				6,509,372,144	
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				2,841,431,144	
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100	13,952,448,432	4,256,506,144	30.51
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	100	4,602,743,550	1,759,314,000	38.22
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	100	147,000,000	493,552,000	29.78
		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	100	17,656,996,165		0.00
		Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)	100	6,560,000,000		0.00
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)	100	1,200,000,000		0.00



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	100	100,000,000	92,900,000	92.90
		Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	100	50,000,000		0.00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		100		3,690,890,620	0.00
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah	Presentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah	100		3,402,832,000	0.00
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100	3,669,973,750	3,402,832,000	92.72
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	830,045,390	288,058,620	34.70
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				288,058,620	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		100	478,287,308,731	350,849,843,631	73.36
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	3,831,605,679	3,835,437,282	99.90
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	100	15,000,000	14,820,000	98.80
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	100	15,000,000	14,820,000	98.80
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	371,829,500	514,849,511	72.22
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	21,829,500	21,600,000	98.95
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	350,000,000	493,249,511	70.96
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	100	574,109,920	675,472,000	84.99



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	12,000,000	24,290,000	49.40
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	25,000,000		0.00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	88,988,550	72,660,000	81.65
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	52,121,370	49,619,000	95.20
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100	126,000,000	60,000,000	47.62
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	270,000,000	468,903,000	57.58
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterlaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	685,000,000	496,560,000	72.49
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	135,000,000	93,500,000	69.26
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	100		310,560,000	0.00
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	100	400,000,000	92,500,000	23.13
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	100	150,000,000		0.00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	51,181,371	45,891,477	89.66
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	9,157,680	9,795,000	93.49
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	42,023,691	36,096,477	85.90
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterlaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	123,054,950	296,413,200	41.51
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	103,054,950	106,616,000	96.66
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	20,000,000	189,797,200	10.54



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		100	34,366,167,000	55,296,104,011	62.15
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Menjamin keberlanjutan fungsi sumber daya air (SDA) di wilayah sungai (WS) yang berada dalam satu kabupaten/kota.	100	22,838,580,000	48,224,016,011	47.36
		Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	100	6,278,000,000	14,176,118,545	44.29
		Pembangunan Breakwater	Panjang Breakwater yang Dibangun (KM)	100	1,487,500,000		0.00
		Pembangunan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun (KM)	100	3,500,000,000	7,576,353,866	46.20
		Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul sungai yang Dibangun (KM)	100	3,250,000,000		0.00
		Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall sungai yang Dibangun (KM)	100	7,885,410,000	26,471,543,600	29.79
		Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota		100	437,670,000		0.00
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	100	11,527,587,000	7,072,088,000	61.35
		Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan		100	11,527,587,000	7,072,088,000	61.35
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		100	10,807,700,000	13,247,638,850	81.58
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	100	10,807,700,000	13,247,638,850	81.58
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Unit)	100	4,800,000,000	5,541,015,150	86.63
		Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)	100	7,700,000,700	7,706,623,700	99.91
		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	100	6,000,000,000		0.00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		100	5,410,000,000	119,835,000	2.22
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi (Unit)	100	5,410,000,000	119,835,000	2.22



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun (M ³ /Hari)	100	35,000,000		0.00
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala kawasan yang dibangun (M ³ /Hari)	100	375,000,000		0.00
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	100	5,000,000,000	119,835,000	2.40
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		100	17,310,000,000	24,971,858,250	69.32
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter)	100	17,310,000,000	24,971,858,250	69.32
		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	100	5,650,000,000	24,971,858,250	22.63
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter)	100	360,000,000		0.00
		Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi (M)	100	8,000,000,000		0.00
		Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Lingkungan)	100	3,300,000,000		0.00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		100	360,000,000		0.00
		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		100	360,000,000		0.00
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota		100	360,000,000		0.00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		100	25,676,523,200	54,109,631,210	47.45
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya (Orang)	100	25,676,523,200	54,109,631,210	47.45
		Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan (Bangunan Gedung)	100	15,225,975,200	31,674,443,125	48.07



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dokumen)	100	10,111,648,000	22,168,923,985	45.61
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		100		266,264,100	0.00
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan (Orang)	100	338,900,000		0.00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		100	5,350,000,000	8,030,617,800	66.62
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan (Orang)	100	5,350,000,000	8,030,617,800	66.62
		Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan (Orang)	100	5,350,000,000	8,030,617,800	66.62
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		100	371,999,720,979	191,238,721,228	51.41
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase keterlaksanaan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	100	371,999,720,979	191,238,721,228	51.41
		Pembangunan Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	100	280,766,271,975	149,595,161,836	53.28
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		100	25,000,000		0.00
		Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa		100	200,000,000		0.00
		Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	100	31,256,949,003	41,643,559,392	75.06
		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	100	35,453,000,000		0.00
		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	100	3,000,000,000		0.00
		Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pelebaran Panjang Jalan (KM)	100	6,000,000,000		0.00
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	100	815,000,000		0.00
		Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	100	1,611,500,000		0.00
		Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang jembatan yang Dipelihara Secara Berkala (M)	100	3,272,000,000		0.00
		Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	100	4,000,000,000		0.00



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
3a	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	100	1,000,000,000		0.00
		Pelebaran Jembatan	Pelebaran Panjang Jembatan (M)	100	2,256,000,000		0.00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	3,175,591,873	1,741,410,620	54.84
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) yang ditetapkan dalam bentuk Perda dan Perkada	100	850,000,000	1,512,231,837	56.21
		Penetapan RTRW Kabupaten/Kota				499,999,800	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang terselesaikan	100	2,325,591,873	224,009,000	9.63
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang terselesaikan	100	1,500,000,000	1,241,410,820	82.76
		Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	100	825,591,873	-	0.00
		Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	100	350,000,000		0.00
		Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	100	500,000,000	1,512,231,837	33.06
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100	21,821,762,538	85,470,966,957	25.53
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	3,843,223,232	4,668,049,169	82.33
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat	100	1,809,788,232	1,674,997,569	92.55
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	1,809,788,232	1,674,997,569	92.55
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	456,684,000	1,441,887,000	31.67
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	102,000,000	159,867,000	63.80
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	354,684,000	1,282,020,000	27.67
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat	100	943,407,000	503,760,600	53.40
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	47,165,500	25,680,000	54.45



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	4,253,100	29,007,400	14.66
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	69,753,000	72,050,100	96.81
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	59,060,400	54,480,600	92.25
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	35,400,000	20,250,000	57.20
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	727,775,000	302,292,500	41.54
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keterlaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	423,600,000	842,768,000	50.26
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	423,600,000	842,768,000	50.26
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	19,754,000	27,915,000	70.76
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	19,754,000	27,915,000	70.76
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterlaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	189,990,000	176,721,000	93.02
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	189,990,000	176,721,000	93.02
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		100	1,301,680,000		0.00
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Berserta PSU (Dokumen)	100	1,301,680,000		0.00
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	100	125,000,000		0.00
		Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh		100	336,680,000		0.00
		Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)	100	840,000,000		0.00
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		100	8,162,500,000	4,999,738,705	61.25



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	100	8,162,500,000	4,999,738,705	61.25
		Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	100	8,162,500,000	4,999,738,705	61.25
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		100	1,676,000,000	64,484,685,300	2.60
		URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN		100	1,676,000,000	64,484,685,300	2.60
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	100	1,640,000,000	64,484,685,300	2.54
		Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	100	36,000,000		0.00
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		100	6,838,359,306	11,318,493,783	40.70
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	4,606,149,408	3,010,067,725	65.35
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	30,000,000	15,900,000	53.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	10,000,000	7,950,000	79.50
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	100	20,000,000	7,950,000	39.75
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	2,255,718,038	865,935,085	38.39
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	2,227,718,038	860,445,085	38.62
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	100	10,000,000		0.00



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	100	18,000,000	5,490,000	30.50
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	866,201,845	792,800,880	91.53
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	100	5,000,000		0.00
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	100	557,986,612	506,835,000	90.83
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100	16,500,000		0.00
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	100	256,715,232	255,977,680	99.71
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	100	30,000,000	29,988,200	99.96
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	1,013,826,507	1,335,431,760	75.92
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	11,289,798	17,825,000	63.34
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	239,694,072	148,600,300	62.00
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	5,020,785		0.00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	65,909,813	529,226,000	12.45
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	55,794,430	20,350,000	36.47
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	11,201,287		0.00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	624,916,320	619,430,460	99.12
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		100		99,891,000	0.00
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		100		99,891,000	0.00



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		100		99,891,000	0.00
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100	360,000,000	901,952,100	39.91
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	200,000,000	791,656,600	25.26
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	100	200,000,000	791,656,600	25.26
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	100	160,000,000	110,295,500	68.93
		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	100	160,000,000	110,295,500	68.93
5a	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100		2,380,790,977	0.00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	49,437,035	47,790,000	96.67
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	4,000,000	2,400,000	60.00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	45,437,035	45,390,000	99.90
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterlaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	390,965,983	277,310,000	70.93
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	342,965,983	257,145,000	74.98
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	100	48,000,000	20,165,000	42.01
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		100	1,872,209,898	1,097,500,400	58.62
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase keterlaksanaan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100	96,253,861	96,177,700	99.92



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100	96,253,861	96,177,700	99.92
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase keterlaksanaan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100	207,058,009	74,994,400	36.22
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	100	132,058,009		0.00
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		100	75,000,000	74,994,400	99.99
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase keterlaksanaan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	231,550,050	307,240,000	75.36
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	100	215,911,350	307,240,000	70.27
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	15,638,700		0.00
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase keterlaksanaan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100	1,337,347,977	619,088,300	46.29
		Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	100	137,347,977		0.00
		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	100	100,000,000	80,706,400	80.71
		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	100	100,000,000		0.00
		Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang)	100	400,000,000	392,116,900	98.03
		Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota		100	100,000,000		0.00
		Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	100	300,000,000	81,662,500	27.22



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
			(R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)				
		Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana (Laporan)	100	100,000,000		0.00
		Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	100	100,000,000		0.00
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		100	3,977,375,500	6,320,111,195	62.93
6	Sosial	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	2,646,682,200	3,500,397,995	75.61
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	10,000,000		0.00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	100	10,000,000		0.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	1,551,327,400	1,512,231,837	97.48
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	1,551,327,400	1,512,231,837	97.48
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	472,416,370	1,416,142,000	33.36
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	75,000,000	74,481,000	99.31
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	207,566,370		0.00
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100	100,000,000	63,398,000	63.40
		Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	100	89,850,000	89,849,000	100.00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	317,268,530	314,305,854	99.07
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)	100	9,982,500	9,975,000	99.92
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)	100	43,000,000	42,966,000	99.92



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor (Paket)	100	40,528,530	37,782,000	93.22
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)	100	13,833,810	13,750,000	99.39
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	100	50,673,600	50,600,000	99.85
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100	159,250,090	159,232,854	99.99
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keterlaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	85,000,000	84,800,000	99.76
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)	100	85,000,000	84,800,000	99.76
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	15,521,500	14,288,304	92.05
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	100	5,071,500	5,066,000	99.89
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)	100	10,450,000	9,222,304	88.25
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterlaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	195,148,400	158,630,000	81.29
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)	100	110,000,000	110,400,000	99.64
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	36,620,000		0.00
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	8,528,400	8,350,000	97.91
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	100	40,000,000	39,880,000	99.70
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		100	250,451,000	900,249,200	27.82
		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase keterlaksanaan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	100	125,000,000	374,999,200	33.33



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	100	125,000,000		0.00
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase keterlaksana-an Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100	125,451,000	525,250,000	23.88
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100	125,451,000	125,450,000	100.00
		PROGRAM REHABILITAS SOSIAL		100	340,181,950	240,176,000	70.60
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase keterlaksanaan reabilitas sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100		240,176,000	0.00
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase keterlak- sanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100	340,181,950		0.00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100	103,022,400	103,022,000	100.00
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100	100,000,000		0.00
		Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100	137,159,550		0.00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		100	613,560,350	1,604,488,000	38.24
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	presentase keterlaksanaan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100	613,560,350	1,604,488,000	38.24
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	100	157,255,350	407,254,000	38.61
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100	250,000,000	377,247,000	66.27
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100	206,305,000	819,987,000	25.16



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA		100	126,500,000	74,800,000	59.13
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100	126,500,000	74,800,000	59.13
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100	126,500,000	74,800,000	59.13
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		100	31,237,624,453	86,588,282,070	36.08
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		100	21,452,076,672	8,803,136,498	41.04
1	Kelautan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	2,568,787,185	2,276,490,908	88.62
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	25,000,000		0.00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	5,000,000		0.00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	5,000,000		0.00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	5,000,000		0.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	10,000,000		0.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	1,448,913,492	1,381,509,310	95.35
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	1,448,913,492	1,381,509,310	95.35
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	5,000,000		0.00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	256,471,000	42,000,000	16.38
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	42,000,000	42,000,000	100.00



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	214,471,000	146,527,380	68.32
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	469,205,620	3,630,000	0.77
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	3,549,000	3,630,000	97.77
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	75,250,000	148,980,000	50.51
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	5,000,000	3,700,000	74.00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	37,864,050	37,856,700	99.98
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	34,873,020	34,872,700	100.00
		Penyediaan Bahan/Material		100	7,000,000		0.00
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	21,945,000	10,800,000	49.21
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	283,724,550	275,644,895	97.15
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	51,932,273	4,335,000	8.35
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	4,347,000	4,335,000	99.72
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	47,585,273	74,434,923	63.93
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterlaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	317,264,800	110,400,000	34.80
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	110,400,000	110,400,000	100.00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	36,990,900		0.00
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	9,873,900	1,800,000	18.23
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	160,000,000		0.00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		100	11,636,477,613	6,294,328,490	54.09



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase keterlaksanaan pengelolaan Penangkapan Ikan di Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100	11,007,772,013	44,580,000	0.40
		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	100	124,740,000	44,580,000	35.74
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	100	10,883,032,013	6,249,748,490	57.43
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterlaksanaan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	628,705,600	35,867,000	5.70
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	100	201,950,000	35,867,000	17.76
		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	100	76,755,600		0.00
		Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	100	350,000,000		0.00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		100	3,303,595,416	187,657,100	5.68
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase keterlaksanaanya Pemberdayaan Budi Daya Ikan Kecil	100	550,000,000	187,657,100	34.12
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil		100	150,000,000		0.00
		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil		100	100,000,000		0.00
		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	100	300,000,000	187,657,100	62.55
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Presentase Keterlaksanaan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	100	2,753,595,416	32,000,000	1.16
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100		32,000,000	0.00
		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	100	83,454,000	2,626,803,704	3.18
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	100	2,620,141,416		0.00



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	100	50,000,000		0.00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		100	3,943,216,458	44,660,000	1.13
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase keterlaksanaan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	100	50,000,000	44,660,000	89.32
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	100	50,000,000	44,660,000	89.32
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase keterlaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	100	119,077,350	202,835,160	58.71
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	100	119,077,350	202,835,160	58.71
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase keterlaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	3,774,139,108	57,000,000	1.51
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	140,389,470	57,000,000	40.60
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	100	3,633,749,638	4,605,819,200	78.89
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		100	4,632,961,078	70,567,850,977	6.57
2	Pertanian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	2,944,661,078	6,533,363,315	45.07
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100		89,200,000	0.00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100		74,000,000	0.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	100		15,200,000	0.00



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
			Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase keterlaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100		4,425,024,115	0.00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100		4,361,724,115	0.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100		63,300,000	0.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase keterlaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100		978,481,200	0.00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100		88,300,000	0.00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100		28,122,000	0.00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100		583,282,200	0.00
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			100		278,777,000	0.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase keterlaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100		410,911,500	0.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100		12,850,000	0.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100		32,300,000	0.00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	100		8,500,000	0.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100		27,279,000	0.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100		16,200,000	0.00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100		18,325,000	0.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100		295,457,500	0.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100		596,291,500	0.00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	100		3,960,000	0.00



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100		83,231,500	0.00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100		509,100,000	0.00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterlak- sanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100		33,455,000	0.00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	100		33,455,000	0.00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		100		13,290,182,800	0.00
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase keterlaksanaan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	100		10,013,896,800	0.00
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	100		9,756,305,000	0.00
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	100		257,591,800	0.00
		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)	100		35,510,000	0.00
		Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)	100		35,510,000	0.00
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak d lam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak d lam Daerah Kabupaten/Kota	100		3,240,776,000	0.00
		Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	100		3,240,776,000	0.00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		100	1,688,300,000	36,876,850,262	4.58
		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana Pertanian	100		91,270,300	0.00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	100		91,270,300	0.00
		Pembangunan Prasarana Pertanian	Presentase Keterlaksanaan Pengembangan Prasarana Pertanian	100	1,688,300,000	36,785,579,962	4.59
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	100	1,033,000,000	36,581,069,962	2.82



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	100	655,300,000	103,760,000	15.83
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	100		100,750,000	0.00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		100		390,181,000	0.00
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali Dalam daerah Kabupaten/Kota	100		390,181,000	0.00
		Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	100		390,181,000	0.00
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		100		13,173,462,600	0.00
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Presentase Keterlaksanaan Pengembangan Prasarana Pertanian	100		13,173,462,600	0.00
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	100		520,495,600	0.00
		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	100		12,652,967,000	0.00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		100		303,811,000	0.00
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Keterlaksanaan Pelaksanaan Penyuluh Pertanian	100		303,811,000	0.00
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100		102,687,000	0.00
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100		109,235,000	0.00
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	100		91,889,000	0.00
3	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		100	692,360,000	1,669,600,000	41.47



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		100	900,000,000	1,262,766,900	71.27
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase keterlaksanaan dan Pengelolaan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100	900,000,000	1,262,766,900	71.27
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	100	900,000,000	1,262,766,900	71.27
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		100	196,760,000	1,429,300,000	13.77
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Harga, Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	100	196,760,000	1,429,300,000	13.77
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	100	96,000,000	238,800,000	40.20
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	100	100,760,000	1,190,500,000	8.46
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		100	495,600,000	240,300,000	48.49
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		100	400,000,000		0.00
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		100	400,000,000		0.00
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		100	100,000,000		0.00
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		100	200,000,000		0.00
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		100	100,000,000		0.00
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		100	95,600,000	240,300,000	39.78
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	100	95,600,000	240,300,000	39.78
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam	100	95,600,000	240,300,000	39.78



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
4	Transmigrasi	IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota				
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		100	414,560,000	763,680,000	54.28
		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI		100	207,280,000	557,020,000	37.21
		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Presentase Areal Permukiman Yang Memadai	100	207,280,000	102,160,000	49.29
		Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain (Dokumen)	100	102,760,000		0.00
		Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi (Dokumen)	100	104,520,000	103,200,000	98.74
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		100	207,040,000		0.00
		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pembangunan Permukiman Masyarakat Kawasan Transmigrasi	100	207,040,000		0.00
		Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS) (Kepala Keluarga)	100	103,520,000		0.00
		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Lokasi)	100	103,520,000	102,160,000	98.69
		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI		100	207,280,000	206,660,000	99.70
		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Presentase Keterlaksanaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	100	207,280,000	206,660,000	99.70
		Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	100	102,760,000	102,580,000	99.82
		Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	100	4,520,000	104,080,000	4.34
5	Pariwisata	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		100	3,550,066,703	4,543,714,595	78.13
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	2,944,661,078	2,717,150,399	92.27
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	10,000,000	10,000,000	100.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	100	10,000,000	10,000,000	100.00



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
			Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase keterlaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	2,031,438,668	1,628,025,799	80.14
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	2,031,438,668	1,604,025,799	78.96
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100		24,000,000	0.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase keterlaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	392,840,000	391,895,000	99.76
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	42,840,000	41,895,000	97.79
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	100	350,000,000	350,000,000	100.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase keterlaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	378,643,260	555,582,400	68.15
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	50,000,000	201,682,300	24.79
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	27,498,450	27,497,500	100.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	17,406,060	17,404,600	99.99
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	24,675,000	50,310,000	49.05
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	259,063,750	258,688,000	99.85
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	21,339,150	21,247,200	99.57
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	100	4,792,200	4,785,000	99.85
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	100	16,546,950	16,462,200	99.49
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	16,546,950		0.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase keterlaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	110,400,000	110,400,000	100.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	110,400,000	110,400,000	100.00
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			100	394,839,045	1,469,587,196	26.87



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase keterlaksanaan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	100	100,000,000	1,469,587,196	6.80
		Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	100	100,000,000		0.00
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	100	294,839,045		0.00
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak d lam Daerah Kabupaten/Kota	100	294,839,045	1,469,587,196	20.06
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		100	210,566,580	356,977,000	58.99
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100	210,566,580	356,977,000	58.99
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	100	160,566,580	207,599,000	77.34
		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	100	50,000,000	149,378,000	33.47
		URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		100	86,138,093,938	136,895,674,581	62.92
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		100	1,650,470,760	2,975,077,400	55.48
1	Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		100	230,000,000	860,564,300	26.73
		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Keterlaksanaan Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100,000,000	417,626,400	23.94
		Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG		100	417,626,400	417,626,400	100.00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100,000,000	199,240,000	50.19
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	Presentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	130,000,000	442,937,900	29.35



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Kewenangan Kabupaten/Kota					
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	100	130,000,000	127,095,000	97.77
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		100	184,070,760	212,319,800	86.70
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Keterlaksanaan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100	122,400,000	196,879,800	62.17
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	22,400,000	96,879,800	23.12
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		100		100,000,000	0.00
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		100		15,440,000	0.00
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		100	100,000,000		0.00
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		100	61,670,760		0.00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		100	61,670,760		0.00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		100	100,000,000	215,000,000	46.51
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	100,000,000	215,000,000	46.51
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	100	100,000,000	215,000,000	46.51



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		100	340,000,000	758,193,200	44.84
		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100	260,000,000	678,193,200	38.34
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		100	130,000,000	403,539,200	32.21
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100	130,000,000	274,654,000	47.33
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		100	80,000,000	80,000,000	100.00
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100	80,000,000	80,000,000	100.00
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		100	796,400,000	929,000,100	85.73
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100	237,300,000	504,441,100	47.04
		Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA		100	237,300,000	504,441,100	47.04
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100	484,504,000	336,159,800	69.38
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100	230,000,000		0.00
		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK		100	254,504,000	336,159,800	75.71
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	100	87,300,000	87,300,000	100.00
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	546,339,200	546,339,200	100.00



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	100	546,339,200	546,339,200	100.00
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	74,596,000	88,399,200	84.39
		Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/		100	74,596,000	88,399,200	84.39
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	124,895,000	124,895,000	100.00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	74,596,000	74,596,000	100.00
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		100	8,205,673,779	12,398,671,384	66.18
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	3,253,087,559	4,692,737,184	69.32
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	1,435,648,634	1,544,027,113	92.98
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100	1,435,648,634	1,544,027,113	92.98
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	1,107,453,250	1,739,573,000	63.66
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	63,000,000	63,000,000	100.00
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	100	119,453,250	751,573,000	15.89
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	100	925,000,000	925,000,000	100.00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	185,000,000	970,679,971	19.06



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)	100	15,000,000	14,999,100	99.99
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	60,000,000	845,685,871	7.09
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	60,000,000	60,000,000	100.00
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	50,000,000	49,995,000	99.99
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	663,983,000	663,983,000	100.00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	324,985,675	239,037,100	73.55
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	8,694,000	8,670,000	99.72
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	14,391,675	14,368,600	99.84
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	301,900,000	215,998,500	71.55
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterlaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	200,000,000	199,420,000	99.71
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	200,000,000	199,420,000	99.71
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100	399,808,000	398,659,000	99.71
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		100	224,600,000	786,318,000	28.56
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Presentase Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	100	328,569,400	328,569,400	100.00
		Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	Persentase keterlaksanaan penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	100	204,414,400	204,414,400	100.00
		Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	100	124,155,000	124,155,000	100.00
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100	331,133,000	331,133,000	100.00



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	100	65,220,000	65,220,000	100.00
		Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	100	60,113,000	60,113,000	100.00
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		100		786,318,000	0.00
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	100	60,000,000	260,141,000	23.06
		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	100	64,200,000	64,200,000	100.00
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	100	20,400,000	20,400,000	100.00
		Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)	100	80,000,000	441,577,000	18.12
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		100	3,366,888,000	4,502,164,000	74.78
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Presentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	100	1,266,000,000	1,644,627,500	76.98
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	100	616,000,000	434,975,100	70.61
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	100	150,000,000	150,000,000	100.00



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	100	70,000,000	364,514,300	19.20
		Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah yang Mendapatkan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	100	80,000,000	345,459,500	23.16
		Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100	150,000,000	150,000,000	100.00
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	100	130,000,000	130,000,000	100.00
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	100	481,500,000	481,500,000	100.00
		Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	100	200,000,000	199,999,600	100.00
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana		100		434,975,100	0.00
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		100		150,000,000	0.00
		Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		100		149,679,000	0.00
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal		100		364,514,300	0.00
		Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		100		345,459,500	0.00
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		100		1,084,024,000	0.00
		Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB		100		617,300,000	0.00
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		100		466,724,000	0.00
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	100	962,000,000	1,287,925,000	74.69



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit)	100	650,000,000		0.00
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	100	312,000,000		0.00
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		100	174,638,000	809,263,000	21.58
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	100	157,988,000	444,490,000	35.54
		Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	100	78,000,000	78,000,000	100.00
		Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	100	1,007,810,000	1,005,925,000	99.81
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	100	204,000,000	204,000,000	100.00
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	100	145,820,000	145,820,000	100.00
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100	16,200,000	16,200,000	100.00
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100	117,920,000	117,920,000	100.00
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100	16,650,000	364,773,000	4.56
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100	964,250,000	964,249,500	100.00
		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	100	3,750,000	3,750,000	100.00



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	100	63,000,000	325,500,000	19.35
		Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	100	897,500,000	897,499,500	100.00
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas		100		63,000,000	0.00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		100	1,361,098,220	2,417,452,200	56.30
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100	1,361,098,220	2,417,452,200	56.30
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (Laporan)	100	140,000,000	720,565,400	19.43
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	100	150,000,000	268,566,600	55.85
		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	100	114,510,000	114,510,000	100.00
		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	100	300,000,000	291,276,000	97.09
		Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	100	109,598,220	475,544,200	23.05



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	100	661,500,000	661,500,000	100.00
		Sosialisasi IPK	Jumlah sosialisasi IPK yang terlaksana	100	144,555,000	144,555,000	100.00
		URUSAN PEMERINTAHAN PANGAN		100	2,776,137,961	6,850,019,046	40.53
2	Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	2,176,783,361	2,928,850,564	74.32
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	29,394,000	29,388,000	99.98
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	100	29,394,000	29,388,000	99.98
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	1,388,096,866	1,371,688,874	98.82
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100	1,358,096,866	1,341,841,174	98.80
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		100	20,000,000	19,860,000	99.30
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100	10,000,000	9,987,700	99.88
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100	10,000,000	9,740,000	97.40
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		100	10,000,000	9,740,000	97.40
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	192,228,000	404,742,000	47.49
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	100	42,228,000	41,920,000	99.27
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		100	150,000,000	362,822,000	41.34
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	292,499,613	812,026,615	36.02
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)	100	19,716,750	149,028,600	13.23
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100	25,000,000	24,972,700	99.89
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga (Paket)	100	8,639,145	8,634,000	99.94
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100		8,634,000	0.00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor (Paket)	100	40,550,000	8,980,400	22.15



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan (Paket)	100	8,999,118	8,980,400	99.79
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	100	9,894,600	9,890,000	99.95
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100	220,250,000	610,520,915	36.08
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	164,564,882	190,865,075	86.22
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)	100	8,363,162	21,318,085	39.23
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100		6,195,000	0.00
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Laporan)	100	100,000,000	60,240,000	60.24
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100		103,111,990	0.00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100		110,400,000	0.00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100		110,400,000	0.00
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		100		149,129,200	0.00
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		100		99,129,400	0.00
		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		100		99,129,400	0.00
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		100		49,999,800	0.00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota		100		49,999,800	0.00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterlaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	398,898,000	343,520,000	86.12
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Keterlaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	398,898,000	343,520,000	86.12
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		100	387,975,000	3,560,659,682	10.90
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase keterlaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	100	387,975,000	3,560,659,682	10.90



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	100	53,020,000	53,020,000	100.00
		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	100	100,000,000	2,469,146,382	4.05
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100	100,000,000	753,812,500	13.27
		Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota		100		50,000,000	0.00
		Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan		100		87,970,800	0.00
		Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Presentase Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	100	87,975,000	199,730,000	44.05
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta dan Analisis Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	100	99,129,402	273,157,200	36.29
		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	100	99,129,402	273,157,200	36.29
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	50,000,000	51,970,000	96.21
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	100	50,000,000	51,970,000	96.21
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		100	211,379,600	211,379,600	100.00
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	100	211,379,600	211,379,600	100.00
		Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	100	30,305,000	30,305,000	100.00
		Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	100	62,271,000	62,120,000	99.76
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	100	118,803,600	118,732,600	99.94
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		100	6,298,121,299	9,628,131,417	65.41
3	Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	5,329,656,489	8,014,133,069	66.50
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	10,000,000		0.00



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP		100	10,000,000		0.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	1,571,994,877	1,282,388,833	81.58
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		100	1,551,844,462	1,282,388,833	82.64
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100	20,150,415	15,687,000	77.85
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	445,000,000	37,500,000	8.43
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		100	45,000,000	37,500,000	83.33
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			100	400,000,000		0.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	256,528,812	221,269,236	86.26
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)		100	13,743,132	3,422,536	24.90
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		100	17,103,450	3,155,500	18.45
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		100	104,451,500	514,919,300	20.29
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		100	35,944,480	49,192,000	73.07
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		100	25,746,000	24,520,000	95.24
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100	59,540,250	214,691,200	27.73
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keterlaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	551,872,800	78,810,000	14.28
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			100	506,872,800		0.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		100	45,000,000	78,810,000	57.10
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	2,227,500,000	6,271,018,800	35.52
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100	9,900,000	2,475,000	25.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		100	2,217,600,000	6,268,543,800	35.38



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterlaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	266,760,000	201,956,200	75.71
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)	100	110,400,000	110,400,000	100.00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)	100	156,360,000	91,556,200	58.55
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	192,195,000	191,924,000	99.86
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100	199,200,000	180,986,200	90.86
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		100	205,391,610	124,282,000	60.51
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100	205,391,610	124,282,000	60.51
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	100	205,391,610	124,282,000	60.51
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		100	41,731,200	40,180,000	96.28
		Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Penyimpanan sementara Limbah B3 yang tertangani	100	41,731,200	40,180,000	96.28
		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	100	41,731,200	40,180,000	96.28
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		100	302,302,000	118,506,666	39.20
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	302,302,000	118,506,666	39.20
		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan	Jumlah Laporan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin	100	162,302,000	118,506,666	73.02



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
		Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup		100	140,000,000		0.00
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		100	54,040,000	38,520,000	71.28
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		100	54,040,000	38,520,000	71.28
		Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota		100	54,040,000	38,520,000	71.28
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		100	365,000,000	1,292,509,682	28.24
		Pengelolaan Sampah	Jumlah Pengelolaan Sampah Yang Tertangani	100	365,000,000	1,292,509,682	28.24
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	100	165,000,000	1,205,174,350	13.69
		Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan		100		87,335,332	0.00
		pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan		100	200,000,000		0.00
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		100	2,848,863,501	4,741,379,021	60.09
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	39,000,000	228,859,000	17.04
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	39,000,000	228,859,000	17.04



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	100		228,859,000	0.00
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		100	104,040,000	117,360,000	88.65
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		100	104,040,000	117,360,000	88.65
		Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	100	104,040,000	117,360,000	88.65
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		100		445,765,000	0.00
		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100		445,765,000	0.00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100		445,765,000	0.00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		100	1,671,619,181	2,915,330,701	57.34
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	100	1,671,619,181	2,915,330,701	57.34
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	100	1,671,619,181	2,915,330,701	57.34
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		100	1,034,204,320	1,034,064,320	99.99
		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	1,034,204,320	1,034,064,320	99.99
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	1,034,204,320	1,034,064,320	99.99
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		100	7,774,455,948	6,480,158,852	83.35



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
4	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	3,887,227,974	2,906,230,928	74.76
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	2,629,792,474	2,503,429,299	95.19
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	1,884,806,352	1,396,087,749	74.07
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	1,668,746,352	1,396,087,749	83.66
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	100	216,060,000		0.00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	408,406,122		0.00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100		396,651,000	0.00
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	umlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	100	408,406,122	396,651,000	97.12
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	110,420,000	235,868,875	46.81
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)	100	24,000,000	30,410,000	78.92
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga (Paket)	100	5,762,000	5,700,000	98.92
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor (Paket)	100	54,800,000	67,939,875	80.66
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan (Paket)	100	55,620,000	167,929,000	33.12
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	100	54,705,000	54,120,000	98.93
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keterlaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	556,558,000	555,234,000	99.76
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)	100	556,558,000	555,234,000	99.76
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	226,160,000	474,821,675	47.63
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	umlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	100	5,000,000	7,500,000	66.67
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)	100	24,000,000	23,949,175	99.79



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)	100	65,000,000	136,647,500	47.57
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100	132,160,000	306,725,000	43.09
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterlaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	400,392,000	359,370,000	89.75
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100	400,392,000	359,370,000	89.75
		Penataan Organisasi	Persentase keterlaksanaan Penataan Organisasi	100	220,220,000	220,220,000	100.00
		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	100	220,220,000	220,220,000	100.00
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		100	452,210,000	413,660,000	91.48
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Terdaftar	100	250,000,000	413,660,000	60.44
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		100		413,660,000	0.00
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	100	175,000,000		0.00
		Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)	100	75,000,000		0.00
		Penataan Pendaftaran Penduduk		100	152,210,000		0.00
		Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	100	212,340,000	212,107,077	99.89
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100	480,680,000	480,260,000	99.91
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		100	50,000,000	45,000,000	90.00
		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan	100	50,000,000	45,000,000	90.00
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL		100	551,375,500	359,515,700	65.20
		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelayanan Pencatatan Sipil yang tertangani	100	401,375,500	359,515,700	89.57
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	100	349,315,000	119,880,000	34.32
		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	100	52,060,500	239,635,700	21.72



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		100	150,000,000		0.00
		Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam (Laporan)	100	150,000,000		0.00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		100	253,850,000	297,322,925	85.38
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		100	253,850,000	297,322,925	85.38
		Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	100	100,000,000	176,942,925	56.52
		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	100	153,850,000	120,380,000	78.25
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		100	12,363,385,900	19,668,320,226	62.86
5	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	6,752,210,000	7,852,523,339	85.99
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	115,000,000	142,680,000	80.60
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	100	35,000,000		0.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	100	35,000,000	142,680,000	24.53



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	100	45,000,000		0.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	2,956,086,192	2,734,626,837	92.51
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	2,881,086,192	2,734,626,837	94.92
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	100	25,000,000		0.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	100	25,000,000		0.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	100	25,000,000		0.00
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	142,800,000	141,800,000	99.30
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	472,723,808	472,469,950	99.95
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	100	36,000,000	36,000,000	100.00
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	75,000,000	74,985,550	99.98
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	213,745,000	213,650,000	99.96
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	100	397,723,808	397,484,400	99.94
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	1,455,000,000	2,880,947,630	50.50
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)	100	60,000,000	59,980,000	99.97
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	70,000,000		0.00
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100	75,000,000	190,000,000	39.47
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	100,000,000	200,000,000	50.00



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	75,000,000	175,098,000	42.83
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100	75,000,000	75,000,000	100.00
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100	30,470,000	5,000,000	16.41
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	250,000,000	617,550,000	40.48
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	750,000,000	1,563,319,630	47.97
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keterlaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	512,600,000	1,050,693,800	48.79
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	100	454,571,000	452,049,500	99.45
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	100	12,600,000		0.00
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	500,000,000	544,700,000	91.79
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	520,800,000	288,916,122	55.48
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	100	50,000,000	49,950,000	99.90
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)	100	100,000,000	87,976,122	87.98
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)	100	220,800,000	101,200,000	45.83
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	100	150,000,000	49,790,000	33.19
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterlaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	720,000,000	282,189,000	39.19
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)	100	20,300,000	20,300,000	100.00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)	100	600,000,000	133,200,000	22.20
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100	120,000,000	282,189,000	42.52
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		100	3,743,183,150	4,871,477,000	76.84



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase keterlaksanaan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100	3,743,183,150	4,871,477,000	76.84
		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	100	350,000,000	660,000,000	53.03
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	umlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100	750,000,000	2,054,785,000	36.50
		Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	100	186,675,000	186,675,000	100.00
		Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	100	250,000,000	249,965,000	99.99
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	100	750,000,000	749,967,000	100.00
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	100	300,000,000	275,000,000	91.67
		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	100	442,000,000	344,160,000	77.86
		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	100	350,000,000	160,550,000	45.87
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	100	201,183,150	201,050,000	99.93
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	100	350,000,000	176,000,000	50.29
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	100	420,715,000	420,695,000	100.00
		Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	100	100,000,000	100,000,000	100.00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		100	1,867,992,750	6,944,319,887	26.90
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat	100	1,867,992,750	6,944,319,887	26.90



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
			Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				
		Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	100	166,935,000	166,935,000	100.00
		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100	292,331,550	2,447,325,000	11.94
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	510,661,200	3,982,135,137	12.82
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	100	150,000,000	149,982,190	99.99
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	100	365,000,000	364,877,560	99.97
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	100	550,000,000	1,036,481,630	53.06
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		100	11,241,207,750	24,693,154,119	45.52
6	Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	3,616,874,759	5,147,899,519	70.26
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	15,000,000		0.00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	100	5,000,000		0.00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	100	3,000,000		0.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	umlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan	100	7,000,000		0.00



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	1,978,554,306	2,047,053,414	96.65
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	1,970,554,306	2,047,053,414	96.26
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	100	3,000,000		0.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	100	5,000,000		0.00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	464,576,688	274,918,800	59.18
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	100	15,000,000		0.00
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	100	42,000,000	89,382,000	46.99
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	100	10,000,000		0.00
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	100	27,500,000		0.00
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	174,812,000	185,536,800	94.22
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	317,022,970	905,794,921	35.00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)	100	7,290,540	1,695,000	23.25
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	6,655,000	4,550,000	68.37
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	100	6,655,000		0.00



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	61,973,730	55,340,000	89.30
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	11,198,700	11,030,000	98.49
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100	15,000,000	15,000,000	100.00
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	8,250,000	8,250,000	100.00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	200,000,000	809,929,921	24.69
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keterlaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	114,860,000	49,950,000	43.49
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	100	15,000,000		0.00
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	100	20,000,000		0.00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	100	39,930,000		0.00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	100	39,930,000		0.00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	102,500,000	238,131,384	43.04
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	100	3,500,000	3,450,000	98.57
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	100	56,000,000	70,281,384	79.68
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	100	25,000,000	110,400,000	22.64
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	100	18,000,000	54,000,000	33.33



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	624,360,795	1,682,001,000	37.12
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	500,000,000	852,320,000	58.66
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	100	24,360,795	829,681,000	2.94
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	100,000,000	408,761,900	24.46
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		100	5,062,778,685	13,146,049,400	38.51
		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100	254,414,000	187,566,800	73.73
		Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		100		187,566,800	0.00
		Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100	254,414,000	254,404,000	100.00
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	100	3,946,907,350	11,148,129,000	35.40
		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)	100	1,500,000,000	3,077,029,000	48.75
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	100	1,146,907,350	8,071,100,000	14.21
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	100	1,300,000,000	2,379,511,110	54.63
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100		42,285,000	0.00
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100	42,310,000	42,285,000	99.94
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100	340,871,335	306,205,000	89.83
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan	100	55,000,000		0.00



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
			Kapasitasnya (Orang)				
		Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (Unit)	100	5,000,000		0.00
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	100	57,500,000		0.00
		Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	100	100,000,000	123,320,000	81.09
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	100	23,371,335	37,415,000	62.47
		Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	100	20,000,000	145,470,000	13.75
		Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	100	20,000,000		0.00
		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	100	60,000,000		0.00
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100	60,000,000	643,850,000	9.32
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	100	50,000,000		0.00
		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan KabupatenKota	100	10,000,000	643,850,000	1.55
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	100	55,000,000	70,385,000	78.14
		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	100	55,000,000	70,385,000	78.14
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	100	159,240,000	263,613,600	60.41



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		100		171,436,800	0.00
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	100	159,240,000	171,436,800	92.89
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		100		92,176,800	0.00
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	100	660,000,000	526,300,000	79.74
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	100	10,000,000	405,120,000	2.47
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		100		405,120,000	0.00
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		100		121,180,000	0.00
		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	243,140,000	243,105,000	99.99
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	100	10,000,000		0.00
		Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	650,000,000	243,105,000	37.40
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		100	2,561,554,306	6,399,205,200	40.03



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
7	Komunikasi dan Informatika	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100	121,340,000	121,340,000	100.00
		Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	121,340,000	121,340,000	100.00
		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	100	2,561,554,306	6,399,205,200	40.03
		Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	100	2,458,054,306	3,959,521,400	62.08
		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	100	103,500,000	2,439,683,800	4.24
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		100	3,795,061,567	2,974,346,093	78.37
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	3,115,493,067	2,444,109,293	78.45
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	24,500,000	13,580,000	55.43
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	14,500,000	13,580,000	93.66
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	100	10,000,000	12,680,000	78.86
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	1,308,059,102	1,127,265,599	86.18
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	1,301,059,102	1,127,265,599	86.64
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	100	7,000,000		0.00

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	335,000,000	329,302,000	98.30
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	35,000,000	30,000,000	85.71
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	100	300,000,000	299,302,000	99.77



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
			Peraturan Perundang-Undangan (Orang				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	1,216,352,015	958,802,694	78.83
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)		100	17,956,215	17,951,600	99.97
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		100	90,000,000	415,466,800	21.66
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		100	7,000,000		0.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		100	40,000,000	39,999,000	100.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		100	10,000,000	9,999,500	100.00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		100	14,000,000	13,992,000	99.94
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100	926,790,000	461,393,794	49.78
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		100	837,395,800	936,683,126	89.40
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keterlaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	110,400,000	110,400,000	100.00
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		100	110,400,000	110,400,000	100.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	71,181,950	15,159,000	21.30
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100	3,000,000	3,000,000	100.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		100	6,000,000		0.00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		100	50,000,000		0.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		100	12,181,950	12,159,000	99.81



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	50,000,000		0.00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	100	50,000,000		0.00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		100	679,568,500	530,236,800	78.03
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterlaksanaan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	679,568,500	530,236,800	78.03
		Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (Dokumen)	100	75,000,000		0.00
		Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah (Dokumen)	100	100,000,000		0.00
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publi	100	150,000,000	249,999,700	60.00
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	100	100,000,000	852,202,000	11.73
		Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media (Layanan)	100	100,000,000	280,237,100	35.68
		Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	100	54,568,500	51,969,188	95.24
		Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	100	100,000,000		0.00
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		100	214,259,800	149,745,000	69.89
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		100	214,259,800	149,745,000	69.89
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100	214,259,800	149,745,000	69.89
		Membangun Metadata Statistik Sektoral		100		149,745,000	0.00



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	100	34,130,000	34,130,000	100.00
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		100	328,079,000	1,262,564,200	25.99
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		100	56,700,000	460,851,700	12.30
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100		199,999,600	0.00
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		100		199,999,600	0.00
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		100		260,852,100	0.00
		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100		260,852,100	0.00
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	100	56,700,000	56,699,188	100.00
		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	100	56,700,000	56,699,188	100.00
		PROGRAM PENGELOLA APLIKASI INFORMATIKA		100	271,379,000	801,712,500	33.85
		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100	110,000,000		0.00
		Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota (Domain)	100	10,000,000		0.00
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Unit)	100	100,000,000		0.00
		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	1,350,000,000	801,712,500	59.39
		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		100		99,999,500	0.00
		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas		100		306,259,100	0.00



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	100	50,000,000	395,453,900	12.64
		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola (Unit)	100	100,000,000		0.00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik (Perangkat Daerah)	100	100,000,000		0.00
		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Layanan)	100	100,000,000		0.00
		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	100	900,000,000	119,988,726	13.33
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE (Dokumen)	100	100,000,000		0.00
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		100	7,547,013,034	13,409,317,127	56.28
8	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	2,179,573,034	3,656,288,429	59.61
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	10,000,000	29,431,700	33.98
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	100	10,000,000	29,431,700	33.98
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	1,321,336,884	1,275,675,379	96.54
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	1,321,336,884	1,275,675,379	96.54
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	245,000,000	348,839,000	70.23



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	100	245,000,000	348,839,000	70.23
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	155,294,000	155,294,000	100.00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	487,684,450	1,654,597,190	29.47
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)	100	15,722,000	71,794,400	21.90
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	44,200,000	229,515,000	19.26
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	15,003,000	44,136,400	33.99
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	51,904,450	88,812,000	58.44
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	36,065,000	64,338,000	56.06
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	24,600,000	75,270,000	32.68
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	300,190,000	1,080,731,390	27.78
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keterlaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	61,732,000	110,400,000	55.92
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100		110,400,000	0.00
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100	11,533,000	11,499,000	99.71
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	50,199,000	50,100,000	99.80
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	26,003,500	65,745,160	39.55
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	7,000,000	26,850,000	26.07
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	100	19,003,500	38,895,160	48.86
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterlaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	89,548,200	171,600,000	52.18
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	89,548,200	171,600,000	52.18



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	399,894,000	398,232,000	99.58
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		100	50,700,000	240,700,000	21.06
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100	50,700,000	240,700,000	21.06
		Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	50,700,000	125,420,000	40.42
		Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	100	50,700,000	240,700,000	21.06
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		100	1,000,000,000	5,241,807,838	19.08
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		100	1,000,000,000	5,241,807,838	19.08
		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	100	1,000,000,000	5,241,807,838	19.08
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		100	900,000,000	876,334,430	97.37
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase Keterlaksanaan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100	900,000,000	876,334,430	97.37
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	100	900,000,000	876,334,430	97.37
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		100	124,560,000	124,560,000	100.00
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	100	124,560,000	124,560,000	100.00



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	100	124,560,000	124,560,000	100.00
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		100	227,180,000	227,180,000	100.00
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Presentase Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	100	227,180,000	227,180,000	100.00
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	100	126,420,000	126,420,000	100.00
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	100	100,760,000	100,760,000	100.00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		100	3,065,000,000	3,042,446,430	99.26
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	100	3,065,000,000	3,042,446,430	99.26
		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	100	3,065,000,000	3,042,446,430	99.26
		URUSANPEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		100	3,988,806,684	4,586,253,168	86.97
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	2,841,306,684	3,567,773,168	79.64
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	19,500,000	15,000,000	76.92
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	umlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	100	1,500,000		0.00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	umlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	100	1,500,000		0.00



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	100	1,500,000		0.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	100	15,000,000	15,000,000	100.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	1,157,354,642	1,059,889,808	91.58
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100	1,154,354,642	1,059,889,808	91.82
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	100	1,500,000		0.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	100	1,500,000		0.00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	787,774,447	1,461,395,000	53.91
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	umlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	100	40,611,847	48,100,000	84.43
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	100	407,162,600	393,927,000	96.75
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	100	340,000,000	804,978,000	42.24
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		100		214,390,000	0.00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	533,214,500	520,959,360	97.70



No	Urusan/Bidang Urusan	Progran/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	umlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	100	5,400,000	5,250,000	97.22	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	100	6,700,000	6,670,000	99.55	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	umlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	100	135,000,000	134,985,600	99.99	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	100	61,900,000	67,670,000	91.47	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	100	36,000,000	42,310,000	85.09	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	umlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100	288,214,500	264,073,760	91.62	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	100,000,000	98,105,000	98.11	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	100	100,000,000	98,105,000	98.11	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	38,300,000	54,420,000	70.38	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	100	3,300,000	7,500,000	44.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	umlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	100	35,000,000	46,920,000	74.60	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205,163,095.00	100		376,347,000	0.00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	100	130,000,000	152,450,000	85.27	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	100	75,163,095	223,897,000	33.57	



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
			Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)				
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		100	427,500,000	172,375,000	40.32
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100	277,500,000		0.00
		Penetapan Kebijakan Daerah Menegenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	100	277,500,000		0.00
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		100	150,000,000	172,375,000	87.02
		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	100	150,000,000	172,375,000	87.02
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		100	200,000,000	390,589,000	51.20
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		100	200,000,000	390,589,000	51.20
		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	100	200,000,000	390,589,000	51.20
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		100	470,000,000	385,516,000	82.02
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100	470,000,000	385,516,000	82.02
		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	umlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	100	65,000,000	57,818,000	88.95
		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi	100	307,000,000	212,062,000	69.08



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
			Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)				
		Pengawasan Penanaman Modal	umlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	100	98,000,000	115,636,000	84.75
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		100	50,000,000	70,000,000	71.43
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	100	50,000,000	70,000,000	71.43
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		100	4,932,243,237	14,082,128,433	35.02
10	Kepemudaan dan Olahraga	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	1,357,243,237	2,385,254,633	56.90
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	640,228,022	780,113,973	82.07
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	640,228,022	780,113,973	82.07
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	327,324,000	324,430,000	99.12
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	27,324,000	26,992,000	98.78
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	100	300,000,000	297,438,000	99.15
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	264,386,840	682,165,000	38.76
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	50,000,000	248,183,000	20.15



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	umlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	100	20,810,000	20,810,000	100.00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	31,126,590	31,120,000	99.98
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	32,922,200	32,922,000	100.00
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	32,000,000	32,000,000	100.00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	97,528,050	317,130,000	30.75
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	14,904,375	80,894,760	18.42
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	umlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	100	4,854,150	4,845,000	99.81
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	100	10,050,225	10,049,760	100.00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keterlaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	200,000,000	199,800,000	99.90
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	200,000,000	199,800,000	99.90
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	44,740,225	44,740,225	100.00
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	4,690,000	4,690,000	100.00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	10,050,225	10,050,225	100.00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	30,000,000	30,000,000	100.00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	110,400,000	406,887,500	27.13
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	110,400,000	130,362,500	84.69
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100	399,894,000	387,288,400	96.85
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		100	950,000,000	150,000,000	15.79



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	100	150,000,000	150,000,000	100.00
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100	50,000,000	100,000,000	50.00
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (Orang)	100	100,000,000	50,000,000	50.00
		Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	100	1,199,989,000	1,199,709,000	99.98
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100	800,000,000		0.00
		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan (Dokumen)	100	800,000,000		0.00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		100	2,525,000,000	11,546,873,800	21.87
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		100	828,190,000	1,823,716,000	45.41
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	100	828,190,000	1,823,716,000	45.41
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100	1,021,810,000	2,887,667,000	35.39
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	100	1,021,810,000	2,887,667,000	35.39
		Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	umlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	100	871,810,000		0.00
		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan	100	150,000,000		0.00



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
			Kejuaraan (Orang)				
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	100	100,000,000		0.00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	100	100,000,000	154,420,000	64.76
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase keterlaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	100	325,000,000	670,108,900	48.50
		Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan (Dokumen)	100	125,000,000		0.00
		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	100	200,000,000	839,645,200	23.82
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase keterlaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	100	250,000,000	6,165,381,900	4.05
		Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	100	250,000,000	6,165,381,900	4.05
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		100	100,000,000		0.00
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		100	100,000,000		0.00
		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	umlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	100	100,000,000		0.00
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		100	4,888,719,102	4,699,597,610	96.13
11	Komunikasi dan Informatika	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	3,653,748,302	3,401,036,822	93.08
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	27,168,000	27,168,000	100.00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	14,488,000	14,488,000	100.00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100	12,680,000	12,680,000	100.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	1,301,059,102	1,103,029,919	84.78
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	1,301,059,102	1,103,029,919	84.78



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	37,400,000	37,400,000	100.00
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	37,400,000	37,400,000	100.00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	2,158,251,200	2,103,568,903	97.47
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	17,349,000	17,349,000	100.00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	137,032,000	137,000,000	99.98
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	42,684,000	42,684,000	100.00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	27,550,200	27,550,200	100.00
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	18,850,000	18,850,000	100.00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP	100	926,790,000	923,452,577	99.64
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100	987,996,000	936,683,126	94.81
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keterlaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	110,400,000	110,400,000	100.00
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100	110,400,000	110,400,000	100.00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	19,470,000	19,470,000	100.00
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	7,700,000	7,700,000	100.00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	11,770,000	11,770,000	100.00
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		100	1,084,970,800	1,084,300,988	99.94
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	1,084,970,800	1,084,300,988	99.94
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	100	180,129,800	180,129,800	100.00
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	100	852,871,000	852,202,000	99.92
		Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	100	51,970,000	51,969,188	100.00



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		100	150,000,000	214,259,800	70.01
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100	150,000,000	214,259,800	70.01
		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun (Dokumen)	100	1,500,000		0.00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	100	34,130,000	34,130,000	100.00
		Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	100	180,129,800	180,129,800	100.00
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		100	730,914,000	328,070,914	44.89
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		100	459,535,000	56,699,188	12.34
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100	400,000,000		0.00
		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Dokumen)	100	200,000,000		0.00
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	100	200,000,000		0.00
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		100	59,535,000		0.00
		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi (Perangkat Daerah)	100	59,535,000		0.00
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	100	56,700,000	56,699,188	100.00



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	100	56,700,000	56,699,188	100.00
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		100	271,379,000	271,371,726	100.00
		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	271,379,000	271,371,726	100.00
		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	100	119,996,000	119,988,726	99.99
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	100	151,383,000	151,383,000	100.00
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		100	200,000,000	399,600,000	50.05
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		100	100,000,000	149,800,000	66.76
		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	100,000,000	149,800,000	66.76
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan /Difasilitasi	100	100,000,000	149,800,000	66.76
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		100	100,000,000	249,800,000	40.03
		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		100	100,000,000	249,800,000	40.03
		Pemanfaatan Cagar Budaya		100	100,000,000	249,800,000	40.03
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100	300,000,000	300,000,000	100.00
		Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	100	150,000,000	150,000,000	100.00
		Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	100	150,000,000	150,000,000	100.00
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		100	1,355,192,000	1,732,722,000	78.21
12	Kearsipan dan Perpustakaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	36,400,000	875,452,700	4.16
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keterlaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	36,400,000	18,183,400	49.95
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	100	36,400,000	18,183,400	49.95



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)	100	119,582,000	119,571,000	99.99
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		100	1,318,792,000	857,269,300	65.00
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota		100	1,018,792,000	707,288,300	69.42
		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten /Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	100	239,960,000	119,200,000	49.67
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	100	359,392,000	179,543,300	49.96
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	100	199,440,000	99,245,000	49.76
		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	100	220,000,000	309,300,000	71.13
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan (Lokus)	100	300,000,000	149,981,000	49.99
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat		100	170,690,000	149,981,000	87.87
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		100	534,129,790	523,329,900	97.98
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	231,578,790	115,660,400	49.94
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	100	231,578,790	115,660,400	49.94



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	100	231,578,790	115,660,400	49.94
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		100	302,551,000	407,669,500	74.21
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		100	256,000,000	127,780,000	49.91
		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)	100	256,000,000	127,780,000	49.91
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)	100	120,000,000	59,440,000	49.53
		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)	100	120,000,000	59,440,000	49.53
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		100	538,460,000	220,449,500	40.94
		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna)	100	177,640,000	88,771,500	49.97
		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	100	360,820,000	131,678,000	36.49
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		100	4,465,358,826	5,313,088,671	84.04
13	Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	4,183,013,826	4,838,333,671	86.46
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	2,262,507,506	2,168,317,708	95.84
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100	2,262,507,506	2,055,784,699	90.86
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	347,025,000	347,429,000	99.88
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	100	98,025,000	97,968,822	99.94
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		100	249,000,000		0.00



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	823,275,800	875,426,453	94.04
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)	100	22,406,000	32,597,000	68.74
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)	100	100,976,000	297,795,500	33.91
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	49,957,000	49,893,600	99.87
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	112,911,000	112,802,900	99.90
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	77,898,000	77,861,600	99.95
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	59,050,000	78,575,000	75.15
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	400,077,800	773,157,800	51.75
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keterlaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	92,029,000	96,010,000	95.85
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100	40,598,000	153,740,600	26.41
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	51,431,000	96,010,000	53.57
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	49,708,520	38,665,510	77.78
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	7,406,000	7,406,000	100.00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	100	42,302,520	55,847,850	75.75
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase keterlaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	131,156,000	152,286,000	86.12
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		100		544,368,000	0.00
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		100		63,111,000	0.00
		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		100		494,070,000	0.00
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		100		58,650,000	0.00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	80,400,000	110,400,000	72.83



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100	50,756,000		0.00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		100	180,260,000	300,230,000	60.04
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Presentase Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	100	75,000,000	159,425,000	47.04
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun ini	100	75,000,000	159,425,000	47.04
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Presentase Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100	105,260,000	140,805,000	74.76
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	100	105,260,000	140,805,000	74.76
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		100	102,085,000	174,525,000	58.49
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	100	102,085,000	174,525,000	58.49
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	100	102,085,000	174,525,000	58.49
		URUSAN PENDUKUNG, PENUNJANG, PENGAWASAN, KEWILAHAN, DAN PEMERINTAHAN UMUM		100	521,383,159,283	374,941,396,099	71.91
	A	UNSUR PENUNJANG PEMERINTAHAN		100	447849878571	297,510,066,803	66.43
1	SEKRETARIAT DAERAH	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100		10,896,587,493	0.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100		1,160,765,065	0.00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100		1,160,765,065	0.00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100		5,629,415,000	0.00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100		491,226,000	0.00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100		464,081,900	0.00
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100		134,044,000	0.00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100		694,294,500	0.00



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100		245,358,600	0.00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100		1,212,500,000	0.00
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100		2,387,910,000	0.00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100		1,423,164,186	0.00
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100		149,995,000	0.00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100		325,669,186	0.00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100		947,500,000	0.00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100		1,373,615,244	0.00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100		1,373,615,244	0.00
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		100		1,267,687,698	0.00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		100		112,687,698	0.00
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		100		400,000,000	0.00
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		100		755,000,000	0.00
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		100		41,940,300	0.00
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		100		41,940,300	0.00
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		100		573,981,409	0.00
		Administrasi Tata Pemerintahan		100		573,981,409	0.00
		Penataan Administrasi Pemerintahan		100		573,981,409	0.00
		Belanja Perjalanan Dinas		100		573,981,409	0.00
1b	Bagian Adimistrasi Umum dan Protokoler	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	62,343,786,819	45,513,193,349	73.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	7,173,332,902	5,094,282,379	71.02
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	7,173,332,902	5,094,282,379	71.02
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	4,522,737,800	4,500,870,000	99.52



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	1,462,450,000	1,461,740,000	99.95
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	599,730,000	599,730,000	100.00
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	2,460,557,800	2,439,400,000	99.14
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	19,532,986,200	13,268,764,000	67.93
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	1,141,226,900	650,000,000	56.96
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	683,371,900	219,290,000	32.09
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	575,619,000	250,784,000	43.57
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	1,494,294,500	800,000,000	53.54
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	499,999,900	254,600,000	50.92
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100	4,637,500,000	3,425,000,000	73.85
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100	200,000,000	199,800,000	99.90
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	3,513,215,000	1,120,229,000	31.89
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	6,787,759,000	6,349,061,000	93.54
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keterlaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	8,519,550,131	7,942,516,031	93.23
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	100	939,140,000	937,847,000	99.86
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	2,838,015,000	2,325,413,900	81.94
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100	4,742,395,131	4,679,255,131	98.67
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	3,564,290,000	1,554,720,711	43.62
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	150,000,000	-	0.00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	1,124,996,000	551,470,711	49.02
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	271,650,000	271,250,000	99.85
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	2,017,644,000	732,000,000	36.28



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	5,671,104,000	3,411,680,000	60.16
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	3,671,110,000	2,122,900,000	57.83
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100	999,996,000	938,880,000	93.89
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100	999,998,000	349,900,000	34.99
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	11,244,502,886	8,591,560,228	76.41
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	545,620,886	287,027,228	52.61
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		100	198,894,000	198,500,000	99.80
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		100	400,000,000	-	0.00
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		100	10,099,988,000	8,106,033,000	80.26
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		100	249,996,300	-	0.00
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		100	6,003,393,900	5,336,046,500	88.88
		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	100	6,003,393,900	5,336,046,500	88.88
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	100	6,003,393,900	5,336,046,500	88.88
1c	Bagian Hukum dan Organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	3,601,239,200	3,154,218,800	87.59
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	314,660,000	314,660,000	100.00
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	314,660,000	314,660,000	100.00
		Penataan Organisasi		100	3,286,579,200	2,839,558,800	86.40
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		100	1,343,856,300	918,024,000	68.31
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		100	994,118,200	972,951,400	97.87
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		100	948,604,700	948,583,400	100.00
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		100	4,042,304,800	3,047,521,800	75.39



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		100	4,042,304,800	3,047,521,800	75.39
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		100	1,467,302,000	1,344,009,000	91.60
		Fasilitasi Bantuan Hukum		100	873,864,700	505,362,000	57.83
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		100	1,701,138,100	1,198,150,800	70.43
1d	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	20,064,590,500	19,128,795,799	95.34
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	20,064,590,500	19,128,795,799	95.34
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	100	12,566,995,200	12,334,440,800	98.15
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	100	7,497,595,300	6,794,354,999	90.62
1e	Bagian Administrasi Pembangunan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	1,399,014,350	1,399,014,350	100.00
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	19,999,950	19,999,950	100.00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	19,999,950	19,999,950	100.00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	1,379,014,400	1,379,014,400	100.00
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		100	605,384,500	605,384,500	100.00
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		100	349,554,400	349,554,400	100.00
		Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	100	174,130,000	174,130,000	100.00
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	100	249,945,500	249,945,500	100.00
1f	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	1,301,107,300	1,201,319,850	92.33
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	1,177,107,300	1,077,619,850	91.55
		Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	100	378,669,300	279,200,600	73.73



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
1g	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	100	798,438,000	798,419,250	100.00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	124,000,000	123,700,000	99.76
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	124,000,000	123,700,000	99.76
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		100	2,143,452,400	2,078,522,299	96.97
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		100	2,143,452,400	2,078,522,299	96.97
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		100	763,900,000	763,811,000	99.99
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		100	880,489,400	870,633,199	98.88
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		100	499,063,000	444,078,100	88.98
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterlaksana- naan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	394,535,000	196,366,380	49.77
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	394,535,000	196,366,380	49.77
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	394,535,000	196,366,380	49.77
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		100	802,980,000	521,440,000	64.94
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		100	404,440,000	301,840,000	74.63
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		100	199,240,000	199,240,000	100.00
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		100	205,200,000	102,600,000	50.00
1h	Bagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		100	398,540,000	219,600,000	55.10
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		100	99,880,000	60,000,000	60.07
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		100	199,200,000	99,600,000	50.00
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		100	99,460,000	60,000,000	60.33
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterlaksana- naan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	2,148,788,900	2,148,768,900	100.00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	299,799,500	299,799,500	100.00
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		100	49,929,500	49,929,500	100.00



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	100	249,870,000	249,870,000	100.00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keterlaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	193,600,000	193,600,000	100.00
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	193,600,000	193,600,000	100.00
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		100	1,655,389,400	1,655,369,400	100.00
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		100	697,100,000	697,100,000	100.00
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan		100	958,289,400	958,269,400	100.00
2	SEKRETARIAT DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterlaksana- naan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	26,121,972,106	32,402,009,554	80.62
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	270,475,000	368,367,500	73.43
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	270,475,000	368,367,500	73.43
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	1,176,695,000	1,970,019,002	59.73
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	352,775,000	525,880,000	67.08
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	823,920,000		0.00
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	100	122,900,000	-	0.00
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	100	723,920,000	456,941,000	63.12
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	1,176,695,000	1,970,019,002	59.73
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	352,775,000	525,880,000	67.08
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	823,920,000		0.00
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	100	122,900,000	-	0.00
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	100	723,920,000	456,941,000	63.12



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	3,765,857,650	5,623,173,030	66.97
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	191,536,000	191,536,000	100.00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	1,452,856,250	3,361,872,600	43.22
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	406,149,000	406,110,630	99.99
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	483,045,400	483,036,000	100.00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100	349,686,000	349,600,000	99.98
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100	80,000,000	79,000,000	98.75
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	802,585,000	752,018,800	93.70
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	3,440,951,240	3,783,964,935	90.94
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	28,000,000	28,000,000	100.00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	865,675,240	379,242,882	43.81
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	1,055,600,000	1,090,270,000	96.82
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	1,491,676,000	2,286,452,053	65.24
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	300,000,000	300,000,000	100.00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	300,000,000	300,000,000	100.00
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase keterlaksanaan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100	10,076,774,672	9,458,501,157	93.86
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	100	8,157,367,672	7,977,904,737	97.80
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	100	850,000,000	620,596,420	73.01
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	100	1,069,407,000	860,000,000	80.42
		Layanan Administrasi DPRD	Persentase keterlaksanaan Layanan Administrasi DPRD	100	5,062,122,000	4,944,473,000	97.68
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	100	4,102,122,000	3,984,473,000	97.13



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	100	960,000,000	960,000,000	100.00
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		100	21,403,108,000	15,749,134,600	73.58
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Presentase Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100	5,565,049,000	1,619,406,000	29.10
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	100	4,555,049,000	1,449,406,000	31.82
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	100	1,010,000,000	170,000,000	16.83
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Presentase Keterlaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran	100	1,035,550,000	650,650,000	62.83
		Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	100	250,000,000	133,080,000	53.23
		Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	100	200,000,000	185,150,000	92.58
		Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	100	250,550,000	147,420,000	58.84
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	100	185,000,000	185,000,000	100.00
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	4,910,000,000	4,833,632,500	98.44
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	100	902,000,000	1,075,705,000	83.85
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	100	902,000,000	730,535,000	80.99
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	100	902,000,000	1,243,040,000	72.56
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	100	902,000,000	801,712,500	88.88
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	100	902,000,000	982,640,000	91.79
		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	100	200,000,000		0.00
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	100	200,000,000		0.00
		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase keterlaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD	100	2,503,944,000	1,167,605,000	214.45



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	100	800,000,000		0.00
		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	100	1,253,944,000	892,402,000	71.17
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	100	150,000,000		0.00
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	100	150,000,000	126,000,000	84.00
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	100	150,000,000	149,203,000	99.47
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase keterlaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100	3,109,940,000	2,286,593,500	73.53
		Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	100	738,600,000		0.00
		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	100	50,000,000	40,000,000	80.00
		Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	100	2,321,340,000	1,996,593,500	86.01
		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase keterlaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD	100	4,278,625,000	5,191,247,600	82.42
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100	3,873,625,000		0.00
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	100	405,000,000	369,481,000	109.61
3	PERENCANAAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	2,183,961,286	6,288,025,008	34.73
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	90,000,000	85,022,100	94.47
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	30,000,000	29,987,000	99.96
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	30,000,000	27,420,300	91.40
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100	30,000,000	27,614,800	92.05
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	26,331,200	26,331,200	100.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	1,928,961,286	1,669,009,155	86.52
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	1,928,961,286	1,669,009,155	86.52



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	1,050,000,000	1,310,832,100	80.10
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	100,000,000	210,832,500	47.43
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	950,000,000	1,099,999,600	86.36
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterlaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	1,461,000,000	1,596,087,130	91.54
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	60,000,000	29,864,900	49.77
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	10,000,000	41,869,500	23.88
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	58,000,000	54,663,900	94.25
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	45,000,000	63,120,000	71.29
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	100	290,000,000	440,000,000	65.91
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	998,000,000	966,568,830	96.85
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keterlaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	400,000,000	362,200,000	90.55
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	400,000,000	362,200,000	90.55
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	40,000,000	73,467,473	54.45
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	10,000,000	9,990,000	99.90
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	30,000,000	63,477,473	47.26
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	295,000,000	1,191,407,050	24.76
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	85,000,000	82,820,000	97.44
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	10,000,000	20,000,000	50.00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	200,000,000	923,634,000	21.65



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		100	5,364,328,000	5,752,803,100	93.25
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase keterlaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		100	3,300,000,000	3,938,805,900	83.78
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)		100	600,000,000	621,198,400	96.59
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		100	650,000,000	996,941,900	65.20
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan		100	900,000,000	684,365,200	76.04
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan		100	1,150,000,000	1,636,300,400	70.28
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		100	800,000,000	549,669,600	68.71
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)		100	450,000,000	449,999,600	100.00
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi		100	350,000,000	99,670,000	28.48
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		100	1,264,328,000	1,264,327,600	100.00
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		100	914,328,000	914,327,600	100.00
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		100	350,000,000	350,000,000	100.00
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		100	1,800,000,000	1,966,069,250	91.55
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		100	600,000,000	698,821,700	85.86
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan		100	350,000,000	348,841,600	99.67



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	100	250,000,000	349,980,100	71.43
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100	600,000,000	449,219,800	74.87
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	100	350,000,000	349,234,600	99.78
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	100	250,000,000	99,985,200	39.99
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	600,000,000	818,027,750	73.35
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	100	350,000,000	718,028,050	48.74
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	100	250,000,000	99,999,700	40.00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		100	3,447,910,000	2,398,626,960	69.57
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100	3,447,910,000	2,398,626,960	69.57
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	100	3,447,910,000	2,398,626,960	69.57
3a	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		100	1,950,000,000	2,049,855,500	95.13
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100	350,000,000	399,940,400	87.51
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	100	350,000,000	399,940,400	87.51
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100	350,000,000	599,990,000	58.33
		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	100	350,000,000	599,990,000	58.33



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100	1,250,000,000	1,049,925,100	83.99
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	100	467,906,000	467,906,000	100.00
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	100	600,000,000	349,934,600	58.32
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	100	650,000,000	699,990,500	92.86
4	KEUANGAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	91,040,212,981	96,476,185,766	94.37
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	105,000,000	129,445,000	81.12
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	100	105,000,000	129,445,000	81.12
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	54,000,000,000	52,527,689,166	97.27
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	54,000,000,000	52,527,689,166	97.27
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	1,369,374,711	2,017,886,000	67.86
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100	73,375,027	85,940,000	85.38
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100	1,295,999,684	1,931,946,000	67.08
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100	1,250,000,000	1,000,000,000	80.00
		Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	100	1,250,000,000	1,000,000,000	80.00
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	100	1,250,000,000		0.00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	925,800,000	2,562,564,300	36.13
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	175,800,000	172,460,000	98.10
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	100	1,383,970,660	936,405,660	67.66



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	750,000,000	2,562,564,300	29.27
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	1,985,000,000	2,797,431,250	70.96
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	100	45,000,000	95,352,500	47.19
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	40,000,000	43,323,650	92.33
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	300,000,000	361,490,000	82.99
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	120,000,000	110,363,600	91.97
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100	130,000,000	67,000,000	51.54
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	750,000,000	1,165,003,000	64.38
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100	600,000,000	954,898,500	62.83
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keterlaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	2,734,038,270	4,927,989,550	55.48
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100	1,100,000,000	1,797,610,000	61.19
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	100	785,000,000	2,365,500,000	33.19
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	849,038,270	764,879,550	90.09
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	27,715,000,000	30,537,961,000	90.76
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	15,000,000	69,000,000	21.74
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	1,000,000,000	1,898,211,000	52.68
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	26,700,000,000	28,570,750,000	93.45
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterlaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	956,000,000	975,219,500	98.03
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	275,000,000	344,330,000	79.87



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipel	100	31,000,000	33,500,000	92.54
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100	650,000,000	597,389,500	91.91
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		100	176,851,565,821	20,663,346,050	11.68
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase keterlaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100	1,010,000,000	1,208,655,000	83.56
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	100	150,000,000	202,068,000	74.23
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	100	150,000,000	202,068,000	74.23
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	100	35,000,000	43,758,000	79.99
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	100	35,000,000	43,758,000	79.99
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	100	70,000,000	80,733,000	86.71
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	100	70,000,000	80,733,000	86.71
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APB	100	250,000,000	272,448,000	91.76
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	100	250,000,000	283,089,000	88.31
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksanannya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100	1,238,096,683	4,192,143,850	29.53
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	100	375,000,000	1,349,054,250	27.80
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100	250,000,000	1,113,053,000	22.46
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan	100	228,096,683	474,450,000	48.08



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
			Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	100	35,000,000	39,263,000	89.14
		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	100	85,000,000	379,425,000	22.40
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100	265,000,000	1,216,323,600	21.79
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100	1,928,241,900	3,916,421,200	49.23
		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	100	110,000,000	255,215,000	43.10
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	100	230,000,000	341,494,000	67.35
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	100	243,241,900	490,107,600	49.63
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		100		120,744,800	0.00
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100	325,000,000	734,490,000	44.25
		Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100	115,000,000	182,370,000	63.06
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	100	125,000,000	0	0.00



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100	325,000,000	210,385,400	64.73
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		100		225,463,400	0.00
		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		100		200,882,000	0.00
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	100	205,000,000	761,585,000	26.92
		Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	100	250,000,000	393,684,000	63.50
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase keterlaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	172,675,227,238	11,346,126,000	6.57
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	100	171,614,327,238	11,346,126,000	6.61
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100	1,060,900,000	0	0.00
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		100	1,871,276,237	3,717,423,750	50.34
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase keterlaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1,871,276,237	3,717,423,750	50.34
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	100	125,000,000	882,994,150	14.16
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	100	169,375,027	271,043,000	160.03
		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	398,131,000	912,975,400	43.61
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100	175,000,000	231,066,000	75.74
		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah (Laporan)	100	150,000,000	861,064,000	17.42
		Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	100	250,000,000	227,352,800	90.94
		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	141,901,210	151,132,500	93.89
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	100	180,000,000	112,054,000	62.25



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100	230,000,000	238,912,000	96.27
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100	150,000,000	111,389,300	74.26
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		100	2,075,138,699	4,817,050,500	43.08
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Presentase Keterlaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100	2,075,138,699	4,817,050,500	43.08
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	100	300,000,000	626,919,400	47.85
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	100	155,283,933	774,972,100	20.04
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	100	221,503,720	727,510,000	30.45
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	100	160,000,000	221,558,000	72.22
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	100	75,000,000	99,900,000	75.08
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100	175,000,000	398,945,000	43.87
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	100	790,237,888	1,198,590,000	65.93
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	100	113,113,158	167,190,000	67.66
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	100	85,000,000	601,466,000	14.13
5	KEPEGAWAIAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	3,293,007,272	3,424,901,236	96.15
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	50,000,000	49,999,300	100.00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	15,000,000	14,999,600	100.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	35,000,000	34,999,700	100.00



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterlaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	1,798,128,472	1,607,202,177	89.38
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	1,798,128,472	1,607,202,177	89.38
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	353,560,000	598,679,600	59.06
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	56,100,000	56,100,000	100.00
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100	297,460,000	542,579,600	54.82
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterlaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	962,718,800	1,030,671,659	93.41
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	397,189,000	397,189,000	100.00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100		353,019,400	0.00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	102,738,000	92,120,800	89.67
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	82,801,800	94,018,600	88.07
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	71,700,000	92,200,000	77.77
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	308,290,000	399,312,859	77.21
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	18,200,000	18,195,000	99.97
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	18,200,000	18,195,000	99.97
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	110,400,000	120,153,500	91.88
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	110,400,000	120,153,500	91.88
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		100	6,202,205,000	6,608,858,600	93.85
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100	870,000,000	1,248,849,300	69.66
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	100	555,000,000	957,975,400	57.93
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	100	165,000,000	164,993,900	100.00
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	100	150,000,000	125,880,000	83.92
		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Mutasi dan Promosi ASN	100	273,000,000	199,999,700	73.26



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	100	200,000,000	199,999,700	100.00
		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	100	73,000,000	71,894,950	98.49
		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Pengembangan Kompetensi ASN	100	4,859,205,000	4,910,037,200	98.96
		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	100	1,000,000,000	1,640,268,800	60.97
		Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	100	600,000,000	584,720,000	97.45
		Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	100	250,000,000	249,999,100	100.00
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	100	13,359,205,000	89,020,000	0.67
		Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	100	1,300,000,000	2,580,749,600	50.37
		Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	100	350,000,000	349,999,700	100.00
		Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	100	159,205,000	159,205,000	100.00
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100	200,000,000	249,972,400	80.01
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100	200,000,000	249,972,400	80.01
	B	UNSUR PENGAWASAN		100	6,003,111,586	10,060,620,355	59.67
6	INSPEKTORAT DAERAH	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	3,251,300,336	5,124,295,755	63.45
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	30,000,000	99,280,000	30.22
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	30,000,000	55,320,000	54.23
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100		16,800,000	0.00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100		12,600,000	0.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100		14,560,000	0.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	1,590,800,232	1,603,213,156	99.23



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	1,590,800,232	1,573,363,156	98.90
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100		13,050,000	0.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	100		16,800,000	0.00
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase keterlak- sanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	534,499,079	11,120,000	2.08
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	86,928,817	11,120,000	12.79
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterlak- sanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	534,499,079	998,732,749	53.52
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	86,928,817	86,147,100	99.10
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	447,570,261	912,585,649	49.04
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	748,415,850	1,372,851,600	54.52
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	6,092,100	19,202,000	31.73
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	120,459,150	237,589,000	50.70
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	42,521,850	42,521,000	100.00
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	85,575,000	108,000,000	79.24
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	493,767,750	965,539,600	51.14
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keterlaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	193,027,800	734,876,150	26.27
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	193,027,800	192,831,000	99.90
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100		198,450,000	0.00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100		343,595,150	0.00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	154,557,375	159,035,800	97.18
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	7,350,000	7,350,000	100.00



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	31,287,375	41,285,800	75.78
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	115,920,000	110,400,000	95.24
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterlaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	249,996,000	145,186,300	58.08
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	249,996,000	145,186,300	58.08
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		100	2,273,982,500	3,628,690,000	62.67
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100	1,848,879,500	3,420,135,000	54.06
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	100	392,049,000	849,820,000	46.13
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	100	57,461,250	57,275,000	99.68
		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	100	75,000,000	143,140,000	52.40
		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	100	245,474,250	196,845,000	80.19
		Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	100	719,155,500	719,150,000	100.00
		Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	100	50,000,000	0	0.00
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	100	309,739,500	1,453,905,000	21.30
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Presentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 40	100	425,103,000	494,885,000	85.90
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	100	79,999,500	149,935,000	53.36
		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100	345,103,500	344,950,000	99.96
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		100	477,828,750	1,307,634,600	36.54
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100	80,461,500	79,460,000	98.76
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	100	49,092,750	48,190,000	98.16
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	100	31,368,750	31,270,000	99.69
		Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	100	397,367,250	716,551,710	55.46



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	100	159,369,000	159,340,000	99.98
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	100	94,389,750	94,345,000	99.95
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	100	131,885,250	462,866,710	28.49
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	100	11,723,250	0	0.00
	C	UNSUR KEWILAYAHAN		100	33,490,331,216	28,792,682,208	85.97
7a	Kecamatan Kota Maba	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	1,944,254,110	1,389,781,517	71.48
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	207,600,000	207,600,000	100.00
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	207,600,000	207,600,000	100.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	1,158,353,210	680,833,617	58.78
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	1,158,353,210	680,833,617	58.78
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	283,440,000	283,440,000	100.00
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	283,440,000	283,440,000	100.00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	204,260,900	137,812,900	67.47
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	21,563,300	21,563,300	100.00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	34,013,200	34,013,200	100.00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	13,844,400	5,366,400	38.76
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	43,500,000	43,500,000	100.00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	91,340,000	33,370,000	36.53
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	7,500,000	6,995,000	93.27
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	7,500,000	6,995,000	93.27



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterlaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	83,100,000	73,100,000	87.97
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	83,100,000	73,100,000	87.97
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	258,959,000	258,959,000	100.00
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	159,630,000	159,630,000	100.00
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	159,630,000	159,630,000	100.00
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	99,329,000	99,329,000	100.00
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan di Tingkat Kecamatan	100	99,329,000	99,329,000	100.00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	46,733,200	46,733,200	100.00
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	46,733,200	46,733,200	100.00
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan di Tingkat Kecamatan	100	46,733,200	46,733,200	100.00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	100,923,600	100,923,600	100.00
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	100,923,600	100,923,600	100.00
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100	100,923,600	100,923,600	100.00
7b	KecamatanMaba	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterlaksana- naan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	2,798,382,710	2,504,970,619	89.51
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	2,208,407,710	1,914,996,319	86.71
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	2,183,527,710	1,890,116,319	86.56



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100	24,880,000	24,880,000	100.00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	21,000,000	21,000,000	100.00
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	21,000,000	21,000,000	100.00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	266,025,000	266,025,000	100.00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	14,985,500	14,985,500	100.00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	36,419,500	36,419,500	100.00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	11,404,000	11,404,000	100.00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	203,216,000	203,216,000	100.00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Keterlaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	143,800,000	143,800,000	100.00
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	143,800,000	143,800,000	100.00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	159,150,000	159,149,300	100.00
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	2,250,000	2,250,000	100.00
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	110,400,000	110,400,000	100.00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	46,500,000	46,499,300	100.00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	23,670,900	23,670,900	100.00
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	23,670,900	23,670,900	100.00
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	23,670,900	23,670,900	100.00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	410,518,200	410,518,200	100.00
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	173,165,800	173,165,800	100.00
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100	173,165,800	173,165,800	100.00



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100	237,352,400	237,352,400	100.00
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	237,352,400	237,352,400	100.00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	150,931,000	150,931,000	100.00
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	150,931,000	150,931,000	100.00
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100	150,931,000	150,931,000	100.00
7c	Kecamatan Maba Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	2,174,859,408	1,764,477,505	81.13
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	1,695,353,508	1,284,971,605	75.79
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	1,690,273,508	1,279,891,605	75.72
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100	5,080,000	5,080,000	100.00
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	5,080,000	5,080,000	100.00
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		100	5,080,000	5,080,000	100.00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	362,425,900	362,425,900	100.00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	7,138,500	7,138,500	100.00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	117,900,000	117,900,000	100.00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	24,961,400	24,961,400	100.00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	212,426,000	212,426,000	100.00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Keterlaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	55,000,000	55,000,000	100.00
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	55,000,000	55,000,000	100.00



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	57,000,000	57,000,000	100.00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	57,000,000	57,000,000	100.00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	119,027,500	119,027,500	100.00
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	119,027,500	119,027,500	100.00
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	119,027,500	119,027,500	100.00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	458,475,600	458,475,600	100.00
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	204,776,600	204,776,600	100.00
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100	204,776,600	204,776,600	100.00
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100	253,699,000	253,699,000	100.00
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	253,699,000	253,699,000	100.00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	137,884,800	137,884,800	100.00
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	137,884,800	137,884,800	100.00
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100	137,884,800	137,884,800	100.00
7d	Kecamatan Maba Tengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	2,768,234,806	2,077,256,447	75.04
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	2,000,000	-	0.00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	2,000,000	-	0.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	2,199,219,806	1,510,287,747	68.67



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	2,199,219,806	1,510,287,747	68.67
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	65,000,000	65,000,000	100.00
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	65,000,000	65,000,000	100.00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	236,615,000	236,568,700	99.98
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	19,965,200	19,918,900	99.77
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	58,487,500	58,487,500	100.00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	29,847,300	29,847,300	100.00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	128,315,000	128,315,000	100.00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Keterlaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	72,500,000	72,500,000	100.00
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	72,500,000	72,500,000	100.00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	192,900,000	192,900,000	100.00
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	7,500,000	7,500,000	100.00
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	110,400,000	110,400,000	100.00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	75,000,000	75,000,000	100.00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	97,385,000	97,385,000	100.00
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	97,385,000	97,385,000	100.00
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	97,385,000	97,385,000	100.00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	403,119,600	403,119,600	100.00
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	186,616,500	186,616,500	100.00
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100	186,616,500	186,616,500	100.00



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100	216,503,100	216,503,100	100.00
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	216,503,100	216,503,100	100.00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	180,480,000	180,480,000	100.00
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	180,480,000	180,480,000	100.00
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100	180,480,000	180,480,000	100.00
7e	Kecamatan Maba Utara	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterlaksana- naan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	1,658,456,870	1,515,714,120	91.39
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	1,289,499,970	1,146,757,220	88.93
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	1,001,753,970	859,011,220	85.75
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100	287,746,000	287,746,000	100.00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	31,500,000	31,500,000	100.00
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	31,500,000	31,500,000	100.00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	75,806,900	75,806,900	100.00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	13,601,000	13,601,000	100.00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	41,559,700	41,559,700	100.00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	20,646,200	20,646,200	100.00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Keterlaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	91,250,000	91,250,000	100.00
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	100	91,250,000	91,250,000	100.00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterlak- sanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	170,400,000	170,400,000	100.00



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	7,500,000	7,500,000	100.00
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	110,400,000	110,400,000	100.00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	52,500,000	52,500,000	100.00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	136,199,500	136,199,500	100.00
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	136,199,500	136,199,500	100.00
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	136,199,500	136,199,500	100.00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	451,902,800	451,902,800	100.00
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	216,095,900	216,095,900	100.00
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan di Tingkat Kecamatan	100	216,095,900	216,095,900	100.00
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100	235,806,900	235,806,900	100.00
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	235,806,900	235,806,900	100.00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	105,194,800	105,194,800	100.00
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	105,194,800	105,194,800	100.00
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100	105,194,800	105,194,800	100.00
7f	Kecamatan Wasile	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	4,344,007,766	3,767,033,975	86.72
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	3,757,584,866	3,180,613,975	84.65
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	3,757,584,866	3,180,613,975	84.65
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	52,500,000	52,500,000	100.00



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	52,500,000	52,500,000	100.00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	365,242,900	365,240,000	100.00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	24,995,300	24,995,300	100.00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	34,013,200	34,013,200	100.00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	14,024,400	14,021,500	99.98
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	64,590,000	64,590,000	100.00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	227,620,000	227,620,000	100.00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterlaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	53,600,000	53,600,000	100.00
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	53,600,000	53,600,000	100.00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	4,680,000	4,680,000	100.00
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	4,680,000	4,680,000	100.00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterlaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	110,400,000	110,400,000	100.00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100	110,400,000	110,400,000	100.00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	54,953,000	54,953,000	100.00
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	54,953,000	54,953,000	100.00
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	54,953,000	54,953,000	100.00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	405,788,200	405,788,200	100.00
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	405,788,200	405,788,200	100.00
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100	169,918,600	169,918,600	100.00



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan di Tingkat Kecamatan	100	235,869,600	235,869,600	100.00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	152,814,000	152,814,000	100.00
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	152,814,000	152,814,000	100.00
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100	152,814,000	152,814,000	100.00
7g	Kecamatan Wasile Timur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterlaksana- naan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	3,165,065,418	2,593,204,642	81.93
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	2,695,928,118	2,124,067,342	78.79
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	2,519,012,118	1,947,151,342	77.30
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		100	176,916,000	176,916,000	100.00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	35,800,000	35,800,000	100.00
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	35,800,000	35,800,000	100.00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	202,922,300	202,922,300	100.00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	14,316,000	14,316,000	100.00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	28,131,300	28,131,300	100.00
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	57,750,000	57,750,000	100.00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	102,725,000	102,725,000	100.00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Keterlaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	222,900,000	222,900,000	100.00
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	222,900,000	222,900,000	100.00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterlak- sanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	7,515,000	7,515,000	100.00



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	7,515,000	7,515,000	100.00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	131,181,200	131,181,200	100.00
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	131,181,200	131,181,200	100.00
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	131,181,200	131,181,200	100.00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	209,415,100	209,415,100	100.00
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	209,415,100	209,415,100	100.00
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan di Tingkat Kecamatan	100	209,415,100	209,415,100	100.00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	152,253,600	152,253,600	100.00
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	152,253,600	152,253,600	100.00
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100	152,253,600	152,253,600	100.00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100	61,056,000	61,056,000	100.00
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	61,056,000	61,056,000	100.00
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		100	61,056,000	61,056,000	100.00
7h	Kecamatan Wasile Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterlaksana- naan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	3,871,488,410	3,160,390,080	81.63
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	3,237,176,910	2,530,859,980	78.18
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	3,216,976,910	2,510,779,980	78.05
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	100	20,200,000	20,080,000	99.41



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	33,000,000	33,000,000	100.00
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	33,000,000	33,000,000	100.00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	452,561,500	447,780,100	98.94
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	11,606,000	11,606,000	100.00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	40,242,500	40,215,800	99.93
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	11,120,000	10,980,300	98.74
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	54,990,000	54,975,000	99.97
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	334,603,000	330,003,000	98.63
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterlaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	36,100,000	36,100,000	100.00
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	36,100,000	36,100,000	100.00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	2,250,000	2,250,000	100.00
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	2,250,000	2,250,000	100.00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterlaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	110,400,000	110,400,000	100.00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	110,400,000	110,400,000	100.00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	80,000,000	80,000,000	100.00
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	80,000,000	80,000,000	100.00
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	80,000,000	80,000,000	100.00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	363,315,600	362,811,600	99.86
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	185,534,400	185,102,400	99.77



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100	185,534,400	185,102,400	99.77
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100	177,781,200	177,709,200	99.96
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100	177,781,200	177,709,200	99.96
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	152,168,000	152,168,000	100.00
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	152,168,000	152,168,000	100.00
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100	152,168,000	152,168,000	100.00
7i	Kecamatan Wasile Tengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	2,669,231,592	2,237,185,264	83.81
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	2,038,907,792	1,607,748,064	78.85
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	2,017,247,792	1,586,228,064	78.63
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	100	21,660,000	21,520,000	99.35
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	37,500,000	37,500,000	100.00
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	37,500,000	37,500,000	100.00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	386,483,800	385,597,200	99.77
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	8,938,500	8,923,100	99.83
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	30,960,000	30,759,000	99.35
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	10,322,300	10,262,100	99.42
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	336,263,000	335,653,000	99.82



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Keterlaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	18,600,000	18,600,000	100.00
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	100	18,600,000	18,600,000	100.00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	187,740,000	187,740,000	100.00
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	2,250,000	2,250,000	100.00
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	110,400,000	110,400,000	100.00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	75,090,000	75,090,000	100.00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	455,925,600	454,809,600	99.76
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	185,597,700	185,201,700	99.79
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100	185,597,700	185,201,700	99.79
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100	270,327,900	269,607,900	99.73
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	270,327,900	269,607,900	99.73
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	142,090,000	142,090,000	100.00
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	142,090,000	142,090,000	100.00
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100	142,090,000	142,090,000	100.00
7j	Kecamatan Wasile Utara	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	2,078,959,326	1,769,345,239	85.11
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	1,366,645,326	1,060,397,999	77.59
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	1,303,985,326	997,737,999	76.51
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	100	62,660,000	62,660,000	100.00



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
			Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase keterlaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	45,000,000	45,000,000	100.00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	45,000,000	45,000,000	100.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase keterlaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	425,409,000	422,348,340	99.28
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	13,722,000	12,785,800	93.18
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	40,213,400	40,209,090	99.99
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	11,185,600	11,185,450	100.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	360,288,000	358,168,000	99.41
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Keterlaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	75,000,000	75,000,000	100.00
	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	100	75,000,000	75,000,000	100.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase keterlaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	166,905,000	166,598,900	99.82
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	2,100,000	1,793,900	85.42
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	110,400,000	110,400,000	100.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	54,405,000	54,405,000	100.00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			100	419,025,000	416,577,000	99.42
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	191,317,500	189,685,500	99.15
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100	191,317,500	189,685,500	99.15
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100	227,707,500	226,891,500	99.64
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	227,707,500	226,891,500	99.64
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			100	156,000,000	156,000,000	100.00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	156,000,000	156,000,000	100.00



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100	156,000,000	156,000,000	100.00
	D	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		100	34,039,837,910	38,578,026,733	88.24
8	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	2,787,778,390	2,368,510,733	84.96
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	2,927,326,792	2,368,510,733	80.91
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	16,771,000	16,504,000	98.41
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	1,200,999,999	1,176,129,993	97.93
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	1,200,999,999	1,176,129,993	97.93
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	405,139,625	398,932,720	98.47
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	55,139,625	55,060,000	99.86
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	244,165,000	244,027,341	99.94
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		100		343,872,720	0.00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	200,306,770	528,288,020	37.92
		Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	100	12,101,220	11,588,500	95.76
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	100	7,527,555	11,872,500	63.40
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	2,893,000	31,056,000	9.32
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	15,000,000	22,837,400	65.68
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	23,211,945	12,827,000	55.26



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	42,466,050	23,715,000	55.84
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	100,000,000	425,980,120	23.48
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keterlaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	213,139,275	246,390,000	86.50
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	100	110,400,000	110,400,000	100.00
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	102,739,275	135,990,000	75.55
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	20,071,500	19,560,000	97.45
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	5,071,500	3,870,000	76.31
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	15,000,000	14,900,000	99.33
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterlaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	399,974,000	373,135,000	93.29
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100	399,974,000	373,135,000	93.29
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		100	1,000,000,000	1,055,977,400	94.70
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	1,000,000,000	1,055,977,400	94.70
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	100	50,666,000	50,666,000	100.00
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	100	1,000,000,000	1,055,977,400	94.70
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN		100	30,075,000,000	34,238,836,300	87.84



No	Urusan/Bidang Urusan	Progran/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100	30,075,000,000	34,238,836,300	87.84
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	100	10,287,024,057	10,287,024,057	100.00
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	100	75,000,000	564,815,000	13.28
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	100	30,000,000,000	33,579,821,300	89.34
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		100	57,889,620	305,025,000	18.98
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100	57,889,620	305,025,000	18.98
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi	100	57,889,620	305,025,000	18.98



No	Urusan/Bidang Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPKD Tahun 2024 (%)	
				Kinerja	Rupiah	Rupiah	Kinerja
		Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		100	119,169,900	609,677,300	19.55
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		100	119,169,900	609,677,300	19.55
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100	0	332,102,300	0.00
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100	119,169,900	277,575,000	42.93

2.6. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan *gap expectation* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah diperlukan untuk menentukan strategi dan kebijakan yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Pembangunan daerah Kabupaten Halmahera Timur dalam lima tahun terakhir secara umum telah memperlihatkan hasil, dengan berbagai variasi tingkat capaiannya. Namun demikian masih terdapat permasalahan dan tantangan dari berbagai dimensi pembangunan, khususnya dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Halmahera Timur tahun 2021-2025. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal maupun internal yang terjadi sebagai dampak interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor, baik pada skala lokal kabupaten/kota, provinsi, nasional maupun global. Permasalahan-permasalahan muncul karena belum didayagunakannya secara optimal kekuatan yang dimiliki, kelemahan-kelemahan yang tidak diatasi, peluang-peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan-permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana dimaksud diuraikan sebagai berikut.

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Bidang Pendidikan. Masalah-masalah pokok dalam penyelenggaraan urusan pendidikan di Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana akan disajikan sebagai berikut:

1) Pencapaian IPM dalam dimensi pengetahuan :

- Pencapaian IPM dalam dimensi pengetahuan yang meliputi angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, secara konsisten rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan bahkan tumbuh lebih cepat dari rata-rata secara Provinsi dan Nasional.
- Pencapaian IPM dimensi pengetahuan di Kabupaten Halmahera Timur masih jauh dari standar yang diharapkan, dalam hal ini 15 tahun untuk angka rata-rata lama sekolah (RLS) dan 18 tahun untuk angka harapan lama sekolah (HLS).
- Kesenjangan pencapaian IPM pada dimensi pengetahuan kabupaten Halmahera Timur masih cukup signifikan dengan capaian HLS di bawah rata-rata provinsi.

- lambannya peningkatan RLS merupakan efek berantai dari belum optimalnya penanganan penduduk putus sekolah di masa lalu, terutama melalui program-program pendidikan non formal (Paket B/C).
- 2) Aksesibilitas pelayanan pendidikan :
- Peningkatan APS penduduk usia 7-12 tahun belum mencapai 90 persen.
 - APM pada jenjang pendidikan SD/ sederajat dan SMP/ sederajat masing-masing juga masih berada di bawah angka 80 persen dan 70 persen;
 - Angka melanjutkan sekolah dari jenjang SD/ sederajat dan SMP/ sederajat yang belum mencapai 80 persen;
 - Angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SMA/ SMK yang masih di atas satu persen;
- 3) Mutu pelayanan pendidikan :
- Semakin meningkatnya rasio ketersediaan sekolah belum dibarengi dengan upaya menjaga keseimbangan pada kualitas sarana dan prasarana pembelajaran.
 - Persentase ruang kelas dalam kondisi baik pada satuan pendidikan SMP baru mencapai 90 persen.
 - Ketersediaan prasarana penunjang pembelajaran seperti perpustakaan dan laboratorium di seluruh jenjang pendidikan masih jauh di bawah rata-rata secara Nasional.
 - Ketersediaan guru dengan kualifikasi pendidikan sesuai yang disyaratkan (D4/S1 atau lebih) pada jenjang pendidikan dasar masih belum memadai.
 - Kesenjangan ketersediaan guru dengan kualifikasi pendidikan sesuai disyaratkan juga masih cukup lebar antar wilayah kecamatan.
 - Rasio guru-murid mendekati standar yang ada untuk seluruh jenjang pendidikan mengindikasikan bahwa pola rekrutmen guru dan keseimbangan distribusi atau penempatan guru belum berjalan secara optimal.
 - Pengembangan satuan-satuan pendidikan vokasional berbasis klaster untuk menopang pengembangan wilayah belum optimal terutama untuk menciptakan lulusan-lulusan yang terampil dan relevan sesuai kebutuhan industri.

Bidang Kesehatan. Masalah-masalah pokok dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan di Kabupaten Halmahera Timur yaitu:

- 1) Pencapaian IPM dalam dimensi kesehatan yang meliputi Usia Harapan Hidup, secara konsisten mengalami peningkatan namun masih jauh di bawah rata-rata Nasional. Disparitas antar kabupaten/kota juga masih tinggi bahkan semakin melebar dalam delapan tahun terakhir.
- 2) Sejumlah indikator utama menunjukkan pencapaian yang belum optimal antara lain:
 - Masih belum signifikannya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB); semakin masih jauh dari target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030.
 - Secara agregat provinsi Angka Kematian Neonatal semakin meningkat jauh dari target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030.
 - Kondisi paling krusial dalam sektor kesehatan yang dapat berdampak pada kualitas generasi masa depan Halmahera Timur adalah *stunting* pada balita, prevalensi di atas 40 persen;
- 3) Dari sisi fasilitas kesehatan, rasio ketersediaan puskesmas terus meningkat, namun cakupan fasilitas kesehatan yang bermutu sesuai standar belum merata antar wilayah;
- 4) Dari sisi sumber daya manusia kesehatan, rasio ketersediaan dokter semakin membaik namun masih jauh dari standar idealnya, serta belum meratanya distribusi tenaga kesehatan antar wilayah;
- 5) Permasalahan lainnya, masih tingginya prevalensi dan kematian akibat penyakit menular; *Universal Child Immunization (UCI)* belum mencapai target.
- 6) kelengkapan fasilitas RSUD Maba, kurangnya rumah sakit/puskesmas terapan dalam rangka pelayanan kesehatan antar pulau, angka kecukupan gizi yang rendah,
- 7) Cakupan anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak belum mencapai target;
- 8) Lemahnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan penyakit menular dan kesehatan lingkungan, terdapatnya gizi buruk dan gizi kurang pada balita,
- 9) Rendahnya cakupan penanganan penyakit malaria, HIV/AIDS, TBC, DBD dan diare;

- 10) Rendahnya cakupan kunjungan ibu hamil K4,
- 11) Rendahnya cakupan pelayanan nifas
- 12) Rendahnya cakupan pelayanan anak balita, dan
- 13) Rendahnya cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin.

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Masalah-masalah pokok yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang di Kabupaten Halmahera Timur yaitu:

- 1) Pada bidang pekerjaan umum yaitu
 - Proporsi panjang Jalan kondisi baik mengalami peningkatan 0,59 hingga Tahun 2020 dari total panjang jalan kabupaten 1251,74 km, namun masih terdapat jalan dalam kondisi rusak 358,33 km atau 28,63 persen dan Jalan kabupaten yang masih berjenis permukaan jalan tanah 96,86 km atau 6,43 persen. kemudian Masih terdapat desa/UPT yang belum dapat dilalui kendaraan roda empat sepanjang tahun. Permasalahan lainnya ketersediaan infrastruktur jalan yang belum merata disebabkan oleh masih terdapat satu ruas jalan kolektor yang menghubungkan Kecamatan Maba Utara Dengan Kecamatan Wasile Utara belum dibangun. Selain itu, Ruas-ruas jalan di wilayah utara juga masih banyak yang belum terhubung dengan jembatan serta masih kurangnya infrastruktur jalan tani khususnya di wilayah- wilayah tengah dan utara. Selanjutnya rendahnya rasio jalan berbanding penduduk, masih banyak jalan yang belum memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air dan masih banyaknya kawasan yang terjadi genangan >2 kali setahun.
 - Permasalahan selanjutnya masih terdapat rumah tangga yang tidak memiliki akses air minum layak dan aman serta masih terdapat rumah tangga yang tidak memiliki akses pada air bersih.
 - Infrastruktur sumber daya air belum memadai, hal ini disebabkan karena kondisi saluran irigasi dan tampungan air yang kurang memadai, tingginya kerusakan jaringan Irigasi Kawasan Kabupaten, kurangnya Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur Irigasi, tingginya daya rusak pantai, sungai dan DAS, minimnya penanganan operasional dan pemeliharaan Daerah Irigasi, kurangnya kesadaran terhadap perawatan saluran irigasi.

- Masih rendahnya rumah tinggal bersanitasi
- 2) Bidang Penataan Ruang, Belum tersedia dokumen rinci penataan ruang baik di tingkat Kabupaten, minimnya ketersediaan data dan informasi penataan ruang (RTRW, RDTR dan peraturan yang lebih rinci); Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan Ruang serta kurangnya dokumen pendukung tentang Penataan Ruang,

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Halmahera Timur antara lain:

- 1) Masih terdapat rumah tidak layak huni,
- 2) Lingkungan permukiman kumuh dan kawasan permukiman kumuh di wilayah perkotaan,
- 3) Masih banyak rumah tangga yang belum terlayani jaringan air bersih perpipaan,
- 4) Masih terdapat kawasan permukiman yang belum tertata,
- 5) Masih banyak rumah tangga yang belum menggunakan fasilitas sanitasi yang layak dan aman,
- 6) Minimnya data dan informasi terkait cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU, serta
- 7) Luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan maupun proporsi rumah tangga kumuh perkotaan.

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur antara lain:

- 1) Masih minimnya rencana aksi terkait dengan pengurangan risiko bencana;
- 2) Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota masih belum optimal dengan tingkat waktu tanggap (*respon time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) masih belum sesuai standar;
- 3) Gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat masih ada, dan
- 4) Berkembangnya modus-modus kejahatan baru, masih tingginya potensi konflik sumberdaya alam, dan batas wilayah, serta ancaman tindakan kekerasan antar warga masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat, berserikat dan

berkeyakinan.

Bidang Sosial. Permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- 1) masih belum optimalnya sistem rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis, dan lanjut usia terlantar, serta penanganan korban bencana provinsi untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial sesuai standar pemenuhan mutu baik pada saat dan setelah tanggap darurat bencana;
- 2) masih kurangnya pemberdayaan terhadap komunitas adat terpencil; dan
- 3) cenderung semakin menurunnya efektivitas penanggulangan kemiskinan dimana kesenjangan antar penduduk miskin maupun antar wilayah semakin melebar.

B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Bidang Tenaga Kerja. Permasalahan urusan ketenagakerjaan yang dapat teridentifikasi berdasarkan data capaian kinerja antara lain :

- 1) Masih terbatasnya kesempatan kerja layak dan masih perlunya peningkatan keterampilan kerja melalui pelatihan dan sertifikasi keahlian tenaga kerja.
- 2) Masih kurangnya perhatian terhadap hubungan antara pengusaha dan pekerja terkait sengketa tenaga kerja.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Permasalahan terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah:

Masih adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak baik fisik maupun emosional

- 1) Masih kurangnya keterwakilan perempuan di legislatif
- 2) Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik perlu di tingkatkan.

Bidang Pangan. Permasalahan terkait dengan pangan di Kabupaten Halmahera Timur antara lain:

- 1) Belum optimalnya ketersediaan dan cadangan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat perseorangan/individu.
- 2) Masih perlunya Penyediaan Pangan yang Berbasis Sumber Daya Lokal
- 3) Belum optimalnya pemantauan distribusi, harga, dan akses pangan masyarakat di wilayah Halmahera Timur

Bidang Pertanahan

Permasalahan terkait dengan urusan pemerintahan bidang pertanahan di Kabupaten Halmahera Timur antara lain:

- 1) Konflik di bidang pertanahan masih sering terjadi di masyarakat
- 2) Masih banyak lahan yang belum tersertifikasi

Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan terkait dengan lingkungan hidup di Kabupaten Halmahera Timur antara lain:

- 1) Belum Optimalnya pemantauan kualitas lingkungan
- 2) Indeks kualitas air dan udara berada pada predikat baik, akan tetapi perlu dipertahankan guna menjaga stabilitas lingkungan dari pencemaran dan kerusakan.
- 3) Indeks kualitas tutupan lahan baru mencapai 64,18
- 4) Perlunya peningkatan ketaatan terhadap izin lingkungan (PPLH dan PUU LH)
- 5) Belum optimalnya Sistem dan Pengelolaan Persampahan

Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Permasalahan terkait dengan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

- 1) Belum tuntasnya pengadministrasian kependudukan dan pencatatan sipil, khususnya pencatatan arus migrasi penduduk dan kematian
- 2) Belum optimalnya penyediaan profil kependudukan berbasis keluarga yang komprehensif lintas sektor, akurat dan mampu telusur sebagai rujukan utama perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. Permasalahan terkait dengan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa di Kabupaten Halmahera Timur antara lain:

- 1) Masih rendahnya peran lembaga kemasyarakatan/LSM dalam mengelola program pembangunan desa
- 2) Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) perlu di tingkatkan

Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. Permasalahan terkait dengan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana di Kabupaten Halmahera Timur antara lain:

- 1) Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*) dan Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB Mandiri juga mengalami penurunan setiap tahunnya
- 2) Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi mengalami penurunan setiap tahunnya
- 3) Belum optimalnya anggota Bina Kelompok Balita (BKB) ber-KB
- 4) Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB perlu ditingkatkan

Bidang Perhubungan. Permasalahan terkait dengan Perhubungan antara lain:

- 1) Ketersediaan jaringan jalan belum didukung dengan penyediaan layanan angkutan umum yang memadai;
- 2) Masih terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya meskipun pada wilayah dengan *traffic* rendah;
- 3) Keterbatasan sarana prasarana transportasi wilayah;
- 4) Rendahnya kesadaran pemilik kendaraan ADPB dalam membayar retribusi;
- 5) Rendahnya tingkat kelayakan armada;
- 6) Terbatasnya rambu dan fasilitas keselamatan di jalan serta banyaknya angkutan ilegal;
- 7) Belum terintegrasinya sistem transportasi wilayah; angkutan umum yang melayani kepulauan dalam provinsi masih terbatas;
- 8) Belum adanya terminal yang memadai di Kota Maba dan Buli sebagai tempat pertukaran moda transportasi;
- 9) Masih kurangnya rute lintas penyeberangan serta sarana prasarana pendukungnya;

Bidang Komunikasi dan Informatika. Permasalahan terkait dengan Komunikasi dan Informatika adalah :

- 1) Minimnya penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan layanan internet.
- 2) Perlu dioptimalkan aksesibilitas telekomunikasi dan informasi.
- 3) Belum optimalnya Pemanfaatan TIK layanan masyarakat dan dunia usaha.
- 4) Belum adanya Pelatihan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat.

Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Permasalahan terkait dengan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Halmahera Timur antara lain:

- 1) Masih minim jumlah Koperasi aktif dibandingkan dengan jumlah seluruh koperasi.
- 2) Belum adanya Pengembangan industri pangan lokal berbasis UMKM.
- 3) Belum optimalnya Fasilitas Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil
- 4) Belum optimalnya upaya dalam penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil menengah (UMKM), dan koperasi.
- 5) Belum optimalnya Perluasan dan Peningkatan Akses Pemasaran
- 6) Masih minimnya pemberdayaan kewirausahaan melalui pelatihan kewirausahaan

Bidang Penanaman Modal. Permasalahan terkait dengan Penanaman di Kabupaten Halmahera Timur antara lain:

- 1) Minimnya nilai investasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, sampai pada Tahun 2026 nilainya menurun mencapai 80 miliar rupiah.
- 2) Belum maksimalnya upaya dalam peningkatan realisasi nilai investasi penanaman modal dalam negeri dan modal asing.
- 3) Belum optimalnya upaya peningkatan dalam pengembangan iklim penanaman modal (Penetapan pemberian fasilitas / insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah)
- 4) Belum optimalnya upaya pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang lebih intensif, walaupun Jumlah investor mengalami pertumbuhan mencapai 224 investor di Tahun 2026.
- 5) Masih minimnya sarana penunjang, fasilitas perizinan dan penguatan usaha dan investasi.

Bidang Kepemudaan dan Olahraga. Permasalahan terkait dengan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Halmahera Timur antara lain:

- 1) Rendahnya capaian prestasi olahraga Kabupaten Halmahera Timur
- 2) Belum optimalnya pembinaan cabang olahraga
- 3) Belum memadainya sarana dan prasarana di bidang kepemudaan dan olahraga.

Bidang Statistik dan Persandian. Permasalahan terkait dengan urusan pemerintahan bidang Persandian dan statistik di Kabupaten Halmahera Timur antara lain:

- 1) Belum optimalnya penyediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi.
- 2) Kurangnya jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah.

Bidang Kebudayaan. Permasalahan terkait dengan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan di Kabupaten Halmahera Timur antara lain:

- 1) Belum optimalnya pengelolaan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya sebagai aset kebudayaan yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dalam pembangunan kebudayaan.
- 2) Masih kurang dipromosikannya aset kebudayaan sebagai salah satu obyek pariwisata yang diandalkan.

Bidang Perpustakaan dan Kearsipan. Permasalahan terkait dengan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan kearsipan antara lain:

- 1) Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan dan kearsipan.
- 2) Minat baca masyarakat masih rendah, dikarenakan masyarakat sekarang cenderung lebih berminat membaca lewat HP/Internet daripada membaca langsung di Perpustakaan Daerah.

C. Urusan Pilihan

Bidang Kelautan dan Perikanan. Permasalahan terkait dengan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Halmahera Timur antara lain:

- 1) Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap perekonomian daerah dalam lima tahun terakhir relatif masih kecil;
- 2) Produksi Perikanan tangkap dan budidaya masih belum mencapai titik optimalnya;
- 3) Nilai Tukar Nelayan yang merepresentasikan kesejahteraan pelaku usaha perikanan masih berfluktuasi;
- 4) Penyerapan Tenaga Kerja di sektor Kelautan-Perikanan masih terbatas;
- 5) Penyediaan Pasar Ikan yang belum merata dan belum optimalnya pemanfaatan PPI;
- 6) Belum optimalnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir (terumbu karang, padang lamun dan lain-lain);
- 7) Akses permodalan bagi usaha bidang kelautan dan perikanan terbatas;
- 8) Kondisi sarana dan prasarana kelautan dan perikanan kurang optimal;
- 9) Masih adanya *illegal fishing* dan *unreported*;

- 10) Kurangnya kelembagaan pengelola kawasan konservasi perairan didaerah;
- 11) Rendahnya kesadaran masyarakat/publik tentang arti penting dan nilai strategis sumber daya perikanan dan kelautan;
- 12) Belum optimalnya ekspor hasil perikanan dan produk olahan perikanan,
- 13) Belum optimalnya upaya-upaya adaptasi tujuan pembangunan berkelanjutan terkait ekosistem kelautan.

Bidang Pariwisata. Permasalahan terkait dengan urusan pemerintahan bidangPariwisata di Kabupaten Halmahera Timur antara lain:

- 1) Masih sangat rendahnya kontribusi sektor ini pada perekonomian daerah sementara potensi yang dimiliki sangat besar dan Daya saing pariwisata di kawasan juga sangat lemah.
- 2) Menurunnya kunjungan wisatawan setiap tahunnya, baik itu kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara
- 3) Masih banyak potensi ODTW yang belum dikelola menuju skala Regional, Nasional/Internasional
- 4) Belum memadai ketersediaan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi, serta daya dukung destinasi pariwisata.
- 5) Belum optimalnya promosi pariwisata yang memanfaatkan teknologi informasi.
- 6) Belum adanya biro perjalanan dalam menunjang pertumbuhan pariwisata;
- 7) Keberadaan kelompok komunitas kreatif masih sangat minim dan belum mendapat dukungan fasilitas yang memadai oleh pemerintah.

Bidang Pertanian. Permasalahan terkait dengan urusan pemerintahan bidangPertanian di Kabupaten Halmahera Timur antara lain:

- 1) Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB tidak stabil;
- 2) Minimnya tenaga kerja di sektor pertanian;
- 3) Infrastruktur Irigasi belum memadai;
- 4) Selama 5 (lima) tahun terakhir Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami fluktuasi;
- 5) Akses dan ketersediaan input produksi masih terbatas;
- 6) Infrastruktur jalan ke sentra produksi belum memadai;
- 7) Tataniaga produk pertanian belum terkendali dengan baik;
- 8) Tingginya alih fungsi lahan pertanian;
- 9) Rendahnya tingkat pendidikan petani;
- 10) Minat generasi muda terhadap usaha pertanian yang semakin minim.

- 11) Belum merata dan memadainya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian.
- 12) Belum optimalnya pemantapan sistem penyuluhan pertanian.
- 13) Kurangnya upaya dalam penghidupan berkelanjutan berbasis usaha mikro di sektor pertanian dan perkebunan.
- 14) Belum optimalnya fasilitasi pupuk dan pestisida.
- 15) Belum optimalnya penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produktivitas ternak.
- 16) Belum maksimalnya upaya dalam pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil ternak.

Bidang Perdagangan. Permasalahan terkait dengan urusan pemerintahan bidang perdagangan di Kabupaten Halmahera Timur antara lain:

- 1) Adanya ketimpangan nilai ekspor terhadap nilai impor, dimana nilai impor lebih tinggi dibandingkan dengan nilai ekspor.
- 2) Belum maksimalnya pengendalian inflasi daerah, stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat.
- 3) Belum optimalnya akses pasar.
- 4) Masih lemahnya pengawasan ekspor-impor antar daerah
- 5) Belum adanya pusat distribusi lokal;
- 6) Belum terbangunnya sistem informasi pasar dan market intelijen yang efektif;
- 7) Belum optimalnya pembentukan dan pembinaan kelompok-kelompok pedagang dan pengusaha informal.
- 8) Kurangnya pembinaan usaha dan pelaku distribusi perdagangan.
- 9) Belum optimalnya sarana distribusi perdagangan dan kapasitas logistik perdagangan.
- 10) Infrastruktur pendukung aktivitas perdagangan belum memadai.

Bidang Perindustrian. Permasalahan terkait dengan urusan pemerintahan bidang perindustrian di Kabupaten Halmahera Timur antara lain:

- 1) Belum optimalnya binaan kelompok pengrajin.
- 2) Kurangnya upaya dalam pemanfaatan teknologi digital dan industri.
- 3) Belum optimalnya industri pengelolaan pada sektor produksi.
- 4) Belum optimalnya pengelolaan ekspor produk industri dan pertambangan.
- 5) Minimnya penyerapan tenaga kerja lokal di sektor industri;

- 6) Keterbatasan tenaga fungsional di bidang industri dalam mengoptimalkan fungsi pelayanan penyuluhan kepada masyarakat maupun kepada pelaku industri;
- 7) Daya saing mutu desain dan produk industri yang belum maksimal;
- 8) Rendahnya kemampuan SDM pelaku industri;
- 9) Belum memadainya sarana penunjang industri.

Bidang Transmigrasi. Permasalahan terkait dengan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi di Kabupaten Halmahera Timur antara lain:

- 1) Belum maksimalnya capaian status perkembangan Kawasan Transmigrasi dengan nilai IPK trans sebesar 42,30 “Berkembang”.
- 2) Minimnya sarana prasarana dasar di permukiman transmigrasi;
- 3) Sertifikasi lahan yang belum terselesaikan;
- 4) Aksesibilitas ke kawasan permukiman yang belum memadai;
- 5) Lemahnya koordinasi lintas sektor terkait pembinaan sektor ketransmigrasian;
- 6) Masih terdapat luasan areal pencadangan yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan permukiman transmigrasi;
- 7) Adanya lahan transmigrasi yang telah diokupasi oleh penduduk daerah sekitar kawasan transmigrasi.

D. Unsur Pendukung, Penunjang, dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah. Permasalahan yang belum terselesaikan adalah :

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan pengoordinasian antar perangkat daerah
- 2) Belum optimalnya pelaksanaan fungsi administrasi pemerintah daerah.
- 3) Belum optimalnya fungsi pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- 4) Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum cukup untuk menjawab tantangan kinerja pemerintahan kedepan. Permasalahan yang terkait yaitu: masih rendahnya Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan belum adanya instrumen terotomatisasi untuk menilai kinerja kepuasan masyarakat atas pelayanan publik pemerintah daerah.

Sekretariat DPRD. Permasalahan yang belum terselesaikan adalah belum optimalnya pelaksanaan fasilitasi terhadap DPRD. Hal ini ditunjukkan oleh persentase tingkat kepuasan pimpinan dan anggota DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD

sebesar 85 persen.

Perencanaan. Permasalahan unsur penunjang urusan pemerintahan terkait perencanaan di Kabupaten Halmahera Timur antara lain:

- 1) Minimnya Sumber Daya Aparatur Perencana yang handal, serta belum terisinya formasi jabatan fungsional perencana;
- 2) Belum optimalnya sinkronisasi antara rencana kerja pembangunan dengan dokumen rencana tata ruang;
- 3) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antara RPJMD, RKPD, dan dokumen perencanaan lainnya dengan APBD;
- 4) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
- 5) Belum terlaksananya pengendalian dan evaluasi dokumen penganggaran kabupaten/kota
- 6) Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.
- 7) Belum optimalnya perencanaan yang integratif antar pemangku kepentingan, adanya keterlambatan pengiriman data menyebabkan keterlambatan dalam proses perencanaan.

Keuangan. Permasalahan unsur penunjang urusan pemerintahan terkait keuangan di Kabupaten Halmahera Timur antara lain:

- 1) Belum terpenuhinya target Persentase belanja pendidikan (20%)
- 2) Belum terpenuhinya target Persentase belanja kesehatan (10%)
- 3) Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera Timur terhadap APBD masih di bawah 10%
- 4) pencatatan aset belum optimal dan adanya aset-aset yang belum tersertifikasi
- 5) Belum optimalnya Pengelolaan dan penyusunan standar harga dan standar barang milik daerah milik daerah

Kepegawaian. Permasalahan unsur penunjang urusan pemerintahan terkait kepegawaian di Kabupaten Halmahera Timur antara lain:

- 1) Belum terpenuhinya kebutuhan ASN untuk melaksanakan kewenangan daerah, disebabkan oleh jumlah pensiun, tiap tahun lebih banyak dari jumlah ASN yang diterima, selain itu rasio jumlah pegawai belum masih memperlihatkan kesenjangan jika dibanding dengan hasil analisis kebutuhan formasi.
- 2) Belum adanya peta jabatan dan rencana aksi pengembangan kompetensi aparatur

yang kokoh sebagai rujukan pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme aparatur;

Pendidikan dan Pelatihan. Permasalahan unsur penunjang urusan pemerintahan terkait Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Halmahera Timurantara lain:

- 1) Belum terpenuhinya kualifikasi dan kompetensi ASN berdasarkan kebutuhan pelaksanaan kewenangan daerah, serta belum terpetakan dengan baik penempatan ASN sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi.
- 2) Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pendidikan dan pelatihan aparatur yang representatif.

Penelitian dan Pengembangan. Permasalahan unsur penunjang urusan pemerintahan terkait Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Halmahera Timurantara lain:

- 1) Belum optimalnya penyelenggaraan penelitian dan pengembangan daerah yang terintegrasi lintas sektoral.
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan, baik untuk mendukung peningkatan kualitas kebijakan maupun hilirisasi hasil litbang untuk menunjang pengembangan sektor-sektor unggulan.
- 3) Masih Kurangnya inovasi daerah di perangkat Daerah maupun masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur.

Pengawasan. Masalah-masalah pokok dalam penyelenggaraan unsur pengawasan urusan Pemerintahan di Kabupaten Halmahera Timur yaitu:

- 1) Belum optimalnya penerapan sistem integritas serta pengawasan internal yang independen, profesional, dan sinergis, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang responsif, transparan dan akuntabel.
- 2) Masih kurangnya tenaga auditor untuk melayani pengawasan dan pembinaan di seluruh perangkat daerah.

BAB 3

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

2026

RKPD

BAB 3

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan ekonomi daerah mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP Tahun 2026, arahan RKP Provinsi Maluku Utara Tahun 2025, serta kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025-2029. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Disamping itu juga memuat juga permasalahan daerah di bidang ekonomi, sebagai rujukan dalam merumuskan perubahan skala prioritas program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2025.

3.1.1. Perkembangan Perekonomian Terkini

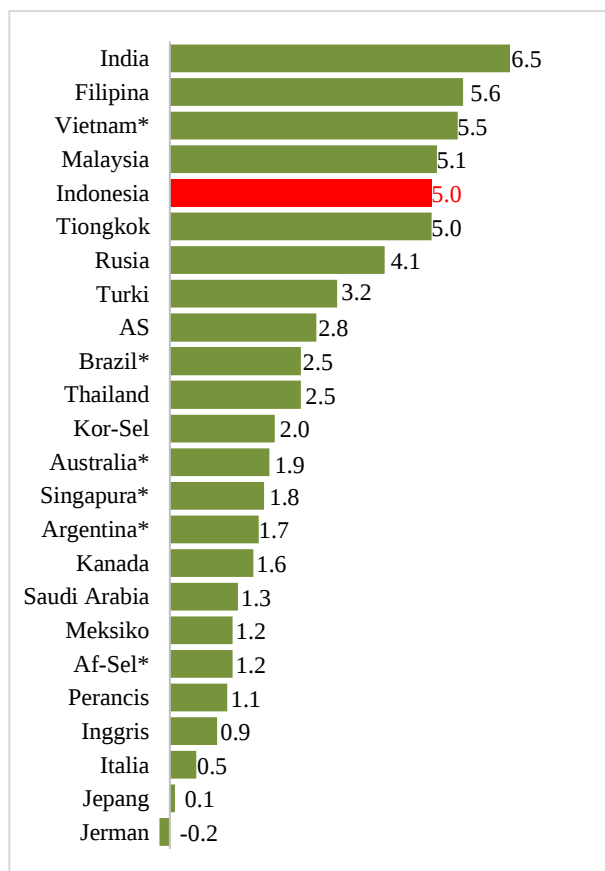
Perkembangan Perekonomian Indonesia menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Tantangan-tantangan ini meliputi volatilitas harga komoditas, ketidakpastian ekonomi global, perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, dan masalah struktural lainnya. Namun, Indonesia juga memiliki potensi yang besar untuk tumbuh dan berkembang, didukung oleh populasi yang besar, sumber daya alam yang melimpah, dan stabilitas politik yang terjaga. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan memanfaatkan potensi yang ada untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia, menarik investasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

Prospek perekonomian Indonesia dalam jangka panjang tetap positif, meskipun terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi. Dengan kebijakan yang tepat dan kerja keras dari seluruh pihak, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Penting untuk terus memantau perkembangan ekonomi Indonesia dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghadapi tantangan

dan memanfaatkan peluang yang ada. Dengan pemahaman yang komprehensif tentang kondisi perekonomian Indonesia, kita dapat berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Perekonomian Global. Memasuki awal 2025, ketidakpastian ekonomi global masih tinggi akibat ketegangan geopolitik dan perubahan kebijakan perdagangan AS yang berpotensi mengganggu perdagangan, investasi, dan normalisasi kebijakan moneter global. Konflik memperburuk fragmentasi geo-ekonomi dan meningkatkan kerentanan rantai pasok. Pada Maret 2025, AS memberlakukan tarif baru atas impor dari Kanada dan Meksiko serta menaikkan tarif barang dari Tiongkok yang dibalas dengan tindakan serupa dari Tiongkok dan Kanada. Hal tersebut semakin memperumit situasi hubungan perdagangan internasional. Di sisi lain, pelanggaran kebijakan moneter global berlanjut meski trajectory kebijakan moneter antara AS dengan negara-negara lain semakin divergen.

Pertumbuhan Ekonomi 2024 Negara Asean dan G20 (%yoy)

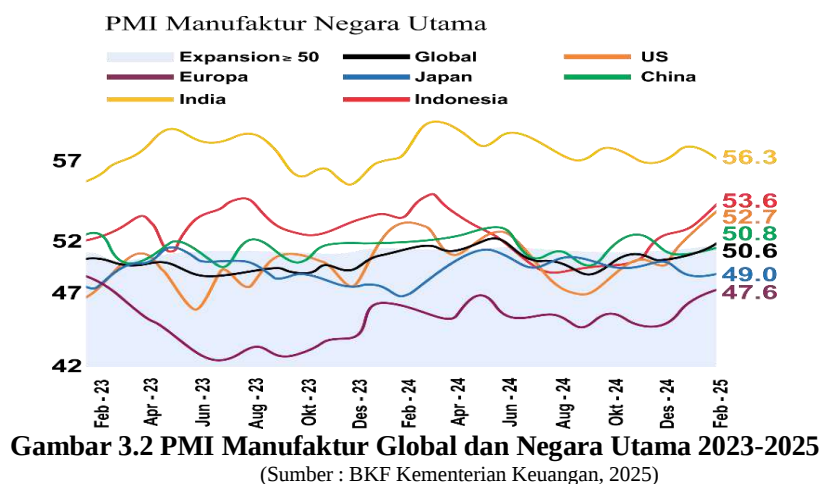


Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Global Tahun 2024

(Sumber : BKF Kementerian Keuangan, 2025)

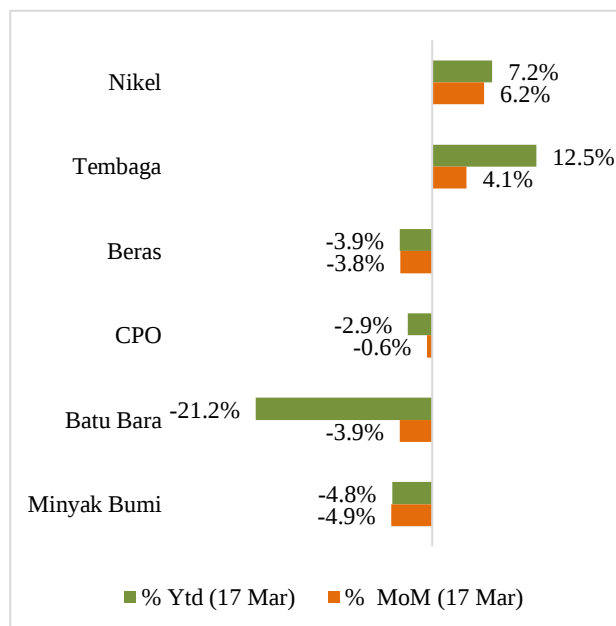
Ditinjau dari level pertumbuhan, perekonomian global menunjukkan pola pertumbuhan ekonomi yang cukup beragam pada tahun 2024. Negara-negara berkembang Asia, terutama Vietnam, mencatat pertumbuhan solid, diikuti oleh Malaysia, Filipina dan India. AS mempertahankan pertumbuhan yang kuat, sementara Eropa tetap lesu dengan Jerman mengalami kontraksi. Ekonomi Tiongkok membaik di triwulan IV 2024 berkat dukungan stimulus pemerintah, namun beberapa tantangan masih membayangi prospek pertumbuhan Tiongkok ke depan. Pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN dan G20 untuk tahun 2024 disajikan pada Gambar diatas.

Kinerja manufaktur global pada awal 2025 menguat meskipun terbatas, dengan beberapa negara mencatatkan kinerja yang impresif. PMI manufaktur global naik ke 50,6 pada Februari, meningkat dari 50,1 pada Januari. Dari keseluruhan negara ASEAN-6 dan G-20, sebanyak 43,5% masih berada dalam zona kontraksi, sementara 56,5% berada dalam zona ekspansi. Amerika Serikat mencatatkan ekspansi ditengah kebijakan tarif agresif. Di Kawasan Asia, sektor manufaktur Tiongkok berhasil keluar dari zona kontraksi di awal 2025, didorong oleh output, pesanan baru, dan pembelian yang meningkat. India masih berada di zona ekspansi, meskipun sedikit lebih rendah dari bulan Januari. Di Kawasan ASEAN, kondisi manufaktur melanjutkan ekspansi selama tujuh bulan berturut-turut, didorong percepatan kenaikan output yang dibarengi dengan peningkatan permintaan baru. Kinerja manufaktur Indonesia juga menunjukkan tren positif, dimana PMI Manufaktur Indonesia meningkat ke level 53,6 di bulan Februari yang didorong oleh lonjakan pesanan baru serta peningkatan produksi dan aktivitas pembelian yang lebih baik. Perkembangan PMI Manufaktur global dan beberapa negara utama dapat dilihat pada Gambar dibawah.



Sementara itu, pergerakan harga komoditas global masih bervariasi, dipengaruhi oleh faktor permintaan dan pasokan, ekspektasi pasar, serta kebijakan perdagangan internasional termasuk kebijakan Trump. Harga minyak Brent relatif stabil di level rendah. Beberapa faktor yang memengaruhi situasi ini termasuk ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan Ukraina-Rusia, peningkatan pasokan dari OPEC+ dan stok AS yang diperkirakan melimpah. Sementara itu, harga batu bara Newcastle turun ke titik terendah dalam 4 tahun, dipicu oleh lonjakan stok yang masih tinggi, sementara permintaan global terbatas. Pada komoditas tambang, harga tembaga dalam tren meningkat akibat menipisnya pasokan di Tiongkok. Banyak negara mempercepat pengiriman dari Asia ke AS untuk menghindari kebijakan tarif, yang saat ini sedang dalam tahap investigasi oleh AS. Harga nikel juga meningkat di atas USD16.000 per ton, seiring dengan rencana Indonesia mengurangi kuota penambangan nikel yang dikhawatirkan dapat mengurangi pasokan global. Pada komoditas pangan, harga CPO masih dalam tren meningkat, didorong oleh menurunnya permintaan dari Afrika, yang mengoffset penahanan permintaan dari Tiongkok dan India. Sementara itu, harga global cenderung stabil seiring permintaan global meningkat. Pasokan beras relatif kuat seiring dengan keputusan India untuk mencabut larangan ekspor beras. Ilustrasi pergerakan harga komoditas global hingga 17 Maret 2025 disajikan pada Gambar dibawah.

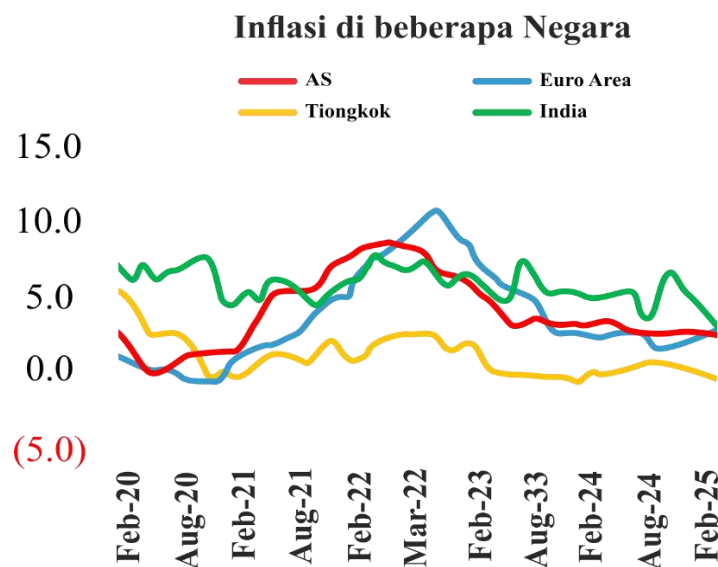
Pergerakan Harga Komoditas Global



Gambar 3.3 Perkembangan Harga Minyak Mentah dan Gas Alam/Batubara 2025

(Sumber : BKF Kementerian Keuangan, 2025)

Meskipun demikian, memasuki triwulan pertama tahun 2025, kondisi inflasi global melanjutkan tren penurunan, dengan beberapa negara mengalami deflasi. Inflasi di AS terus melandai, terutama karena perlambatan harga energi. Pada Februari, inflasi tercatat sebesar 2,8%, turun dari 3,0% pada Januari. Di Zona Eropa, inflasi bahkan mendekati target 2% dari European Central Bank (ECB), dengan tingkat inflasi sebesar 2,3%. Penurunan ini disebabkan oleh lemahnya permintaan karena ketidakpastian terhadap prospek ekonomi ke depan. Tiongkok mencatatkan deflasi sebesar 0,7% pada Februari. Kondisi ini mencerminkan lemahnya permintaan domestik dan rendahnya harga, terutama pada sektor pangan. Di India, inflasi Februari turun menjadi 3,6%, di bawah target 4% dari Reserve Bank of India (RBI), setelah sebelumnya mencapai 4,3% pada Januari. Ini merupakan kenaikan harga konsumen yang paling lambat sejak Juli 2024. Untuk mendorong aktivitas ekonomi, RBI berencana meningkatkan likuiditas dan memulai pemangkasan suku bunga. Gambar dibawah menyajikan perkembangan inflasi di berbagai negara.



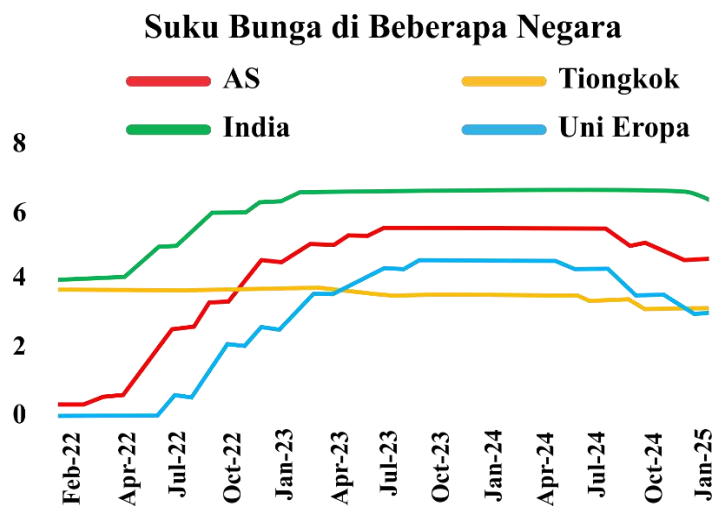
Gambar 3.4 Inflasi Beberapa Negara 2020-2025

(Sumber : BKF Kementerian Keuangan, 2025)

Kondisi inflasi yang moderat memberikan ruang bagi pelonggaran moneter di berbagai negara, diharapkan menjadi katalis untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi. Di tengah perkembangan tersebut, kebijakan moneter AS dan negara-negara lain cenderung divergen. Pada FOMC Maret, The Fed masih mempertahankan suku bunga pada tingkat 4,25%-4,5%, walaupun ekonomi tahun 2025 diproyeksikan melambat ke tingkat 1,7% (turun 0,4 pp dari proyeksi sebelumnya). The Fed mengisyaratkan kemungkinan pemangkasan sebesar 50 bps

tahun ini, dengan mempertimbangkan penurunan inflasi menuju target 2% dan potensi pelemahan di pasar tenaga kerja. Di Zona Eropa, ECB memangkas suku bunga sebesar 25 bps pada 6 Maret ke tingkat 2,65%, setelah sebelumnya menurunkannya ke 2,9% pada Januari dari 3,15% di akhir 2024. Pelonggaran kebijakan moneter ini bertujuan untuk menekan biaya pinjaman bagi rumah tangga dan bisnis.

Di Asia, Tiongkok mempertahankan suku bunga acuan di tingkat 3,1% selama lima bulan berturut-turut. Namun demikian, untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang lemah di 2025, People's Bank of China (PBoC) mengisyaratkan kemungkinan pemangkasan suku bunga dan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) dalam waktu dekat. Selain itu, Pemerintah Tiongkok juga telah mengumumkan komitmen untuk meluncurkan stimulus tambahan untuk mendorong konsumsi domestik. Gambar 4 menyajikan pergerakan suku bunga di berbagai negara utama.



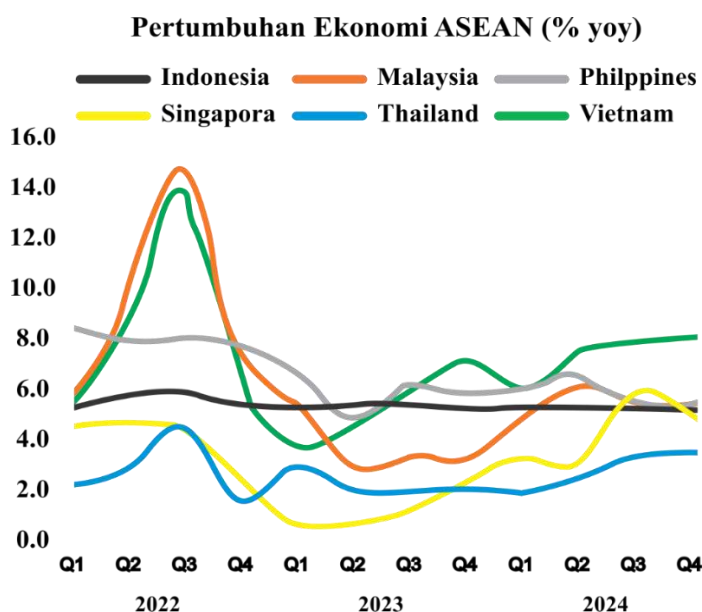
Gambar 3.5 Suku Bunga Negara Utama

(Sumber : BKF Kementerian Keuangan, 2025)

Perekonomian ASEAN pada triwulan IV 2024 menunjukkan dinamika yang beragam di kawasan ini. Indonesia mencatat pertumbuhan 5,0%, sedikit meningkat dari 4,95% di triwulan sebelumnya, didorong oleh konsumsi rumah tangga yang stabil. Thailand tumbuh 3,2% (sebelumnya 3,0%) berkat kenaikan konsumsi rumah tangga, didukung oleh stimulus Pemerintah dan pencairan anggaran yang mendorong investasi. Vietnam mencatat pertumbuhan kuat sebesar 7,6% (sebelumnya 7,5%), didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 7,54% dan investasi yang naik 7,98%. Ekspor Vietnam juga melonjak 11,35% berkat tingginya permintaan luar negeri menjelang akhir tahun. Filipina tumbuh 5,2%, sama dengan triwulan

sebelumnya, tetapi masih menjadi laju ekspansi paling lambat sejak triwulan II 2023 akibat perlambatan konsumsi rumah tangga dan investasi. Meski begitu, belanja pemerintah meningkat signifikan ke 9,7% (sebelumnya 5%).

Di sisi lain, Malaysia dan Singapura mengalami perlambatan. Ekonomi Malaysia tumbuh 5,0% (sebelumnya 5,4%) akibat melemahnya *output* manufaktur dan kontraksi di sektor agrikultur, sementara belanja pemerintah dan investasi juga melambat. Sementara itu, Singapura mencatat pertumbuhan 1,5% (sebelumnya 2,2%) mencerminkan perlambatan sepanjang tahun 2024.

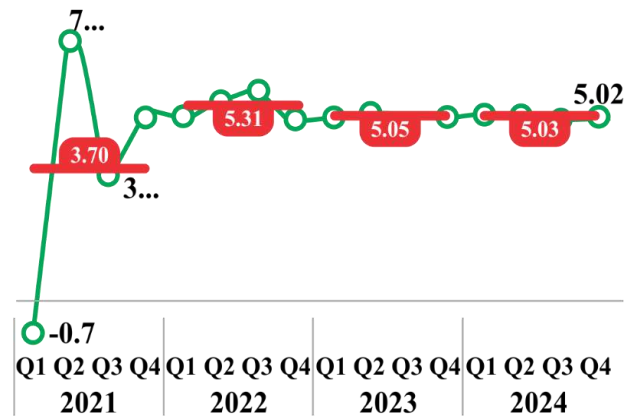


Gambar 3.6 Pertumbuhan Ekonomi Negara Asean

(Sumber : BKF Kementerian Keuangan, 2025)

Perekonomian Nasional terus menunjukkan resiliensi dengan momentum pertumbuhan yang kuat. Pada tahun 2024, ekonomi nasional tumbuh 5,02%; didorong oleh kuatnya permintaan domestik, peningkatan investasi, serta aktivitas manufaktur yang semakin ekspansif. Capaian ini melanjutkan tren pertumbuhan di atas 5% selama tiga tahun berturut-turut, mencerminkan ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan global.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

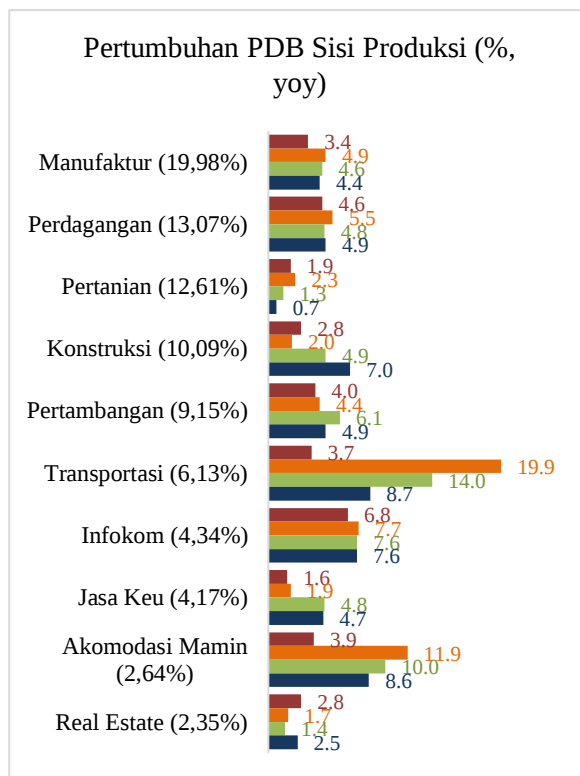


Gambar 3.7 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2021-2024

(Sumber : BKF Kementerian Keuangan, 2025)

Sebagai kontributor utama pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga tetap menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan 4,94% pada 2024, meningkat dibandingkan 4,82% pada tahun sebelumnya. Dengan kontribusi 54% terhadap PDB, pertumbuhan konsumsi didukung oleh inflasi yang terkendali serta meningkatnya mobilitas masyarakat. Peran APBN dalam menjaga daya beli dan penciptaan 4,79 juta lapangan kerja baru turut menjadi faktor pendorong utama. Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) juga mencatat pertumbuhan tinggi, mencapai 6,06% pada kuartal IV 2024 dan 12,48% secara kumulatif sepanjang tahun, didukung oleh meningkatnya aktivitas Pemilu dan Pilkada serentak serta berbagai ajang olahraga nasional yang mendorong aktivitas ekonomi.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (P-KP) mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 6,6%, tertinggi dalam satu dekade terakhir, dengan kontribusi 7,4% terhadap PDB. Dari total P-KP, 48,6% bersumber dari APBN dan 51,4% dari APBD. Pertumbuhan ini didorong oleh alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Struktur belanja pegawai, belanja barang, dan bantuan sosial menjadi penopang utama, dengan realisasi belanja pegawai meningkat 12,6% didorong oleh kenaikan gaji ASN/TNI/POLRI sesuai Peraturan Pemerintah No. 5/2024. Belanja barang dan jasa tumbuh 17,9%, sementara belanja bantuan sosial meningkat 11,8%, utamanya untuk program jaminan sosial.



Gambar 3.8 Pertumbuhan PDB Sisi Produksi Tahun 2021-2024

(Sumber : BKF Kementerian Keuangan, 2025)

Dari sisi produksi, lima sektor dengan kontribusi terbesar terhadap ekonomi, yaitu Industri Pengolahan, Pertanian, Perdagangan, Konstruksi, dan Pertambangan menunjukkan kinerja yang positif. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tinggi meliputi sektor transportasi dan perdagangan sejalan dengan peningkatan jumlah penumpang seluruh moda angkutan dan peningkatan pengiriman barang. Selanjutnya, sektor Akomodasi Makanan Minuman didorong oleh peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, kegiatan MICE maupun event berskala nasional dan internasional, seperti moto GP Mandalika, PON XXI, dan International Sustainability Forum.

Di tengah ketidakpastian global dan dinamika politik domestik, investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) tumbuh 4,61% pada 2024, melanjutkan tren positif selama empat tahun berturut-turut. Hal ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia yang stabil, didukung kebijakan fiskal dan moneter yang efektif. Investasi masih didominasi oleh sektor bangunan dengan kontribusi 74,48%, namun ke depan, diharapkan sektor mesin dan kendaraan meningkat seiring dengan kebijakan hilirisasi dan penguatan sektor prioritas lainnya. Investasi asing dan domestik juga menunjukkan peningkatan, dengan realisasi

Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tumbuh 20,82%, mencapai Rp1.714 triliun, melampaui target investasi langsung yang ditetapkan.

Dalam kondisi perdagangan global yang menantang, ekspor barang dan jasa Indonesia tetap mencatat pertumbuhan positif. Sepanjang 2024, ekspor RI tumbuh 6,35%, jauh lebih tinggi dibandingkan 1,3% pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh ekspor barang yang meningkat 8,41%, dengan ekspor non-migas tumbuh 6,31%. Di sisi jasa, pertumbuhan mencapai 14,2%, sejalan dengan lonjakan 19,05% jumlah wisatawan mancanegara. Peningkatan ekspor ini mencerminkan daya saing Indonesia di pasar global dan memperkuat peran sektor ekspor dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian perdagangan internasional.

Sementara itu, impor barang dan jasa rill menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2024, impor tumbuh 7,95%, jauh meningkat dari kontraksi 1,64% pada 2023. Peningkatan ini terutama berasal dari impor barang yang tumbuh 8,15%, dengan impor non-migas naik 9,01%, setelah sebelumnya mengalami kontraksi 4,5% pada 2023. Pertumbuhan impor non-migas mencerminkan meningkatnya aktivitas industri domestik. Di sisi lain, impor jasa tumbuh 6,67%, lebih rendah dibandingkan 11,99% pada tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024, perekonomian Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif di seluruh sektor produksi. Sektor manufaktur, perdagangan, pertanian, dan pertambangan menjadi pilar utama dalam struktur ekonomi nasional. Capaian ini tidak hanya mencerminkan pemulihan ekonomi pasca pandemi, tetapi juga memperkuat fondasi perekonomian dalam menghadapi tantangan global. Reformasi struktural, peningkatan investasi, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha terus dioptimalkan guna mendorong produktivitas dan daya saing nasional.

Sektor manufaktur tumbuh sebesar 4,43% pada 2024, didorong oleh industri berbasis hilirisasi. Industri logam dasar mencatat pertumbuhan hingga 13,94%, terutama berkat peningkatan ekspor produk turunan nikel. Sementara itu, industri makanan dan minuman tumbuh 5,90%, didorong oleh permintaan yang meningkat terhadap produk turunan kelapa sawit.

Sektor pertanian mengalami perlambatan dengan pertumbuhan hanya 0,67%, lebih rendah dibandingkan 1,31% pada 2023. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kontraksi subsektor tanaman pangan (2,21%), serta moderasi pertumbuhan

subsektor perkebunan (2,78%) dan perikanan (0,84%). Faktor cuaca dan musim turut memengaruhi produksi pertanian. Kendati demikian, sektor ini masih memberikan kontribusi lebih dari 11% terhadap PDB nasional.

Sektor pertambangan tetap tumbuh positif meskipun melambat, dengan pertumbuhan 4,90% dibandingkan 6,12% pada 2023. Subsektor pertambangan bijih logam menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan 8,30%, seiring meningkatnya produksi tembaga dan nikel. Subsektor batu bara dan pertambangan lainnya juga tumbuh masing-masing sebesar 6,82% dan 6,27%, didukung oleh permintaan ekspor komoditas tambang yang tinggi. Sementara itu, subsektor pertambangan migas dan panas bumi mengalami kontraksi 0,78% disebabkan gangguan operasional akibat cuaca ekstrem, penundaan eksplorasi, serta keterlambatan proyek strategis.

Sektor konstruksi terus menunjukkan peningkatan dengan tumbuh 7,02% pada 2024, melanjutkan tren positif sejak 2021. Pertumbuhan ini didukung oleh percepatan pembangunan infrastruktur yang didanai Pemerintah maupun investasi swasta, mencakup jalan tol, bendungan, kawasan industri, dan Pariwisata. Kenaikan impor bahan baku konstruksi sebesar 5% serta impor besi baja sebesar 1,4% juga mencerminkan tingginya aktivitas pembangunan. Tren ini menunjukkan prospek investasi yang kuat serta kepercayaan pasar terhadap sektor konstruksi dalam jangka menengah.

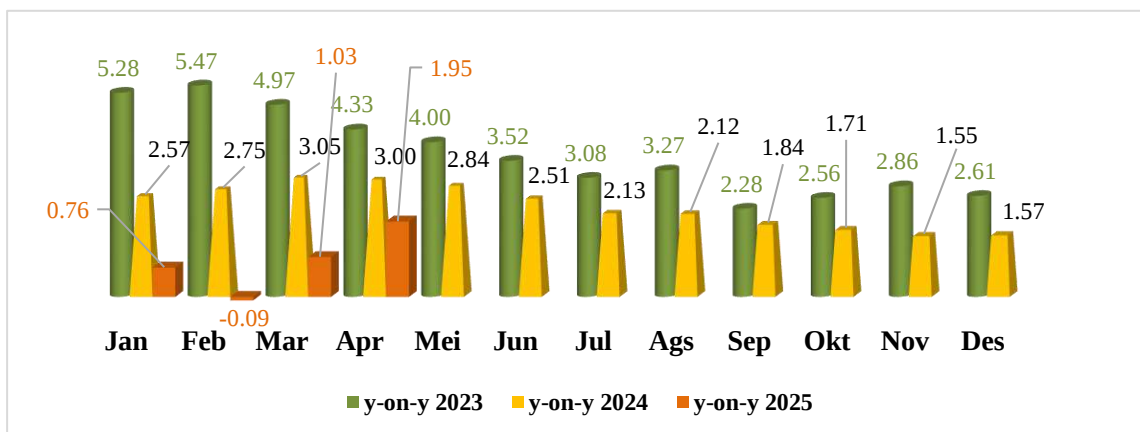
Sektor perdagangan mencatat pertumbuhan sebesar 4,9% pada 2024 dengan kontribusi 13,07% terhadap PDB, menjadikannya sektor terbesar kedua setelah manufaktur. Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran Bukan Mobil dan Sepeda Motor tumbuh 5,95%, didorong oleh peningkatan produksi domestik dan aktivitas impor. Sementara itu, subsektor perdagangan mobil dan sepeda motor terkontraksi 0,05%, akibat tekanan permintaan dan perubahan preferensi konsumen terhadap kendaraan baru maupun bekas.

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terus menunjukkan peran signifikan dalam perekonomian nasional, dengan kontribusi 2,6% pada 2024. Sektor ini tumbuh 8,7%, melampaui rata-rata pertumbuhan nasional. Kedua subsektor, yaitu Subsektor Penyediaan Akomodasi dan Subsektor Penyediaan Makan Minum tumbuh positif, masing-masing 8,7% dan 8,5%. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik. Maraknya penyelenggaraan kegiatan berskala nasional dan internasional di berbagai daerah juga berdampak pada peningkatan tingkat okupansi hotel, restoran, serta bisnis

kuliner. Selain itu, pemulihan ekonomi turut meningkatkan daya beli dan minat masyarakat untuk berwisata serta mengakses layanan perhotelan dan makanan-minuman, sehingga semakin memperkuat ekspansi sektor ini.

Kebijakan hilirisasi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Kawasan timur Indonesia mencatat pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, dengan Sulawesi dan Maluku-Papua masing-masing tumbuh 7,12% dan 7,81%, didorong oleh industri berbasis hilirisasi. Sementara itu, Jawa dan Sumatra tetap menjadi kontributor utama ekonomi nasional dengan pertumbuhan masing-masing 2,99% dan 4,45%, walaupun di bawah rata-rata nasional. Kalimantan tumbuh 5,96%, dengan kontribusi signifikan dari sektor industri pengolahan, terutama di wilayah Kalimantan dan Bali-Nusa Tenggara juga menunjukkan pertumbuhan yang kuat, masing-masing 5,52% dan 4,92%.

Selanjutnya, setelah melewati masa pandemi covid 19. pada April 2025 tingkat inflasi menunjukkan tren kenaikan (y-on-y) sebesar 1,95 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,47. Inflasi provinsi y-on-y tertinggi terjadi di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 5,96 persen dengan IHK sebesar 114,22 dan terendah terjadi di Provinsi Papua Barat sebesar 0,15 persen dengan IHK sebesar 106,95. Sementara inflasi kabupaten/kota y-on-y tertinggi terjadi di Kabupaten Jayawijaya sebesar 5,96 persen dengan IHK sebesar 114,22 dan terendah terjadi di Kota Sorong sebesar 0,12 persen dengan IHK sebesar 104,45.



Gambar 3.9 Tingkat Inflasi Indonesia Tahun 2023-2025

(Sumber : Bank Pusat Statistik Indonesia, 2025)

Perekonomian Daerah pada triwulan IV 2024 tumbuh sebesar 27,27% (yoy), mengalami peningkatan pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,42% (yoy). Maluku Utara menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia pada triwulan IV 2024, di atas Papua Barat dan Sulawesi Tengah. Ketiga provinsi dengan pertumbuhan tertinggi ini

ditopang oleh industri pengolahan dan pertambangan.



Gambar 3.10 Peta Pertumbuhan Ekonomi Provinsi seluruh Indonesia Tahun 2025

(Sumber: Bank Indonesia, 2025)

Secara wholeyear, perekonomian Maluku Utara pada tahun 2024 tumbuh sebesar 13,73% (ctc), tertinggi kedua setelah Papua Barat yang tumbuh sebesar 14,44% (ctc). Pertumbuhan perekonomian Maluku Utara ditopang oleh pertumbuhan pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan. Secara nasional, mayoritas provinsi mengalami peningkatan pertumbuhan sejalan dengan pertumbuhan nasional yang mengalami akselerasi pada triwulan IV 2024.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara yang tumbuh tinggi pada Triwulan IV 2024 digerakkan oleh sektor industri pengolahan khususnya komoditas nikel. Dilihat dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mencatatkan pertumbuhan sebesar 19,12% (yoy), mengalami akselerasi dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,16% (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh progress persetujuan RKAB tambang yang membaik sehingga memberikan efek domino terhadap realisasi ekspor produk olahan nikel di Maluku Utara dan optimalisasi produksi smelter eksisting serta comissioning smelter RKEF pada triwulan IV 2024. Secara whole year ekspor barang dan jasa Provinsi Maluku Utara pada tahun 2024 tercatat sebesar 11,16% (ctc), mengalami penurunan pertumbuhan dibanding tahun 2023 yang tumbuh sebesar 28,67% (ctc). Penurunan pertumbuhan ini sejalan dengan perlambatan pertumbuhan yang terjadi pada sektor industri pertambangan dan pengolahan nikel.

Di sisi lain, mayoritas komponen konsumsi mengalami pertumbuhan positif pada triwulan IV 2024. Komponen konsumsi pemerintah tumbuh sejalan dengan peningkatan realisasi belanja pemerintah khususnya belanja modal. Konsumsi

LNPRT mengalami deselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan mulai menurunnya konsumsi organisasi partai atau kemasyarakatan lainnya seiring berakhirnya momen pilkada. Di sisi lain, komponen konsumsi Rumah Tangga (RT) mengalami peningkatan pertumbuhan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sejalan dengan peningkatan pola konsumsi masyarakat selama momen HBKN Natal dan Tahun Baru 2025 yang berlangsung pada triwulan berjalan. Secara kumulatif, seluruh Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 9 komponen konsumsi pada tahun 2024 mengalami akselerasi dibanding tahun 2023. Hal ini diperkirakan karena adanya momen Pemilu dan Pilkada sehingga mendorong pertumbuhan konsumsi pemerintah dan LNPRT. Selanjutnya, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami akselerasi pertumbuhan pada triwulan IV 2024 dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh adanya realisasi pengalihan lini produksi smelter nikel maupun penambahan infrastruktur pada lini produksi yang segera masuk fase commissioning pada triwulan IV 2024. Sepanjang tahun 2024, komponen PMTB secara kumulatif mengalami akselerasi pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya.

Ditinjau dari sisi Lapangan Usaha (LU), terdapat 10 (sepuluh) LU yang mengalami peningkatan pertumbuhan sementara 7 (tujuh) LU mengalami penurunan pertumbuhan. Diantara sepuluh LU yang mengalami peningkatan pertumbuhan, 2 (dua) diantaranya adalah LU industri pengolahan dan LU pertambangan yang masuk sebagai lima besar penyumbang struktur ekonomi tertinggi di Maluku Utara. LU Industri Pengolahan yang memiliki andil pertumbuhan ekonomi terbesar mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 58,27% (yoy) pada triwulan IV, diikuti LU Pertambangan yang memiliki andil terbesar kedua dengan peningkatan pertumbuhan sebesar 33,33% (yoy). Peningkatan pertumbuhan LU pengolahan sejalan dengan optimalisasi produksi smelter pirometalurgi dan hidrometalurgi eksisting yang berada di Maluku Utara.

Komponen ekspor barang dan jasa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara pada triwulan IV 2024 sejalan dengan permintaan akan produk olahan nikel yang masih tinggi. Komponen ekspor barang dan jasa secara agregat masih memberikan andil yang paling besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi 12 Maluku Utara dari sisi pengeluaran. Pada triwulan IV 2024, ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan sebesar 19,12% (yoy), meningkat

dibandingkan triwulan III 2024 yang tumbuh sebesar 7,16% (yoy). Pertumbuhan komponen ekspor dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan akan produk olahan nikel di Maluku Utara. Pertumbuhan yang lebih lanjut terjadi seiring dengan penambahan lini produksi smelter nikel pirometalurgi pada triwulan IV 2024. Selain itu, pertumbuhan ekspor berlangsung sejalan dengan optimalisasi produksi feronikel, nickel matte, Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), nikel sulfat, dan kobalt sulfat dari smelter pirometalurgi dan hidrometalurgi yang berada di Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan. Sementara itu, sepanjang tahun 2024 ekspor barang dan jasa tumbuh sebesar 11,16% (ctc) lebih rendah dibanding tahun 2023 yang tumbuh sebesar 28,67% (ctc). Penurunan pertumbuhan ini diperkirakan karena keterlambatan persetujuan RKAB selama beberapa bulan sehingga berdampak terhadap ekspor produk olahan nikel.

Dari sisi komponen impor barang dan jasa, pada triwulan IV 2024 tercatat tumbuh sebesar 12,67% (yoy), mengalami peningkatan pertumbuhan dibandingkan dengan triwulan III 2024 yang tumbuh sebesar 7,85% (yoy). Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan impor komoditas mesin atau pesawat mekanik, mesin atau peralatan listrik, sebagai salah satu alat operasional smelter yang comissioning pada triwulan IV 2024. Berdasarkan data dari Dirjen Bea dan Cukai, impor Luar Negeri (LN) Provinsi Maluku Utara menurut nilai tumbuh sebesar 28,12% (yoy), mengalami peningkatan 13 pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 23,18% (yoy). Sumber pertumbuhan impor utamanya dipengaruhi oleh impor komoditas mesin atau pesawat mekanik, mesin atau peralatan listrik, sebagai salah satu alat operasional smelter di Maluku Utara. Sementara secara kumulatif, impor luar negeri pada tahun 2024 tumbuh sebesar 30,44% (ctc) mengalami peningkatan pertumbuhan yang signifikan dibanding tahun 2023 yang mengalami kontraksi sebesar -11,37% (ctc). Pertumbuhan ini disinyalir karena meningkatkan aktivitas impor bijih nikel dari Filipina sejalan dengan perlambatan persetujuan RKAB tambang selama beberapa bulan sehingga untuk menopang industri pengolahan nikel, perlu dilakukan impor bijih nikel dari Filipina. Sejalan dengan impor luar negeri yang mengalami akselerasi pertumbuhan pada triwulan IV 2024, Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) Provinsi Maluku Utara juga mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 9,94% (yoy) pada triwulan IV 2024.

Tabel 3.1. Pertumbuhan dan Andil PDRB Sisi Penggunaan 2024

Komponen	Pertumbuhan (%yoy)		Andil (%)	
	TW III 2024	TW IV 2024	TW III 2023	TW IV 2024
Ekspor Barang & Jasa	7,16	19,12	18,33	53,39
Impor Barang & Jasa	7,85	12,67	-20,07	-36,62
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	12,50	24,21	1,98	4,97
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,33	6,21	1,38	2,01
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9,10	0,32	0,07	0,00
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,30	9,94	2,68	5,62
PDRB	4,42	27,27	4,42	27,27

(Sumber: Bank Indonesia, 2025)

Ditinjau dari andil setiap komponen pengeluaran, ekspor masih menjadi komponen yang memberikan kontribusi positif tertinggi pada triwulan IV 2024, disusul dengan PMTB. Tingginya andil ekspor mengindikasikan bahwa permintaan global akan produk olahan nikel di Maluku Utara tetap mengalami peningkatan positif. PMTB sendiri mengalami akselerasi pertumbuhan yang diperkirakan sejalan dengan peningkatan realisasi pembangunan smelter baru dan realisasi PMA/PMDN yang mengalami perbaikan sebesar -28,15% (yoy) pada triwulan IV 2024 dibanding triwulan sebelumnya sebesar -53,63% (yoy). Selain itu, kebutuhan bahan bakar mineral sebagai bahan baku pembangkit listrik di kawasan industri yang masih meningkat turut mendorong pertumbuhan impor Maluku Utara.

Dilihat dari sisi lapangan usaha, mayoritas lapangan usaha (LU) utama di Maluku Utara mencatatkan pertumbuhan positif pada triwulan IV 2024. Lapangan usaha utama yang menjadi penyumbang PDRB terbesar di Maluku Utara, yaitu LU industri pengolahan mencatatkan pertumbuhan tinggi dan mengalami akselerasi yang signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari 17 (tujuh belas) LU penyumbang pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha, terdapat 10 (sepuluh) lapangan usaha yang tercatat mengalami peningkatan pertumbuhan. Secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mengalami akselerasi dari 4,42% (yoy) pada triwulan III 2024 menjadi 27,27% (yoy) pada triwulan IV 2024. Sementara apabila dilihat secara kumulatif sepanjang tahun, pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tercatat sebesar 13,73% (ctc), mengalami penurunan pertumbuhan dibanding tahun 2023 yang tumbuh sebesar 20,49% (ctc). Adapun pertumbuhan masing-masing LU pada triwulan II 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 3.2. Pertumbuhan dan Andil PDRB Menurut Lapangan Usaha 2023-2024

Lapangan Usaha		Pertumbuhan (%.yoy)					
		TW I	TW II	TW III	TW	WY	WY
		2024	2024	2024	IV2024	2023	2024
1	Pertanian	3,46	4,82	6,58	3,45	4,25	4,51
2	Pertambangan	17,68	0,07	-10,47	33,33	49,07	9,91
3	Industri Pengolahan	10,55	17,06	9,88	58,27	41,32	24,69
4	Listrik & Gas	21,87	8,67	9,45	65,26	16,12	27,22
5	Pengadaan Air & Sanitasi	6,17	9,49	6,69	4,67	3,56	6,71
6	Konstruksi	8,02	9,74	7,78	7,21	-0,38	8,17
7	Perdagangan	18,52	15,97	12,13	10,84	5,78	14,24
8	Transportasi	12,16	6,95	2,36	6,95	3,28	6,51
9	Akomodasi & Restoran	3,17	7,85	3,48	2,12	1,22	4,12
10	Informasi & Komunikasi	2,85	3,30	3,78	3,67	2,21	3,40
11	Jasa Keuangan	10,41	10,21	16,53	26,47	3,96	16,02
12	Real Estate	4,83	7,19	6,92	8,77	7,50	6,94
13	Jasa Perusahaan	10,41	10,21	16,53	26,47	3,96	16,02
14	Administrasi Pemerintahan	18,35	25,17	4,93	1,32	1,46	11,34
15	Jasa Pendidikan	1,69	2,93	1,60	2,37	1,86	2,15
16	Jasa Kesehatan	2,21	3,38	2,60	3,15	3,71	2,84
17	Jasa Lainnya	5,14	5,42	3,73	6,55	1,91	5,21
PDRB		11,88	10,76	4,42	27,27	20,49	13,73

(Sumber: Bank Indonesia, 2025)

LU industri pengolahan masih tetap menjadi kontributor terbesar dalam catatan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara triwulan IV 2024, yang tercermin dari tingginya andil LU tersebut pada capaian PDRB Provinsi Maluku Utara. Pada triwulan IV 2024, empat lapangan usaha utama dengan andil tertinggi ialah LU industri pengolahan dengan penyumbang andil tertinggi yaitu sebesar 17,57%, diikuti dengan LU pertambangan dan penggalian yang memberikan andil sebesar 6,65%, LU perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan andil sebesar 0,82%, serta LU pertanian dengan andil sebesar 0,42%.

Pertumbuhan ekonomi Maluku utara pada triwulan IV 2024 mengalami peningkatan pertumbuhan yang signifikan disebabkan oleh adanya dua smelter pirometalurgi yang commissioning pada triwulan IV 2024 yang menjadi faktor pendorong LU pengolahan serta progress persetujuan RKAB pertambangan nikel yang telah mencapai 63% menjadi faktor pendorong LU pertambangan karena mampu memenuhi kebutuhan bijih nikel dalam negeri sehingga mengurangi ketergantungan impor bijih nikel dari wilayah lain. Selain itu, adanya realisasi ekspansi produk olahan nikel yang memiliki nilai tambah lebih tinggi, peningkatan kebutuhan

ore nikel sebagai bahan baku utama smelter juga turut mendongkrak kinerja pada LU industri pengolahan. Kemudian, LU perdagangan besar dan eceran juga tetap tumbuh tinggi meskipun mengalami perlambatan secara moderat pada triwulan IV 2024. Pertumbuhan yang tetap tinggi ini sejalan dengan peningkatan pola konsumsi selama momen HBKN Natal dan Tahun Baru 2025 ini berpengaruh terhadap aktivitas perdagangan di Maluku Utara yang semakin tinggi pada periode tersebut. Kemudian, pada triwulan IV 2024, rata-rata NTP Provinsi Maluku Utara tercatat sebesar 103,42, meningkat dibandingkan triwulan III 2024 yang tercatat sebesar 103,2. Peningkatan NTP tersebut menjadi faktor pendorong kinerja LU pertanian, kehutanan dan perikanan pada triwulan laporan. Pertumbuhan LU industri pengolahan yang memberikan andil cukup tinggi bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara mengindikasikan adanya peluang untuk mendorong pertumbuhan pada sektor lapangan usaha lainnya. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif tentunya tetap menjadi harapan setiap lapisan masyarakat maupun pemerintah dan pelaku usaha di Maluku Utara. Melalui perluasan sektor pertambangan dan industri pengolahan akselerasi dibanding triwulan sebelumnya, multiplier effect diharapkan dapat hadir melalui terciptanya lapangan-lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang berada di wilayah lingkaran tambang maupun lingkaran smelter pengolahan.

Adapun Inflasi IHK Maluku Utara pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar 1,50% (yoy). Inflasi pada triwulan IV 2024 tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 3,56% (yoy). Inflasi IHK Maluku Utara pada triwulan IV 2024 tercatat lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 1,57% (yoy) sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.1. Berdasarkan Gambar tersebut, terlihat bahwa sepanjang triwulan IV 2024 tekanan inflasi Maluku Utara mengalami penurunan disebabkan oleh pasokan komoditas hortikultura seperti cabai merah, cabai rawit, dan tomat yang terjaga stabil dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Selain itu, tekanan inflasi lebih tinggi tertahan oleh kebijakan pemerintah untuk memberikan imbauan kepada pihak maskapai untuk memastikan keterjangkauan tarif pesawat selama periode Nataru.

Pada triwulan IV 2024, seluruh provinsi di Sulampua mengalami inflasi, kecuali provinsi Gorontalo. Inflasi IHK di provinsi Maluku Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara,

dan Gorontalo tercatat lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional. Sementara itu, inflasi IHK di provinsi Maluku Utara dan Papua tercatat berada pada rentang target $2,5 \pm 1\%$.

Inflasi IHK Maluku Utara pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar 1,50% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2024 sebesar 3,56% (yoy). Kelompok penyumbang inflasi terbesar sepanjang triwulan IV 2024 adalah Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang menjadi penyumbang andil inflasi tertinggi sebesar 1,39% (andil yoy) dan dengan inflasi tercatat sebesar 4,21% (yoy), kemudian disusul oleh Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran dengan andil inflasi sebesar 0,35% (andil yoy) atau inflasi sebesar 4,44% (yoy). Selanjutnya, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga dengan andil inflasi sebesar 0,13% (yoy) atau inflasi sebesar 0,65% (yoy). Dari sisi komoditas, penyumbang andil inflasi tertinggi sepanjang triwulan IV 2024 ialah komoditas beras, sigaret kretek mesin (SKM), emas perhiasan, ikan cakalang/ikan sisik. Secara akumulasi sampai dengan Januari 2025, tercatat Maluku Utara mengalami deflasi sebesar 1,64% (ytd). Inflasi sepanjang triwulan berjalan diperkirakan akan mengalami peningkatan dibandingkan triwulan IV 2024. Terjadinya peningkatan disebabkan peningkatan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamina dan Dexlite per 1 Februari 2025. Selain itu, tekanan inflasi juga diperkirakan berasal dari peningkatan permintaan konsumsi masyarakat seiring datangnya bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2025

Ketidakpastian perekonomian global pada triwulan II 2025 tetap tinggi akibat kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Pengumuman kebijakan tarif resiprokal AS awal April 2025 serta langkah retaliasi oleh Tiongkok memicu peningkatan ketidakpastian perekonomian global. Eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah pada Juni 2025 makin meningkatkan ketidakpastian perekonomian global dan berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi di negara maju seperti AS, Eropa, dan Jepang dalam tren menurun. Ekonomi Tiongkok pun melambat akibat menurunnya ekspor terutama ke AS, sedangkan ekonomi India diperkirakan tetap tumbuh baik. Pertumbuhan ekonomi di negara berkembang lainnya juga diperkirakan melambat, dipengaruhi dampak langsung dari penurunan

ekspor ke AS dan dampak tidak langsung dari penurunan volume perdagangan dengan negara-negara lain. Dengan perkembangan tersebut, prospek pertumbuhan ekonomi dunia 2025 diperkirakan belum kuat sebesar 3,0%. Sementara itu, tekanan inflasi AS masih rendah sejalan dengan ekonomi yang melambat, meskipun terjadi kenaikan inflasi pada kelompok barang akibat kebijakan tarif, sehingga memperkuat ekspektasi terhadap arah penurunan Fed Funds Rate (FFR) ke depan di tengah yield US Treasury 10 tahun yang masih tinggi karena kebutuhan defisit anggaran Pemerintah AS.

Tantangan perekonomian domestik pada triwulan II 2025 juga masih berat akibat ekspektasi pelaku ekonomi yang menurun. Hal tersebut berdampak pada demand kredit yang diperkirakan terbatas dengan supply kredit yang tertahan sejalan dengan peningkatan risk averse bank. Di tengah ketidakpastian global yang tinggi dan tantangan perekonomian domestik yang berat, perekonomian Indonesia pada triwulan II 2025 tetap tumbuh baik. Perekonomian Indonesia triwulan II 2025 tumbuh sebesar 5,12% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan sebelumnya sebesar 4,87% (yoy).

Perekonomian Provinsi Maluku Utara pada tahun 2025 diproyeksikan tetap tumbuh tinggi dan mengalami akselerasi dibanding tahun 2024. Apabila dilihat dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 diproyeksikan masih didorong oleh tingginya aktivitas ekspor LN. Aktivitas ini sejalan dengan masih tingginya kebutuhan dunia akan produk nikel sebagai bahan baku industri besi dan baja serta baterai kendaraan listrik. Hal ini juga dipengaruhi oleh optimalisasi produksi smelter pirometalurgi dan hidrometalurgi eksisting, serta realisasi hilirisasi olahan nikel yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Realisasi pembangunan smelter yang akan memasuki fase commissioning pada tahun 2025 akan berdampak positif pada naiknya angka ekspor Maluku Utara secara keseluruhan.

Komponen konsumsi rumah tangga diperkirakan akan mengalami penurunan pertumbuhan dibandingkan tahun 2024 sejalan dengan normalisasi pasca Pemilu dan Pilkada serta rencana efisiensi anggaran belanja pemerintah. Kendati demikian, adanya kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 di Maluku Utara yang mengalami peningkatan sebesar 6,5% diperkirakan menjadi faktor pendorong konsumsi rumah tangga pada tahun 2025. Dari sisi PMTB, komponen ini diperkirakan akan tetap tumbuh pada tahun 2025 kendati mengalami penurunan

pertumbuhan dibanding 2024. Hal ini dipengaruhi oleh realisasi pembangunan smelter baru dan penambahan lini produksi pada tahun 2025 yang tidak sebanyak tahun – tahun sebelumnya. Sejalan dengan hal tersebut, impor untuk bahan modal seperti mesin dan pesawat mekanik sebagai pendukung pembangunan smelter diperkirakan mengalami tren penurunan pada tahun 2025. Di sisi lain, menurut info dari pelaku industri adanya risiko pelemahan permintaan domestik industri besi dan baja di Tiongkok serta ketergantungan akan permintaan dari Tiongkok diperkirakan akan sangat mempengaruhi kinerja industri pengolahan maupun ekspor LN.

Apabila dilihat dari sisi Lapangan Usaha, industri pengolahan dan pertambangan masih akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi sejalan dengan kinerja produksi produk olahan nikel di Maluku Utara yang semakin optimal. Realisasi ekspansi dan konversi produk olahan nikel yang memiliki nilai jual tinggi sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik, serta realisasi smelter hidrometalurgi yang akan memasuki fase commissioning pada tahun 2025 diperkirakan 99 akan mendorong industri pertambangan dan pengolahan kembali tumbuh seiring masih tingginya kebutuhan bahan baku pembuatan baterai untuk keperluan kendaraan listrik. Lebih lanjut, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan diperkirakan akan tetap tumbuh positif namun mengalami penurunan pertumbuhan seiring kondisi cuaca dan tinggi gelombang laut yang tidak menentu selama beberapa periode pada tahun 2025. Dengan demikian, pada tahun 2025 perekonomian Maluku Utara diproyeksikan tetap tumbuh tinggi dengan rentang pertumbuhan sebesar 28,06% - 34,06% (yoy).

Adapun Tekanan inflasi Maluku Utara pada tahun 2025 diproyeksikan akan berada di sasaran target inflasi Nasional pada rentang 2,5% ± 1 % (yoy). Hal tersebut dipengaruhi oleh tekanan inflasi pada kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga dan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Peningkatan harga bahan bakar rumah tangga disebabkan adanya permasalahan distribusi yaitu ketidakseimbangan kuota pasokan minyak tanah dengan jumlah penerima. Provinsi Maluku Utara masih memiliki ketergantungan 102 tinggi terhadap penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah dibandingkan gas untuk keperluan sehari-hari. Berdasarkan data BPS tahun 2023, persentase rumah tangga di Maluku Utara dengan bahan bakar minyak tanah untuk memasak sebesar 53,39 persen. Dimana persentase rumah tangga yang menggunakan bahan

bakar jenis gas/elpiji sebesar 1,67 persen.

Selanjutnya, Dengan mempertimbangkan kondisi terkini serta beberapa potensi dan risiko tersebut, inflasi whole year 2025 diproyeksikan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024. Inflasi pada tahun 2025 diperkirakan akan berada dalam rentang target inflasi nasional. Inflasi pada tahun 2025 terjadi sejalan dengan adanya peningkatan harga yang diatur pemerintah seperti penyesuaian Harga Jual Eceran (HJE) rokok. Penyesuaian tersebut diperkirakan akan berpengaruh secara gradual kepada peningkatan harga komoditas sigaret kretek. Selain itu, ketidakseimbangan kuota minyak tanah di masyarakat juga menjadi salah satu faktor pendorong inflasi di tahun 2025. Selain itu, tingginya tingkat ketergantungan Maluku Utara terhadap pasokan bahan pangan strategis dari luar provinsi. Kemudian, inflasi juga diproyeksikan meningkat seiring dengan semakin tingginya jumlah tenaga kerja yang memasuki wilayah Maluku Utara, baik tenaga kerja asing maupun tenaga kerja nasional, sehingga berpotensi meningkatkan aktivitas berbelanja maupun kebutuhan bahan pangan.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan daerah tersebut harus dikelola dengan prinsip-prinsip transparan, efisien, efektif, akuntabilitas dan partisipatif.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Semua sumber keuangan yang melekat pada urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber penerimaan yang cukup

dengan mengacu pada peraturan perundangundangan.

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2026 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025-2029, tentunya tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dalam konteks ini, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Sosial Responsibility* (CSR). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah).

Berdasarkan pada hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan penelaahan terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, dapat dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan pelaksanaan APBD Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2026, baik pendapatan, belanja dan pembiayaan, yang diuraikan sebagai berikut.

3.2.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang selanjutnya akan menjadi penerimaan daerah. Pendapatan daerah Kabupaten Halmahera Timur bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Pendapatan Transfer yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah; Dana Desa serta Pendapatan Transfer Antar Daerah yaitu berasal dari Transfer Pemerintah Provinsi (Dana Bagi Hasil Pajak); dan 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang berasal Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan.

Berdasarkan data tahun sebelumnya, target pendapatan daerah Kabupaten Halmahera Timur pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 1.904,74 triliun dan terealisasi sebesar 99,4% persen atau Rp. 1.893,56 triliun. Belanja daerah dianggarkan Rp. 2.017,37 triliun dan terealisasi sebesar Rp. 1.547,15 triliun atau 76,7 persen. APBD Kabupaten Halmahera Timur tahun anggaran 2024 direncanakan defisit sebesar Rp. (112,63) milyar, dan terealisasi Surplus sebesar Rp. 346,41 milyar. Sedangkan target pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 112,64 miliar terealisasi Rp. 112,64 miliar atau 100 persen. Adapun target Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar nol rupiah, terealisasi sebesar Rp. 233,77 miliar rupiah.

Sumber pendapatan daerah terbesar Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2024 masih berasal dari Pendapatan Transfer dengan kontribusi sebesar 94,09 persen terhadap total pendapatan daerah. Namun demikian, kinerja terbaik justru ditunjukkan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mampu melampaui target. Dari target PAD sebesar Rp34,44 miliar, realisasinya mencapai Rp69,00 miliar atau 200,33 persen. Secara rinci, dari empat komponen utama PAD, dua komponen berhasil melampaui target secara signifikan. Pajak Daerah ditargetkan Rp16,25 miliar, terealisasi Rp30,12 miliar atau 185,44 persen. Lain-lain PAD yang Sah bahkan jauh melebihi target, dari Rp6,07 miliar terealisasi Rp30,79 miliar atau 507,26 persen. Sementara itu, Retribusi Daerah hanya mampu terealisasi Rp5,38 miliar atau 87,96 persen dari target Rp6,12 miliar. Sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga belum mampu mencapai target, dengan realisasi Rp0,71 miliar atau 35,77 persen dari target Rp2,00 miliar. Berbeda dengan PAD, Pendapatan Transfer yang menjadi tulang punggung pendapatan daerah menunjukkan realisasi sebesar Rp1.781,65 miliar atau 99,05 persen dari target Rp1.798,05 miliar. Hampir seluruhnya bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat dengan capaian realisasi 99,1 persen. Sementara itu, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah belum mencapai target. Dari target Rp72,25 miliar, realisasi hanya sebesar Rp42,90 miliar atau 59,37 persen. Penerimaan terbesar berasal dari Pendapatan Transfer Antar Daerah dengan realisasi Rp30,43 miliar atau 50,5 persen dari target Rp60,31 miliar, serta Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang tidak terealisasi dari target Rp11,94 miliar. Satu-satunya komponen

yang mencapai target penuh adalah Pendapatan Hibah dengan capaian 100 persen.

Secara umum, kinerja pendapatan daerah tahun 2024 cukup baik dengan total realisasi sebesar Rp1.893,56 miliar atau 99,4 persen dari target Rp1.904,74 miliar. Meski demikian, masih terdapat ketergantungan tinggi pada pendapatan transfer, sehingga ke depan perlu upaya penguatan basis PAD yang telah menunjukkan tren positif. Gambaran selengkapanya tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 3.3. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Menurut Jenis Pendapatan Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH	1.904,74	1.893,56	99,4%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	34,44	69,00	200,3%
4.1.1	Pajak Daerah	16,25	30,12	185,4%
4.1.2	Retribusi Daerah	6,12	5,38	87,9%
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,00	2,71	45,2%
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	6,07	30,79	507,2%
4.2	Pendapatan Transfer	1.798,05	1.781,65	99,1%
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.798,05	1.781,65	99,1%
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	72,25	42,90	59,4%
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	12,47	100,0%
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11,94	-	0,0%
4.3.4	Pendapatan Transfer Antar Daerah	60,31	30,43	50,5%

Sumber: BPKAD Kab. Halmahera Timur, 2025; *) Audited LRA

Total realisasi pendapatan daerah Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp1.893,56 miliar, meningkat tajam dibanding tahun 2023 yang hanya mencapai Rp999,89 miliar. Dengan demikian terjadi kenaikan sebesar Rp893,67 miliar atau 89,4 persen. Peningkatan terbesar terjadi pada Pendapatan Transfer, yang tetap menjadi kontributor utama. Tahun 2023 realisasinya sebesar Rp956,10 miliar, sementara tahun 2024 meningkat signifikan menjadi Rp1.781,65 miliar atau naik Rp825,55 miliar (86,3 persen). Hampir seluruhnya bersumber dari transfer pemerintah pusat. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menunjukkan kinerja positif. Realisasi PAD tahun 2024 sebesar Rp69,00 miliar, naik Rp33,84 miliar (96,2 persen) dibanding tahun 2023 yang sebesar Rp35,16 miliar. Dari sisi komponennya, Pajak Daerah melonjak dari Rp14,99 miliar di tahun 2023

menjadi Rp30,12 miliar pada 2024, atau meningkat 100,9 persen. Lain-lain PAD yang Sah juga naik signifikan dari Rp9,23 miliar menjadi Rp30,79 miliar atau naik 233,6 persen. Sementara itu, Retribusi Daerah justru mengalami penurunan cukup tajam, dari Rp10,07 miliar menjadi Rp5,38 miliar atau turun 46,6 persen. Di sisi lain, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meningkat lebih dari dua kali lipat, dari Rp0,87 miliar menjadi Rp2,71 miliar atau naik 211,5 persen.

Sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah juga menunjukkan lonjakan signifikan, dari Rp8,64 miliar pada 2023 menjadi Rp42,90 miliar pada 2024, atau meningkat 396,5 persen. Peningkatan terbesar berasal dari Pendapatan Hibah yang pada tahun 2023 tidak terealisasi, namun pada 2024 mencapai Rp12,47 miliar. Selain itu, Pendapatan Transfer Antar Daerah meningkat dari Rp7,15 miliar menjadi Rp30,43 miliar, atau naik 325,6 persen. Sebaliknya, Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang tahun 2023 sebesar Rp1,48 miliar tidak terealisasi pada 2024. Gambaran perbandingan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Halmahera Timur menurut jenis pendapatan Tahun Anggaran 2023 dan 2024 dapat dilihat pada Tabel di halaman berikut.

Tabel 3.4. Realisasi Pendapatan Daerah Menurut Jenis Pendapatan Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2023 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Naik/Turun (Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH	999,89	1.893,56	893,67	89,4%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	35,16	69,00	33,84	96,2%
4.1.1	Pajak Daerah	14,99	30,12	15,13	100,9%
4.1.2	Retribusi Daerah	10,07	5,38	- 4,69	-46,6%
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,87	2,71	1,84	211,5%
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	9,23	30,79	21,56	233,6%
4.2	Pendapatan Transfer	956,10	1.781,65	825,55	86,3%
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	956,10	1.781,65	825,55	86,3%
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	8,64	42,90	34,26	396,5%
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	12,47	12,47	12,47
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1,48	-	- 1,48	100,0%
4.3.4	Pendapatan Transfer Antar Daerah	7,15	30,43	23,28	325,6%

Sumber: BPKAD Kab. Halmahera Timur, 2025; *) Audited LRA

Berdasarkan kondisi pendapatan daerah tahun 2023–2024 serta memperhatikan tantangan dan proyeksi ekonomi daerah ke depan, maka target/proyeksi pendapatan daerah untuk RKPD Kabupaten Halmahera Timur tahun

2026 diarahkan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan pada transfer pusat. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengoptimalkan realisasi pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Intensifikasi pendapatan antara lain dilakukan dengan memperbaiki administrasi pajak dan mempermudah pembayaran pajak dan retribusi secara elektronik, memperbanyak dan meningkatkan kualitas petugas pungut, dan melakukan penyesuaian kembali obyek pajak melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 2) Ekstensifikasi pajak dan retribusi dilakukan dengan memaksimalkan tarif PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi yang telah ditetapkan dalam Perubahan beberapa peraturan daerah di tahun 2021.
- 3) Diversifikasi pajak dapat dilakukan dengan optimalisasi pendapatan daerah melalui inventarisasi dan pendayagunaan aset-aset daerah, melalui kerjasama penggunaan aset Pemda dan penjualan aset lainnya.
- 4) Peningkatan tata kelola pemungutan dan penerimaan pajak daerah melalui perbaikan bank data, membangun sistem pendapatan daerah secara terintegrasi berbasis elektronik;
- 5) Peningkatan koordinasi antara SKPD yang mengelola pendapatan, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
- 6) Memperbaiki struktur data yang menjadi penentu dalam variabel perhitungan dana perimbangan sebagaimana termuat dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 7) Memperbaiki performa kinerja pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan dana insentif daerah.

Tabel 3.5. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2026

No.	Uraian	Milyar (Rp.)				
		Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Target/Proyeksi Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026
4.1	Pendapatan Asli Daerah	58,06	35,16	69,00	43,80	51,20
4.1.1	Pajak Daerah	8,45	14,99	30,12	31,85	33,80
4.1.2	Retribusi Daerah	5,36	10,07	5,38	3,80	4,50
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,28	0,87	2,71	2,50	2,80
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	39,98	9,23	30,79	5,65	10,10
4.2	Pendapatan Transfer	1.055,23	956,10	1.781,65	1.262,56	1.385,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.055,23	956,10	1.781,65	1.262,56	1.385,00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	19,46	8,64	42,90	32,0	28,5
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,03	-	12,47	0,00	2,50
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4,35	1,48	-	10,0	9,00
4.3.4	Pendapatan Transfer Antar Daerah	15,08	7,15	30,43	22,01	17,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1.132,75	999,90	1.893,55	1.338,37	1.464,70

Ket: *) Realisasi APBD TA 2022-2024

Sumber: Hasil Analisis dan Proyeksi BP4D Kabupaten Halmahera Timur, 2025

3.2.2. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan meliputi antara lain :

1) Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai

- Gaji PNS dihitung dengan memperhatikan peraturan penggajian PNS dengan berdasar pada realisasi pembayaran gaji sampai bulan Desember 2024;
- Tambahan penghasilan diberikan kepada PNS/CPNSD dan direncanakan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan Kriteria Tanggung Jawab Pekerjaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;
- Penganggaran belanja gaji, tunjangan dan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati berpedoman pada peraturan yang berlaku;
- Penganggaran belanja hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Pemberian insentif atas pemungutan pajak dan retribusi daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- Pemberian honorarium bagi pegawai dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tetap dibatasi;
- Tunjangan Penghasilan PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur disesuaikan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Belanja Barang dan Jasa

- Belanja barang dan jasa di setiap Perangkat Daerah digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan;

- Dalam perubahan APBD, anggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan riil;
- Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas dalam daerah maupun perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas luar negeri dilakukan secara selektif;
- Belanja pemeliharaan aset barang, infrastruktur, konstruksi dianggarkan pada belanja barang dan jasa;
- Penganggaran belanja modal yang akan diserahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dialokasikan pada belanja barang dan jasa;
- Penyesuaian penggunaan jenis BBM bagi kendaraan dinas.
- Kebutuhan tambahan tenaga kerja/tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja program dan kegiatannya dilaksanakan secara outsourcing dan dikriteriakan sebagai jasa dari pihak ketiga dialokasikan pada belanja barang dan jasa;
- Honor tim yang berasal dari unsur non PNS serta tenaga ahli/narasumber non PNS dikriteriakan belanja pegawai Non PNS dialokasikan dalam belanja barang dan jasa;

c. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

- Pemberian hibah dan bantuan sosial berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- Penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang bantuan keuangan kepada partai politik;

2) Belanja Modal

- a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengadaan aset tetap berwujud, yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah nilai aset/modal;
- b. Biaya pendukung dalam rangka proses pengadaan belanja modal dikapitalisasi pada nilai belanja modal tersebut;
- c. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi;

- d. Penganggaran belanja modal memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan jadwal waktu proses pengadaannya;
- e. Pengadaan kendaraan dinas sebagai pendukung mobilitas kerja bagi Perangkat Daerah memperhatikan kebutuhan.

3) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dianggarkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang yang tidak diperkirakan sebelumnya, seperti bencana alam/bencana sosial.

4) Belanja Transfer

Belanja transfer meliputi Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sesuai peraturan perundangan-undangan.

Anggaran belanja disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasikan pada hasil dan diarahkan pada peningkatan pelayanan publik, penerapan prinsip-prinsip akuntabel anggaran, efisiensi pengelolaan, dan peningkatan mutu dan kualitas SDM. Orientasi belanja daerah diprioritaskan untuk efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah (PD). Setiap peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran diikuti dengan optimalisasi kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun prioritas kebijakan belanja daerah Kabupaten Halmahera Timur tahun anggaran 2026, adalah sebagai berikut:

- 1) Dialokasikan untuk membiayai kebutuhan belanja langsung wajib dan mengikat, meliputi: gaji dan tunjangan ASN, pembayaran iuran jaminan kesehatan, belanja operasional kantor (listrik, air, telekomunikasi/internet), sewa gedung, premi asuransi, serta belanja wajib lainnya yang tidak dapat ditunda.
- 2) Dialokasikan untuk mendukung program prioritas kepala daerah, khususnya pada sektor unggulan daerah seperti pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lokal, penguatan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 3) Belanja diarahkan untuk mendukung pencapaian target SDGs, terutama dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan inklusif, pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, serta perlindungan lingkungan

hidup.

- 4) Belanja diarahkan pada program prioritas nasional yang relevan dengan daerah, seperti penanggulangan stunting, penguatan ketahanan pangan, peningkatan investasi dan lapangan kerja, transformasi digital, serta peningkatan kualitas SDM.
- 5) Dialokasikan untuk mendukung arah kebijakan provinsi, terutama pembangunan infrastruktur konektivitas wilayah, peningkatan ketahanan energi dan pangan, serta penguatan daya saing daerah melalui sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata.
- 6) Alokasi Dana Fungsi Pendidikan dan Kesehatan. Pendidikan dialokasikan sekurang-kurangnya 20% dari total belanja daerah, untuk peningkatan akses, mutu, dan sarana prasarana pendidikan. Sementara Kesehatan dialokasikan sekurang-kurangnya 10% dari total belanja daerah (di luar gaji) untuk mendukung peningkatan layanan kesehatan, pengendalian stunting, dan penguatan layanan dasar masyarakat.
- 7) Dialokasikan untuk pemenuhan kewajiban daerah, termasuk peningkatan kapasitas SDM aparatur, dukungan penyelenggaraan pengawasan internal (APIP), penyertaan modal daerah sesuai kebutuhan, serta kewajiban lain yang ditetapkan regulasi.
- 8) Dialokasikan untuk program/kegiatan prioritas pembangunan daerah yang sesuai dengan misi RPJMD Halmahera Timur 2025–2029, antara lain pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, penguatan sistem pertanian dan perikanan, serta transformasi digital pelayanan publik.

Proyeksi pendapatan daerah untuk RKPD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2026 sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.6 menjadi dasar perencanaan belanja ini.



**Tabel 3.6. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2026**

No.	Uraian	Milyar (Rp.)				
		Realisasi Tahun	Realisasi Tahun	Realisasi Tahun	Target/Proyeksi	Proyeksi Tahun
		2022	2023	2024	Tahun 2025	2026
1	Belanja Pegawai	224,25	212,22	262,00	207,64	225,00
2	Belanja Barang dan Jasa	313,19	403,23	541,97	251,45	325,00
3	Belanja Modal	251,37	338,86	489,23	253,44	310,00
4	Belanja Lainnya	153,78	173,66	253,94	108,81	170,00
-	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Belanja Bantuan Keuangan	137,63	155,15	201,57	92,86	125,00
-	Belanja Hibah	10,87	17,62	49,57	15,75	22,00
-	Belanja Bantuan Sosial	4,76	0,56	0,40	0,19	0,50
-	Belanja Tidak Terduga	0,52	0,34	2,40	0,00	1,00
JUMLAH BELANJA DAERAH		942,59	1.127,97	1.547,14	821,34	1.030,00

Ket: *) Realisasi APBD TA 2022-2024;
Sumber: Hasil Analisis dan Proyeksi BP4D Kabupaten Halmahera Timur, 2025

3.2.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pembiayaan daerah Kabupaten Halmahera Timur tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp320,00 miliar yang terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp325,00 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp5,00 miliar. Penerimaan pembiayaan masih didominasi oleh komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, sedangkan dari sisi pengeluaran dialokasikan untuk penyertaan modal daerah.

Dengan komposisi tersebut, pembiayaan netto pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp320,00 miliar, yang akan digunakan untuk menutup defisit anggaran maupun mendukung pembiayaan program prioritas daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Halmahera Timur. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2026 diperkirakan sebesar Rp115,00 miliar, yang menunjukkan adanya ruang fiskal bagi pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas fiskal serta memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

Proyeksi pembiayaan daerah untuk RKPD Kabupaten Halmahera Timur tahun 2026 sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.7.

Tabel 3.7. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2026

No.	Uraian	Milyar (Rp.)				
		Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Target/Proyeksi Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026
	SURPLUS/ (DEFISIT)	190,16	-	128,07	346,41	517,03
6	PEMBIAYAAN DAERAH	67,52	256,18	112,64	459,05	320,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	68,02	257,68	114,14	459,05	325,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	68,02	257,68	114,14	459,05	325,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,50	1,50	1,50	0,00	5,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	0,50	1,50	1,50	0,00	5,00
	PEMBIAYAAN NETTO	67,52	256,18	112,64	459,05	320,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	122,64	-	384,25	233,77	57,98

Ket: *) Realisasi APBD TA 2022-2024

Sumber: Hasil Analisis dan Proyeksi BP4D Kabupaten Halmahera Timur, 2025

BAB 4

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

2026

RKPD

BAB 4

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Halmahera Timur dimanifestasikan dari Visi RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025-2029, yaitu: **“HALMAHERA TIMUR BERBENAH MENUJU TRANSFORMASI KEMAJUAN”**. Visi ini secara eksplisit memiliki makna sebagai cita-cita mewujudkan pencapaian pembangunan Halmahera Timur ke depan. Pembangunan yang lebih baik dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Makna ini dapat diterjemahkan secara parsial dalam Tiga Kata utama, yaitu:

a) **Berbenah** memiliki makna, upaya melanjutkan kerja-kerja pembangunan yang telah dilakukan secara terukur dan berkesinambungan, sehingga tercipta keberlanjutan pembangunan pada seluruh aspek-aspek kehidupan. Pembenahan atas pelaksanaan pembangunan yang dilakukan yakni dengan akan terus meningkatkan kualitas pembangunan yang telah dilakukan pada periode sekarang, dan senantiasa membuat terobosan dan inovasi pembangunan agar Halmahera Timur bersiap untuk mengakselerasi pembangunan pada masa akan datang. Berbenah, juga memberikan pemahaman bahwa upaya pembangunan merupakan kerja-kerja terkoordinir yang berkelanjutan. Kata Berbenah juga merupakan akronim dari: **Bersih, Berani dan Amanah**.

- 1) **Berani**, artinya bahwa Halmahera Timur siap untuk menghadapi tantangan dan dinamika pembangunan melalui kebijakan pemerintahan yang inovatif dan transformatif, sehingga Halmahera Timur siap untuk mengkaselerasi pembangunannya di masa depan.
- 2) **Bersih**, artinya bahwa pelaksanaan pembangunan Halmahera Timur yang dilakukan bersih dari tindakan korupsi dengan memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal serta menerapkan kebijakan anti korupsi secara tegas dan terukur serta menerapkan kebijakan pembangunan yang transparan dan

akuntabel.

- 3) **Amanah**, artinya bahwa dalam mengemban tugas dan melaksanakan harapan masyarakat Halmahera Timur dengan berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, responsif dan terpercaya. Pembangunan yang dilakukan merupakan manifestasi untuk menjawab kebutuhan daerah yang tentunya diperuntukan bagi semua golongan/ kalangan masyarakat dari Sondo-Sondo dampe dengan Sill-Sowoli.
- b) **Transformasi**, memiliki makna, perubahan pendekatan pembangunan yang dilakukan menyeluruh pada setiap aspek, yang berarti bahwa transformasi merupakan wujud nyata langkah-langkah strategis taktis yang dilakukan guna mencapai kondisi untuk mendukung terjadinya perubahan struktur pembangunan dari produktivitas yang belum maksimal menuju kepada produktivitas manusia dan wilayah yang tinggi. Transformasi, dalam perspektif ini berkonotasi menjadikan Kabupaten Halmahera Timur sebagai daerah yang mengalami persiapan menuju lanjutan perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan dimaksud berkaitan dengan peningkatan kemajuan di berbagai sektor serta dimensi pembangunan daerah sesuai dengan prinsip keberlanjutan pembangunan. *Approach* pembangunan melalui ketersediaan infrastruktur yang merata, berkualitas dan terintegrasi; meningkat konektivitas dan aksesibilitas antar daerah yang berimplikasi pada menurunnya ketimpangan antar wilayah; serta tersedia dan terpenuhi layanan dasar masyarakat yang berkualitas. Secara spesifik kata Transformasi juga memiliki makna, Langkah kongkrit terukur dalam upaya menyiapkan terlaksananya pembangunan Halmahera Timur yang berkelanjutan
- c) **Maju** memiliki makna, sebuah kondisi kemajuan daerah yang semakin meningkat, atau semakin memantapkan arah pembangunan yang makin baik dan berkelanjutan. Sebuah kemajuan yang tidak statis, tetapi dinamis, sesuai kondisi obyektif dan ideal dengan kebutuhan dan kepentingan pembangunan di Kabupaten Halmahera Timur. Maju, dalam perspektif ini berkonotasi menjadikan Kabupaten Halmahera Timur sebagai daerah yang mengalami perubahan lanjutan ke arah yang lebih baik. Khususnya dari periode kemajuan sebelumnya. Perubahan

dimaksud berkaitan dengan peningkatan kemajuan di berbagai sektor dan dimensi pembangunan daerah. Sesuai prinsip keberlanjutan pembangunan, yaitu melalui: ketersediaan infrastruktur yang makin merata, berkualitas dan terintegrasi; makin meningkat konektivitas dan aksesibilitas antar daerah; serta makin tersedia dan terpenuhi layanan dasar masyarakat yang berkualitas. Secara spesifik kata Maju juga memiliki makna, makin meningkat kualitas sumber daya manusia terdidik yang berdaya saing unggul dan berkarakter terampil. SDM yang kreatif, inovatif, berdedikasi, dan memiliki etos kerja tinggi, serta berintegritas dan visioner. Bentuk SDM seperti ini diharapkan menjadi agen perubahan bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur

Rumusan visi diatas terbangun dalam satu kesatuan dan saling melengkapi. Secara substantif, rangkaian visi tersebut bertujuan meningkatkan pemenuhan kebutuhan akan pelayanan dasar, infrastruktur, peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Serta tidak kalah penting, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mewujudkan harmoni sosial di tengah masyarakat Halmahera Timur. Berdasarkan visi pembangunan tersebut maka dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Halmahera Timur tahun 2025-2029, yaitu:



Gambar 4.1. Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2025-2029

Sumber: RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2025-2029

Misi Pertama, mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dalam membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai

fondasi utama transformasi daerah. Arah strategis ini menempatkan pendidikan, kesehatan, ketahanan keluarga, serta penguatan karakter sebagai prioritas dalam memastikan setiap warga memiliki kemampuan adaptif, produktif, dan resilien di tengah perubahan zaman yang dinamis, kompleks, dan sarat tantangan multidimensi. Kualitas SDM tidak hanya ditentukan oleh akses terhadap layanan dasar, tetapi juga oleh keberdayaan individu dan komunitas untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi kemajuan daerahnya.

Melalui Misi ini, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur berupaya memperluas cakupan dan mutu pendidikan formal maupun nonformal, memperkuat kapasitas layanan kesehatan primer hingga ke wilayah terpencil, serta mengembangkan ekosistem sosial yang mendukung tumbuh kembang anak, penguatan remaja, dan kemandirian keluarga. Pengembangan keterampilan vokasional dan karakter warga didorong melalui pendekatan kontekstual berbasis potensi lokal, sekaligus membangun budaya inovasi dan kesetaraan dalam pembelajaran sepanjang hayat. Dengan semangat inklusif dan progresif, pelaksanaan misi ini diarahkan untuk memastikan bahwa tidak ada satupun kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses transformasi menuju Halmahera Timur yang maju, sehat, terdidik, berkarakter kuat, dan berdaya saing dalam skala regional maupun nasional.

Misi Kedua, dirancang untuk memperkuat kapasitas fiskal dan struktur ekonomi daerah Kabupaten Halmahera Timur melalui optimalisasi sumber daya alam strategis sebagai penggerak utama transformasi ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dalam konteks fiskal, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi langkah prioritas yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga pada pembenahan sistem pengelolaan aset daerah, efisiensi belanja publik, dan terobosan inovatif dalam pembiayaan pembangunan. Strategi fiskal diarahkan untuk menciptakan ketahanan keuangan daerah sebagai syarat mutlak bagi kemandirian dan keberlanjutan pembangunan.

Dalam dimensi ekonomi, Misi ini memfokuskan perhatian pada dua pilar utama, yaitu hilirisasi sumber daya alam strategis dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Pengolahan hasil pertambangan nikel, pertanian/perkebunan, dan perikanan di dalam wilayah menjadi keharusan strategis guna menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi dan memperluas kesempatan kerja yang berkualitas. Pemerintah daerah berkomitmen mendorong pertumbuhan sektor produktif berbasis

potensi unggulan, sekaligus memastikan keberpihakan terhadap petani, nelayan, pelaku usaha lokal, serta kelompok rentan lainnya melalui skema perlindungan dan fasilitasi akses terhadap sumber daya ekonomi.

Pelaksanaan misi ini didesain agar selaras dengan prinsip inklusivitas, keberlanjutan, dan daya saing daerah. Setiap langkah diarahkan untuk memperkuat kehadiran negara dalam mendampingi masyarakat, membangun sistem ekonomi yang berpihak, serta meletakkan pondasi ekonomi lokal yang tangguh terhadap guncangan. Dengan pendekatan lintas sektor dan kemitraan multipihak, Halmahera Timur diharapkan mampu mengonsolidasikan seluruh potensi fiskal dan ekonomi secara lebih adil, terstruktur, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan seluruh warganya.

Misi Ketiga, bertujuan untuk memperkuat sistem pemerintahan daerah yang mampu merespons tantangan masa kini secara profesional, adaptif, dan inovatif. Penguatan tata kelola birokrasi bukan semata-mata soal administrasi pemerintahan yang rapi, tetapi mencerminkan upaya transformatif untuk membangun birokrasi yang berpihak pada kepentingan publik, mampu menghasilkan solusi, serta menjunjung tinggi nilai integritas dan akuntabilitas. Transformasi birokrasi diarahkan pada tiga pilar utama.

Pertama, penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan melalui sistem merit, manajemen talenta, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berintegritas dan mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan. Kedua, pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman, efisien, dan terintegrasi, sehingga menghadirkan layanan publik yang lebih inklusif, responsif, dan berbasis data. Ketiga, pembenahan sistem regulasi dan perizinan daerah secara menyeluruh untuk menciptakan tata kelola yang sederhana, adil, dan mendukung produktivitas masyarakat serta dunia usaha.

Misi ini juga menekankan pentingnya membangun budaya inovasi dalam birokrasi, memanfaatkan teknologi digital secara cerdas, serta memperkuat tata hukum yang partisipatif dan berbasis bukti. Reformasi birokrasi dan hukum dijalankan tidak sekadar dalam kerangka administratif, melainkan sebagai gerakan perubahan yang menyentuh struktur, proses, hingga nilai-nilai pelayanan publik. Melalui pendekatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur bertekad membangun tata kelola yang tidak hanya efisien secara sistem, tetapi juga dipercaya dan dirasakan manfaatnya secara nyata oleh seluruh warga.

Misi Keempat, mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur untuk membangun tatanan sosial yang kokoh, berkeadaban, dan adaptif terhadap dinamika zaman, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup sebagai warisan bersama lintas generasi. Di tengah arus globalisasi dan tekanan ekologis yang semakin kompleks, daerah tidak hanya dituntut untuk bertumbuh secara ekonomi, tetapi juga menjaga akar budaya, menjamin keadilan sosial, serta mengelola sumber daya alam secara bijaksana.

Penguatan ketahanan sosial-budaya diarahkan pada revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal, pelestarian ekspresi budaya yang hidup dalam masyarakat, serta pengembangan ekosistem budaya yang harmonis dan adaptif. Kearifan lokal bukan sekadar warisan, melainkan kekuatan strategis yang membentuk identitas, membangun kohesi sosial, dan memperkaya inovasi pembangunan daerah. Misi ini juga menekankan pentingnya membangun masyarakat yang inklusif, harmonis, dan setara gender. Pemberdayaan kelompok rentan, pemenuhan hak sosial dasar, serta perluasan ruang partisipasi menjadi elemen utama dalam memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam proses pembangunan.

Di sisi lain, tekanan terhadap lingkungan hidup dan meningkatnya risiko bencana serta perubahan iklim membutuhkan respons sistemik dan berjangka panjang. Oleh karena itu, Misi ini mendorong penguatan kapasitas adaptasi masyarakat, perlindungan terhadap ekosistem penting, serta pengarusutamaan edukasi lingkungan sebagai strategi membangun ketangguhan ekologis daerah. Melalui pendekatan terintegrasi antara pelestarian budaya, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur bertekad menciptakan landasan sosial-ekologis yang tangguh bagi kemajuan daerah.

Misi Kelima, merepresentasikan prioritas strategis Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dalam membangun fondasi fisik pembangunan yang inklusif, adil, dan berdaya saing. Ketersediaan infrastruktur dasar yang merata dan konektivitas antarwilayah yang berkualitas menjadi prasyarat utama bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, efektivitas pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pemerataan infrastruktur pelayanan dasar tidak hanya menyentuh aspek teknis, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak dasar masyarakat atas air minum yang layak, sanitasi yang aman, perumahan yang sehat, serta lingkungan permukiman yang mendukung kualitas hidup. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur

diarahkan secara bertahap, dengan menekankan pada kawasan tertinggal dan rentan, serta memanfaatkan pendekatan kolaboratif lintas sektor dan sumber pendanaan. Konektivitas wilayah menjadi aspek penting dalam mengurangi ketimpangan spasial dan meningkatkan efisiensi distribusi barang, jasa, dan layanan sosial. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan, moda transportasi darat dan laut, serta fasilitas penunjang mobilitas warga diarahkan untuk membuka keterisolasian wilayah-wilayah hinterland, memperkuat keterhubungan antara pusat dan desa, serta menjamin kontinuitas logistik dan layanan dasar.

Di samping itu, pengembangan kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru menjadi salah satu upaya untuk mengonsolidasikan ruang wilayah yang produktif. Penataan ruang difokuskan pada efisiensi pemanfaatan lahan, kesinambungan ekologis, serta kemudahan aksesibilitas terhadap layanan dan pasar. Kawasan-kawasan prioritas akan diarahkan menjadi simpul pertumbuhan, investasi, dan inovasi lokal yang memperkuat daya saing dan pemerataan pembangunan antarwilayah. Dengan landasan tersebut, Misi kelima menjadi elemen pengungkit yang tidak terpisahkan dari keberhasilan misi lainnya, serta menjadi kunci dalam membangun Halmahera Timur yang terhubung, inklusif, dan siap menyongsong transformasi kemajuan secara berkelanjutan.

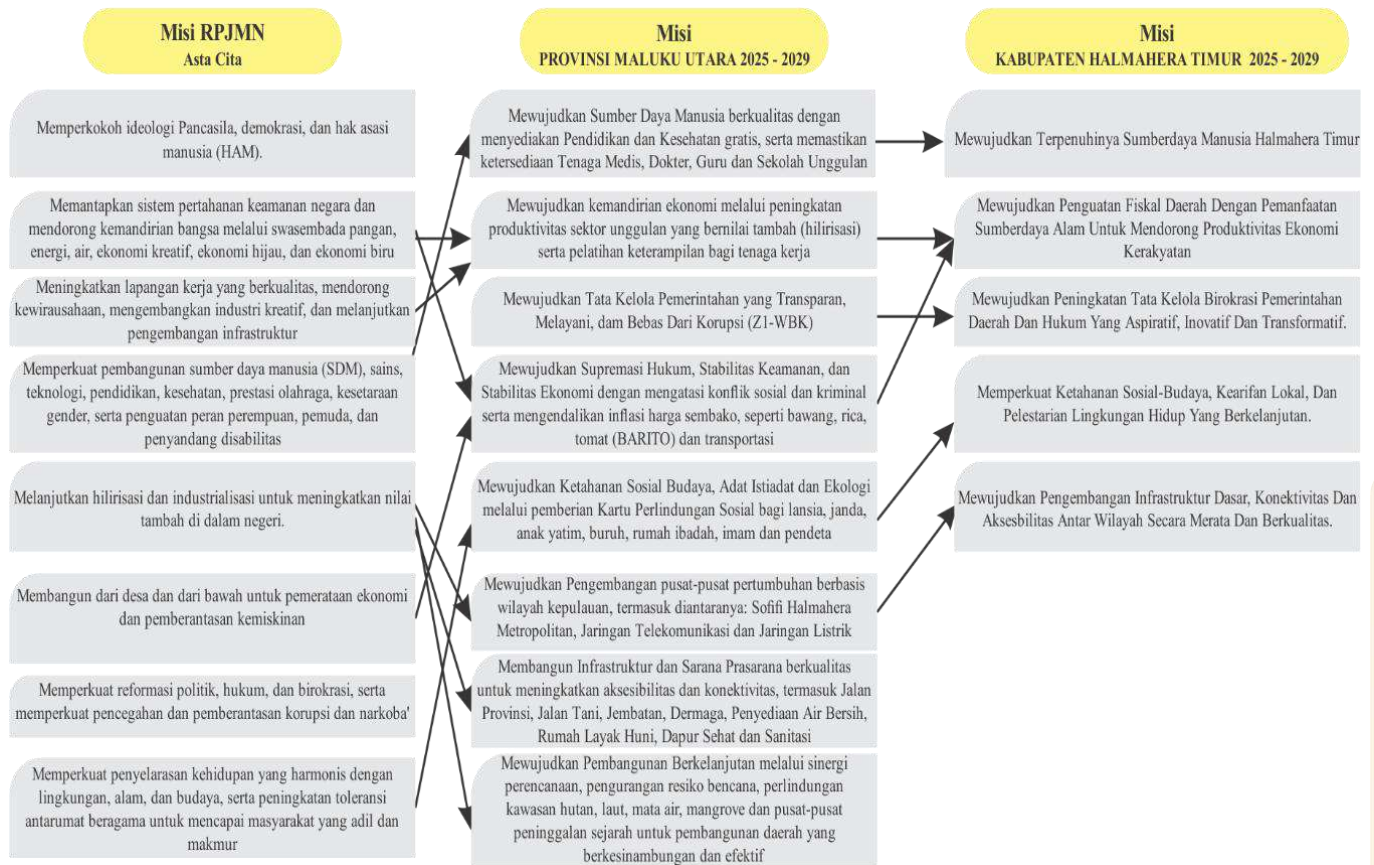
Kelima misi tersebut dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan, sebagai berikut:



Gambar 4.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2025-2029

Sumber: RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2025-2029

Misi Bupati Halmahera Timur yang terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Halmahera tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan Agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2025- 2029 dan Misi RPJMD Provinsi Maluku Utara 2025-2029, sebagaimana ilustrasi pada gambar berikut.



Gambar 4.3. Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2025-2029 dengan RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Maluku Utara 2025-2029

Sumber: RPJMD Kaabupaten Halmahhera Timur

Penjabaran misi Kabupaten Halmahera Timur sejalan dengan RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029 dan tentunya sinkron terhadap penjabaran ASTA CITA dalam RPJMN Tahun 2025-2029. kesamaan orientasi utama

1. Pembangunan SDM berkualitas — ketiga level menempatkan peningkatan kualitas SDM sebagai prioritas (pendidikan, kesehatan, keterampilan, penguatan karakter). [OBJ]
2. Pengembangan ekonomi inklusif berbasis potensi daerah / SDA yang berkelanjutan — RPJMN mendorong transformasi ekonomi berkelanjutan; Provinsi dan Kabupaten menargetkan pemanfaatan SDA dan penguatan ekonomi lokal. [OBJ]
3. Pembangunan infrastruktur & konektivitas — kebutuhan infrastruktur untuk mendukung akses layanan dan perekonomian muncul di ketiga dokumen/agenda. [OBJ]

4. Tata kelola pemerintahan / pelayanan publik yang lebih baik — pemerintahan bersih, akuntabel, dan pelayanan publik prioritas di RPJMN dan RPJMD Provinsi; Halmahera Timur juga menekankan pelayanan dan tata kelola.

kekuatan sinergi

Visi/misi Haltim sangat kompatibel dengan arah kebijakan Provinsi dan Nasional — terutama pada SDM, infrastruktur, ekonomi berbasis SDA, dan tata kelola. Korelasi kebijakan Kabupaten Halmahera Timur yang dijabarkan melalui misi RPJMD lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.1 Keselarasan Misi Pembangunan Kabupaten Halmahera Timur Terhadap RPJMD Provinsi Maluku Utara dan RPJMN

No	Misi RPJMD Haltim 2025-2029 (ringkasan)	Kaitan dengan RPJMD Prov. Maluku Utara 2025-2029	Kaitan dengan RPJMN (RPJMN 2025-2029)
1	Penguatan SDM: pendidikan, kesehatan, keterampilan, karakter/agamis	Sejalan — fokus pada peningkatan kualitas SDM, kesehatan, pendidikan, dan pembangunan SDM berdaya saing.	Sejalan — RPJMN menempatkan peningkatan kualitas SDM sebagai prioritas nasional.
2	Pembangunan infrastruktur & konektivitas untuk mengurangi kesenjangan wilayah	Sejalan — Provinsi menekankan akselerasi infrastruktur dan konektivitas antarkawasan.	Sejalan — prioritas nasional untuk infrastruktur penunjang pertumbuhan dan pemerataan.
3	Penguatan fiskal daerah & ekonomi kerakyatan berbasis pemanfaatan SDA yang berkelanjutan	Sejalan — Provinsi menekankan ekonomi inklusif berorientasi nilai tambah SDA dan pengelolaan berkelanjutan.	Sejalan — transformasi ekonomi nasional menuju kemandirian dan pengelolaan SDA berkelanjutan.
4	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, inovatif	Sejalan — Provinsi memasukkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik sebagai misi.	Sejalan — RPJMN mendorong pemerintahan bersih, reformasi birokrasi, dan pelayanan publik berkualitas.
5	Ketahanan sosial budaya dan pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan	Sejalan — Provinsi menekankan menjaga keberagaman, budaya, dan pembangunan berkelanjutan.	Sejalan — RPJMN mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup.

Sumber :

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2026

4.2.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional

Berpedoman pada Permendagri No. 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2026 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 8 (Delapan) Asta Cita arahan utama Presiden, sebagai berikut:



1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemnadirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan Lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan Ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat Transformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil makmur.

Dalam rangka mendukung 8 (delapan) Misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Tercepat, sebagai berikut:

1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.

Stunting (tengkes) adalah masalah konkret dan mendesak yang harus segera ditangani secara langsung dan massal oleh pemerintah untuk memastikan tercapainya kualitas SDM dan kualitas hidup yang baik. Hal ini dilakukan dengan memberikan makan siang harian kepada siswa pra-sekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren. Bantuan gizi diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga. Program ini menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100% pada tahun 2029.



2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50% dalam lima tahun dan bangun RS lengkap berkualitas di kabupaten.

Kesehatan adalah salah satu bagian penting dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Jumlah tenaga kesehatan (nakes) per populasi dan tempat tidur rumah sakit (RS) per populasi yang masih di bawah standar World Health Organization (WHO) harus segera dibenahi. Akselerasi Pembarantasan penyakit tuberkulosis (TBC) serta pembangunan RS menjadi prioritas utama untuk memastikan kualitas hidup manusia yang terjaga. Pemeriksaan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kesehatan dan pencegahan penyakit dengan pemeriksaan kesehatan tekanan darah, kadar gula darah, dan rontgen paru. Target pemberantasan TBC adalah mengurangi kasus TBC sebanyak 50% pada tahun 2029. Rumah sakit berkualitas akan didirikan di seluruh kabupaten dengan dukungan dan insentif yang menarik bagi dokter ahli yang bertugas disana.

3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.

Guna mencapai swasembada pangan, dibutuhkan peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan. Kedua program tersebut dilakukan di level desa, kecamatan, kabupaten/ kota, dan nasional secara lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan komoditas padi, jagung, kedelai, singkong, tebu, sagu, dan sukun. Ditargetkan minimal tambahan 4 juta ha luas panen tanaman pangan tercapai pada tahun 2029.

4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah, meningkatkan kualitas lulusan dan infrastruktur sekolah dan sarana pendukungnya, akan dibangun sekolah-sekolah unggulan di setiap kabupaten. Sekolah unggulan yang akan dibangun mengikuti model sekolah unggulan tanpa asrama (non-boarding school) dan asrama, serta terintegrasi dari sekolah dasar hingga ke menengah atas. Di samping itu, akan dilaksanakan perbaikan untuk sekolah-sekolah yang saat ini dalam kondisi kurang dan tidak layak.

5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.

Masih adanya kemiskinan absolut menunjukkan pembangunan ekonomi belum

optimal dan belum merata. Negara wajib memberikan perlindungan sosial untuk warga miskin. Program-program seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), KIS Lansia, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, MEKAR, dan Program Keluarga Harapan akan dilanjutkan dan menambahkan Kartu Anak Sehat. Selain itu program Kredit Usaha Tani - Perternakan, - Perikanan, Perkebunan, -Produksi Pangan Rakyat, Nelayan, -Pesisir, -Industri Hilir UKM, Kredit untuk usaha Start Up dankredit untuk para millennial akan didorong, diperluas, dan diperbanyak untuk menjadi garda terdepan dalam upaya peningkatan wirausaha dan sekaligus.

6. Meningkatkan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan), TNI/POLRI, dan pejabat negara.

Pelayanan publik yang baik akan terlaksana bila aparatur sipil negara (ASN) terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan (nakes), tentara nasional Indonesia (TNI), kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan pejabat negara berada dalam kondisi sejahtera. Oleh karena itu, pendapatan mereka perlu ditingkatkan secara layak. Kebijakan penggajian diarahkan pada upah minimum provinsi (UMP) dengan rentang gaji tertinggi mengacu pada jabatan profesional, meski pelaksanaan dilakukan bertahap sesuai kemampuan keuangan negara.

7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan.

Membangun dari desa menjadi strategi utama dalam pembangunan nasional. Untuk itu, program terkait pembangunan desa yang sudah dilaksanakan harus dilanjutkan dan ditingkatkan, termasuk membangun rumah murah dengan sanitasi baik untuk masyarakat yang membutuhkan, menyalurkan dana desa secara langsung, dan dana kelurahan. Ditargetkan untuk dapat membangun/merenovasi rumah sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun dengan total nasional mencapai 3 juta rumah mulai pada tahun kedua.

8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Sebagian pembangunan ekonomi perlu dibiayai sebagian dari anggaran pemerintah. Anggaran pemerintah perlu ditingkatkan dari sisi penerimaan yang bersumber dari pajak dan bukan pajak (PNBP). Untuk itu, negara membutuhkan terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri. Pendirian Badan Penerimaan Negara ditargetkan meningkatkan rasio

penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 23%.

Dalam rangka mendukung 8 (delapan) Misi Asta Cita dan 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Tercepat Presiden dan Wakil Presiden, maka diterjemahkan ke dalam 17 (tujuhbelas) Program Prioritas sebagai berikut:

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air

Pangan, energi, dan air merupakan syarat utama dari kemandirian dan kedaulatan sebuah negara. Untuk itu, maka pencapaian swasembada pangan, energi, dan air harus dilakukan secara cepat dan seksama. Untuk program pangan di antaranya dengan pengembangan program food estate, terutama untuk padi, jagung, singkong, dan kedelai, dan tebu. Ditargetkan minimal 4 juta ha tambahan luas panen tanaman pangan tercapai pada tahun 2029. Untuk energi, Indonesia berpeluang bisa menjadi raja energi hijau dunia melalui pengembangan produk bio- diesel dan bio-avtur dari sawit, bio- ethanol dari tebu dan singkong, serta energi hijau lainnya dari angin, matahari, dan panas bumi. Pada tahun 2029 dengan sumber daya alam yang ada, sangat optimis program biodiesel B50 dan campuran ethanol E10 akan dapat tercapai. Kecukupan air akan dijamin melalui manajemen air yang baik sehingga tersedia pada saat kemarau dan tidak menyebabkan bencana saat musim hujan.

2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara, Pemerintah.

Pemerintah akan melaksanakan amanah konstitusi UUD 1945 pasal 23A secara taat asas sehingga dipandang perlu untuk meningkatkan kapasitas lembaga penerimaan negara. Diharapkan lembaga ini mampu memberikan kontribusi positif terhadap upaya mendapatkan sumber pembiayaan pembangunan berkelanjutan.

3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi

Politik adalah unsur penting dari kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa agar peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat diakomodasi dengan baik. Untuk itu, diperlukan upaya meminimalisasi sistem politik yang serta meningkatkan kesetaraan dan kemudahan dalam akses politik. Kesamaan hak setiap orang di mata hukum dan kepastian penegakan hukum merupakan salah satu prasyarat stabilitas ekonomi dan demokrasi. Birokrasi yang efisien, profesional, dan berintegritas merupakan penunjang yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Digitalisasi dengan satu data terpadu dipastikan akan sangat membantu efisiensi dan kesatuan pengelolaan, serta

pembinaan karir.

4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi

Korupsi menyebabkan kebocoran diberbagai aspek pembiayaan dalam pembangunan negara dan mengakibatkan rusaknya perekonomian negara serta sendi sendi kehidupan sosial masyarakat Oleh karena itu, pemberantasan korupsi seimbang antara pencegahan dan penindakan perlu secara terstruktur dilakukan. Pemberantasan korupsi seimbang menitik beratkan pada menghilangkan keuntungan pada pelaku sekaligus mengupayakan pemulihan kerugian keuangan negara. Bila kebijakan ini dapat dilakukan dengan seksama, maka akan diperoleh manfaat ekonomi yang merata dan efisien, tambahan pembiayaan pemerintah serta percepatan kemajuan negara.

5. Pemberantasan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan cerminan dari kurangnya akses terhadap hasil pembangunan bagi masyarakat. Kemiskinan juga menjadi akar masalah dari tumbuhnya berbagai tindak kriminal dan permasalahan sosial, termasuk lahirnya generasi yang kurang berkualitas. Untuk itu, pemberantasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama kebijakan pemerintah. Upaya pemberantasan kemiskinan ekstrim menuju 0% perlu dilakukan sesegera mungkin dalam 2 tahun pertama pemerintahan. Sementara untuk kemiskinan relatif ditargetkan di bawah 6% di akhir 2029.

6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba.

Penggunaan narkoba adalah salah satu penyakit sosial masyarakat yang dapat menghancurkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Untuk itu, langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan peredaran dan penggunaan narkoba harus dilakukan secara tepat sasaran dan menyeluruh dimulai dari kesadaran dalam keluarga.

7. Pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan obat untuk rakyat.

Akses pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas akan sangat membantu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Program BPJS Kesehatan yang sedang diselenggarakan saat ini perlu ditingkatkan dan didukung dengan penyediaan obat bagi seluruh rakyat. Untuk itu, peningkatan program BPJS Kesehatan dan ketersediaan obat menjadi perhatian utama Pemerintah.

8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi.

Kemajuan sebuah bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan, serta penguasaan sains dan teknologi. Inovasi akan lahir seiring dengan kemajuan di bidang tersebut. Untuk itu, dana riset dan inovasi akan diupayakan mencapai 1.5-2.0% dari PDB dalam 5 tahun. Untuk itu, kebijakan pemerintah dalam berinvestasi yang mendukung pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi merupakan suatu keharusan dalam memperkuat kemandirian bangsa. Ini dilakukan diantaranya melalui pengembangan dana abadi pendidikan, dana abadi pesantren, dana abadi kebudayaan, dan dana abadi lembaga swadaya masyarakat (LSM).

9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.

Kemakmuran dan kehidupan yang damai akan tercipta dalam keadaan negara yang kondusif dan aman. Negara yang kuat mampu melakukan dan menciptakan apapun yang dicita-citakan dan akan disegani dalam hubungan antarbangsa yang bermartabat.

10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.

Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif, negara memiliki peran utama dalam penguatan gender, dan perlindungan hak perempuan anak serta penyandang disabilitas dengan mendorong kebijakan dan insentif yang melindungi hak-hak perempuan dan kaum penyandang disabilitas, termasuk hak pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik, pemerintah dapat meniadakan diskriminasi gender dalam berkontribusi penuh terhadap pembangunan negara. Pemerintah juga perlu lebih intensif dalam memberikan perlindungan yang cukup untuk tumbuh kembang anak-anak, termasuk kecukupan gizi.

11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup.

Dalam upaya pembangunan dan peningkatan ekonomi negara, kepastian, keberlanjutan dan pelestarian lingkungan hidup menjadi prioritas utama untuk menjamin generasi mendatang dapat hidup sehat dan nyaman. Oleh karena itu, percepatan pencapaian komitmen terhadap target pembangunan berkelanjutan termasuk percepatan pencapaian target Net Zero emisi GRK akan dilaksanakan. Diantaranya juga dengan mengupayakan penurunan jejak karbon (carbon footprint) dan jejak air (water footprint) untuk berbagai produk. Selain itu, pemanfaatan bioplastik dalam kehidupan sehari-hari perlu

diupayakan sesegera mungkin.

12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke Petani.

Swasembada pangan ditentukan oleh tercapainya produksi dan produktivitas yang berkelanjutan dari komoditas pangan. Produksi dan produktivitas pangan akan sangat ditentukan oleh tersedianya dan akses yang menyeluruh petani pada pupuk, benih unggul, dan pestisida. Untuk itu, pemerintah berkewajiban untuk menjamin ketersediaan termasuk akses langsung pupuk, benih, dan pestisida kepada petani.

13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan.

Tempat tinggal yang layak dan terjangkau merupakan hak dasar setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga bisa menguatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi masyarakat miskin, serta mengurangi ketimpangan. Pemerintah harus hadir memberikan perumahan yang terjangkau dan sanitasi yang layak bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan target membangun atau merenovasi sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun akan dapat dicapai sebanyak 3 juta rumah mulai tahun kedua.

14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Salah satu kunci pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Penguatan skala ekonomi dan pembangunan kelembagaan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta kewirausahaan merupakan langkah-langkah penting pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi. Penguatan program Kredit Usaha Tani Perternakan, Perikanan, Perkebunan, Produksi Pangan Rakyat, -Nelayan, Pesisir, Industri Hilir UKM, Kredit untuk usaha Start Up dan kredit untuk para millennial akan didorong, diperluas, dan diperbanyak untuk dapat menumbuhkan wirausaha- wirausaha baru, terutama di kalangan anak muda.

15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas- luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.

Melanjutkanhilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA), termasuk di sekitar maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas- luasnya

dalam mewujudkan keadilan ekonomi Upaya hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA akan meningkatkan nilai tambah, lapangan pekerjaan, dan efek pengganda lainnya. Tidak saja secara ekonomi, tetapi juga efek pengganda sosial. Upaya hilirisasi dilakukan dengan memastikan terjadinya transfer teknologi, mengembangkan SDM lokal, dan, menjaga lingkungan. Hilirisasi terbukti telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan di wilayah yang memiliki SDA dan mendorong pemerataan ekonomi serta industrialisasi di wilayah timur Indonesia. Hilirisasi yang sudah dilaksanakan seperti hilirisasi produk nikel akan dilanjutkan dan akan ditambah dengan hilirisasi bauksit, tembaga, timah, produk agro, serta produk maritim. Pemanfaatan sektor maritim juga perlu diperkuat untuk dapat menunjang proses industrialisasi dan pengembangan ekonomi biru.

16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah.

Menjaga kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerukunan yang tercipta akan membuat negara kuat, aman, dan harmonis

17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan prestasi olahraga.

Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga Budaya adalah bagian integral dari identitas bangsa, dan pelestariannya membantu melindungi warisan budaya yang berharga. Penyediaan dana abadi kebudayaan akan menjamin pelestarian budaya secara berkelanjutan. Program pelestarian budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga akan mengangkat citra Indonesia di tingkat internasional. Peningkatan ekonomi kreatif melalui seni, musik, film, dan industri kreatif lainnya juga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 menetapkan Arah pembangunan yang termuat dalam RKP dapat menjadi acuan bagi Badan Usaha (BUMN/Swasta) dan *Non-State Actor* untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2026: **“Peningkatan Produktivitas untuk**

Swasembada Pangan dan Energi, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Tema ini menekankan pentingnya ketahanan pangan dan energi sebagai dasar pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dan tema ini juga mencerminkan strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan domestik dan menjawab tantangan global melalui 2 (dua) pilar utama meliputi:

- 1). Kedaulatan Pangan dan Energi: Menekankan pentingnya kemandirian dalam sektor pangan dan energi untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan nasional.
- 2). Ekonomi yang Produktif dan Inklusif: Bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata, dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan

Gambaran sederhana strategi pencapaian tema pembangunan Nasional Tahun 2026 dapat dilihat seperti pada gambar dibawah Ini



Gambar 4.3 Rencana Kerja Pemerintah 2026

Sumber ; Bappenas RI, 2025

Upaya kolaborasi multi sektor perlu ditingkatkan untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing, sesuai tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Tema ini merupakan respons atas dinamika global yang tengah berlangsung seperti krisis pangan dan energi, tantangan perubahan iklim, transformasi teknologi, serta tuntutan terhadap pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata. Oleh karena itu, strategi pembangunan nasional tahun 2026 disusun dalam tiga pilar utama: Pangan dan Energi, Ekonomi Produktif, dan Ekonomi Inklusif.

Pilar pertama, Pangan dan Energi, menekankan pada strategi swasembada

pangan, energi, dan air. Upaya ini mencakup optimalisasi peran BULOG dalam distribusi dan stabilisasi harga pangan, pelaksanaan program food estate sebagai lumbung pangan nasional, serta peningkatan bauran energi berbasis biofuel seperti etanol dan biodiesel. Selain itu, pengembangan energi terbarukan dan sistem penyediaan air minum (SPAM) yang terintegrasi dari hulu ke hilir menjadi bagian dari transisi energi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara berkelanjutan. Pilar ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan nasional terhadap gejolak global, serta memastikan ketersediaan sumber daya vital bagi pertumbuhan jangka panjang.

Selanjutnya, pilar Ekonomi Produktif difokuskan pada peningkatan daya saing nasional melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, teknologi, serta tata kelola pemerintahan. Strategi utamanya mencakup penyediaan ekosistem makanan bergizi gratis di sekolah, percepatan renovasi fasilitas pendidikan, serta pembangunan rumah sakit unggulan di tingkat kabupaten/kota. Di sisi lain, adopsi teknologi dan inovasi didorong melalui transformasi digital serta penguatan riset dan inovasi. Pemerintah juga menekankan pentingnya pertahanan semesta melalui pemenuhan kebutuhan alutsista dan peningkatan kemampuan teritorial. Untuk mendukung iklim usaha, dilakukan reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi, serta peningkatan kepastian hukum bagi investor. Keseluruhan langkah ini diperkuat dengan kebijakan fiskal yang adaptif dan pengelolaan makroekonomi yang stabil.

Terakhir, pilar Ekonomi Inklusif diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta memperkuat upaya pengentasan kemiskinan. Strategi percepatan pertumbuhan ekonomi dilaksanakan melalui hilirisasi sumber daya alam oleh entitas nasional, optimalisasi potensi investasi oleh sovereign wealth fund (SWF) termasuk Danantara, serta penguatan koperasi. Sementara itu, percepatan pengentasan kemiskinan ditempuh melalui konsolidasi data kemiskinan tunggal, digitalisasi bantuan sosial yang ditargetkan menjangkau 3 juta rumah, serta penguatan koperasi merah putih sebagai wadah pemberdayaan ekonomi rakyat.

Secara keseluruhan, strategi pembangunan nasional tahun 2026 menggambarkan upaya terpadu untuk mengatasi tantangan domestik dan global, dengan menekankan keseimbangan antara pertumbuhan, pemerataan, dan keberlanjutan. Sinergi antara ketiga pilar tersebut menjadi arah kebijakan nasional yang harus dijadikan acuan oleh pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Halmahera Timur, dalam menyusun program dan kegiatan yang selaras serta berdampak nyata

bagi kesejahteraan masyarakat. Secara lebih rinci, target pembangunan nasional tahun 2026 mencakup berbagai indikator makro dan sektoral strategis yang menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah yang dapat dilihat seperti gambar di bawah ini.

Tabel 4.2 Sasaran Pembangunan Nasional 2026

No	Uraian	Tahun		
		2024	2025	2026
A	Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan			
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,03	5,3	5,8 – 6,3
2	GNI Per Capita	5.000	5.410	5.870
3	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	34,09	35,53	37,14
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,54	76,49	76,67
B	Penurunan Kemiskinan			
1	Tingkat Kemiskinan (%)	8,57	7,0 – 8,0	6,5 – 7,5
2	Kemiskinan Ekstrem (%)	0,83	0	0
3	Rasio Gini	0,373	0,379 – 0,382	0,377 – 0,380
C	Sumber Daya Manusia			
1	Indeks Modal Manusia	0,54	0,56	0,57

Sumber: Bappenas RI, 2025

Berdasarkan tabel sasaran pembangunan nasional tahun 2026, terlihat bahwa arah kebijakan pembangunan nasional difokuskan pada tiga hal utama: pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Target pertumbuhan ekonomi nasional dipatok dalam kisaran 5,8–6,3 persen, dengan harapan peningkatan pendapatan per kapita hingga USD 5.870. Di sisi lingkungan, target penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) mencapai 37,14 persen, sementara indeks kualitas lingkungan hidup ditingkatkan menjadi 76,67. Sasaran ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah terhadap pembangunan yang inklusif sekaligus ramah lingkungan. Dalam aspek sosial, penurunan tingkat kemiskinan nasional ditargetkan berada pada rentang 6,5–7,5 persen dengan eliminasi total terhadap kemiskinan ekstrem. Rasio Gini diturunkan menjadi 0,377–0,380 sebagai indikator perbaikan ketimpangan distribusi pendapatan. Pada dimensi pengembangan manusia, indeks modal manusia juga ditingkatkan menjadi 0,57 sebagai cerminan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan penduduk. Seluruh indikator ini menegaskan bahwa pembangunan nasional tahun 2026 dirancang untuk memperkuat fondasi kesejahteraan rakyat melalui pendekatan yang holistik dan berorientasi jangka panjang.

4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Maluku Utara

Pembangunan Provinsi Maluku Utara sebagaimana tertuang dalam Visi RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2025-2029, yaitu **“MENJAGA KEBERAGAMAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN MALUKU UTARA BANGKIT, MAJU, SEJAHTERAH, BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN”**

Maluku Utara Menjaga Keberagaman, mengandung arti Menunjukkan perekat sakti Bhineka Tunggal Ika dalam setiap pandangan, langkahnya untuk menciptakan harmonisasi sosial, dan pluralisme.

Maluku Utara Pemerataan Pembangunan, mengandung arti; Mewujudkan pemerataan akses dan kualitas pembangunan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat Maluku Utara.

Maluku Utara Bangkit, mengandung arti Menunjukkan semangat untuk kebangkitan dan pemulihan, mencerminkan tekad untuk mengatasi berbagai tantangan dan kesulitan, serta berusaha untuk berkembang dan maju

Maluku Utara Maju, Mengacu pada pengelolaan sumber daya dan pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem.

Maluku Utara Sejahtera, Menggambarkan tujuan untuk mencapai kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat, termasuk dalam hal ekonomi, sosial, dan kualitas hidup. Ini berarti adanya upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Maluku Utara Berkeadilan, Menekankan pentingnya keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk distribusi sumber daya, kesempatan, dan perlakuan yang adil untuk semua pihak tanpa diskriminasi.

Maluku Utara Berkelanjutan, Ini mencakup upaya menjaga dan melestarikan sumber daya alam, meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, serta memastikan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial dapat terus berlangsung tanpa merugikan generasi mendatang.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku Utara 2025 - 2029, maka ditetapkan misi pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan transformasi sosial melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul dan berdaya saing
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah melalui pengembangan dan hilirisasi sektor unggulan dan Ekonomi Kreatif
3. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang inklusif dan adaptif berorientasi pada kebutuhan masyarakat
4. Mewujudkan Prinsip Demokrasi, stabilitas keamanan dan stabilitas ekonomi
5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi berbasis kearifan lokal dalam tatanan masyarakat yang aman, nyaman dalam harmoni sosial untuk pembangunan yang berkelanjutan
6. Mewujudkan pengembangan wilayah berbasis kepulauan melalui penguatan infrastruktur dan sarana prasarana yang berkualitas dan berkeadilan.

Visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan daerah. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, yaitu berupahasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program-program pembangunan daerah. Dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah, maka pelaksanaan misi pembangunan RPJMD Provinsi Maluku Utara 2025-2029 diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan daerah.

Secara rinci, keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2029 direpresentasikan melalui indikator-indikator kinerja, sebagai berikut.

TUJUAN 1 – Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul dan berdaya saing melalui kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas, kesehatan gender, peran pemuda dan perlindungan sosial yang inklusif dan adaptif

SS-1: Mewujudkan Kesehatan Untuk Semua

SS-2: Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas

SS-3: Terwujudnya Perlindungan sosial yang adaptif dan Partisipatif Untuk

Menciptakan masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.

SS-4: Mewujudkan Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Peningkatan peran pemuda dalam Pembangunan.

TUJUAN 2 – Meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui Optimalisasi produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif yang inovatif dan berdaya saing. Tujuan dan sasaran yang kedua ini meliputi 2 (dua) sub sasaran, yaitu:

SS-5: Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan melalui hilirisasi dan pengembangan industri pengolahan berkelanjutan

SS-6: Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif melalui pertumbuhan wirausaha dan pelaku usaha yang inovatif dan berdaya saing

TUJUAN 3 – Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan melayani

SS-7: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan melayani.

TUJUAN 4 – Menerapkan Prinsip-prinsip Demokrasi secara konsisten dan berkelanjutan serta mewujudkan stabilitas ekonomi melalui pencegahan dan penanganan konflik secara efektif dan berkeadilan

SS-8: Meningkatnya ketahanan daerah melalui stabilitas keamanan, serta demokrasi yang berkelanjutan;

TUJUAN 5 – Peningkatan kemandirian pangan, ketahanan sosial, budaya dan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui pelestarian nilai-nilai kearifan lokal, penguatan harmoni sosial, serta pembangunan yang berwawasan lingkungan dalam menciptakan masyarakat yang aman, nyaman, dan tangguh terhadap berbagai perubahan.

SS-9: Meningkatnya ketahanan daerah melalui stabilitas keamanan, serta demokrasi yang berkelanjutan;

SS-10: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan

Tujuan 6 – Terwujudnya pengembangan wilayah yang terpadu dan merata berbasis kepulauan melalui penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang andal, berkualitas, dan berkeadilan guna mendukung peningkatan konektivitas, pelayanan

dasar, serta penguatan peran sofifi sebagai simpul strategis wilayah.

SS-11: Meningkatnya nilai tambah dan daya saing sektor pertanian serta kesejahteraan eko Meningkatnya kemandirian desa sebagai simpul pertumbuhan lokal di wilayah kepulauan dan perbatasan

SS-12: Meningkatnya cakupan dan kualitas infrastruktur dasar meliputi listrik, telekomunikasi, air bersih, perumahan, dan sanitasi.

SS-13: Terbangunnya dan meningkatnya konektivitas antar wilayah melalui infrastruktur transportasi

SS-14: Tersedianya sarana pendukung produktivitas masyarakat

Beberapa arahan pengembangan wilayah di Provinsi Maluku Utara untuk mendukung pencapaian sasaran Pembangunan Kabupaten Halmahera Timur

Tahun 2026, adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan kegiatan ekonomi dan peningkatan kerjasama antar daerah untuk mendorong pengembangan kawasan minapolitan dan kawasan strategis lainnya
2. Peningkatan kualitas sistem layanan transportasi public di internal kawasan perkotaan dalam mendukung mobilitas masyarakat dan akses ke simpul transportasi lainnya
3. Peningkatan konektivitas jalan menuju/dari kawasan strategis industri dan ekonomi kreatif melalui penguatan pengelolaan jalan daerah
4. Pemenuhan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman melalui peningkatan akses rumah tangga terhadap rumah layak huni terjangkau dan berkelanjutan.

4.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Halmahera Timur

Sesuai arah kebijakan RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025-2029, RKPD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025 menetapkan Arah kebijakan pembangunan daerah sebagai pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan daerah adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai Tema RKPD Tahun 2026: “**Memperkuat Fondasi Layanan dasar, tata kelola data dan kelembagaan pembangunan, serta regulasi daerah**”, maka arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Halmahera Timur diuraikan sebagai berikut.

- 1) Terwujudnya sumber daya manusia yang terdidik dan berkarakter melalui pemerataan akses pendidikan bermutu dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan berbasis potensi wilayah Upaya untuk mencapainya melalui program-program prioritas sebagai berikut:
 - a) Program Pengelolaan Pendidikan
 - b) Program Pengembangan Kurikulum
 - c) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
 - d) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - e) Program Pengembangan Kapsitas daya saing kepemudaan
 - f) Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
 - g) Program Pengembangan Kapsitas Kepramukaan
 - h) Program Pembinaan Perpustakaan
- 2) Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan terlindungi melalui penguatan layanan kesehatan dasar dan penguatan kualitas keluarga sebagai fondasi pembangunan sosial. . Upaya untuk mencapainya ditempuh melalui program-program prioritas sebagai berikut
 - a) Program Upaya Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

- b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
 - c) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
 - d) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
 - e) Program Pengendalian Penduduk
 - f) Program Pembinaan Keluarga Berencana
 - g) Program Pemberdayaan Sosial
 - h) Program Rehabilitasi Sosial
 - i) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- 3) Terwujudnya kapasitas fiskal daerah yang kuat dan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan asli daerah, optimalisasi aset, dan tata kelola keuangan yang efisien, inovatif, dan akuntabel. . Upaya untuk mencapainya ditempuh melalui program-program prioritas sebagai berikut
- a) Program Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - b) Program Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - c) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - d) Program Pengolahan Pendapatan Daerah
- 4) Terwujudnya struktur perekonomian daerah yang tangguh dan berkelanjutan melalui hilirisasi sumber daya alam, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan usaha mikro dan kecil. . Upaya untuk mencapainya ditempuh melalui program-program prioritas sebagai berikut
- a) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - b) Program Pengendalian izin Usaha Industri
 - c) Program Pengolahan Sistem Informasi Industri Nasional
 - d) Program Pengembangan UMKM
 - e) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
 - f) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
 - g) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
 - h) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
 - i) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
 - j) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi



- k) Program Perencanaan Tenaga Kerja
- l) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- m) Program Penempatan Tenaga Kerja
- n) Program Hubungan Industrial
- o) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- p) Program Pemasaran Pariwisata
- q) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- r) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- s) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- t) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- u) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- v) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
- w) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- x) Program Pengembangan Ekspor
- 5) Terwujudnya kesejahteraan petani dan nelayan secara berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan yang terintegrasi dalam rantai nilai. . Upaya untuk mencapainya ditempuh melalui program-program prioritas sebagai berikut
 - a) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - b) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - c) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - d) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - e) Program Perizinan Usaha Pertanian
 - f) Program Penyuluhan Pertanian
 - g) Program Pengelolaan Perikanan Tangka
 - h) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - i) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



- j) Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - k) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
 - l) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - m) Program Penanganan Kerawanan Pangan
 - n) Program Pengawasan Keamanan Pangan
- 6) Terwujudnya peningkatan akses masyarakat dan kelompok rentan terhadap sumber daya ekonomi produktif melalui perlindungan dan pemberdayaan yang adaptif, inklusif, dan lintas dimensi. Upaya untuk mencapainya ditempuh melalui program-program prioritas sebagai berikut
- a) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - b) Program Penanganan Bencana
 - c) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
- 7) Terwujudnya aparatur dan kelembagaan pemerintahan daerah yang profesional, berintegritas, dan adaptif melalui reformasi birokrasi, manajemen talenta strategis, serta penguatan budaya inovasi Upaya untuk mencapainya ditempuh melalui program-program prioritas sebagai berikut:
- a) Program Program Kepegawaian Daerah
 - b) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - c) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - d) Program Perekonomian dan Pembangunan
 - e) Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - f) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
 - g) Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - h) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - i) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

- j) Program Pengelolaan Arsip
 - k) Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - l) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 8) Terwujudnya sistem pemerintahan daerah berbasis elektronik yang aman, inklusif, dan terintegrasi melalui digitalisasi layanan, interoperabilitas data, serta penguatan infrastruktur teknologi informasi. Upaya untuk mencapainya ditempuh melalui program-program prioritas sebagai berikut:
- a) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 - b) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 - c) Program Pendaftaran Penduduk
 - d) Program Pencatatan Sipil
 - e) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - f) Program Pengelolaan Profil Kependudukan
 - g) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informas
 - h) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
 - i) Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
 - j) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- 9) Terwujudnya sistem regulasi dan perizinan daerah yang efektif, adaptif, transparan, adil, dan responsif melalui evaluasi berkala, penyederhanaan prosedur, serta penguatan budaya kepatuhan. Upaya untuk mencapainya ditempuh melalui program-program prioritas sebagai berikut:
- a) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
 - b) Program Pelayanan Penanaman Modal
 - c) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Moda
 - d) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- 10) Terwujudnya pelestarian, pengembangan dan pemajuan kebudayaan yang memperkuat identitas, nilai, dan ekspresi budaya lokal secara harmonis dan adaptif di seluruh wilayah. Upaya untuk mencapainya ditempuh melalui program-program prioritas sebagai berikut:
 - a) Program Pengembangan Kebudayaan
 - b) Program Pengembangan Kesenian Tradisional
 - c) Program Pembinaan Sejarah
 - d) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
 - e) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
- 11) Terwujudnya masyarakat yang harmonis, inklusif, dan setara gender melalui penguatan hak, partisipasi sosial, dan pemberdayaan kelompok rentan dalam pembangunan. Upaya untuk mencapainya ditempuh melalui program-program prioritas sebagai berikut:
 - a) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - b) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
 - c) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - d) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
 - e) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
 - f) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - g) Program Perlindungan Perempuan
 - h) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
 - i) Program Pemenuhan Hak Anak
 - j) Program Perlindungan Khusus Anak

- k) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- 12) Terwujudnya lingkungan hidup yang lestari dan ketangguhan terhadap bencana dan iklim melalui perlindungan ekosistem, edukasi lingkungan, dan penguatan kapasitas adaptasi masyarakat. Upaya untuk mencapainya ditempuh melalui program-program prioritas sebagai berikut:
 - a) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - b) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan hidup
 - c) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
 - d) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
 - e) Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - f) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH
 - g) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
 - h) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
 - i) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 - j) Program Pengelolaan Persampahan
 - k) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regiona
 - l) Program Pengelolaan Sumber Daya Air
 - m) Program Penanggulangan Bencana
 - n) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran
 - o) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

- 13) Terwujudnya layanan infrastruktur pelayanan dasar yang merata dan berkualitas melalui peningkatan akses air minum, sanitasi, perumahan layak, dan lingkungan yang sehat bagi masyarakat. Upaya untuk mencapainya ditempuh melalui program-program prioritas sebagai berikut:
- a) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - b) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - c) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
 - d) Program Pengembangan Perumahan
 - e) Program Kawasan Permukiman
 - f) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
 - g) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
- 14) Terwujudnya konektivitas antarwilayah yang efisien dan berkelanjutan melalui jaringan jalan dan layanan transportasi terpadu untuk mendukung mobilitas penduduk, barang, dan layanan dasar. Upaya untuk mencapainya ditempuh melalui program-program prioritas sebagai berikut:
- a) Program Penyelenggaraan Jalan
 - b) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - c) Program Pengelolaan Pelayaran
 - d) Program Pengelolaan Penerbangan
- 15) Terwujudnya kawasan strategis yang produktif dan berdaya saing secara berkeadilan melalui penataan ruang fungsional, efisiensi lahan, dan pengembangan pusat pertumbuhan dan investasi baru. Upaya untuk mencapainya ditempuh melalui program-program prioritas sebagai berikut:
- a) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - b) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - c) Program Promosi Penanaman Modal

- d) Program Pengembangan Permukiman
- e) Program Penataan Bangunan dan Gedung
- f) Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
- g) Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
- h) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- i) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
- j) Program Penataan Desa
- k) Program Peningkatan Kerja Sama Desa
- l) Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Prioritas-prioritas daerah tersebut dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan peran dari berbagai urusan/unsur pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 32 bidang urusan pemerintahan daerah yang terbagi dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, termasuk unsur-unsur pendukung (Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD), unsur-unsur penunjang (perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengelolaan perbatasan), unsur pengawasan, dan pemerintahan umum (Kesatuan Bangsa dan Politik).

BAB 5

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

2026

RKPD

BAB 5

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2026 diarahkan untuk melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, maka urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten adalah merupakan urusan konkuren yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, dan fungsi penunjang urusan pemerintahan serta fungsi lainnya yang menjadi kewenangan daerah, yaitu:

- 1) Urusan wajib pelayanan dasar, yang meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial
- 2) Urusan wajib non pelayanan dasar, yang meliputi: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan
- 3) Urusan pilihan, yang terdiri dari: kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi
- 4) Unsur pendukung, penunjang dan pengawasan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari: sekretariat daerah, sekretariat DPRD, perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan; serta unsur kewilayahan (kecamatan), dan unsur pemerintahan umum.

Untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan pada Tahun 2026, ditetapkan rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatif pendanaannya. Program dan kegiatan/sub kegiatan disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90



Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah tersebut telah dimutakhirkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program dan kegiatan prioritas dilaksanakan baik melalui belanja operasi maupun belanja modal yang dikelompokkan berdasarkan tugaspokok dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana kerja dan pendanaan pembangunan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, dengan pendanaan bersumber dari PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rincian prioritas program dan kegiatan/sub kegiatan serta pagu indikatif RKPD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2026 sebagaimana tersaji dalam tabel 5.1.



Tabel 5.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah yang Disertai Kebutuhan Pendanaan RKPD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2026

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)		PERANGKAT DAERAH
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				163.950.391.520		168.049.151.309	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				136.794.093.720		140.225.838.119	
Tingkat Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Perangkat Daerah (persen)	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	100	100	136.794.093.720	100	140.225.838.119	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				65.000.000		68.250.000	
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	65.000.000	1	68.250.000	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		
1.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				45.000.000		47.250.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	45.000.000	1	47.250.000	
1.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				20.000.000		21.000.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	20.000.000	1	21.000.000	
1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				134.424.411.520		137.785.021.809	
Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.342	1.400	134.424.411.520	1.400	137.785.021.809	
1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				134.424.411.520		137.785.021.809	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.342	1.400	134.424.411.520	1.400	137.785.021.809	
1.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.110.000.000		1.165.500.000	
Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	1.110.000.000	1	1.165.500.000	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	2	2		2		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Kelengkapan (Paket)				
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	38	40	43	
1.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			150.000.000	157.500.000	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	2	150.000.000	157.500.000
1.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			240.000.000	252.000.000	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	240.000.000	252.000.000
1.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			720.000.000	756.000.000	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	38	40	720.000.000	756.000.000
1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			595.782.200	625.571.310	
Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	595.782.200	625.571.310
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	1	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	
1.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi			23.000.000	24.150.000	
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	23.000.000	24.150.000
1.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor			165.000.000	173.250.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	165.000.000	173.250.000
1.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			57.782.200	60.671.310	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	57.782.200	60.671.310
1.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			350.000.000	367.500.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	350.000.000	12	367.500.000
1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				352.000.000		322.250.000
Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	20	352.000.000	15	322.250.000
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	13	20		20	
1.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				127.000.000		86.000.000
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	20	127.000.000	15	86.000.000
1.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				225.000.000		236.250.000
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	13	20	225.000.000	20	236.250.000
1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				96.900.000		101.745.000
Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	96.900.000	12	101.745.000
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12	
1.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				15.000.000		15.750.000
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	15.000.000	12	15.750.000
1.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				42.500.000		44.625.000
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	42.500.000	12	44.625.000
1.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				39.400.000		41.370.000
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	39.400.000	12	41.370.000
1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				150.000.000		157.500.000
Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	1	150.000.000	1	157.500.000
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	1	1		1	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)				
1.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			110.000.000	115.500.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	110.000.000	115.500.000
1.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			40.000.000	42.000.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	1	40.000.000	42.000.000
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			26.754.047.800	27.258.790.690	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah dan mutu layanan pendidikan	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) (%)	8	8,8	26.754.047.800	9
1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			11.112.793.700	11.820.536.590	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	62	4	9.456.554.100	4
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	4	4		4
	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	39	13		14
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	11.765	15.553		15.553
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	30	4		4
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	34	5		5
	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	6	8		8
	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	25	2		2
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	48	4		4
	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	204	20		30
	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru,	74	17		15



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit)				
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	58	3	3	
	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1	2	2	
	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	101	102	102	
1.01.02.2.01.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			252.000.000	264.600.000	
Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1	2	252.000.000	264.600.000
1.01.02.2.01.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			700.000.000	735.000.000	
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	30	4	700.000.000	735.000.000
1.01.02.2.01.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			700.000.000	735.000.000	
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	48	4	700.000.000	735.000.000
1.01.02.2.01.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah			150.000.000	157.500.000	
Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	62	4	150.000.000	157.500.000
1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			600.000.000	630.000.000	
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	58	3	600.000.000	630.000.000
1.01.02.2.01.0007 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			75.000.000	112.500.000	
Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	204	20	75.000.000	112.500.000
1.01.02.2.01.0013 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			340.000.000	300.000.000	
Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit)	74	17	340.000.000	300.000.000
1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah			546.000.000	588.000.000	
Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	39	13	546.000.000	588.000.000
1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			2.463.794.100	2.622.323.990	
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	101	102	2.463.794.100	2.622.323.990
1.01.02.2.01.0031 - Pembangunan			600.000.000	630.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
Laboratorium Sekolah Dasar						
Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	25	2	600.000.000	2	630.000.000
1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				150.000.000		150.000.000
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	4	4	150.000.000	4	150.000.000
1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru				187.500.000		187.500.000
Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	34	5	187.500.000	5	187.500.000
1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				160.000.000		168.000.000
Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	6	8	160.000.000	8	168.000.000
1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				2.532.260.000		2.858.873.000
Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	11.765	15.553	2.532.260.000	15.553	2.858.873.000
Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1	1	1.656.239.600	1	1.681.239.600
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	250	250		250	
	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	101	102		102	
	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	101	102		102	
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	101	102		102	
	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	190	102		102	
1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				156.239.600		156.239.600
Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	190	102	156.239.600	102	156.239.600



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
Akademik (Peserta Didik)						
1.01.02.2.01.0030 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			360.000.000	360.000.000		
Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	101	102	360.000.000	102	360.000.000
1.01.02.2.01.0035 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			300.000.000	315.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	250	250	300.000.000	250	315.000.000
1.01.02.2.01.0037 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			370.000.000	370.000.000		
Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	101	102	370.000.000	102	370.000.000
1.01.02.2.01.0043 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			270.000.000	270.000.000		
Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1	1	270.000.000	1	270.000.000
1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			200.000.000	210.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	101	102	200.000.000	102	210.000.000
1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			8.522.662.200	8.519.662.200		
Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	4	4	7.090.534.000	4	7.087.534.000
	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	52	9		10	
	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	29	5		7	
	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	11.474	8.474		8.474	
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	41	10		9	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	20	3	3	
	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	30	7	8	
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	24	5	4	
	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	92	10	12	
	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	43	5	5	
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	38	6	6	
	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	3	2	2	
	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	46	47	47	
1.01.02.2.02.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			200.000.000	200.000.000	
Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	3	2	200.000.000	200.000.000
1.01.02.2.02.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			30.000.000	27.000.000	
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	41	10	30.000.000	27.000.000
1.01.02.2.02.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			30.000.000	30.000.000	
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	24	5	30.000.000	30.000.000
1.01.02.2.02.0006 - Pembangunan Laboratorium			24.000.000	24.000.000	
Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	30	7	24.000.000	24.000.000
1.01.02.2.02.0009 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			300.000.000	300.000.000	
Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	92	10	300.000.000	300.000.000
1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			150.000.000	150.000.000	
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	38	6	150.000.000	150.000.000
1.01.02.2.02.0021 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			100.000.000	100.000.000	
Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga	Jumlah Rumah Dinas Kepala	43	5	100.000.000	100.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)				
1.01.02.2.02.0027 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah			119.000.000	119.000.000	
Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	29	5	119.000.000	7
1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama			2.575.960.000	2.575.960.000	
Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	11.474	8.474	2.575.960.000	8.474
1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			2.950.574.000	2.950.574.000	
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	46	47	2.950.574.000	47
1.01.02.2.02.0046 - Pemeliharaan Mebel Sekolah			378.000.000	378.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	52	9	378.000.000	10
1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			128.000.000	128.000.000	
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	4	4	128.000.000	4
1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru			105.000.000	105.000.000	
Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	20	3	105.000.000	3
Rata-rata kemampuan Literasi dan Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1	1	1.432.128.200	1
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	250	250	250	
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	47	47	47	
	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	47	47	47	
	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	94	95	95	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	94	94	94	
1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			167.128.200	167.128.200	
Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	94	95	167.128.200	95
1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			350.000.000	350.000.000	
Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	94	94	350.000.000	94
1.01.02.2.02.0048 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			250.000.000	250.000.000	
Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	250	250	250.000.000	250
1.01.02.2.02.0050 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			240.000.000	240.000.000	
Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	47	47	240.000.000	47
1.01.02.2.02.0055 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			225.000.000	225.000.000	
Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1	1	225.000.000	1
1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			200.000.000	200.000.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	47	47	200.000.000	47
1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			6.293.231.900	6.293.231.900	
Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	65	9	5.263.231.900	8
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan	1	1	1	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	di Bidang Pendidikan (Dokumen)				
	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	97	97	97	
	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	97	97	97	
	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	9.068	7.120	7.120	
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	22	1	1	
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	60	3	3	
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	20	5	3	
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	2	2	2	
1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			450.000.000	450.000.000	
Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	2	2	450.000.000	450.000.000
1.01.02.2.03.0011 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD			1.136.000.000	1.136.000.000	
Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	9.068	7.120	1.136.000.000	1.136.000.000
1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD			2.300.000.000	2.300.000.000	
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	97	97	2.300.000.000	2.300.000.000
1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			57.231.900	57.231.900	
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1	57.231.900	57.231.900
1.01.02.2.03.0028 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			360.000.000	360.000.000	
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	22	1	360.000.000	360.000.000
1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru			105.000.000	105.000.000	
Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	60	3	105.000.000	105.000.000
1.01.02.2.03.0031 - Penyediaan infrastruktur TIK			485.000.000	485.000.000	
Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	97	97	485.000.000	485.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD			270.000.000	270.000.000	
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	65	9	270.000.000	8
1.01.02.2.03.0050 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			100.000.000	100.000.000	
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	20	5	100.000.000	3
Rata-rata kemampuan Literasi dan Numerasi PAUD berdasarkan Asesmen Nasional	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1	1.030.000.000	1
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	97	97		97
	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	97	97		97
	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	90	94		94
1.01.02.2.03.0019 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD			340.000.000	340.000.000	
Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	90	94	340.000.000	94
1.01.02.2.03.0024 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			290.000.000	290.000.000	
Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	97	97	290.000.000	97
1.01.02.2.03.0026 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			250.000.000	250.000.000	
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1	250.000.000	1
1.01.02.2.03.0039 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			150.000.000	150.000.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	97	97	150.000.000	97
1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			825.360.000	625.360.000	
Angka Partisipasi Sekolah (APS)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	0	1	825.360.000	0



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Sedang/Berat (Unit)				
	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	2.231	2.231	2.231	
1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			625.360.000	625.360.000	
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	2.231	2.231	625.360.000	2.231 625.360.000
1.01.02.2.04.0041 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			200.000.000	0	
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	0	1	200.000.000	0 0
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			126.250.000	127.512.500	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	25	30,3	126.250.000	33,3 127.512.500
1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			72.142.858	72.864.287	
Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku)	1.490	2.300	72.142.858	2.300 72.864.287
	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	1	1	1	
	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun (Dokumen)	1	1	1	
	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	1	1	1	
1.01.03.2.01.0002 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar			18.035.716	18.216.074	
Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	1	1	18.035.716	1 18.216.074
1.01.03.2.01.0003 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar			18.035.714	18.216.071	
Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku)	1.490	2.300	18.035.714	2.300 18.216.071
1.01.03.2.01.0006 - Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar			18.035.714	18.216.071	
Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun (Dokumen)	1	1	18.035.714	1 18.216.071
1.01.03.2.01.0007 - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar			18.035.714	18.216.071	
Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian	1	1	18.035.714	1 18.216.071



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)					
1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			54.107.142	54.648.213		
Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia (Buku)	3.000	1.600	54.107.142	54.648.213	
	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	1	1	1		
	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	1	1	1		
1.01.03.2.02.0002 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			18.035.714	18.216.071		
Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	1	1	18.035.714	18.216.071	
1.01.03.2.02.0003 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			18.035.714	18.216.071		
Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia (Buku)	3.000	1.600	18.035.714	18.216.071	
1.01.03.2.02.0006 - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			18.035.714	18.216.071		
Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	1	1	18.035.714	18.216.071	
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			175.000.000	155.000.000		
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase PNS yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi (S1/S2/S3) (%)	1.230	1.350	175.000.000	155.000.000	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			175.000.000	155.000.000		
Proporsi pembelanjaan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan Rata-rata dari	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	1	175.000.000	155.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)		PERANGKAT DAERAH
persentase nilai pembelanjaan sekolah untuk peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan dibagi total belanja sekolah dalam satu tahun anggaran BOS	Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)					
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	1	1	1		
1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				87.500.000	77.500.000	
Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	1	1	87.500.000	1	77.500.000
1.01.04.2.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				87.500.000	77.500.000	
Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	1	1	87.500.000	1	77.500.000
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				101.000.000	102.010.000	
Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/Diperbarui	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	243	250	101.000.000	250	102.010.000
1.01.05.2.01 - Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				33.666.666	34.003.333	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
Persentase penerbitan izin Operasional satuan pendidikan dasar (Dengan Satuan:%)	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1	1	33.666.666	1	34.003.333
1.01.05.2.01.0001 - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				33.666.666	34.003.333	
Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1	1	33.666.666	1	34.003.333
1.01.05.2.02 - Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				67.333.334	68.006.667	
Persentase penerbitan izin Operasional satuan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan	1	1	67.333.334	1	68.006.667



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
PAUD dan Pendidikan Non Formal (Dengan Satuan:%)	Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)				
	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1	1	1	
1.01.05.2.02.0001 - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			33.666.666	34.003.333	
Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1	1	33.666.666	34.003.333
1.01.05.2.02.0003 - Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			33.666.668	34.003.334	
Terlaksananya Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1	1	33.666.668	34.003.334
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA			0	180.000.000	
Meningkatnya pelestarian bahasa dan sastra daerah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	1	1	0	180.000.000
1.01.06.2.01 - Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			0	180.000.000	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
Bahasa daerah yang didokumentasikan dan direvitalisasi	Jumlah Kamus Bahasa Daerah kewenangan kabupaten/kota (Buku)	1		0	25.714.285
1.01.06.2.01.0009 - Penyusunan Kamus Bahasa Daerah			0	25.714.285	
Tersusunnya kamus bahasa daerah kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Kamus Bahasa Daerah kewenangan kabupaten/kota (Buku)	1		0	25.714.285
Karya ilmiah Berbahasa Daerah yang diterbitkan	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun (Dokumen)	1		0	51.428.570
	Jumlah media bahasa daerah terfasilitasi (Media)	1	0	1	
1.01.06.2.01.0007 - Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota			0	25.714.285	
Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun (Dokumen)	1		0	25.714.285
1.01.06.2.01.0011 - Fasilitasi media publik berbahasa daerah			0	25.714.285	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH	
Media publik berbahasa daerah terfasilitasi	Jumlah media bahasa daerah terfasilitasi (Media)	1	0	0	1	25.714.285
Penggunaan Bahasa Daerah yang Baik dan Benar	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi (Bahasa)	1	1	0	1	51.428.575
	Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan (Buku)	0	0		20	
1.01.06.2.01.0002 - Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota				0		25.714.290
Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi (Bahasa)	1	1	0	1	25.714.290
1.01.06.2.01.0008 - Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah				0		25.714.285
Terlaksananya Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah	Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan (Buku)	0	0	0	20	25.714.285
Tingkat partisipasi masyarakat	Jumlah sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan yang terbina di kab/kota (Orang)	0	0	0	50	51.428.570
	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan (Orang)	0	0		10	
1.01.06.2.01.0004 - Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota				0		25.714.285
Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Mendapat Penghargaan	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan (Orang)	0	0	0	10	25.714.285
1.01.06.2.01.0010 - Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan kab/kota				0		25.714.285
Terbinanya sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan di kab/kota	Jumlah sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan yang terbina di kab/kota (Orang)	0	0	0	50	25.714.285
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				111.069.575.160		113.846.314.540
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				63.022.943.460		64.408.835.340
Tingkat Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Perangkat				54.034.947.820		55.229.321.516
						1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Daerah (persen)					
1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.350.000.000	1.350.000.000	
jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	17	17	1.350.000.000	17
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	17	17		17
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	16	16		16
1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			500.000.000	500.000.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	17	17	500.000.000	17
1.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			350.000.000	350.000.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	17	17	350.000.000	17
1.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			500.000.000	500.000.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	16	16	500.000.000	16
1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			44.554.947.820	45.662.571.516	
tersedianya laporan keuangan daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	16	16	44.554.947.820	16
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12	12		12
1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			44.304.947.820	45.412.571.516	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12	12	44.304.947.820	12
1.02.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			250.000.000	250.000.000	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	16	16	250.000.000	16
1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			3.150.000.000	3.150.000.000	
presentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	16	16	3.150.000.000	16
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	12		12
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	16	16		16



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
	Administrasi Kepegawaian (Dokumen)					
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	40	40	40		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	40	40	40		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	75	75	75		
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	16	16	16		
1.02.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			400.000.000	400.000.000		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	16	16	400.000.000	16	400.000.000
1.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			150.000.000	150.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	75	75	150.000.000	75	150.000.000
1.02.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			400.000.000	400.000.000		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	16	16	400.000.000	16	400.000.000
1.02.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			450.000.000	450.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	16	16	450.000.000	16	450.000.000
1.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			450.000.000	450.000.000		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	12	450.000.000	12	450.000.000
1.02.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			650.000.000	650.000.000		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	40	40	650.000.000	40	650.000.000
1.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			650.000.000	650.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	40	40	650.000.000	40	650.000.000
1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.930.000.000	1.930.000.000		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	12		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	12	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	12	12	
1.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi			80.000.000	80.000.000	
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	80.000.000	80.000.000
1.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			400.000.000	400.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	400.000.000	400.000.000
1.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			100.000.000	100.000.000	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	12	100.000.000	100.000.000
1.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor			400.000.000	400.000.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	400.000.000	400.000.000
1.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			350.000.000	350.000.000	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	350.000.000	350.000.000
1.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			100.000.000	100.000.000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	100.000.000	100.000.000
1.02.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material			100.000.000	100.000.000	
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	12	12	100.000.000	100.000.000
1.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			400.000.000	400.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	400.000.000	400.000.000
1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.950.000.000	3.036.750.000	
Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.950.000.000	3.036.750.000
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12	12	12	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
	Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)					
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	50.000.000	12	126.750.000
1.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				400.000.000		400.000.000
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	400.000.000	12	400.000.000
1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.450.000.000		2.450.000.000
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.450.000.000	12	2.450.000.000
1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.000.000		100.000.000
Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	25	25	100.000.000	25	100.000.000
1.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.000.000		100.000.000
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	25	25	100.000.000	25	100.000.000
Tingkat Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Perangkat Daerah (persen)				8.987.995.640	9.179.513.824	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Rumah Sakit Umum Daerah
1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14.659.000		14.659.000
Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	2	14.659.000	1	14.659.000
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3.278.000	3.278.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	2	3.278.000	1
1.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2.822.000	2.822.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.822.000	1
1.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			2.199.000	2.199.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.199.000	1
1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.660.727.340	7.852.245.524	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	120	150	7.660.727.340	175
1.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			5.693.000	5.693.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	5.693.000	1
1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			52.126.000	52.126.000	
Persentase Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2	2	52.126.000	2
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1		1
1.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			50.000.000	50.000.000	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	50.000.000	1
1.02.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			2.126.000	2.126.000	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2	2	2.126.000	2
1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			231.797.800	231.797.800	
Persentase peningkatan kinerja administrasi perangkat daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	231.797.800	1
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	1	1		1



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)		PERANGKAT DAERAH
	Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)					
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2		2	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggunaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggunaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggunaan yang Disediakan (Paket)	1	1	20.580.000	1	20.580.000
1.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				8.380.000		8.380.000
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	8.380.000	1	8.380.000
1.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				63.816.000		63.816.000
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	63.816.000	1	63.816.000
1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				400.000.000		400.000.000
Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	10	400.000.000	10	400.000.000
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	4		4	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	6		8	
1.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				200.000.000		200.000.000
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	4	200.000.000	4	200.000.000
1.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				100.000.000		100.000.000
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	10	100.000.000	10	100.000.000
1.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000		100.000.000
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	6	100.000.000	8	100.000.000
1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				422.992.500		422.992.500
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	2	422.992.500	2	422.992.500
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1	
1.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.199.000		1.199.000
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1.199.000	1	1.199.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			421.793.500	421.793.500	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	2	421.793.500	2
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat			32.649.500.000	33.659.500.000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			4.430.000.000	3.910.000.000	
Persentase fasyankes pemerintah yg memiliki sarana prasarana kesehatan yang memenuhi standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	389	374	4.430.000.000	748
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	10.598	1.467		1.247
	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	64	64		64
	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	60	1		1
	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	60	1		1
	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	2.446	2.500		2.600
	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	2	20		30
	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan (Layanan)	3	4		4
	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center (Unit)	120	130		140
	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	16	17		17
	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana,	16	16		16



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)				
	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)	51	1	1	
	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1	1	1	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)	32	2	2	
	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	0	1	1	
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	0	1	1	
1.02.02.2.01.0002 - Pembangunan Puskesmas			500.000.000	250.000.000	
Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	16	17	500.000.000	250.000.000
1.02.02.2.01.0003 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya			200.000.000	250.000.000	
Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	60	1	200.000.000	250.000.000
Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	60	1	200.000.000	200.000.000
1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			200.000.000	200.000.000	
Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	0	1	200.000.000	200.000.000
1.02.02.2.01.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya			200.000.000	200.000.000	
Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	0	1	200.000.000	200.000.000
1.02.02.2.01.0011 - Rehabilitasi dan			100.000.000	100.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)		PERANGKAT DAERAH
Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan							
Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)	32	2	100.000.000	2	100.000.000	
1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				300.000.000		300.000.000	
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	10.598	1.467	300.000.000	1.247	300.000.000	
1.02.02.2.01.0015 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi				100.000.000		100.000.000	
Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center (Unit)	120	130	100.000.000	140	100.000.000	
1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				100.000.000		100.000.000	
Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	389	374	100.000.000	748	100.000.000	
1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit				800.000.000		730.000.000	
Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	2	20	500.000.000	30	250.000.000	
1.02.02.2.01.0024 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga				250.000.000		250.000.000	
Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	2.446	2.500	250.000.000	2.600	250.000.000	
1.02.02.2.01.0025 - Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)				250.000.000		250.000.000	
Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan (Layanan)	3	4	250.000.000	4	250.000.000	
1.02.02.2.01.0026 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke				100.000.000		100.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)		PERANGKAT DAERAH
Fasilitas Kesehatan							
Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	64	64	100.000.000	64	100.000.000	
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				27.601.500.000		29.131.500.000	
Persentase pelayanan kesehatan yang memenuhi standar untuk pelayanan SPM	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	6.326	7.130	27.601.500.000	7.891	29.131.500.000	
	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4.789	5.902		6.409		
	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.543	2.254		2.558		
	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota (Dokumen)	16	16		16		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	17	17		17		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	3	3		3		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	16	16		16		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	16	16		16		
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	16	16		16		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	1	1		1		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	1	1		1		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	16	16		16		
	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	1	1		1		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1	1		1		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)				
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	1	1	
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	16	16	16	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	16	16	16	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	16	16	16	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	16	16	16	
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	16	16	16	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	1	1	1	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	5	5	5	
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	17	17	17	
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	32	32	32	
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1	2	2	
	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	0			
	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	16	16	16	
	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.576	2.269	2.575	
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.993	2.271	2.578	
	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	1	1	1	
	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	26	124	129	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	50	60	65	
	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	159	273	237	
	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	684	2.405	2.421	
	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	433	1.329	1.152	
	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	1.130	2.200	2.400	
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	67	60	60	
	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Orang)	0	20	25	
	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.046	17.191	377	
	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2.117	17.191	17.517	
	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	6.692	6.964	7.101	
	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	14.479	65.908	66.845	
	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	0	20	25	
	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	17	17	17	
	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	21	21	21	
	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktivitas merokok (Tatanan)	24	30	32	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			250.000.000	250.000.000	
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.993	2.271	250.000.000	2.578
1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			300.000.000	300.000.000	
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.576	2.269	300.000.000	2.575
1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			250.000.000	250.000.000	
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.543	2.254	250.000.000	2.558
1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			250.000.000	250.000.000	
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4.789	5.902	250.000.000	6.409
1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			250.000.000	250.000.000	
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	6.326	7.130	250.000.000	7.891
1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			300.000.000	300.000.000	
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	14.479	65.908	300.000.000	66.845
1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			200.000.000	200.000.000	
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	6.692	6.964	200.000.000	7.101
1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			250.000.000	250.000.000	
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2.117	17.191	250.000.000	17.517
1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			250.000.000	250.000.000	
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.046	17.191	250.000.000	377
1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			300.000.000	300.000.000	
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	67	60	300.000.000	60



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)				
1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			300.000.000	300.000.000	
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	433	1.329	300.000.000	1.152
1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			250.000.000	250.000.000	
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	684	2.405	250.000.000	2.421
1.02.02.2.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			200.000.000	200.000.000	
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	1	1	200.000.000	1
1.02.02.2.02.0014 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			150.000.000	150.000.000	
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	1	1	150.000.000	1
1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			300.000.000	300.000.000	
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	16	16	300.000.000	16
1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			300.000.000	300.000.000	
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	1	300.000.000	1
1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			200.000.000	200.000.000	
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	1	200.000.000	1
1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			350.000.000	350.000.000	
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	16	16	350.000.000	16



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Promosi Kesehatan	Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)				
1.02.02.2.02.0019 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			200.000.000	200.000.000	
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	16	16	200.000.000	16
1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan			100.000.000	100.000.000	
Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	16	16	100.000.000	16
1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			350.000.000	350.000.000	
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	50	60	350.000.000	65
1.02.02.2.02.0022 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			150.000.000	150.000.000	
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	0	20	150.000.000	25
1.02.02.2.02.0024 - Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan			300.000.000	300.000.000	
Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	1	1	300.000.000	1
1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			700.000.000	700.000.000	
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	3	3	700.000.000	3
1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			12.000.000.000	12.000.000.000	
Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	16	16	12.000.000.000	16
1.02.02.2.02.0027 - Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah			200.000.000	200.000.000	
Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Orang)	0	20	200.000.000	25
1.02.02.2.02.0028 - Pengambilan dan			150.000.000	150.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						
Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	21	21	150.000.000	21	150.000.000
1.02.02.2.02.0029 - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				150.000.000		150.000.000
Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	5	5	150.000.000	5	150.000.000
1.02.02.2.02.0030 - Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				900.000.000		900.000.000
Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	16	16	900.000.000	16	900.000.000
1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit				150.000.000		150.000.000
Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1	2	150.000.000	2	150.000.000
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				3.470.000.000		5.000.000.000
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	32	32	3.470.000.000	32	5.000.000.000
1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				518.000.000		518.000.000
Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	17	17	518.000.000	17	518.000.000
1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				0		0
Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	0		0		0
1.02.02.2.02.0036 - Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				250.000.000		250.000.000
Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	1	1	250.000.000	1	250.000.000
1.02.02.2.02.0037 - Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				300.000.000		300.000.000
Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	17	17	300.000.000	17	300.000.000
1.02.02.2.02.0038 - Penyediaan dan				245.000.000		245.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)		PERANGKAT DAERAH
Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)							
Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	17	17	245.000.000	17	245.000.000	
1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				500.000.000		500.000.000	
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	159	273	500.000.000	237	500.000.000	
1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				200.000.000		200.000.000	
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	26	124	200.000.000	129	200.000.000	
1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				132.500.000		132.500.000	
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	1.130	2.200	132.500.000	2.400	132.500.000	
1.02.02.2.02.0043 - Pengelolaan Kawasan tanpa rokok				300.000.000		300.000.000	
Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	24	30	300.000.000	32	300.000.000	
1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				300.000.000		300.000.000	
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	16	16	300.000.000	16	300.000.000	
1.02.02.2.02.0045 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				300.000.000		300.000.000	
Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota (Dokumen)	16	16	300.000.000	16	300.000.000	
1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				300.000.000		300.000.000	
Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	16	16	300.000.000	16	300.000.000	
1.02.02.2.02.0047 - Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan				150.000.000		150.000.000	
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan (Dokumen)	16	16	150.000.000	16	150.000.000	
1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi				386.000.000		386.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH	
Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	16	16	386.000.000	16	386.000.000
1.02.02.2.02.0050 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				250.000.000		250.000.000
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	1	1	250.000.000	1	250.000.000
1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				300.000.000		300.000.000
Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	2	300.000.000	2	300.000.000
1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				300.000.000		300.000.000
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	2	300.000.000	2	300.000.000
1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				318.000.000		318.000.000
Persentase Peningkatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D Serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	1	1	318.000.000	1	318.000.000
	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	16	16		16	
	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	1	1		1	
1.02.02.2.04.0002 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000		150.000.000
Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	1	1	150.000.000	1	150.000.000
1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				150.000.000		150.000.000
Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	16	16	150.000.000	16	150.000.000
1.02.02.2.04.0004 - Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				18.000.000		18.000.000
Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	1	1	18.000.000	1	18.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan			5.894.631.700	6.205.979.200	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Rumah Sakit Umum Daerah	
1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			2.837.696.200	2.931.043.700		
Jumlah Unit Penyedia Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	0	5	2.837.696.200	5	2.931.043.700
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	2	5		5	
	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	0	2		2	
	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	0	1		1	
	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	15	25		30	
	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center (Unit)	100	150		160	
	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	0	1		1	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)	0	2		2	
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	0	2		2	
1.02.02.2.01.0003 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya			200.000.000	200.000.000		
Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	0	2	200.000.000	2	200.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
1.02.02.2.01.0007 - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya			150.000.000	150.000.000	
Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	0	1	150.000.000	1
1.02.02.2.01.0008 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit			200.000.000	200.000.000	
Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	0	2	200.000.000	2
1.02.02.2.01.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan			100.000.000	100.000.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)	0	2	100.000.000	2
1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			200.000.000	200.000.000	
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	2	5	200.000.000	5
1.02.02.2.01.0015 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi			100.000.000	150.000.000	
Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center (Unit)	100	150	100.000.000	160
1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			150.000.000	150.000.000	
Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	0	5	150.000.000	5
1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit			100.000.000	100.000.000	
Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	0	1	100.000.000	1



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			1.637.696.200	1.681.043.700		
Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	15	25	1.637.696.200	30	1.681.043.700
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.122.935.500	2.340.935.500		
Jumlah Layanan Kesehatan Untuk UMK Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1	1	2.122.935.500	1	2.340.935.500
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1	2		2	
	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	0	0		1	
1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit			2.022.935.500	2.040.935.500		
Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1	2	2.022.935.500	2	2.040.935.500
1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			100.000.000	100.000.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000
1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota			0	200.000.000		
Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	0	0	0	1	200.000.000
1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			594.000.000	594.000.000		
Jumlah Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi yang tersedia	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	2	594.000.000	2	594.000.000
1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			594.000.000	594.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	2	594.000.000	2	594.000.000
1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			340.000.000	340.000.000		
Persentase Peningkatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D Serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	1	1	340.000.000	1	340.000.000
	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan	0	1		1	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)				
	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	0	1	1	
	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	0	1	1	
1.02.02.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya			50.000.000	50.000.000	
Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	0	1	50.000.000	50.000.000
1.02.02.2.04.0002 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			70.000.000	70.000.000	
Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	0	1	70.000.000	70.000.000
1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			100.000.000	100.000.000	
Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	0	1	100.000.000	100.000.000
1.02.02.2.04.0004 - Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan			120.000.000	120.000.000	
Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	1	1	120.000.000	120.000.000
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			8.147.500.000	8.217.000.000	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan			915.500.000	935.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
1.02.03.2.01 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			430.500.000	450.000.000	
Persentase pelaksanaan pemberian izin praktik tenaga kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1	1	430.500.000	450.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	128	970	970	
1.02.03.2.01.0001 - Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan			250.000.000	250.000.000	
Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	128	970	250.000.000	970
1.02.03.2.01.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan			180.500.000	200.000.000	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1	1	180.500.000	1
1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			135.000.000	135.000.000	
Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	1	135.000.000	1
	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	1		1
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	316	643	970	
1.02.03.2.02.0001 - Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan			35.000.000	35.000.000	
Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	1	35.000.000	1
1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar			50.000.000	50.000.000	
Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	316	643	50.000.000	970
1.02.03.2.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			50.000.000	50.000.000	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia	1	1	50.000.000	1



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Kesehatan (Dokumen)					
1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			350.000.000	350.000.000	
Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	271	359	350.000.000	447
1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			350.000.000	350.000.000	
Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	271	359	350.000.000	447
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan			7.232.000.000	7.282.000.000	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Rumah Sakit Umum Daerah
1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			7.032.000.000	7.032.000.000	
Jumlah Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	16	26	7.032.000.000	31
1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar			7.032.000.000	7.032.000.000	
Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	16	26	7.032.000.000	31
1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			200.000.000	250.000.000	
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	15	30	200.000.000	35
1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah			200.000.000	250.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH		
Kabupaten/Kota							
Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	15	30	200.000.000	35	250.000.000	
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				255.000.000		255.000.000	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	0	0	255.000.000	0	255.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
1.02.04.2.01 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				100.000.000		100.000.000	
Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	3	3	100.000.000	3	100.000.000	
1.02.04.2.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				100.000.000		100.000.000	
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	3	3	100.000.000	3	100.000.000	
1.02.04.2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				45.000.000		45.000.000	
Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	20	20	45.000.000	20	45.000.000	
1.02.04.2.03.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman				45.000.000		45.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	20	20	45.000.000	20	45.000.000
1.02.04.2.04 - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						
Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	1	1	35.000.000	1	35.000.000
1.02.04.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	1	1	35.000.000	1	35.000.000
1.02.04.2.05 - Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan						
Persentase Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen)	0	20	25.000.000	20	25.000.000
1.02.04.2.05.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan						
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen)	0	20	25.000.000	20	25.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH		
1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			50.000.000	50.000.000			
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	30	30	50.000.000	30	50.000.000	
1.02.04.2.06.0001 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan			50.000.000	50.000.000			
Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	30	30	50.000.000	30	50.000.000	
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			1.100.000.000	1.100.000.000			
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	0	0	1.100.000.000	0	1.100.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			250.000.000	250.000.000			
Persentase Pelaksanaan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	16	16	250.000.000	16	250.000.000	
1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			250.000.000	250.000.000			
Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	16	16	250.000.000	16	250.000.000	
1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			350.000.000	350.000.000			
Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	16	16	350.000.000	16	350.000.000	
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan	2.446	2.600		2.700		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)				
1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			150.000.000	150.000.000	
Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	16	16	150.000.000	16
1.02.05.2.02.0002 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			200.000.000	200.000.000	
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	2.446	2.600	200.000.000	2.700
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			500.000.000	500.000.000	
Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1	1	500.000.000	1
1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			500.000.000	500.000.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1	1	500.000.000	1
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			179.698.802.530	179.991.763.643	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.969.055.260	4.030.956.642	
Tingkat Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Perangkat Daerah (persen)	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	60	62	3.969.055.260	63
1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100.000.000	100.000.000	
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	1	100.000.000	1
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan	5	1		1

1.03.0.00.0.00.01.0000
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)				
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5	1	1	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	20	4	4	
1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			25.000.000	25.000.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	1	25.000.000	1
1.03.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			25.000.000	25.000.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5	1	25.000.000	1
1.03.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			25.000.000	25.000.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5	1	25.000.000	1
1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25.000.000	25.000.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	20	4	25.000.000	4
1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.576.055.260	2.637.956.642	
Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	5	1	2.576.055.260	1
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5	1		1
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	10	2		2
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	10	2		2
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	60	70		70
1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.476.055.260	2.537.956.642	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	60	70	2.476.055.260	70	2.537.956.642
1.03.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan				25.000.000		25.000.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5	1	25.000.000	1	25.000.000
1.03.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				25.000.000		25.000.000
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	5	1	25.000.000	1	25.000.000
1.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				25.000.000		25.000.000
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	10	2	25.000.000	2	25.000.000
1.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				25.000.000		25.000.000
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	10	2	25.000.000	2	25.000.000
1.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				20.000.000		20.000.000
Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5	1	20.000.000	1	20.000.000
1.03.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				20.000.000		20.000.000
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5	1	20.000.000	1	20.000.000
1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				287.500.000		287.500.000
Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	60	70	287.500.000	70	287.500.000
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20	15		15	
1.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				87.500.000		87.500.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	60	70	87.500.000	70	87.500.000
1.03.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				200.000.000		200.000.000
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20	15	200.000.000	15	200.000.000
1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				363.500.000		363.500.000
Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	50	10	363.500.000	10	363.500.000
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	120	12		12	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	1		1	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	1		1	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	1		1	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	1		1	
1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				12.000.000		12.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	1	12.000.000	1	12.000.000
1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		15.000.000
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	1	15.000.000	1	15.000.000
1.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				14.000.000		14.000.000
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	1	14.000.000	1	14.000.000
1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.500.000		12.500.000
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	1	12.500.000	1	12.500.000
1.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				60.000.000		60.000.000
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	50	10	60.000.000	10	60.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Perundang-undangan	Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)				
1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			250.000.000	250.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	120	12	250.000.000	12
1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			350.000.000	350.000.000	
Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	13	10	350.000.000	10
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	50	10		10
1.03.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			200.000.000	200.000.000	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	13	10	200.000.000	10
1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			150.000.000	150.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	50	10	150.000.000	10
1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			72.000.000	72.000.000	
Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	15	3	72.000.000	3
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	400	80		80
1.03.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12.000.000	12.000.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	400	80	12.000.000	80
1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			60.000.000	60.000.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	15	3	60.000.000	3
1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			200.000.000	200.000.000	
Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	100	20	200.000.000	20
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50	10		10
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	5	1		1



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
	atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)					
1.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			100.000.000	100.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	100	20	100.000.000	20	100.000.000
1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			50.000.000	50.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50	10	50.000.000	10	50.000.000
1.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			50.000.000	50.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	1	50.000.000	1	50.000.000
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			29.725.214.890	30.022.467.030		
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi			29.725.214.890	30.022.467.030	1.04.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			28.725.214.890	24.222.467.030		
Menjamin keberlanjutan fungsi sumber daya air (SDA) di wilayah sungai (WS) yang berada dalam satu kabupaten/kota.	Panjang bangunan pengamanan pantai yang dipelihara (KM)	0	0,1	28.725.214.890	0,1	24.222.467.030
	Panjang Breakwater yang Dibangun (KM)	0,992	1		1	
	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun (KM)	15,921	3		3	
	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	7	2		2	
	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi (KM)	0	3		3	
	Panjang Kanal Banjir yang Ditingkatkan (KM)	0	0,9		0,9	
	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi (KM)	10,521	3,2		3,2	
	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	12,663	5		5	
	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	0	3		3	
1.03.02.2.01.0073 - Operasi dan Pemeliharaan			554.704.590	529.951.139		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH	
Sungai						
Beroperasi dan Terpeliharanya Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	0	3	554.704.590	3	529.951.139
1.03.02.2.01.0081 - Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir				4.533.300.000		4.029.600.000
Beroperasi dan Terpeliharanya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	7	2	4.533.300.000	2	4.029.600.000
1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai				5.037.000.000		5.037.000.000
Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	12,663	5	5.037.000.000	5	5.037.000.000
1.03.02.2.01.0099 - Peningkatan Kanal Banjir				2.518.500.000		2.518.500.000
Meningkatnya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Ditingkatkan (KM)	0	0,9	2.518.500.000	0,9	2.518.500.000
1.03.02.2.01.0102 - Pembangunan Breakwater				2.230.513.400		2.531.632.709
Terbangunnya Breakwater	Panjang Breakwater yang Dibangun (KM)	0,992	1	2.230.513.400	1	2.531.632.709
1.03.02.2.01.0105 - Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya				6.691.540.200		2.743.531.482
Terehabilitasinya Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi (KM)	10,521	3,2	6.691.540.200	3,2	2.743.531.482
1.03.02.2.01.0113 - Pembangunan Kanal Banjir				2.518.500.000		2.518.500.000
Terbangunnya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun (KM)	15,921	3	2.518.500.000	3	2.518.500.000
1.03.02.2.01.0122 - Rehabilitasi Kanal Banjir				3.525.900.000		3.198.495.000
Terehabilitasinya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi (KM)	0	3	3.525.900.000	3	3.198.495.000
1.03.02.2.01.0133 - Pemeliharaan Bangunan Pengamanan Pantai				1.115.256.700		1.115.256.700
Terpeliharanya Bangunan Pengamanan Pantai	Panjang bangunan pengamanan pantai yang dipelihara (KM)	0	0,1	1.115.256.700	0,1	1.115.256.700
1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.000.000.000		5.800.000.000
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara (UNIT)	0	3	1.000.000.000	3	5.800.000.000
	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (UNIT)	1	0			
	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan (UNIT)	1	1		1	
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	3	4,5		4,5	
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	0	0,5		0,5	
1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				0		1.000.000.000
Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang	0	0,5	0	0,5	1.000.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Direhabilitasi (KM)					
1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				0	1.500.000.000
Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	3	4,5	0	4,5
1.03.02.2.02.0048 - Peningkatan Bendung Irigasi				0	1.500.000.000
Meningkatnya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan (UNIT)	1	1	0	1
1.03.02.2.02.0053 - Rehabilitasi Bendung Irigasi				0	0
Terehabilitasinya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (UNIT)	1	0	0	0
1.03.02.2.02.0054 - Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi				1.000.000.000	1.800.000.000
Beroperasi dan Terpeliharanya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara (UNIT)	0	3	1.000.000.000	3
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				18.685.000.000	18.871.850.000
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum				18.685.000.000	18.871.850.000
1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				18.685.000.000	18.871.850.000
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Desa)	35	5	18.685.000.000	10
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	1	0		1
	Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	1	1		1
	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Orang)	45	10		10
	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	3.641	1.550		600
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	8	2		2

1.04.1.03.0.00.01.0000
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
	Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Unit)					
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)	12	0	2		
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama (Unit)	4		1		
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)	3	2	0		
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	4	0	1		
	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	45	10			
	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	50	30	30		
1.03.03.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan				0	601.800.000	
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Unit)	8	2	0	2	601.800.000
1.03.03.2.01.0024 - Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				0		150.000.000
Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Orang)	45	10	0	10	150.000.000
1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				0		0
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	1	0	0	1	0
1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				10.725.000.000		6.000.000.000
Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	50	30	10.725.000.000	30	6.000.000.000
1.03.03.2.01.0027 - Pembinaan Pengelolaan				0		150.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa						
Terbinanya Desa dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Desa)	35	5	0	10	150.000.000
1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				750.000.000		0
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	45	10	750.000.000		0
1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				0		250.050.000
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	4	0	0	1	250.050.000
1.03.03.2.01.0030 - Fasilitas Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				0		1.000.000.000
Terfasilitasinya Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama (Unit)	4		0	1	1.000.000.000
1.03.03.2.01.0031 - Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				0		0
Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)	3	2	0	0	0
1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				7.210.000.000		4.290.000.000
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	3.641	1.550	7.210.000.000	600	4.290.000.000
1.03.03.2.01.0033 - Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan				0		400.000.000
Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)	12	0	0	2	400.000.000
1.03.03.2.01.0034 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				0		6.030.000.000
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	1	1	0	1	6.030.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			5.403.500.000	5.457.535.000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah			5.403.500.000	5.457.535.000	1.04.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			5.403.500.000	5.457.535.000	
Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi (Unit)	2	0	0	
1.03.05.2.01.0029 - Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman			0	0	
Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi (Unit)	2	0	0	
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun (MÂ³/Hari)	35	0	0	
1.03.05.2.01.0025 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan			0	0	
Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun (MÂ³/Hari)	35	0	0	
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Orang)	30	0	10	25.000.000
1.03.05.2.01.0040 - Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			0		25.000.000
Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Orang)	30	0	10	25.000.000
Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Desa)	6	0	2	50.000.000
	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi (Unit)				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026			PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
1.03.05.2.01.0024 - Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan				0		0	
Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi (Unit)			0		0	
1.03.05.2.01.0034 - Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa				0		50.000.000	
Terbinanya Desa dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Desa)	6		0	2	50.000.000	
Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan (M ³ /Hari)	35		0		0	
1.03.05.2.01.0021 - Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)				0		0	
Meningkatnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan (M ³ /Hari)	35		0		0	
Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan (M ³ /Hari)	35	50	1.903.500.000	50	1.857.535.000	
1.03.05.2.01.0028 - Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan				1.903.500.000		1.857.535.000	
Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan (M ³ /Hari)	35	50	1.903.500.000	50	1.857.535.000	
Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	40		0	10	25.000.000	
1.03.05.2.01.0033 - Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				0		25.000.000	
Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	40		0	10	25.000.000	
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	665	50	3.500.000.000	50	3.500.000.000	
1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat				3.500.000.000		3.500.000.000	
Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob	665	50	3.500.000.000	50	3.500.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	(yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)				
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	1	0	0	
1.03.05.2.01.0045 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			0	0	
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	1	0	0	
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			17.483.100.000	17.657.931.000	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan			17.483.100.000	17.657.931.000	1.04.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			17.483.100.000	17.657.931.000	
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter)		3.000	4.200.000.000	3.000
1.03.06.2.01.0019 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan				4.200.000.000	4.200.000.000
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter)		3.000	4.200.000.000	3.000
Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi (M)		1.500	1.500.000.000	1.500
1.03.06.2.01.0020 - Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan				1.500.000.000	1.200.000.000
Teroptimalisasainya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi (M)		1.500	1.500.000.000	1.500
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	19.736,99	7.000	7.077.000.000	7.000
1.03.06.2.01.0012 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan				7.077.000.000	7.000.000.000
Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	19.736,99	7.000	7.077.000.000	7.000
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	1.276	1	600.000.000	1
1.03.06.2.01.0029 - Pembangunan Sistem				600.000.000	600.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)		PERANGKAT DAERAH
Drainase Perkotaan							
Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	1.276	1	600.000.000	1	600.000.000	
Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Lingkungan)		10	1.700.000.000	10	1.500.000.000	
1.03.06.2.01.0021 - Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan				1.700.000.000		1.500.000.000	
Meningkatnya Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Lingkungan)		10	1.700.000.000	10	1.500.000.000	
Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Perkotaan)	2.500	1	400.000.000	1	400.000.000	
1.03.06.2.01.0024 - Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan				400.000.000		400.000.000	
Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Perkotaan)	2.500	1	400.000.000	1	400.000.000	
Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan (Unit)	60	10	806.100.000	10	1.157.931.000	
1.03.06.2.01.0022 - Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan				806.100.000		1.157.931.000	
Tersedianya Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan (Unit)	60	10	806.100.000	10	1.157.931.000	
Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan (Unit)	50	10	900.000.000	10	900.000.000	
1.03.06.2.01.0026 - Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan				900.000.000		900.000.000	
Tersedianya Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan (Unit)	50	10	900.000.000	10	900.000.000	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan (Orang)	0		0		0	
1.03.06.2.01.0018 - Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan				0		0	
Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan (Orang)	0		0		0	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen)	1		0	1	400.000.000	
1.03.06.2.01.0030 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan				0		400.000.000	
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen)	1		0	1	400.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	1.200	1	300.000.000	300.000.000
1.03.06.2.01.0028 - Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan				300.000.000	300.000.000
Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	1.200	1	300.000.000	300.000.000
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				0	0
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman				0	0
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				20.415.508.380	17.831.113.971
Meningkatnya kualitas bangunan gedung				20.415.508.380	17.831.113.971
1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				20.415.508.380	17.831.113.971
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya (Orang)		3	45.000.000	45.000.000
1.03.08.2.01.0022 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung				45.000.000	45.000.000
Bangunan Gedung yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraannya	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya (Orang)		3	45.000.000	45.000.000
Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dokumen)	39	10	15.000.008.380	12.415.613.971
1.03.08.2.01.0019 - Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				15.000.008.380	12.415.613.971
Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dokumen)	39	10	15.000.008.380	12.415.613.971
Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo) (Bangunan Gedung Negara)		30	145.500.000	145.500.000
1.03.08.2.01.0014 - Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara				145.500.000	145.500.000
Terdaftaranya Huruf Daftar Nomor (HDNo)	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang		30	145.500.000	145.500.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)		PERANGKAT DAERAH
Bangunan Gedung Negara	Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo) (Bangunan Gedung Negara)						
Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan (Bangunan Gedung)	202	10	5.200.000.000	10	5.200.000.000	
1.03.08.2.01.0017 - Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				5.200.000.000		5.200.000.000	
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengubahsuaian	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan (Bangunan Gedung)	202	10	5.200.000.000	10	5.200.000.000	
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	39	10	25.000.000	10	25.000.000	
1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				25.000.000		25.000.000	
Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	39	10	25.000.000	10	25.000.000	
Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)			0		0	
1.03.08.2.01.0018 - Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				0		0	
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)			0		0	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH		
Berkala	Gedung)						
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			5.403.500.000	5.457.535.000			
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata			5.403.500.000	5.457.535.000	1.04.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			5.403.500.000	5.457.535.000			
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan (Orang)	21	10	5.403.500.000	10	5.457.535.000	
1.03.09.2.01.0012 - Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan			5.403.500.000	5.457.535.000			
Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan penataan dan lingkungan	Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan (Orang)	21	10	5.403.500.000	10	5.457.535.000	
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			76.882.000.000	78.841.375.000			
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	60	62	76.882.000.000	63	78.841.375.000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			76.882.000.000	78.841.375.000			
Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	548	568	76.882.000.000	578	78.841.375.000	
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	0	10		20		
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	50	60		70		
	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	25	29		33		
	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	683	863		953		
	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	193	211		221		
1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan			450.000.000	450.000.000			
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	50	60	450.000.000	70	450.000.000	
1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan			44.188.730.010	46.160.383.142			
Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	548	568	44.188.730.010	578	46.160.383.142	
1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala			8.500.000.000	8.510.000.000			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
Jalan						
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	0	10	8.500.000.000	20	8.510.000.000
1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan				4.250.000.000		4.240.000.000
Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	193	211	4.250.000.000	221	4.240.000.000
1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan				10.000.000.000		10.000.000.000
Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	25	29	10.000.000.000	33	10.000.000.000
1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan				9.493.269.990		9.480.991.858
Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	683	863	9.493.269.990	953	9.480.991.858
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				1.731.924.000		1.821.000.000
Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Penataan Ruang				1.731.924.000	1.821.000.000	5.01.1.03.5.05.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				1.425.000.000		20.000.000
Jumlah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) yang ditetapkan dalam bentuk Perda dan Perkada	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	1.425.000.000	1	20.000.000
	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan)	1			1	
	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1	
1.03.12.2.01.0006 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota				350.000.000		5.000.000
Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	350.000.000	1	5.000.000
1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota				350.000.000		5.000.000
Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	350.000.000	1	5.000.000
1.03.12.2.01.0013 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang				725.000.000		10.000.000
Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan)	1		725.000.000	1	10.000.000
1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi				10.000.000		1.576.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota						
Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang terselesaikan	Jumlah data SHP Peta Dasar (Peta)	2	1	10.000.000	1	1.576.000.000
	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1	
1.03.12.2.02.0004 - Penyusunan Peta Dasar Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ECW dan tersedianya data SHP Peta Dasar			5.000.000		300.000.000	
	Jumlah data SHP Peta Dasar (Peta)	2	1	5.000.000	1	300.000.000
1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman			5.000.000		1.276.000.000	
	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	5.000.000	1	1.276.000.000
1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			196.924.000		125.000.000	
Jumlah Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW			0		0	
	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)	1	1		1	
1.03.12.2.03.0004 - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang			196.924.000		125.000.000	
Terlayannya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)	1	1	196.924.000	1	125.000.000
1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			100.000.000		100.000.000	
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000
1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			100.000.000		100.000.000	
Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			48.714.209.570		54.177.351.660	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.692.862.220		5.749.790.840	
Tingkat Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Perangkat Daerah (persen)			5.692.862.220		5.749.790.840	1.04.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.352.432.840	2.322.432.840	
Tingkat Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Perangkat Daerah (persen)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5	5	2.352.432.840	2.322.432.840
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	1	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	14	14	
1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.287.432.840	2.287.432.840	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	14	2.287.432.840	2.287.432.840
1.04.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			50.000.000	20.000.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5	5	50.000.000	20.000.000
1.04.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			15.000.000	15.000.000	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	15.000.000	15.000.000
1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.294.886.468	2.170.815.088	
Tingkat Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Perangkat Daerah (persen)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3	3	1.294.886.468	2.170.815.088
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	1	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	33	58	58	
1.04.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			300.000.000	300.000.000	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	300.000.000	300.000.000
1.04.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			30.000.000	30.000.000	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3	3	30.000.000	30.000.000
1.04.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan			964.886.468	1.840.815.088	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	33	58	964.886.468	58	1.840.815.088
1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				376.802.912	476.802.912	
Tingkat Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Perangkat Daerah (persen)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	10	10	376.802.912	10	476.802.912
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	22	22		22	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1	
1.04.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				70.002.712	70.002.712	
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	70.002.712	1	70.002.712
1.04.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				71.784.200	71.784.200	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	71.784.200	1	71.784.200
1.04.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				90.016.000	90.016.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	90.016.000	1	90.016.000
1.04.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				75.000.000	75.000.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	75.000.000	1	75.000.000
1.04.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				25.000.000	25.000.000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	10	10	25.000.000	10	25.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Disediakan (Dokumen)					
1.04.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu			45.000.000		45.000.000
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	45.000.000	1
1.04.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0		100.000.000
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	22	22	0	22
1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			532.000.000		132.000.000
Tingkat Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Perangkat Daerah (persen)	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	532.000.000	1
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7	5		5
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7	1		1
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	25		25
1.04.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			185.000.000		0
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7	1	185.000.000	1
1.04.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0		0
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7	5	0	5
1.04.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			315.000.000		100.000.000
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	25	315.000.000	25
1.04.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			32.000.000		32.000.000
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	32.000.000	1
1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			32.000.000		32.000.000
Tingkat Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Perangkat Daerah (persen)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	32.000.000	1
1.04.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat			32.000.000		32.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	32.000.000	1	32.000.000	
1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.104.740.000		615.740.000	
Tingkat Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Perangkat Daerah (persen)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1.104.740.000	1	615.740.000	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7	7		7		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		
1.04.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				289.740.000		289.740.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	289.740.000	1	289.740.000	
1.04.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				315.000.000		126.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7	7	315.000.000	7	126.000.000	
1.04.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				250.000.000		100.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	250.000.000	1	100.000.000	
1.04.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				250.000.000		100.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	250.000.000	1	100.000.000	
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				5.400.000.000		6.300.000.000	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah				5.400.000.000		6.300.000.000	1.04.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan				2.000.000.000		0	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	2.000.000.000	0	
1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			2.000.000.000	0	
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	2.000.000.000	0	
1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			3.400.000.000	3.400.000.000	
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	10	2.900.000.000	10	2.900.000.000
1.04.02.2.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana			2.900.000.000	2.900.000.000	
Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	10	2.900.000.000	10	2.900.000.000
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	10	500.000.000	10	500.000.000
1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana			500.000.000	500.000.000	
Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	10	500.000.000	10	500.000.000
1.04.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			0	2.900.000.000	
Pembangunan Rumah Khusus	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun (Unit)		0	50	2.900.000.000
1.04.02.2.05.0003 - Pembangunan Rumah Khusus			0	2.900.000.000	
Terbangunnya Rumah Khusus	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun (Unit)		0	50	2.900.000.000
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			4.754.683.070	4.802.229.900	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman			4.754.683.070	4.802.229.900	1.04.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.03.2.01 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman			50.083.070	50.029.900	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum (Laporan)	1	50.083.070	1	50.029.900



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
1.04.03.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum			50.083.070	50.029.900	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum (Laporan)	1	50.083.070	1	50.029.900
1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			600.000.000	0	
Penyusunan / Review / Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	1	200.000.000	0	
1.04.03.2.02.0008 - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP			200.000.000	0	
Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	1	200.000.000	0	
Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen)	1	400.000.000	0	
1.04.03.2.02.0014 - Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh			400.000.000	0	
Terlaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen)	1	400.000.000	0	
1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			4.104.600.000	4.752.200.000	
Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU (Dokumen)	100	750.000.000	100	750.000.000
1.04.03.2.03.0003 - Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU			750.000.000	750.000.000	
Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU (Dokumen)	100	750.000.000	100	750.000.000
Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Ha)		0	1	200.000.000
1.04.03.2.03.0009 - Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh			0	200.000.000	
Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Ha)		0	1	200.000.000
Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas	100	2.354.600.000	100	2.802.200.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)				
1.04.03.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			2.354.600.000	2.802.200.000	
Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)		100	2.354.600.000	100
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	312	100	1.000.000.000	100
1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				1.000.000.000	1.000.000.000
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	312	100	1.000.000.000	100
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				11.277.295.280	11.390.068.230
Meningkatnya kualitas perumahan				11.277.295.280	11.390.068.230
1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				11.277.295.280	11.390.068.230
Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	579	100	6.277.295.280	100
1.04.04.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru				6.277.295.280	6.390.068.230
Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	579	100	6.277.295.280	100
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	312	25	5.000.000.000	100
1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap				5.000.000.000	5.000.000.000

1.04.1.03.0.00.01.0000
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)		PERANGKAT DAERAH
Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha							
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	312	25	5.000.000.000	100	5.000.000.000	
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				21.589.369.000		25.935.262.690	
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman				21.589.369.000		25.935.262.690	1.04.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				21.589.369.000		25.935.262.690	
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	10	10	21.589.369.000	10	25.935.262.690	
	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	60	35		35		
	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)		4				
1.04.05.2.01.0001 - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1.800.000.000		1.800.000.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	10	10	1.800.000.000	10	1.800.000.000	
1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				500.000.000		0	
Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)		4	500.000.000		0	
1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				19.289.369.000		24.135.262.690	
Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	60	35	19.289.369.000	35	24.135.262.690	
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				7.570.311.800		7.759.569.596	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.588.311.800		5.673.619.596	
Tingkat Realisasi Kinerja	Nilai SAKIP Perangkay Daerah (Skor)	60,55	65	2.864.618.460	66	2.881.833.922	1.05.0.00.0.00.02.0000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah					- Dinas Satuan Polisi dan Pamong Praja
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			11.743.000	11.743.000	
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	11.743.000	1
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1
1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4.500.000	4.500.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	4.500.000	1
1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2.243.000	2.243.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.243.000	1
1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			2.500.000	2.500.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.500.000	1
1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2.500.000	2.500.000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	2.500.000	1
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.568.618.460	1.607.583.922	
Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	1.568.618.460	1
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	1	1		1



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)				
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	14	14	
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.558.618.460	1.597.583.922	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	14	1.558.618.460	1.597.583.922
1.05.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan			5.000.000	5.000.000	
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	5.000.000	5.000.000
1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			5.000.000	5.000.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	5.000.000	5.000.000
1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			762.400.000	762.400.000	
Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4	4	762.400.000	762.400.000
1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			762.400.000	762.400.000	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4	4	762.400.000	762.400.000
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			256.360.000	256.360.000	
Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	256.360.000	256.360.000
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	1	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	1	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang		1	1	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Disediakan (Paket)				
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	1	
1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				30.000.000	30.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		1	30.000.000	30.000.000
1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.120.000	10.120.000
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	10.120.000	10.120.000
1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				80.000.000	80.000.000
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	80.000.000	80.000.000
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				11.000.000	11.000.000
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	11.000.000	11.000.000
1.05.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				15.000.000	15.000.000
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	15.000.000	15.000.000
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				110.240.000	110.240.000
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	110.240.000	110.240.000
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				145.000.000	170.000.000
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	145.000.000	170.000.000
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		1		1
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1
1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000	5.000.000
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	5.000.000	5.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			5.000.000	5.000.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	5.000.000	1
1.05.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			20.000.000	20.000.000	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		1	20.000.000	1
1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			115.000.000	140.000.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	115.000.000	1
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			120.497.000	73.747.000	
"Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan"	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	6	120.497.000	6
1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			120.497.000	73.747.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	6	120.497.000	6
Tingkat Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Perangkat Daerah (persen)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Skor)	61,5	85	2.723.693.340	86,3
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			19.500.000	20.000.000	
Efektivitas perencanaan, koordinasi, pelaporan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara sistematis dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	19.500.000	1
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2
1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			9.500.000	10.000.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	9.500.000	2
1.05.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata			10.000.000	10.000.000	

1.05.0.00.0.00.03.0000
- Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)		PERANGKAT DAERAH
Pendukung Statistik Sektoral Daerah							
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.721.293.340		1.764.485.674	
Terpenuhinya kewajiban administrasi keuangan SKPD melalui pembayaran gaji dan tunjangan ASN secara tepat waktu, penyusunan laporan akhir tahun yang akurat, serta penyampaian tanggapan pemeriksaan yang lengkap dan sesuai jadwal	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1.721.293.340	1	1.764.485.674	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	14		14		
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.711.693.340		1.754.485.674	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	14	1.711.693.340	14	1.754.485.674	
1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				9.600.000		10.000.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	9.600.000	1	10.000.000	
1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				10.000.000		10.000.000	
Peningkatan kualitas basis data BMD sebagai aset strategis daerah, Terwujudnya efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah yang berkelanjutan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	
1.05.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				10.000.000		10.000.000	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	
1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				40.000.000		42.916.000	
Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai, terselenggaranya sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dan dimanfaatkan, serta terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala dengan tindak lanjut yang konkret.	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	40.000.000	1	42.916.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	30	35	35	
1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			31.000.000	31.600.000	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	30	35	31.000.000	35
1.05.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			9.000.000	11.316.000	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	9.000.000	1
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			484.700.000	494.584.000	
Pelaksanaan dukungan administrasi SKPD berjalan optimal melalui pemenuhan logistik, ketersediaan dokumen cetakan, pelayanan kunjungan yang memuaskan, koordinasi terjadwal, dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	484.700.000	1
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1
1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi			5.000.000	5.100.000	
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	5.000.000	1
1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100.000.000	102.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	100.000.000	1
1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			4.200.000	4.284.000	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	1	1	4.200.000	1



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Disediakan (Paket)				
1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor			34.000.000	34.600.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	34.000.000	34.600.000
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			32.000.000	32.600.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	32.000.000	32.600.000
1.05.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu			9.500.000	10.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	9.500.000	10.000.000
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			300.000.000	306.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	300.000.000	306.000.000
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			46.000.000	48.000.000	
Ketersedianya dukungan operasional kantor yang andal dan efisien melalui layanan surat menyurat, komunikasi, utilitas, perlengkapan, dan pelayanan umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	46.000.000	48.000.000
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		
1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.355.000	2.400.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	2.355.000	2.400.000
1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			43.645.000	45.600.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	43.645.000	45.600.000
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			402.200.000	411.800.000	
Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah secara efisien dan menyeluruh, mencakup kendaraan dinas, peralatan, gedung, bangunan, serta sarana prasarana lainnya.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	6	402.200.000	411.800.000
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	23	23		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1	1		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)					
1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			335.700.000	342.500.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	6	335.700.000	342.500.000
1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			41.500.000	42.300.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	23	23	41.500.000	42.300.000
1.05.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			25.000.000	27.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	25.000.000	27.000.000
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			583.000.000	583.000.000	
Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan penegakan Perda berbasis kepatuhan dan profesionalisme SDM			583.000.000	583.000.000	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Satuan Polisi dan Pamong Praja
1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			408.000.000	408.000.000	
Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan)	12	12	408.000.000	408.000.000
	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	10	15	15	
1.05.02.2.01.0013 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat			105.000.000	105.000.000	
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	10	15	105.000.000	105.000.000
1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			303.000.000	303.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)	12	12	303.000.000	12	303.000.000
1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				65.000.000		65.000.000
Terlaksananya Perda/ Perkada yang ditegakan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1	2	65.000.000	2	65.000.000
1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				65.000.000		65.000.000
Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1	2	65.000.000	2	65.000.000
1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				110.000.000		110.000.000
Terlaksananya pengembangan dan eningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)	1	5	110.000.000	5	110.000.000
1.05.02.2.03.0004 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah				110.000.000		110.000.000
Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)	1	5	110.000.000	5	110.000.000
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				1.288.000.000		1.320.200.000
Meningkatnya ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui sistem penanggulangan yang terstruktur, kolaboratif, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat	Indeks Risiko Bencana Kabupaten (Index)	174	172,8	1.288.000.000	172,3	1.320.200.000
	Persentase desa dengan kapasitas kesiapsiagaan komunitas (%)	0	1		2	
	Persentase tanggap darurat dan pemulihan pascabencana yang dilaksanakan sesuai SOP dan waktu respons (%)	0	1		2	
	Persentase wilayah rawan bencana yang memiliki sistem peringatan dini dan jalur evakuasi fungsional (%)	0	1		2	
1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan				287.000.000		100.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Bencana Kabupaten/Kota					
Persentase Informasi Rawan Bencana Yang Tersampaikan	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1	287.000.000	100.000.000
	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	75	85	85	
1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)				97.000.000	100.000.000
Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	75	85	97.000.000	100.000.000
1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota				190.000.000	0
Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1	190.000.000	0
1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				438.000.000	298.200.000
Persentase Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1	438.000.000	298.200.000
	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1			
	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	0		1	
	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	0	15		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	9	10		
	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	30	30	30	
1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				58.000.000	0
Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	0	15	58.000.000	0
1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				90.000.000	96.200.000
Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	30	30	90.000.000	30 96.200.000
1.05.03.2.02.0021 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota				130.000.000	0
Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	9	10	130.000.000	0
1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota				160.000.000	160.000.000
Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1	160.000.000	1 160.000.000
1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				0	42.000.000
Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan	0		0	1 42.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)		PERANGKAT DAERAH
penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)					
1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				0		0
Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		0		0
1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				170.000.000		324.000.000
Terwujudnya respons cepat, pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur serta ketersediaan logistik penyelamatan di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen)	0		170.000.000	1	324.000.000
	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1	1		1	
	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	50			50	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota (Laporan)	0	1		1	
1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota				130.000.000		130.000.000
Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1	1	130.000.000	1	130.000.000
1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				0		70.000.000
Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	50		0	50	70.000.000
1.05.03.2.03.0010 - Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit				0		84.000.000
Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen)	0		0	1	84.000.000
1.05.03.2.03.0012 - Aktivasi Sistem Komando				40.000.000		40.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
Penanganan Darurat Bencana						
Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan)	0	1	40.000.000	1	40.000.000
1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				393.000.000		598.000.000
Meningkatnya ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui sistem penanggulangan yang terstruktur, kolaboratif, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	1		393.000.000	1	598.000.000
	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana (Laporan)	0			1	
	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	1	1			
	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	1	1		1	
	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	0	1		1	
	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1			
	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	1			
	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	1	1		1	
	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang)	20			10	
1.05.03.2.04.0001 - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				42.000.000		42.000.000
Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	1	1	42.000.000	1	42.000.000
1.05.03.2.04.0003 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan				75.000.000		0



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
Bencana Kabupaten/Kota						
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	1	1	75.000.000	0	
1.05.03.2.04.0004 - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan				0	80.000.000	
Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	1		0	1	80.000.000
1.05.03.2.04.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				40.000.000	40.000.000	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	0	1	40.000.000	1	40.000.000
1.05.03.2.04.0007 - Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				0	200.000.000	
Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang)	20		0	10	200.000.000
1.05.03.2.04.0010 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				135.000.000	136.000.000	
Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	1	1	135.000.000	1	136.000.000
1.05.03.2.04.0012 - Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota				0	100.000.000	
Tersedianya data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana (Laporan)	0		0	1	100.000.000
1.05.03.2.04.0014 - Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota				51.000.000	0	
Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1	51.000.000	0	
1.05.03.2.04.0015 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi				50.000.000	0	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Pascabencana (R3P) Kab/Kota					
Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	1	50.000.000	0
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				111.000.000	182.750.000
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi korban secara cepat, profesional, dan manusiawi	Cakupan edukasi dan sosialisasi rawan kebakaran (%)	0	1	111.000.000	2
	Persentase wilayah manajemen kebakaran yang terlayani respon cepat (%)	0	1		2
	Waktu rata-rata tanggap darurat kebakaran dan non kebakaran (Jam)	0	1		2
1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				111.000.000	182.750.000
Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	6	6	111.000.000	6
	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	1	1		1
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1		1
1.05.04.2.01.0001 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				35.000.000	35.000.000
Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	1	1	35.000.000	1
1.05.04.2.01.0007 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran				41.000.000	112.750.000
Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan	6	6	41.000.000	6



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Penanggulangan Kebakaran	Penanggulangan Kebakaran (Orang)				
1.05.04.2.01.0026 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			35.000.000	35.000.000	
Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	35.000.000	1
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			11.755.203.480	12.049.083.567	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.085.203.480	3.134.083.567	
Tingkat Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Perangkat Daerah (persen)			3.085.203.480	3.134.083.567	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.005.203.480	2.025.083.567	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		36	2.005.203.480	38
1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.005.203.480	2.025.083.567	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		36	2.005.203.480	38
1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			200.000.000	200.000.000	
Presentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		1	200.000.000	1
1.06.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			200.000.000	200.000.000	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		1	200.000.000	1
1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			329.600.000	346.100.000	
Persentase administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		1	329.600.000	1
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		1		1
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		1		1
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		1		1
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		1		1



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		1	1	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		1	1	
1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi			10.000.000	12.000.000	
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	10.000.000	12.000.000	12.000.000
1.06.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			10.000.000	12.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	10.000.000	12.000.000	12.000.000
1.06.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			10.000.000	12.500.000	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	10.000.000	12.500.000	12.500.000
1.06.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor			50.000.000	52.500.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	50.000.000	52.500.000	52.500.000
1.06.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			50.000.000	52.500.000	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	50.000.000	52.500.000	52.500.000
1.06.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu			60.000.000	62.500.000	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	60.000.000	62.500.000	62.500.000
1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			139.600.000	142.100.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	139.600.000	142.100.000	142.100.000
1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100.000.000	102.500.000	
"Persentase Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan"	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	100.000.000	12	102.500.000
1.06.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			100.000.000	102.500.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	100.000.000	12	102.500.000
1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			30.000.000	35.000.000	
"Persentase laporan penyediaan jasa"	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1	30.000.000	1	35.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)		PERANGKAT DAERAH
penunjang urusan pemerintahan daerah"	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		1			
1.06.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000		12.500.000
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		1	10.000.000		12.500.000
1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				20.000.000		22.500.000
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		1	20.000.000	1	22.500.000
1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				420.400.000		425.400.000
Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		2	420.400.000	3	425.400.000
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		1		1	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		7		1	
1.06.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				110.400.000		110.400.000
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		1	110.400.000	1	110.400.000
1.06.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		12.500.000
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		7	10.000.000	1	12.500.000
1.06.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				300.000.000		302.500.000
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		2	300.000.000	3	302.500.000
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				450.000.000		515.000.000
Meningkatnya pemberdayaan sosial				450.000.000		515.000.000
1.06.02.2.01 - Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)				200.000.000		222.567.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Presentase Komonitas Adat terpencil (KAT)	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	68	200.000.000	70	222.567.000
1.06.02.2.01.0004 - Fasilitas Pemberdayaan Sosial KAT yang terpadu dan berkelanjutan			200.000.000		222.567.000
Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	68	200.000.000	70	222.567.000
1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			250.000.000		292.433.000
Presentase PSKS yang berperan aktif dalam pelayanan	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	250.000.000	7	292.433.000
	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis (orang)	20		22	
1.06.02.2.03.0012 - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)			75.000.000		96.000.000
Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	75.000.000	7	96.000.000
1.06.02.2.03.0017 - Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			175.000.000		196.433.000
Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis (orang)	20	175.000.000	22	196.433.000
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			450.000.000		525.000.000
Meningkatnya rehabilitasi sosial			450.000.000		525.000.000
1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			450.000.000		525.000.000
Presentasi miskin yang terlantar	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20	450.000.000	21	525.000.000
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu	15		17	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)				
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		10	12	
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		7	9	
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		5	6	
	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		15	16	
1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu			50.000.000	51.000.000	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15	50.000.000	17	51.000.000
1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			20.000.000	21.000.000	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	20.000.000	6	21.000.000
1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan			235.000.000	270.000.000	
Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10	235.000.000	12	270.000.000
1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			30.000.000	65.000.000	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	7	30.000.000	9	65.000.000
1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan			80.000.000	81.500.000	
Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20	80.000.000	21	81.500.000
1.06.04.2.01.0014 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota			35.000.000	36.500.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH		
Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		15	35.000.000	16	36.500.000	
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				7.650.000.000		7.750.000.000	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial				7.650.000.000		7.750.000.000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				7.650.000.000		7.750.000.000	
Presentase Keluarga Miskin yang mendapatkan Pemberdayaan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		10	7.650.000.000	13	7.750.000.000	
	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		3.600		3.650		
1.06.05.2.02.0004 - Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				150.000.000		155.000.000	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		10	150.000.000	13	155.000.000	
1.06.05.2.02.0006 - Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				7.500.000.000		7.595.000.000	
Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		3.600	7.500.000.000	3.650	7.595.000.000	
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA				120.000.000		125.000.000	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana				120.000.000		125.000.000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				120.000.000		125.000.000	
Presentase Keluarga Bencana Alam dan Bencana Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		25	120.000.000	26	125.000.000	
1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan				120.000.000		125.000.000	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		25	120.000.000	26	125.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH	
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			4.896.579.440	5.038.213.616		
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.073.015.550	4.206.814.096		
Tingkat Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Perangkat Daerah (persen)			4.073.015.550	4.206.814.096	3.32.2.07.0.00.02.0000 - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25.000.000	25.000.000		
Tersedianya jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disediakan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	86,79	86,89	25.000.000	86,99	25.000.000
2.07.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			25.000.000	25.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	86,79	86,89	25.000.000	86,99	25.000.000
2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.149.070.590	2.190.296.860		
Persentase cakupan sarana prasarana administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	98,89	98,89	2.149.070.590	98,89	2.190.296.860
2.07.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.149.070.590	2.190.296.860		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	98,89	98,89	2.149.070.590	98,89	2.190.296.860
2.07.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			620.000.000	625.000.000		
Persentase cakupan sarana prasarana administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	96,89	96,89	620.000.000	96,89	625.000.000
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	96,89	96,89		96,89	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	98,89	98,89		98,89	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	96,89	96,89		96,89	
2.07.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			120.000.000	125.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	98,89	98,89	120.000.000	98,89	125.000.000
2.07.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			0	0		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	96,89	96,89	0	96,89	0



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Pelatihan (Orang)					
2.07.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			150.000.000	150.000.000	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	96,89	96,89	150.000.000	96,89
2.07.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			350.000.000	350.000.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	96,89	96,89	350.000.000	96,89
2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			737.118.560	824.690.836	
Persentase cakupan sarana prasarana administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	98,89	98,89	737.118.560	98,89
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	98,89	98,89		98,89
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	98,89	98,89		98,89
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	98,89	98,89		98,89
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	86,79	86,89		86,99
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	86,79	86,89		86,99
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	98,89	98,89		98,89
2.07.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi			25.301.500	25.301.500	
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	86,79	86,89	25.301.500	86,99
2.07.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100.000.000	150.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	86,79	86,89	100.000.000	86,99
2.07.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			35.955.800	35.955.800	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	98,89	98,89	35.955.800	98,89
2.07.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor			115.433.800	115.433.800	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	98,89	98,89	115.433.800	98,89



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Disediakan (Paket)					
2.07.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			49.999.700	49.999.700	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	98,89	98,89	49.999.700	98,89
2.07.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu			60.040.000	60.040.000	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	98,89	98,89	60.040.000	98,89
2.07.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			350.387.760	387.960.036	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	98,89	98,89	350.387.760	98,89
2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			265.866.400	265.866.400	
Persentase Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	96,89	96,89	265.866.400	96,89
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	98,89	98,89		98,89
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	96,89	96,89		96,89
2.07.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			110.400.000	110.400.000	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	98,89	98,89	110.400.000	98,89
2.07.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel			65.866.400	65.866.400	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	96,89	96,89	65.866.400	96,89
2.07.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			89.600.000	89.600.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	96,89	96,89	89.600.000	96,89
2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			80.000.000	80.000.000	
Persentase Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	9.689	9.689	80.000.000	9.689
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	96,89	96,89		96,89
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	96,89	96,89		96,89
2.07.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat			10.000.000	10.000.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	96,89	96,89	10.000.000	96,89



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Menyurat	Menyurat (Laporan)				
2.07.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			45.000.000	45.000.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	9,689	9,689	45.000.000	45.000.000
2.07.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			25.000.000	25.000.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	96,89	96,89	25.000.000	25.000.000
2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			195.960.000	195.960.000	
Persentase Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	98,89	98,89	195.960.000	195.960.000
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	98,89	98,89	98,89	
2.07.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			97.980.000	97.980.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	98,89	98,89	97.980.000	97.980.000
2.07.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			97.980.000	97.980.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	98,89	98,89	97.980.000	97.980.000
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			40.000.000	40.000.000	
Terkelolanya informasi tenaga kerja			40.000.000	40.000.000	3.32.2.07.0.00.02.0000 - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			40.000.000	40.000.000	
Persentase jumlah dokumen Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Kabupaten/kota yang ditetapkan	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	86,79	86,89	40.000.000	40.000.000
	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	86,79	86,89	86,99	
2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			20.000.000	20.000.000	
Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	86,79	86,89	20.000.000	20.000.000
2.07.02.2.01.0003 - Fasilitas Penyusunan			20.000.000	20.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Rencana Tenaga Kerja Mikro					
Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	86,79	86,89	20.000.000	86,9920.000.000
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				221.515.050	223.730.200
Meningkatnya produktivitas tenaga				221.515.050	223.730.2003.32.2.07.0.00.02.0000 - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				186.072.642	187.933.368
Presentase Peningkatan Pelatihan Kerja Bagi Pencari Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	86,79	86,89	186.072.642	86,99187.933.368
	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	86,79	86,89		86,99
2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				8.860.602	8.949.208
Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	86,79	86,89	8.860.602	86,998.949.208
2.07.03.2.01.0002 - Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja				177.212.040	178.984.160
Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	86,79	86,89	177.212.040	86,99178.984.160
2.07.03.2.02 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				35.442.408	35.796.832
Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	86,79	86,89	35.442.408	86,9935.796.832
2.07.03.2.02.0001 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				35.442.408	35.796.832
Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	86,79	86,89	35.442.408	86,9935.796.832
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				401.812.340	405.830.460
Meningkatnya penempatan tenaga				401.812.340	405.830.4603.32.2.07.0.00.02.0000 - Dinas Transmigrasi

3.32.2.07.0.00.02.0000
- Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH
dan Tenaga Kerja							
2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota				401.812.340		405.830.460	
Tingkat Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	86,79	86,89	401.812.340	86,99	405.830.460	
	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	86,79	86,89		86,99		
2.07.04.2.01.0002 - Pelayanan antar Kerja				200.906.170		202.915.230	
Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	86,79	86,89	200.906.170	86,99	202.915.230	
2.07.04.2.01.0005 - Perluasan Kesempatan Kerja				200.906.170		202.915.230	
Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	86,79	86,89	200.906.170	86,99	202.915.230	
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				160.236.500		161.838.860	
Meningkatnya pekerja yang terlindungi				160.236.500		161.838.860	3.32.2.07.0.00.02.0000 - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				160.236.500		161.838.860	
Pembinaan Sarana Hubungan Industrial	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	86,79	86,89	160.236.500	86,99	161.838.860	
2.07.05.2.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				160.236.500		161.838.860	
Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	86,79	86,89	160.236.500	86,99	161.838.860	
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				1.000.000.000		1.020.000.000	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				300.000.000		300.000.000	
Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	82,3	86	300.000.000	87	300.000.000	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pengendalian



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
					Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			180.000.000	180.000.000	
Terbentuknya kelembagaan PUG di tingkat kabupaten/kota (Pokja PUG, Focal Point Gender, dll.)	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi (Kebijakan)	10	7	180.000.000	7
	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)	1	5		5
	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	5	7		7
2.08.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota			60.000.000	60.000.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)	1	5	60.000.000	5
2.08.02.2.01.0010 - Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota			60.000.000	60.000.000	
Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi (Kebijakan)	10	7	60.000.000	7
2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota			60.000.000	60.000.000	
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	5	7	60.000.000	7
2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			80.000.000	80.000.000	
Meningkatnya kapasitas perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi melalui pendidikan, pelatihan, maupun pendampingan.	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	5	8	80.000.000	8
	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi	30	50		60



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)				
2.08.02.2.02.0003 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			40.000.000	40.000.000	
Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/ kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	5	8	40.000.000	8
2.08.02.2.02.0008 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			40.000.000	40.000.000	
Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)	30	50	40.000.000	60
2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			40.000.000	40.000.000	
Meningkatnya kapasitas SDM pada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan.	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	0	40	40.000.000	40
2.08.02.2.03.0010 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi			40.000.000	40.000.000	
terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	0	40	40.000.000	40
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			100.000.000	100.000.000	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	62,5	80	100.000.000	85
2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			70.000.000	70.000.000	

2.08.2.14.0.00.02.0000
- Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Meningkatnya partisipasi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan.	Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi (Kebijakan)	1	1	70.000.000	1
	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	1	2		2
	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (orang)	5	10		10
2.08.03.2.01.0005 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi				10.000.000	10.000.000
Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (orang)	5	10	10.000.000	10.000.000
2.08.03.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota				30.000.000	30.000.000
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	1	2	30.000.000	30.000.000
2.08.03.2.01.0007 - Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota				30.000.000	30.000.000
Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi (Kebijakan)	1	1	30.000.000	30.000.000
2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				10.000.000	10.000.000
Tersedianya mekanisme layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan.	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	3	8	10.000.000	10.000.000
2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				10.000.000	10.000.000
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	3	8	10.000.000	10.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			20.000.000	20.000.000	
Meningkatnya kapasitas SDM lembaga (pendamping, konselor, pekerja sosial, aparat) melalui pelatihan dan bimbingan teknis.	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	30	50	20.000.000	50
2.08.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			20.000.000	20.000.000	
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	30	50	20.000.000	50
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			100.000.000	120.000.000	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	65	67	100.000.000	69
2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100.000.000	120.000.000	
Data terpilah menurut jenis kelamin, umur, wilayah, dan indikator lainnya	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1	1	100.000.000	1
	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak (Lembaga)	0	10		10
2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota			50.000.000	70.000.000	
Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1	1	50.000.000	1
2.08.05.2.01.0004 - Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak			50.000.000	50.000.000	
Terlaksananya Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak (Lembaga)	0	10	50.000.000	10
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			200.000.000	200.000.000	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (Indeks)	55,83	58,66	200.000.000	60,12

2.08.2.14.0.00.02.0000
- Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak

2.08.2.14.0.00.02.0000
- Dinas Pengendalian



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
					Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			100.000.000	100.000.000	
Terbentuknya kelembagaan/struktur kerja PHA di tingkat kabupaten/kota (forum anak, gugus tugas, focal point, dll.).	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	100.000.000	1
	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	3	5		7
2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			50.000.000	50.000.000	
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	3	5	50.000.000	7
2.08.06.2.01.0006 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			50.000.000	50.000.000	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	50.000.000	1
2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			100.000.000	100.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
Terbentuknya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di tingkat kabupaten/kota.	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000
	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	5		5	
	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	18	50		60	
2.08.06.2.02.0005 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				30.000.000		30.000.000
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	18	50	30.000.000	60	30.000.000
2.08.06.2.02.0006 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				40.000.000		40.000.000
Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	40.000.000	1	40.000.000
2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				30.000.000		30.000.000
Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	5	30.000.000	5	30.000.000
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				300.000.000		300.000.000
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	80,41	84,48	300.000.000	86,59	300.000.000
2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak				100.000.000		100.000.000
						2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.08.2.14.0.00.02.0000
- Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)		PERANGKAT DAERAH
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							
persentase kasus kekerasan terhadap anak di wilayah kabupaten/kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	
	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Orang)	0	40		60		
2.08.07.2.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota				50.000.000		50.000.000	
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	
2.08.07.2.01.0010 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota				50.000.000		50.000.000	
Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Orang)	0	40	50.000.000	60	50.000.000	
2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000		50.000.000	
Tersedianya mekanisme koordinasi lintas sektor dalam penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK).	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	32	50	50.000.000	50	50.000.000	
2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				50.000.000		50.000.000	
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	32	50	50.000.000	50	50.000.000	
2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000		150.000.000	
Terbentuknya jejaring/kemitraan antar lembaga dalam penanganan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK).	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)	1	1	150.000.000	1	150.000.000	
	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi	1	5		5		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)				
2.08.07.2.03.0007 - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota			80.000.000	100.000.000	
Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)	1	1	80.000.000	100.000.000
2.08.07.2.03.0013 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			70.000.000	50.000.000	
terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	1	5	70.000.000	50.000.000
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			3.485.008.120	3.572.133.323	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.551.872.420	2.684.359.720	
Tingkat Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Perangkat Daerah (persen)			2.551.872.420	2.684.359.720	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			21.407.400	26.000.000	
Tersediaanya Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	21.407.400	26.000.000
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1
2.09.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			19.993.700	20.000.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	19.993.700	20.000.000
2.09.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1.413.700	6.000.000	
Tersediaanya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	1	1	1.413.700	6.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)				
2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.798.008.120	1.672.959.720	
Tersedianya laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	1.798.008.120	1.672.959.720
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	1	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	18	22	24	
2.09.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.785.008.120	1.659.959.720	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	18	22	1.785.008.120	1.659.959.720
2.09.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan			5.000.000	5.000.000	
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	5.000.000	5.000.000
2.09.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			8.000.000	8.000.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	8.000.000	8.000.000
2.09.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			11.998.800	13.000.000	
Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Output: Terlaksananya kegiatan administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib, akurat, dan sesuai ketentuan, yang mencakup pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan barang milik daerah oleh perangkat daerah.	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	10	10	11.998.800	13.000.000
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1	
2.09.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan			2.000.000	3.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH	
Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	2.000.000	1	3.000.000
2.09.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				9.998.800		10.000.000
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	10	10	9.998.800	10	10.000.000
2.09.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				142.000.000		406.000.000
Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian secara tertib, akurat, dan sesuai ketentuan oleh perangkat daerah, yang mencakup pengelolaan data pegawai, penyusunan dokumen kepegawaian, pelaporan, dan pemutakhiran informasi kepegawaian.	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	18	0	142.000.000	18	406.000.000
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	204		204	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	23	26		29	
2.09.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				42.000.000		50.000.000
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	23	26	42.000.000	29	50.000.000
2.09.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100.000.000		100.000.000
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	204	100.000.000	204	100.000.000
2.09.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0		256.000.000
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	18	0	0	18	256.000.000
2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				300.058.100		288.000.000
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10	10	300.058.100	12	288.000.000
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1		1	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	1	
2.09.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				24.976.100	10.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	24.976.100	10.000.000
2.09.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				119.331.200	120.000.000
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	119.331.200	120.000.000
2.09.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.994.000	10.000.000
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	8.994.000	10.000.000
2.09.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				39.999.900	40.000.000
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	39.999.900	40.000.000
2.09.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.999.900	8.000.000
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	6.999.900	8.000.000
2.09.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				99.757.000	100.000.000
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10	10	99.757.000	100.000.000
2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				65.000.000	65.000.000
& Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan&	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	3	65.000.000	65.000.000
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	2	2	
2.09.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.000.000	14.000.000
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	2	14.000.000	14.000.000
2.09.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				51.000.000	51.000.000
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	3	51.000.000	51.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			98.000.000	98.000.000	
- Terpenuhinya kebutuhan teknis dan administratif dalam pelaksanaan program/kegiatan OPD.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	98.000.000	1
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1
2.09.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.000.000	5.000.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	5.000.000	1
2.09.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			36.000.000	36.000.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	36.000.000	1
2.09.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12.000.000	12.000.000	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	12.000.000	1
2.09.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			45.000.000	45.000.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	45.000.000	1
2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			115.400.000	115.400.000	
Barang milik daerah dalam kondisi terpelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	115.400.000	1
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	5		5
2.09.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			110.400.000	110.400.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	110.400.000	1



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Jabatan					
2.09.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5.000.000	5.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	5	5.000.000	5.000.000
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN			250.000.000	0	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan			250.000.000	0	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			250.000.000	0	
Tersedianya Infrastruktur pangan	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia (unit)	0	1	250.000.000	0
2.09.02.2.01.0006 - Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			250.000.000	0	
Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia (unit)	0	1	250.000.000	0
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			500.385.700	568.261.103	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat			500.385.700	568.261.103	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			305.000.000	339.000.000	
Terlaksananya Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	305.000.000	339.000.000
	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	0	1		1
	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	2	2		2
	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	0	1		1
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi	0	12		12



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)				
	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	2	3	4	
	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)	0	1	1	
	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	0	1	1	
2.09.03.2.01.0002 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			10.000.000	11.000.000	
Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	0	1	10.000.000	11.000.000
2.09.03.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya			75.000.000	100.000.000	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	2	3	75.000.000	100.000.000
2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota			100.000.000	100.000.000	
Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	2	2	100.000.000	100.000.000
2.09.03.2.01.0009 - Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			10.000.000	11.000.000	
Terlaksananya pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)	0	1	10.000.000	11.000.000
2.09.03.2.01.0010 - Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota			50.000.000	55.000.000	
Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	0	1	50.000.000	55.000.000
2.09.03.2.01.0014 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis			10.000.000	10.000.000	
Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	0	12	10.000.000	10.000.000
2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)			25.000.000	26.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	0	1	25.000.000	1	26.000.000
2.09.03.2.01.0020 - Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota				25.000.000		26.000.000
Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	25.000.000	1	26.000.000
2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				135.606.000		164.261.103
Jenis komoditas pangan yang dikelola sebagai cadangan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara (Ton)	0	44	135.606.000	44	164.261.103
	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	85	88		88	
	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (Ton)	20.380	70		70	
2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				81.363.600		121.596.279
Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	85	88	81.363.600	88	121.596.279
2.09.03.2.02.0005 - Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota				40.681.800		31.998.618
Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (Ton)	20.380	70	40.681.800	70	31.998.618
2.09.03.2.02.0006 - Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota				13.560.600		10.666.206
Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara (Ton)	0	44	13.560.600	44	10.666.206
2.09.03.2.03 - Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi				25.000.000		25.000.000
Jumlah komoditas pangan lokal yang telah ditetapkan harga minimum daerahnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal (Laporan)	1	1	25.000.000	1	25.000.000
2.09.03.2.03.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal				25.000.000		25.000.000
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal (Laporan)	1	1	25.000.000	1	25.000.000
2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				34.779.700		40.000.000
Terlaksananya kampanye atau sosialisasi peningkatan konsumsi pangan sesuai AKG di wilayah prioritas	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	0	1	34.779.700	1	40.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen)	0	1	1	
2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			24.779.700	30.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	0	1	24.779.700	30.000.000
2.09.03.2.04.0005 - Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			10.000.000	10.000.000	
Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen)	0	1	10.000.000	10.000.000
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			132.750.000	224.000.000	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan			132.750.000	224.000.000	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			30.000.000	42.000.000	
Tersedianya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kab/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	1	1	30.000.000	42.000.000
2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan			30.000.000	42.000.000	
Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	1	1	30.000.000	42.000.000
2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			102.750.000	182.000.000	
Tertanganinya Desa Rentan Rawan Pangan Di Wilayah Kab/Kota	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)	0	1	102.750.000	182.000.000
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	6	6	6	
	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	1	
2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota			15.000.000	40.000.000	
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	6	6	15.000.000	40.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
2.09.04.2.02.0004 - Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi			57.750.000	100.000.000	
Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)	0	1	57.750.000	1
2.09.04.2.02.0005 - Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota			30.000.000	42.000.000	
Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	30.000.000	1
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			50.000.000	95.512.500	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan			50.000.000	95.512.500	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			50.000.000	95.512.500	
Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	0	1	50.000.000	1
	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Laporan)	0	1		1
	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	3		3
	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	2	4		4
2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			10.000.000	22.000.000	
Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	3	10.000.000	3
2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			20.000.000	21.000.000	
Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	2	4	20.000.000	4
2.09.05.2.01.0008 - Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan			10.000.000	26.256.250	
Terlaksananya koordinasi, dan sinkronisasi	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan	0	1	10.000.000	1



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH		
keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Laporan)						
2.09.05.2.01.0009 - Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan			10.000.000	26.256.250			
Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	0	1	10.000.000	1	26.256.250	
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			3.267.669.113	3.330.170.218			
2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.945.317.693	3.004.595.284			
Tingkat Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Perangkat Daerah (persen)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Skor)	64,15	66,15	2.945.317.693	67,35	3.004.595.284	2.10.2.11.0.00.03.0000 - Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
2.10.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8.860.000	8.860.000			
Cakupan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	8.860.000	1	8.860.000	
2.10.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			8.860.000	8.860.000			
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	8.860.000	1	8.860.000	
2.10.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.987.562.940	2.037.256.694			
Persentase ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1.987.562.940	1	2.037.256.694	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	14		14		
2.10.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.981.772.940	2.031.317.264			
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	14	1.981.772.940	14	2.031.317.264	
2.10.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			5.790.000	5.939.430			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
SKPD						
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	5.790.000	1	5.939.430
2.10.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				198.000.000		199.999.800
Cakupan Paket Pakaian Dinas dan Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	198.000.000	1	199.999.800
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	2		2	
2.10.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				48.000.000		48.484.800
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	48.000.000	1	48.484.800
2.10.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				150.000.000		151.515.000
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	2	150.000.000	2	151.515.000
2.10.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				304.172.053		307.244.191
Cakupan Paket Penyediaan Kebutuhan Logistik dan Rumah Tangga Kantor serta Laporan Pnyelenggaraan Kordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah dan Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4	4	304.172.053	4	307.244.191
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	4		4	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	6		6	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	3		3	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	5		5	
2.10.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				13.689.930		13.828.198
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	13.689.930	13.828.198
2.10.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				31.425.023	31.742.416
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	3	31.425.023	31.742.416
2.10.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12.621.900	12.749.381
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	5	12.621.900	12.749.381
2.10.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				58.109.100	58.696.002
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	6	58.109.100	58.696.002
2.10.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				37.586.100	37.965.720
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	37.586.100	37.965.720
2.10.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				25.740.000	25.999.974
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4	4	25.740.000	25.999.974
2.10.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				125.000.000	126.262.500
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	4	125.000.000	126.262.500
2.10.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				166.263.700	167.942.963
Cakupan Paket Pengadaan Peralatan dan Bahan serta Unit Aset dan Sarpras Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	3	166.263.700	167.942.963
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		
2.10.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				85.263.700	86.124.863
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	3	85.263.700	86.124.863
2.10.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				81.000.000	81.818.100
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	81.000.000	81.818.100
2.10.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				35.519.000	35.877.742



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
Cakupan Laporan Jasa Surat Menyurat dan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	35.519.000	4	35.877.742
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4		4	
2.10.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				9.889.000		9.988.879
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4	9.889.000	4	9.988.879
2.10.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				25.630.000		25.888.863
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	25.630.000	4	25.888.863
2.10.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				244.940.000		247.413.894
Cakupan Jasa Pemeliharaan Jasa Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	5	244.940.000	5	247.413.894
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1	
2.10.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				110.400.000		111.515.040
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	110.400.000	1	111.515.040
2.10.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				134.540.000		135.898.854
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	5	134.540.000	5	135.898.854
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				272.195.000		274.916.950
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat melalui Mediasi (%)	90	90	272.195.000	91	274.916.950
2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota				272.195.000		274.916.950
Rasio Jumla Kasus yang diajukan dengan penyelesaian Kasus	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	272.195.000		274.916.950

2.10.2.11.0.00.03.0000
- Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
2.10.04.2.01.0005 - Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			272.195.000	274.916.950	
Terinventarisasinya Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	272.195.000	274.916.950
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			50.156.420	50.657.984	
Meningkatnya indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Persentase luas tanah milik pemda yang telah dimanfaatkan untuk pembangunan (%)	38,15	46	50.156.420	50.657.984
2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			50.156.420	50.657.984	
Rasio Penyelesaian Malah Ganti Kerugian dan santunan tanah yang diselesaikan dengan yang belum di seleaikan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	38,15	46	50.156.420	50.657.984
2.10.05.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			50.156.420	50.657.984	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	38,15	46	50.156.420	50.657.984
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			5.964.103.827	6.132.397.047	
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			0	108.566.668	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase rekomendasi KLHS yang ditindaklanjuti dalam dokumen perencanaan daerah (%)	100	0	0	100
2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			0	108.566.668	
RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan (Dokumen)	1		0	1
2.11.02.2.01.0003 - Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota			0	108.566.668	
RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan (Dokumen)	1		0	1



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			219.010.420	221.200.520	
Menurunnya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	53,8	78,35	219.010.420	78,55
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	94,09	85,18		85,38
	Persentase Tutupan Lahan (Persentase)	98,98	96,4		96,47
2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			219.010.420	221.200.520	
Data dan Informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap media Tanah Air dan udara yang dipantau 2 Sungai dengan 12 Parameter Air 1 Lokasi Sampling Udara	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	3	3	219.010.420	3
	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan (Unit)	0	2		2
2.11.03.2.01.0007 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			200.000.000	200.000.000	
Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	3	3	200.000.000	3
2.11.03.2.01.0013 - Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota			19.010.420	21.200.520	
Tersedianya peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan (Unit)	0	2	19.010.420	2
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			505.000.000	510.050.000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Luas RTH publik yang telah terbangun (Ha, kumulatif) (Ha)	36	36	505.000.000	39
2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			505.000.000	510.050.000	
Ruang Terbuka Hijau(RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	17	17	505.000.000	18
2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang			505.000.000	510.050.000	

2.10.2.11.0.00.03.0000
- Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup

HALMAHERA TIMUR BERBENAH - Berani, Bersih, Amanah



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH		
Terbuka Hijau (RTH)							
Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	17	17	505.000.000	18	510.050.000	
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				54.499.600		55.044.590	
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah B3	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	90	91	54.499.600	92	55.044.590	2.10.2.11.0.00.03.0000 - Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
2.11.05.2.01 - Penyimpanan sementara Limbah B3				54.499.600		55.044.590	
Rasio Limbah B3 yang dikelola dengan jumlah verifikasi lapangan yang dilaksana	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan (Usaha)	1	1	54.499.600	1	55.044.590	
2.11.05.2.01.0006 - Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3				54.499.600		55.044.590	
Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan (Usaha)	1	1	54.499.600	1	55.044.590	
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				179.537.600		181.332.970	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang izin PPLH dan PUU LH yang Taat (%)	40	41	179.537.600	42	181.332.970	2.10.2.11.0.00.03.0000 - Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				179.537.600		181.332.970	
Rasio Penanggung jawab Kegiatan dengan Ketaatan Perizinan berusaha terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan Jumlah PPLHD	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	20	20	179.537.600	26	181.332.970	
2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				179.537.600		181.332.970	
Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang	20	20	179.537.600	26	181.332.970	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	diawasi (Badan Usaha)				
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			52.000.000	52.520.000	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	0	80	52.000.000	81
2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			52.000.000	52.520.000	
Rasio Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup terhadap Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	0	50	52.000.000	50
2.11.08.2.01.0003 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup			52.000.000	52.520.000	
Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	0	50	52.000.000	50
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			40.581.800	40.581.800	
Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup			40.581.800	40.581.800	2.10.2.11.0.00.03.0000 - Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			40.581.800	40.581.800	
Rasio Pengduaan yang diajukan terhadap Pengaduan yang diselesaikan dan Jumlah PPNS yang tersedia	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	4	4	40.581.800	4
2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota			40.581.800	40.581.800	
Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	4	4	40.581.800	4
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			4.913.474.407	4.963.100.499	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH		
Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Persentase volume timbunan sampah perkotaan yang sudah ditangani (Ton)	94,91	95,11	4.913.474.407	95,51	4.963.100.499	2.10.2.11.0.00.03.0000 - Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah				4.913.474.407	4.963.100.499		
Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	0	1	4.913.474.407	1	4.963.100.499	
	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	2	2		2		
	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	5.460	5.733		5.747		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	4	2		2		
	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	4	2		2		
2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				35.000.000		35.353.500	
Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	0	1	35.000.000	1	35.353.500	
2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				250.000.000		252.525.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	4	2	250.000.000	2	252.525.000	
2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan				425.380.000		429.676.338	
Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	5.460	5.733	425.380.000	5.747	429.676.338	
2.11.11.2.01.0015 - Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah				4.131.300.000		4.173.026.130	
Sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan	4	2	4.131.300.000	2	4.173.026.130	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)				
2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan			71.794.407	72.519.531	
Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	2	2	71.794.407	72.519.531
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			3.737.935.620	3.831.384.010	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.896.614.970	2.925.581.110	
Tingkat Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Perangkat Daerah (persen)			2.896.614.970	2.925.581.110	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10.000.000	10.000.000	
Meningkatkan program penunjang pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	10.000.000	10.000.000
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1
2.12.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5.000.000	5.000.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	5.000.000	5.000.000
2.12.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			5.000.000	5.000.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	5.000.000	5.000.000
2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.077.135.620	2.128.084.011	
Tingkat Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Perangkat	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	100	100	2.077.135.620	2.128.084.011



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Daerah (persen)	(Dokumen)				
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	100	100	100	
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	100	100	100	
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	100	100	100	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	100	100	100	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	100	100	100	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	100	100	100	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	95	97	98	
2.12.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.037.935.620	2.088.884.011	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	95	97	2.037.935.620	2.088.884.011
2.12.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			5.000.000	5.000.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	100	100	5.000.000	5.000.000
2.12.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			5.500.000	5.500.000	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	100	100	5.500.000	5.500.000
2.12.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			5.000.000	5.000.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	100	100	5.000.000	5.000.000
2.12.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			8.000.000	8.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	100	100	8.000.000	100	8.000.000
2.12.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				6.200.000		6.200.000
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	100	100	6.200.000	100	6.200.000
2.12.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				5.000.000		5.000.000
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	100	100	5.000.000	100	5.000.000
2.12.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4.500.000		4.500.000
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	100	100	4.500.000	100	4.500.000
2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				101.479.350		120.497.099
pengadaan pakai dinas beserta atribut kelekapannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	101.479.350	1	120.497.099
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1		1	
2.12.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				50.000.000		51.000.000
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	50.000.000	1	51.000.000
2.12.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				51.479.350		69.497.099
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	51.479.350	1	69.497.099
2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				152.000.000		106.000.000
penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	152.000.000	1	106.000.000
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	
2.12.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi			22.000.000	12.000.000	
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	22.000.000	12.000.000
2.12.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			30.000.000	20.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	30.000.000	20.000.000
2.12.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor			60.000.000	50.000.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	60.000.000	50.000.000
2.12.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			20.000.000	12.000.000	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	20.000.000	12.000.000
2.12.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			20.000.000	12.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	20.000.000	12.000.000
2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			260.000.000	260.000.000	
pengadaan alat cetak ktp-el	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		1	260.000.000	260.000.000
2.12.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			260.000.000	260.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		1	260.000.000	260.000.000
2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			152.000.000	147.000.000	
penyedia jasa dan peralatan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	152.000.000	147.000.000
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	1	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	(Laporan)				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1	
2.12.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat			30.000.000	25.000.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	30.000.000	25.000.000
2.12.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			22.000.000	22.000.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	22.000.000	22.000.000
2.12.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			60.000.000	60.000.000	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	60.000.000	60.000.000
2.12.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			40.000.000	40.000.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	40.000.000	40.000.000
2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			144.000.000	154.000.000	
Belanja Sewa Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	144.000.000	154.000.000
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1	
2.12.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			114.000.000	114.000.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	114.000.000	114.000.000
2.12.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			30.000.000	40.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	30.000.000	40.000.000
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN			313.100.000	316.231.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH		
PENDUDUK							
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	90	92	313.100.000	93	316.231.000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	90	92		93		
2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk				313.100.000		316.231.000	
Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	1	1	313.100.000	1	316.231.000	
	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	1	1		1		
	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Dokumen)	1	1		1		
	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	1	1		1		
	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)	1	1		1		
	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)	1	1		1		
	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk (Orang)	1	1		1		
2.12.02.2.01.0001 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				48.000.000		52.000.000	
Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	1	1	48.000.000	1	52.000.000	
2.12.02.2.01.0002 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				50.000.000		55.000.000	
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	1	1	50.000.000	1	55.000.000	
2.12.02.2.01.0003 - Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk				42.000.000		42.000.000	
Terlasaksananya Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk (Orang)	1	1	42.000.000	1	42.000.000	
2.12.02.2.01.0004 - Peningkatan Pelayanan				40.000.000		43.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Pendaftaran Penduduk					
Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	1	1	40.000.000	1
2.12.02.2.01.0005 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				41.000.000	42.000.000
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Dokumen)	1	1	41.000.000	1
2.12.02.2.01.0006 - Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				30.000.000	32.000.000
Terlaksananya Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)	1	1	30.000.000	1
2.12.02.2.01.0007 - Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan				62.100.000	50.231.000
Terlaksananya Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)	1	1	62.100.000	1
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL				212.100.000	214.221.000
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	90	92	212.100.000	93
2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil				124.000.000	148.000.000
Persentase akta kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian yang diterbitkan dari laporan peristiwa yang terjadi	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)			124.000.000	148.000.000
	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil (Dokumen)	95	97		98
	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Paket)	100	100		100
	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun (Dokumen)		1		1
	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	90	92		93
2.12.03.2.01.0001 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				20.000.000	22.000.000
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen			20.000.000	22.000.000

2.12.0.00.0.00.01.0000
- Dinas Kependudukan
Dan Catatan Sipil



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Peristiwa Penting	Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)				
2.12.03.2.01.0002 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil			20.000.000	22.000.000	
Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	90	92	20.000.000	93
2.12.03.2.01.0003 - Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil			30.000.000	33.000.000	
Terlaksananya Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil (Dokumen)	95	97	30.000.000	98
2.12.03.2.01.0004 - Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil			34.000.000	48.000.000	
Tersedianya Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun (Dokumen)		1	34.000.000	1
2.12.03.2.01.0005 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan			20.000.000	23.000.000	
Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Paket)	100	100	20.000.000	100
2.12.03.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			88.100.000	66.221.000	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil (Dokumen)	1	1	88.100.000	1
	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	1	1		1
2.12.03.2.03.0001 - Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil			44.100.000	33.100.000	
Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil (Dokumen)	1	1	44.100.000	1
2.12.03.2.03.0004 - Bimbingan Teknis Terkait			44.000.000	33.121.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Pencatatan Sipil					
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	1	1	44.000.000	1
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			252.500.000	255.025.000	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan			252.500.000	255.025.000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			100.000.000	110.000.000	
pemeliharaan server siak dan server ktp	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	82	84	100.000.000	85
	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	1	1		1
	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah (Laporan)	1	1		1
2.12.04.2.01.0001 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan			30.000.000	32.000.000	
Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	82	84	30.000.000	85
2.12.04.2.01.0002 - Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan			40.000.000	46.000.000	
Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	1	1	40.000.000	1
2.12.04.2.01.0003 - Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah			30.000.000	32.000.000	
Terlaksananya Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah (Laporan)	1	1	30.000.000	1
2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			100.000.000	103.000.000	
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan (Dokumen)	1	1	100.000.000	1
	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	1	1		1
2.12.04.2.03.0005 - Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			60.000.000	60.000.000	
Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	1	60.000.000	1



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
(Laporan)					
2.12.04.2.03.0008 - Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan			40.000.000	43.000.000	
Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan (Dokumen)	1	1	40.000.000	43.000.000
2.12.04.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			52.500.000	42.025.000	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	1	1	52.500.000	42.025.000
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	1	2	3	
2.12.04.2.04.0001 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			25.500.000	20.025.000	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	1	2	25.500.000	20.025.000
2.12.04.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan			27.000.000	22.000.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	1	1	27.000.000	22.000.000
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			63.620.650	120.325.900	
Meningkatnya kualitas profil kependudukan			63.620.650	120.325.900	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan			63.620.650	120.325.900	
penyediaan data kependudukan kabupaten	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	95	97	63.620.650	98
	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	95	97	98	
2.12.05.2.01.0001 - Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota			31.060.325	58.655.450	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH		
Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	95	97	31.060.325	98	58.655.450	
2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain				32.560.325		61.670.450	
Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	95	97	32.560.325	98	61.670.450	
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				17.078.868.120		17.505.839.823	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.993.018.120		8.359.989.823	
Tingkat Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Perangkat Daerah (persen)	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	81.50%	85.00%	7.993.018.120	86.50%	8.359.989.823	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				200.000.000		200.000.000	
penyusunan rencana program, penetapan dan meningkatkan capaian kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	1	1	200.000.000	1	200.000.000	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		
2.13.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				150.000.000		150.000.000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	150.000.000	1	150.000.000	
2.13.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				50.000.000		50.000.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	
2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.078.868.120		2.130.839.823	
Pengelolaan dan penyusunan keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20	25	2.078.868.120	25	2.130.839.823	
2.13.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan				2.078.868.120		2.130.839.823	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
Tunjangan ASN						
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20	25	2.078.868.120	25	2.130.839.823
2.13.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				650.000.000		775.000.000
Peningkatan Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20	30	650.000.000	35	775.000.000
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1		1	
2.13.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				150.000.000		175.000.000
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	150.000.000	1	175.000.000
2.13.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				500.000.000		600.000.000
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20	30	500.000.000	35	600.000.000
2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.413.750.000		2.413.750.000
Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	2.413.750.000	1	2.413.750.000
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1		1	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1		1	
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2	2		2	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1	
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1		1	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	1	1		1	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Disediakan (Paket)					
2.13.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi			150.000.000	150.000.000	
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	150.000.000	150.000.000
2.13.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			150.000.000	150.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	150.000.000	150.000.000
2.13.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			100.000.000	100.000.000	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	100.000.000	100.000.000
2.13.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor			105.000.000	105.000.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	105.000.000	105.000.000
2.13.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			100.000.000	100.000.000	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	100.000.000	100.000.000
2.13.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			78.750.000	78.750.000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	78.750.000	78.750.000
2.13.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material			150.000.000	150.000.000	
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1	150.000.000	150.000.000
2.13.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu			200.000.000	200.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2	2	200.000.000	200.000.000
2.13.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.250.000.000	1.250.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	1.250.000.000	1.250.000.000
2.13.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			75.000.000	75.000.000	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	75.000.000	75.000.000
2.13.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada			55.000.000	55.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH	
SKPD						
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	55.000.000	1	55.000.000
2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.550.000.000		1.700.000.000
terfasilitasinya pengadaan barang milik daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	2	1.550.000.000	1	1.700.000.000
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3	3		3	
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	1		3	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	2		2	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1	
2.13.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				500.000.000		500.000.000
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	1	500.000.000	3	500.000.000
2.13.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				250.000.000		250.000.000
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3	3	250.000.000	3	250.000.000
2.13.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				200.000.000		300.000.000
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	2	200.000.000	1	300.000.000
2.13.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				150.000.000		200.000.000
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	2	150.000.000	2	200.000.000
2.13.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				250.000.000		250.000.000
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	250.000.000	1	250.000.000
2.13.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000		200.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	200.000.000	1	200.000.000
2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				290.400.000		310.400.000
terfasilitasinya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	290.400.000	2	310.400.000
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		2	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		2	
2.13.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				80.000.000		100.000.000
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	80.000.000	2	100.000.000
2.13.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100.000.000		100.000.000
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	100.000.000	2	100.000.000
2.13.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				110.400.000		110.400.000
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	110.400.000	2	110.400.000
2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				810.000.000		830.000.000
Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	810.000.000	1	830.000.000
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1	
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1	1		1	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	1		1	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1	
2.13.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				150.000.000		150.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	150.000.000	1	150.000.000
2.13.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				150.000.000		150.000.000
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1	1	150.000.000	1	150.000.000
2.13.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				150.000.000		150.000.000
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	1	150.000.000	1	150.000.000
2.13.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				230.000.000		250.000.000
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	230.000.000	1	250.000.000
2.13.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				130.000.000		130.000.000
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	130.000.000	1	130.000.000
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA				750.000.000		475.000.000
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	9	15	750.000.000	15	475.000.000
2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa				750.000.000		475.000.000
Terlaksananya peningkatan kualitas penataan desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)	9	1	750.000.000	1	475.000.000
	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa (Desa)	1	1		1	
	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya (Desa)	1	1		1	
	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa)	1	1		1	
	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1		1	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	1	1		1	
2.13.02.2.01.0001 - Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				100.000.000		75.000.000
Terlaksananya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan	9	1	100.000.000	1	75.000.000

2.13.0.00.0.00.01.0000
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Perubahan Status Desa (Desa)					
2.13.02.2.01.0002 - Fasilitas Tata Wilayah Desa			150.000.000	50.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Penataan Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa)	1	1	150.000.000	1 50.000.000
2.13.02.2.01.0003 - Fasilitas Penataan Kewenangan Desa			150.000.000	100.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya (Desa)	1	1	150.000.000	1 100.000.000
2.13.02.2.01.0004 - Fasilitas Penamaan dan Kode Desa			100.000.000	100.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa (Desa)	1	1	100.000.000	1 100.000.000
2.13.02.2.01.0005 - Fasilitas Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota			100.000.000	50.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	100.000.000	1 50.000.000
2.13.02.2.01.0006 - Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa			150.000.000	100.000.000	
Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	1	1	150.000.000	1 100.000.000
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			500.000.000	500.000.000	
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam inisiasi kerja sama desa (Desa)	0	18	500.000.000	20 500.000.000
2.13.03.2.01 - Fasilitas Kerja Sama antar Desa			500.000.000	500.000.000	
Peningkatan efektifitas kerja sama desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	2	1	500.000.000	1 500.000.000
	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)		2		1
	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	1		1
2.13.03.2.01.0001 - Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota			150.000.000	150.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)		2	150.000.000	1 150.000.000
2.13.03.2.01.0002 - Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota			200.000.000	200.000.000	
Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa	2	1	200.000.000	1 200.000.000

2.13.0.00.0.00.01.0000
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)				
2.13.03.2.01.0003 - Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan			150.000.000	150.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	2	1	150.000.000	1
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			5.075.850.000	5.010.850.000	
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa yang tertib administrasi dan akuntabel	Persentase desa yang memiliki dokumen perencanaan dan pelaporan sesuai regulasi (%)	9	15	5.075.850.000	15
	Persentase desa yang tertib administrasi pemerintahan (%)	9	15		15
2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			5.075.850.000	5.010.850.000	
peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	47	1	5.075.850.000	2
	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	102	1		2
	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Desa)	25	1		2
	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	20	1		2
	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	1	1		2
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa (Dokumen)	1	1		2
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	102	1		2
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	102	1		2
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	-	1		2
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	-	1		2
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)		1		2
	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang	1	1		2

2.13.0.00.0.00.01.0000
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Dilaksanakan oleh Desa (Dokumen)				
	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	-	1	2	
	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	1	1	2	
	Jumlah Laporan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)		1	2	
	Jumlah Laporan Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Laporan)	1	1	2	
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	1	1	2	
	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	102	1	2	
2.13.04.2.01.0001 - Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			150.000.000	150.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	-	1	150.000.000	2
2.13.04.2.01.0002 - Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa			100.000.000	100.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	-	1	100.000.000	2
2.13.04.2.01.0003 - Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			150.000.000	150.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	-	1	150.000.000	2
2.13.04.2.01.0004 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa			1.580.000.000	1.580.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	102	1	1.580.000.000	2
2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			250.000.000	350.000.000	
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	102	1	250.000.000	2
2.13.04.2.01.0006 - Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa			150.000.000	150.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Laporan)	1	1	150.000.000	2
2.13.04.2.01.0007 - Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa			100.000.000	100.000.000	
Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	20	1	100.000.000	2
2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja			150.000.000	150.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)		PERANGKAT DAERAH
Sama antar Desa							
Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)		1	150.000.000	2	150.000.000	
2.13.04.2.01.0009 - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				800.000.000		425.000.000	
Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	102	1	800.000.000	2	425.000.000	
2.13.04.2.01.0010 - Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				150.000.000		150.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)		1	150.000.000	2	150.000.000	
2.13.04.2.01.0011 - Fasilitas Penyusunan Profil Desa				100.000.000		200.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	1	1	100.000.000	2	200.000.000	
2.13.04.2.01.0012 - Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa				100.000.000		160.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa (Dokumen)	1	1	100.000.000	2	160.000.000	
2.13.04.2.01.0013 - Fasilitas Pengelolaan Aset Desa				75.000.000		175.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	102	1	75.000.000	2	175.000.000	
2.13.04.2.01.0014 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD				745.850.000		695.850.000	
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	47	1	745.850.000	2	695.850.000	
2.13.04.2.01.0015 - Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa				100.000.000		100.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Desa)	25	1	100.000.000	2	100.000.000	
2.13.04.2.01.0016 - Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa				100.000.000		100.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	1	1	100.000.000	2	100.000.000	
2.13.04.2.01.0017 - Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa				100.000.000		100.000.000	
Terlaksananya Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa (Dokumen)	1	1	100.000.000	2	100.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH		
2.13.04.2.01.0018 - Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			175.000.000	175.000.000			
Terlaksananya Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	1	1	175.000.000	2	175.000.000	
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			2.760.000.000	3.160.000.000			
Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	0	15	2.760.000.000	15	3.160.000.000	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.760.000.000	3.160.000.000			
Peningkata KAPasitas Kelembagaan dalam pembangunan desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	3	3	2.760.000.000	3	3.160.000.000	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	2	1		1		
	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	1	2		1		
	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	1	1		1		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	3	5		6		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdava Saing (Keluarga)	3	5		6		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1	1	1	
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2	1	1	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Unit)	2	1	1	
2.13.05.2.01.0001 - Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat			100.000.000	100.000.000	
Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	1	2	100.000.000	100.000.000
2.13.05.2.01.0002 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			300.000.000	300.000.000	
Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	1	1	300.000.000	300.000.000
2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			750.000.000	1.150.000.000	
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2	1	750.000.000	1.150.000.000
2.13.05.2.01.0004 - Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan			175.000.000	175.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Masyarakat Hukum Adat					
Terlaksananya Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Unit)	2	1	175.000.000	175.000.000
2.13.05.2.01.0005 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				150.000.000	150.000.000
Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	3	3	150.000.000	150.000.000
2.13.05.2.01.0006 - Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				350.000.000	350.000.000
Terlaksananya Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1	1	350.000.000	350.000.000
2.13.05.2.01.0009 - Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				600.000.000	600.000.000
Terlaksananya Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	2	1	600.000.000	600.000.000
2.13.05.2.01.0010 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				185.000.000	185.000.000
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	3	5	185.000.000	185.000.000
2.13.05.2.01.0011 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				150.000.000	150.000.000
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	3	5	150.000.000	150.000.000
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG				8.595.767.980	8.815.662.180



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.745.067.980	3.835.662.180	
Tingkat Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Perangkat Daerah (persen)	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	80	85,5	3.745.067.980	86
2.14.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25.000.000	25.000.000	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tersusunnya dokumen Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah. Tersusunnya dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah setiap tahun. Tersusunnya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Tersusunnya dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) perangkat daerah. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah. Tersusunnya Perjanjian Kinerja (PK) perangkat daerah. Tersusunnya laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) perangkat daerah. Tersusunnya laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	25.000.000	1
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1
2.14.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			20.000.000	20.000.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	20.000.000	1
2.14.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			5.000.000	5.000.000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	5.000.000	1



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
2.14.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.850.767.980	1.896.912.180	
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, evaluasi, serta tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan perangkat daerah.	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	1.850.767.980	1.896.912.180
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	32	32	
2.14.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.845.767.980	1.891.912.180	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	32	1.845.767.980	1.891.912.180
2.14.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			5.000.000	5.000.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	5.000.000	5.000.000
2.14.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			220.000.000	354.450.000	
Tersusunnya data kepegawaian perangkat daerah yang mutakhir dan terintegrasi.	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	220.000.000	354.450.000
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	1	
2.14.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			60.000.000	60.000.000	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	60.000.000	60.000.000
2.14.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			160.000.000	294.450.000	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	160.000.000	294.450.000
2.14.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			660.000.000	660.000.000	
Meningkatnya tertib administrasi, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah.	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	660.000.000	660.000.000
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	1	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	1	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1	1	1	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	1	
2.14.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				50.000.000	50.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	50.000.000	50.000.000
2.14.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000	100.000.000
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	100.000.000	100.000.000
2.14.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				40.000.000	40.000.000
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	40.000.000	40.000.000
2.14.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				80.000.000	80.000.000
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	80.000.000	80.000.000
2.14.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				40.000.000	40.000.000
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	40.000.000	40.000.000
2.14.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				350.000.000	350.000.000
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	350.000.000	350.000.000
2.14.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				490.400.000	390.400.000
Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (sarana prasarana kantor, peralatan kerja, kendaraan dinas, TIK, dan lainnya).	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	2	490.400.000	390.400.000
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	1		1
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	2		2
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	4	2		2



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Lainnya yang Disediakan (Unit)					
2.14.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			110.400.000	110.400.000	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	1	110.400.000	1
2.14.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel			40.000.000	40.000.000	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	2	40.000.000	2
2.14.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			40.000.000	40.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	2	40.000.000	2
2.14.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			300.000.000	200.000.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	2	300.000.000	2
2.14.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			258.900.000	258.900.000	
Tersusunnya rencana kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	258.900.000	1
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1
2.14.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat			10.000.000	10.000.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	10.000.000	1
2.14.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			50.000.000	50.000.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	50.000.000	1
2.14.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			198.900.000	198.900.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	198.900.000	1
2.14.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			240.000.000	250.000.000	
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan sarana	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2	2	240.000.000	2



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
dan prasarana perkantoran (gedung, kendaraan dinas, peralatan kerja, TIK, dan perlengkapan lainnya).	(Unit)				
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7	5	5	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	2	
2.14.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			170.000.000	180.000.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7	5	170.000.000	180.000.000
2.14.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			50.000.000	50.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	2	50.000.000	50.000.000
2.14.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			20.000.000	20.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	20.000.000	20.000.000
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			600.000.000	729.300.000	
Meningkatnya pengendalian pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)	2,7	2,6	600.000.000	729.300.000
2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			428.000.000	537.300.000	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tersusunnya dokumen kebijakan bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengendalian kuantitas penduduk.	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	11	19	428.000.000	537.300.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	0	
	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	1	
	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	1	
	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)	1	1	1	
	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)	0	8	8	
	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)	1	1	1	
	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan (Kegiatan)	1	1	1	
	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga (Kegiatan)	0	1	1	
	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan (Dokumen)	0	1	0	
2.14.02.2.01.0016 - Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan				50.000.000	50.000.000
Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan (Kegiatan)	1	1	50.000.000	50.000.000
2.14.02.2.01.0017 - Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				30.000.000	50.000.000
Terlaksananya Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga (Kegiatan)	0	1	30.000.000	50.000.000
2.14.02.2.01.0023 - Pelaksanaan Rapat				48.000.000	50.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
Pengendalian Program Bangsa Kencana						
Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)	1	1	48.000.000	1	50.000.000
2.14.02.2.01.0025 - Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				30.000.000		0
Terlaksananya Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	30.000.000	0	0
2.14.02.2.01.0027 - Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal				50.000.000		110.000.000
Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	11	19	50.000.000	25	110.000.000
2.14.02.2.01.0028 - Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				50.000.000		50.000.000
Terlaksananya Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)	0	8	50.000.000	8	50.000.000
2.14.02.2.01.0030 - Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				50.000.000		47.300.000
Terlaksananya Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)	1	1	50.000.000	1	47.300.000
2.14.02.2.01.0031 - Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan				40.000.000		60.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH	
Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota						
Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	40.000.000	1	60.000.000
2.14.02.2.01.0032 - Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Kepedulian Terhadap Isu Kependudukan (IKIK)				30.000.000		0
Terlaksananya Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan (Dokumen)	0	1	30.000.000	0	0
2.14.02.2.01.0033 - Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				50.000.000		120.000.000
Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	50.000.000	1	120.000.000
2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				172.000.000		192.000.000
Tersedianya data dasar kependudukan daerah (jumlah, distribusi, struktur umur, jenis kelamin, laju pertumbuhan).	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan (Dokumen)	0	1	172.000.000	0	192.000.000
	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan (Dokumen)	0	1		1	
	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan (Dokumen)	0	1		0	
	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	1	1		1	
	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	1	1		1	
	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)	33	35		30	
2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan				1.000.000		1.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH	
Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga						
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	1	1	1.000.000	1	1.000.000
2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				1.000.000		1.000.000
Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	1	1	1.000.000	1	1.000.000
2.14.02.2.02.0022 - Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan				40.000.000		0
Terlaksananya Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan (Dokumen)	0	1	40.000.000	0	0
2.14.02.2.02.0024 - Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan				40.000.000		100.000.000
Terlaksananya Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan (Dokumen)	0	1	40.000.000	1	100.000.000
2.14.02.2.02.0025 - Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB				40.000.000		0
Terlaksananya Perumusan dan Evaluasi Parameter Pengendalian penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan (Dokumen)	0	1	40.000.000	0	0
2.14.02.2.02.0026 - Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain				50.000.000		90.000.000
Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)	33	35	50.000.000	30	90.000.000
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				500.000.000		500.000.000
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	62	64	500.000.000	66	500.000.000
2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)				260.000.000		260.000.000
						2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.08.2.14.0.00.02.0000
- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)		PERANGKAT DAERAH
Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal							
Tersusunnya rencana advokasi dan KIE pengendalian penduduk dan KB berbasis kearifan lokal.	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	1	1	260.000.000	1	260.000.000	
	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1		1		
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	10	10		10		
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	10	10		10		
	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	10	10		10		
	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	2	6		8		
2.14.03.2.01.0008 - Pengendalian Program KKBPK				20.000.000		20.000.000	
Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	10	10	20.000.000	10	20.000.000	
2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana				50.000.000		50.000.000	
Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	10	10	50.000.000	10	50.000.000	
2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam).				50.000.000		50.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)					
Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	10	10	50.000.000	10 50.000.000
2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				20.000.000	20.000.000
Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	1	1	20.000.000	1 20.000.000
2.14.03.2.01.0013 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal				70.000.000	70.000.000
Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1	70.000.000	1 70.000.000
2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				50.000.000	50.000.000
Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	2	6	50.000.000	8 50.000.000
2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				100.000.000	100.000.000
Terlaksananya penyuluhan, advokasi, dan KIE pengendalian penduduk dan KB kepada masyarakat.	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	50	100	100.000.000	100 100.000.000
	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1	1		1



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	(Laporan)				
	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)	2	6	6	
2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			20.000.000	20.000.000	
Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	50	100	20.000.000	100
2.14.03.2.02.0005 - Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB			20.000.000	20.000.000	
Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)	2	6	20.000.000	6
2.14.03.2.02.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			60.000.000	60.000.000	
Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	1	1	60.000.000	1
2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			70.000.000	70.000.000	
Tersedianya data stok dan distribusi alat/obat kontrasepsi yang mutakhir. Terdistribusinya alat dan obat kontrasepsi ke fasilitas pelayanan KB (puskesmas, klinik, rumah sakit, bidan praktek). Terlaksananya pelayanan KB (IUD, implant, suntik, pil, kondom, MOW/MOP) secara berkualitas dan merata.	Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan (Kegiatan)	1	1	70.000.000	1
	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas	1	1	1	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)				
	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	628	800	1.000	
	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Orang)	30	30	30	
2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			10.000.000	10.000.000	
Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	1	1	10.000.000	10.000.000
2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			10.000.000	10.000.000	
Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	628	800	10.000.000	1.000
2.14.03.2.03.0010 - Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi			30.000.000	30.000.000	
Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Orang)	30	30	30.000.000	30
2.14.03.2.03.0017 - Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan			20.000.000	20.000.000	
Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan (Kegiatan)	1	1	20.000.000	1
2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			70.000.000	70.000.000	
Tersusunnya rencana kerja pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dalam bidang KB.	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	2	10	70.000.000	25



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	1	1	1	
2.14.03.2.04.0005 - Fasilitas Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas			40.000.000	40.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	2	10	40.000.000	25
2.14.03.2.04.0007 - Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			30.000.000	30.000.000	
Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	1	1	30.000.000	1
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			3.750.700.000	3.750.700.000	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	67	75	3.750.700.000	75,3
2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			240.700.000	240.700.000	
Terlaksananya pembinaan ketahanan keluarga melalui kelompok kegiatan (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia).	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)	315	315	240.700.000	315
	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)	60	100		100
	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	1	1		1
	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan	25	10		5

2.08.2.14.0.00.02.0000
- Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)				
	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia (Kegiatan)	1	1	1	
2.14.04.2.01.0015 - Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL			60.700.000	60.000.000	
Terlaksananya aktifitas lansia sesuai tujuh dimensi lansia tangguh dalam mewujudkan lansia yang Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia (Kegiatan)	1	1	60.700.000	60.000.000
2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))			70.000.000	70.000.000	
Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	1	1	70.000.000	70.000.000
2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))			20.000.000	20.000.000	
Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	25	10	20.000.000	20.000.000
2.14.04.2.01.0019 - Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))			70.000.000	70.000.000	
Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)	60	100	70.000.000	70.000.000
2.14.04.2.01.0024 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			20.000.000	20.700.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)		PERANGKAT DAERAH
(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))							
Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)	315	315	20.000.000	315	20.700.000	
2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				3.510.000.000		3.510.000.000	
Terlaksananya kemitraan pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan (PKK, Karang Taruna, organisasi perempuan, organisasi keagamaan, dsb.) dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	1	1	3.510.000.000	1	3.510.000.000	
	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	1	1		1		
2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				10.000.000		10.000.000	
Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	
2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				3.500.000.000		3.500.000.000	
Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	1	1	3.500.000.000	1	3.500.000.000	
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				20.683.578.280		21.200.667.737	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.516.506.580		5.781.167.737	
Tingkat Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Perangkat				5.516.506.580		5.781.167.737	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
Daerah (persen)						
2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.433.578.280	2.494.417.737		
Persentase realisasi anggaran dan penyampaian laporan keuangan tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25	45	2.433.578.280	50	2.494.417.737
2.15.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.433.578.280	2.494.417.737		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25	45	2.433.578.280	50	2.494.417.737
2.15.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100.000.000	0		
Persentase data BMD yang tervalidasi dan tercatat dalam sistem	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	2	100.000.000	0	
2.15.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			100.000.000	0		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	2	100.000.000	0	
2.15.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			430.000.000	455.000.000		
Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	430.000.000	1	455.000.000
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20	25			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	150			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	40	50	50		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20	25	25		
2.15.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			75.000.000	75.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	40	50	75.000.000	50	75.000.000
2.15.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			80.000.000	80.000.000		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	80.000.000	1	80.000.000
2.15.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			125.000.000	300.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20	25	125.000.000	25	300.000.000
2.15.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan			50.000.000	0		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Perundang-Undangan					
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	150	50.000.000	0
2.15.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				100.000.000	0
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20	25	100.000.000	0
2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				649.028.300	777.850.000
Persentase layanan administrasi umum yang terdokumentasi dan dilaksanakan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2	4	649.028.300	4
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	8	10		13
2.15.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				35.000.000	50.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	35.000.000	1
2.15.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				153.000.000	190.000.000
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	153.000.000	1
2.15.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12.000.000	12.000.000
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	8	10	12.000.000	13
2.15.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.028.300	126.850.000
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	100.028.300	1
2.15.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang				25.000.000	25.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
Cetakan dan Penggandaan						
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	25.000.000	1	25.000.000
2.15.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				24.000.000		24.000.000
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2	4	24.000.000	4	24.000.000
2.15.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300.000.000		350.000.000
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	300.000.000	12	350.000.000
2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100.000.000		250.000.000
Persentase realisasi pengadaan BMD yang tercatat dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan perangkat daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	9	15	100.000.000	18	250.000.000
2.15.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000		250.000.000
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	9	15	100.000.000	18	250.000.000
2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				428.900.000		278.900.000
Persentase pelaksanaan jasa penunjang yang dimanfaatkan untuk mendukung operasional perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	428.900.000	12	278.900.000
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1	
2.15.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		3.000.000
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	3.000.000	1	3.000.000
2.15.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				115.500.000		115.500.000
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	115.500.000	12	115.500.000
2.15.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				110.400.000		110.400.000
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	110.400.000	1	110.400.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
2.15.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			200.000.000	50.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	200.000.000	1	50.000.000
2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.375.000.000	1.525.000.000		
Persentase BMD penunjang yang terpelihara dan berfungsi optimal	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2	1.375.000.000	2	1.525.000.000
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18	20		20	
2.15.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.125.000.000	1.325.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18	20	1.125.000.000	20	1.325.000.000
2.15.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			250.000.000	200.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2	250.000.000	2	200.000.000
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			8.243.571.700	7.712.406.810		
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Rasio konektivitas darat (persen) (%)	86,27	87,25	8.243.571.700	88,24	7.712.406.810
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	35,18	48,01		53,01	
	Rasio Konektivitas Darat (Rasio)	0	0		0	
2.15.02.2.01 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			800.000.000	0		
Tersusunnya dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	800.000.000		0
	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1			
2.15.02.2.01.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			750.000.000	0		
Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	750.000.000		0
2.15.02.2.01.0002 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			50.000.000	0		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	50.000.000	0
2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				3.670.071.700	3.628.000.000
Rasio perlengkapan jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	5	3	3.670.071.700	4
	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	23	35		20
	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)	4	7		11
	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	0			
2.15.02.2.02.0001 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				210.000.000	280.000.000
Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)	4	7	210.000.000	11
2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				3.310.071.700	3.048.000.000
Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	5	3	3.310.071.700	4
2.15.02.2.02.0003 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan				0	0
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	0		0	0
2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				150.000.000	300.000.000
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	23	35	150.000.000	20
2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				1.400.000.000	1.000.000.000
Persentase terminal tipe C yang beroperasi secara fungsional dengan fasilitas pelayanan	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi. (Orang)	0		1.400.000.000	1.000.000.000
	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	1			
	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang (Unit)	1	1		1
2.15.02.2.03.0009 - Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang				1.400.000.000	1.000.000.000
Terbangunnya Terminal Tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas	1	1	1.400.000.000	1



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Penunjang (Unit)					
2.15.02.2.03.0010 - Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C			0	0	
Terlaksana Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi. (Orang)	0	0	0	
2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)			0	0	
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	1	0	0	
2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			0	0	
2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			635.000.000	1.294.406.810	
Persentase kualitas Layanan Transportasi darat	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	1.000	1.200	635.000.000	1.294.406.810
	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (Laporan)	4	2	2	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	8	8	8	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	10	4	4	
	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	4	3	2	
2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			250.000.000	965.000.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	10	4	250.000.000	965.000.000
2.15.02.2.05.0002 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			105.000.000	70.406.810	
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	4	3	105.000.000	70.406.810
2.15.02.2.05.0004 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			30.000.000	0	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	1.000	1.200	30.000.000	0
2.15.02.2.05.0006 - Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji				100.000.000	250.000.000
Terlaksananya Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (Laporan)	4	2	100.000.000	250.000.000
2.15.02.2.05.0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				150.000.000	9.000.000
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	8	8	150.000.000	9.000.000
2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1.113.500.000	1.000.000.000
Persentase titik jalan kabupaten yang telah ditata dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	0	1	1.113.500.000	1.000.000.000
	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan)	1	3		4
	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	2		2
	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) (Unit)	0	3		5
2.15.02.2.06.0013 - Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)				200.000.000	100.000.000
Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) (Unit)	0	3	200.000.000	100.000.000
2.15.02.2.06.0014 - Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				213.500.000	200.000.000
Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	2	213.500.000	200.000.000
2.15.02.2.06.0015 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				200.000.000	200.000.000
Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	0	1	200.000.000	200.000.000
2.15.02.2.06.0017 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan				500.000.000	500.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
Kabupaten/Kota						
Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan)	1	3	500.000.000	4	500.000.000
2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				200.000.000		340.000.000
Tingkat kepatuhan implementasi Andalalin dan kompetensi petugas penilai yang ditingkatkan	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (Laporan)	2	2	200.000.000	2	340.000.000
	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi (Orang)	2			4	
2.15.02.2.07.0005 - Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin				0		140.000.000
Meningkatnya Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi (Orang)	2		0	4	140.000.000
2.15.02.2.07.0006 - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin				200.000.000		200.000.000
Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (Laporan)	2	2	200.000.000	2	200.000.000
2.15.02.2.08 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				275.000.000		300.000.000
Jumlah lokasi audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota (Laporan)	2	2	275.000.000	2	300.000.000
	Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Laporan)	2	2		2	
2.15.02.2.08.0004 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				150.000.000		150.000.000
Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota (Laporan)	2	2	150.000.000	2	150.000.000
2.15.02.2.08.0006 - Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C				125.000.000		150.000.000
Terlaksananya Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Laporan)	2	2	125.000.000	2	150.000.000
2.15.02.2.09 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah				150.000.000		150.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)		PERANGKAT DAERAH
Kabupaten/Kota							
Jumlah trayek angkutan umum antarkota dalam kabupaten yang tersedia dan beroperasi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	2	4	150.000.000	6	150.000.000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
2.15.02.2.09.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				150.000.000		150.000.000	
Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	2	4	150.000.000	6	150.000.000	
2.15.02.2.10 - Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		0	
2.15.02.2.11 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		0	
2.15.02.2.12 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		0	
2.15.02.2.13 - Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		0	
2.15.02.2.14 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		0	
2.15.02.2.15 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		0	
2.15.02.2.16 - Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		0	
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				6.923.500.000	7.707.093.190		
Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Rasio konektivitas laut (persen) (%)	60,61	78,79	6.923.500.000	84,85	7.707.093.190	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
2.15.03.2.12 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal			6.463.500.000	7.107.093.190	
Jumlah pelabuhan pengumpan lokal yang dibangun, beroperasi, diawasi, dan dilengkapi fasilitas pelayanan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia (Unit)	1	6.463.500.000	2	7.107.093.190
	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal (Laporan)	2	4		
	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)	4	6	8	
	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun (Unit)	13	20	23	
2.15.03.2.12.0002 - Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal			5.303.500.000	5.947.093.190	
Terbangunnya Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun (Unit)	13	20	5.303.500.000	5.947.093.190
2.15.03.2.12.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal			1.000.000.000	660.000.000	
Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)	4	6	1.000.000.000	660.000.000
2.15.03.2.12.0004 - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal			160.000.000	0	
Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal (Laporan)	2	4	160.000.000	0
2.15.03.2.12.0005 - Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal			0	500.000.000	
Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan lokal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia (Unit)	1	0	2	500.000.000
2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau			460.000.000	600.000.000	
Jumlah dokumen persyaratan perizinan yang disusun, sarana pelabuhan yang dipelihara, serta fasilitas keselamatan dan pelayanan pelabuhan yang tersedia dan diawasi.	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara (Unit)	9	460.000.000	600.000.000	
	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan (Dokumen)	0		1	
	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia (Unit)	0	1		
	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan	0	1	2	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Penyeberangan (Laporan)				
	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)	1	1		
2.15.03.2.13.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau				0	550.000.000
Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan (Dokumen)	0		0	1 550.000.000
2.15.03.2.13.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau				200.000.000	0
Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)	1	1	200.000.000	0
2.15.03.2.13.0007 - Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau				0	0
Terlaksananya Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara (Unit)	9		0	0
2.15.03.2.13.0010 - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan				50.000.000	50.000.000
Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Laporan)	0	1	50.000.000	2 50.000.000
2.15.03.2.13.0011 - Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan				210.000.000	0
Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia (Unit)	0	1	210.000.000	0
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				4.401.211.960	4.500.057.259
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.891.211.960	2.950.057.259
Tingkat Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Perangkat Daerah (persen)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Skor)	100	100	2.891.211.960	100 2.950.057.259
2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.000.000	12.000.000
Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	5	12.000.000	5 12.000.000
2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12.000.000	12.000.000

2.16.2.20.2.21.02.0000
- Dinas Komunikasi,
Informatika,
Persandian dan
Statistik



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	5	12.000.000	5	12.000.000
2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.713.811.960		1.756.657.259
Persentase Terwujudnya Penatausahaan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100	29	1.713.811.960	29	1.756.657.259
2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.713.811.960		1.756.657.259
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100	29	1.713.811.960	29	1.756.657.259
2.16.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				5.000.000		5.000.000
Persentase Nilai penguatan keuangan dan aset	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	5.000.000	4	5.000.000
2.16.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5.000.000		5.000.000
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	5.000.000	4	5.000.000
2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				230.000.000		230.000.000
Nilai Indeks Profesionalitas	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	37	37	230.000.000	37	230.000.000
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1		1	
2.16.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				80.000.000		80.000.000
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	80.000.000	1	80.000.000
2.16.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				150.000.000		150.000.000
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	37	37	150.000.000	37	150.000.000
2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				584.000.000		600.000.000
Penilaian pengawasan Arsip Administrasi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	1	584.000.000	1	600.000.000
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1		1	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5	6	6	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	15	16	17	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	1	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	4	4	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	1	
2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				15.000.000	15.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	15.000.000	15.000.000
2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				200.000.000	200.000.000
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	4	200.000.000	200.000.000
2.16.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000	10.000.000
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	10.000.000	10.000.000
2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.000.000	55.000.000
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	50.000.000	55.000.000
2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				10.000.000	11.000.000
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	10.000.000	11.000.000
2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.000.000	2.000.000
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	1	2.000.000	2.000.000
2.16.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.000.000	15.000.000
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	6	15.000.000	15.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
(Laporan)					
2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			250.000.000	260.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	15	16	250.000.000	260.000.000
2.16.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			32.000.000	32.000.000	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	32.000.000	32.000.000
2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			310.400.000	310.400.000	
Persentase Nilai penguatan keuangan dan aset	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	10	310.400.000	310.400.000
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	1	1	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	1	
2.16.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			110.400.000	110.400.000	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	1	110.400.000	110.400.000
2.16.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel			100.000.000	100.000.000	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	10	100.000.000	100.000.000
2.16.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			100.000.000	100.000.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	100.000.000	100.000.000
2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			36.000.000	36.000.000	
Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	1	36.000.000	36.000.000
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1	1	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	12	12	12	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Menyurat (Laporan)					
2.16.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat			10.000.000	10.000.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	10.000.000	12
2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			3.000.000	3.000.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	1	3.000.000	1
2.16.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000	3.000.000	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1	3.000.000	1
2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			20.000.000	20.000.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	20.000.000	12
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			700.000.000	725.000.000	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (Indeks)	40,6	41,8	700.000.000	44,2
2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			700.000.000	725.000.000	2.16.2.20.2.21.02.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Persentase produksi konten yang dipublikasi melalui media cetak dan digital	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	1	2	700.000.000	2
	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	3	4		4
	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	12	12		12
	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	1	3		4
	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	2	5		6



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)		PERANGKAT DAERAH
	(Rekomendasi)					
	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (Persentase)	0	30		30,5	
	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	20	40,5		40,6	
2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media			100.000.000		100.000.000	
Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	1	2	100.000.000	2	100.000.000
2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik			100.000.000		105.000.000	
Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	1	3	100.000.000	4	105.000.000
2.16.02.2.01.0018 - Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik			100.000.000		105.000.000	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (Persentase)	0	30	100.000.000	30,5	105.000.000
2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik			100.000.000		105.000.000	
Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	2	5	100.000.000	6	105.000.000
2.16.02.2.01.0020 - Diseminasi Informasi			100.000.000		105.000.000	
Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	20	40,5	100.000.000	40,6	105.000.000
2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik			100.000.000		100.000.000	
Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	12	12	100.000.000	12	100.000.000
2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten			100.000.000		105.000.000	
Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	3	4	100.000.000	4	105.000.000
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			810.000.000		825.000.000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (Indeks)	40,6	41,8	810.000.000	44,2	825.000.000
						2.16.2.20.2.21.02.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

2.16.2.20.2.21.02.0000
- Dinas Komunikasi,
Informatika,
Persandian dan
Statistik



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			10.000.000	10.000.000		
Persentase domain yang dikelola pemerintah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	35	40	10.000.000	40	10.000.000
2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa			10.000.000	10.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	35	40	10.000.000	40	10.000.000
2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			800.000.000	815.000.000		
Jumlah Layanan Berbasis Elektronik di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota yang dikelola	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	6	7	800.000.000	7	815.000.000
	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	1	2		2	
	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	2		2	
	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	1	5		5	
	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	0	3		3	
	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	6	7		7	
	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	35	36		36	
	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan	35	37		37	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
oleh Dinas (Perangkat Daerah)					
2.16.03.2.02.0019 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				100.000.000	100.000.000
Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	1	5	100.000.000	5
2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi				150.000.000	150.000.000
Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	35	36	150.000.000	36
2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE				120.000.000	120.000.000
Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	6	7	120.000.000	7
2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan				100.000.000	105.000.000
Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	1	2	100.000.000	2
2.16.03.2.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				100.000.000	100.000.000
Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	0	3	100.000.000	3
2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet				100.000.000	105.000.000
Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	35	37	100.000.000	37
2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				100.000.000	105.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH		
Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	2	100.000.000	2	105.000.000	
2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas				30.000.000		30.000.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitas penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	6	7	30.000.000	7	30.000.000	
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				3.269.266.060		3.398.497.712	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.619.266.060		2.748.497.712	
Tingkat Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Perangkat Daerah (persen)	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	95,36	96,91	2.619.266.060	97,69	2.748.497.712	2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30.000.000		30.000.000	
Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	100	30.000.000	100	30.000.000	
2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				30.000.000		30.000.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	100	30.000.000	100	30.000.000	
2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.669.266.060		1.710.997.712	
Persentase cakupan pelayanan adminitrasi keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	26	47	1.669.266.060	47	1.710.997.712	
2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.669.266.060		1.710.997.712	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	26	47	1.669.266.060	47	1.710.997.712	
2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				173.000.000		200.000.000	
Ketersediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	26	47	173.000.000	47	200.000.000	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20	20		20		
2.17.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				73.000.000		100.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	26	47	73.000.000	47	100.000.000
2.17.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				100.000.000		100.000.000
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20	20	100.000.000	20	100.000.000
2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				630.000.000		690.500.000
Presentase administrasi umum SKPD tersedia dan terlayani	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	12	630.000.000	12	690.500.000
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12		12	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	100		100	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	12		12	
2.17.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				55.000.000		55.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	55.000.000	12	55.000.000
2.17.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000		100.000.000
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	100	100.000.000	100	100.000.000
2.17.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				50.000.000		50.000.000
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	12	50.000.000	12	50.000.000
2.17.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.000.000		100.000.000
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	100.000.000	12	100.000.000
2.17.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang				50.000.000		50.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH		
Cetakan dan Penggandaan							
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	50.000.000	12	50.000.000	
2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				265.000.000		325.500.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	265.000.000	12	325.500.000	
2.17.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				10.000.000		10.000.000	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	12	10.000.000	12	10.000.000	
2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				39.000.000		39.000.000	
Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	39.000.000	12	39.000.000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.000	100		100		
2.17.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				14.000.000		14.000.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.000	100	14.000.000	100	14.000.000	
2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				25.000.000		25.000.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	25.000.000	12	25.000.000	
2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				78.000.000		78.000.000	
Presentase jasa urusan penunjang umum SKPD tersedia dan terlayani	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	100	100	78.000.000	100	78.000.000	
2.17.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				78.000.000		78.000.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	100	100	78.000.000	100	78.000.000	
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				100.000.000		100.000.000	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan	82	66,57	100.000.000	69,57	100.000.000	2.17.3.31.3.30.07.0000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)		PERANGKAT DAERAH
koperasi	Koperasi (Persentase)					- Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				100.000.000	100.000.000	
Terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan koperasi, termasuk koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, sesuai kewenangan Kabupaten/Kota untuk mewujudkan koperasi yang sehat, transparan, dan akuntabe	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	82	92	100.000.000	102	100.000.000
2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000	100.000.000	
Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	82	92	100.000.000	102	100.000.000
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				50.000.000	50.000.000	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase)	1,2	3,5	50.000.000	6	50.000.000
2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000	50.000.000	
Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan dan tata kelola koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	82	92	50.000.000	102	50.000.000
2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				50.000.000	50.000.000	
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	82	92	50.000.000	102	50.000.000
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				500.000.000	500.000.000	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	3,78	4,57	500.000.000	5,03	500.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH Perindustrian, Koperasi dan UKM
2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			500.000.000	500.000.000	
Terlaksananya pemberdayaan usaha mikro melalui pendataan, fasilitasi kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing usaha mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	82	92	500.000.000	102
2.17.07.2.01.0002 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro			500.000.000	500.000.000	
Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	82	92	500.000.000	102
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			3.927.004.020	4.025.179.121	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.865.004.020	2.952.929.121	
Tingkat Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Perangkat Daerah (persen)			2.865.004.020	2.952.929.121	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			22.000.000	22.000.000	
Tersusunnya dokumen perencanaan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	1	22.000.000	1
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5	1		1
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5	1		1
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	1		1
2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2.000.000	2.000.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	1	2.000.000	1



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
2.18.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1.000.000	1.000.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5	1	1.000.000	1
2.18.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1.000.000	1.000.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5	1	1.000.000	1
2.18.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			18.000.000	18.000.000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	1	18.000.000	1
2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.520.004.020	1.557.929.121	
Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	1	1.520.004.020	1
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	10	2		2
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	70	30		30
2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.517.004.020	1.554.929.121	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	70	30	1.517.004.020	30
2.18.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1.000.000	1.000.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	1	1.000.000	1
2.18.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			2.000.000	2.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	10	2	2.000.000	2	2.000.000
2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				350.000.000		350.000.000
Jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	30	30	350.000.000	30	350.000.000
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	300	100		100	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	169	30		30	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	59	30		30	
2.18.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				50.000.000		50.000.000
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	169	30	50.000.000	30	50.000.000
2.18.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				100.000.000		100.000.000
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	59	30	100.000.000	30	100.000.000
2.18.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100.000.000		100.000.000
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	300	100	100.000.000	100	100.000.000
2.18.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				100.000.000		100.000.000
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	30	30	100.000.000	30	100.000.000
2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				609.000.000		659.000.000
Tersedianya jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5	1	609.000.000	1	659.000.000
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	1		1	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	1		1	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	0	10		10	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Disediakan (Dokumen)				
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	5	1	1	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	1	1	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	1	1	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5	1	1	
2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				2.000.000	2.000.000
ListriK/Penerangan Bangunan Kantor					
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	1	2.000.000	1 2.000.000
2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.000.000	2.000.000
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	1	2.000.000	1 2.000.000
2.18.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.000.000	3.000.000
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5	1	3.000.000	1 3.000.000
2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				200.000.000	200.000.000
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	1	200.000.000	1 200.000.000
2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				30.000.000	80.000.000
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	1	30.000.000	1 80.000.000
2.18.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.000.000	2.000.000
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	10	2.000.000	10 2.000.000
2.18.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				20.000.000	20.000.000
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	5	1	20.000.000	1 20.000.000
2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				350.000.000	350.000.000
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5	1	350.000.000	1 350.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			50.000.000	50.000.000	
Tersedianya barang milik daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	35	3	50.000.000	3
2.18.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			50.000.000	50.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	35	3	50.000.000	3
2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			54.000.000	54.000.000	
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5	1	54.000.000	1
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5	1		1
2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.000.000	4.000.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5	1	4.000.000	1
2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			50.000.000	50.000.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5	1	50.000.000	1
2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			260.000.000	260.000.000	
Terpeliharanya barang milik daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	260.000.000	1
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3		3
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	21	5		5
2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			150.000.000	150.000.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	150.000.000	1
2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			10.000.000	10.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	21	5	10.000.000	5	10.000.000
2.18.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	100.000.000	3	100.000.000
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				122.000.000		124.020.000
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	100	65	122.000.000	70	124.020.000
2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				72.000.000		74.020.000
Tersedianya jumlah peraturan daerah fasilitasi/ insentif bidang penanaman modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	0	1	72.000.000	1	74.020.000
	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)	0	1		1	
	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	0	1		1	
2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				52.000.000		54.020.000
Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	0	1	52.000.000	1	54.020.000
2.18.02.2.01.0003 - Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota				10.000.000		10.000.000
Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	0	1	10.000.000	1	10.000.000
2.18.02.2.01.0004 - Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko				10.000.000		10.000.000
Ditetapkannya rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	0	1	10.000.000	1	10.000.000

2.18.0.00.0.00.01.0000
- Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
(Dokumen)					
2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			50.000.000	50.000.000	
Tersedianya peta potensi investasi kabupaten	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	0	1	50.000.000	1
	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	1	50.000.000
	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	1	
2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			20.000.000	20.000.000	
Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	20.000.000	1
2.18.02.2.02.0003 - Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)			10.000.000	10.000.000	
Tersedianya data potensi investasi daerah yang temutakhirkan	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	0	1	10.000.000	1
2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			20.000.000	20.000.000	
Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	20.000.000	1
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			400.000.000	360.000.000	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	171,39	65	400.000.000	70
2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			400.000.000	360.000.000	
Tersedianya dokumen penyelenggaraan promosi penanaman modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	171.39 %	1	400.000.000	1
	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	171.39 %	1	1	360.000.000
2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			150.000.000	160.000.000	
Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	171.39 %	1	150.000.000	1

2.18.0.00.0.00.01.0000
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota			250.000.000	200.000.000	
Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	171.39 %	1	250.000.000	1
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			270.000.000	275.000.000	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100	65	270.000.000	70
2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			270.000.000	275.000.000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan dan non perizinan	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	270.000.000	1
	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	300	100		100
	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	0	5		5
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	150	100		110
2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah			10.000.000	10.000.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	10.000.000	1
2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			150.000.000	155.000.000	
Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem	150	100	150.000.000	110



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)				
2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko			80.000.000	80.000.000	
Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	300	100	80.000.000	100
2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko			30.000.000	30.000.000	
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	0	5	30.000.000	5
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			220.000.000	263.230.000	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100	65	220.000.000	70
2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			220.000.000	263.230.000	
Terlaksananya pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	20	10	220.000.000	7
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	798	50		150
	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	20	5		5
2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan			30.000.000	30.000.000	

2.18.0.00.0.00.01.0000
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
Usahanya						
Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	20	5	30.000.000	5	30.000.000
2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha			140.000.000		183.230.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	798	50	140.000.000	150	183.230.000
2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal			50.000.000		50.000.000	
Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	20	10	50.000.000	7	50.000.000
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			50.000.000		50.000.000	
Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	65	50.000.000	70	50.000.000
2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			50.000.000		50.000.000	
Terlaksananya pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan terintegrasi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	5	1	50.000.000	1	50.000.000
2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			50.000.000		50.000.000	
Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	5	1	50.000.000	1	50.000.000
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA			11.840.977.100		12.137.001.528	

2.18.0.00.0.00.01.0000
- Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.237.179.100	4.284.651.528	
Tingkat Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Perangkat Daerah (persen)			4.237.179.100	4.284.651.528	2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			87.500.000	91.000.000	
Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	87.500.000	1	91.000.000
2.19.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			87.500.000	91.000.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	87.500.000	1	91.000.000
2.19.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.290.977.100	1.304.873.528	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12	1.290.977.100	14	1.304.873.528
2.19.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.290.977.100	1.304.873.528	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12	1.290.977.100	14	1.304.873.528
2.19.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			200.000.000	202.000.000	
Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4	200.000.000	5	202.000.000
2.19.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			200.000.000	202.000.000	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4	200.000.000	5	202.000.000
2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			961.957.000	976.533.000	
Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	961.957.000	1	976.533.000
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1	
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		1	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		1	1	
2.19.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi			67.450.000	70.026.000	
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	67.450.000	1	70.026.000
2.19.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			200.000.000	202.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	200.000.000	1	202.000.000
2.19.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			76.975.000	78.975.000	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	76.975.000	1	78.975.000
2.19.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor			86.077.000	88.077.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	86.077.000	1	88.077.000
2.19.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			86.000.000	88.000.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	86.000.000	1	88.000.000
2.19.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu			95.455.000	97.455.000	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	95.455.000	1	97.455.000
2.19.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			350.000.000	352.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	350.000.000	1	352.000.000
2.19.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			700.000.000	703.000.000	
Persentase Ketercukupan Sarana & Prasarana Aparatur	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	700.000.000	6	703.000.000
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		4	
2.19.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			350.000.000	351.500.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	350.000.000	6	351.500.000
2.19.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan			350.000.000	351.500.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Lainnya					
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	350.000.000	4	351.500.000
2.19.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			166.305.000		172.305.000
Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	166.305.000	1	172.305.000
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1	
2.19.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat			25.990.000		27.490.000
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	25.990.000	1	27.490.000
2.19.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			60.850.000		62.350.000
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	60.850.000	1	62.350.000
2.19.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			15.465.000		16.965.000
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	15.465.000	1	16.965.000
2.19.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			64.000.000		65.500.000
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	64.000.000	1	65.500.000
2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			830.440.000		834.940.000
Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	1	830.440.000	1	834.940.000
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4		6	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	1		1	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)					
2.19.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			110.400.000	110.400.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	110.400.000	1	110.400.000
2.19.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			20.040.000	21.540.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	20.040.000	6	21.540.000
2.19.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			250.000.000	251.500.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	250.000.000	1	251.500.000
2.19.01.2.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah			450.000.000	451.500.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	1	450.000.000	1	451.500.000
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			500.000.000	608.045.000	
Meningkatnya daya saing kepemudaan			500.000.000	608.045.000	2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			500.000.000	608.045.000	
Persentase pemuda berprestasi, Persentase fasilitas dalam pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	20	500.000.000	25	608.045.000
	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	2		4	
	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)	15		20	
2.19.02.2.01.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota			200.000.000	250.000.000	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat	20	200.000.000	25	250.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota	kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)				
2.19.02.2.01.0013 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota			200.000.000	250.000.000	
Terlaksananya Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)	15	200.000.000	20 250.000.000	
2.19.02.2.01.0016 - Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota			100.000.000	108.045.000	
Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana kepemudaan melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	2	100.000.000	4 108.045.000	
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			7.103.798.000	7.244.305.000	
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga			7.103.798.000	7.244.305.000	2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			4.903.798.000	4.932.305.000	
Prsentase Hasil Pembinaan Olahraga Usia Dini, dan Pemeliharaan Prasarana dan Penyediaan Sarana Olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	4	4.903.798.000	6 4.932.305.000	
	Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota (Unit)	6		8	
2.19.03.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota			150.000.000	173.379.000	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota (Unit)	6	150.000.000	8 173.379.000	
2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota			4.753.798.000	4.758.926.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH	
Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)		4	4.753.798.000	6	4.758.926.000
2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.500.000.000		1.547.000.000
Presentase penyelenggaraan kejuaraan olahraga	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)		1	1.500.000.000	1	1.547.000.000
	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)		110			
2.19.03.2.02.0004 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				300.000.000		322.000.000
Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)		1	300.000.000	1	322.000.000
2.19.03.2.02.0006 - Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				1.200.000.000		1.225.000.000
Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)		110	1.200.000.000		1.225.000.000
2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				400.000.000		445.000.000
Prsentase pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) (Pelatda)		1	400.000.000	2	445.000.000
	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)		150		160	
2.19.03.2.03.0006 - Seleksi Atlet Daerah				150.000.000		172.500.000
Terlaksananya Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)		150	150.000.000	160	172.500.000
2.19.03.2.03.0008 - Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				250.000.000		272.500.000
Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) (Pelatda)		1	250.000.000	2	272.500.000
2.19.03.2.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				300.000.000		320.000.000
Persentase pengelolaan organisasi	Persentase pengelolaan organisasi		20	300.000.000	25	320.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH		
keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional (Dokumen)						
2.19.03.2.04.0005 - Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota			300.000.000	320.000.000			
Terlaksananya pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota sesuai standar nasional	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional (Dokumen)	20	300.000.000	25	320.000.000		
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			0	0			
Meningkatnya kualitas kepramukaan			0	0	2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kepemudaan dan Olahraga		
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			210.000.000	220.000.000			
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			210.000.000	220.000.000			
Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral daerah	Persentase Publikasi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) dalam Modul E-Walidata SIPD (Persentase)	20	20,8	210.000.000	49,6	220.000.000	2.16.2.20.2.21.02.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			210.000.000	220.000.000			
Jumlah Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang terselenggara	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	2	5	210.000.000	6	220.000.000	
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	10	30		30		
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	10	40		45		
2.20.02.2.01.0017 - Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional			60.000.000	60.000.000			
Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	10	30	60.000.000	30	60.000.000	
2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia			100.000.000	105.000.000			
Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	10	40	100.000.000	45	105.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
2.20.02.2.01.0020 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral			50.000.000	55.000.000		
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	2	5	50.000.000	6	55.000.000
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			332.600.000	347.350.000		
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			332.600.000	347.350.000		
Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah (%)	23,8	47,6	332.600.000	62,7	347.350.000
2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			200.000.000	210.000.000		
Persentase aplikasi yang sudah diuji keamanan informasi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	0	2	200.000.000	3	210.000.000
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	1	2		3	
2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			100.000.000	105.000.000		
Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	1	2	100.000.000	3	105.000.000
2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah			100.000.000	105.000.000		
Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	0	2	100.000.000	3	105.000.000

2.16.2.20.2.21.02.0000
- Dinas Komunikasi,
Informatika,
Persandian dan
Statistik



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
(Dokumen)					
2.21.02.2.02 - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			132.600.000	137.350.000	
Persentase JKS yang sudah dibentuk	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	1	3	132.600.000	137.350.000
2.21.02.2.02.0002 - Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah			132.600.000	137.350.000	
Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	1	3	132.600.000	137.350.000
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			350.000.000	370.000.000	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			100.000.000	105.000.000	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan			100.000.000	105.000.000	3.26.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			50.000.000	55.000.000	
Jumlah Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	6	15	50.000.000	55.000.000
2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			50.000.000	55.000.000	
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	6	15	50.000.000	55.000.000
2.22.02.2.03 - Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			50.000.000	50.000.000	
Jumlah Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	0	1	50.000.000	50.000.000
	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi (Unit)	1	1	1	
2.22.02.2.03.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan			25.000.000	25.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH		
Lembaga Adat							
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	0	1	25.000.000	1	25.000.000	
2.22.02.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat				25.000.000		25.000.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi (Unit)	1	1	25.000.000	1	25.000.000	
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				100.000.000		105.000.000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah				100.000.000		105.000.000	3.26.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000		105.000.000	
Jumlah Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)		2	100.000.000	2	105.000.000	
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)		10		10		
2.22.03.2.01.0001 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional				80.000.000		85.000.000	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)		10	80.000.000	10	85.000.000	
2.22.03.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional				20.000.000		20.000.000	
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)		2	20.000.000	2	20.000.000	
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				50.000.000		55.000.000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah				50.000.000		55.000.000	3.26.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
2.22.04.2.01 - Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000		55.000.000	
Jumlah data Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	0	1	50.000.000	1	55.000.000	
2.22.04.2.01.0003 - Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah				50.000.000		55.000.000	
Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah	0	1	50.000.000	1	55.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Diakses Masyarakat	yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)				
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			100.000.000	105.000.000	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan			100.000.000	105.000.000	3.26.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			100.000.000	105.000.000	
Jumlah Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	0	10	100.000.000	10
	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	0	10		10
	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan (Objek)	0	15		15
2.22.05.2.01.0001 - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya			25.000.000	25.000.000	
Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	0	10	25.000.000	10
2.22.05.2.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya			50.000.000	55.000.000	
Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	0	10	50.000.000	10
2.22.05.2.01.0003 - Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda			25.000.000	25.000.000	
Terlaksananya Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan (Objek)	0	15	25.000.000	15
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			932.616.156	1.186.125.358	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			331.296.856	422.451.058	
Tingkat Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah			331.296.856	422.451.058	2.23.2.24.0.00.23.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12.000.000	12.000.000	
Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	4	12.000.000	4
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	2		2
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	1		1
2.23.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4.000.000	4.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	2	4.000.000	2	4.000.000
2.23.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3.000.000		3.000.000
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	3.000.000	1	3.000.000
2.23.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5.000.000		5.000.000
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	4	5.000.000	4	5.000.000
2.23.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.485.856		37.481.108
Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	1	10.485.856	1	37.481.108
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0	11		20	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	4		4	
2.23.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				485.856		27.481.108
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0	11	485.856	20	27.481.108
2.23.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5.000.000		5.000.000
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	1	5.000.000	1	5.000.000
2.23.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				5.000.000		5.000.000
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	4	5.000.000	4	5.000.000
2.23.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian				35.000.000		82.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Perangkat Daerah					
Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	35.000.000	3	82.000.000
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		2	2	
2.23.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			35.000.000		35.000.000
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		2	2	35.000.000
2.23.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			0		47.000.000
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	3	47.000.000
2.23.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			175.161.000		180.819.950
Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	10	10	180.819.950
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	2		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	1	1	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	5	5	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	1	1	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	5	5	
2.23.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi			5.500.000		5.500.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	5	5	5.500.000
2.23.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			41.500.000		0
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	2		0
2.23.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			5.000.000		5.000.000
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	1	1	5.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
2.23.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor			10.000.000	10.000.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	5	10.000.000	5
2.23.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			5.811.000	5.319.950	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	1	5.811.000	1
2.23.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			107.350.000	155.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	10	107.350.000	10
2.23.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			61.000.000	72.500.000	
Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	61.000.000	72.500.000
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		3	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	5		
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0		3	
2.23.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0	50.000.000	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0		0	3
2.23.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel			46.000.000	0	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	5	46.000.000	0
2.23.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0	22.500.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		0	3
2.23.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			15.000.000	0	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	15.000.000	0
2.23.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			27.650.000	27.650.000	
Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	1	27.650.000	1



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	(Laporan)				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	2	2	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	1	1	
2.23.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.650.000	4.650.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	1	4.650.000	4.650.000
2.23.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			18.000.000	18.000.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	2	18.000.000	18.000.000
2.23.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5.000.000	5.000.000	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1	5.000.000	5.000.000
2.23.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			10.000.000	10.000.000	
Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0		10.000.000	10.000.000
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	1	1	
2.23.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			10.000.000	10.000.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	1	10.000.000	10.000.000
2.23.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0	0	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0		0	0
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN			601.319.300	710.763.300	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH		
PERPUSTAKAAN							
Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	0	0	601.319.300	0	710.763.300	2.23.2.24.0.00.23.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				349.088.300	458.532.300		
Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	0	500	349.088.300	500	458.532.300	
	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	27	15		20		
	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Eksemplar)	1.556			1.500		
	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)	0					
	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	0	4		8		
	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	0	3		3		
	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)	0	3		0		
	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	171	60				
2.23.02.2.01.0004 - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan				34.562.750	84.562.750		
Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	0	4	34.562.750	8	84.562.750	
2.23.02.2.01.0011 - Pengembangan				55.708.000	0		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)	0	3	55.708.000	0
2.23.02.2.01.0013 - Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota				44.808.500	44.808.500
Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	0	3	44.808.500	3
2.23.02.2.01.0016 - Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				134.848.000	0
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	171	60	134.848.000	0
2.23.02.2.01.0017 - Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan				60.911.050	110.911.050
Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	27	15	60.911.050	20
2.23.02.2.01.0018 - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan				18.250.000	18.250.000
Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	0	500	18.250.000	500
2.23.02.2.01.0019 - Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota				0	200.000.000
Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Eksemplar)	1.556		0	1.500
2.23.02.2.01.0020 - Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik				0	0
Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)	0		0	0
2.23.02.2.02 - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				252.231.000	252.231.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)		PERANGKAT DAERAH
Persentase Pelaksanaa Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	0	2	252.231.000	2	252.231.000
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)	8	7		7	
	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Perpustakaan)	0	1		1	
2.23.02.2.02.0008 - Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				35.650.000		35.650.000
Terlaksananya Pembangunan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Perpustakaan)	0	1	35.650.000	1	35.650.000
2.23.02.2.02.0009 - Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				189.581.000		189.581.000
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)	8	7	189.581.000	7	189.581.000
2.23.02.2.02.0010 - Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				27.000.000		27.000.000
Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	0	2	27.000.000	2	27.000.000
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				0		52.911.000
Meningkatnya Pelestarian Koleksi Arsip Nasional dan kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	0	0	0	0	52.911.000
2.23.03.2.01 - Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota				0		52.911.000
Pesentase Pelaksanaan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan (Eksemplar)	0		0	2	52.911.000
	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)	2			2	
2.23.03.2.01.0003 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan,				0		31.351.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH		
Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno							
Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)	2	0	2	31.351.000		
2.23.03.2.01.0004 - Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan			0		21.560.000		
Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan (Eksemplar)	0	0	2	21.560.000		
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			317.869.700		422.605.750		
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			317.869.700		374.154.750		
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase perangkat daerah yang memiliki daftar arsip aktif dan inaktif (%)	0	0	317.869.700	0	374.154.750	2.23.2.24.0.00.23.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.02.2.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			76.485.000		146.485.000		
Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)	500	500	76.485.000	800	146.485.000	
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	4	4		4		
	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)	171	700		500		
	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis (Unit)	0			2		
2.24.02.2.01.0001 - Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis			23.060.000		18.060.000		
Terkelolanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)	171	700	23.060.000	500	18.060.000	
2.24.02.2.01.0002 - Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis			31.120.000		46.120.000		
Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)	500	500	31.120.000	800	46.120.000	
2.24.02.2.01.0003 - Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			22.305.000		22.305.000		
Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	4	4	22.305.000	4	22.305.000	
2.24.02.2.01.0004 - Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis			0		60.000.000		
Terlaksananya pengadaan prasarana dan	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan	0	0	2	60.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
sarana pengelolaan arsip statis	arsip statis (Unit)				
2.24.02.2.02 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			20.720.000	27.505.800	
Pesentase Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)	12	5	20.720.000	8 27.505.800
2.24.02.2.02.0004 - Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis			20.720.000	27.505.800	
Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)	12	5	20.720.000	8 27.505.800
2.24.02.2.03 - Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			220.664.700	200.163.950	
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	94	4	220.664.700	8 200.163.950
	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna)	0	5		
2.24.02.2.03.0001 - Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN			33.045.750	0	
Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna)	0	5	33.045.750	0
2.24.02.2.03.0002 - Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota			187.618.950	200.163.950	
Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	94	4	187.618.950	8 200.163.950
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			0	48.451.000	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	0	0	0	0 48.451.000
2.24.03.2.01 - Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			0	48.451.000	
Persentase Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)	500	0	500	48.451.000
	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah	500		300	

2.23.2.24.0.00.23.0000
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
10 Tahun yang Dimusnahkan (Berkas)					
2.24.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun			0	27.771.000	
Terlaksananya Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan (Berkas)	500	0	300	27.771.000
2.24.03.2.01.0004 - Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			0	20.680.000	
Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)	500	0	500	20.680.000
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			5.770.957.359	5.915.231.293	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.120.957.360	3.268.981.294	
Tingkat Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Perangkat Daerah (persen)			3.120.957.360	3.268.981.294	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			22.500.000	25.000.000	
Presentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	22.500.000	1
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1
3.25.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4.500.000	5.000.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	4.500.000	1
3.25.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			4.500.000	5.000.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	1	1	4.500.000	1



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Dokumen RKA-SKPD	SKPD (Dokumen)				
3.25.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			4.500.000	5.000.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	4.500.000	5.000.000
3.25.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4.500.000	5.000.000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	4.500.000	5.000.000
3.25.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.500.000	5.000.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	4.500.000	5.000.000
3.25.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.940.957.360	1.998.981.294	
Presentase Ketersediaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	33	46	1.940.957.360	1.998.981.294
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1		1
3.25.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.920.957.360	1.968.981.294	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	33	46	1.920.957.360	1.968.981.294
3.25.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			10.000.000	15.000.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	10.000.000	15.000.000
3.25.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			10.000.000	15.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	10.000.000	1	15.000.000
3.25.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				110.000.000		110.000.000
Presentase Ketersediaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	1	1	110.000.000	1	110.000.000
	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1		1	
	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1		1	
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1		1	
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1		1	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1		1	
	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	1	1		1	
3.25.01.2.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah				10.000.000		10.000.000
Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	10.000.000
3.25.01.2.04.0002 - Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah				10.000.000		10.000.000
Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	10.000.000
3.25.01.2.04.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				50.000.000		50.000.000
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	1	1	50.000.000	1	50.000.000
3.25.01.2.04.0004 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah				10.000.000		10.000.000
Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	10.000.000
3.25.01.2.04.0005 - Pengolahan Data Retribusi Daerah				10.000.000		10.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	1	1	10.000.000	1	10.000.000
3.25.01.2.04.0006 - Penetapan Wajib Retribusi Daerah				10.000.000		10.000.000
Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	10.000.000
3.25.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				10.000.000		10.000.000
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	10.000.000
3.25.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				325.600.000		325.600.000
Presentase Ketersediaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	325.600.000	1	325.600.000
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	8	8		8	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	33	46		46	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6	6		6	
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1	1		1	
3.25.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				50.000.000		50.000.000
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1	1	50.000.000	1	50.000.000
3.25.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				165.600.000		165.600.000
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	33	46	165.600.000	46	165.600.000
3.25.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				25.000.000		25.000.000
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	25.000.000	1	25.000.000
3.25.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				45.000.000		45.000.000
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6	6	45.000.000	6	45.000.000
3.25.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				40.000.000		40.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	8	8	40.000.000	8	40.000.000
3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				438.135.000		500.635.000
Presentasi Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	438.135.000	1	500.635.000
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1	
3.25.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				20.000.000		25.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	20.000.000	1	25.000.000
3.25.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				65.000.000		65.000.000
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	65.000.000	1	65.000.000
3.25.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.500.000		9.500.000
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	7.500.000	1	9.500.000
3.25.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				45.000.000		45.000.000
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	45.000.000	1	45.000.000
3.25.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				35.012.000		39.012.000
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	35.012.000	1	39.012.000
3.25.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				40.000.000		40.000.000
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	40.000.000	1	40.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
3.25.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			225.623.000	277.123.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	225.623.000	1
3.25.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			10.000.000	35.000.000	
Presentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	10	10.000.000	10
3.25.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	10	10.000.000	10
3.25.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			84.275.000	84.275.000	
Presentase Ketersediaan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	84.275.000	1
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1
3.25.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat			7.275.000	7.275.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	7.275.000	1
3.25.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			65.000.000	65.000.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	65.000.000	1
3.25.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			12.000.000	12.000.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	12.000.000	1
3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			189.490.000	189.490.000	
Presentase Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	189.490.000	1
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	2		2
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	10	10		10



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH		
Dipelihara (Unit)							
3.25.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			110.400.000	110.400.000			
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	110.400.000	1	110.400.000	
3.25.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			39.090.000	39.090.000			
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	2	39.090.000	2	39.090.000	
3.25.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5.000.000	5.000.000			
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	10	5.000.000	10	5.000.000	
3.25.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			35.000.000	35.000.000			
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	35.000.000	1	35.000.000	
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			883.333.333	882.083.333			
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	8.718,83	9.154,77	883.333.333	9.612,51	882.083.333	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			103.333.333	104.366.666			
Jumlah Nelayan atau Armada Kapal yang Terdaftar dan Beroperasi Secara Legal	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1	1	103.333.333	1	104.366.666	
3.25.03.2.01.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan			103.333.333	104.366.666			
Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1	1	103.333.333	1	104.366.666	
3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			650.000.000	654.000.000			
Jumlah Nelayan yang Meningkatkan Pengetahuannya	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan	5	10	650.000.000	10	654.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
	Kelembagaannya (Kelompok)					
	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	50	50	50		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	152	6	4		
	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	0	10	12		
3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil			100.000.000	101.000.000		
Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	50	50	100.000.000	50	101.000.000
3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil			50.000.000	51.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	5	10	50.000.000	10	51.000.000
3.25.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha			100.000.000	102.000.000		
Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha kepada Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	0	10	100.000.000	12	102.000.000
3.25.03.2.02.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil			400.000.000	400.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	152	6	400.000.000	4	400.000.000
3.25.03.2.03 - Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			130.000.000	123.716.667		
Jumlah Ikan yang Dilelang.	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)	0	156	130.000.000	156	123.716.667
	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Dokumen)	0	3	2		
3.25.03.2.03.0001 - Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			50.000.000	50.500.000		
Ditetapkannya SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Dokumen)	0	3	50.000.000	2	50.500.000
3.25.03.2.03.0002 - Pelayanan			80.000.000	73.216.667		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)					
Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)	0	156	80.000.000	15673.216.667
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				883.333.333	882.083.333
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1.079	1.133	883.333.333	1.190882.083.3333.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				275.000.000	280.000.000
Jumlah Pokdakan yang mendapatkan Pelatihan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	5	5	275.000.000	5280.000.000
3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				275.000.000	280.000.000
Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	5	5	275.000.000	5280.000.000
3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				608.333.333	602.083.333
Meningkatnya Biaya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	608.333.333	1602.083.333
	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	10	11		11
3.25.04.2.04.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				80.500.000	81.363.650
Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	80.500.000	181.363.650
3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				527.833.333	520.719.683
Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	10	11	527.833.333	11520.719.683
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN				883.333.333	882.083.333



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH		
PEMASARAN HASIL PERIKANAN							
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	46,2	46,7	883.333.333	47,1	882.083.333	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil				66.000.000		66.660.000	
Peningkatan legalitas, akses pasar dan potensi pertumbuhan usaha	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	1	1	66.000.000	1	66.660.000	
3.25.06.2.01.0005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko				66.000.000		66.660.000	
Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	1	1	66.000.000	1	66.660.000	
3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				65.000.000		65.065.000	
Kepatuhan terhadap standar operasional Prosedur (SOP) Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	5	5	65.000.000	5	65.065.000	
3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				65.000.000		65.065.000	
Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	5	5	65.000.000	5	65.065.000	
3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				752.333.333		750.358.333	
Ketersediaan dan kualitas bahan baku, efisiensi produksi dan keberlanjutan sumberdaya perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	10	10	752.333.333	10	750.358.333	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)		PERANGKAT DAERAH
	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	3	3	3		
3.25.06.2.03.0001 - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			150.000.000	150.150.000		
Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	3	3	150.000.000	3	150.150.000
3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			602.333.333	600.208.333		
Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	10	10	602.333.333	10	600.208.333
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			4.062.889.960	4.153.212.209		
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.212.889.960	3.280.712.209		
Tingkat Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Perangkat Daerah (%)	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	83	85	3.212.889.960	86,3	3.280.712.209
3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30.000.000	30.000.000		
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	30.000.000	1	30.000.000
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1		1	
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1	
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
3.26.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5.000.000	5.000.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	5.000.000	1
3.26.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			5.000.000	5.000.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	5.000.000	1
3.26.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			5.000.000	5.000.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	5.000.000	1
3.26.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			5.000.000	5.000.000	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	5.000.000	1
3.26.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			5.000.000	5.000.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	5.000.000	1
3.26.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			5.000.000	5.000.000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	5.000.000	1
3.26.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.547.889.960	2.610.712.209	
Jumlah Dokumen Realisasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2	2	2.547.889.960	2
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1		1
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2	2		2
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2	2		2
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	2	2		2



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)				
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	2	2	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25	40	40	
3.26.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.512.889.960	2.575.712.209	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25	40	2.512.889.960	2.575.712.209
3.26.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			5.000.000	5.000.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	5.000.000	5.000.000
3.26.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan			5.000.000	5.000.000	
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2	2	5.000.000	5.000.000
3.26.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			5.000.000	5.000.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2	2	5.000.000	5.000.000
3.26.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			5.000.000	5.000.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	5.000.000	5.000.000
3.26.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			5.000.000	5.000.000	
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2	2	5.000.000	5.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
3.26.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			5.000.000	5.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	2	5.000.000	2	5.000.000
3.26.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			5.000.000	5.000.000		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2	2	5.000.000	2	5.000.000
3.26.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			150.000.000	150.000.000		
Jumlah Laporan Realisasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3	2	150.000.000	2	150.000.000
3.26.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			150.000.000	150.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3	2	150.000.000	2	150.000.000
3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			345.000.000	350.000.000		
Jumlah Laporan Realisasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	345.000.000	1	350.000.000
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1	
3.26.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi			25.000.000	25.000.000		
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	25.000.000	1	25.000.000
3.26.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			120.000.000	120.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	1	1	120.000.000	1	120.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Kantor	Kantor yang Disediakan (Paket)				
3.26.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor			40.000.000	40.000.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	40.000.000	1
3.26.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			10.000.000	10.000.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	10.000.000	1
3.26.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu			70.000.000	70.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	70.000.000	1
3.26.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			80.000.000	85.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	80.000.000	1
3.26.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			40.000.000	40.000.000	
Jumlah laporan realisasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	40.000.000	1
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1
3.26.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat			7.000.000	7.000.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	7.000.000	1
3.26.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			13.000.000	13.000.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	13.000.000	1
3.26.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			10.000.000	10.000.000	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	10.000.000	1
3.26.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			10.000.000	10.000.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	1	1	10.000.000	1



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)					
3.26.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.000.000	100.000.000	
Jumlah Laporan Realisasi Pemeliharaan Branag Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	100.000.000	1
3.26.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			100.000.000	100.000.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	100.000.000	1
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			600.000.000	607.500.000	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	83	85	600.000.000	86
3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			550.000.000	552.500.000	
Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	550.000.000	1
	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota (Dokumen)		1		
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1		1
	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	2	2		2
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	5	4		5
3.26.02.2.03.0002 - Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			100.000.000	150.000.000	
Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	100.000.000	1
3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			225.000.000	260.000.000	
Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan	5	4	225.000.000	5

3.26.2.22.0.00.01.0000
- Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)				
3.26.02.2.03.0006 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				75.000.000	82.500.000
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	2	2	75.000.000	82.500.000
3.26.02.2.03.0008 - Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000	0
Tersusunnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kab/Kota (Dokumen)		1	100.000.000	0
3.26.02.2.03.0010 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				50.000.000	60.000.000
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	50.000.000	60.000.000
3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000	55.000.000
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi (Usaha Pariwisata)	5	10	50.000.000	55.000.000
3.26.02.2.04.0006 - Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota				50.000.000	55.000.000
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021)Terjaganya konsistensi pelaksanaan standar CHSE	Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi (Usaha Pariwisata)	5	10	50.000.000	55.000.000
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				100.000.000	105.000.000
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	83,7	85	100.000.000	105.000.000
3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				100.000.000	105.000.000

3.26.2.22.0.00.01.0000
- Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Jumlah Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen)	0	1	100.000.000	1
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	0	1		1
	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	1	1		1
	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	0	1		1
	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	1	1		1
3.26.03.2.01.0003 - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				20.000.000	21.000.000
Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	0	1	20.000.000	21.000.000
3.26.03.2.01.0004 - Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				20.000.000	21.000.000
Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	0	1	20.000.000	21.000.000
3.26.03.2.01.0005 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				20.000.000	21.000.000
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen)	0	1	20.000.000	21.000.000
3.26.03.2.01.0006 - Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota				20.000.000	21.000.000
Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	1	1	20.000.000	21.000.000
3.26.03.2.01.0007 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				20.000.000	21.000.000
Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	1	1	20.000.000	21.000.000
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN				50.000.000	55.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH		
EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL							
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	0	85	50.000.000	86,5	55.000.000	3.26.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifA				50.000.000		55.000.000	
Persentase Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif (Laporan)	0	1	50.000.000	1	55.000.000	
	Jumlah terlaksanakannya pendudukan pemasaran ekonomi kreatif (Promosi)	0	1		1		
3.26.04.2.02.0003 - Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan				25.000.000		27.500.000	
Terfasilitasinya Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif (Laporan)	0	1	25.000.000	1	27.500.000	
3.26.04.2.02.0017 - Pendudukan Pemasaran Ekonomi Kreatif				25.000.000		27.500.000	
Terlaksanakannya pendudukan pemasaran ekonomi kreatif	Jumlah terlaksanakannya pendudukan pemasaran ekonomi kreatif (Promosi)	0	1	25.000.000	1	27.500.000	
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				100.000.000		105.000.000	
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	0	85	100.000.000	86,3	105.000.000	3.26.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				100.000.000		105.000.000	
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Laporan)	0	1	100.000.000	1	105.000.000	
	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	5	10		10		
3.26.05.2.01.0009 - Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata				50.000.000		52.500.000	
Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	5	10	50.000.000	10	52.500.000	
3.26.05.2.01.0011 - Monitoring dan Evaluasi				50.000.000		52.500.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH		
Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif							
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Laporan)	0	1	50.000.000	1	52.500.000	
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			59.045.477.760	60.521.614.704			
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8.154.820.960	8.252.733.832			
Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan di tingkat perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Skor)	63,75	65	8.154.820.960	66	8.252.733.832	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			106.250.000	107.590.000			
Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah agar lebih efektif dan efisien	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	2	106.250.000	1	107.590.000	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		
3.27.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			35.500.000	35.855.000			
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	2	35.500.000	1	35.855.000	
3.27.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			35.500.000	35.855.000			
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	35.500.000	2	35.855.000	
3.27.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			35.250.000	35.880.000			
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	35.250.000	1	35.880.000	
3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.058.204.700	5.108.786.747			
Pengelolaan keuangan perangkat daerah yang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	5.058.204.700	1	5.108.786.747	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku	dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)				
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	60	34	34	
3.27.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.994.904.700	5.044.853.747	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	60	34	4.994.904.700	5.044.853.747
3.27.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			63.300.000	63.933.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	63.300.000	63.933.000
3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.166.465.600	1.186.417.756	
Pengelolaan Dokumen dan laporan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12	1.166.465.600	1.186.417.756
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	70	88	88	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	13	14	15	
3.27.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			563.482.800	569.117.628	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	70	88	563.482.800	569.117.628
3.27.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			50.482.800	50.987.628	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12	50.482.800	50.987.628
3.27.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			552.500.000	566.312.500	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	13	14	552.500.000	566.312.500
3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.400.588.100	1.422.393.981	
Pengelolaan Sarana dan Prasarana, layanan Umum, dan operasional perangkat daerah yang efektif dan efisien	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	1.400.588.100	1.422.393.981
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	12	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	12	12	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggunaan yang Disediakan (Paket)	2	2	2	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	12	12	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	3	3	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	12	12	
3.27.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				35.582.800	35.938.628
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	12	35.582.800	35.938.628
3.27.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				555.048.500	560.598.985
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	3	555.048.500	560.598.985
3.27.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				53.482.800	54.017.628
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	12	53.482.800	54.017.628
3.27.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				150.342.000	151.845.420
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	12	150.342.000	151.845.420
3.27.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggunaan				35.582.000	35.937.820
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggunaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggunaan yang Disediakan (Paket)	2	2	35.582.000	35.937.820
3.27.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				50.550.000	51.055.500
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	50.550.000	51.055.500
3.27.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				520.000.000	533.000.000
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	520.000.000	533.000.000
3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				375.358.760	379.112.348
Terpenuhinya kebutuhan penunjang operasional, kelancaran dan efektivitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	1	2	375.358.760	379.112.348



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
penyelenggaraan urusan Perangkat daerah	Disediakan (Laporan)				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	2	2	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	2	2	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	2	2	
3.27.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat			48.482.800	48.967.628	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	2	48.482.800	48.967.628
3.27.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			161.035.960	162.646.320	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	2	161.035.960	162.646.320
3.27.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			55.000.000	55.550.000	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	2	55.000.000	55.550.000
3.27.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			110.840.000	111.948.400	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	2	110.840.000	111.948.400
3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			47.953.800	48.433.000	
Pemeliharaan dan pengelolaan barang milik daerah untuk menjaga kondisi aset daerah agar tetap berfungsi dengan baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	1	47.953.800	48.433.000
3.27.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			47.953.800	48.433.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	1	47.953.800	48.433.000
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			20.245.539.170	21.317.311.794	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	52	53	20.245.539.170	21.317.311.794
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	52	53		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)		PERANGKAT DAERAH
3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				16.250.539.170		17.282.361.794	
Meningkatkan Produktivitas dan Kualitas Pertanian, Pengendalian mutu dan keamanan sarana pertanian dan Meningkatkan Keterampilan Petani dan kepatuhan terhadap regulasi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang)	29.800	30.800	16.250.539.170	35.200	17.282.361.794	
	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan (Anakan)	137.136	150.000		150.150		
	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	100	250		255		
	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	4	4		4		
	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	2	2		2		
3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				4.934.699.170		5.853.363.394	
Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	2	2	4.934.699.170	2	5.853.363.394	
3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				210.840.000		212.948.400	
Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	4	4	210.840.000	4	212.948.400	
3.27.02.2.01.0003 - Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih				1.875.000.000		1.893.750.000	
Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	100	250	1.875.000.000	255	1.893.750.000	
3.27.02.2.01.0009 - Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang				3.830.000.000		3.868.300.000	
Tersedianya benih bersertikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang)	29.800	30.800	3.830.000.000	35.200	3.868.300.000	
3.27.02.2.01.0017 - Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan				5.400.000.000		5.454.000.000	
Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan (Anakan)	137.136	150.000	5.400.000.000	150.150	5.454.000.000	
3.27.02.2.04 - Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer				105.000.000		106.050.000	
Jaminan peredaran obat hewan yang aman, bermutu, dan bermanfaat bagi kesehatan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1	1	105.000.000	1	106.050.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
hewan	(Laporan)				
3.27.02.2.04.0001 - Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan			105.000.000	106.050.000	
Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)	1	1	105.000.000	106.050.000
3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.340.000.000	2.363.400.000	
Ketersediaanya benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang berkualitas dan terjamin di dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia (Laporan)	2	2	2.340.000.000	2.363.400.000
3.27.02.2.05.0009 - Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak			2.340.000.000	2.363.400.000	
Terkendalinya penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia (Laporan)	2	2	2.340.000.000	2.363.400.000
3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain			1.550.000.000	1.565.500.000	
Peningkatan kualitas dan kuantitas populasi ternak serta keberlanjutan pasokan pakan yang bergizi untuk ternak	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	0	1.250	1.550.000.000	1.565.500.000
3.27.02.2.06.0003 - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			1.550.000.000	1.565.500.000	
Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	0	1.250	1.550.000.000	1.565.500.000
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			29.234.414.810	29.526.758.858	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian			29.234.414.810	29.526.758.858	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian			696.360.000	703.323.600	
Peningkatan kualitas dan fasilitas, peningkatan produktivitas pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	2	3	696.360.000	703.323.600
	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	0	1		1
	Luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan (Ha)	4.681	4.681		4.700
3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			303.000.000	306.030.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	2	3	303.000.000	3	306.030.000
3.27.03.2.01.0005 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian				243.360.000		245.793.600
Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	4.681	4.681	243.360.000	4.700	245.793.600
3.27.03.2.01.0015 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota				150.000.000		151.500.000
Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	0	1	150.000.000	1	151.500.000
3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian				28.538.054.810		28.823.435.258
Terbangunnya fasilitas-fasilitas fisik yang mendukung kegiatan pertanian, seperti jalan usaha tani (JUT) yang meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas petani, jaringan irigasi yang menjamin ketersediaan air, serta unit pelayanan jasa alat mesin pertanian (UPJA) yang menyediakan bantuan peralatan untuk meningkatkan pendapatan petani dan produktivitas usaha tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	48	60	28.538.054.810	65	28.823.435.258
	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	4	5		5	
	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	2	2		2	
	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	14	1		1	
	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	10	5		5	
	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	1		1	
	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	2	1		1	
	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	1	1		1	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH	
3.27.03.2.02.0002 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian			450.360.000	454.500.000		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	2	2	450.360.000	2	454.500.000
3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			26.820.000.000	27.088.200.000		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	48	60	26.820.000.000	65	27.088.200.000
3.27.03.2.02.0006 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air			125.000.000	126.250.000		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	10	5	125.000.000	5	126.250.000
3.27.03.2.02.0008 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya			152.754.810	154.282.358		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	4	5	152.754.810	5	154.282.358
3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya			155.000.000	156.550.000		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	1	155.000.000	1	156.550.000
3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani			195.000.000	196.950.000		
terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	14	1	195.000.000	1	196.950.000
3.27.03.2.02.0014 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas			285.000.000	287.850.000		
Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	2	1	285.000.000	1	287.850.000
3.27.03.2.02.0015 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan			354.940.000	358.852.900		
Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	1	1	354.940.000	1	358.852.900
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			304.910.900	307.960.000		
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner			304.910.900	307.960.000	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian	
3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan,			304.910.900	307.960.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota					
Terwujudnya kesehatan hewan yang terjamin, terkendali dan tereliminasi penyakit hewan menular, serta terjaganya kesehatan masyarakat dan ekosistem	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	1	1	304.910.900	1 307.960.000
	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	1	1		1
3.27.04.2.01.0003 - Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular				153.006.920	154.536.989
Tertanggulanginya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	1	1	153.006.920	1 154.536.989
3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				151.903.980	153.423.011
Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	1	1	151.903.980	1 153.423.011
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				540.097.000	545.498.400
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian				540.097.000	545.498.400 3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				540.097.000	545.498.400
Terlaksananya gerakan dan diseminasi teknologi pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), serta tersedianya fasilitasi gerakan dan diseminasi OPT di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	1.500	1.515	540.097.000	1.530 545.498.400
	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	1.500	1.515		1.530
3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				314.750.000	317.897.500
Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	1.500	1.515	314.750.000	1.530 317.897.500



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
3.27.05.2.01.0002 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			225.347.000	227.600.900	
Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	1.500	1.515	225.347.000	227.600.900
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			54.390.520	54.934.420	
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian			54.390.520	54.934.420	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
3.27.06.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			54.390.520	54.934.420	
Pelaksanaan penertiban Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota sesuai standar	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	8	9	54.390.520	54.934.420
3.27.06.2.01.0002 - Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian			54.390.520	54.934.420	
Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	8	9	54.390.520	54.934.420
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			511.304.400	516.417.400	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian			511.304.400	516.417.400	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			511.304.400	516.417.400	
Tercapainya perubahan perilaku petani dalam bentuk peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memungkinkan mereka mengelola usaha tani lebih baik, menguntungkan, dan sejahtera, serta terwujudnya pembangunan pertanian yang berkelanjutan	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	10	10	511.304.400	516.417.400
	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	10	10	10	
3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			156.304.400	157.867.400	
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	10	10	156.304.400	157.867.400
3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas			355.000.000	358.550.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH		
Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa							
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	10	10	355.000.000	10	358.550.000	
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				1.700.000.000	1.700.000.000		
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				800.000.000	800.000.000		
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	35,71	7,14	800.000.000	10,71	800.000.000	2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				800.000.000	800.000.000		
Tersedianya dan terkelolanya sarana distribusi perdagangan yang layak dan mendukung kelancaran arus barang serta akses masyarakat	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	10	2	800.000.000	3	800.000.000	
3.30.03.2.01.0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan				800.000.000	800.000.000		
Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	10	2	800.000.000	3	800.000.000	
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				900.000.000	900.000.000		
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	100	100	900.000.000	100	900.000.000	2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				900.000.000	900.000.000		
Terselenggaranya pengendalian harga dan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan penting melalui pemantauan, pelaporan, serta intervensi pasar di tingkat kabupaten/kota.	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	900.000.000	1	900.000.000	
	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	43	100		100		
3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				100.000.000	100.000.000		
Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	43	100	100.000.000	100	100.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)				
3.30.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			800.000.000	800.000.000	
Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	800.000.000	1
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			200.000.000	200.000.000	
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			100.000.000	100.000.000	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian			100.000.000	100.000.000	2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			100.000.000	100.000.000	
Terbitnya dokumen perizinan usaha industri dan kawasan industri sesuai kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1	1	100.000.000	1
3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota			100.000.000	100.000.000	
Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1	1	100.000.000	1
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			100.000.000	100.000.000	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri			100.000.000	100.000.000	2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Perdagangan, Perindustrian,



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Koperasi dan UKM					
3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			100.000.000	100.000.000	
Penyediaan Informasi Industri Untuk IUI,IPUI,IUK,dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Simtem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen)	0	1	100.000.000	1
3.31.04.2.01.0002 - Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas			100.000.000	100.000.000	
Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen)	0	1	100.000.000	1
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			1.014.645.600	1.020.792.050	
3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI			308.413.600	311.497.730	
Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi			308.413.600	311.497.730	3.32.2.07.0.00.02.0000 - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3.32.02.2.01 - Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi			308.413.600	311.497.730	
Presentase Areal Permukiman Yang Memadai	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain (Dokumen)	86,79	86,89	308.413.600	86,99
	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi (Dokumen)	98,89	98,89		98,89
	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi (Kawasan Transmigrasi)	86,79	86,89		86,99
	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Hektar)	86,79	86,89		86,99
3.32.02.2.01.0001 - Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi			61.682.600	61.682.600	
Teridentifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain (Dokumen)	86,79	86,89	61.682.600	86,99
3.32.02.2.01.0002 - Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan			62.299.546	62.299.546	
Terlaksananya Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi (Kawasan Transmigrasi)	86,79	86,89	62.299.546	86,99



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
3.32.02.2.01.0003 - Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi			150.000.000	150.000.000		
Tersedianya Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Hektar)	86,79	86,89	150.000.000	86,99	150.000.000
3.32.02.2.01.0004 - Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi			34.431.454	37.515.584		
Terlaksananya Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi (Dokumen)	98,89	98,89	34.431.454	98,89	37.515.584
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			306.232.000	309.294.320		
Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi			306.232.000	309.294.320	3.32.2.07.0.00.02.0000 - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			306.232.000	309.294.320		
Presentase Pembangunan Permukiman Masyarakat Kawasan Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Lokasi)	86,79	86,89	306.232.000	86,99	309.294.320
	Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS) (Kepala Keluarga)	86,79	86,89		86,99	
3.32.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi			153.116.000	154.647.160		
Terlaksananya Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS) (Kepala Keluarga)	86,79	86,89	153.116.000	86,99	154.647.160
3.32.03.2.01.0020 - Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi			153.116.000	154.647.160		
Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Lokasi)	86,79	86,89	153.116.000	86,99	154.647.160
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			400.000.000	400.000.000		
Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi			400.000.000	400.000.000	3.32.2.07.0.00.02.0000 - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
3.32.04.2.01 - Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian			400.000.000	400.000.000		
Presentase Pembangunan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)	86,79	86,89	400.000.000	86,99	400.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan (Satuan Permukiman)	86,79	86,89	86,99	
3.32.04.2.01.0001 - Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman			200.000.000	200.000.000	
Terwujudnya Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)	86,79	86,89	200.000.000	86,99
3.32.04.2.01.0002 - Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman			200.000.000	200.000.000	
Terwujudnya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan (Satuan Permukiman)	86,79	86,89	200.000.000	86,99
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH			86.004.870.126	88.154.991.879	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			53.211.370.126	54.541.654.379	
Tingkat realisasi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah (persen)			53.211.370.126	54.541.654.379	4.01.2.24.2.23.01.0000 - Sekretariat Daerah
4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			360.000.000	369.000.000	
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)		360.000.000	369.000.000	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	67,65	1	1	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	67,65	4	4	
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)				
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)				
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)				
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		4	4	
	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi)				
4.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			360.000.000	369.000.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	67,65	1	360.000.000	1 369.000.000
4.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			0	0	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		0	0	
4.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			0	0	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		0	0	
4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0	0	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		0	0	
4.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0	0	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		4	0 4	0
4.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			0	0	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)		0	0	
4.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD			0	0	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	67,65	4	0 4	0



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
4.01.01.2.01.0012 - Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu			0	0	
Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Subtansi)		0	0	
4.01.01.2.01.0013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan			0	0	
Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)		0	0	
4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.713.749.240	8.713.749.240	
Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		8.713.749.240	8.713.749.240	
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)				
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)				
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)				
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	67,65	123	123	
4.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			8.713.749.240	8.713.749.240	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	67,65	123	8.713.749.240	8.713.749.240
4.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan			0	0	
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		0	0	
4.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0	0	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan		0	0	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Akuntansi SKPD	Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)				
4.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0	0	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		0	0	
4.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0	0	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		0	0	
4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			0	0	
Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		0	0	
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				
4.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			0	0	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		0	0	
4.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			0	0	
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		0	0	
4.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			0	0	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		0	0	
4.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			0	0	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		0	0	
4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.022.500.000	1.042.642.500	
Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	67,65	2	1.022.500.000	2
				1.042.642.500	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)				
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	67,65	120	130	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	67,65	120	100	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	67,65	4	5	
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)				
4.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0	0
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)			0	0
4.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				947.500.000	967.642.500
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	67,65	4	947.500.000	967.642.500
4.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0	0
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)			0	0
4.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				25.000.000	25.000.000
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	67,65	2	25.000.000	25.000.000
4.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				25.000.000	25.000.000
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	67,65	120	25.000.000	100
4.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25.000.000	25.000.000
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	67,65	120	25.000.000	130
4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				11.224.262.500	11.504.869.063
Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	67,65	1	11.224.262.500	1
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)				
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	67,65	1		1



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	67,65	1	1	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	67,65	1	1	
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	67,65	1	1	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	67,65	1	1	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	67,65	1	1	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	67,65	1	1	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	67,65	1	1	
4.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				512.500.000	525.312.500
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	67,65	1	512.500.000	525.312.500
4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				512.500.000	525.312.500
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	67,65	1	512.500.000	525.312.500
4.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				461.250.000	472.781.250
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	67,65	1	461.250.000	472.781.250
4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				973.750.000	998.093.750
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	67,65	1	973.750.000	998.093.750
4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				256.250.000	262.656.250
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	67,65	1	256.250.000	262.656.250
4.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.050.000.000	2.101.250.000
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	67,65	1	2.050.000.000	2.101.250.000
4.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				205.000.000	210.125.000
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	67,65	1	205.000.000	210.125.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
(Paket)					
4.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				3.075.000.000	3.151.875.000
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	67,65	1	3.075.000.000	3.151.875.000
4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.178.012.500	3.257.462.813
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	67,65	1	3.178.012.500	3.257.462.813
4.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0	0
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)			0	0
4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				4.584.250.000	4.744.281.256
Pesentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	67,65	4	4.584.250.000	4.744.281.256
	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)				
	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)				
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)				
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)				
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	67,65	13		15
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)				
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	67,65	16		18
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	67,65	104		100
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)				
4.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0	0
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)			0	0
4.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				19.000.000	60.000.000
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional	67,65	13	19.000.000	60.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
atau Lapangan	atau Lapangan yang Disediakan (Unit)					
4.01.01.2.07.0004 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor			0	0		
Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)		0	0		
4.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel			717.500.000	735.437.500		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	67,65	4	717.500.000	6	735.437.500
4.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			260.250.000	271.656.256		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	67,65	16	260.250.000	18	271.656.256
4.01.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya			0	0		
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)		0	0		
4.01.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud			0	0		
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)		0	0		
4.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0	0		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		0	0		
4.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			3.587.500.000	3.677.187.500		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	67,65	104	3.587.500.000	100	3.677.187.500
4.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0	0		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		0	0		
4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.792.500.000	3.887.312.500		
Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	67,65	5	3.792.500.000	5	3.887.312.500
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	67,65	3		4	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	67,65	4		3	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	67,65	10	8	
4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat			205.000.000	210.125.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	67,65	10	205.000.000	8 210.125.000
4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			820.000.000	840.500.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	67,65	5	820.000.000	5 840.500.000
4.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			205.000.000	210.125.000	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	67,65	4	205.000.000	3 210.125.000
4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.562.500.000	2.626.562.500	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	67,65	3	2.562.500.000	4 2.626.562.500
4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.560.000.000	6.724.000.000	
Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)		6.560.000.000	6.724.000.000	
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)				
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	67,65	1	1	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	67,65	1	1	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)				
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)				
4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa			0	0	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		0	0	
4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.537.500.000	1.575.937.500	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	67,65	1	1.537.500.000	1
4.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel			0	0	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		0	0	
4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0	0	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		0	0	
4.01.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			0	0	
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)		0	0	
4.01.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			0	0	
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)		0	0	
4.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			5.022.500.000	5.148.062.500	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	67,65	1	5.022.500.000	1
4.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0	0	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		0	0	
4.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0	0	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		0	0	
4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan			11.097.995.886	10.816.184.375	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						
Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	67,65	1	11.097.995.886	1	10.816.184.375
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	67,65	1		1	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	67,65	1		1	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	67,65	1		1	
4.01.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				545.620.886		0
Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	67,65	1	545.620.886	1	0
4.01.01.2.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				199.875.000		204.871.875
Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	67,65	1	199.875.000	1	204.871.875
4.01.01.2.11.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				410.000.000		420.250.000
Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	67,65	1	410.000.000	1	420.250.000
4.01.01.2.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				9.942.500.000		10.191.062.500
Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	67,65	1	9.942.500.000	1	10.191.062.500
4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				1.426.250.000		3.137.781.250
Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	67,65	1	1.426.250.000	1	3.137.781.250
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	67,65	6		7	
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga	67,65	1		1	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)					
4.01.01.2.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			563.750.000	577.843.750	
Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	67,65	1	563.750.000	1
4.01.01.2.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			512.500.000	525.312.500	
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	67,65	1	512.500.000	1
4.01.01.2.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah			350.000.000	2.034.625.000	
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	67,65	6	350.000.000	7
4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi			0	0	
Persentase Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)		0	0	
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)				
	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)				
	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)				
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)				
4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			0	0	
Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)		0	0	
4.01.01.2.13.0002 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			0	0	
Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)		0	0	
4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			0	0	
Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)		0	0	
4.01.01.2.13.0004 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			0	0	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)		0	0	
4.01.01.2.13.0005 - Koordinasi dan			0	0	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH		
Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah							
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)		0	0			
4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			4.429.862.500	3.601.834.195			
Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	67,65	4	4.429.862.500	4	3.601.834.195	
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)						
	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	67,65	4		4		
4.01.01.2.14.0001 - Fasilitasi Keprotokolan			4.094.862.500	3.266.834.195			
Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	67,65	4	4.094.862.500	4	3.266.834.195	
4.01.01.2.14.0002 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			0	0			
Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)		0	0			
4.01.01.2.14.0003 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan			335.000.000	335.000.000			
Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	67,65	4	335.000.000	4	335.000.000	
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			28.403.500.000	29.113.587.500			
Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kebijakan pemerintahan daerah secara adaptif, kolaboratif, dan berbasis hasil	Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Daerah yang Bernilai Manfaat (%)	0	0	28.403.500.000	0	29.113.587.500	4.01.2.24.2.23.01.0000 - Sekretariat Daerah
	PPersentase Program Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana Berbasis Evaluasi dan Data (%)	0	0		0		
	Persentase Produk Hukum Daerah yang Tersinkronisasi dengan Kebijakan Nasional (%)	0	0		0		
	Indeks Kematangan Organisasi Pemerintah Daerah (%)	0	0		0		
4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan			7.533.672.000	8.185.219.500			
Persentase Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	67,65	2	7.533.672.000	2	8.185.219.500	
	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	67,65	6		7		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	67,65	3		4		
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan	67,65	38		38		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)				
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitas Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	67,65	30	37	
4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan			4.920.000.001	5.474.962.500	
Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	67,65	6	4.920.000.001	7
4.01.02.2.01.0002 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			1.835.214.874	1.468.117.000	
Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	67,65	3	1.835.214.874	4
4.01.02.2.01.0003 - Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah			704.457.125	1.168.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	67,65	2	704.457.125	2
4.01.02.2.01.0004 - Fasilitas Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			60.000.000	60.000.000	
Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitas Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	67,65	30	60.000.000	37
4.01.02.2.01.0005 - Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			14.000.000	14.140.000	
Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	67,65	38	14.000.000	38
4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			17.500.000.000	17.937.500.000	
Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	67,65	-	17.500.000.000	-
	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)				
	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan	67,65	12	12	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)				
4.01.02.2.02.0001 - Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual			9.820.000.000	10.130.500.000	
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	67,65	-	9.820.000.000	-
4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial			7.680.000.000	7.807.000.000	
Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	67,65	12	7.680.000.000	12
4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat			0	0	
Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)		0	0	
4.01.02.2.03 - Fasilitas dan Koordinasi Hukum			3.278.500.000	2.898.500.000	
Persentase Pelaksanaan Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum (Kasus)	67,65	13	3.278.500.000	13
	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	67,65		20	
	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	67,65	520	520	
4.01.02.2.03.0001 - Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah			1.198.000.000	890.000.000	
Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	67,65		1.198.000.000	20
4.01.02.2.03.0002 - Fasilitas Bantuan Hukum			1.738.500.000	1.738.500.000	
Terlaksananya Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum (Kasus)	67,65	13	1.738.500.000	13



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH		
4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan			342.000.000	270.000.000			
Pengelolaan Informasi Hukum							
Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	67,65	520	342.000.000	520	270.000.000	
4.01.02.2.04 - Fasilitas Kerja Sama Daerah			91.328.000	92.368.000			
Persentase Pelaksanaan Fasilitas Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	67,65	12	91.328.000	14	92.368.000	
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	67,65	15		17		
4.01.02.2.04.0001 - Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri			86.128.000	86.960.000			
Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	67,65	12	86.128.000	14	86.960.000	
4.01.02.2.04.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama			5.200.000	5.408.000			
Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	67,65	15	5.200.000	17	5.408.000	
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			4.390.000.000	4.499.750.000			
Meningkatnya efektivitas koordinasi kebijakan perekonomian, administrasi pembangunan, dan layanan pengadaan untuk mendukung tata kelola pembangunan daerah berkinerja tinggi	Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)	0	0	4.390.000.000	0	4.499.750.000	4.01.2.24.2.23.01.0000 - Sekretariat Daerah
	Persentase realisasi tindak lanjut hasil evaluasi pembangunan lintas sektor (%)	0	0		0		
	Persentase kesesuaian antara RKPD, KUA-PPAS, dan DPA Perangkat Daerah (%)	0	0		0		
4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			650.000.000	473.750.000			
Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD (Dokumen)			650.000.000	473.750.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	67,65	3		4		
	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)						
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	67,65	2		3		
4.01.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan			0	0			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
BUMD dan BLUD					
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	67,65	3	0	4
4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				450.000.000	273.000.000
Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	67,65	2	450.000.000	3
4.01.03.2.01.0003 - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				200.000.000	200.750.000
Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)			200.000.000	200.750.000
4.01.03.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				0	0
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD (Dokumen)			0	0
4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				540.000.000	553.500.000
Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	67,65	1	540.000.000	1
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	67,65	1		1
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	67,65	-		-
4.01.03.2.02.0001 - Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan				200.000.000	153.000.000
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	67,65	1	200.000.000	1
4.01.03.2.02.0002 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				140.000.000	200.000.000
Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	67,65	-	140.000.000	-
4.01.03.2.02.0003 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				200.000.000	200.500.000
Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	67,65	1	200.000.000	1
4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				2.900.000.000	2.972.500.000
Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	67,65	114	2.900.000.000	115
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	67,65	800		900



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)				
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	67,65	27	29	
4.01.03.2.03.0001 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			1.000.000.000	1.025.000.000	
Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	67,65	800	1.000.000.000	900
4.01.03.2.03.0002 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			703.000.000	720.575.000	
Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	67,65	114	703.000.000	115
4.01.03.2.03.0003 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			1.197.000.000	1.226.925.000	
Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	67,65	27	1.197.000.000	29
4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			300.000.000	500.000.000	
Persentase Pelaksanaan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)	67,65	3	300.000.000	4
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	67,65	3		4
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	67,65	3		4
4.01.03.2.04.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			100.000.000	100.000.000	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	67,65	3	100.000.000	4



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)		PERANGKAT DAERAH
4.01.03.2.04.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				100.000.000		300.000.000	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	67,65	3	100.000.000	4	300.000.000	
4.01.03.2.04.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				100.000.000		100.000.000	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)	67,65	3	100.000.000	4	100.000.000	
4.02 - SEKRETARIAT DPRD				46.134.864.092	46.961.252.588,82		
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				28.266.342.028	28.737.942.296,82		
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan administrasi perkantoran untuk mendukung kinerja DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	71,8	71,93	28.266.342.028	72,14	28.737.942.296,82	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (%)	25.742.483.622	28.266.342.028	28.737.942.296			
4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				515.324.000	516.869.972		
Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	6	515.324.000	6	516.869.972	
4.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				515.324.000	516.869.972		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	6	515.324.000	6	516.869.972	
4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.719.011.860	2.782.974.017		
Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4	4	2.719.011.860	4	2.782.974.017	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4	4	4	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	62	65	65	
4.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.473.141.860	2.534.970.407	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	62	65	2.473.141.860	2.534.970.407
4.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			100.000.000	100.600.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4	4	100.000.000	100.600.000
4.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			145.870.000	147.403.610	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4	4	145.870.000	147.403.610
4.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			130.400.000	132.291.200	
Terlaksananya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	3	130.400.000	132.291.200
4.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			130.400.000	132.291.200	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	3	130.400.000	132.291.200
4.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			867.502.000	871.004.500	
Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	62	65	867.502.000	871.004.500
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3	3	3	
4.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			343.700.000	344.731.100	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3	3	343.700.000	344.731.100
4.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			523.802.000	526.273.400	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	62	65	523.802.000	526.273.400



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Undangan (Orang)					
4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.687.898.468	2.702.985.826	
Tersedianya sejumlah Paket Dokumen Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	2.687.898.468	2.702.985.826
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	2	2	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8	8	8	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	3	3	
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	10	3	3	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6	5	5	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6	7	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	5	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	2	2	
4.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi			247.850.000	250.285.000	
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6	247.850.000	250.285.000
4.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			472.900.000	475.150.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	472.900.000	475.150.000
4.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			127.600.000	127.600.000	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	2	127.600.000	127.600.000
4.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor			406.148.000	407.366.444	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	3	406.148.000	407.366.444
4.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			325.855.468	325.920.355	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6	5	325.855.468	5	325.920.355
4.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				349.684.000		350.733.052
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	349.684.000	12	350.733.052
4.02.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				79.852.000		80.064.475
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	10	3	79.852.000	3	80.064.475
4.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				552.509.000		555.366.500
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8	8	552.509.000	8	555.366.500
4.02.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				125.500.000		130.500.000
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	2	125.500.000	2	130.500.000
4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.500.000.000		1.504.500.000
Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	3	1.500.000.000	3	1.504.500.000
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	3		3	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	3		3	
4.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				500.000.000		501.500.000
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	3	500.000.000	3	501.500.000
4.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				500.000.000		501.500.000
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	3	500.000.000	3	501.500.000
4.02.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				500.000.000		501.500.000
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	3	500.000.000	3	501.500.000
4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.007.640.940		4.019.663.862,82
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12	12	4.007.640.940	12	4.019.663.862,82



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Disediakan (Laporan)				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	12	
4.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat			49.987.500	50.137.462,5	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	49.987.500	12 50.137.462,5
4.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			799.977.440	802.377.372,32	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	799.977.440	12 802.377.372,32
4.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.055.600.000	1.058.766.800	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.055.600.000	12 1.058.766.800
4.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.102.076.000	2.108.382.228	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.102.076.000	12 2.108.382.228
4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			695.788.672	724.112.003	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	23	695.788.672	25 724.112.003
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	8	10	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	4	5	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	2	3	
4.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			54.460.350	55.670.355	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	8	54.460.350	10	55.670.355
4.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				45.770.450		46.157.832
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	23	45.770.450	25	46.157.832
4.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				345.077.535		346.353.545
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	4	345.077.535	5	346.353.545
4.02.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				250.480.337		275.930.271
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	2	250.480.337	3	275.930.271
4.02.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				200.000.000		200.000.000
Tercapainya Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan (Laporan)	1	3	200.000.000	3	200.000.000
	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	1	3		3	
4.02.01.2.14.0002 - Fasilitas Komunikasi Pimpinan				100.000.000		100.000.000
Terlaksananya Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan (Laporan)	1	3	100.000.000	3	100.000.000
4.02.01.2.14.0003 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan				100.000.000		100.000.000
Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	1	3	100.000.000	3	100.000.000
4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				9.881.215.088		10.090.427.311
Terpenuhinya Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	20	20	9.881.215.088	20	10.090.427.311
	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	20	20		20	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	20	20		20	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH		
4.02.01.2.15.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			8.162.208.088	8.366.263.290			
Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	20	20	8.162.208.088	20	8.366.263.290	
4.02.01.2.15.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			649.600.000	651.548.800			
Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	20	20	649.600.000	20	651.548.800	
4.02.01.2.15.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			1.069.407.000	1.072.615.221			
Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	20	20	1.069.407.000	20	1.072.615.221	
4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD			5.061.561.000	5.193.113.605			
Tersedianya Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	12	12	5.061.561.000	13	5.193.113.605	
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	12	12		12		
4.02.01.2.16.0003 - Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			3.741.561.000	3.870.568.350			
Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	12	12	3.741.561.000	13	3.870.568.350	
4.02.01.2.16.0004 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD			1.320.000.000	1.322.545.255			
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	12	12	1.320.000.000	12	1.322.545.255	
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			17.868.522.064	18.223.310.292			
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase Produk Hukum Daerah yang Tersinkronisasi dengan Kebijakan Nasional (%)	16.173.665.470	17.869.007.920	17.868.522.064	18.550.791.401	18.223.310.292	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			3.139.577.275	3.178.535.820			
Terbentuknya Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	6	6	3.139.577.275	6	3.178.535.820	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	6	6		6		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	6	6				
	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	6	6				
	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	1	0		0		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	100	175		200		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah (Orang)				
4.02.02.2.01.0001 - Penyusunan dan Pembahasan Program			1.454.905.200	1.455.253.742	
Pembentukan Peraturan Daerah					
Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	6	6	1.454.905.200	1.455.253.742
4.02.02.2.01.0002 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			285.345.480	287.450.235	
Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	6	6	285.345.480	287.450.235
4.02.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan			457.880.580	460.750.223	
Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	6	6	457.880.580	460.750.223
4.02.02.2.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan			685.775.635	697.640.885	
Naskah Akademik					
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	6	6	685.775.635	697.640.885
4.02.02.2.01.0005 - Penyusunan Tata Tertib DPRD			0	0	
Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	1	0	0	0
4.02.02.2.01.0006 - Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah			255.670.380	277.440.735	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah (Orang)	100	175	255.670.380	277.440.735
4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran			374.996.928	405.654.707	
Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	1	1	374.996.928	405.654.707
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	1	1		1
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	2	2		2
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	2	2		2
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan	2	2		2



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)				
4.02.02.2.02.0001 - Pembahasan KUA dan PPAS			85.000.000	87.550.225	
Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	2	2	85.000.000	2
4.02.02.2.02.0002 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			55.665.375	57.635.497	
Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	2	2	55.665.375	2
4.02.02.2.02.0003 - Pembahasan APBD			95.860.775	97.375.840	
Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	1	1	95.860.775	1
4.02.02.2.02.0004 - Pembahasan APBD Perubahan			65.520.115	77.462.370	
Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	1	1	65.520.115	1
4.02.02.2.02.0006 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			72.950.663	85.630.775	
Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	2	2	72.950.663	2
4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			3.089.280.550	3.114.401.177	
Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)	1	1	3.089.280.550	1
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	6	6		6
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	6	6		
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	6	6		6
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Laporan)	6	6		6
	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	6	6		6
	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	1	1		1
4.02.02.2.03.0001 - Pengawasan Urusan			582.040.000	582.040.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum					
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	6	6	582.040.000	582.040.000
4.02.02.2.03.0002 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				582.040.000	582.040.000
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	6	6	582.040.000	582.040.000
4.02.02.2.03.0003 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				582.040.000	582.040.000
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	6	6	582.040.000	582.040.000
4.02.02.2.03.0004 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				582.040.000	582.040.000
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	6	6	582.040.000	582.040.000
4.02.02.2.03.0005 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				582.040.000	582.040.000
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Laporan)	6	6	582.040.000	582.040.000
4.02.02.2.03.0006 - Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				93.250.325	103.370.645
Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)	1	1	93.250.325	103.370.645
4.02.02.2.03.0008 - Pembahasan Laporan Keterangan				85.830.225	100.830.532
Pertanggungjawaban Kepala Daerah					
Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	1	1	85.830.225	100.830.532
4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD				1.510.782.632	1.549.317.112
Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	2	2	1.510.782.632	1.549.317.112
	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	1	1		
	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	5	5		5
	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan	2	3		3



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Tim Ahli (Orang)				
	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	2	2	2	
4.02.02.2.04.0002 - Pendalaman Tugas DPRD			916.332.000	952.884.362	
Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	2	2	2	952.884.362
4.02.02.2.04.0004 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli			225.000.000	225.000.000	
Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	2	3	3	225.000.000
4.02.02.2.04.0005 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			144.000.000	144.000.000	
Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	2	2	2	144.000.000
4.02.02.2.04.0007 - Penyusunan Program Kerja DPRD			75.450.632	77.432.750	
Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	5	5	5	77.432.750
4.02.02.2.04.0008 - Publikasi dan Dokumentasi DPRD			150.000.000	150.000.000	
Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	1	1		150.000.000
4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			3.590.843.594	3.596.474.206	
Terserap dan Terhimpunnya Aspirasi Masyarakat	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	3	3	3	3.596.474.206
	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	20	20	20	
	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)	12	12	12	
4.02.02.2.05.0001 - Kunjungan Kerja dalam Daerah			1.020.455.594	1.020.455.594	
Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)	12	12	12	1.020.455.594
4.02.02.2.05.0002 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD			50.000.000	55.630.612	
Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	20	20	20	55.630.612
4.02.02.2.05.0003 - Pelaksanaan Reses			2.520.388.000	2.520.388.000	
Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	3	3	3	2.520.388.000
4.02.02.2.06 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			85.374.620	87.445.780	
Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	1	1	1	87.445.780
4.02.02.2.06.0001 - Penyusunan Kode Etik DPRD			85.374.620	87.445.780	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH	
Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	1	1	85.374.620	1	87.445.780
4.02.02.2.07 - Pembahasan Kerja Sama Daerah				0		0
Kerja Sama Daerah				0		0
4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD				6.077.666.465		6.291.481.490
Terfasilitasinya Tugas-Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	2	4	6.077.666.465	5	6.291.481.490
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen)	2	2		2	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	3	3		3	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	5	5		5	
	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)	2	4		5	
4.02.02.2.08.0001 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				5.076.392.000		5.076.392.000
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	5	5	5.076.392.000	5	5.076.392.000
4.02.02.2.08.0002 - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD				57.435.520		63.950.215
Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)	2	4	57.435.520	5	63.950.215
4.02.02.2.08.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				75.430.220		82.730.550
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	2	4	75.430.220	5	82.730.550
4.02.02.2.08.0004 - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				420.858.000		420.858.000
Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	3	3	420.858.000	3	420.858.000
4.02.02.2.08.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus				447.550.725		647.550.725
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen)	2	2	447.550.725	2	647.550.725
5.01 - PERENCANAAN				8.464.250.000		9.250.440.562
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.032.328.000		4.655.530.562
Tingkat Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Perangkat Daerah (persen)				4.032.328.000		4.655.530.562
						5.01.1.03.5.05.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan,



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
					Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			82.000.000	87.740.000	
Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah yg disusun			0	0	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1	1	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	2	2	
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	1	
5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			25.500.000	27.635.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	2	25.500.000	27.635.000
5.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			15.500.000	16.585.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	15.500.000	16.585.000
5.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			15.500.000	16.585.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	15.500.000	16.585.000
5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			20.500.000	21.935.000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	20.500.000	21.935.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
(Laporan)					
5.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			5.000.000	5.000.000	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1	5.000.000	1
5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.335.320.060	2.394.625.562	
Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	2.335.320.060	1
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25	45		48
5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.314.820.060	2.372.690.562	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25	45	2.314.820.060	48
5.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			20.500.000	21.935.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	20.500.000	1
5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			245.000.000	747.500.000	
Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang disusun	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	43	53	245.000.000	56
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1		1
5.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			240.000.000	247.500.000	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	240.000.000	1
5.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			5.000.000	500.000.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	43	53	5.000.000	56
5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			955.007.940	1.002.165.000	
Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	1	1	955.007.940	1



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Disediakan (Dokumen)				
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	1	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	2	2	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	1	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	1	
5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				20.007.940	21.408.496
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	20.007.940	21.408.496
5.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000	21.400.000
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	20.000.000	21.400.000
5.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000	5.350.000
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	5.000.000	5.350.000
5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.000.000	21.400.000
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	20.000.000	21.400.000
5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				25.000.000	26.750.000
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	25.000.000	26.750.000
5.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				290.000.000	290.000.000
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	290.000.000	290.000.000
5.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				25.000.000	27.356.504



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	25.000.000	1	27.356.504
5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				550.000.000		588.500.000
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	2	550.000.000	2	588.500.000
5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100.000.000		107.000.000
Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur yang disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	60	25	100.000.000	12	107.000.000
5.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000		107.000.000
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	60	25	100.000.000	12	107.000.000
5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				45.000.000		46.500.000
Jumlah Penunjang Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	45.000.000	1	46.500.000
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1	
5.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				9.000.000		9.500.000
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	9.000.000	1	9.500.000
5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				36.000.000		37.000.000
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	36.000.000	1	37.000.000
5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				270.000.000		270.000.000
Jumlah sarana dan prasarana penunjang aparatur dalam kondisi baik				0		0
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	1		1	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	1		1	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
5.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			100.000.000	100.000.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	100.000.000	1
5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			50.000.000	50.000.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	1	50.000.000	1
5.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			20.000.000	20.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	1	20.000.000	1
5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			100.000.000	100.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	100.000.000	1
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			3.621.922.000	3.742.910.000	
Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	32	33	3.621.922.000	34
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	20	21		22
5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			2.118.087.000	2.066.660.000	
1			0	0	
Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan			0	0	
Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1	2.118.087.000	1
	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	3	1		1
	Jumlah Berita Acara Musrenbang	3	3		3

5.01.1.03.5.05.01.0000
- Badan Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Kabupaten/Kota (Berita Acara)				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	5	1	1	
	(RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)				
	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	3	3	3	
	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	510	600	700	
5.01.02.2.01.0001 - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah			500.000.000	500.000.000	
Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	3	3	500.000.000	3 500.000.000
5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik			100.000.000	107.000.000	
Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	3	1	100.000.000	1 107.000.000
5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			100.000.000	107.000.000	
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1	100.000.000	1 107.000.000
5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			600.297.000	647.660.000	
Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	3	3	600.297.000	3 647.660.000
5.01.02.2.01.0006 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan			812.790.000	700.000.000	
Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	510	600	812.790.000	700 700.000.000
5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			5.000.000	5.000.000	
Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	5	1	5.000.000	1 5.000.000
	(RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			123.835.000	124.000.000		
Jumlah Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	1	1	123.835.000	1	124.000.000
	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	1	5		5	
5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			5.000.000	5.000.000		
Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	1	1	5.000.000	1	5.000.000
5.01.02.2.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			118.835.000	119.000.000		
Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	1	5	118.835.000	5	119.000.000
5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			550.000.000	560.000.000		
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	1	1	550.000.000	1	560.000.000
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	1	1		1	
5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota			300.000.000	310.000.000		
Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	1	1	300.000.000	1	310.000.000
5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			250.000.000	250.000.000		
Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	1	1	250.000.000	1	250.000.000
5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			830.000.000	992.250.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Jumlah Ketersediaan Data Yang Akurat dan Muktahir			0	0	
	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	1	1	1	
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	1	
	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	1	1	1	
5.01.02.2.04.0001 - Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			200.000.000	330.750.000	
Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	1	1	200.000.000	330.750.000
5.01.02.2.04.0002 - Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			157.500.000	165.375.000	
Terlaksananya Penerapana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	1	1	157.500.000	165.375.000
5.01.02.2.04.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			472.500.000	496.125.000	
Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	472.500.000	496.125.000
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			810.000.000	852.000.000	
Meningkatnya kualitas sinkronisasi dan perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	10	12	810.000.000	852.000.000
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja	10	12	13	5.01.1.03.5.05.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)				
5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			270.000.000	284.000.000	
Jumlah Laporan Perencanaan Pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	1	270.000.000	284.000.000
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	1	1	
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	1	1	
	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	1	1	
5.01.03.2.01.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			25.000.000	26.000.000	
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	1	25.000.000	26.000.000
5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			150.000.000	157.000.000	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	1	150.000.000	157.000.000
5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			25.000.000	26.000.000	
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	1	25.000.000	26.000.000
5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan			70.000.000	75.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
Manusia						
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	1	70.000.000	1	75.000.000
5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				270.000.000		284.000.000
Jumlah Laporan Perencanaan Pembangunan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber daya alam)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	1	1	270.000.000	1	284.000.000
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	1	1		1	
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	1	1		1	
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	1	1		1	
5.01.03.2.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				25.000.000		26.000.000
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	1	1	25.000.000	1	26.000.000
5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				150.000.000		157.000.000
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	1	1	150.000.000	1	157.000.000
5.01.03.2.02.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				25.000.000		26.000.000
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	1	1	25.000.000	1	26.000.000
5.01.03.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA				70.000.000		75.000.000
Sinkronnya Renstra/Renja dengan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi	1	1	70.000.000	1	75.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)				
5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			270.000.000	284.000.000	
Jumlah Laporan Perencanaan Pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	1	270.000.000	284.000.000
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	1	1		1
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	1		1
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	1	1		1
5.01.03.2.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			25.000.000	26.000.000	
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	1	25.000.000	26.000.000
5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			150.000.000	157.000.000	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	1	150.000.000	157.000.000
5.01.03.2.03.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			25.000.000	26.000.000	
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	1	1	25.000.000	26.000.000
5.01.03.2.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			70.000.000	75.000.000	
Sinkronnya Renstra/Renja dengan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi	1	1	70.000.000	75.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)				
5.02 - KEUANGAN			459.762.704.626	471.256.772.242	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			24.111.438.406	24.895.046.587	
Tingkat realisasi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah			24.111.438.406	24.895.046.587	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			142.370.000	142.370.000	
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	83	2	142.370.000	2
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	83	1		1
5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			92.370.000	92.370.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	83	2	92.370.000	2
5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			50.000.000	50.000.000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	83	1	50.000.000	1
5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.138.218.980	4.226.022.455	
Jumlah dokumen administrasi keuangan tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	83	1	4.138.218.980	1
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	83	85		85
5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.512.138.980	3.599.942.455	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	83	85	3.512.138.980	85
5.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			626.080.000	626.080.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	83	1	626.080.000	1



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				
5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.358.023.830	2.618.826.213	
Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disusun	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	83	125	2.358.023.830	2.618.826.213
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	83	85	85	
5.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			250.000.000	300.000.000	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	83	85	250.000.000	300.000.000
5.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			2.108.023.830	2.318.826.213	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	83	125	2.108.023.830	2.318.826.213
5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.826.991.736	5.169.289.059	
Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	83	1	4.826.991.736	5.169.289.059
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	83	1	1	
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	83	4	4	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	83	4	4	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	83	1	1	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	83	1	1	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	83	1	1	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	83	1	1	
5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi			83.903.050	92.293.355	
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	83	1	83.903.050	92.293.355



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Disediakan (Paket)					
5.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			937.035.176	1.030.738.693	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	83	1	937.035.176	1.030.738.693
5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor			521.806.450	573.987.095	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	83	1	521.806.450	573.987.095
5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			281.129.960	309.242.956	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	83	1	281.129.960	309.242.956
5.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			85.800.000	94.380.000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	83	1	85.800.000	94.380.000
5.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu			200.000.000	200.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	83	4	200.000.000	200.000.000
5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.204.018.500	1.204.018.500	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	83	4	1.204.018.500	1.204.018.500
5.02.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			1.513.298.600	1.664.628.460	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	83	1	1.513.298.600	1.664.628.460
5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			6.533.035.500	6.620.185.500	
Jumlah sarana dan prasarana penunjang aparatur yang disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	83	635	6.533.035.500	6.620.185.500
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	83	4		4
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	83	20		20
5.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.743.000.000	1.830.150.000	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	83	4	1.743.000.000	1.830.150.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Disediakan (Unit)					
5.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel			4.249.225.500	4.249.225.500	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	83	635	4.249.225.500	635
5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			540.810.000	540.810.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	83	20	540.810.000	20
5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.314.086.460	4.319.641.460	
Jumlah penunjang unit kerja internal yang terlayani dengan baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	83	4	4.314.086.460	4
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	83	4		4
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	83	4		4
5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat			49.445.000	55.000.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	83	4	49.445.000	4
5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			4.114.641.460	4.114.641.460	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	83	4	4.114.641.460	4
5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			150.000.000	150.000.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	83	4	150.000.000	4
5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.798.711.900	1.798.711.900	
Jumlah sarana dan prasarana penunjang aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	83	4	1.798.711.900	4
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	83	25		25
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	83	1		1
5.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			598.711.900	598.711.900	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	83	4	598.711.900	4



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)				
5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			250.000.000	250.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	83	25	250.000.000	25
5.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			950.000.000	950.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	83	1	950.000.000	1
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			416.697.552.142	426.427.628.999	
Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharaan dan akuntansi pelaporan pemerintah daerah			416.697.552.142	426.427.628.999	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			2.846.345.776	3.120.980.352	
Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang di susun	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	100	2	2.846.345.776	2
	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	100	2		2
	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	100	48		48
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	100	100		100
	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	100	2		2
	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	100	2		2
	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	100	48		48
	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	100	48		48
	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	100	48		48
5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			434.993.780	478.493.158	
Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang	100	2	434.993.780	2



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH	
Disusun (Dokumen)						
5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			434.993.780	478.493.158		
Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	100	2	434.993.780	2	478.493.158
5.02.02.2.01.0003 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD			52.946.960	58.241.656		
Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	100	48	52.946.960	48	58.241.656
5.02.02.2.01.0004 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD			52.946.960	58.241.656		
Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	100	48	52.946.960	48	58.241.656
5.02.02.2.01.0005 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD			97.686.710	107.455.381		
Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	100	48	97.686.710	48	107.455.381
5.02.02.2.01.0006 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD			97.686.710	107.455.381		
Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	100	48	97.686.710	48	107.455.381
5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			537.545.438	591.299.981		
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	100	2	537.545.438	2	591.299.981
5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			537.545.438	591.299.981		
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	100	2	537.545.438	2	591.299.981
5.02.02.2.01.0013 - Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			600.000.000	650.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	100	100	600.000.000	100	650.000.000
5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			4.275.761.540	4.693.337.693		
Jumlah dokumen laporan BUD yang disusun	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan	100	48	4.275.761.540	48	4.693.337.693



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)				
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	100	4	4	
	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	100	4	4	
	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	100	4	4	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	100	100	100	
5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			1.264.834.780	1.391.318.258	
Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	100	48	1.264.834.780	1.391.318.258
5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			1.371.641.800	1.498.805.980	
Terlaksananya Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	100	4	1.371.641.800	1.498.805.980
5.02.02.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			411.218.500	452.340.350	
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi	100	4	411.218.500	452.340.350



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)				
5.02.02.2.02.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			69.556.316	76.511.947	
Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	100	4	69.556.316	76.511.947
5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			1.158.510.144	1.274.361.158	
Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	100	100	1.158.510.144	1.274.361.158
5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			7.885.634.254	8.674.197.679	
Jumlah dokumen laporan keuangan daerah yang disusun	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	100	1	7.885.634.254	8.674.197.679
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	100	1		1
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	100	1		1
	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	100	4		4
	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	100	1		1
	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	100	1		1
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	100	4		4
	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	100	1		1



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	100	4	4	
	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota (Laporan)	100	1	1	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	100	90	90	
	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	100	2	2	
	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	100	2	2	
5.02.02.2.03.0001 - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			350.000.000	385.000.000	
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	100	4	350.000.000	4 385.000.000
5.02.02.2.03.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban			582.393.280	640.632.608	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	100	4	582.393.280	4 640.632.608
5.02.02.2.03.0003 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			933.324.800	1.026.657.280	
Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	100	4	933.324.800	4 1.026.657.280
5.02.02.2.03.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			400.000.000	440.000.000	
Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	100	1	400.000.000	1 440.000.000
5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan			1.008.787.274	1.109.666.001	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						
Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	100	2	1.008.787.274	2	1.109.666.001
5.02.02.2.03.0006 - Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				350.577.300		385.635.030
Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	100	1	350.577.300	1	385.635.030
5.02.02.2.03.0007 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				991.606.200		1.090.766.820
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	100	1	991.606.200	1	1.090.766.820
5.02.02.2.03.0008 - Penyusunan Analisis Laporan				526.060.020		578.666.022
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD						
Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	100	1	526.060.020	1	578.666.022
5.02.02.2.03.0009 - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				375.000.000		412.500.000
Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	100	1	375.000.000	1	412.500.000
5.02.02.2.03.0010 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				480.000.000		528.000.000
Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	100	2	480.000.000	2	528.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
5.02.02.2.03.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan			725.981.380	798.579.518		
Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota						
Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	100	90	725.981.380	90	798.579.518
5.02.02.2.03.0012 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota			585.000.000	643.500.000		
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	100	1	585.000.000	1	643.500.000
5.02.02.2.03.0013 - Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah			576.904.000	634.594.400		
Tersedianya Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota (Laporan)	100	1	576.904.000	1	634.594.400
5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			401.689.810.572	409.939.113.275		
Jumlah dokumen laporan urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang disusun	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	100	4	401.689.810.572	4	409.939.113.275
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	100	1		1	
5.02.02.2.04.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			386.689.810.572	394.939.113.275		
Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	100	4	386.689.810.572	4	394.939.113.275
5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			15.000.000.000	15.000.000.000		
Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	100	1	15.000.000.000	1	15.000.000.000
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			10.050.670.476	10.160.748.690		
Meningkatnya tata kelola aset daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel			10.050.670.476	10.160.748.690	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah			10.050.670.476	10.160.748.690		
Jumlah aset daerah yang dikelola	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	97,7	4	10.050.670.476	4	10.160.748.690
	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	97,7	1		1	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	97,7	40	40	
	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	97,7	1	1	
	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	97,7	40	40	
	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	97,7	40	40	
	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	97,7	4	4	
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	97,7	4	4	
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	97,7	40	40	
	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	97,7	40	40	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	97,7	300	300	
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	97,7	1	1	
	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	97,7	1	1	
5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga Tersedianya Standar Harga			925.852.800	1.018.438.080	
	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	97,7	1	925.852.800	1.018.438.080
5.02.03.2.01.0002 - Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah			420.938.585	420.938.585	
	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	97,7	1	420.938.585	420.938.585
5.02.03.2.01.0003 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah			100.000.000	100.000.000	
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	97,7	1	100.000.000	100.000.000
5.02.03.2.01.0004 - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			501.614.875	501.614.875	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	97,7	1	501.614.875	1	501.614.875
5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah				627.029.388		627.029.388
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	97,7	4	627.029.388	4	627.029.388
5.02.03.2.01.0006 - Inventarisasi Barang Milik Daerah				722.008.802		722.008.802
Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	97,7	40	722.008.802	40	722.008.802
5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah				2.897.182.376		2.897.182.376
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	97,7	4	2.897.182.376	4	2.897.182.376
5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah				552.482.421		552.482.421
Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	97,7	40	552.482.421	40	552.482.421
5.02.03.2.01.0009 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				432.750.000		432.750.000
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	97,7	4	432.750.000	4	432.750.000
5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				496.200.000		496.200.000
Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	97,7	40	496.200.000	40	496.200.000
5.02.03.2.01.0011 - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				576.181.888		576.181.888
Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	97,7	40	576.181.888	40	576.181.888
5.02.03.2.01.0012 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				523.500.000		523.500.000
Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	97,7	40	523.500.000	40	523.500.000
5.02.03.2.01.0013 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				1.274.929.341		1.292.422.275



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)		PERANGKAT DAERAH
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	97,7	300	1.274.929.341	300	1.292.422.275	
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				8.903.043.602	9.773.347.966		
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan				8.903.043.602	9.773.347.966		5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				8.903.043.602	9.773.347.966		
Jumlah pendapatan daerah yang dikelola	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	100	100	8.903.043.602	100	9.773.347.966	
	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	100	510		510		
	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	100	27.060		27.060		
	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	100	1.230		1.230		
	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	100	100		100		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	100	270.600		270.600		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	100	27.060		27.060		
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	100	270.600		270.600		
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	100	75		75		
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	100	510		510		
	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	100	10		10		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	100	100		100		
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	100	400		400		
	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP	100	225.000		225.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH	
	nya (Obyek Pajak)					
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	100	550	550		
5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah			350.000.000	385.000.000		
Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	100	75	350.000.000	75	385.000.000
5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah			389.049.590	427.954.549		
Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	100	100	389.049.590	100	427.954.549
5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			855.654.283	941.219.716		
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	100	100	855.654.283	100	941.219.716
5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			973.377.450	1.070.715.195		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	100	550	973.377.450	550	1.070.715.195
5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			434.888.520	478.377.372		
Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	100	510	434.888.520	510	478.377.372
5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			320.527.729	352.580.501		
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	100	10	320.527.729	10	352.580.501
5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			1.078.302.390	1.186.132.629		
Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	100	225.000	1.078.302.390	225.000	1.186.132.629
5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah			350.000.000	385.000.000		
Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	100	270.600	350.000.000	270.600	385.000.000
5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			680.811.000	738.892.100		
Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100	400	680.811.000	400	738.892.100



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH	
Daerah	(Layanan)					
5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			350.000.000	385.000.000		
Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	100	1.230	350.000.000	1.230	385.000.000
5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah			1.248.107.740	1.372.918.514		
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	100	270.600	1.248.107.740	270.600	1.372.918.514
5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			450.000.000	495.000.000		
Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	100	27.060	450.000.000	27.060	495.000.000
5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			375.913.000	403.504.300		
Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	100	27.060	375.913.000	27.060	403.504.300
5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			746.411.900	821.053.090		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	100	100	746.411.900	100	821.053.090
5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah			300.000.000	330.000.000		
Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	100	510	300.000.000	510	330.000.000
5.03 - KEPEGAWAIAN			8.720.066.800	8.975.568.470		
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.713.749.300	4.158.074.370		
Tingkat Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Perangkat Daerah (persen)			3.713.749.300	4.158.074.370	5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	
5.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			29.000.000	35.000.000		
Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	100	100	29.000.000	100	35.000.000
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	100	100		100	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	100	100		100	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)				
5.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10.000.000	10.000.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	100	100	10.000.000	100
5.03.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			10.000.000	10.000.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	100	100	10.000.000	100
5.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			9.000.000	15.000.000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	100	100	9.000.000	100
5.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.240.066.800	2.295.568.470	
Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	100	100	2.240.066.800	100
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	100	100		100
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	95	100		100
5.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.220.066.800	2.275.568.470	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	95	100	2.220.066.800	100
5.03.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan			10.000.000	10.000.000	
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	100	100	10.000.000	100
5.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			10.000.000	10.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	100	100	10.000.000	100	10.000.000
5.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				348.500.000		349.500.000
Persentase dokumen administrasi kepegawaian daerah yang tersedia	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	100	100	348.500.000	100	349.500.000
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	100	100		100	
5.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				99.000.000		100.000.000
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	100	100	99.000.000	100	100.000.000
5.03.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				249.500.000		249.500.000
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	100	100	249.500.000	100	249.500.000
5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				668.246.600		715.005.900
Persentase Administrasi Umum PD yang terlaksana	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	87,5	100	668.246.600	100	715.005.900
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	100	100		100	
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	90,5	100		100	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	99	100		100	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	80,5	100		100	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	70	100		100	
5.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				75.000.000		75.000.000
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	70	100	75.000.000	100	75.000.000
5.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				70.005.900		70.005.900
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	80,5	100	70.005.900	100	70.005.900
5.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				94.999.700		100.000.000
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	87,5	100	94.999.700	100	100.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
5.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			70.000.000	70.000.000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	100	100	70.000.000	100
5.03.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu			100.000.000	100.000.000	
5.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			258.241.000	300.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	99	100	258.241.000	100
5.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			228.998.700	264.000.000	
Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	100	100	228.998.700	100
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	100	100		100
5.03.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			114.000.000	114.000.000	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	100	100	114.000.000	100
5.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			114.998.700	150.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	100	100	114.998.700	100
5.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			39.000.000	39.000.000	
Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	100	100	39.000.000	100
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	100	100		100
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	100	100		100
5.03.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat			19.000.000	19.000.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	100	100	19.000.000	100
5.03.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			10.000.000	10.000.000	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	100	100	10.000.000	100



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
5.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			10.000.000	10.000.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	100	100	10.000.000	100
5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			159.937.200	460.000.000	
Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2	159.937.200	2
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	6		7
5.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			59.997.200	60.000.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	6	59.997.200	7
5.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			99.940.000	400.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2	99.940.000	2
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			5.006.317.500	4.817.494.100	
Meningkatnya profesionalisme dan tata kelola manajemen ASN yang berbasis sistem merit			5.006.317.500	4.817.494.100	5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			1.090.000.000	1.090.000.000	
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN (Dokumen)	0	1	1.090.000.000	1
	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	41	35		43
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	47	47		47
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	3.746	635		643



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	1.303	635	643	
5.03.02.2.01.0001 - Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN			180.000.000	180.000.000	
Terlaksananya Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN (Dokumen)	0	1	180.000.000	180.000.000
5.03.02.2.01.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			90.000.000	90.000.000	
Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	3.746	635	90.000.000	90.000.000
5.03.02.2.01.0003 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			560.000.000	560.000.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	1.303	635	560.000.000	560.000.000
5.03.02.2.01.0006 - Koordinasi Pelaksanaan Administrasi			150.000.000	150.000.000	
Pemberhentian					
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	41	35	150.000.000	150.000.000
5.03.02.2.01.0010 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			110.000.000	110.000.000	
Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	47	47	110.000.000	110.000.000
5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN			240.000.000	200.000.000	
Persentase Pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	480	530	240.000.000	200.000.000
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	47	47	47	
5.03.02.2.02.0002 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			170.000.000	130.000.000	
Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	480	530	170.000.000	130.000.000
5.03.02.2.02.0003 - Pengelolaan Promosi ASN			70.000.000	70.000.000	
Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	47	47	70.000.000	70.000.000
5.03.02.2.03 - Pengembangan Kompetensi ASN			3.326.317.500	3.177.494.100	
Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	50	10	3.326.317.500	3.177.494.100



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen)	10	47	47		
	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	500	30	30		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (Dokumen)	128	26	26		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dokumen)	125	25	25		
5.03.02.2.03.0001 - Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN			1.000.000.000	1.000.000.000		
Meningkatnya Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	500	30	1.000.000.000	30	1.000.000.000
5.03.02.2.03.0002 - Pengelolaan Assessment Center			430.000.000	430.000.000		
Terkelolanya Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen)	10	47	430.000.000	47	430.000.000
5.03.02.2.03.0003 - Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN			300.000.000	300.000.000		
Terkelolanya Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dokumen)	125	25	300.000.000	25	300.000.000
5.03.02.2.03.0004 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			1.000.000.000	1.000.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	50	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000
5.03.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat			596.317.500	447.494.100		
Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (Dokumen)	128	26	596.317.500	26	447.494.100
5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			350.000.000	350.000.000		
Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	0	10	350.000.000	10	350.000.000
	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	5	11	11		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	47	47	47		
5.03.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			100.000.000	100.000.000		
Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	47	47	100.000.000	47	100.000.000
5.03.02.2.04.0004 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai			150.000.000	150.000.000		
Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	0	10	150.000.000	10	150.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
ASN	(Orang)				
5.03.02.2.04.0007 - Pembinaan Disiplin ASN			100.000.000	100.000.000	
Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	5	11	100.000.000	11
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			1.500.000.000	1.500.000.000	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			1.500.000.000	1.500.000.000	
Meningkatnya kapasitas dan kompetensi ASN yang relevan dengan kebutuhan organisasi dan transformasi pelayanan publik			1.500.000.000	1.500.000.000	5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
5.04.02.2.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis			1.500.000.000	1.500.000.000	
Jumlah pejabat Eselon II, III dan IV yang mengikuti pelatihan kepemimpinan (Diklatpim)	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	183	19	1.500.000.000	19
5.04.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			1.500.000.000	1.500.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	183	19	1.500.000.000	19
5.04.02.2.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			0	0	
Jumlah CASN yang mengikuti pelatihan dasar/Orientasi PPPK			0	0	
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			2.118.646.060	1.551.250.000	
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH			2.118.646.060	1.551.250.000	
Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	0	10	2.118.646.060	10
5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan			525.000.000	551.250.000	5.01.1.03.5.05.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Jumlah Hasil Penelitian, Pengembangan,	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu	1	1	525.000.000	1



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Pengkajian, dan Penerapan	pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Dokumen)				
5.05.03.2.01.0006 - Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah			525.000.000	551.250.000	
Terlaksananya koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah untuk menghasilkan dokumen Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Dokumen)	1	1	525.000.000	1 551.250.000
5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi			1.593.646.060	1.000.000.000	
Jumlah Hasil Inovasi dan Inovasi	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan inovasi dan inovasi (Pelatihan)	1	1	1.593.646.060	1 1.000.000.000
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	1	1		1
5.05.03.2.02.0012 - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi			858.656.060	500.000.000	
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	1	1	858.656.060	1 500.000.000
5.05.03.2.02.0018 - Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan inovasi dan inovasi			734.990.000	500.000.000	
Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan inovasi dan inovasi	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan inovasi dan inovasi (Pelatihan)	1	1	734.990.000	1 500.000.000
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH			7.565.577.700	7.754.717.143	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.706.386.700	4.785.526.143	
Tingkat Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Perangkat Daerah (persen)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Skor)	66,9	68	4.706.386.700	69 4.785.526.143 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			113.984.000	113.984.000	
Presentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	113.984.000	1 113.984.000
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	1	7		7



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)				
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	1	
6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			32.080.000	32.080.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	32.080.000	32.080.000
6.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			16.040.000	16.040.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	16.040.000	16.040.000
6.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			16.040.000	16.040.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	16.040.000	16.040.000
6.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			37.859.000	37.859.000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	7	37.859.000	37.859.000
6.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			11.965.000	11.965.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	11.965.000	11.965.000
6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.029.507.700	2.079.647.143	
Presentase laporan keuangan daerah yang memperoleh WTP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	12	2.029.507.700	2.079.647.143
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	21	51	51	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.005.577.700	2.055.717.143	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	21	51	2.005.577.700	2.055.717.143
6.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			11.965.000	11.965.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	11.965.000	11.965.000
6.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			11.965.000	11.965.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	12	11.965.000	11.965.000
6.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			23.930.000	23.930.000	
Jumlah laporan Administrasi BMD yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	23.930.000	23.930.000
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	2		2
6.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			11.965.000	11.965.000	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	11.965.000	11.965.000
6.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			11.965.000	11.965.000	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	2	11.965.000	11.965.000
6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.348.965.000	1.348.965.000	
Presentase ASN Mengikuti pengembangan kompetensi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5	10	1.348.965.000	1.348.965.000
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3	4		4
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	16	45		45



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Pelatihan (Orang)				
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	4	4	
6.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				97.500.000	97.500.000
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3	4	97.500.000	97.500.000
6.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				11.965.000	11.965.000
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	4	11.965.000	11.965.000
6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				1.098.500.000	1.098.500.000
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	16	45	1.098.500.000	1.098.500.000
6.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				141.000.000	141.000.000
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5	10	141.000.000	141.000.000
6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				560.480.800	589.480.800
jumlah laporan administrasi umum yang disampaikan sesuai jadwal	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	560.480.800	589.480.800
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4	4		4
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2
6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				23.848.000	23.848.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	23.848.000	23.848.000
6.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				151.490.800	165.490.800
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	151.490.800	165.490.800



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			60.000.000	60.000.000	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	60.000.000	2
6.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu			100.000.000	115.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4	4	100.000.000	4
6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			225.142.000	225.142.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	225.142.000	12
6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			290.983.000	290.983.000	
Presentase paket pengadaan yang dilaksanakan sesuai jadwal dan spesifikasi teknis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	12	13	290.983.000	13
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1
6.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			90.983.000	90.983.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	12	13	90.983.000	13
6.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			100.000.000	100.000.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	100.000.000	1
6.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			100.000.000	100.000.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	100.000.000	1
6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			193.541.200	193.541.200	
presentase penyediaan jasa sesuai kontrak dan kebutuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	193.541.200	12
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4		4



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	(Laporan)				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	2	2	
6.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat			10.540.000	10.540.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	2	10.540.000	2
6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			72.601.200	72.601.200	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	72.601.200	12
6.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			110.400.000	110.400.000	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	110.400.000	4
6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			144.995.000	144.995.000	
presentase barang milik daerah yang dipelihara secara berkala dan tercatat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	2	144.995.000	2
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1	
6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			44.995.000	44.995.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	2	44.995.000	2
6.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			100.000.000	100.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	100.000.000	1
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			1.956.463.000	2.026.463.000	
Menurunnya potensi penyimpangan anggaran, prosedur, dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	67,27	69	1.956.463.000	70
6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal			1.670.073.500	1.720.073.500	
Persentase Hasil Pengawasan Internal yang ditindak lanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	18	6	1.670.073.500	6

6.01.0.00.0.00.01.0000
- Inspektorat



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	11	14	14	
	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	1	2	2	
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	34	36	36	
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	70	80	83	
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	18	8	8	
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	15	4	4	
6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			452.636.000	477.636.000	
Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	70	80	452.636.000	477.636.000
6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			147.600.000	147.600.000	
Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	18	6	147.600.000	147.600.000
6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja			98.400.000	98.400.000	
Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	15	4	98.400.000	98.400.000
6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan			276.582.500	281.582.500	
Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	18	8	276.582.500	281.582.500
6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa			399.855.000	399.855.000	
Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	34	36	399.855.000	399.855.000
6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal			70.000.000	70.000.000	
Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	1	2	70.000.000	70.000.000
6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			225.000.000	245.000.000	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	11	14	225.000.000	245.000.000
6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			286.389.500	306.389.500	
Persentase penyelesaian pengaduan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan	15	6	286.389.500	306.389.500



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
masyarakat yang dapat diverifikasi	Tujuan Tertentu (Laporan)				
	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	7	1	1	
6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian				53.239.500	53.239.500
Negara/Daerah					
Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	7	1	53.239.500	53.239.500
6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				233.150.000	253.150.000
Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	15	6	233.150.000	253.150.000
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				902.728.000	942.728.000
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dan kapasitas pengawasan intern	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	Berkembang	Berkembang	902.728.000	942.728.000
	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Infrastruktur (Infrastructure)	Infrastruktur (Infrastructure)	Infrastruktur (Infrastructure)	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan				109.500.000	114.500.000
Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	1	2	109.500.000	114.500.000
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	3	1		1
6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan				50.000.000	55.000.000
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	3	1	50.000.000	55.000.000
6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan				59.500.000	59.500.000
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	1	2	59.500.000	59.500.000
6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi				793.228.000	828.228.000
Monitoring Center Prevension (MCP) KPK	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	22	48	793.228.000	828.228.000
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan	106	24		24



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)				
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	83	47	47	
	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	10	6	6	
6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			325.445.000	345.445.000	
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	83	47	325.445.000	345.445.000
6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			64.600.000	64.600.000	
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	106	24	64.600.000	64.600.000
6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			345.783.000	360.783.000	
Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	10	6	345.783.000	360.783.000
6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			57.400.000	57.400.000	
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	22	48	57.400.000	57.400.000
7.01 - KECAMATAN			31.875.416.680	32.672.302.102	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			27.885.552.680	28.590.043.501	
Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang 100%			3.955.379.000	4.054.263.475	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Wasile Selatan
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.560.632.000	3.649.647.800	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Wasile Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		1	3.560.632.000	3.649.647.800
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	1	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
(Laporan)					
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.530.632.000	3.618.897.800	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		1	3.530.632.000	1 3.618.897.800
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			30.000.000	30.750.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		1	30.000.000	1 30.750.000
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			97.500.000	99.937.500	
Tersusunnya Pelaporan Administrasi Keuangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	97.500.000	1 99.937.500
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	1		1
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			37.500.000	38.437.500	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	37.500.000	1 38.437.500
7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			60.000.000	61.500.000	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	1	60.000.000	1 61.500.000
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			54.544.000	55.907.600	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	15.000.000	1 15.375.000
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			15.000.000	15.375.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	15.000.000	1 15.375.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	4.230.100	1 4.335.853
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			4.230.100	4.335.853	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	4.230.100	1 4.335.853
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	5.313.900	1 5.446.747



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi			5.313.900	5.446.747	
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	5.313.900	5.446.747
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	30.000.000	30.750.000
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			30.000.000	30.750.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	30.000.000	30.750.000
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			110.303.000	113.060.575	
Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1	110.303.000	113.060.575
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		1		1
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel			45.000.000	46.125.000	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1	45.000.000	46.125.000
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			65.303.000	66.935.575	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		1	65.303.000	66.935.575
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			132.400.000	135.710.000	
Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	132.400.000	135.710.000
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.000.000	2.050.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	2.000.000	2.050.000
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			110.400.000	113.160.000	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	110.400.000	113.160.000
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			20.000.000	20.500.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	1	1	20.000.000	20.500.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)						
Tingkat realisasi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah (persen)			2.721.537.020	2.789.575.446	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Wasile Tengah	
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.326.790.020	2.384.959.771		
Persentase Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	14	2.326.790.020	14	2.384.959.771
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12		12	
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.296.790.020	2.354.209.771		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	14	2.296.790.020	14	2.354.209.771
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			30.000.000	30.750.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	30.000.000	12	30.750.000
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			97.500.000	99.937.500		
Persentase Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	30	30	97.500.000	30	99.937.500
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4	4		4	
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			37.500.000	38.437.500		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	30	30	37.500.000	30	38.437.500
7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			60.000.000	61.500.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4	4	60.000.000	4	61.500.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			54.544.000	55.907.600	
Persentase Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor /Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD / Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan / Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	54.544.000	55.907.600
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi			5.313.900	5.446.748	
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	5.313.900	5.446.748
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor			15.000.000	15.375.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	15.000.000	15.375.000
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			4.230.100	4.335.852	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	4.230.100	4.335.852
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			30.000.000	30.750.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	30.000.000	30.750.000
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			110.303.000	113.060.575	
Persentase Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	150	110.303.000	113.060.575
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	2		2
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel			45.000.000	46.125.000	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	150	45.000.000	46.125.000
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			65.303.000	66.935.575	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	1	2	65.303.000	66.935.575



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
yang Disediakan (Unit)					
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			132.400.000	135.710.000	
Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	132.400.000	135.710.000
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.000.000	2.050.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	2.000.000	2.050.000
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			110.400.000	113.160.000	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	110.400.000	113.160.000
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			20.000.000	20.500.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	20.000.000	20.500.000
Tingkat Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Perangkat Daerah (persen)			21.208.636.660	21.746.204.580	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Maba
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.446.241.820	2.508.022.866	
Persentase terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		2.446.241.820	2.508.022.866	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	84	28	28	
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.431.241.820	2.492.022.866	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	84	28	2.431.241.820	2.492.022.866
7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			15.000.000	16.000.000	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		15.000.000	16.000.000	
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			76.000.000	78.000.000	
Persentase Terlaksananya Kegiatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	1	1	76.000.000	78.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Administrasi Kepegawaian Daerah	Kelengkapan (Paket)				
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	84	5	5	
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				32.000.000	33.000.000
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	32.000.000	33.000.000
7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				44.000.000	45.000.000
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	84	5	44.000.000	45.000.000
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				101.400.000	104.675.000
Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	101.400.000	104.675.000
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	84	1		1
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	84	1		1
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	84	1		1
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	84	1		1
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				15.000.000	16.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	15.000.000	16.000.000
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.000.000	36.000.000
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	84	1	35.000.000	36.000.000
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				11.000.000	11.175.000
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	84	1	11.000.000	11.175.000
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				15.000.000	16.000.000
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	84	1	15.000.000	16.000.000
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat				25.400.000	25.500.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	84	1	25.400.000	1	25.500.000
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				30.000.000		31.000.000
Presentasi Pengadaan meubiler dan peralatan mesin dan lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	30.000.000	1	31.000.000
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.000.000		31.000.000
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	30.000.000	1	31.000.000
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				158.600.000		159.700.000
Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	158.600.000	1	159.700.000
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	84	1		1	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1	
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		3.100.000
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	84	1	3.000.000	1	3.100.000
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				6.000.000		6.000.000
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	6.000.000	1	6.000.000
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				110.400.000		110.400.000
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	110.400.000	1	110.400.000
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				39.200.000		40.200.000
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	39.200.000	1	40.200.000
Tingkat Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Perangkat Daerah (persen)				21.208.636.660	21.746.204.580	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Wasile
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan				4.074.018.340	4.175.868.799	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
Perangkat Daerah						
Presentasi Realisasi Anggaran dan Penyampaian Laporan Keuangan tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	52	52	4.074.018.340	52	4.175.868.799
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.074.018.340		4.175.868.799
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	52	52	4.074.018.340	52	4.175.868.799
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian				55.000.000		56.375.000
Perangkat Daerah						
Presentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	55.000.000	1	56.375.000
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				55.000.000		56.375.000
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	55.000.000	1	56.375.000
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				271.930.500		278.728.763
Persentase Layanan Administrasi Umum yang terdokumentasi dan dilaksanakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	271.930.500	1	278.728.763
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1	
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				9.996.200		10.246.105
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	9.996.200	1	10.246.105
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				34.012.800		34.863.120
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	34.012.800	1	34.863.120
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				14.031.500		14.382.288
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	14.031.500	1	14.382.288
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				39.000.000		39.975.000
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	39.000.000	1	39.975.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
(Laporan)					
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			174.890.000	179.262.250	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	174.890.000	179.262.250
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			22.100.000	22.652.500	
Persentase Realisasi Pengadaan BMD yang tercatat dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	22.100.000	22.652.500
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			22.100.000	22.652.500	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	22.100.000	22.652.500
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.991.500	3.066.288	
Persentase Jasa Penunjang yang dimanfaatkan untuk mendukung operasional Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		1	2.991.500	3.066.288
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.991.500	3.066.288	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		1	2.991.500	3.066.288
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			110.400.000	113.160.000	
presentase			0	0	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		1	1	
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			110.400.000	113.160.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		1	110.400.000	113.160.000
Tingkat Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Perangkat Daerah (persen)			21.208.636.660	21.746.204.580	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Maba Selatan
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.944.240.960	1.993.221.984	
Persentase terlaksananya kegiatan administrasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	1	1	1.944.240.960	1.993.221.984



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
keuangan	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)				
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	22	22	22	
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.919.240.960	1.967.221.984	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	22	22	1.919.240.960	1.967.221.984
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			25.000.000	26.000.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	25.000.000	26.000.000
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			75.000.000	75.000.000	
Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	1	75.000.000	75.000.000
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	1	
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			35.000.000	35.000.000	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	35.000.000	35.000.000
7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			40.000.000	40.000.000	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	1	40.000.000	40.000.000
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			110.000.000	114.975.000	
Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	110.000.000	114.975.000
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	1	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	1	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	1	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi		1	1	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)				
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi			12.000.000	13.000.000	
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		1	12.000.000	13.000.000
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor			28.000.000	29.000.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	28.000.000	29.000.000
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			10.000.000	11.000.000	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	10.000.000	11.000.000
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu			20.000.000	20.975.000	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	20.000.000	20.975.000
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			40.000.000	41.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	40.000.000	41.000.000
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			57.600.000	61.500.000	
Persentase Pengadaan Barang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	57.600.000	61.500.000
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1		1
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel			22.600.000	23.500.000	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1	22.600.000	23.500.000
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			35.000.000	38.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	35.000.000	38.000.000
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			152.400.000	153.900.000	
Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	152.400.000	153.900.000
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat			2.000.000	2.500.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
Menyurat						
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	2.000.000	1	2.500.000
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			110.400.000		110.400.000	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	110.400.000	1	110.400.000
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			40.000.000		41.000.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	40.000.000		41.000.000
Tingkat Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Perangkat Daerah (persen)			21.208.636.660		21.746.204.580	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Kota Maba
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.000.000		5.127.000	
Persentase Meningkatkan Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	5.000.000	1	5.127.000
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.000.000		5.127.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	5.000.000	1	5.127.000
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.363.114.200		1.397.192.055	
Persentase Realisasi Anggaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	13	13	1.363.114.200	13	1.397.192.055
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.363.114.200		1.397.192.055	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	13	13	1.363.114.200	13	1.397.192.055
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			85.163.000		87.292.075	
Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6	6	85.163.000	1	87.292.075
7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			85.163.000		87.292.075	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6	6	85.163.000	1	87.292.075
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			56.540.000		57.953.500	
Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	56.540.000	1	57.953.500



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	1	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	1	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6	6	
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				5.070.000	5.196.750
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	5.070.000	5.196.750
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.000.000	12.300.000
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6	12.000.000	12.300.000
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.070.000	4.171.750
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	4.070.000	4.171.750
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				14.750.000	15.118.750
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	14.750.000	15.118.750
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20.650.000	21.166.250
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	20.650.000	21.166.250
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				15.210.000	15.590.250
Persentase Pengadaan Barang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2	15.210.000	15.590.250
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.210.000	15.590.250
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2	15.210.000	15.590.250
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				114.550.000	117.413.750
Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	114.550.000	117.413.750
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1		1



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
(Laporan)					
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.150.000	4.253.750	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	4.150.000	4.253.750
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			110.400.000	113.160.000	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	110.400.000	113.160.000
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.650.000	5.791.250	
Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	5.650.000	5.791.250
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			5.650.000	5.791.250	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	5.650.000	5.791.250
Tingkat Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Perangkat Daerah (persen)			21.208.636.660	21.746.204.580	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Maba Tengah
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.514.080.720	2.577.307.738	
Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	14	2.514.080.720	2.577.307.738
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1		1
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.489.080.720	2.551.307.738	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	14	2.489.080.720	2.551.307.738
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			25.000.000	26.000.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	1	25.000.000	26.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
SKPD	(Laporan)				
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			79.100.000	81.000.000	
Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	1	79.100.000	81.000.000
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	1	
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			37.000.000	38.000.000	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	37.000.000	38.000.000
7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			42.100.000	43.000.000	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	1	42.100.000	43.000.000
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			98.000.000	103.725.000	
Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	98.000.000	103.725.000
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	1	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	1	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi			11.000.000	12.000.000	
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	11.000.000	12.000.000
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor			20.000.000	21.725.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	20.000.000	21.725.000
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			7.000.000	8.000.000	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	7.000.000	8.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu			20.000.000	21.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	20.000.000	1
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			40.000.000	41.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	40.000.000	1
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			80.000.000	84.000.000	
Persentase Pengadaan Barang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1	80.000.000	1
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	11		1
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel			35.000.000	37.000.000	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1	35.000.000	1
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			45.000.000	47.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	11	45.000.000	1
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			152.900.000	154.900.000	
Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	152.900.000	1
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.500.000	2.500.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	2.500.000	1
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			110.400.000	110.400.000	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	110.400.000	1
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			40.000.000	42.000.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	40.000.000	1
Tingkat Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Perangkat Daerah (persen)			21.208.636.660	21.746.204.580	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Maba Utara
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.289.931.540	1.326.429.829	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
Persentase terlaksananya kegiatan adminstrasi keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	13	13	1.289.931.540	13	1.326.429.829
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12		12	
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.259.931.540		1.291.429.829
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	13	13	1.259.931.540	13	1.291.429.829
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				30.000.000		35.000.000
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	30.000.000	12	35.000.000
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				80.000.000		82.000.000
Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	80.000.000	1	82.000.000
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	1		1	
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				30.000.000		31.000.000
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	30.000.000	1	31.000.000
7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000		51.000.000
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	1	50.000.000	1	51.000.000
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				131.000.000		136.000.000
Persentase Terlaksananya Kegiatan Administراسي Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	131.000.000	1	136.000.000
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	1	1		1	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Penggandaan yang Disediakan (Paket)				
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	1	
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				15.000.000	16.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	15.000.000	16.000.000
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				38.000.000	39.000.000
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	38.000.000	39.000.000
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				11.000.000	12.000.000
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	11.000.000	12.000.000
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				22.000.000	23.000.000
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	22.000.000	23.000.000
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45.000.000	46.000.000
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	45.000.000	46.000.000
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				86.100.000	88.000.000
Persentase Pengadaan Barang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	86.100.000	88.000.000
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				41.100.000	42.000.000
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1	41.100.000	42.000.000
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				45.000.000	46.000.000
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	45.000.000	46.000.000
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				162.900.000	165.125.000
Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	162.900.000	165.125.000
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH	
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.500.000	2.700.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	2.500.000	1	2.700.000
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			110.400.000	110.400.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	110.400.000	12	110.400.000
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			50.000.000	52.025.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	50.000.000	12	52.025.000
Tingkat Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Perangkat Daerah (persen)			21.208.636.660	21.746.204.580	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Wasile Utara	
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.595.158.640	1.635.037.606		
Persentase Realisasi Kinerja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	14	1.595.158.640	14	1.635.037.606
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	4		4	
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.555.158.640	1.594.037.606		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	14	1.555.158.640	14	1.594.037.606
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			40.000.000	41.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	4	40.000.000	4	41.000.000
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			107.500.000	110.187.500		
Presentase Realisasi kinerja	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	107.500.000	1	110.187.500
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	8	4		4	
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas			37.500.000	38.437.500		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
beserta Atribut Kelengkapannya						
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	37.500.000	1	38.437.500
7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				70.000.000		71.750.000
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	8	4	70.000.000	4	71.750.000
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				90.504.000		92.766.601
Persentase Realisasi Kinerja	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	90.504.000	1	92.766.601
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				5.313.900		5.446.748
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	5.313.900		5.446.748
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.960.000		31.734.000
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	30.960.000	1	31.734.000
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.230.100		4.335.853
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	4.230.100	1	4.335.853
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000		51.250.000
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	50.000.000	12	51.250.000
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				110.303.000		113.060.575
Realisasi Pengadaan Barang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	100	110.303.000	100	113.060.575
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	2		2	
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				45.000.000		46.125.000
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	100	45.000.000	100	46.125.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			65.303.000	66.935.575		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	2	65.303.000	2	66.935.575
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			132.400.000	135.710.000		
Presentase Realisasi kinerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	132.400.000	12	135.710.000
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12	
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.000.000	2.050.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	2.000.000	12	2.050.000
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			110.400.000	113.160.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	110.400.000	12	113.160.000
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			20.000.000	20.500.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	20.000.000	12	20.500.000
Tingkat Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Perangkat Daerah (persen)			21.208.636.660	21.746.204.580	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Wasile Timur	
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.836.208.440	2.907.113.651		
Persentase Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	2.836.208.440	12	2.907.113.651
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	14		14	
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.806.208.440	2.876.363.651		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	14	2.806.208.440	14	2.876.363.651
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			30.000.000	30.750.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	30.000.000	12	30.750.000
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				27.000.000		27.675.000
Persentase Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	27.000.000	1	27.675.000
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				27.000.000		27.675.000
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	27.000.000	1	27.675.000
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				83.000.000		85.075.000
Persentase Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	83.000.000	1	85.075.000
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1	
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1	
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				15.000.000		15.375.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	15.000.000	1	15.375.000
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.000.000		15.375.000
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	15.000.000	1	15.375.000
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		5.125.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	5.000.000	1
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				26.000.000	26.650.000
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	26.000.000	1
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				22.000.000	22.550.000
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	22.000.000	12
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				95.000.000	97.375.000
Persentase Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	150	95.000.000	150
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	2		2
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				45.000.000	46.125.000
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	150	45.000.000	150
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000	51.250.000
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	2	50.000.000	2
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				124.400.000	127.510.000
Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	124.400.000	12
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000	2.050.000
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	2.000.000	12
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				110.400.000	113.160.000
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	110.400.000	12
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12.000.000	12.300.000
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12.000.000	12



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.191.508.500	1.217.646.213		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif di tingkat kecamatan			1.191.508.500	1.217.646.213	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Maba	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan			69.000.000	71.000.000		
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	82	1	69.000.000	1	71.000.000
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	82	1		1	
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			14.000.000	15.000.000		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	82	1	14.000.000	1	15.000.000
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			55.000.000	56.000.000		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	82	1	55.000.000	1	56.000.000
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			32.000.000	34.000.000		
Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	82	1	32.000.000	1	34.000.000
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	82	1		1	
7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan			16.000.000	17.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	82	1	16.000.000	1	17.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			16.000.000	17.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	82	1	16.000.000	17.000.000
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif di tingkat kecamatan			1.191.508.500	1.217.646.213	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Wasile
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan			63.224.500	64.805.113	
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					
Presentasii Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)		1	63.224.500	64.805.113
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			63.224.500	64.805.113	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)		1	63.224.500	64.805.113
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif di tingkat kecamatan			1.191.508.500	1.217.646.213	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Maba Selatan
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan			135.000.000	137.000.000	
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					
Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	1	135.000.000	137.000.000
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			135.000.000	137.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	1	135.000.000	137.000.000
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif di tingkat kecamatan			1.191.508.500	1.217.646.213	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Wasile Selatan
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan			150.000.000	153.750.000	
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1	150.000.000	153.750.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
(Dokumen)					
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			150.000.000	153.750.000	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)		1	150.000.000	153.750.000
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif di tingkat kecamatan			1.191.508.500	1.217.646.213	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Kota Maba
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan			110.589.000	113.353.725	
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					
Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	1	110.589.000	113.353.725
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1	1		1
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			20.120.000	20.623.000	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1	1	20.120.000	20.623.000
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			90.469.000	92.730.725	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	1	90.469.000	92.730.725
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			40.095.000	41.097.375	
Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	1	1	40.095.000	41.097.375
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1		1
7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan			19.450.000	19.936.250	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	1	1	19.450.000	1	19.936.250	
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				20.645.000		21.161.125	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	20.645.000	1	21.161.125	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif di tingkat kecamatan				1.191.508.500		1.217.646.213	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Maba Tengah
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan				150.000.000		152.000.000	
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	1	150.000.000	1	152.000.000	
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				150.000.000		152.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	1	150.000.000	1	152.000.000	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif di tingkat kecamatan				1.191.508.500		1.217.646.213	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Maba Utara
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan				160.000.000		162.000.000	
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	1	160.000.000	1	162.000.000	
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				160.000.000		162.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	1	160.000.000	1	162.000.000	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif di tingkat kecamatan				1.191.508.500		1.217.646.213	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Wasile Utara
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan				150.000.000		153.750.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)		PERANGKAT DAERAH
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
Presentase Realisasi kinerja	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	1	150.000.000	1	153.750.000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Wasile Timur
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				150.000.000	153.750.000		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	1	150.000.000	1	153.750.000	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif di tingkat kecamatan				1.191.508.500	1.217.646.213		
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan				121.600.000	124.640.000		
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
Persentase Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	1	121.600.000	1	124.640.000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Wasile Tengah
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				121.600.000	124.640.000		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	1	121.600.000	1	124.640.000	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif di tingkat kecamatan				1.191.508.500	100	1.217.646.213	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan				10.000.000	10.250.000		
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
Persentase Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	10.250.000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Maba
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				10.000.000	10.250.000		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	10.250.000	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				984.429.600	1.017.425.340		
Jumlah produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan				984.429.600	1.017.425.340		
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				32.000.000	34.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH		
Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	1	1	32.000.000	1	34.000.000	
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	82	1		1		
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				16.000.000		17.000.000	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	1	1	16.000.000	1	17.000.000	
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				16.000.000		17.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	82	1	16.000.000	1	17.000.000	
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				66.000.000		68.500.000	
Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	82	1	66.000.000	1	68.500.000	
	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	82	1		1		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	1	1		1		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				16.000.000		17.000.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	82	1	16.000.000	1	17.000.000	
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				30.000.000		31.000.000	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	1	1	30.000.000	1	31.000.000	
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				20.000.000		20.500.000	
Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	82	1	20.000.000	1	20.500.000	
Jumlah produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan				984.429.600		1.017.425.340	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Wasile
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan				86.539.600		88.703.090	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Pemberdayaan Desa					
Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	86.539.600	1
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	1	1		1
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				43.072.000	44.148.800
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	1	1	43.072.000	1
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				43.467.600	44.554.290
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	43.467.600	1
Jumlah produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan				984.429.600	1.017.425.340
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				30.000.000	32.000.000
Persentase kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	1	1	30.000.000	1
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				30.000.000	32.000.000
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	1	1	30.000.000	1
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				40.000.000	42.000.000
Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	1	1	40.000.000	1
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				40.000.000	42.000.000
Meningkatnya Kapasitas Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	1	1	40.000.000	1

7.01.0.00.0.00.03.0000
- Kecamatan Maba Selatan

HALMAHERA TIMUR BERBENAH - Berani, Bersih, Amanah



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Kemasyarakatan	Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)				
Jumlah produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan			984.429.600	1.017.425.340	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Wasile Selatan
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			40.000.000	41.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	1	1	40.000.000	41.000.000
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			40.000.000	41.000.000	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	1	1	40.000.000	41.000.000
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			30.000.000	30.750.000	
Terlaksananya koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1	1	30.000.000	30.750.000
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			30.000.000	30.750.000	
Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1	1	30.000.000	30.750.000
Jumlah produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan			984.429.600	1.017.425.340	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Kota Maba
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			55.670.000	57.061.750	
Persentase kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	1	1	55.670.000	57.061.750
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1		
7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			15.210.000	15.590.250	
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta	1	1	15.210.000	15.590.250



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Wilayah Kerja Kecamatan	di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)				
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			40.460.000	41.471.500	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	40.460.000	41.471.500
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			30.180.000	30.934.500	
Persentase kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1	1	30.180.000	30.934.500
	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1	1		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			15.530.000	15.918.250	
Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1	1	15.530.000	15.918.250
7.01.03.2.03.0005 - Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			14.650.000	15.016.250	
Terlaksananya Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1	1	14.650.000	15.016.250
Jumlah produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan			984.429.600	1.017.425.340	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Maba Tengah
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			70.000.000	72.000.000	
Persentase kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	1	1	70.000.000	72.000.000
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1		
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			30.000.000	31.000.000	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	1	1	30.000.000	31.000.000
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			40.000.000	41.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	1	1	40.000.000	41.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Kecamatan	Wilayah Kecamatan (Laporan)				
Jumlah produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan			984.429.600	1.017.425.340	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Maba Utara
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			40.000.000	42.000.000	
Persentase Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	1	1	40.000.000	42.000.000
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			40.000.000	42.000.000	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	1	1	40.000.000	42.000.000
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			50.000.000	52.000.000	
Persentase Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	1	1	50.000.000	52.000.000
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			50.000.000	52.000.000	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	1	1	50.000.000	52.000.000
Jumlah produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan			984.429.600	1.017.425.340	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Wasile Utara
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			109.040.000	111.766.000	
Persentase Realisasi Kinerja	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	1	1	109.040.000	111.766.000
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1		1
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			60.000.000	61.500.000	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1	1	60.000.000	61.500.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
(Lembaga Kemasyarakatan)					
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			49.040.000	50.266.000	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	49.040.000	50.266.000
Jumlah produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan			984.429.600	1.017.425.340	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Wasile Timur
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			95.000.000	100.135.000	
persentase kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	4	4	95.000.000	100.135.000
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			95.000.000	100.135.000	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	4	4	95.000.000	100.135.000
Jumlah produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan			984.429.600	1.017.425.340	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Wasile Tengah
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			40.000.000	41.000.000	
Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	1	1	40.000.000	41.000.000
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			40.000.000	41.000.000	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	1	1	40.000.000	41.000.000
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			30.000.000	30.075.000	
Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	1	1	30.000.000	30.075.000
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas			30.000.000	30.075.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
Lembaga Kemasyarakatan						
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	1	1	30.000.000	1	30.075.000
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			140.000.000		143.500.000	
Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	0	1	140.000.000	1	143.500.000
7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			140.000.000		143.500.000	
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	0	1	140.000.000	1	143.500.000
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			37.530.000		39.066.250	
Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum			37.530.000		39.066.250	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Maba
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			16.000.000		17.000.000	
Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	82	1	16.000.000	1	17.000.000
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			16.000.000		17.000.000	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	82	1	16.000.000	1	17.000.000
Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum			37.530.000		39.066.250	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Kota Maba
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban			21.530.000		22.066.250	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH		
Umum							
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	21.530.000	1	22.066.250	
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				21.530.000		22.066.250	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	21.530.000	1	22.066.250	
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				1.719.790.900		1.750.200.673	
Jumlah produksi urusan pemerintahan umum				1.719.790.900		1.750.200.673	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Maba
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				155.000.000		156.000.000	
Presentasi Penelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	1	1	155.000.000	1	156.000.000	
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				155.000.000		156.000.000	
1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1	1	155.000.000	1	156.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Indonesia (Orang)					
Jumlah produksi urusan pemerintahan umum			1.719.790.900	1.750.200.673	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Wasile
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			162.813.900	166.884.248	
Presentasi Kinerja Kerja	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	1	1	162.813.900	166.884.248
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			162.813.900	166.884.248	
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	1	1	162.813.900	166.884.248
Jumlah produksi urusan pemerintahan umum			1.719.790.900	1.750.200.673	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Maba Selatan
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			150.000.000	152.000.000	
Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	1	1	150.000.000	152.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)				
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			150.000.000	152.000.000	
1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	1	1	150.000.000	152.000.000
Jumlah produksi urusan pemerintahan umum			1.719.790.900	1.750.200.673	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Wasile Selatan
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			180.253.000	184.759.325	
Terlaksananya koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	1	1	180.253.000	184.759.325
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			180.253.000	184.759.325	
1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	1	1	180.253.000	184.759.325



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)				
Jumlah produksi urusan pemerintahan umum			1.719.790.900	1.750.200.673	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Kota Maba
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			152.218.000	156.023.450	
Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	15	15	152.218.000	156.023.450
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1		1	
	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	1	1	1	
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			110.538.000	113.301.450	
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	15	15	110.538.000	113.301.450
7.01.05.2.01.0005 - Penanganan Konflik Sosial			25.730.000	26.373.250	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH		
Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan							
Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	1	1	25.730.000	1	26.373.250	
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				15.950.000		16.348.750	
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1		15.950.000	1	16.348.750	
Jumlah produksi urusan pemerintahan umum				1.719.790.900		1.750.200.673	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Maba Tengah
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				170.000.000		172.000.000	
Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	1	1	170.000.000	1	172.000.000	
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				170.000.000		172.000.000	
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	1	1	170.000.000	1	172.000.000	
Jumlah produksi urusan pemerintahan umum				1.719.790.900		1.750.200.673	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Maba Utara
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan				185.000.000		186.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					
Persentase Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	1	1	185.000.000	186.000.000
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				185.000.000	186.000.000
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	1	1	185.000.000	186.000.000
Jumlah produksi urusan pemerintahan umum				1.719.790.900	1.750.200.673
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				185.253.000	189.884.325
Persentase Realisasi Kinerja	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	8	17	185.253.000	189.884.325
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam				185.253.000	189.884.325

7.01.0.00.0.00.08.0000
- Kecamatan Wasile Utara



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)		PERANGKAT DAERAH
rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun						
1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	8	17	185.253.000	17	189.884.325
Jumlah produksi urusan pemerintahan umum				1.719.790.900	1.750.200.673	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Wasile Timur
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				199.000.000	201.215.000	
Persentase Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	12	17	199.000.000	17	201.215.000
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun				199.000.000	201.215.000	
1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal	12	17	199.000.000	17	201.215.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)				
Jumlah produksi urusan pemerintahan umum			1.719.790.900	1.750.200.673	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Wasile Tengah
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			180.253.000	185.434.325	
Persentase Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	8	17	180.253.000	17 185.434.325
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			180.253.000	185.434.325	
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	8	17	180.253.000	17 185.434.325
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			56.605.000	57.920.125	
Meningkatnya efektivitas pembinaan dan pengawasan kecamatan terhadap tata kelola pemerintahan desa			56.605.000	57.920.125	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Maba
7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi			24.000.000	24.500.000	
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)		PERANGKAT DAERAH
Persentase Pelaksanaan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	82	1	24.000.000	1	24.500.000	
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa				24.000.000		24.500.000	
Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	82	1	24.000.000	1	24.500.000	
Meningkatnya efektivitas pembinaan dan pengawasan kecamatan terhadap tata kelola pemerintahan desa				56.605.000		57.920.125	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Kota Maba
7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi				32.605.000		33.420.125	
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
Persentase Pelaksanaan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	1	1	32.605.000	1	33.420.125	
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	1	1		1		
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa				16.873.000		17.294.825	
Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	1	1	16.873.000	1	17.294.825	
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				15.732.000		16.125.300	
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	1	1	15.732.000	1	16.125.300	
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				4.805.078.680		4.925.205.647	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.705.078.680		2.676.455.647	
Tingkat Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Perangkat Daerah (persen)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Skor)	60	65	2.705.078.680	65	2.676.455.647	8.01.0.00.0.00.02.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.000.000		5.000.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	
8.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen				5.000.000		5.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
Perencanaan Perangkat Daerah						
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	5.000.000	1	5.000.000
8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.855.078.680		1.901.455.747
Tersedianya Dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	23	28	1.855.078.680	28	1.901.455.747
8.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.855.078.680		1.901.455.747
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	23	28	1.855.078.680	28	1.901.455.747
8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				135.000.000		135.000.000
Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	3	135.000.000	3	135.000.000
8.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				135.000.000		135.000.000
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	3	135.000.000	3	135.000.000
8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				415.000.000		439.999.900
Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	415.000.000	1	439.999.900
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1	
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1	
8.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		10.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	15.000.000	1	10.000.000
8.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000		5.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	5.000.000	1	5.000.000
8.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				25.000.000		20.000.000
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	25.000.000	1	20.000.000
8.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.000.000		29.999.900
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	35.000.000	1	29.999.900
8.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				35.000.000		25.000.000
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	35.000.000	1	25.000.000
8.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				50.000.000		50.000.000
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	50.000.000	12	50.000.000
8.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250.000.000		300.000.000
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	250.000.000	12	300.000.000
8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				200.000.000		100.000.000
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8	10	200.000.000		100.000.000
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2		2	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1		1	
8.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				50.000.000		50.000.000
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1	50.000.000	1	50.000.000
8.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000		0
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8	10	100.000.000		0
8.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2	50.000.000	2	50.000.000
8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				60.000.000		60.000.000
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	1	1	60.000.000	1	60.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
	Disediakan (Laporan)				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	12	12	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1	
8.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.000.000	5.000.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	5.000.000	1
8.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			15.000.000	15.000.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	15.000.000	1
8.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			40.000.000	40.000.000	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	12	40.000.000	12
8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			35.000.000	35.000.000	
Terpeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1	35.000.000	1
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	10		10
8.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			10.000.000	10.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	10	10.000.000	10
8.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			25.000.000	25.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1	25.000.000	1
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			1.400.000.000	1.420.000.000	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	70	75	1.400.000.000	76
8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			1.400.000.000	1.420.000.000	
Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan	784	760	1.400.000.000	760

8.01.0.00.0.00.02.0000
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)				
	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)	75	75	75	
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	500	500	500	
	Jumlah Paskibraka (Orang)	70	70	70	
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	1	1	1	
	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	1	1	1	
	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	1	1	1	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	5	5	5	
	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	1	1	1	
8.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			150.000.000	150.000.000	
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	784	760	150.000.000	150.000.000
8.01.02.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			25.000.000	25.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH	
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	5	5	25.000.000	5	25.000.000
8.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				10.000.000		10.000.000
Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	1	1	10.000.000	1	10.000.000
8.01.02.2.01.0006 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				100.000.000		100.000.000
Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	500	500	100.000.000	500	100.000.000
8.01.02.2.01.0007 - Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka				10.000.000		10.000.000
Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	10.000.000
8.01.02.2.01.0008 - Pembentukan Paskibraka				1.000.000.000		1.020.000.000
Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka (Orang)	70	70	1.000.000.000	70	1.020.000.000
8.01.02.2.01.0009 - Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				10.000.000		10.000.000
Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	10.000.000
8.01.02.2.01.0010 - Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila				30.000.000		30.000.000
Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	1	1	30.000.000	1	30.000.000
8.01.02.2.01.0011 - Pengangkatan				65.000.000		65.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH		
Purnapaskibraka Duta Pancasila							
Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)	75	75	65.000.000	75	65.000.000	
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				100.000.000		178.750.000	
Meningkatnya etika dan budaya politik warga	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	80	80,7	100.000.000	81	178.750.000	8.01.0.00.0.00.02.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				100.000.000		178.750.000	
Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	1	1	100.000.000	1	178.750.000	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	5	5		5		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	5	5		5		
8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan				25.000.000		25.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)		PERANGKAT DAERAH
Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	5	5	25.000.000	5	25.000.000	
8.01.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				25.000.000		25.000.000	
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	5	5	25.000.000	5	25.000.000	
8.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				50.000.000		128.750.000	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	1	1	50.000.000	1	128.750.000	
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				200.000.000		250.000.000	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	50	70	200.000.000	75	250.000.000	8.01.0.00.0.00.02.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis				200.000.000		250.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)		PERANGKAT DAERAH
dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan							
Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemsyarakatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	5	5	200.000.000	5	250.000.000	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	10	10		10		
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	1	1		1		
8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah							
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	10	10	50.000.000	10	100.000.000	
8.01.04.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah							
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	5	5	50.000.000	5	50.000.000	
8.01.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah							
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi	1	1	100.000.000	1	100.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH		
Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)						
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			200.000.000	200.000.000			
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	10	50	200.000.000	55	200.000.000	8.01.0.00.0.00.02.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			200.000.000	200.000.000			
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	5	5	200.000.000	5	200.000.000	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	5	15		15		
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	1	1		1		
8.01.05.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			75.000.000	75.000.000			
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	5	15	75.000.000	15	75.000.000	
8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya			25.000.000	25.000.000			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH		
dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah							
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	5	5	25.000.000	5	25.000.000	
8.01.05.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah							
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	80	94	200.000.000	94	200.000.000	8.01.0.00.0.00.02.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial							
Tersedianyan Rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	5	5	200.000.000	5	200.000.000	
Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di							
		1	1		1		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH	
	Daerah (Laporan)					
	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	10	15	15		
8.01.06.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			75.000.000	75.000.000		
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	10	15	75.000.000	15	75.000.000
8.01.06.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			25.000.000	25.000.000		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	5	5	25.000.000	5	25.000.000
8.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			100.000.000	100.000.000		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini,	1	1	100.000.000	1	100.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TARGET (PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027)	PERANGKAT DAERAH
Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)				

BAB 6

KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH

2026

RKPD

BAB 6

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

6.1. INDIKATOR KINERJA

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dari sisi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025-2029. Dalam hal ini, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Timur dalam bentuk kinerja nyata dari seluruh perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten.

Sebagai daerah otonom, Kabupaten Halmahera Timur tidak terlepas dan kewajiban untuk menetapkan target-target capaian dari indikator-indikator yang disepakati bersama antara pemerintah Kabupaten dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten. Target pencapaian ini adalah sebuah kunci kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik. Penetapan indikator kinerja RKPD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2026 bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan daerah, khususnya dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah dengan mempedomani RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025-2029.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau komposisinya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator kinerja ditetapkan dengan mempertimbangkan indikator yang khusus, terukur, dapat dicapai, rasional, dan memperhitungkan waktu pencapaian dengan tetap bersumber pada aspek, fokus dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah.

**6.2. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA**

Memperhatikan sasaran-sasaran pokok pembangunan pada RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025-2029, maka target capaian kinerja pembangunan daerah, baik indikator kinerja makro maupun indikator kinerja kunci (IKK) yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Timur untuk tahun 2026, sebagaimana tersaji pada tabel 6.1 dan 6.2.

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Makro RKPD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi			Target
		2022	2023	2024	2026
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	1.18	26.56	3,64	7.80
2	Pendapatan per Kapita (Rp. Juta)	44.19	54,33	54,93	58.44
3	Indeks Rasio Gini	0.247	0.297	0,297	0.294
4	Persentase Penduduk Miskin	13.14	12.47	11,91	11,82
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	5.20	4.66	4,32	4.30
6	Indeks Pembangunan Manusia	67.93	68.82	69,58	69.94
7	Indeks Pembangunan Gender	82.13	82.62	82,73	0.597

Sumber : RPJMD Halmahera Timur 2025-2029

Tabel 6.2. Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan RKPD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi			Target
		2022	2023	2024	2026
1	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	1.18	26.56	3,64	7.80
2	Pendapatan per Kapita (Rp. Juta)	44.19	54,33	54,93	58.44
3	Indeks Rasio Gini	0.247	0.297	0,297	0.294
4	Persentase Penduduk Miskin	13.14	12.47	11,91	11,82
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	5.20	4.66	4,32	4.30
6	Indeks Pembangunan Manusia	67.93	68.82	69,58	69.94
7	Indeks Pembangunan Gender	82.13	82.62	82,73	0.597
B ASPEK PELAYANAN UMUM					
B.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
1 Pendidikan					
1.1	Rata-rata lama sekolah (tahun)	8.52	8.66	8.88	8.99
1.2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12.86	12,87	12,89	12.94
1.3	Proporsi Siswa SD mencapai kompetensi minimum dalam Literasi Membaca (persen)	36,86	40,16	35,48	39.12
1.4	Proporsi Siswa SD mencapai kompetensi minimum dalam Numerasi (persen)	23.86	40.16	35.48	52.21
1.5	Proporsi Siswa SMP mencapai kompetensi minimum dalam Literasi Membaca (persen)	18.14	19.01	37.16	40.97



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi			Target
		2022	2023	2024	2026
1.6	Proporsi Siswa SMP mencapai kompetensi minimum dalam Numerasi (persen)	18.3	16.21	48,44	53.41
2	Kesehatan				
2.1	Usia Harapan Hidup (tahun)	71.03	71.36	71.70	71.76
2.2	Indeks Keluarga Sehat	0.114	0.122	0.125	0.138
2.3	Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	335	327	130	127
2.4	Angka Kematian Neonatal (per 1000 KH)	14	9	9	9
2.5	Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)	6	5	6	6
2.6	Persentase persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan	81.19	78.33	75.75	79.59
2.7	Persentase persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan	84.05	80.14	76.13	79.98
2.8	Prevalensi Stunting pada Balita (persen)	16.57	16.09	11.34	18.5
2.9	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap pada Anak Usia 12-23 Bulan (persen)	78.5	n/a	n/a	82.47
2.10	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	122	96	135	110
2.11	Angka Penemuan dan Pengobatan TBC (persen)	27.8	29.1	41.0	43.08
2.12	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (persen)	85.3	83.1	83.0	87.2
2.13	Prevalensi HIV/AIDS (persen)	0.004	0.026	0.029	0.023
2.14	Angka Kesakitan Malaria (per 1000 penduduk)	0.11	0.14	0.19	0.11
2.15	Insidensi DBD (per 100.000 penduduk)	50	162	46	37
2.16	Prevalensi Kusta (per 10.000 penduduk)	31	27	31	25
2.17	Rasio dokter per satuan penduduk (per 2500 penduduk)	0.73	0.69	0.72	0.83
2.18	Rasio dokter spesialis per satuan penduduk (per 2500 penduduk)	-	-	-	0.59
2.19	Persentase Puskesmas Terakreditasi	100	100	100	100
2.20	Persentase Puskesmas tersedia 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	n/a	n/a	n/a	75
2.21	Rasio daya tampung Rumah Sakit (per 1000 penduduk)	0.52	0.78	0.76	0.87
2.22	Status Akreditasi RSUD	Madya	Utama	Utama	Paripurna
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
3.1	Rasio panjang jaringan irigasi terbangun per luasan daerah irigasi (km/km ²)	1.26	1.26	1.26	1.29
3.2	Persentase Rumah Tangga memiliki akses pada sumber air minum layak (persen)	65.99	66.47	71.17	74.77
3.3	Persentase Rumah Tangga memiliki akses pada sanitasi layak (persen)	79.79	81.64	82.26	86.42
3.4	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	n/a	n/a	n/a	57.36
3.5	Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (persen)	65.13	66.64	59.29	60.48
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman				
4.1	Rasio Rumah Tinggal Layak Huni (persen)	84.85	84.89	84.79	86.49



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi			Target
		2022	2023	2024	2026
4.2	Rasio luasan kawasan kumuh Perkotaan yang telah ditangani (persen)	6.37	7.81	8.18	8.6
5	Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat				
5.1	Persentase Perda yang yang memuat sanksi yang telah ditegakkan	80.0	50.0	50.0	100
5.2	Persentase Desa yang terjangkau Patroli Satpol-PP	-	-	5.88	7.12
5.3	Persentase Desa yang memiliki satuan Linmas Aktif	-	-	8.82	10.68
5.4	Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Aktif	-	-	3.06	3.7
5.5	Persentase Kejadian Kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang ditangani	50	-	81.8	85.96
5.6	Persentase Kejadian Bencana Ditangani (direspons dengan aktivasi tanggap darurat sesuai SOP)	100	100	100	100
5.7	Rata-rata Waktu Respon Aktivasi Tanggap Darurat (Jam)	< 6	< 6	< 6	< 6
5.8	Indeks Risiko Bencana Kabupaten	173.2	173.2	173.2	172.78
6	Sosial				
6.1	Cakupan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Pangan (persen)	95.99	96.67	98.19	100
B.2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar				
1	Tenaga Kerja				
1.1	Produktifitas per tenaga kerja daerah (Rp. Juta)	89.41	111.32	114.20	119.98
1.2	Persentase pekerja/buruh yang terlindungi dalam program Jamsostek	-	45.87	38.84	39.62
2	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak				
2.1	Indeks Pemberdayaan Gender	50.2	50.05	50.49	53.05
2.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (persen)	46.81	52.98	50.93	51.27
2.3	Indeks Perlindungan Anak	-	58.81	61.11	64.2
2.4	Indeks Pemenuhan Hak Anak	-	53.2	55.83	58.66
2.5	Indeks Perlindungan Khusus Anak	-	77.94	80.41	84.48
3	Pangan				
3.1	Indeks Ketahanan Pangan	72.38	76.12	79.63	81.23
3.2	Skor Pola Pangan Harapan	72.1	68.3	78.5	80.08
3.3	Persentase Desa kategori rentan rawan pangan	51	4.9	20.6	13.2
3.4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	100	100	100	100
4	Pertanahan				
4.1	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat melalui Mediasi	50	66.7	100	100
4.2	Persentase luas tanah milik Pemda yang telah dimanfaatkan untuk pembangunan	100	100	99.1	99.3
5	Lingkungan Hidup				
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	82.7	83.07	83.62	83.7
5.2	Indeks Kualitas Udara	93.57	92.97	96.31	96.33



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi			Target
		2022	2023	2024	2026
5.3	Indeks Kualitas Air	62.38	64.29	62.00	65.14
5.4	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang izin PPLH dan PUU LH yang Taat	27.71	28.92	24.10	26.57
5.5	Persentase objek pencemaran/ kerusakan lingkungan hidup yang dilaporkan dan sudah ditangani	100	100	100	100
5.6	Luas RTH publik yang telah terbangun (Ha, kumulatif)	46.77	46.77	46.77	46.86
5.7	Persentase volume timbulan sampah perkotaan yang sudah ditangani	73	72	70	72.3
6	Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil				
6.1	Persentase Penduduk wajib KTP yang sudah ber-KTP	100	n/a	n/a	100
6.2	Persentasi anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari memiliki KIA	5	n/a	n/a	100
6.3	Persentase anak usia 0-18 tahun memiliki Akta Kelahiran	68.3	n/a	n/a	100
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
7.1	Persentase Desa Kategori IDM Mandiri	-	-		2
7.2	Persentase Desa Kategori IDM Maju	4.77	6.17	90	9.4
7.3	Persentase Desa Kategori IDM Tertinggal/Sangat Tertinggal	56.82	38.67	20.5	16.6
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
8.1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	55.64	61.59	63.4	63.76
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	2.73	2.67	2.45	2.45
8.3	Angka kelahiran remaja perempuan usia 15-19 per 1.000 perempuan usia 15-19 (ASFR 15-19)	48.7	40.7	37.3	36.6
8.4	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive/mCPR)	53.7	39	45.3	49.9
8.5	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang mau ber-KB tapi tidak terlayani (unmeet need)	17.45	15.41	18.4	16.6
9	Perhubungan				
9.1	Rasio konektifitas kabupaten (persen)	91.2	91.2	91.2	93.3
9.2	Rasio konektivitas darat (persen)	82.4	82.4	82.4	86.5
9.3	Rasio konektivitas laut (persen)	100	100	100	100
10	Komunikasi dan Informatika, Persandian				
10.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	-	1.01	1.38	2.5
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
11.1	Persentase Koperasi Aktif	60.8	62.02	62.31	65.46
11.2	Pertumbuhan jumlah UMKM (persen)	3.42	2.62		2.5
11.3	Rasio Wirausaha Mapan (persen)	-	-		2.43
12	Penanaman Modal				
12.2	Nilai realisasi investasi PMA & PMDN (Rp. Milyar)	24.23	54.14	1.38	247.5
13	Kepemudaan dan Olahraga				
13.1	Tingkat partisipasi pemuda (usia 16-30 tahun) dalam kegiatan ekonomi (persen)	81.9	83.25	84.6	88.9
13.2	Jumlah atlet pelajar/dewasa berprestasi	n/a	n/a	n/a	4



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi			Target
		2022	2023	2024	2026
	dalam multi/single event olahraga tingkat Provinsi/ Nasional (PON/PORDA/ POPNAS/POPDA/Kejurnas/Kejurda)				
14	Statistik				
14.1	Persentase OPD telah menetapkan Focal Point Statistik Sektor secara resmi	-	-	12.8	20
15	Persandian				
15.1	Persentase OPD yang telah menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi	-	-	89.1	90.9
16	Kebudayaan				
16.1	Persentase warisan budaya tak benda terinventarisasi yang telah diverifikasi/validasi	-	-	11	12.1
16.2	Persentase warisan budaya tak benda terverifikasi/validasi yang telah ditetapkan	-	-	75	75.5
17	Perpustakaan				
17.1	Angka Melek Huruf (persen)	98.45	97.97	98.67	98.87
17.2	Tingkat Kegemaran Membaca (persen)	-	-	57.56	60.47
17.3	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	-	25.24	29.17
18	Kearsipan				
18.1	Nilai hasil pengawasan kearsipan pemerintah daerah (ANRI)	0,0 (Tidak Ada Opini)	0,0 (Tidak Ada Opini)	0,0 (Tidak Ada Opini)	Cukup
B.3	Urusan Pilihan				
1	Kelautan dan Perikanan				
1.1	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	27,504	23,929	23,929	24,410.10
1.2	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1029	1,475.70	1,475.70	1,505.40
1.3	Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	n/a	n/a	n/a	46.7
2	Pariwisata				
2.1	Kontribusi PDRB sektor pariwisata (persen)	0.17	0.14	0.14	0.16
2.2	Kunjungan Wisatawan Mancanegara (orang)	-	36	49	83
2.3	Kunjungan Wisatawan Nusantara (orang)	37,167	42,936	49,299	50,290
3	Pertanian				
3.1	Produksi tanaman pangan (ton)	11,749	11,607.50	8,868.00	9,046.20
3.2	Produksi tanaman hortikultura (ton)	3,591.00	2,805.00	2,456.50	2,505.90
3.3	Produksi tanaman perkebunan (ton)	11,375	11,378	11,377.70	11,606.40
3.4	Produksi daging ternak (ton)	210	183	159.62	162.8
5	Kehutanan				
5.1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	97.5	97.04	97.28	97.3
6	Energi dan Sumber Daya Mineral				
6.1	Persentase rumah tangga menggunakan listrik	97.36	99.09	100	100
7	Perdagangan				
7.1	Kontribusi PDRB sektor perdagangan (persen)	2.76	2.38	2.51	11.43
7.2	Kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa (%PDRB)	-2.78	-4	-14.46	-11.88
8	Perindustrian				
8.1	Kontribusi PDRB sektor industri	2.76	2.38	2.51	2.88



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi			Target
		2022	2023	2024	2026
	pengolahan (persen)				
9	Transmigrasi				
9.1	Indeks perkembangan kawasan transmigrasi	n/a	n/a	n/a	43.15
B.4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				
1	Sekretariat Daerah				
1.1	Indeks Reformasi Birokrasi	C	C	CC	62.2
1.2	Nilai/Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemda	50.6	51.44	53.57	62.2
1.3	Indeks Pelayanan Publik	3.29	2.12	2.92	2.99
1.4	Indeks Tata Kelola Pengadaan Pemda	24.5	28.68	64.78	66.08
1.5	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.07	82.05	82.81	84.47
2	Sekretariat DPRD				
2.1	Persentase Ranperda dalam Prolegda yang disetujui menjadi Perda	n/a	n/a	n/a	100
B.5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				
1	Perencanaan / Penelitian dan Pengembangan				
1.1	Indeks Inovasi Daerah	49.52	45.43	54.04	56.78
2	Keuangan				
2.1	Predikat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah (persen)	5.51	3.63	3.17	3.84
2.3	Rasio kemandirian keuangan daerah (persen)	5.83	3.78	3.31	4.01
2.4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	n/a	n/a	10.27	10
3	Kepegawaian & Diklat				
3.1	Persentase PNS yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi (S1/S2/S3)	57.3	59.5	59.1	62.05
3.2	Indeks Profesionalitas ASN	-	26.48	26.48	32.04
3.3	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	-	8.08	8.08	12.63
B.6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan				
1	Pengawasan				
1.1	Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (SPIP)	2	2	2	2
1.2	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2	2	2	2
B.7	Unsur Kewilayahan				
1	Kecamatan				
1.1	Indeks Perkembangan Wilayah Kecamatan Kota Maba	67.17	67.16	69.1	70.49
1.2	Indeks Perkembangan Wilayah Kecamatan Maba	60.93	63.91	64.62	65.92
1.3	Indeks Perkembangan Wilayah Kecamatan Maba Selatan	57.47	59.26	65.63	66.95
1.4	Indeks Perkembangan Wilayah Kecamatan Maba Tengah	62.28	63.64	63.55	64.83
1.5	Indeks Perkembangan Wilayah Kecamatan	56.23	56.66	57.04	58.19



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi			Target
		2022	2023	2024	2026
	Maba Utara				
1.6	Indeks Perkembangan Wilayah Kecamatan Wasile	64.45	65.08	66.22	67.55
1.7	Indeks Perkembangan Wilayah Kecamatan Wasile Selatan	59.32	60.47	62.78	64.04
1.8	Indeks Perkembangan Wilayah Kecamatan Wasile Tengah	59.64	59.94	60.01	61.22
1.9	Indeks Perkembangan Wilayah Kecamatan Wasile Timur	63.09	65.68	65.06	66.37
1.10	Indeks Perkembangan Wilayah Kecamatan Wasile Utara	52.94	53.11	53.11	54.72
B.8	Unsur Pemerintahan Umum				
1	Kesatuan Bangsa dan Politik				
1.1	Persentase desa bebas kerawanan konflik sosial	85.3	75.5	75.5	77.01
1.2	Persentase Aksi Unjuk Rasa Damai	100	100	100	100
C	ASPEK DAYA SAING				
1	Proporsi pengeluaran konsumsi rumah Tangga non Pangan per Kapita (persen)	45.73	46.73	-	-
2	Indeks daya beli penduduk (dimensi hidup layak IPM)	64.2	64.84	-	
3	Indeks Perkembangan Wilayah	59.99	60.59	-	69.79
4	Persentase Penduduk Menggunakan Telepon Seluler	81.06	81.87	-	-
5	Persentase Penduduk Mengakses Internet	53.26	53.79	-	-
6	Rasio penduduk usia >15 tahun lulusan S1/S2/S3 (persen)	8.94	9.43	-	-

Sumber : RPJMD Halmahera Timur 2025-2029

BAB 7

PENUTUP

2026

RKPD



BAB 7

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Timur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) serta sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2025.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun keempat dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025-2029. Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2026 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan agar bisa berjalan dengan baik.

Salah satu bagian penting dari penyusunan rencana pembangunan daerah adalah prioritas pembangunan, yang dalam pelaksanaannya disusun sasaran, indikator dan target pembangunan dan dalam mencapai target pembangunan disusun strategi dan kebijakan pembangunan. Dalam pelaksanaannya kebijakan pembangunan dilakukan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang menjadi acuan pelaksanaan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur. Dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Tahun 2026 terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan :



1. Sinergi dan konsistensi perencanaan antara Pemerintah Desa, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat harus sejalan, sehingga percepatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat Halmahera Timur dapat tercapai;
2. Proses antara perencanaan, penganggaran dan pembangunan harus terpadu sehingga target pembangunan yang dituju dapat dicapai;
3. Penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 mempedomani Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2026;
4. RKPD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS, serta Rancangan APBD Tahun 2026;
5. Pelaksanaan pekerjaan dan penyerapan anggaran berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan serta didukung oleh pengendalian dan evaluasi yang cermat dan akurat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2026, dalam mewujudkan Daerah **“HALMAHERA TIMUR BERBENAH (Berani, Bersih, Amanah) MENUJU TRANSFORMASI KEMAJUAN ”** sebagai visi RJPMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025-2029.

**BUPATI HALMAHERA TIMUR****DRS. H. UBAID YAKUB., MPA**



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HALIMAHE TIMUR
TAHUN 2025**

**RKPD
2026**